Edisi Pemutakhiran

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Zaman Kuno

Tim Nasional Penulisan
Sejarah Indonesia

Balai Pustaka

II

Sejarah Nasional Indonesia

II

Zaman Kuno

Edisi Pemutakhiran

Sejarah Nasional Indonesia

II

Zaman Kuno

Editor Umum

Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

Editor Umum Pemutakhiran

R.P. Soejono
R.Z. Leirissa

Balai Pustaka

PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan
BALAI PUSTAKA

BP No. 2703

Edisi Pemutakhiran
Cetakan pertama – 2008
Cetakan Ketujuh – Juli 2019
130719

959.8
Poe Poesponegoro, Marwati Djoened
s Sejarah Nasional Indonesia II/Marwati Djoened
Poesponegoro: Nugroho. –cet.7. – Edisi Pemutakhiran –Jakarta:
Balai Pustaka, 2019
xxxix, 536, hlm.: ilus.; bibl.; indeks 23 cm. – (Seri BP no. 2703).
1. Sejarah Indonesia. I. Notosusanto, Nugroho. II. Judul
III. Seri
ISBN 979–407–408–X

Penyelaras Bahasa : Huri Yani
Desain Isi : Amirullah
Desain Sampul : Dion
Sumber Foto : Endang Sri Hardiati

Kata Pengantar
Edisi Pemutakhiran

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975, buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia.

Keunikan dari SNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/-wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku SNI, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Terima kasih.

Balai Pustaka

Kata Pengantar
Edisi ke-4

Sejarah nasional menggambarkan pertumbuhan kita sebagai suatu bangsa. Sejak zaman purba dengan tanda-tanda pertama akan akar-akar kehidupan bangsa, kemudian melalui perkembangan suku-suku tiap daerah, kita telah tumbuh menjadi kesatuan bangsa dengan tanggapan dan sikap hidup nasional yang khas.

Perkembangan nasional mengingatkan kita kepada pertumbuhan pohon dengan pokok kesatuan yang makin kukuh dan besar. Kata sejarah yang berasal dari bahasa Arab berarti 'pohon'.

Sudah cukup banyak ditulis tentang sejarah nasional kita, baik oleh ahli sejarah bangsa kita maupun oleh orang-orang asing, masing-masing mengenakan pandangan dan tafsirannya terhadap pertumbuhan bangsa kita. Di tengah pelbagai uraian itu diperlukan karangan sejarah babon, yang dapat menjadi dasar dan rujukan penulisan sejarah nasional. Buku ini mengandung sejarah nasional Indonesia yang baku, yang ditulis dan disunting oleh ahli-ahli sejarah bangsa kita.

Balai Pustaka sebagai Penerbit Pemerintah merasa bangga dapat menerbitkan keenam jilid Sejarah Nasional Indonesia edisi ke-4 cetakan ke-8 ini.

Balai Pustaka

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kita semua mengetahui bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia sampai sekarang masih menggunakan bahan-bahan dan versi asing. Karena itu sudah lama dirasakan bahwa penulisan buku Sejarah Indonesia perlu ditangani oleh sejarawan Indonesia yang mempunyai keahlian dalam bidang itu. Usaha-usaha ke arah penyusunan buku Sejarah Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1950, tetapi mengalami pelbagai kesulitan dan hambatan sehingga baru sekarang dapat disusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia.

Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan "babon" sejarah Indonesia, yang disusun oleh sejarawan Indonesia, berdasarkan penelitian ilmiah dan orientasi nasional. Tim sejarawan Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah bekerja dengan penuh ketekunan dan dedikasi. Hasil pekerjaannya sangat berguna bagi dunia pendidikan pada khususnya dan bagi pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mempergunakan fakta-fakta ilmiah yang objektif, dan orientasi yang sesuai dengan kepentingan nasional. Karena itu, kita sekarang tidak lagi menggunakan bahan-bahan dan versi asing dalam Sejarah Indonesia.

Selain Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia, telah pula disusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang terdiri atas tiga jilid, dan untuk tahun 1976 telah direncanakan untuk menyusun buku Sejarah Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Penulisan buku Sejarah Indonesia bukan merupakan tugas yang mudah, apalagi jika diselesaikan dalam waktu yang relatif pendek.

Karena itu, usaha-usaha penulisan Sejarah Indonesia yang telah dilakukan itu perlu kita sempurnakan dan kembangkan terus sehingga anak didik dan masyarakat Indonesia akan dapat memetik manfaatnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Maret 1975
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sjarif Thayeb

Prakata Editor Umum

Edisi Pemutakhiran

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) mungkin telah dianggap sebagai dokumen historis dan telah dimakan waktu sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 1975 dengan pelanjutannya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru). Tiga puluh tiga tahun dan/atau 25 tahun perjalanan sebuah buku sejarah tentu memerlukan pemutakhiran baik secara materi, teori, dan konsep, maupun secara perbukuan dan pembahasaan. Jika sebagian penulis (SNI) pada awalnya berumur 40 tahun, sekarang sebagian dari mereka telah berumur 75 tahun atau telah meninggal.

Dalam perjalanan waktu ini, buku SNI telah menjadi sumber penulisan sejarah yang beredar dan menjadi rujukan para cendekia dari luar dan dalam negeri. Selain itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan sebuah sumber sejarah yang terpercaya didasarkan pada keterpercayaan kepada para penulis yang memang pakar dalam bidang sejarah dan bobot kepakaran mereka menjadi jaminan keakuratan sejarah nasional Indonesia. Kelangkaan buku sejarah yang menjadi sumber rujukan masyarakat, khususnya para pelajar/siswa dan mahasiswa, mendorong para pakar yang terlibat dalam penulisan SNI berkumpul kembali (tentu yang masih hidup) untuk memutakhirkan buku SNI dari segi materi, teori, dan konsep, selain editorial yang menarik dan bertanggung jawab. Lahirlah SNI Edisi Pemutakhiran ini.

Edisi Pemutakhiran ini tetap mempertahankan SNI dalam enam jilid seperti edisi awal dengan beberapa perubahan susunan subbab dan pengaturan kembali urutan subbab serta perbaikan redaksional pada setiap jilid. Pemutakhiran ini telah berlangsung satu setengah tahun di tengah kesibukan para penulis baik yang lama maupun yang baru.

Bagaimanapun juga yang tetap dijaga dalam edisi pemutakhiran ini ialah ditulis oleh pakar Indonesia dengan pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya. Pandangan Prof. Dr. Sartono Kartodirejo tetap relevan dan aktual seperti dalam "Prakata Editor Umum" Edisi I yang tetap dimuat dalam Edisi Pemutakhiran ini.

Dalam Edisi Pemutakhiran ini setiap jilid SNI mendapatkan pula prakata sebagai pertanggungjawaban para penulis jilid SNI. Ada prakata yang pendek dan ada prakata yang panjang yang semuanya menjadi pintu masuk setiap jilid.

Akhirulkalam para penulis mengucapkan terima kasih kepada PT Balai Pustaka (Persero) sebagai penanggung jawab penerbitan, kepada mereka yang membantu memberikan dana kegiatan penulisan dan penerbitan, dan kepada para Konsultan PT Balai Pustaka (Persero) yang tetap pada usaha dan dorongan untuk penerbitan dan pemutakhiran SNI ini. Inilah jasa dan sumbangsih kita bangsa Indonesia dalam bentuk penulisan buku SNI.

Semoga buku ini berguna bagi para anak bangsa sekarang dan pada masa yang akan datang.

Semoga Tuhan memberkati kita semua yang terlibat.

Terima kasih.

Akhir 2007

R.P. Soejono
R.Z. Leirissa

Kata Pengantar Editor Umum
untuk Edisi 1984

Sejak buku Sejarah Nasional Indonesia ini terbit untuk pertama kali pada tahun 1975 dan selanjutnya pada tahun 1977 (sampul hijau) dan pada tahun 1981–1983 (sampul biru), kehadirannya sudah mantap dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dalam sebutan masyarakat mendapat nama-julukan "Buku Standar".

Memang hingga kini buku ini masih unik karena merupakan buku sejarah Indonesia pertama yang substansial hasil karya orang Indonesia. Dengan segala kekurangannya, buku ini dapat menyampaikan suatu view from within, pandangan orang Indonesia sendiri mengenai kisah bangsanya.

Para pengarang sendiri merasa bahwa buku ini sudah perlu diterbitkan dalam suatu edisi revisi, yang telah disesuaikan dengan hasil penelitian mutakhir. Namun, usaha semacam itu memerlukan waktu yang lebih lama dan koordinasi yang tidak mudah. Oleh karena itu, telah diputuskan untuk menerbitkan edisi ini yang telah mulai mengalami perbaikan-perbaikan, tetapi belum sepenuhnya. Selanjutnya, usaha melakukan revisi besar akan diusahakan terus.

Hal itu adalah semata-mata karena edisi-edisi sebelumnya telah lama habis. Padahal permintaan masyarakat sudah sangat mendesak karena sementara ini telah timbul satu generasi baru cendekiawan yang belum sempat memiliki buku standar Sejarah Nasional Indonesia. Generasi baru itu meliputi pula sejumlah besar guru sejarah pada SD, SMTP, dan SMTA yang perlu memantapkan pemahamannya terhadap sejarah nasional Indonesia untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan memadai.

Diharapkan pula agar supaya masyarakat luas dapat menggunakan edisi ini untuk mengerti masa kini bangsa dan negaranya melalui pemahaman masa lampaunya. Dengan demikian, mudah-mudahan dapat dilaksanakan pembangunan masa depannya yang cemerlang.

11 Agustus 1984 — Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

Prakata Editor Umum

Edisi ke-1

Setelah bangsa Indonesia berhasil memerdekakan dirinya terasa di kalangan cendekiawan suatu keperluan untuk menulis kembali sejarah Indonesia, tidak lain karena penulisan-penulisan sejarah yang diwariskan oleh sejarawan Belanda sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia dewasa ini. Sudut penglihatan yang tercermin dalam karya-karya mereka terutama memusatkan perhatian kepada peranan bangsanya, neerlando-sentrisme semacam itu perlu diganti dengan Indonesia-sentrisme, yaitu pandangan dari sudut penglihatan yang berpusat pada Indonesia sendiri. Pemikiran sekitar pandangan baru ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli pikir sebagai salah satu usaha untuk mengarahkan usaha pemikiran serta penulisan sejarah Indonesia yang lebih memadai.

Untuk melaksanakan gagasan tentang penulisan kembali sejarah Indonesia, pada tahun 1951 telah dibentuk suatu Panitia Sejarah Nasional yang bertugas menyusun kitab sejarah nasional Indonesia dengan dasar luas dan jiwa nasional bersendi pada ilmu pengetahuan dipandang dari sudut politik, sosial ekonomi dan kebudayaan mulai dari zaman purba sampai sekarang. Keadaan dewasa itu rupanya belum memungkinkan Panitia itu untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Sebagai langkah yang sangat penting dapat disebut penyelenggaraan Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Selain untuk memperdalam pemikiran tentang Sejarah Indonesia sebagai sejarah nasional, diperbincangkan pula keperluan yang sangat mendesak, yaitu penulisan buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah. Kenyataannya adalah bahwa buku-buku sekolah yang dipakai, kalau bukan terjemahan atau saduran dari buku-buku sejarah karangan sejarawan Belanda, belum mewujudkan sejarah nasional dalam arti yang sebenarnya. Meskipun hasil seminar tidak memenuhi harapan para peserta, tetapi tidak sedikit manfaatnya untuk memperdalam kesadaran akan peranan sejarah nasional sebagai sarana penting untuk pendidikan warga negara Indonesia, terutama untuk menimbulkan kesadaran nasionalnya dengan mengenal identitas bangsanya melalui sejarahnya.

Sekitar tahun 1963 telah dibentuk panitia untuk melaksanakan penulisan kembali sejarah Indonesia, tetapi tahun-tahun berikutnya, yang penuh ketegangan sosial dan krisis politik, tidak memberi kesempatan kepada panitia untuk menghasilkan karya.

Suatu titik terang dalam perkembangan studi sejarah di Indonesia adalah Seminar Sejarah Nasional kedua yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Agustus 1970, yaitu suatu generasi baru sejarawan memajukan kertas kerjanya dalam jumlah yang cukup besar. Pokok-pokok kertas kerja itu mencakup periode prasejarah sampai dengan periode yang paling modern. Hal ini dapat dianggap suatu langkah yang cukup maju jika dibandingkan dengan seminar yang pertama, tambahan pula dapat dipandang sebagai suatu tanda bahwa sudah ada kemungkinan yang lebih besar untuk meneruskan usaha penulisan sejarah nasional. Jumlah tenaga kerja, meskipun kebanyakan belum banyak pengalaman dalam penulisan, telah memadai untuk membentuk kelompok yang akan bertugas melaksanakan usaha itu. Ditambahkan lagi bahwa keperluan penulisan buku sejarah untuk sekolah semakin terasa mendesak. Kedua hal itu mendorong para sejarawan untuk mengusulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar diangkat suatu regu yang ditugaskan menulis kembali Sejarah Indonesia. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0173/1970, 4 April 1970, mengangkat Panitia Penyusun Buku Standar Sejarah Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila yang dapat dipakai di perguruan tinggi dan sekaligus akan dijadikan bahan daripada textbook sejarah untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan tingkat atas.

Panel pertama mencakup seluruh periode yang lazim disebut prasejarah. Panel kedua akan membahas periode dari akhir prasejarah sampai kedatangan pengaruh Islam di Indonesia. Panel ketiga bertolak dari awal zaman ini sampai akhir abad ke-17. Panel keempat mulai sekitar tahun 1700 sampai 1900. Panel berikutnya meliputi periode pergerakan nasional (1900–1942). Panel yang terakhir menggarap masa pendudukan Jepang sampai dengan kira-kira pertengahan tahun enam puluhan.

Tidak berbeda dengan tugas pujangga di masa lampau, sejarawan dewasa ini juga mempunyai kewajiban untuk menafsirkan serta meneruskan tradisi bangsanya dengan menyusun kembali riwayatnya termasuk garis perkembangan masyarakatnya serta kebudayaannya.

Dalam menunaikan fungsinya itu sejarawan Indonesia perlu menyadari sepenuhnya bahwa dengan gambaran sejarahnya, bangsa Indonesia mampu menempatkan diri dalam waktu serta memahami diri sehingga secara lebih mendalam dikenal identitasnya.

Kesadaran akan tanggung jawab yang berat ini pada satu pihak menimbulkan pada sejarawan suatu keragu-raguan apakah kemampuan serta pengetahuannya telah memadai untuk melaksanakan tugas itu, pada pihak lain keadaan pengajaran sejarah sebagai sendi pendidikan nasional sangat menyedihkan sehingga di dalam keadaan itu tidak dapat diharapkan penanaman perasaan kepribadian nasional serta pemupukan konsensus pada generasi muda melalui pengajaran sejarah itu.

Dengan diperolehnya kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menyadari akan situasinya serta hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. Proses dekolonisasi dalam bidang politik diikuti oleh proses yang sama dalam penulisan sejarah. Di dalam masa penjajahan bangsa Indonesia "terasing" dari sejarahnya sendiri, apa yang diajarkannya lebih merupakan sejarah dari negeri perantauan bangsa penjajah di mana ditonjolkan peranan tokoh-tokoh penjajah sedang peranan bangsa Indonesia ada di latar belakang belaka. Pelukisan dari sudut penglihatan Barat jelas-jelas berat sebelah karena subjektivitas yang timbul dari kepentingan perdagangan khususnya dan penjajahan pada umumnya. Masalah dekolonisasi dalam penulisan sejarah tidak cukup dengan mengubah peranan pemberontak menjadi pahlawan, akan tetapi perlu diungkapkan segala kekuatan sosial yang menciptakan masyarakat Indonesia serta memberikan arah perkembangannya. Untuk melengkapi gambaran serta menerangkan proses sejarah perlu diuraikan pelbagai faktor yang mendorong pertumbuhan bangsa Indonesia.

Penyusunan kembali sejarah Indonesia perlu memenuhi beberapa syarat yang dituntut oleh proses dekolonisasi itu.

(1) Sejarah Indonesia yang wajar adalah sejarah yang mengungkapkan "sejarah dari dalam" di mana bangsa Indonesia sendiri memegang peranan pokok.

(2) Proses perkembangan masyarakat Indonesia hanya dapat diterangkan sejelas-jelasnya dengan menguraikan faktor atau kekuatan yang memengaruhinya, baik ekonomis, sosial, maupun politik atau kultural.

(3) Berhubungan erat dengan kedua pokok di atas perlu ada pengungkapan akitivitas dari pelbagai golongan masyarakat, tidak hanya para

bangsawan atau kesatria, tetapi juga dari kaum ulama dan petani serta golongan-golongan lainnya.

(4) Untuk menyusun sejarah Indonesia sebagai suatu sintesis, di mana digambarkan proses yang menunjukkan perkembangan ke arah kesatuan geopolitik seperti yang kita hadapi dewasa ini, prinsip integrasi perlu dipergunakan untuk mengukur seberapa jauh integrasi itu dalam masa-masa tertentu telah tercapai.

Penulisan ini berpangkal pada paham bahwa Indonesia dengan pelbagai kelompok penduduknya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan yang tumbuh bersama dengan perkembangan wilayah Indonesia sebagai daerah politik-geografis. Paham itu kemudian diperkuat dengan munculnya gerakan nasional yang semakin memperkuat kesadaran nasional, yaitu kesadaran bahwa penduduk kepulauan Indonesia merupakan satu bangsa.

Perkembangan kesatuan nasional itu sendiri tidak dapat dipahami tanpa mengetahui perkembangan sejarah Indonesia.

Penulisan sejarah pada tahun tujuh puluhan seyogianya didasarkan atas beberapa anggapan tentang perkembangan masyarakat Indonesia serta sejarahnya.

Anggapan pertama adalah proses integrasi yang memuat pengertian bahwa ada kelangsungan dari kesatuan-kesatuan masyarakat dan kebudayaan lokal sampai yang nasional. Ini berarti bahwa sejarah lokal atau daerah perlu ditulis dalam hubungannya dengan atau peranannya dalam kesatuan besar.

Anggapan kedua berhubungan dengan perubahan sosial dan kebudayaan yang merupakan proses yang kompleks. Lembaga-lembaga kebudayaan mendapat pengaruh dari proses perubahan yang bergerak dengan pelbagai kekuatan, serta mencakup pelbagai aspek kehidupan.

Anggapan ketiga menunjuk kepada kenyataan bahwa setiap kesatuan etnis serta kebudayaannya perlu dipahami menurut jasa-jasa atau sumbangan yang diberikan kepada sejarah Indonesia serta perlu dimengerti berdasarkan nilainya sendiri. Setiap kesatuan sejarah menghasilkan warisan untuk masa depan.

Salah satu sebab yang mendorong panitia untuk menerima tugas penulisan sejarah ini adalah karena buku-buku sejarah untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah sangat rendah mutunya. Beberapa kali usaha untuk memperbaikinya telah gagal, antara lain karena tidak ada buku babon atau pedoman yang dapat memberi kerangkanya. Diharapkan agar tulisan ini akan dapat dipergunakan sebagai kerangka untuk penulisan buku sekolah itu.

Disadari sepenuhnya oleh panitia bahwa pengajaran sejarah merupakan dasar bagi pendidikan dalam masa pembangunan nasional, terutama untuk menggembleng jiwa generasi muda dengan membangkitkan pada mereka suatu kesadaran bahwa mereka anggota dari suatu nasion. Meskipun dirasakan bahwa tenaga ahli masih sangat kurang untuk melaksanakan pekerjaan raksasa itu, keperluan yang mendesak menghilangkan keragu-raguan sehingga kelompok tidak mau mengelakkan kewajiban menulis kembali sejarah Indonesia.

Setiap usaha kolektif semacam ini tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari pelbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan. Pertama-tama perlu disebut Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak semula memberikan dorongan yang kuat untuk menjalankan penulisan ini, dorongan itu berupa fasilitas-fasilitas serta prasarana-prasarana yang amat memudahkan pekerjaan panitia. Lagi pula kepercayaan serta perhatian yang diletakkan pada usaha ini merupakan dukungan moril yang sangat berharga sehingga pelbagai kesulitan dapat diatasi. Kepada beliau beserta pembantu-pembantu beliau di lingkungan Departemen kami mengucapkan terima kasih atas bantuan itu.

Semua anggota panitia, tidak ada seorang pun yang terkecuali, adalah tenaga dari universitas, lembaga ilmiah, dan lembaga pemerintah. Selain tugas pokoknya, mereka diberi kesempatan menyumbangkan tenaga serta pikirannya kepada karya penulisan ini. Atas kelonggaran itu panitia perlu menyatakan rasa terima kasih sebesar-besarnya.

Perhatian terhadap usaha ini, yang sering disertai bantuan materil yang konkret tidak hanya datang dari pihak lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tidak sedikit bantuan diterima dari The Ford Foundation yang diberikan lewat perwakilannya di Indonesia, terutama dengan memberikan kesempatan bagi para ketua panel untuk memperdalam pengetahuannya dalam bidang teori dan metodologi sejarah.

Selama perantauan di luar, di Amerika Serikat dan di Nederland, perhatian serta bantuan diberikan kepada rombongan ketua-ketua panel dengan sangat leluasa sehingga tidak ternilai manfaat yang diperolehnya, terutama bagi penyusunan karya ini. Para sarjana atau sejarawan yang tersohor dari Universitas California di Berkeley, dan dari universitas-universitas lain, seperti Cornell, Ohio, Wisconsin, Yale, kemudian dari Universitas Leiden dan Koninklijk Instituut van Taal–, Land–en Volkenkunde, kesemuanya sangat terbuka dalam membahas masalah dan rencana penulisan sejarah ini. Fasilitas-

fasilitas diperoleh dari arsip-arsip di negeri Belanda sehingga bahan menjadi semakin lengkap. Panitia merasa beruntung mendapat kesempatan yang luar biasa itu, lagi pula banyak yang secara perorangan dengan tulus ikhlas memberikan segala macam bantuan sehingga memperingan tugas rombongan selama merantau, sesungguhnya terlalu banyak untuk disebut satu per satu.

Kepada segenap anggota panitia di sini kami selaku ketua menyatakan rasa terima kasih atas segala jerih payah dan daya upaya, pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran yang kesemuanya memungkinkan pelaksanaan tugas yang diletakkan pada panitia. Yang perlu mendapat penghargaan sebesar-besarnya tidak lain adalah segala kesediaan serta kemauan baik yang ditunjukkan sehingga selama kira-kira tiga tahun terjalin hubungan yang cukup akrab serta kerja sama yang baik. Tanpa sumbangan itu pekerjaan Panitia tidak akan dapat diselesaikan dengan semestinya.

Meskipun panitia sebagai suatu wadah telah mengatur serta sekadar mengarahkan dan mengkoordinasikan penulisan kolektif ini, tetapi tanggung jawab terletak pada pengarang masing-masing.

Meskipun banyak fasilitas yang diperoleh selama menjalankan penulisan itu, mulai dari pengumpulan bahan sampai penerbitannya, tetapi oleh panitia dirasakan bahwa karya belum dapat memenuhi harapan seperti yang telah diutarakan di mana-mana, jangankan tuntutan seperti yang lazim diadakan terhadap karangan ilmiah. Mungkin dirasakan pula bahwa karya ini belum memadai biaya dan tenaga yang dicurahkan bagi pelaksanaannya. Karya kolektif seperti ini memang memerlukan organisasi, permusyawarahan, dan penyerasian pelbagai kondisi anggota sehingga sukar diharapkan bahwa semua nilai input dapat dicerminkan dalam nilai hasilnya. Kecuali kurang pengalaman menulis, pengalaman pertama dalam usaha kolektif, kurang kemahiran penulisan ini membawa akibat ketidakrataan serta serba kurangnya susunan penulisan ini.

Tidak ada seorang pun dalam panitia yang mempunyai anggapan bahwa karya ini merupakan suatu standar karena masih jauh dari itu. Pada hemat kami, ini baru merupakan usaha permulaan, sekadar memenuhi keperluan yang mendesak. Besar harapan kami bahwa setelah karya ini terbit, banyak yang didorong menghasilkan penulisan sejarah Indonesia, dalam keseluruhan atau hanya sebagian, yang lebih tinggi mutunya serta lebih memenuhi syarat-syarat sebagai sejarah nasional yang ilmiah.

Panitia masih mencari-cari gaya bahasa serta tingkat penguraian yang sesuai dengan sidang pembaca karya ini. Yang dimaksud dengan sidang

pembaca di sini terutama para kaum terpelajar serta cendekiawan Indonesia yang memiliki minat kepada sejarah tanah airnya, sekadar sebagai bacaan pendahuluan. Untuk mempelajari sejarah yang lebih mendalam serta terperinci sudah barang tentu diperlukan karya-karya khusus. Meskipun lingkup waktu serta rangkuman karya ini mencakup periode dari prasejarah sampai sejarah terbaru, tetapi panitia terpaksa membatasi diri pada pasal-pasal pilihan, ialah yang meliputi bagian-bagian dari perkembangan sejarah yang merupakan gejala-gejala penting, terutama dalam hubungannya dengan proses integrasi serta yang menjelaskan sistem dan struktur masyarakat sekarang.

Selanjutnya sejarah yang disajikan di sini tidak meliputi semua bidang kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, beberapa segi dengan sengaja tidak dicakup, seperti sejarah kesenian dan sejarah kebudayaan dengan alasan bahwa (1) jenis sejarah itu sudah sejak lama mandiri dan (2) ruang lingkup penulisan ini terpaksa dibatasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pada kesempatan lain ada penulisan tersendiri mengenai sejarah kesenian dan kebudayaan itu.

Keterbatasan karya ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa belum cukup tersedia hasil penelitian, pengkajian, serta penulisan dari sudut penglihatan baru pada waktu karya ini dimulai. Yang jelas adalah bahwa karya ini tidak didasarkan atas penelitian yang asli dan mendalam.

Tidak ada penulisan sejarah yang tidak memuat sifat-sifat subjektif. Meskipun dalam penulisan ini diusahakan agar segala tuntutan metodologi ilmu sejarah dipenuhi, termasuk kritik sejarah, tetapi tidak ada anggapan bahwa hasil penulisan telah mencapai objektivitas sepenuhnya. Dalam menghayati penulisan sejarah Indonesia dari dalam, atau juga sering disebut penulisan yang Indonesia-sentris, mau tidak mau panitia membatasi sudut penglihatannya atau titik pendirian. Dianggapnya hal itu yang paling memadai dalam situasi yang kita hadapi, ialah kenyataan bahwa pengertian "Indonesia" memang mewujudkan realitas bagi bangsa Indonesia, yaitu negara nasional yang mengikat sebagai suatu kesatuan kelompok-kelompok etnis sebagai satu bangsa dengan satu bahasa nasional. Di sini perlu kita akui bahwa pangkal tolak penggarapan penulisan sejarah ini terikat pada zaman kita sekarang ini, suatu ikatan yang tidak dapat kita lepaskan begitu saja.

Sejarah Nasional seperti yang dikonsepsikan di sini sama sekali tidak menyangkut pengertian bahwa sejarah bangsa Indonesia harus digambarkan dalam serta keagungannya belaka sehingga objektivitas harus dikorbankan

demi penggambaran yang demikian itu. Pasang surut kegiatannya, maju-mundur karya kebudayaannya, timbul tenggelamnya lembaga-lembaganya, unggul-kalah perjuangannya, kesemuanya secara bersama-sama menyusun irama sejarah Indonesia yang sebagai nasib bersama akan mempertinggi kesadaran bangsa Indonesia sebagai nasional. Panitia berkeyakinan bahwa sejarah Indonesia yang menggambarkan nasib bersama, dalam suka duka, kegemilangan dan kesuraman, selain kepahlawanan serta kewibawaan tokoh-tokoh sejarah, mampu membangkitkan rasa kebanggaan pada generasi muda, perasaan mana akan memantapkan kepribadian bangsa, serta identitasnya. Dengan demikian, akan tercapai pula apa yang diharapkan dari pelajaran Sejarah Nasional, tanpa mengurangi tuntutan-tuntutan ilmu sejarah.

Akhirulkalam harapan yang terkandung dalam hati Panitia tidak lain ialah semoga karya yang tidak sepertinya ini menambah bahan bacaan bagi kaum terpelajar yang berminat kepada sejarah Indonesia, baik yang hendak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau maupun yang ingin mengambil pelajaran dari suri teladan para tokoh sejarah atau dari pengalaman-pengalaman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Yogyakarta, akhir 1974
Sartono Kartodirdjo

Prakata Editor Jilid

Edisi Pemutakhiran

Buku Sejarah Nasional Indonesia jilid II, berjudul Zaman Kuno, memuat perjalanan perkembangan sejarah Indonesia sejak awal Masehi sampai kira-kira akhir abad XV Masehi, dan merupakan perkembangan kerajaan-kerajaan Nusantara yang berlatar belakang agama Hindu dan Buddha.

Selang waktu lebih dari 20 tahun sejak edisi terakhir SNI tentu membawa perubahan, terutama karena adanya temuan-temuan arkeologi yang baru. Meskipun secara umum temuan arkeologi tersebut tidak menyebabkan terjadinya perubahan konseptual, temuan-temuan baru tersebut sangat penting karena dapat memberikan kepastian akan hal-hal yang semula meragukan, atau merupakan bukti yang memperkuat pendapat yang sudah ada.

Pada dasarnya Edisi Pemutakhiran ini tidak mengubah kerangka sistematika, hanya menambahkan data-data baru pada beberapa bagian dan mengecek kembali sumber-sumber, terutama prasasti dan naskah. Semua kutipan prasasti dan naskah diusahakan sama dengan sumbernya. Kesulitannya adalah kadang-kadang penulis prasasti pun tidak konsisten, terutama dalam hal tanda-tanda diakritik.

Kesulitan lain yang dihadapi Tim Redaksi adalah dalam menyusun materi secara kronologis. Idealnya suatu penuturan atau uraian sejarah disampaikan berdasarkan urutan kronologi. Namun, ternyata perkembang-an kerajaan-kerajaan Nusantara tidak selalu berurutan, satu sesudah yang lain, adakalanya berkembang bersamaan di beberapa tempat. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika kadang-kadang urutan bab dalam jilid II ini kurang pas.

Zaman Kuno dimulai dengan uraian tentang lokasi strategis kepulauan Nusantara di antara dua benua: Asia dan Australia, serta peran masyarakat Nusantara dalam menjalin hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa asing, antara lain India dan Cina pada fajar masa sejarah.

Hubungan dengan pihak asing ini yang kemudian membawa masyarakat Nusantara pada era baru, yaitu era sejarah, dengan dikenalnya tulisan yang merupakan pengaruh dari India. Dengan demikian, tradisi lisan kemudian sebagian digantikan dengan tradisi tulis. Pengaruh India yang lain adalah lembaga kerajaan dan agama Hindu dan Buddha. Dari peninggalan arkeologi yang ditemukan, terutama di Kalimantan Timur dan Jawa Barat, diketahui

bahwa sejak awal abad V Masehi sudah muncul kerajaan yang menganut agama Hindu. Temuan-temuan terbaru di Muara Kaman maupun di Batujaya, Karawang lebih menegaskan lagi keberadan kerajaan yang dipimpin oleh Mulawarman di Kalimantan Timur dan kerajaan Târumanâgara di Jawa Barat.

Selanjutnya diuraikan mengenai kerajaan-kerajaan di Sumatra. Data baru yang disampaikan dalam bab ini adalah temuan permukiman kuno di pantai timur Sumatra Selatan, yang diperkirakan berasal dari masa pra- Sriwijaya. Temuan tersebut adalah situs Karangagung, Kabupaten Musi Banyuasin dan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Temuan dari kedua situs di muara Sungai Musi itu menunjukkan bahwa wilayah pantai timur Sumatra Selatan telah merupakan tempat persinggahan perdagangan antara India dan Cina yang melewati Selat Malaka pada awal-awal abad Masehi. Data arkeologi tersebut tampaknya sesuai dengan apa yang tertulis dalam berita-berita Cina dari periode yang sama. Dengan demikian, terjawablah pertanyaan mengapa Sriwijaya seperti muncul tiba-tiba sebagai kerajaan yang menguasai perdagangan. Ternyata ada pendahulunya, yaitu semacam pelabuhan transit di muara Sungai Musi.

Masih dalam Bab III juga dapat dijumpai uraian tentang kerajaan Mâlayu, yang tertua yang berasal dari sumber-sumber Cina, kemudian dari kitab Nâgarakrtâgama dan Pararaton, juga dari peninggalan arkeologi dan prasasti-prasasti dari abad XIV Masehi. Menurut pendapat terakhir diperkirakan Malayu ini terletak di Jambi pada awal perkembangannya, kemudian bergeser ke Minangkabau pada masa Âdityawarman. Kompleks percandian Muara Jambi yang memanjang di tepi Sungai Batanghari merupakan bukti eksistensi kerajaan Mâlayu di Jambi pada abad IX–VIII Masehi.

Selain kerajaan Sriwijaya dan Mâlayu, diuraikan juga kerajaan Panai yang muncul di Sumatra Utara sekitar abad XI Masehi. Memang tidak banyak sumber tertulis mengenai kerajaan ini, tetapi kompleks percandian di daerah Padang Lawas, Gunung Tua, Tapanuli Selatan dapat menjadi bukti keberadaan kerajaan Panai tersebut.

Bab IV menjelaskan mengenai kerajaan Matarâm Kuno, baik tahap awalnya yang berpusat di Jawa Tengah dan kemudian bergeser ke Jawa Timur. Masa Matarâm Kuno ini boleh dikatakan sebagai masa kejayaan pada periode Jawa Tengah dalam Sejarah Indonesia Kuno, yang berlangsung dari pertengahan abad VIII abad XI Masehi. Perkembangan agama Hindu dan Buddha ditandai dengan begitu banyaknya peninggalan di Jawa Tengah berupa candi dan arca-arca dewa yang berfungsi sebagai sarana pemujaan. Kerajaan Matarâm Kuno berpusat di Jawa Timur sampai masa pemerintahan Airlangga, pada abad XI Masehi. Mengenai kehidupan masyarakat pada masa

Matarâm Kuno ini dapat ditafsirkan dari sejumlah besar prasasti-prasasti yang ditemukan, yang dapat memberikan gambaran mengenai beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Dalam edisi ini, kerajaan Kadiri dipisahkan dalam satu bab tersendiri, mengingat kerajaan ini mempunyai karakter yang berbeda dari pendahulunya. Bahkan dalam gaya seni, masa Kadiri dianggap sebagai masa peralihan antara gaya seni Jawa Tengah yang bersifat naturalis dan gaya seni Jawa Timur yang bersifat dinamis-ekspresif. Masa Kadiri juga dikenal sebagai masa keemasan dalam kesusastraan Jawa Kuno.

Bab selanjutnya menguraikan mengenai kerajaan-kerajaan yang berkembang di Bali. Tampaknya Bali memang merupakan tempat yang subur bagi perkembangan agama Hindu maupun Buddha. Meskipun agama Hindu lebih dominan, bahkan sampai sekarang, tidak berarti bahwa tidak ada perkembangan agama Buddha. Temuan-temuan baru di Tampaksiring dan Lovina membuktikan adanya bangunan suci agama Buddha.

Bab berikutnya membahas mengenai kerajaan Sunda yang berlokasi di wilayah Jawa Barat. Meskipun ada prasasti yang berasal dari abad X Masehi, data yang dimiliki lebih banyak mengacu ke periode yang lebih muda, yaitu dari abad XV–XVI Masehi. Dari prasasti dan naskah yang ditemukan diketahui adanya pusat-pusat kerajaan Sunda, karena rupa-rupanya pusat kerajaan tersebut mengalami beberapa kali perpindahan. Sumber-sumber tertulis tersebut juga memberikan gambaran mengenai beberapa aspek kehidupan masyarakat, misalnya sistem mata pencaharian dan sistem religi.

Bab terakhir membahas dua kerajaan besar yang menjadi penutup masa Hindu-Buddha dalam sejarah Indonesia kuno. Kedua kerajaan itu menghasilkan karya-karya sastra dan seni yang bermutu tinggi. Dalam bidang pemerintahan, tampak kemapanan dan kestabilan, bahkan kerajaan cukup kuat untuk mempersatukan wilayah kepulauan Nusantara. Sayang sepeninggal Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit menjadi lemah karena adanya perang saudara. Ditambah lagi dengan makin majunya penguasa pantai utara Jawa karena menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Islam. Maka ditandai dengan ungkapan sirna-ilang-krtaning-bumi, hilanglah pamor dan kebesaran Majapahit, untuk digantikan dengan periode sejarah kuna yang berikutnya.

Perlu dikemukakan juga di sini mengenai Tim Redaksi yang menangani pemutakhiran Sejarah Nasional Indonesia ini. Tim yang lama, tinggal tersisa 4 orang, adapun yang masih ikut berperan menangani pemutakhiran ini hanya satu orang saja, yaitu Dr. Hasan Djafar. Anggota tim yang lain merupakan "orang baru", meskipun sama sekali tidak "baru" dalam bidang

yang ditanganinya. Mereka itu adalah Drs. Soeroso Mp., M. Hum., Dr. P.E.J. Ferdinandus, Dra. Titi Surti Nastiti, M. Hum., dan Dr. Endang Sri Hardiati sebagai koordinator.

Harapan kami apa yang telah kami hasilkan dalam pemutakhiran ini dapat berguna bagi segenap masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sejarah Indonesia kuno, dan sekaligus dapat menumbuhkan kebanggaan kita akan leluhur dan masa lalu kita yang ternyata memiliki "local genius" yang mampu menyerap dan mengolah pengaruh-pengaruh asing yang masuk dan menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi setempat.

Jakarta, Desember 2007
Endang Sri Hardiati

Prakata Editor Jilid

Edisi ke-4

Sejak tahun 70-an, penelitian mengenai masa lalu bangsa kita memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, penelitian mengenai zaman kuno relatif tidak secepat kemajuan penelitian mengenai zaman-zaman yang lebih mutakhir. Antara lain karena pengumpulan data arkeologis tidak berjalan secepat pengumpulan data sejarah dari arsip, atau sumber tertulis lainnya.

Suatu hal yang menunjang perkembangan penelitian sejarah kuna adalah bertambahnya jumlah peneliti dalam bidang ini. Namun, hasil-hasil penelitian itu masih banyak yang perlu mendapat pembahasan dan pengkajian lebih lanjut sebelum dapat disumbangkan dalam kisah Sejarah Nasional. Walaupun demikian sudah cukup banyak usaha rekonstruksi sejarah kuno yang diajukan sejak terbitnya kitab Sejarah Nasional Indonesia pada tahun 1976. Oleh karenanya dianggap perlu untuk menerbitkan suatu edisi yang telah diperbaiki dengan tambahan hasil-hasil penelitian baru.

Tambahan hasil penelitian ternyata belum dapat menghasilkan gambaran yang lebih menampilkan kebulatan uraian sejarah. Tambahan itu banyak yang hanya sampai pada tingkat menambah fakta, mempertajam analisis, tetapi belum sampai pada penggambaran menyeluruh yang baru.

Walaupun demikian, karena perkembangan penelitian sejarah kuno relatif lamban dibanding dengan penelitian sejarah yang lebih mutakhir, maka tiap kemajuan dalam penelitian menjadi cukup berarti.

Dibanding dengan edisi sebelumnya, maka dalam edisi ini nampak perubahan yang cukup berarti dalam penggarapan bab yang membahas Sriwijaya dan Mataram, khususnya dalam pembahasan Wangsa Sailendra di Jawa.

Mengingat bahwa data-data yang mendukung rekonstruksi sejarah sosial tidak selalu cukup, maka nampak pembagian bab yang tidak selalu konsisten. Misalnya pada penggarapan bab Mataram lebih ditampilkan perjalanan sejarah yang terungkap dari sumber epigrafi.

Pada penyempurnaan Edisi ke-4 ini, dua orang sarjana arkeologi senior telah turut langsung menangani. Mereka adalah saudara Satyawati Suleiman dan saudara M. Boechari.

Akhirnya, kami berharap semoga edisi yang telah disempurnakan ini dapat lebih berguna untuk mengenal masa lampau bangsa kita, khususnya zaman kuno.

Bambang Sumadio

Prakata

Edisi ke-1

Jilid II diberi judul "Jaman Kuna". Uraian dalam jilid ini berusaha menyajikan uraian sejarah bangsa Indonesia dari masa awal masuknya pengaruh budaya India hingga berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit.

Periode sejarah yang dicakup meliputi jangka waktu lima belas abad. Suatu jangka waktu yang panjang dalam sejarah kita yang masih banyak berisi kekosongan, baik dilihat dari segi uraian berdasarkan urutan waktu, gambaran keadaan pada tiap-tiap bagian maupun dari segi daerah yang dibicarakan. Hal ini disebabkan karena penelitian periode sejarah ini masih belum merata pendalamannya. Penelitian yang telah dilakukan sebagian besar masih terpusat pada sejarah daerah-daerah yang telah banyak menghasilkan peninggalan-peninggalan, baik berupa benda-benda temuan arkeologis maupun sumber-sumber tertulis. Daerah-daerah tersebut adalah daerah yang telah menghasilkan bukti-bukti pengaruh budaya India. Daerah-daerah lainnya belum terjangkau secara intensif oleh usaha penelitian sejarah kuna hingga sekarang. Bahkan daerah Sulawesi Selatan yang telah menumbuhkan suatu kekuatan politik yang kekuasaannya dan kemampuannya menjadi penghalang besar terhadap perluasan kekuasaan kolonial pada abad ke-17 belum diungkapkan sejarah pertumbuhannya.

Suatu ciri uraian sejarah jaman kuna adalah bahwa uraian tersebut tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada sumber-sumber tertulis. Sebagian besar uraiannya sebenarnya bertumpu pada penafsiran hasil penelitian arkeologi. Dengan demikian maka lengkapnya pengungkapan sangat tergantung dari jumlah data yang dapat dihasilkan oleh penelitian arkeologi yang sebagian besar dihasilkan oleh penggalian-penggalian (ekskavasi). Berhubung penggalian demikian memerlukan tenaga-tenaga berpendidikan khusus yang belum banyak terdapat di Indonesia, maka penelitiannya pun berjalan lambat. Agaknya sebelum tenaga arkeologi tersedia dalam jumlah yang cukup pengetahuan mengenai sejarah kuna bangsa masih akan memperlihatkan kekosongan-kekosongan.

Uraian Jaman Kuna dimulai dengan masa kedatangan pengaruh budaya India di kepulauan kita. Pada masa itu telah terjadi proses-proses sejarah yang kemudian sangat besar pengaruhnya pada peranan bangsa Indonesia dalam bagian dunia ini. Uraian tersebut berakhir dengan berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit pada waktu pengaruh agama Islam mulai mengubah wajah masyarakat Indonesia yang telah terbentuk pada zaman-zaman sebelumnya.

Jilid II ini terasa belum dapat menyajikan gambaran yang bulat mengenai Jaman Kuna Indonesia. Banyak pendapat-pendapat ilmiah yang telah tersusun di masa lampau mulai dikaji kembali dan hingga sekarang belum selesai penelitiannya. Data-data baru dan pendekatan-pendekatan ilmiah baru masih dalam penggarapan. Jarak waktu yang jauh antara zaman kini dengan peristiwa-peristiwa dan keadaan Jaman Kuna yang sampai kepada kita melalui benda-benda temuan yang tidak langsung dapat "berbicara" memerlukan cara-cara penggarapan ilmiah yang khusus. Dan banyak hasil penelitian yang belum dapat memberikan dasar untuk suatu pengkisahan Jaman Kuna yang jelas.

Dalam kesempatan ini ingin kami menyampaikan penghargaan kepada saudara M. Boechari S.S., salah seorang pelopor penelitian epigrafi Indonesia yang telah memberikan sumbangan-sumbangan pendapat yang berharga hingga Tim Redaksi dapat menyusun Jilid II ini.

Akhir kata kami harapkan semoga jilid II ini dengan segala kekurangan-nya, masih dapat memberikan gambaran yang cukup menyeluruh mengenai pengalaman bangsa kita berdasarkan hasil penelitian yang telah ada.

Bambang Sumadio

Sejarah Nasional Indonesia
Edisi Pemutakhiran

Jilid I	Zaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II	Zaman Kuno (awal M – 1500 M)
Jilid III	Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)
Jilid IV	Kemunculan Penjajahan di Indonesia (±1700–1900)
Jilid V	Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)
Jilid VI	Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (±1942–1998)

Tim Redaksi Edisi Pemutakhiran

1. Endang Sri Hardiati (Editor Jilid)
2. Hasan Djafar
3. Soeroso
4. P.E.J. Ferdinandus
5. Titi Surti Nastiti

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II Jaman Kuna (awal M – 1500 M)
Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (±1500–1800)
Jilid IV Abad Kesembilan belas (±1800–1900)
Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (±1900–1942)
Jilid VI Zaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (±1942–1984)

Tim Redaksi

Ketua : Bambang Sumadio
Anggota : Ayatrohaedi
Boechari
Edi Sedyawati
Edhi Wurjantoro
Hasan Djafar
Oei Soan Nio
Satyawati Suleiman
Soejatmi Satari
M.M. Soekarto K. Atmodjo

Daftar Isi

Kata Pengantar Edisi Pemutakhiran v

Kata Pengantar Edisi ke-4 vi

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia vii

Prakata Editor Umum Edisi Pemutakhiran ix

Kata Pengantar Editor Umum untuk Edisi 1984 xi

Prakata Editor Umum Edisi ke-1 xii

Prakata Editor Jilid Edisi Pemutakhiran xx

Prakata Editor Jilid Edisi ke-4 xxiv

Prakata Editor Jilid Edisi ke-1 xxvi

Daftar Isi xxxi

Daftar Peta xxxv

Daftar Peta xxxix

Bab I Pendahuluan 1

- A. Letak Geografis 1
- B. Hubungan-Hubungan Pertama 1
- C. Hubungan Dagang dengan India dan Cina 15
- D. Proses Masuknya Pengaruh Budaya India 27

Bab II Kerajaan-Kerajaan Tertua 33

- A. Kutai 33
  - 1. Sumber-Sumber 33
    - a. Prasasti 35
    - b. Temuan Arkeologi 40
  - 2. Kehidupan Masyarakat dan Agama 42
- B. Tarumanagara 47
  - 1. Sumber-sumber 47

a. Prasasti 48
b. Berita Cina dari Abad VII Masehi 54
c. Temuan Arkeologi 55
2. Keadaan Masyarakat 60

Bab III Kerajaan-Kerajaan di Sumatra 65
A. Sriwijaya 65
1. Masa Awal 65
2. Jejak-Jejak Masa Sejarah 67
3. Perkembangan Selanjutnya 86
4. Struktur Birokrasi 94
5. Hubungan dengan Luar Negeri 97
6. Perkembangan Perdagangan 98
B. Malayu 101
1. Masa Aw al 101
2. Perkembangan Selanjutnya 104
C. Panai 108

Bab IV Kerajaan Mataram Kuno 113
A. Wangsa Sailendra 113
1. Asal Usul Wangsa Sailendra 113
2. Ho-ling dan Kañjuruhan 118
3. Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya 128
4. Rakai Panangkaran dan Pengganti-Penggantinya 138
B. Wangsa Isana 185
1. Asal Usul Wangsa Isana 185
2. Dharmmawangsa Teguh 196
3. Airlangga 203
C. Keadaan Masyarakat 213
1. Landasan Kosmogonis 222
2. Struktur Birokrasi 226
3. Sumber Penghasilan Kerajaan 249
4. Ekonomi 253
5. Hukum 256
6. Kesenian 270
a. Seni Sastra 270

b. Seni Pertunjukan 276

Bab V Kerajaan Kadiri 279
A. Sumber-Sumber 279
1. Pembagian Kerajaan oleh Airlangga 279
2. Kerajaan Pangjalu di Daha 286
3. Runtuhnya Kerajaan Kadiri 297
4. Temuan Arkeologi 299
B. Keadaan Masyarakat 301
1. Struktur Pemerintahan 301
2. Agama 302
3. Kesenian 302
4. Kesusastraan 303

Bab VI Kerajaan-Kerajaan di Bali 305
A. Sumber 305
1. Berita-Berita Tertua 305
2. Prasasti-Prasasti Kerajaan Singhamandawa 309
3. Prasasti-Prasasti Wangsa Warmmadewa 317
4. Prasasti-Prasasti Wangsa Lainnya di Bali 329
5. Temuan Arkeologi 340
B. Keadaan Masyarakat 343
1. Struktur Birokrasi 343
2. Golongan dalam Masyarakat 352
3. Peraturan dan Hukum 355
4. Kesenian 361
5. Agama dan Kepercayaan 363
6. Perekonomian Rakyat 371

Bab VII Kerajaan Sunda 379
A. Pusat-Pusat Kerajaan Sunda 379
1. Kerajaan Berpusat di Galuh 383
2. Pusat Kerajaan Prahajyan Sunda 384
3. Pusat Kerajaan Kawali 390
4. Pusat Kerajaan Pakwan Pajajaran 393
B. Keadaan Masyarakat 400
1. Struktur Birokrasi 400

2. Agama 409
3. Kesenian 414
4. Ekonomi 416

Bab VIII Kerajaan Singhasari dan Majapahit 421
A. Kerajaan Singhasari 421
1. Ken Angrok: Cikal-bakal Wangsa Rajasa 421
2. Anusapati dan Tohjaya 427
3. Wisnuwarddhana 430
4. Kertanagara: Perluasan Cakrawala Mandala 435
B. Kerajaan Majapahit 447
1. Wijaya dan Awal Perkembangan Majapahit 447
2. Jayanagara 458
3. Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani 461
4. Hayam Wuruk: Puncak Kebesaran Kerajaan Majapahit 463
5. Perebutan Kekuasaan Sesudah Pemerintahan Hayam Wuruk 469
6. Girindrawarddhana: Raja-Raja Majapahit Akhir 472
7. Runtuhnya Kerajaan Majapahit 477
8. Struktur Pemerintahan dan Birokrasi Kerajaan Majapahit 479

Daftar Pustaka 485

Daftar Singkatan 513

Indeks 515

Genealogi 535

Daftar Foto

Foto 1.1	Kedok penutup mata dan mulut, emas, Pasir Angin, panjang 12,2 cm lebar 2 cm	3
Foto 1.2	(a) Intaglio seal, batu karnelian, Air Sugihan; (b) Kendi Soui, Air Sugihan	4
Foto 1.3	Perahu bercadik, relief pada candi Borobudur	6
Foto 1.4	Cengkih, salah satu komoditas penting dari Nusantara17	
Foto 2.1	(a) Arca Buddha, perunggu, Sempaga, Sulawesi Selatan, koleksi Museum Nasional; (b) Arca Buddha, batu, Bukit Seguntang, Palembang, koleksi Museum Badaruddin	34
Foto 2.2	(a) Prasasti Yupa, Muara Kaman, Kalimantan Timur, koleksi Museum Nasional; (b) peripih, batu, Muara Kaman, Kalimantan Timur	37
Foto 2.3	(a) Lukisan cap tangan, gua Tewet, Sungai Jelai, Kalimantan Timur; (b) Arca Siwa dan arca Nandiswara, Gunung Kombeng, Kalimantan Timur, koleksi Museum Nasional	41
Foto 2.4	Prasasti Sangguran di tempat penyimpanannya sekarang di Skotlandia	45
Foto 2.5	(a) Arca Wisnu Cibuaya I dan II, batu, koleksi Museum Nasional; (b) Arca Rajarsi, perunggu, Jawa Barat, koleksi Museum Nasional	49
Foto 2.6	Prasasti Ciaruteun, Bogor	51
Foto 2.7	(a) Candi Jiwa, Batujaya, Karawang, Jawa Barat; (b) Candi Blandongan, Batujaya, Karawang, Jawa Barat	57
Foto 2.8	(a) Meterai berelief, tanah liat, Blandongan; (b) Prasasti mantra Buddhis, tanah liat, Blandongan; (c) Fragmen gerabah Arikamedu, Blandongan	59
Foto 3.1	(a) Manik-manik batu, kaca, koleksi Museum Nasional; (b) Manik-manik kaca emas, koleksi Museum Nasional; (c) Fragmen tiang, kayu, Karangagung, Sumatra Selatan69	

Foto 3.2	(a) Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti Siddhayatra, Palembang................	71
Foto 3.3	(a) Prasasti Telaga Batu, Palembang, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti Kota Kapur, Bangka, koleksi Museum Nasional	75
Foto 3.4	(a) Arca Wisnu, batu, Kota Kapur, Bangka, sekarang di Balai Arkeologi Palembang; (b) Candi Kota Kapur, Bangka..	77
Foto 3.5	(a) Amulet, logam, Karangagung; (b) Manik-manik mutisala, Karangagung, gelang kaca, Karangagung; (c) Fragmen tiang nibung, situs Air Sugihan	83
Foto 3.6	(a) Arca Ganesa, batu, Palembang, koleksi Museum Badaruddin; b) Arca leluhur dan arca Siwa, batu, Bumiayu, Muara Enim; (c) Pola hias candi, tanah liat, Bumiayu......	91
Foto 3.7	(a) Arca Amoghapasa, batu, Sungai Langsat, Sumatra Barat, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti Saruaso, Pagarruyung, Sumatra Barat...	105
Foto 3.8	(a) Candi Bahal I, Padang Lawas, Portibi, Sumatra Utara; (b) Candi Si Pamutung, Padang Lawas, Portibi, Sumatra Utara	107
Foto 3.9	(a) Relief raksasa menari, bata, Candi Bahal I; (b) Relief penari, batu, Candi Pulo, Padang Lawas, koleksi Museum Nasional; (c) Singa, batu, Candi Si Pamutung; (d) Makara, batu, Candi Si Topayan..................................	109
Foto 4.1	Candi Badut, Dinoyo, Jawa Timur	126
Foto 4.2	(a) Candi induk Gunung Wukir, Salam, Magelang; (b) Candi perwara, Gunung Wukir, Salam, Magelang....	130
Foto 4.3	Arca Ganesa, Candi Banon, Magelang, koleksi Museum Nasional	132
Foto 4.4	Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah.....................................	134
Foto 4.5	Candi Plaosan, Klaten, Jawa tengah..................................	137
Foto 4.6	(a) Candi Kalasan, Sleman, DIY; (b) Gapura Candi Ratu Boko, Sleman, DIY	139

Foto 4.7	Kapal Samudraraksa, dibuat tahun 2003 oleh Philip Arnold Beale dan As'ad Abdullah, berdasarkan relief Borobudur, pada tahun yang sama berlayar sampai ke Accra, Ghana, Afrika. Sekarang dijadikan museum di Borobudur	142
Foto 4.8	Candi Ngawen, Muntilan, Jawa Tengah	144
Foto 4.9	Relief Candi Borobudur, kaki tertutup, no. 0147 menggambarkan adegan di surga	154
Foto 4.10	Kompleks percandian Loro Jonggrang, Prambanan, Jawa Tengah	160
Foto 4.11	(a) Petirtaan Jalatunda, Trawas, Jawa Timur; (b) Petirtaan Belahan, Trawas, Jawa Timur	194
Foto 4.12	Gunung Penanggungan, yang dianggap gunung suci pada masa Indonesia kuno	224
Foto 4.13	(a) Mata uang emas dan perak, dari masa Mataram kuno; (b) Mata uang kepeng Cina, koleksi Museum Balaputra Dewa, Palembang	257
Foto 5.1	(a) Arca Candra dan Brahma, Gurah, Kediri; (b) Arca Candra, Tondowongso Kediri	300
Foto 6.1	(a) Stupika, Kalibukbuk, Buleleng, Bali; (b) Meterai berelief, Kalibukbuk, Buleleng, Bali; (c) Meterai berinskripsi mantra Buddha, Palembang	306
Foto 6.2	Prasasti Panempahan, Tampaksiring, Bali	319
Foto 6.3	Tirta Empul, Tampaksiring, Bali	322
Foto 6.3	Pura Pegulingan Tampaksiring, Bali..................................	341
Foto 7.1	Prasasti Huludayeuh, Cirebon	380
Foto 7.2	Prasasti Kawali, Ciamis, Jawa Barat	389
Foto 7.3	Padrao, batu, Jalan Cengkeh, Jakarta, koleksi Museum Nasional	399
Foto 7.4	(a) Arca Siwa, batu, Pulau Panaitan, koleksi Museum Sri Baduga, Bandung; (b) Arca Agastya, Nandiswara dan Yoni, batu, mungkin dari Gunung Pulasari, Banten, koleksi Museum Nasional	411
Foto 7.5	(a) Candi Cangkuang, Leles, Garut, Jawa Barat; (b) Candi Bojong Menje, Rancaekek, Bandung.................	413

Foto 8.1	Candi Kidal, Malang, Jawa Timur	428
Foto 8.2	Candi Jago, Malang, Jawa Timur	434
Foto 8.3	Arca Camundi, Singasari, Jawa Timur, koleksi Museum Trowulan	438
Foto 8.4	Candi Singasari, Malang, Jawa Timur	444
Foto 8.5	Candi Jawi, Pasuruan, Jawa Timur	446
Foto 8.6	Arca Harihara, Sumberjati, Jawa Timur, diduga arca pendharmaan raja Kertarajasa, koleksi Museum Nasional	157
Foto 8.4	Relief pemandangan, batu, menggambarkan rumah dan jalan-jalan berbatu bulat, Trowulan, Jawa Timur, koleksi Museum Nasional	468

Daftar Peta

Peta 1.1 Jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara dalam tahun 250 11
Peta 1.2 Hubungan maritim di Asia Tenggara dalam tahun 430–610 13
Peta 3.1 Lokasi situs Kepurbakalaan di Pulau Sumatra 66
Peta 3.2 Lokasi situs Karangagung dan Air Sugihan, di pantai timur Sumatra Selatan 81
Peta 8.1 Nusantara pada masa Majapahit 466

Bab I
Pendahuluan

A. Letak Geografis

Kepulauan Indonesia terletak antara 5° 54' Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan, serta 95° 01' Bujur Timur dan 141° 02' Bujur Timur. Oleh karena itu, Indonesia termasuk daerah khatulistiwa dan berada di daerah embusan angin musim Indo-Australia. Ciri-ciri iklimnya ialah berhawa tropis dengan curah hujan yang tinggi.[1]

Keadaan iklim yang dipengaruhi oleh angin musim menyebabkan adanya musim kemarau dan penghujan. Panjang-pendek musim-musim itu berbeda menurut letak daerahnya di kepulauan Indonesia. Selain itu, panjang pendek musim-musim itu tidak selalu sama setiap tahunnya.

Adanya dua musim sebagai gejala tetap dalam iklim, berpengaruh pada pelbagai aspek dalam kehidupan penduduk kepulauan Indonesia. Misalnya pada pola pertanian, pola pelayaran, dan aspek-aspek lain yang dipengaruhi iklim.

Angin musim jelas berpengaruh pada pola pelayaran. Pada gilirannya ia memengaruhi pelbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan perahu. Misalnya penangkapan ikan, dan yang lebih penting lagi perdagangan, termasuk pelayaran perdagangan dari dan ke Indonesia.

Selain menjadi jembatan antara daratan Asia dan benua Australia, kepulauan Indonesia juga terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Letaknya yang berada dalam jalur perdagangan "internasional" ini besar pengaruhnya pada perkembangan sejarah kuno Nusantara.

B. Hubungan-Hubungan Pertama

Hingga saat ini harus diakui bahwa tulisan yang khusus membahas tentang sejarah kemaritiman awal untuk daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara belum pernah ada. Padahal kenyataan historis menunjukkan bahwa sebagian pusat politik selalu berkembang dari wilayah pantai. Di

[1] R.W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, IA, 1949, hlm. 6

India misalnya, kaum Ksatrapa di Gujarat serta kaum Satavahana di bagian barat pegunungan Deccan masing-masing harus dianggap sebagai penjaga kekuasaan kemaritiman, sementara dua pusat lain lebih awal berkembang di bagian pantai timur India yaitu di Orissa dan pantai Andhra, pertama di bawah kekuasaan Maurya dan kemudian di bawah pengaruh kekuasaan Dinasti Cola.

Langkanya tulisan yang mengupas tentang sejarah kemaritiman itu barangkali berawal dari pemikiran tradisional yang melihat Asia Selatan sebagai wilayah yang berbasis ekonomi pedesaan yang konservatif yang mampu mencukupi kebutuhan ekonomi sendiri. Debat itu tidak hanya berakhir pada *Indian sub-continent*, tetapi lebih jauh memiliki akar di dalam perbedaan persepsi tentang pentingnya perdagangan di masa lalu. Betapa persepsi orang memandang rendah peran perdagangan itu, oleh karena berdasarkan bukti yang digunakan orang menganggap Roma berkembang karena adanya peningkatan di bidang pertaniannya. Perkembangan desa lebih besar, sedangkan perkembangan perdagangan lebih rendah. Status para pedagang dianggap sebagai status yang rendah dan perdagangan eksternal semata-mata hanya untuk kepentingan barang-barang prestise yang dikonsumsi oleh para elite saja.[2]

Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Bukti arkeologi yang berasal dari masa sebelum adanya tulisan mengisyaratkan bahwa situs-situs awal yang menunjukkan dimulainya hidup menetap selalu ditemukan di wilayah pantai. Hasil penelitian situs Sembiran, Bali, memperlihatkan bahwa permukiman di wilayah ini telah berkembang sejak awal abad Masehi dan kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke daerah pedalaman. Selanjutnya penelitian situs Gilimanuk, Bali, menunjukkan bahwa masyarakat Gilimanuk ternyata telah menjadi penghuni tetap kawasan ini dan bahkan mereka telah mengenal pranata-pranata sosial jauh sebelum munculnya kerajaan awal. Situs Plawangan di Jawa Tengah, yang berasal dari masa yang sama memperlihatkan adanya kehidupan menetap dan bahkan dalam hal sistem penguburannya telah menunjukkan adanya stratifikasi sosial.

Temuan lain yang menarik ialah penggunaan seal yang dianggap menjadi alat tukar masa lalu yang ditemukan di sejumlah situs arkeologi di Asia Tenggara daratan dan di Semenanjung Tanah Melayu. Namun, di Indonesia alat tersebut baru satu kali ditemukan; dan yang agak menarik yang diduga merupakan jenis alat tukar di sini adalah *gold eye-cover* (kedok penutup mata dari bahan emas) seperti yang ditemukan antara lain di Pasir Angin, Gilimanuk, serta sejumlah tempat lain. Betulkah jenis barang tersebut merupakan alat tukar?

---

[2] A.H.M. Jones, The Roman Economy, 1974, hlm. 30
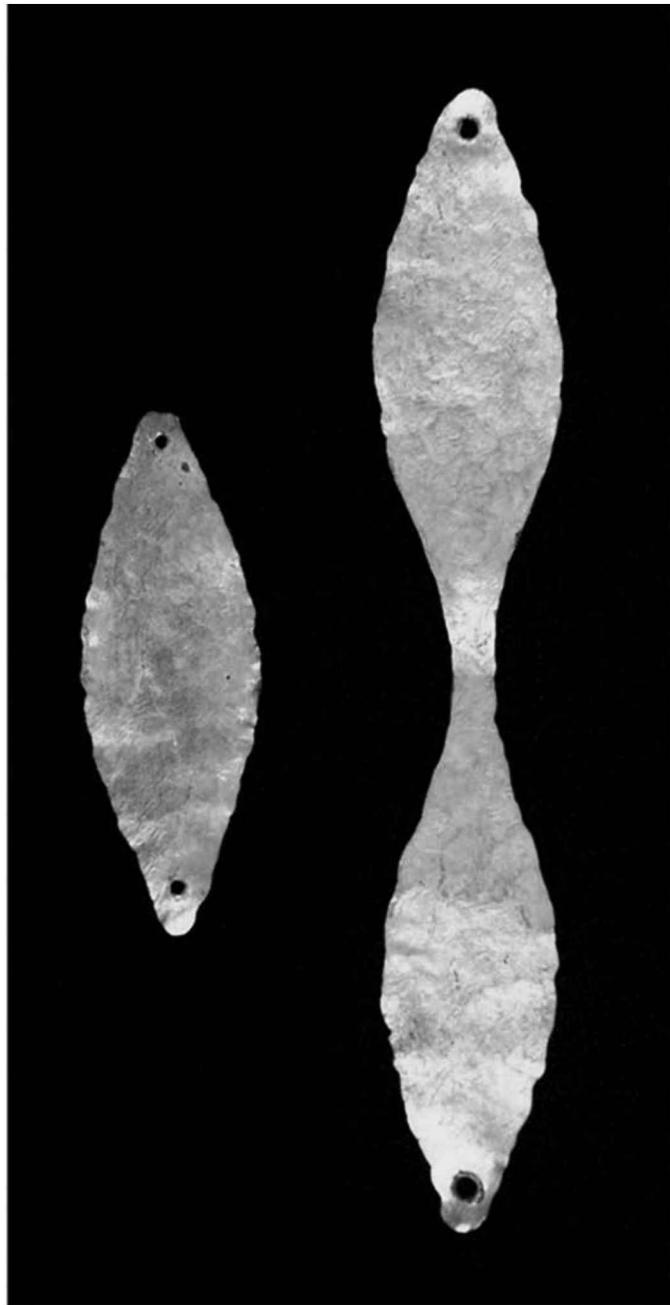
Foto 1.1 Kedok penutup mata dan mulut, emas, Pasir Angin, panjang 12,2 cm lebar 2 cm dan panjang 5,2 cm lebar 2 cm (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

(a)

(b)

Foto 1.2 (a) *Intaglio seal*, batu karnelian, Air Sugihan;
(b) Kendi Soui, Air Sugihan (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

Masyarakat Buni di Jawa Barat, yang diperkirakan telah menempati wilayah itu sejak awal abad Masehi, menyisakan sejumlah temuan penting yang dapat menjadi petunjuk bahwa pada masa itu mereka telah menetap dan memiliki basis subsistensi dari penangkapan ikan. Hampir dapat dipastikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan makanan utama (beras ataupun umbi-umbian) mereka mengandalkan pasokan dari daerah pedalaman; dan mungkin sebagian merupakan produksi lokal yang dihasilkan pada relung-relung ekologi tertentu di sekitarnya.

Pada awal sejarah, ketika tulisan mulai dikenal dan hubungan dengan luar terjalin secara lebih intensif, tampaknya permukiman pantai masih terus berkembang meskipun kemudian terjadi perubahan ke arah pedalaman. Kerajaan Tarumanagara misalnya, meskipun sebagian besar prasastinya tersebar di daerah pedalaman, ketergantungannya terhadap jalur-jalur yang menghubungkannya dengan daerah pantai masih sangat kuat. Lagi pula, prasasti Tugu, yang merupakan prasasti terlengkap dari masa itu dilihat dari isinya, ditemukan tidak jauh dari pantai Tanjung Priok. Prasasti Sojomerto, yang menyebut Dapunta Selendra, tokoh yang diduga menurunkan raja-raja Sailendra dan menggunakan bahasa Melayu kuno dan diperkirakan prasasti tertua di wilayah Jawa Tengah juga ditemukan tidak terlalu jauh dari pantai.

Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan tertua di Sumatra sebagian besar prasastinya ditemukan di Palembang, dan hampir semua tidak jauh dari Sungai Musi. Kerajaan ini baik berdasarkan sumber-sumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri (kronik Cina maupun India) merupakan kerajaan yang basis ekonominya didasarkan pada sektor perdagangan.

Harus diakui bahwa sebagian situs-situs pantai yang berkembang dari masa prasejarah hingga masa sejarah tersebut tidak meliputi masa yang panjang, dan sering kali hanya sedikit menyisakan bukti-bukti arkeologis terutama yang bersifat monumental. Baru setelah terjadi perubahan dan pergeseran dari pantai ke pedalaman, muncul pusat-pusat permukiman berskala besar serta menyimpan bukti-bukti arkeologis yang sifatnya monumental. Kerajaan Mataram Kuno yang diperkirakan berpusat antara daerah Kedu, Yogyakarta, meninggalkan sejumlah besar candi yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Setelah melewati masa hampir dua abad, karena sebab yang belum diketahui (dan umumnya dikaitkan dengan masalah bencana alam) kerajaan ini pun kemudian pindah ke Jawa Timur. Perkembangan kerajaan Kadiri meskipun dari sisi arkeologi hanya mempunyai sedikit bukti-bukti monumental, sejumlah besar prasasti yang berasal dari masa itu umumnya menyebut tentang pembangunan bendungan ataupun saluran air, khususnya

Foto 1.3 Perahu bercadik, relief pada candi Borobudur
(*Sumber.* Puslitbang Arkenas)

untuk kepentingan pertanian. Agaknya pada masa-masa kemudian, dan terutama setelah munculnya Singhasari dan Majapahit, ketika terjadi surplus di bidang pertanian, peran perdagangan mulai berkembang lagi dan menjadi basis perekonomian yang kedua.

Sejak zaman prasejarah, penduduk Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Hubungan dengan daerah pedalaman lebih sulit daripada hubungan antarpulau. Pada awal sejarah kuno Indonesia, kita melihat tumbuhnya pusat-pusat perdagangan di beberapa tempat di pesisir pulau Sumatra dan Jawa.

Berdasarkan penelitian prasejarah, kita dapat mengetahui adanya peninggalan benda-benda prasejarah yang mengandung ciri-ciri yang menunjukkan adanya hubungan antara kepulauan Indonesia dengan pelbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Khususnya *nekara perunggu* telah menjadi sasaran penelitian banyak ahli. Yang terkenal adalah hasil penelitian F. Heger yang hingga sekarang masih digunakan sebagai dasar klasifikasi pelbagai jenis nekara perunggu di Asia Tenggara.[3] Berdasarkan klasifikasi Heger, para ahli telah dapat membedakan antara tipe lokal dan tipe yang sama dengan yang terdapat di daratan Asia Tenggara.

Adanya nekara-nekara perunggu tipe Asia Tenggara yang ditemukan di Indonesia tidaklah harus berarti bahwa nekara-nekara tersebut berasal dari Asia Tenggara seluruhnya. Besar kemungkinan bahwa sebagian dari nekara-nekara tersebut dibuat di Indonesia. Bukti akan kemampuan tersebut cukup banyak. Di pelbagai tempat telah ditemukan cetakan-cetakan yang digunakan dalam pengecoran benda-benda perunggu di zaman prasejarah. Sebaliknya, dapat diduga bahwa ada pula nekara-nekara yang dibawa dari daratan Asia Tenggara. Misalnya nekara yang ditemukan di Sangeang.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan bagian dari satu kesatuan daerah lalu lintas barang. Mungkin pada zaman prasejarah itu belum terdapat perdagangan dalam arti yang kita kenal sekarang, tetapi pertukaran hasil dari pelbagai daerah pasti telah terjadi dan berdasarkan pola tertentu. Untuk menjelaskan keadaan Indonesia yang mula-mula ditemui oleh para pedagang dari luar Asia Tenggara, khususnya para pedagang India, beberapa ahli menekankan bahwa di Indonesia pada saat itu telah berkembang masyarakat-masyarakat yang memiliki pranata

[3] F. Heger, Alte Metalltrommelen aus Sudöst-Asien, 1902

yang memungkinkan masyarakat-masyarakat itu mendapat manfaat dari hubungan tadi.[4]

J.C. van Leur dan O.W. Wolters berpendapat bahwa hubungan dagang antara India dan Indonesia lebih dahulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Cina.[5] Bilakah hubungan dagang tersebut mulai berkembang? Para ahli sependapat mengenai sulitnya menentukan hal ini. Mereka mengajukan dugaan bahwa hubungan dagang antara India dan kepulauan Indonesia telah lama terjadi sebelum hal itu disinggung dalam catatan sejarah.[6] Hubungan itu pada mulanya sangat jarang. Kemudian hubungan tersebut semakin meningkat karena faktor-faktor yang mendorong bertambah ramainya hubungan dagang tersebut.

Ada pendapat bahwa perluasan pelayaran perdagangan ke arah timur India karena diketahuinya angin musim yang baik untuk berlayar menyeberangi Samudra India ke timur dan sebaliknya. Menurut kisahnya, seorang nakhoda yang bernama Hippalos adalah "orang Barat" pertama yang menemukannya. Penduduk setempat tentu sudah mengetahui sebelumnya.[7] Sebelum penemuan tersebut, kapal-kapal menyusuri pantai dalam pelayaran mereka ke timur. Pengetahuan mengenai angin musim pada abad-abad I M bertepatan pula dengan mulai dibuatnya kapal-kapal yang cukup besar untuk pelayaran jarak jauh.

Dalam meneliti masa awal pelayaran ke arah timur India, dan khususnya ke Indonesia, para sarjana Barat pada umumnya lebih banyak menyoroti peran pelaut Barat, Arab, India, dan Cina. Hal ini tidak mengherankan karena sesuai dengan data-data yang tampil dalam sumber-sumber yang mereka gunakan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan penelitian prasejarah dan etnografi dapat diketahui bahwa penduduk Asia Tenggara, khususnya penduduk kepulauan Indonesia, adalah pelaut-pelaut yang mampu melayari samudra lepas. Penyebaran perahu bercadik yang meliputi Polinesia sampai ke Hawaii di timur, dan Madagaskar di barat,[8] menunjukkan penyebaran benda budaya yang sesuai dengan hasil penelitian bahasa oleh H. Kern pada tahun 1886.[9]

---

4 N.J. Krom, HJG, 1931, hlm. 34–54; B.H.M. Vlekke, Nusantara, 1965, hlm. 12–17; D.G.E. Hall, The History of South-east Asia, 1968, hlm. 8–9, 13; J.C. van Leur, Indonesian Trade and Society, 1955, hlm. 89–90

5 J.C. van Leur, 1955, hlm. 90; O.W. Wolter, 1967, hlm. 31

6 D.G.E. Hall, 1968, hlm. 12; N.J. Krom, 1931, hlm. 67, walaupun nada uraian keduanya agak berbeda, karena Krom beranggapan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India

7 Menurut Wheatley, 1961, Hippalos mungkin seorang tokoh mitologi

8 Ralph Linton, 1972; Peter Bellwood, 1978

9 H. Kern, VG, VII, 1917, hlm. 105–120

Sehubungan dengan kenyataan yang ditemukan oleh penelitian-penelitian tadi, bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa pelayaran ke Teluk Benggala, dan mungkin juga sampai ke India Selatan, bukanlah hal yang sulit untuk pelaut Indonesia.

Dalam kitab Periplous terdapat uraian yang menerangkan bahwa ada kapal-kapal Colandia yang bertolak ke Chrysè, negara emas yang mungkin mengacu pada Sumatra. Beberapa orang peneliti berpendapat bahwa Colandia adalah K'un-lun, sebutan dalam tambo Cina untuk bangsa-bangsa Asia Tenggara.[10]

Kesulitan untuk mengetahui keadaan awal hubungan antara Indonesia dengan India disebabkan tidak terdapatnya sumber-sumber yang dapat memberikan keterangan yang jelas. Sumber-sumber tertulis dari zaman itu yang berasal dari Indonesia tidak ada karena menurut hasil penelitian para ahli, tulisan yang kemudian umum digunakan di Indonesia justru berasal dari tulisan India. Dengan demikian, sesungguhnya kita mengharapkan akan menemukan keterangan dari sumber-sumber India. Akan tetapi, berbeda dengan di Cina, di India tidak terdapat suatu kebiasaan untuk membuat catatan-catatan resmi mengenai kejadian-kejadian penting dalam suatu kurun waktu. Sumber India yang dapat digunakan adalah sumber sastra yang tidak bertujuan untuk memberikan fakta-fakta yang lugas mengenai keadaan pada masa awal terjadinya hubungan antara Indonesia dan India.

Salah satu kitab yang sering disebut oleh para peneliti adalah kitab Jataka. Kitab yang memuat kisah-kisah tentang kehidupan Sang Buddha ini menyebut Suvarnnabhumi sebagai sebuah negeri yang memerlukan perjalanan yang penuh bahaya untuk mencapainya. Suvarnnabhumi berarti negeri emas. Menurut Sylvain Levi, yang dimaksudkan adalah salah sebuah negeri di sebelah timur Teluk Benggala.[11]

Kitab lainnya yang banyak dijadikan sumber adalah kitab Ramayana. Kitab yang amat terkenal ini menyebut nama Yawadwipa. Dikisahkan bahwa tentara kera yang bertugas mencari Sita di negeri-negeri sebelah timur telah memeriksa Yawadwipa yang dihias oleh tujuh kerajaan. Pulau ini adalah "pulau emas dan perak". Kitab ini juga menyebut nama Suwarnnadwipa, sebuah nama yang kemudian memang digunakan untuk menyebut Sumatra. Nama itu sendiri berarti pulau emas.

---

[10] O.W. Wolters, 1967, berpendapat bahwa para pelaut Indonesia sudah sampai di Srilangka pada abad-abad pertama Masehi. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh P.Y. Manguin, 1972

[11] S. Levi, "Ptolemee, Le Nidessa et le Brhatkatha", *Études Asiatiques II*, hlm. 29

Adanya nama-nama Yawadwipa dan Suwarnnadwipa dalam kitab-kitab tersebut menyebabkan beberapa ahli banyak bertumpu pada kitab-kitab tadi dalam usaha mereka untuk mengungkapkan masa awal kedatangan pengaruh India di Indonesia. Sesungguhnya sebagai sumber sejarah kitab-kitab tersebut menyajikan beberapa kesulitan pokok pada pemakainya. Pemakai sumber-sumber tersebut sukar mengetahui bila versi yang dihadapinya itu ditulis, sejak kapan keterangan mengenai tempat-tempat yang disebutkan itu dikenal oleh kalangan sastrawan, dan apakah penulisnya mengerti benar pelbagai keterangan geografis yang berasal dari para pelaut itu.

Salah satu hasil sastra India yang oleh para ahli dianggap lebih dapat dipercaya adalah kitab *Mahaniddesa*. Levi berpendapat bahwa keterangan geografis mengenai beberapa tempat di Timur Jauh yang terdapat di dalamnya mencerminkan perbendaharaan pengetahuan di India mengenai tempat-tempat itu pada abad III M.[12]

Dalam usaha untuk mengetahui awal hubungan India dengan daerah-daerah di sebelah timurnya, para peneliti telah pula mengkaji sumber-sumber Barat zaman kuno. Sebuah kitab yang banyak dikaji sebagai sumber adalah kitab *Periplous tès Erythras thalasès*. Periplous adalah sebuah kitab pedoman untuk berlayar di lautan Erythrasa, yaitu Samudra India. Kitab ini ditulis oleh seorang nakhoda Yunani-Mesir yang biasa mengadakan pelayaran antara Asia Barat dan India. Diperkirakan bahwa kitab ini ditulis pada awal tarikh Masehi.[13]
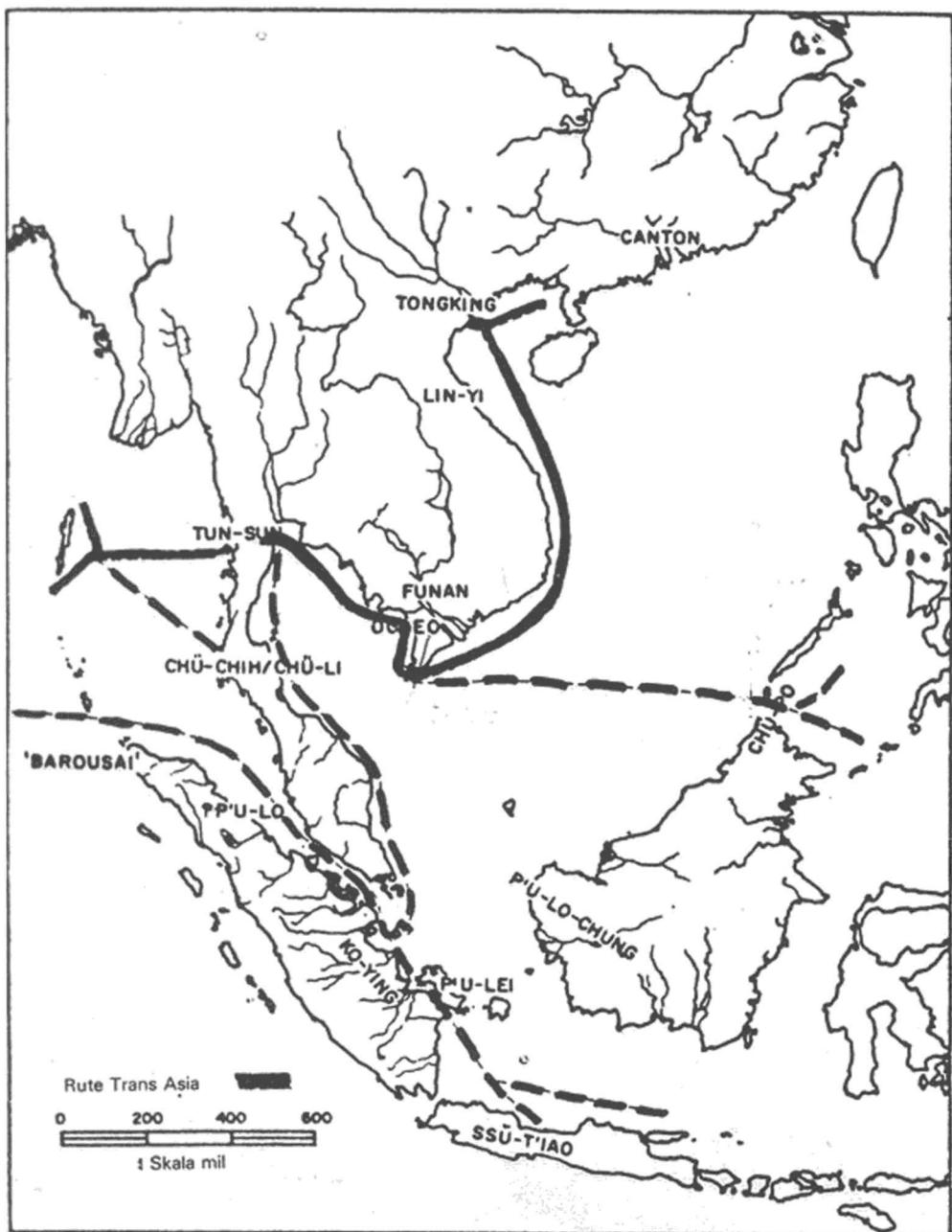
Keterangan dalam *Periplous* mengenai daerah jalur pelayaran antara Asia Barat dan India lengkap dan cukup dapat dipercaya. Akan tetapi, keterangan mengenai daerah yang letaknya lebih ke timur sangat samar-samar. Khususnya keterangan mengenai keadaan geografi. Hal ini dapat kita mengerti karena penulis *Periplous* tidak pernah melayari jalur timur. Pengetahuannya mengenai jalur timur ini diperoleh dari keterangan para pedagang dan pelaut yang melayari jalur timur yang ditemuinya di pelabuhan-pelabuhan India Selatan.

Walaupun keterangan *Periplous* mengenai keadaan geografi daerah sebelah timur India tidak jelas, tetapi menurut Wheatley keterangannya mengenai cara-cara berdagang di daerah-daerah di timur India cukup bernilai.[14] Menarik pula keterangan *Periplous* mengenai hubungan dagang orang-orang India dengan suatu tempat yang disebut Chrysè yang berarti emas. Nama ini mengingatkan kita pada Suwarnnabhumi dan Suwarnnadwipa.

---

[12] Ibid., hlm. 51

[13] P. Wheatley, The Golden Khersonese, 1961, hlm. 129 catatan 1

[14] Ibid., hlm. 129–131

Peta 1.1 Jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara dalam tahun 250
(*Sumber*: O.W. Wolters, 1967)

Untuk penelitian sejarah geografis keterangan *Periplous* mengenai keadaan daerah di sebelah timur India mungkin tidak memuaskan, tetapi sebagai petunjuk tentang awal hubungan India dengan daerah timurnya mungkin dapat dianggap sebagai petunjuk pasti mengenai lalu lintas perdagangan menyeberangi Teluk Benggala.[15]

Sebuah sumber Barat lain yang banyak digunakan oleh para peneliti yaitu kitab *Geographikè Hyphègèsis.* Kitab ini adalah sebuah kitab petunjuk membuat peta yang telah disusun oleh orang Yunani di Iskandariah. Ia bernama Claudius Ptolomaeus. Menurut para ahli, kitab *Geographikè* dalam bentuknya yang dikenal di seluruh dunia Barat itu, tidak seluruhnya hasil karya Ptolomaeus. Sebagian besar merupakan tambahan pada tulisan Ptolomaeus, yang ditambahkan pada zaman-zaman berikutnya. Ptolomaeus sendiri telah menulis karyanya pada abad II M.[16]

Dalam kitab *Geographikè* kita bertemu lagi dengan nama-nama tempat yang berhubungan dengan logam mulia, yaitu emas dan perak. Tempat-tempat tersebut ialah *Argyrè Chora*, negeri perak, *Chrysè Chora*, negeri emas, dan *Chrysè Chersonèsos*, semenanjung emas. Kitab ini menyebutkan pula nama tempat *Iabadiou*, pulau jelai.
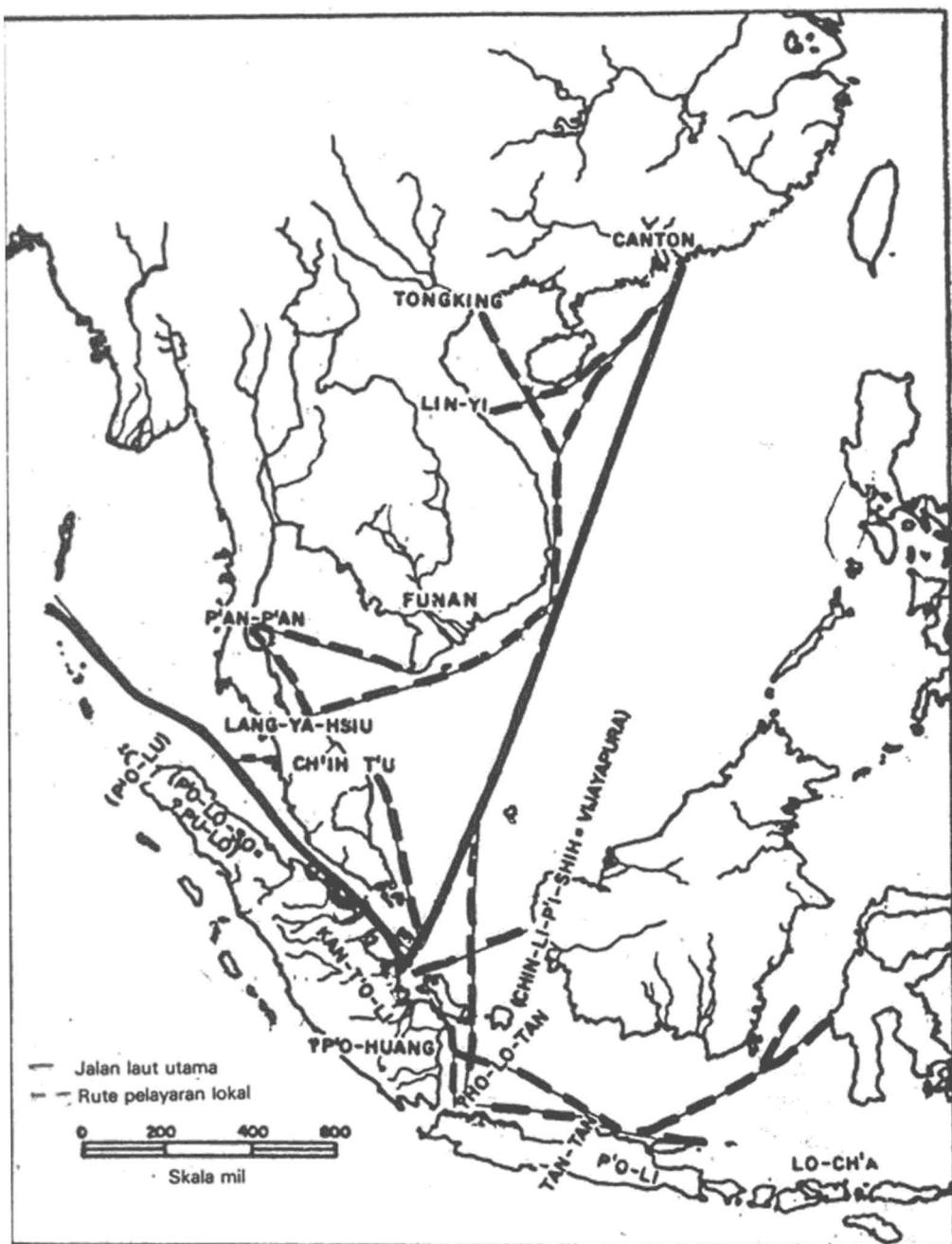
Yawa adalah bahasa Sanskerta untuk menyebut jelai. *Diou* adalah diwu dalam bahasa Pakrit-nya dan *dwipa* dalam bahasa Sanskerta, artinya pulau. Jadi, dalam nama *Iabadiou* ini kita bertemu dengan nama Yawadwipa. Apakah pada masa itu yang dimaksudkan dengan Yawadwipa juga Pulau Jawa? Krom tidak yakin mengenai hal ini, karena dalam sumber-sumber yang lebih muda ternyata nama tersebut sering digunakan untuk menyebut Pulau Sumatra atau bagian dari Pulau Sumatra.[17] Sumber Indonesia tertua yang menyebut Pulau Jawa dengan kata Yawa adalah prasasti Canggal yang berangka tahun 654 Saka atau tahun 732 Masehi. Dalam prasasti tersebut terdapat pujian untuk Dwipa Yawa.[18] Walaupun identifikasi pelbagai tempat yang disebutkan dalam kitab Ptolomaeus masih perlu penelitian lebih lanjut, jelas bahwa pada masa keterangan-keterangan tersebut dibukukan telah terdapat pengetahuan mengenai daerah sebelah timur India yang sampai di dunia Barat. Hal ini tentu hanya mungkin jika dunia perdagangan pada masa itu yang menjadi sumber keterangan para penyusun *Geographikè* mempunyai pengetahuan

---

[15] O.W. Wolters, op. cit, hlm. 33. Istilah menyeberang Teluk Benggala tidak berarti bahwa para pelaut itu mengambil jalur pelayaran yang memotong teluk tersebut di tengah. Mungkin lebih banyak pelaut yang sampai di seberang dengan menyusuri pantainya

[16] P. Wheatley, op. cit., hlm. 131

[17] N.J. Krom, op. cit., hlm. 58

[18] R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia, I, 1952, hlm. 52, 54, 55

Peta 1.2 Hubungan maritim di Asia Tenggara dalam tahun 430–610
(*Sumber*: O.W. Wolters)

faktual mengenai daerah tersebut. Ini berarti bahwa pada masa itu Indonesia telah masuk dalam jangkauan perdagangan "internasional". Khususnya dunia perdagangan yang terletak di sebelah baratnya.

Sumber-sumber tersebut, baik sumber India maupun sumber Barat, belum dapat mengungkapkan awal hubungan antara Indonesia dan India sepenuhnya. Agaknya dapat diambil kesimpulan bahwa di sekitar abad II M hubungan tersebut relatif sudah intensif. Timbul pertanyaan mengapa pada suatu ketika pedagang-pedagang India meluaskan perdagangan mereka ke Indonesia?

Dalam usaha mengungkapkan hubungan dagang antara Indonesia dan India di zaman kuno, kita berpangkal pada pengertian bahwa Indonesia merupakan bagian dari suatu kesatuan wilayah, yaitu Asia Tenggara. Dalam kesatuan wilayah tersebut telah tumbuh suatu budaya yang jelas memperlihatkan ciri-ciri persamaan. Pertumbuhan budaya ini telah berlangsung sejak berabad-abad sebelum masa terjadinya hubungan dagang dengan India yang telah disebutkan terdahulu.

Bagi seseorang di India yang mengarahkan perhatiannya ke arah timur, kepulauan Indonesia merupakan serangkaian pulau-pulau yang membentang di hadapannya, dan merupakan kelanjutan dari daratan Asia Tenggara. Dapat diduga bahwa daerah Asia Tenggara, atau bagian-bagian daripadanya, sudah lama dikenal oleh penduduk di sekitar Teluk Benggala. Pelayaran lokal antara beberapa tempat di tepi Teluk Benggala mungkin telah ada sejak zaman prasejarah. Beberapa sarjana telah meneliti kemungkinan hubungan budaya Asia Tenggara dengan budaya India sebelum kedatangan bangsa *Arya*. Akan tetapi, hingga sekarang belum dapat dihasilkan bukti-bukti yang mantap.[19] Berbeda dengan hubungan-hubungan sebelumnya, maka hubungan dagang antara India dan Indonesia yang bukti-buktinya mulai tampak pada sumber-sumber dari awal tarikh Masehi telah mengakibatkan perubahan-perubahan penting dalam masyarakat Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan India ke Asia Tenggara bukan lagi merupakan suatu kegiatan hubungan pertukaran barang antara dua masyarakat yang bertetangga, melainkan merupakan bagian dari pola kegiatan perdagangan India yang pada awal tarikh Masehi telah beberapa abad berkembang menjadi salah satu kekuatan perdagangan internasional. Suatu kekuatan perdagangan yang telah menumbuhkan suatu pranata perdagangan yang mantap seperti India inilah yang dapat mengembangkan potensi perdagangan Asia Tenggara hingga daerah itu kemudian mengalami perkembangan dalam segala bidang.

---

[19] D.G.E. Hall, op. cit., hlm. 9

C. Hubungan Dagang dengan India dan Cina

Seperti sudah disinggung sebelumnya, kepulauan Indonesia membentang di sebelah timur India sebagai kelanjutan dari daratan Asia Tenggara. Bagi pelaut-pelaut ulung tidaklah terlalu sulit untuk mencapai Indonesia dari India. Mereka mengarahkan haluan mereka ke timur dan berlayar dengan angin musim yang sedang berembus dari buritan. Untuk perjalanan kembali ditunggu angin musim yang berembus ke arah yang berlawanan. Dengan teknologi pelayaran yang telah dikembangkan dalam pelayaran-pelayaran perdagangan ke Asia Barat, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan pelayaran pantai sepanjang pesisir Asia Tenggara menjadi pelayaran samudra yang langsung menyeberangi Samudra India ke Sumatra. Dalam perdagangan ini tidak hanya digunakan perahu-perahu kecil yang menyusur pantai, tetapi juga kapal-kapal kayu yang berukuran beberapa ratus ton dan dapat memuat penumpang sampai dua ratus orang.[20]

Telah diterangkan bahwa sejak zaman prasejarah di kesatuan wilayah Asia Tenggara telah terdapat lalu lintas pertukaran barang. Hubungan ini merupakan salah satu benang merah pemersatu wilayah Asia Tenggara. Dapat diduga bahwa perdagangan dengan India bertumpu pada pola-pola perdagangan regional yang telah lama berkembang. Jika pada mulanya mungkin perdagangan itu terpusat pada tempat-tempat tertentu yang letaknya lebih langsung pada jalur perdagangan atau sudah dikenal sebelumnya, dalam waktu yang relatif singkat seluruh Asia Tenggara agaknya telah terlibat langsung atau tidak langsung dengan perdagangan itu. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada abad V M, baik di daratan Asia Tenggara maupun di Semenanjung Tanah Melayu dan Indonesia bagian barat, telah terdapat pusat-pusat kekuasaan politik dengan taraf pengindiaan yang sama. Tentunya hal ini hanya mungkin jika telah terjadi penyebaran pengaruh yang cukup intensif dan merata di wilayah tersebut.[21]

Kehadiran orang-orang India di Asia Tenggara yang ternyata besar pengaruhnya pada perkembangan budaya wilayah ini telah lama menjadi perhatian para peneliti. Khususnya dalam hubungan penelitian proses pengindiaan Asia Tenggara.[22] Dalam hubungan ini pelbagai teori telah diajukan. Hal ini akan dibahas di bagian lain. Di sini cukup dikemukakan

---

[20] J.C. van Leur, op. cit., hlm. 66–67, memberikan keterangan mengenai inti bentuk perdagangan zaman kuno di Asia

[21] G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, 1968. Bab III dan IV menguraikan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara yang pertama yang jelas memperlihatkan ciri-ciri pengindiaan

[22] Sebagian para peneliti menyebutnya proses penghinduan

adanya anggapan yang menggambarkan bahwa orang-orang India telah datang dalam jumlah besar dan mengadakan kolonisasi.

Jika kita berpegang pada motivasi yang mendorong orang-orang India datang di Asia Tenggara, yaitu berdagang dan hal ini berarti mencari keuntungan, frekuensi kunjungan mereka dan jumlah mereka tergantung dari perkembangan perdagangannya. Tentunya perdagangan itu telah tumbuh tahap demi tahap. Perdagangan Asia Tenggara dengan India adalah bagian dari perdagangan internasional India yang terbentang hingga Asia Barat. Tentunya diperlukan waktu sebelum hasil Asia Tenggara mendapat tempat di pasar internasional pada waktu itu dan sebaliknya perlu tumbuh permintaan akan barang-barang yang diperdagangkan oleh orang-orang India di Asia Tenggara. Asia Tenggara yang baru mulai berkenalan dengan pasaran dunia; belum biasa dengan barang-barang hasil pasar dunia pada waktu itu. Menurut van Leur barang-barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Misalnya, logam mulia, perhiasan, pelbagai jenis tenunan, dan barang-barang pecah belah di samping bahan-bahan baku yang diperlukan untuk pelbagai kerajinan.[23] Selain itu, juga bahan-bahan ramuan untuk wangi-wangian dan obat. Jelas bahwa barang-barang tersebut memerlukan masyarakat dengan taraf perkembangan tertentu sebagai konsumen.

Seperti telah disebutkan, ada pertanyaan mengenai sebab para pedagang India pada suatu saat lebih menaruh minat pada daerah timur, khususnya Asia Tenggara. Coedès memberi penjelasan sebagai berikut mengenai hal tersebut. Dekat pada awal tarikh Masehi, India kehilangan sumber emas yang utama. Sumber emas itu ialah Siberia. Di masa sebelumnya emas didatangkan dengan kafilah-kafilah dari Siberia melalui Baktria. Akan tetapi, gerakan-gerakan pelbagai bangsa penduduk Asia Tengah telah memutuskan jalan-jalan kafilah dari utara itu. Sebagai gantinya India mengimpor mata uang emas dalam jumlah besar dari kerajaan Romawi. Usaha ini kemudian dihentikan atas perintah Kaisar Vespasianus (69–79 M) karena mengalirnya mata uang emas ke luar negeri dalam jumlah besar ternyata membahayakan ekonomi negara. Mungkin keadaan ini telah mendorong para pedagang India untuk mencari emas di daerah lain.[24] Dalam hal ini adalah menarik bahwa pelbagai tempat di sebelah timur India dikenal dengan nama-nama yang mengandung arti emas atau perak. Agaknya daerah yang kemudian lebih dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, pada masa itu dimasyhurkan sebagai negeri emas. Andaikata dugaan Coedès ini benar, hal itu lebih menegaskan lagi motif

---

[23] J.C. van Leur, op. cit., hlm. 63

[24] G. Coedès, op. cit., hlm. 20

Foto 1.4 Cengkih, salah satu komoditas penting dari Nusantara
(*Sumber*: TA)

komersial yang menjadi dasar kedatangan orang-orang India. Bukan politik seperti yang telah diajukan oleh beberapa peneliti, pada awal abad XX ini.[25]

Apakah kiranya yang diperdagangkan antara pedagang-pedagang Indonesia dan India selain emas seperti yang diajukan oleh Coedès? Seperti mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di sekitar hubungan dagang Indonesia dan India juga mengenai barang-barang dagangan sumber-sumber India tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Sebuah naskah kuno India menyebutkan bahwa kayu gaharu dan kayu cendana berasal dari negeri asing, mungkin dari Asia Tenggara. Yang jelas ialah bahwa kayu gaharu Indonesia tidak pernah menjadi bahan ekspor yang terkenal. Yang lebih terkenal adalah kayu cendana dari daerah timur Indonesia. Rupa-rupanya kayu cendana itu dikumpulkan oleh para pedagang Indonesia di pusat-pusat perdagangan dengan India di Indonesia bagian barat dan kemudian diperdagangkan ke India.[26]

Cengkih yang kemudian menjadi salah satu hasil kepulauan Indonesia timur yang masyhur, sudah pula menjadi bahan dagangan yang dicari oleh para pedagang India. Dalam kitab *Raghuvamsa* karangan Kalidasa yang menurut para ahli hidup sekitar tahun 400 M, disebut *lavanga* (cengkih) yang berasal dari *dvipantara.* Wolters percaya bahwa yang dimaksud dengan *dvipantara* adalah kepulauan Indonesia.[27]

Lada yang berabad-abad kemudian merupakan salah satu hasil utama Indonesia untuk pasar internasional, pada masa awal hubungan dagang dengan India tidak begitu penting kedudukannya, karena orang India sendiri adalah penanam dan penghasil lada yang ulung.

Hasil Indonesia bagian barat yang mencapai pasar India pada masa awal agaknya tidak banyak. Kapur barus yang merupakan salah satu barang dagangan yang berharga dari daerah ini belum menduduki tempat yang penting. Dalam kitab-kitab tentang pengobatan belum banyak disebut.

Awal peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan India yang tidak dapat dinyatakan dengan angka tahun yang pasti, mungkin bersamaan dengan kurun waktu masa perluasan kekuasaan kerajaan Cina ke daerah Tongkin di Vietnam. Perluasan kekuasaan di masa dinasti Ch'in dan Han terjadi mulai akhir abad II Sebelum Masehi.

Perluasan kekuasaan kerajaan Cina tersebut membawa kekuasaan itu ke dalam kawasan Asia Tenggara yang pada zaman sebelumnya tidak pernah

---

[25] D.G.E. Hall, op. cit., hlm.16

[26] O.W. Wolters, op. cit., hlm. 65–66

[27] Ibid., hlm. 66

menimbulkan minat pada raja-raja Cina. Asia Tenggara dianggap daerah yang belum beradab yang terletak jauh dari pusat peradaban Cina di Cina bagian utara. Daerah di sebelah selatan Sungai Yangtse yang berbatasan dengan Asia Tenggara tidak dianggap sebagai daerah Cina karena penduduknya tidak berbudaya Cina.[28]

Perdagangan dengan negeri asing yang telah dilakukan oleh Cina sejak berabad-abad Sebelum Masehi adalah perdagangan dengan Asia Barat. Perdagangan itu berlangsung dengan Cina bagian utara yaitu tempat pusat peradabannya. Jalan perdagangan ini melalui Asia Tengah. Kegiatan perdagangan yang sepenuhnya dilaksanakan melalui jalur-jalur perdagangan di daratan Asia ini dengan sendirinya tidak memberi kemungkinan tumbuhnya suatu perdagangan maritim di Cina. Oleh karenanya, Cina tidak segera dapat serta dengan kegiatan maritim di Asia Tenggara pada saat mereka telah dapat memantapkan kekuasaan mereka di Cina Selatan setelah mereka melarikan diri dari pusat peradaban di Cina bagian utara yang diserang oleh suku-suku bangsa dari Asia Tengah pada awal abad IV M. Para bangsawan dari Cina Utara yang mendirikan dinasti-dinasti Cina Selatan mendorong tumbuhnya perdagangan maritim di Asia Barat ke Cina Selatan melalui kepulauan Indonesia. Peran hasil Asia Tenggara, termasuk hasil kepulauan Indonesia, dalam perdagangan dengan Cina turut berkembang bersama dengan perkembangan perdagangan maritim antara Asia Barat dan Cina.

Walaupun dengan perluasan kekuasaan Cina di Tongkin sesungguhnya mereka sudah menanamkan kekuasaan yang tetap di Asia Tenggara,[29] tetapi minat mereka hanya terbatas pada Tongkin. Uraian yang tertua dalam sumber Cina mengenai Asia Tenggara menjelaskan tentang suatu jalan perdagangan dari daerah Cina, melalui Funan dan Semenanjung Tanah Melayu, dan berakhir di tepian Samudra India.[30] Uraian tersebut dibuat untuk menjelaskan hubungan Cina dengan Asia Barat. Keadaan daerah-daerah yang dilalui jalan perdagangan tersebut pada waktu itu tidak dianggap cukup penting untuk diberitakan.

Apakah yang diperdagangkan oleh Asia Barat yang telah berhasil memukau golongan yang berkuasa di Cina sejak lima abad Sebelum Masehi? Di antara pelbagai barang hasil Asia Barat yang dinilai sangat tinggi itu ialah pelbagai jenis getah pohon yang digunakan sebagai atau untuk membuat wangi-wangian (misalnya setanggi), tekstil, batu karang tertentu untuk

---

[28] Ibid., hlm. 38, cat. 32

[29] Kekuasaan tetap itu tidaklah selalu mantap. Banyak pemberontakan yang harus dihadapi. Lihat O.W. Wolters, ibid., hlm. 39

[30] Ibid., hlm. 37

membuat perhiasan, mutiara, barang-barang jadi terutama barang-barang dari gelas atau kaca seperti perhiasan imitasi dan alat-alat hias dari kaca berwarna. Juga batu permata dari daerah Laut Tengah sangat dinilai tinggi.[31]

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa daerah-daerah Asia Tenggara yang berbatasan dengan daerah kekuasaan Cina tidak dianggap penting walaupun jalan perdagangan ke Asia Barat melalui daerah-daerah itu. Utusan-utusan dari India Utara dan Asia Barat telah datang di Cina melalui jalan perdagangan maritim antara India dan Asia Tenggara dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Cina melalui daratan Asia Tenggara. Utusan-utusan tersebut telah berdatangan sejak akhir abad I M. Akan tetapi, utusan dari Funan dan Campa, dua buah negeri yang bertetangga dengan Cina, baru datang di istana dinasti Wu antara tahun 226 dan 231 M. Pada saat itu Funan telah dianggap cukup penting oleh pemerintah Cina. Pemerintahan Wu mengirimkan dua orang utusan, yaitu Chu Ying dan K'ang T'ai.

Minat Cina terhadap Funan tidaklah disebabkan Cina ingin menunjukkan perhatiannya terhadap hasil bumi Funan, tetapi disebabkan perdagangan Asia Barat dengan Cina berlangsung melalui Funan. Perhatian Cina masih tetap pada perdagangannya dengan Asia Barat, dan Asia Tenggara hanya mendapat perhatian jika ada hubungan dengan perdagangan tersebut.[32]

Senada dengan keterangan di atas adalah pendapat Groeneveldt yang mengemukakan bahwa penelitian sumber-sumber Cina menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Asia Tenggara yang terdapat dalam sumber-sumber itu memberikan kesan bahwa mereka tidak segera langsung mengadakan hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Berabad-abad setelah mereka meluaskan kekuasaan mereka di Asia Tenggara bagian utara, pengetahuan mereka mengenai bagian lain dari daerah ini hanya mereka peroleh melalui pihak lain. Bahkan pengetahuan langsung mereka mengenai kepulauan Indonesia baru mereka peroleh pada abad V M, atau bahkan setelah itu.[33]

Dari sumber Cina, khususnya laporan K'ang T'ai, telah dapat disimpulkan peran Funan dalam perdagangan antara Asia Barat dan Cina. Suatu ekskavasi arkeologis telah memberikan gambaran lebih jelas mengenai keadaan perdagangan tersebut. Penggalian itu telah dilakukan di sebuah tempat bernama Oc-Eo. Tempat ini terletak di sisi laut Delta Mekong di dekat pantai Teluk Siam kurang lebih tujuh kilometer dari laut. Selain benda-benda temuan

---

[31] Ibid., hlm. 41

[32] Ibid., hlm. 43

[33] W.P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources, 1960, hlm. 1–2

yang berupa barang-barang buatan setempat, terdapat pula barang-barang dari India, Asia Barat, daerah sekitar Laut Mediterania dan Cina. Di antara temuan barang-barang dari Iran terdapat sebuah cakram dari kaca yang dihias dengan lukisan seseorang yang mirip dengan yang terdapat pada mata uang zaman Sasanid.[34]

Suatu hal yang penting dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Cina ialah adanya hubungan pelayaran langsung antara kedua tempat tersebut. Hubungan pelayaran itu dapat merupakan bagian dari hubungan pelayaran antara Asia Barat dengan Cina, tetapi juga dapat merupakan hubungan tersendiri antara Indonesia dan Cina.

Menurut Wolters, bukti-bukti menunjukkan bahwa pelayaran niaga melintasi Laut Cina Selatan untuk pertama kalinya terjadi antara abad III M dan abad V M. Akan tetapi, bukti yang pasti mengenai pelayaran antara Indonesia dan Cina berasal dari abad V M. Keadaan pelayaran itu dapat disimpulkan dari perjalanan dua orang pendeta agama Buddha, yaitu Fa-hsien dan Gunavarman.[35]

Fa-hsien bertolak dari Sri Langka pada tahun 413. Ia menempuh seluruh perjalanan kembali ke Cina melalui laut. Pada bulan Mei ia bertolak dari Yeh-p'o-t'i ke Cina. Yeh-p'o-t'i diartikan sebagai Yawadwipa oleh para peneliti. Akan tetapi, Yawadwipa tidak harus berarti Pulau Jawa.[36] Laporan Fa-hsien mengenai perjalanannya itu menyebut percakapan antara para penumpang sewaktu pelayaran itu telah melampaui batas waktu berlayar yang lazim untuk mencapai Kanton dari Yeh-p'o-t'i. Para penumpang merasa khawatir dan mereka menduga bahwa kapal mereka telah kehilangan arah. Batas waktu berlayar yang lazim ialah kurang lebih lima puluh hari. Pada waktu itu mereka telah melampaui batas waktu itu berhari-hari.

Dari percakapan di antara penumpang tersebut di atas jelas bahwa suatu pelayaran langsung dari Yeh-p'o-t'i ke Cina pada masa itu telah lazim. Yang dimaksudkan pelayaran langsung adalah pelayaran tanpa menyinggahi suatu pelabuhan selama perjalanan.

Perjalanan Gunavarman adalah sebuah contoh lain tentang pelayaran langsung dari Indonesia ke Cina. Gunavarman bertolak dari She-p'o, yaitu Pulau Jawa. Pada mulanya nakhoda merencanakan untuk singgah di sebuah kerajaan kecil. Akan tetapi, karena angin sedang baik, diputuskan untuk berlayar langsung ke Cina.

---

[34] O.W. Wolters, op. cit., hlm. 38. Lihat pula ibid., hlm. 269, cat. 29

[35] Ibid., hlm. 35

[36] Lihat uraian sebelumnya mengenai Yawadwipa, dan sebagainya

Dua contoh di atas dapat pula ditambah dengan contoh-contoh lain yang berasal dari awal abad V M juga. Pada tahun 449 kaisar Wen Ti (424–453) mengirim utusan ke She-p'o. Selain itu, sebenarnya ia juga berniat untuk mengirimkan kapal untuk menjemput Gunavarman di She-p'o.

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pelayaran langsung antara Indonesia dan Cina pada masa itu telah lazim dilakukan. Tentu kita dapat bertanya mengenai kebangsaan kapal-kapal tersebut. Fa-hsien menumpang kapal India. Bagaimana peran bangsa Indonesia dalam pelayaran ke Cina ini?

Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak zaman prasejarah telah mampu mengarungi lautan telah diakui oleh para peneliti. Akan tetapi, hubungan laut ke Cina bukan sekadar masalah pelayaran. Hubungan itu adalah bagian dari suatu perdagangan maritim yang bersifat internasional. Oleh karenanya, untuk dapat menyertai kegiatan tersebut bekal yang hanya berupa kemampuan melayari samudra tidak cukup. Jika ternyata bahwa bangsa Indonesia telah menyertai kegiatan pelayaran ke Cina, hal itu berarti bahwa bangsa Indonesia telah mampu membawa perdagangannya ke Cina.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa minat berdagang Cina adalah dengan Asia Barat. Dapatkah bangsa Indonesia memasarkan hasil daerahnya di Cina?

Pengalaman perdagangan internasional bangsa Indonesia dimulai dengan hubungan dagang dengan India. Hubungan dagang ini memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemahiran-kemahiran tertentu yang diperlukan agar dapat berhadapan dengan pedagang asing dengan taraf yang sama. Golongan yang berdagang dengan orang-orang asing harus mampu menumbuhkan organisasi perdagangan dan politik yang dapat menjamin kelancaran dan kelanggengan hubungan dagang itu. Dalam kenyataannya tidak semua daerah dapat menumbuhkan hal tersebut. Ada daerah-daerah yang hanya mencapai taraf perdagangan lokal. Daerah-daerah ini membawa hasilnya ke tempat-tempat pengumpulan di *entrepôt.* Dari tempat pengumpulan ini, hasil-hasil itu dipasarkan lebih lanjut ke negeri lain. Pusat-pusat pengumpul barang yang akan diperdagangkan adalah benih yang kemudian akan tumbuh menjadi kerajaan-kerajaan yang memperlihatkan ciri-ciri India. Bukti-bukti arkeologi yang tertua mengenai adanya kerajaan-kerajaan tersebut di Indonesia berasal dari abad V M.[37] Adanya kerajaan-kerajaan tersebut dapat kita simpulkan sebagai petunjuk bahwa hubungan perdagangan dengan India di sekitar abad V M telah membuahkan perubahan-

[37] Prasasti Kutai dan prasasti-prasasti Purnawarman di Jawa Barat

perubahan dalam bentuk tata pemerintahan. Sulit untuk membayangkan bahwa perubahan-perubahan demikian hanya disebabkan seorang pemimpin merasa tertarik pada sesuatu yang bersifat India. Perubahan itu adalah suatu bagian dari rangkaian perubahan yang terjadi dalam pranata masyarakat karena tuntutan objektif suatu hubungan perdagangan internasional. Van Leur telah menguraikan tentang bermacam faktor yang terdapat dalam struktur perdagangan zaman kuno. Tidak sulit untuk menduga bahwa dalam masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing telah timbul kecenderungan untuk menumbuhkan pola-pola masyarakat yang sama.

Salah satu ciri dari setiap perdagangan adalah adanya saingan. Pada waktu Cina Selatan berkembang menjadi suatu pasar yang baik untuk perdagangan dari luar, terbukalah kemungkinan baru untuk bangsa Indonesia memasarkan hasilnya. Pada mulanya pasar baru ini memang tertutup untuk hasil Asia Tenggara karena perdagangan Cina masih mengutamakan hasil Asia Barat. Dengan sendirinya para pedagang India yang memasuki pasar tersebut. Selain secara tradisional mereka telah berdagang dengan daerah penghasil barang-barang tersebut, mereka juga sudah paham akan cara-cara berdagang dengan Cina. Mengingat adanya faktor bersaing dalam perdagangan, para pedagang India tidak akan memberi peluang pada pedagang Indonesia untuk turut memasuki pasar Cina.

Sebuah berita dalam tambo dinasti Ch'i Selatan (479–502) menyebut tentang perdagangan sutra dengan pedagang-pedagang yang datang dengan kapal *K'un-lun*. K'un-lun adalah sebutan umum untuk bangsa-bangsa yang berasal dari daerah Lautan Selatan, yaitu bangsa-bangsa Asia Tenggara pada umumnya. Dalam berita tersebut di muka disebut mengenai kapal-kapal K'un-lun. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan apakah pedagang-pedagangnya juga orang-orang K'un-lun.[38] Selain itu, berita tersebut belum memberi kepastian apakah kapal-kapal K'un-lun itu kapal-kapal Indonesia. Ada kemungkinan kapal-kapal Funan mengadakan pelayaran angkutan ke Cina.

Sebuah berita yang pasti mengenai pelayaran orang Indonesia ke Cina adalah berita mengenai datangnya utusan dari Ho-lo-tan, sebuah negeri di She-p'o. She-p'o adalah Jawa. Jadi jelas bahwa utusan itu datang dari Indonesia. Ia datang pada bulan keempat tahun 430. Ia membawa kain dari India dan Gandhara.

---

[38] Terjemahan dalam kitab O.W. Wolters, Early Indonesian Commerce: (the merchants of) the K'un-lun ships, hlm. 78

Pada bulan ke-7 tahun 430 datang lagi seorang utusan dari Ho-lo-tan.[39] Ia membawa sepucuk surat dari rajanya. Isi surat tersebut menerangkan bahwa negerinya diancam oleh negara-negara tetangganya. Ia mohon agar kaisar memberi perlindungan dari jauh. Ia berharap agar Cina mengirimkan utusan ke negara-negara tersebut, dan meminta agar mereka jangan mengancam Ho-lo-tan. Selanjutnya ia mohon agar para pembesar di Kanton diperintahkan mengembalikan kapal-kapal Ho-lotan, dan jangan merampok maupun merusaknya.

Permohonan agar para pembesar di Kanton memperlakukan kapal-kapal Ho-lo-tan dengan wajar mengisyaratkan bahwa hubungan pelayaran antara Ho-lo-tan dan Cina telah berjalan sejak beberapa waktu sebelumnya. Rupa-rupanya tingkah laku para pembesar Kanton yang korup itu telah melampaui batas.

Berita tersebut memberikan kepastian tentang ikut sertanya bangsa Indonesia dalam perdagangan maritim di Asia pada masa itu. Sumber berita Cina pada masa itu tidak mempunyai catatan sejelas berita mengenai utusan Ho-lo-tan ini tentang kegiatan bangsa-bangsa K'un-lun yang lain.

Hubungan dagang antara pelbagai kerajaan di Indonesia dengan Cina pada umumnya disimpulkan dari kedatangan utusan-utusan mereka. Dalam hubungan ini dapat kita kutip pendapat Wolters mengenai nilai keterangan tersebut di atas. Dikemukakannya bahwa tidak semua utusan selalu ada hubungannya dengan usaha perdagangan. Ia menunjuk kepada perutusan dari P'oli dan Tan-tan. Utusan dari kedua kerajaan ini membawa surat untuk kaisar Cina yang tidak mengemukakan masalah perdagangan. Surat-surat tersebut berisi pujian terhadap kaisar karena jasanya untuk agama Buddha. Mengingat hal tersebut, juga tidak benar menafsirkan ketidakhadiran utusan dari sesuatu kerajaan Indonesia di Cina dalam kurun-waktu tertentu sebagai tanda bahwa hubungan dagang dengan Cina pada waktu itu menurun. *Kan-t'o-li*, salah sebuah kerajaan di Indonesia yang mulai mengirim utusan ke Cina sejak tahun 441. Kemudian tidak mengirim utusan lagi setelah tahun 455. Baru pada tahun 502 datang lagi utusan dari kerajaan tersebut, kemudian pada tahun 518, 520, 560, dan 563. Tampak bahwa Kan-t'o-li tidak begitu sering mengirimkan utusan ke Cina. Menurut Wolters, Kan-t'o-li adalah salah satu dari dua kerajaan Indonesia yang memegang peran sangat penting dalam perkembangan perdagangan pada abad V M. Ia menafsirkan bahwa

[39] Dalam berita Cina yang bersangkutan disebut Ho-lo-t'o, tetapi menurut para ahli yang dimaksud adalah Ho-lo-tan, Ibid., hlm. 151

justru kedudukannya yang kuat dalam perdagangan menyebabkan Kan-t'o-li tidak merasa perlu untuk menunjang perdagangannya itu dengan banyak mengirimkan utusan ke Cina.[40]

Dari berita-berita Cina mengenai dua kerajaan Indonesia tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada abad V M bangsa Indonesia telah memasuki perdagangan dengan Cina. Apakah isi perdagangan itu?

Mengingat bahwa pola konsumsi pasar Cina memberi nilai yang tinggi pada barang-barang yang diperdagangkan dari Asia Barat, para pedagang Indonesia harus dapat menyediakan barang dagangan yang dapat menyamai kedudukan barang-barang Asia Barat dalam penilaian orang Cina. Barang dagangan itu haruslah berupa barang bernilai tinggi untuk konsumsi kalangan atas. Ternyata kekayaan bumi Indonesia dapat menyediakan barang-barang tersebut. Bahan wangi-wangian dari Asia Barat dapat bersaing dengan bahan yang dihasilkan Indonesia. Misalnya pelbagai jenis kemenyan dan kayu harum seperti cendana. Bahkan kapur barus lebih dahulu dikenal umum di Cina daripada di Barat. Demikian pula pelbagai jenis rempah-rempah lambat laun memasuki pasar Cina. Ditambah pula dengan pelbagai hasil kerajinan dan binatang yang hanya terdapat di Indonesia.

Keberhasilan bangsa Indonesia untuk memasuki pasar perdagangan luar negeri Cina adalah suatu tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Hal itu merupakan suatu tahap nyata dalam perkembangan masyarakat Indonesia yang telah dimulai pada saat bangsa Indonesia berhubungan dagang dengan orang India.

Taraf perubahan nyata dalam masyarakat Indonesia pada abad V M yang dapat disimpulkan dari temuan-temuan prasasti diperkuat dengan bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menyertai perdagangan maritim internasional Asia. Seperti dikatakan oleh Wolters, keadaan tersebut hanya dapat dicapai jika kemampuan melayari lautan ditambah dengan suatu sikap terbuka dan bersahabat terhadap orang asing, penghargaan terhadap barang dagangan orang asing, adanya fasilitas pergudangan dan pelabuhan yang baik, dan khususnya adanya suatu kekuasaan yang dapat menjamin keamanan dan mendorong perkembangan perdagangan dengan mengadakan hubungan-hubungan luar negeri seperti yang dapat dilihat dari pengiriman utusan oleh raja-raja Indonesia ke Cina.[41] Walaupun tidak semua bagian Indonesia dapat mencapai taraf perkembangan tersebut, akibatnya terasa di seluruh kepulauan.

---

40 O.W. Wolters, op. cit., hlm. 164–167

41 Ibid., hlm. 155

Setelah bangsa Indonesia berdagang langsung dengan Cina, ia mendapatkan kedudukannya sendiri dalam perdagangan internasional. Kapal-kapal Indonesia melayari jalur-jalur pelayaran perdagangan dari India hingga Cina. Pada abad VII M, I-tsing, seorang pendeta Buddha Cina, bertolak ke India dari Indonesia dengan menumpang kapal Sriwijaya.

Hubungan dagang antara Indonesia sampai ke Cina, tentu tidak hanya menyebabkan orang-orang Indonesia sampai ke Cina, tetapi juga sebaliknya. Bilamana orang Cina mulai mengunjungi Indonesia tidak mudah untuk dipastikan. Fa-hsien yang mengunjungi Indonesia pada awal abad V M, dalam kisah perjalanannya tidak memberikan kesan bahwa orang Cina telah biasa datang di Indonesia. Walaupun pada masa itu sudah dapat diadakan pelayaran langsung dari Indonesia ke Cina, melihat pernilaian pihak penguasa Cina terhadap daerah ini untuk perdagangan mereka, mungkin kunjungan demikian kalaupun ada masih sangat jarang. Mungkin pengiriman utusan oleh Kaisar Liu Sung pada tahun 449[42] adalah awal kunjungan resmi orang Cina ke Indonesia. Selanjutnya orang-orang Cina semakin banyak mengunjungi Indonesia. Kisah perjalanan mereka sebagian dapat diikuti dari sumber-sumber resmi Cina.

Hubungan dagang dengan India dan Cina telah menempatkan Indonesia di gelanggang perdagangan internasional zaman kuno. Akan tetapi, pengaruh India dan Cina pada perkembangan sejarah Indonesia di zaman kuno berbeda. Hubungan dagang dengan India telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam bentuk tata negara di sebagian daerah Indonesia. Selain itu, telah pula terjadi perubahan dalam tata dan susunan masyarakatnya sebagai akibat penyebaran agama Buddha dan Hindu. Pengaruh hubungan dengan Cina jauh lebih kecil.

Untuk membandingkan secara teliti hubungan dagang Indonesia dengan India dan hubungannya dengan Cina tidaklah mudah. Sumber-sumber untuk mengungkapkan hubungan dagang dengan India jauh lebih sedikit daripada sumber mengenai hubungan dagang dengan Cina. Walaupun demikian, pengungkapan hubungan dagang dengan Cina mempunyai kesulitan sendiri yang disebabkan kesulitan menginterpretasikan sumber-sumbernya. Yang jelas ialah bahwa hubungan dagang dengan Cina nyata selalu melibatkan pihak penguasa di Cina. Sedang hubungan dagang dengan India lebih tampak sebagai hubungan antara pedagang walaupun tentu juga melibatkan pihak penguasa sesuai dengan pola zaman itu.

---

[42] Ibid., hlm. 36, 21

D. Proses Masuknya Pengaruh Budaya India

Krom mengatakan: "... orang tidak perlu membayangkan suatu peradaban yang luar biasa, yang dapat berdiri berhadapan setaraf dengan peradaban Hindu. Akan tetapi, jelas bahwa mereka (orang Hindu) tidak tiba di tengah-tengah orang-orang biadab."[43] Van Leur menganggap pernyataan Krom tersebut sangat negatif.[44] Selanjutnya ia mengatakan bahwa kunci untuk dapat menilai dengan tepat pengaruh budaya Hindu di Indonesia adalah perkiraan yang tepat tentang arti peradaban kuno Indonesia dalam arti seluas-luasnya.[45] Pendapatnya ini diajukan karena ia melihat bahwa para peneliti proses masuknya pengaruh budaya India kurang memerhatikan hal tersebut.

Proses masuknya pengaruh budaya India pada umumnya disebut penghinduan oleh para penelitinya. Istilah tersebut harus digunakan dengan hati-hati karena bukan hanya pengaruh Hindu yang terdapat, melainkan juga pengaruh agama Buddha. Dalam kenyataan di Indonesia keduanya kemudian tumbuh dalam bentuk koalitis, yaitu Siwa-Buddha.

Hubungan dagang antara orang Indonesia dan India telah mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India dalam budaya Indonesia. Bagaimana sesungguhnya proses yang terjadi belum dapat diungkapkan sepenuhnya oleh penelitian-penelitian yang telah dilakukan sejak abad yang lalu. Pada pokoknya pendapat para peneliti dapat dibagi dua. Pendapat pertama bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses tersebut. Pendapat kedua yang tumbuh lebih akhir memberikan peran aktif kepada bangsa Indonesia.

Para eksponen pendapat pertama selalu beranggapan bahwa telah terjadi kolonisasi oleh orang-orang India. Koloni-koloni orang India ini menjadi pusat penyebaran budaya India. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kolonisasi tersebut disertai pula oleh penaklukan. Hingga timbul gambaran yang melukiskan orang-orang India sebagai golongan yang menguasai orang Indonesia.[46] Dalam proses masuknya budaya India menurut gambaran di atas peran utama dipegang oleh golongan prajurit, yaitu kasta Ksatria. Oleh karenanya, Bosch menyebutnya sebagai *hipotesis ksatria*. Pendapat lain yang masih berpegang pada anggapan adanya kolonisasi memberikan peran pada golongan lain dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Hipotesis yang mula-mula diajukan oleh Krom memberikan peran kepada golongan

---

[43] N. J. Krom., op. cit., hlm. 54

[44] J.C. van Leur, op. cit., hlm. 255

[45] Ibid.

[46] F.D.K. Bosch "The Problem of the Hindu Colonisation of Indonesia", dalam Selected Studies in Indonesian Archaeology, 1961, hlm. 6

pedagang.[47] Krom tidak berpendapat bahwa golongan ksatria merupakan golongan yang terbesar di antara orang-orang India yang datang di Indonesia. Karena orang-orang itu datang untuk berdagang, golongan terbesar tentulah golongan pedagang. Mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peran dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungan mereka dengan penguasa-penguasa Indonesia. Krom mengisyaratkan kemungkinan adanya perkawinan antara pedagang-pedagang tersebut dengan perempuan Indonesia. Perkawinan demikian merupakan saluran penyebaran pengaruh yang penting. Oleh karena pedagang termasuk kasta waisya, Bosch menyebut hipotesis ini hipotesis waisya.[48]

Selain memberikan peran pada golongan yang berbeda, hipotesis Krom mempunyai perbedaan lain pula jika dibanding dengan *hipotesis ksatria*. Berdasarkan pengamatan pelbagai aspek budaya Indonesia-Hindu. Krom berpendapat bahwa unsur Indonesia dalam budaya tersebut masih sangat jelas. Ia berkesimpulan bahwa peran budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya Indonesia Hindu sangat penting. Hal tersebut tidak mungkin dapat terjadi jika bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan oleh *hipotesis ksatria.*

Hipotesis Krom mendapat penganut di kalangan yang luas. Akan tetapi, dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam penelitian, tumbuh pula pendapat yang beranggapan bahwa hipotesis tersebut masih kurang memberikan peran pada bangsa Indonesia. Walaupun Krom telah melihat adanya peran yang penting dari budaya Indonesia, masih terdapat kesan bahwa proses itu tidak sepenuhnya ditentukan oleh bangsa Indonesia. Van Leur mengajukan keberatan baik terhadap *hipotesis ksatria* maupun hipotesis waisya. Keberatan pertama adalah mengenai kolonisasi. Suatu kolonisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan ksatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Catatan demikian tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis di India. Di Indonesia pun tidak terdapat suatu tanda peringatan apa pun, misalnya dalam bentuk prasasti. Selain itu, suatu kolonisasi selalu disertai oleh pemindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal. Misalnya, sistem kasta, kerajinan, bentuk rumah, tata kota, bahasa, dan pergaulan. Dalam kenyataannya, apa yang terdapat di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di India. Kalaupun ada pedagang-pedagang India yang menetap, mereka bertempat tinggal di perkampungan-perkampungan khusus. Sampai sekarang kita masih menemukan Kampung Keling di beberapa tempat di Indonesia barat. Kedudukan mereka tidak berbeda dengan rakyat biasa di tempat itu.

---

[47] N.J. Krom, op. cit., hlm. 90

[48] F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 7

Hubungan mereka dengan penguasa hanyalah dalam bidang perdagangan. Dari mereka tidak dapat diharapkan pengaruh budaya yang membawa perubahan-perubahan dalam bidang tata negara dan pandangan agama. Hal ini lebih pasti lagi kalau kita ingat bahwa sebagian besar pedagang tingkat pedagang keliling[49] seperti mereka ini berasal dari kalangan masyarakat yang tidak tinggi.[50] Mengingat sifat unsur-unsur budaya India yang terdapat dalam budaya Indonesia, van Leur cenderung untuk memberikan peran penyebaran budaya India pada golongan Brahmana. Mereka datang atas undangan para penguasa Indonesia. Budaya yang mereka perkenalkan adalah budaya golongan brahmana.

Apa yang diuraikan tersebut adalah proses masuknya pengaruh budaya India menurut hipotesis van Leur. Masih belum jelas apa yang mendorong terjadinya proses tersebut. Van Leur berpendapat bahwa dorongan itu adalah akibat kontak dengan India melalui perdagangan. Bukan hanya melalui orang-orang India yang datang, melainkan mungkin juga karena orang-orang Indonesia melihat sendiri keadaan di India.[51] Terdorong oleh keinginan untuk dapat berhadapan dengan orang-orang India dengan taraf yang sama dan terdorong pula untuk meningkatkan keadaan negerinya, mereka mengundang brahmana.[52]

Bosch menyetujui pendirian dengan van Leur. Berpangkal tolak dari sifat unsur-unsur budaya India yang diamatinya dalam budaya Indonesia, ia juga berpendapat hanya golongan cendekiawanlah yang dapat menyampaikannya kepada bangsa Indonesia. Golongan tersebut ia sebut clerks dan untuk proses yang terjadi antara budaya Indonesia dan India ia mengusulkan istilah *penyuburan*.[53] Ia melihat dua jenis proses penyuburan.

Yang pertama dan kemungkinan telah terjadi lebih dahulu adalah proses melalui pendeta agama Buddha.[54] Awal hubungan dagang antara Indonesia dan India bertepatan pula dengan perkembangan yang pesat dari agama Buddha.

Pendeta-pendeta agama tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia melalui jalan-jalan perdagangan tanpa menghiraukan kesulitan-kesulitannya. Mereka mendaki pegunungan Himalaya untuk menyebarkan agamanya di Tibet. Dari sini kemudian mereka melanjutkan usaha mereka ke utara hingga

---

49 Istilah van Leur: peddling traders

50 J.C. van Leur, op. cit., hlm. 89–110

51 Ibid., hlm. 99

52 Bandingkan dengan uraian pada hlm. 21 dan 22

53 F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 20. Istilah yang diusulkannya ialah fecundation

54 Lihat juga G. Coedes, op. cit., hlm. 1

akhirnya sampai ke Cina. Kedatangan mereka biasanya telah diberitakan terlebih dahulu. Setelah mereka tiba di tempat tujuan biasanya mereka berhasil bertemu dengan kalangan istana. Dengan penuh ketekunan kemudian mereka mengajarkan agama mereka. Kemudian dibentuklah sebuah sanggha dengan bhiksu-bhiksu-nya. Melalui bhiksu ini timbul suatu ikatan langsung dengan India, tanah suci agama Buddha. Kedatangan bhiksu-bhiksu India di pelbagai negeri ternyata mengundang arus bhiksu dari negeri-negeri tersebut ke India. Para bhiksu itu kemudian kembali dengan membawa kitab-kitab suci, relik, dan kesan-kesan. Bosch menyebut gejala sejarah ini arus balik.[55] Bosch menarik perhatian kita kepada manifestasi pengaruh arus balik di negeri asal para bhiksu. Khususnya yang tampak pada seni agama Buddha. Ternyata bahwa baik di Indonesia maupun di daerah Asia Tenggara lainnya telah tumbuh seni agama Buddha baik yang berasal dari bhiksu India maupun arus balik tidak menghasilkan suatu seni India di perantauan. Gejala yang tampak pada seni ini terdapat pula pada bidang-bidang pengaruh agama Buddha lainnya.

Aliran agama dari India yang lain yang meninggalkan pengaruh di Indonesia adalah agama Hindu. Berbeda dengan para bhiksu agama Buddha, para brahmana agama Hindu tidak dibebani kewajiban untuk menyebarkan agama Hindu. Pada dasarnya seseorang tidak dapat menjadi Hindu, tetapi seseorang itu lahir sebagai Hindu. Mengingat hal tersebut, lebih menariklah masalah adanya agama Hindu di Indonesia. Bagaimana dapat terjadi bahwa orang-orang Indonesia yang pasti pada mulanya tidak dilahirkan sebagai Hindu dapat beragama Hindu.

Untuk dapat menjelaskan hal tersebut di atas kita lihat lebih dahulu watak khas agama Hindu. Agama Hindu pada dasarnya bukanlah agama untuk umum dalam arti bahwa pendalaman agama tersebut hanyalah mungkin oleh golongan brahmana. Merekalah yang dibenarkan mendalami kitab-kitab suci.

Dalam kenyataan tentu terdapat pelbagai tingkat keketatan pelaksanaan prinsip tersebut. Hal itu tergantung dari aliran sekte yang bersangkutan. Adapun sekte agama Hindu yang terbesar pengaruhnya di Jawa dan Bali adalah sekte Saiwa-Siddhanta.

Aliran Saiwa-Siddhanta sangat esoteris. Seseorang yang dicalonkan untuk menjadi seorang brahmanaguru harus mempelajari kitab-kitab agama selama bertahun-tahun sebelum ia diuji, setelah diuji, diizinkan menerima inti ajarannya langsung dari seorang brahmanaguru. Brahmana inilah yang selanjutnya membimbing hingga ia siap untuk ditahbiskan menjadi brahmanaguru pula. Setelah ditasbihkan ia dianggap telah disucikan oleh

[55] F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 14. Ia menyebutnya counter-current

Siwa dan dapat menerima kehadirannya dalam tubuhnya pada upacara-upacara tertentu.[56] Dalam keadaan demikian ia dianggap dapat mengubah air menjadi amrta.

Brahmana seperti tersebut di atas diundang ke Indonesia. Mereka melakukan upacara khusus untuk dapat menghindukan seseorang. Upacara demikian disebut vratyastoma.[57] Pada dasarnya kesaktian mereka itulah yang menyebabkan raja-raja Indonesia mengundang para brahmana ini. Mereka mendapat kedudukan yang terhormat di keraton-keraton dan menjadi inti golongan brahmana Indonesia yang kemudian berkembang. Penguasaan yang luas dan mendalam mengenai kitab-kitab suci menempatkan mereka sebagai purohita yang memberi nasihat kepada raja bukan hanya dalam bidang keagamaan, melainkan juga mengenai pemerintahan, peradilan, perundang-undangan, dan sebagainya.[58]

Dari uraian di atas agaknya jelas bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya India. Hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses tersebut. Akan tetapi, proses itu sendiri adalah sesuatu yang terpisah dari proses perdagangan. Akibat proses tersebut, misalnya perubahan dalam birokrasi pemerintahan, memang dapat berakibat pada jalannya perdagangan, tetapi inti perubahan yang terjadi sebagian besar terletak pada bidang keagamaan. Hal ini bukan hanya berlaku untuk bidang-bidang yang jelas bercorak agama seperti sastra, seni rupa, dan seni bangunan suci, tetapi juga berpengaruh pada tata upacara di kraton, organisasi ketatanegaraan, dan kelembagaan masyarakat.[59]

Penyuburan budaya Indonesia yang terjadi melalui kontak dengan golongan agama dari India sebagian besar langsung berpengaruh pada golongan "elite" zaman kuno di Indonesia. Mengingat kedudukan golongan ini dalam masyarakat, dengan sendirinya akan tersebar pengaruh di kalangan yang lebih luas. Bagaimanakah wujudnya?

Para ahli yang telah meneliti masyarakat Indonesia kuno semua berpendapat bahwa unsur budaya Indonesia lama masih tampak dominan sekali dalam semua lapisan masyarakat. Salah satu hal yang mencolok dalam suatu masyarakat Hindu adalah adanya kasta. Keterangan-keterangan dari sumber-sumber epigrafi dan sastra kuno, maupun pengamatan terhadap keadaan di Bali sekarang, tidak menggambarkan keadaan seperti di India. Kasta memang ada. Suatu indikasi bahwa masalah tersebut dipahami.

---

[56] F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 17

[57] G. Coedès, op. cit., hlm. 24

[58] Dalam pewayangan kita mengenal tokoh demikian, yaitu Drona

[59] F.D.K. Bosch., op. cit., hlm. 11

Akan tetapi, ciri-ciri kasta seperti di masyarakat India tidak terdapat. Bosch menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia melaksanakan teori tentang kasta tetapi tidak memindahkan wujudnya yang telah tercipta dalam perkembangan di India. Demikian pula dalam seni. Hingga sekarang para ahli belum berhasil untuk menghubungkan dengan pasti gaya seni bangunan candi dengan salah satu daerah di India. Usaha tersebut diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai daerah-daerah di India yang terdapat pengaruhnya di Indonesia. Mengingat pendapat-pendapat baru yang telah berkembang mengenai proses masuknya budaya India, usaha demikian tampaknya tidak begitu relevan lagi. Bahwa bangunan candi adalah sebuah bangunan yang mengandung unsur budaya India adalah jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para seniman Indonesia hanya menggunakan dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam *Silpasastra* sebagai dasar untuk konsep pelaksanaannya.[60] Bangsa Indonesia hanya mengambil unsur budaya India sebagai dasar ciptaannya, hasilnya adalah sesuatu yang bercorak Indonesia.

Penelitian bahan epigrafi dan sastra kuno serta ekskavasi arkeologi masih dapat mengungkapkan keterangan lebih banyak lagi mengenai corak budaya Indonesia kuno yang mendapat pengaruh budaya India. Akan tetapi, inti proses masuknya pengaruh budaya India agaknya telah jelas. Proses tersebut telah dimungkinkan karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Akan tetapi, proses yang mengakibatkan penyuburan budaya Indonesia telah terjadi karena inisiatif bangsa Indonesia. Dalam proses tersebut bangsa Indonesia telah bertindak selektif. Unsur-unsur budaya India diambil intinya dalam proses penyuburan budaya Indonesia. Dengan demikian, ternyata unsur-unsur budaya India tidak pernah menjadi unsur yang dominan dalam kerangka budaya Indonesia sebagai keseluruhan.

[60] Silpasastra ialah sebuah kitab pegangan yang memuat pelbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan

Bab II
Kerajaan-Kerajaan Tertua

A. Kutai

1. Sumber-Sumber

Walaupun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kerajaan tertua di Indonesia terletak di Kalimantan, sedemikian jauh pulau tersebut sedikit sekali diperhatikan oleh para penulis tambo di daratan Cina. Hal ini cukup menarik, karena biasanya para penulis tambo Cina rajin sekali menuliskan hal-hal aneh yang mereka ketahui dari suatu daerah asing. Berita tertua Cina yang bertalian dengan salah satu daerah di Kalimantan berasal dari zaman dinasti T'ang (618–906),[1] padahal berita-berita Cina yang berhubungan dengan Jawa sudah ada sejak abad V M,[2] dan Sumatra pada awal abad VI M, pada zaman pemerintahan dinasti Liang (502–56).[3]

Tidak adanya perhatian dari pihak Cina itu kemungkinan sekali disebabkan Kalimantan tidak terletak pada jalan niaga Cina yang utama, walaupun di daerah Serawak misalnya, ditemukan beberapa buah benda yang berasal dari zaman dinasti Han yang mulai berkuasa pada tahun 220 sebelum Masehi.[4] Ternyata, kurangnya perhatian terhadap sejarah daerah Kalimantan itu terus melanjut di masa-masa sesudahnya, sehingga di dalam keseluruhan sejarah kebudayaan Asia Tenggara misalnya, daerah ini masih tetap merupakan suatu daerah yang terlupakan.[5]

Di daerah yang berada di luar jangkuan perhatian Cina itulah, untuk pertama kalinya kita menemukan bukti-bukti tertua akan adanya suatu kehidupan masyarakat yang bercorak keindiaan, yaitu di Sulawesi Selatan dan di Kalimantan Timur. Dengan ditemukannya arca Buddha yang terbuat

---
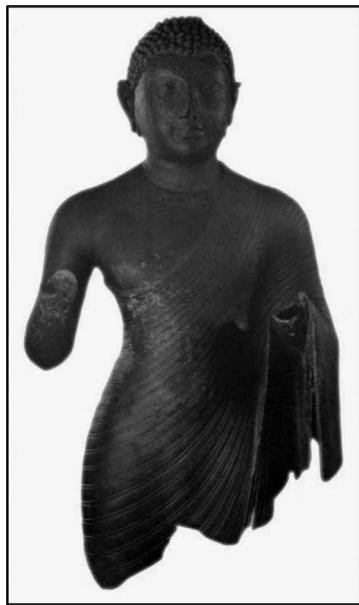
1 W.P. Groeneveldt, "Notes on the Malay Archipelago and Malacca compiled from Chinese Sources", VBG, 39, 1879, hlm. 60

2 Ibid., hlm. 6

3 Ibid., hlm. 60

4 Tom Harrison & Stanley J. O'Connor, Gold and Megalithic Activity in Prehistoric and Recent West Borneo, Data Paper no. 77, 1970, XIV, 15

5 Ayatrohaèdi, "Tom Harrison and Stanley J. O'Connor, Gold and Megalithic Activity in Prehistoric and Recent West Borneo" (Boekbesprekingen), BKI, 130, 1974, hlm. 186

(a)

(b)

Foto 2.1 (a) Arca Buddha, perunggu, Sempaga, Sulawesi Selatan, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas); (b) Arca Buddha, batu, Bukit Seguntang, Palembang, koleksi Museum Badaruddin (*Sumber*: Esh)

dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan,[6] untuk pertama kalinya kita mendapatkan bukti tentang adanya hubungan serta pengaruh tertua budaya India di Indonesia. Penemuan arca ini sangat penting karena dapat memberi petunjuk tentang bagaimana taraf hidup dan budaya bangsa Indonesia pada waktu tersebut. Berdasarkan ciri-ciri ikonografinya dapat ditentukan bahwa arca Sempaga ini berasal dari mazhab seni Amarawati dan rupanya dibuat di sana, kemudian dibawa ke Indonesia, mungkin sebagai barang dagangan, tetapi mungkin pula sebagai barang persembahan untuk suatu wihara atau bangunan suci agama Buddha. Selain di Sempaga, arca-arca langgam Amarawati ini juga ditemukan antara lain di Jember dan Bukit Seguntang, sementara di Kota Bangun (Kalimantan Timur), ditemukan arca Buddha yang memperlihatkan langgam seni arca Gandhara.[7] Menurut Foucher dan Bosch, ciri seni Gandhara tampak pada sikap tangan dan hiasan jala pada telapak tangan arca Buddha Kota Bangun.

Di samping arca-arca Buddha, juga ditemukan arca-arca yang memperlihatkan sifat-sifat kehinduan, di antaranya mukhalingga yang ditemukan di Sepauk, dan arca Ganesa yang ditemukan di Serawak.[8] Walaupun daerah Kalimantan dan Sulawesi berada di luar perhatian Cina, tidak berarti bahwa kedua daerah tersebut tertutup sama sekali dari kemungkinan mengadakan hubungan dengan daerah luar. Temuan-temuan yang disebutkan di atas merupakan salah satu buktinya. Hubungan tersebut tentulah pada mulanya melalui hubungan niaga, yang kemudian berkembang menjadi hubungan agama dan budaya. Melalui hubungan niaga itu, turut pula para pendeta yang bermaksud menyebarkan agama, yang kemudian disusul dengan perginya orang Indonesia ke daerah asal para guru agama atau pendeta itu. Hubungan seperti itu sudah berlangsung cukup lama.[9] Di dalam proses terjadinya hubungan timbal balik seperti itu, masyarakat-masyarakat setempat yang sudah menetap di beberapa daerah tertentu, menerima budaya dan peradaban baru itu.

a. Prasasti

Selain benda-benda berupa arca seperti yang disebutkan di atas, dari daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Bukit Berubus, Muara Kaman pada tahun 1879 ditemukan beberapa buah prasasti yang dipahatkan pada tiang batu. Tiang batu itu disebut yupa, yaitu nama yang disebutkan pada prasasti-prasastinya sendiri. Sampai saat ini telah ditemukan tujuh buah yupa, dan

[6] F.D.K. Bosch, 'Het Bronzen Buddha-beeld van Celebes Westkust", TBG, 73, 1933, hlm. 495–513

[7] A.J. Bernet Kempers, *Ancient Indonesian Art*, 1959, hlm. 31–32; F.D.K. Bosch, op. cit.; A. Foucher 1918, hlm. 304–310

[8] N.J. Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis* 1931, hlm. 75–76

[9] G. Coedès, *Les Etat Hindouises d'Indochine et d'Indonésie*, 1948, hlm. 51–52

masih ada kemungkinan yupa yang lain belum ditemukan. Prasasti-prasasti yang ditemukan di Kalimantan Timur itu mula-mula ditemukan hanya sebanyak empat buah yupa,[10] tetapi kemudian tiga buah yupa yang lainnya ditemukan lagi.[11] Menurut Kern, huruf yang dipahatkan pada yupa itu adalah huruf Pallawa yang berasal dari awal abad V M, sedangkan bahasanya ialah bahasa Sanskerta. Semuanya dikeluarkan atas titah seorang penguasa daerah itu pada masa tersebut, yang bernama Mulawarman, yang dapat dipastikan bahwa ia adalah seorang Indonesia asli, karena kakeknya masih mempergunakan nama Indonesia asli, Kundungga.

Prasasti yang menyebutkan silsilah Mulawarman, raja terbesar di daerah Kutai kuno itu, berbunyi sebagai berikut:

çrimatah çri-narendrasya,
kundungasya mahatmanah,
putro çvavarmmo vikhyatah,
vançakartta yathançuman,
tasya putra mahatmanah,
trayas traya ivagnayah,
tesan trayanam pravarah,
tapo-bala-damanvitah,
çri mulavarmma rajendro,
yastva bahusuvarnnakam,
tasya yajñasya yupo 'yam,
dvijendrais samprakalpitah.

Terjemahan:

Sang Maharaja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aswawarmman namanya, yang seperti sang Angsuman (= dewa Matahari) menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarmman mempunyai putra tiga, seperti api (yang suci) tiga. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarmman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarmman telah mengadakan kenduri (selamatan yang dinamakan) emas-amat-banyak. Untuk peringatan kenduri (selamatan) itulah tugu batu ini didirikan oleh para brahmana.[12]

---
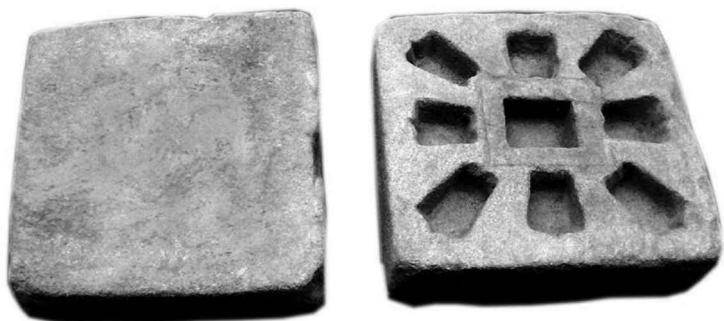
10 B.Ch. Chhabra, "Expansion of Indo-Aryan Culture, JASB, 33, 1935, hlm. 45; N.J. Krom, Zaman Hindu, 1954, hlm. 16

11 B.Ch. Chhabra, "Three more yupa inscriptions of King Mulawarman from Kutai (East Borneo)", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 370–374

12 R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia I, 1952, hlm. 9

(a)

(b)

Foto 2.2 (a) Prasasti *Yupa*, Muara Kaman, Kalimantan Timur, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas); (b) peripih, batu, Muara Kaman, Kalimantan Timur (*Sumber*: Esh)

Dari prasasti itu dapat kita ketahui bahwa sedikitnya ada tiga angkatan dalam keluarga, dimulai dengan raja Kundungga yang mempunyai anak bernama Aswawarman, dan Aswawarman yang mempunyai tiga orang anak, seorang di antaranya bernama Mulawarman.

Yang menarik dari prasasti ini ialah berita yang menyebutkan bahwa pendiri keluarga kerajaan (= *vansakartta/wangsakarta*) ialah Aswawarman, dan bukan Kundungga yang dianggap sebagai raja yang pertama. Apakah pengertian wangsakarta dalam prasasti ini ditujukan kepada pengertian keluarga yang sudah berbudaya India, yang antara lain ditandai dengan pemakaian nama yang berbau India? Karena Kundungga sendiri jelas bukan nama yang berbau India, walaupun ia memang disebutkan sebagai ayah Aswawarman dan pernah menjadi raja, tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja. Jika kita ketahui, bahwa pada saat sekarang ada nama Bugis yang mirip dengan Kundungga, yaitu Kadungga, barangkali tidak akan terlalu jauh dari kebenaran, seandainya Kundungga dianggap sebagai orang Indonesia asli yang untuk pertama kalinya menyentuh budaya India, tetapi belum sepenuhnya menganut pengaruh baru tersebut. Di mulai dengan Aswawarman dan dilanjutkan oleh Mulawarman, kita berhadapan dengan nama-nama yang sudah berbau India, dan berdasarkan berita dari prasasti-prasastinya juga jelas, bahwa pada waktu itu agama yang dipeluk agama yang berasal dari India juga. Apakah mungkin, seseorang yang dilahirkan bukan sebagai orang India yang tergolong ke dalam kasta-kasta sejak mereka dilahirkan, menyamakan dirinya sama sekali sederajat dengan orang India, seperti yang diperlihatkan oleh Mulawarman?

Prasasti lain yang dikeluarkan oleh Mulawarman, berbunyi sebagai berikut:

çrimad-viraja-kirtteh
rajñah çri-mulavarmmanah punyam
çrnantu vipramukhyah
ye canye sadhavah purusah
bahudana-jivadanam
sakalpavrksam sabhumidanañ ca
tesam punyagananam
yupo 'yam stahipito vipraih

Terjemahan:

Dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarmman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah

banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa (yang memberi segala keinginan), dengan sedekah tanah (yang dihadiahkan). Berhubung dengan semua kebaikan itulah tugu ini didirikan oleh para brahmana (sebagai peringatan).[13]

Prasasti yang ketiga berbunyi sebagai berikut:

sri-mulavarmmana rajña

yad dattan tila-parvvatam

sa-dipamalaya sarddham

yupo yam likhitas tayoh

Terjemahan:

Tugu ini ditulis untuk (peringatan) dua (perkara) yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak (kental), dengan lampu serta malai bunga.[14]

Masih ada lagi prasastinya yang lain, berbunyi:

srimato nrpamukhyasya

rajñah sri-mulavarmmanah

danam punyatame ksetre

yad dattam vaprakesvare

dvijatibhyo gnikalpebhyah

vinsatir nggosahasrikam

tasya punyasya yupo yam

krto viprair ihagataih

Terjemahan:

Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para brahmana yang seperti api, (bertempat) di tanah yang sangat suci (bernama) Waprakeswara. Untuk (peringatan) akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para brahmana yang datang di tempat ini.[15]

Prasasti yang lainnya yang ditemukan belakangan, berbunyi sebagai berikut:

sri-mulavarmma rajendra(h) sama vijitya partthi(van)

karadam nrpatimms cakre yatha raja yudhisthirah

---

13 J.Ph. Vogel, BKI, 74, 1918, hlm. 214

14 B.Ch. Chhabra, op. cit., hlm. 372

15 J.Ph. Vogel, op. cit.

catvarimsat sahasrani sa dadau vapprakesvare
ba ... trimsat sahasrani punar ddadau
malam sa punar jivadanam pritagvidham
akasadipam dharmmatma partthivendra (h) svake pure
... ... mahatmana
yupo yam sth (apito) viprair nnana desad iha (gataih //)

Terjemahan:

Raja Mulawarman yang tersohor telah mengalahkan raja-raja di medan perang, dan menjadikan mereka bawahannya seperti yang dilakukan oleh raja Yudisthira. Di waprakeswara raja Mulawarman menghadiahkan (sesuatu) 40 ribu, lalu 30 ribu lagi. Raja yang saleh tersebut juga memberikan jivadana dan cahaya terang (?) di kotanya. Yupa ini didirikan oleh para brahmana yang datang ke sini dari pelbagai tempat.[16]

Dari prasasti-prasastinya yang sudah ditemukan sampai saat ini, dapat diketahui nama beberapa orang tokoh, serta bagaimana kira-kira kehidupan keagamaan pada waktu itu. Akan tetapi, sedemikian jauh tidak dapat diketahui, bagaimana kehidupan dan keadaan masyarakat pada umumnya.

Bahan yang sampai kepada kita belum cukup untuk mengungkapkan keadaan zaman tersebut secara lengkap dan menyeluruh, sehingga pengetahuan mengenai zaman tersebut, untuk sementara terbatas pada sumber yang ada.

b. Temuan Arkeologi

Kecuali prasasti *yupa* dan arca Buddha dari Kota Bangun, di wilayah Kalimantan Timur ditemukan pula peninggalan-peninggalan arkeologi yang menunjang bukti keberadaan kerajaan Mulawarman dan bahkan kelompok-kelompok masyarakat sebelum masa Mulawarman.

Peninggalan yang berasal dari masa sebelum Mulawarman ditemukan di gua-gua di sepanjang Sungai Jelai, Tepian Langsat, Kabupaten Kutai Timur. Peninggalan tersebut berupa lukisan cap tangan pada dinding gua. Diperkirakan gua-gua tersebut merupakan permukiman masa prasejarah di wilayah Kalimantan Timur.

Di Bukit Berubus, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, tempat ditemukannya prasasti yupa, banyak ditemukan arca-arca perunggu oleh para penggali liar pada tahun 90-an. Sayang arca-arca tersebut tidak ada

[16] B.Ch. Chhabra, op. cit., hlm. 372–373

(a)

(b)

Foto 2.3 (a) Lukisan cap tangan, gua Tewet, Sungai Jelai, Kalimantan Timur (*Sumber*: T.A.); (b) Arca Siwa dan arca Nandiswara, Gunung Kombeng, Kalimantan Timur, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Esh)

yang tersimpan di museum sehingga tidak dapat diidentifikasi jenis dan pertanggalannya.

Ekskavasi yang diadakan di situs tersebut menemukan sisa-sisa bangunan (mungkin candi) dari batu kapur, tetapi tinggal dasar pondasi bangunan saja, dan beberapa fragmen batu berpelipit yang jelas merupakan komponen bangunan. Di tempat lain, masih di situs yang sama, ditemukan batu peripih, yang biasanya diletakkan di dalam sumuran candi. Peripih tersebut ditemukan dalam keadaan kosong. Meskipun tidak banyak data yang didapatkan dari penemuan-penemuan tersebut, setidaknya kita dapat memperkirakan adanya kegiatan keagamaan di tempat itu, yang kemungkinan sezaman dengan Mulawarman.

Wilayah Kalimantan Timur yang lain yang juga memiliki peninggalan Hindu adalah Desa Long Bagun, di daerah hulu Sungai Mahakam. Di desa tersebut terdapat sebuah nandi (batu), tetapi tidak ada temuan sisa bangunan atau arca lain. Nandi di Desa Long Bagun ini masih dalam kondisi utuh. Di daerah Kota Bangun juga ditemukan dua buah fragmen nandi dari batu, yang sudah sangat aus, jadi tidak jelas lagi bentuknya. Juga tidak dapat ditentukan dengan pasti pertanggalannya, sehingga nandi-nandi itu, baik dari Long Bagun maupun Kota Bangun, belum jelas apakah semasa dengan Mulawarman atau tidak.

Sejumlah arca yang ditemukan di dalam gua Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, diperkirakan berasal dari periode yang lebih muda dari Mulawarman, mungkin dari abad VIII–IX M.

Meskipun ditemukan bukti keberadaan masyarakat penganut agama Hindu dari masa yang lebih muda dari masa Mulawarman, belum diketahui dengan jelas bagaimana hubungannya dengan kerajaan Mulawarman.

2. Kehidupan Masyarakat dan Agama

Berdasarkan silsilahnya dapat dipastikan bahwa Kundungga adalah orang Indonesia asli, yang barangkali untuk pertama kalinya tersentuh oleh pengaruh budaya India. Sedemikian jauh, Kundungga sendiri masih tetap mempertahankan ciri-ciri keindonesiaannya, dan itu pulalah rupanya yang menyebabkan ia tidak dianggap sebagai pendiri keluarga raja. Dari data yang sedikit itu dapat disimpulkan bahwa rupanya pengertian keluarga raja pada waktu itu terbatas kepada keluarga kerajaan yang telah menyerap budaya India di dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut prasasti yang ada, penyerapan budaya itu mulai terlihat pada waktu Aswawarman, anak Kundungga, menjadi raja, yaitu dipergunakannya nama yang berbau India sebagai nama

pengenalnya. Oleh karena itulah yang dianggap sebagai pendiri keluarga raja adalah Aswawarman, dan bukan Kundungga.

Mengingat bahwa kehidupan yang bersifat Hindu sangat ketat terikat kepada peraturan yang disebut kasta, akan timbul pertanyaan, apakah mungkin seseorang yang dilahirkan tidak sebagai orang Hindu dapat memperoleh perlakuan sebagai orang Hindu dan terdaftar ke dalam salah satu kasta? Di dalam kepercayaan Hindu, seseorang yang telah tercemar dan karenanya dikeluarkan dari kasta, dapat diterima kembali masuk ke dalam kastanya, setelah melalui upacara penyucian diri yang disebut vratyastoma. Melalui upacara yang cukup berat ini, segala macam kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan oleh seorang anggota kasta dapat dihapus, dan hukuman yang pernah ditimpakan kepadanya berupa pengucilan dari kastanya, dapat dihapuskan juga. Dengan kata lain, seseorang yang pernah dikeluarkan dari kastanya karena melakukan kesalahan dan dosa yang cukup berat, dapat diterima kembali menjadi anggota kastanya dengan melalui upacara *vratyastoma* ini. Upacara *vratyastoma* inilah yang rupanya dijadikan jalan oleh orang-orang Indonesia yang sudah terkena pengaruh India itu, untuk meresmikannya sebagai anggota masyarakat suatu kasta yang dikenal di dalam agama Hindu. Upacara penerimaan orang luar kasta ke dalam kasta itu, dilakukan dengan memerhatikan kedudukan asal orang yang bersangkutan. Karena pendeta Indonesia sendiri tentu saja pada taraf pertama tidak berhak memimpin upacara *vratyastoma*, dapat dipastikan bahwa pada mulanya yang memimpin upacara tersebut ialah para brahmana agama Hindu yang langsung datang atau didatangkan dari India. Dalam hal ini hampir dapat dipastikan bahwa pendeta yang memimpin upacara vratyastoma untuk Aswawarman adalah pendeta India. Akan tetapi, ketika upacara itu dilakukan terhadap Mulawarman, kemungkinan sekali upacara itu sudah dipimpin oleh pendeta Indonesia sendiri. Dalam hal ini, para brahmana yang berulang kali disebutkan pada prasasti-prasastinya, dengan sendirinya tentulah sebagian terdiri dari kaum brahmana India, dan sebagian lainnya kaum brahmana orang Indonesia asli.

Dari semua prasasti *yupa*, hampir tidak ada kemungkinan untuk mengungkapkan bagaimana kira-kira kehidupan kemasyarakatan pada zaman kerajaan Kutai kuno.[17] Hal ini disebabkan prasasti-prasasti itu boleh dikatakan tidak sedikit pun berbicara tentang masyarakatnya. Ini tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan masyarakat masa tersebut. Ditulisnya prasasti-prasasti Mulawarman dengan mempergunakan

---

[17] Nama Kutai digunakan oleh para peneliti (sejak zaman Belanda) untuk menamakan kerajaan Mulawarman, karena prasasti-prasasti yupa tidak menyebut nama kerajaan

bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, merupakan petunjuk bagi kita untuk menduga bagaimana keadaan masyarakat ketika itu. Walaupun tidak jelas, dapat dipastikan bahwa ketika itu sudah ada sebagian penduduk Kutai kuno yang hidup dalam suasana peradaban India. Mengingat bahwa bahasa Sanskerta pada dasarnya bukanlah bahasa rakyat India sehari-hari, melainkan lebih merupakan bahasa resmi untuk masalah-masalah keagamaan, dapatlah disimpulkan bahwa ketika itu di Kutai kuno sudah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta. Ini berarti bahwa kaum brahmana pada masa itu sudah merupakan suatu golongan tersendiri di dalam masyarakat Kutai kuno.

Golongan lainnya ialah kaum ksatria, yang terdiri dari kaum kerabat Mulawarman. Golongan ini sampai pada masa tersebut rupanya masih terbatas kepada orang-orang yang sangat erat hubungannya dengan raja saja. Di luar kedua golongan yang secara resmi hidup dalam suasana peradaban India itu, masih terdapat golongan lain yang boleh dikatakan berada di luar pengaruh India. Mereka adalah rakyat Kutai kuno pada umumnya, yang terdiri dari penduduk setempat, dan masih memegang teguh agama asli leluhur mereka. Barangkali di samping mereka yang terdiri dari penduduk asli, juga terdapat kaum brahmana yang berasal dari India, yang bagaimanapun juga, tentu telah turut memegang peran yang cukup penting dalam usaha penghinduan keluarga raja Mulawarman. Masih menjadi pertanyaan apakah upacara yang disebutkan di dalam prasasti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di India. Namun, jika dilihat jenis-jenis benda yang dihadiahkan raja kepada kaum brahmana, seperti lembu, minyak (menurut Chhabra: biji wijen), dan lampu, dapat diperkirakan bahwa upacara dilakukan berpedoman pada aturan-aturan dari India. Akan tetapi, sejauh mana aturan itu ditaati, termasuk penggunaan musik untuk mengiringi upacara, belum dapat dipastikan karena sedikitnya data.

Beberapa istilah dalam prasasti belum dapat dimengerti maknanya dengan jelas, misalnya jivadana. Apakah dapat diartikan menyedekahkan binatang atau ternak atau mungkin berarti pemberian pengampunan atau membatalkan hukuman mati?[18] Sayang sekali, bukti-bukti yang ada tidak memungkinkan lebih banyak menarik kesimpulan.

Berlainan dengan tentang masyarakatnya, kita lebih banyak tahu tentang kehidupan keagamaan pada zaman Mulawarman. Ini antara lain disebabkan semua prasasti yang telah ditemukan sampai saat ini membicarakan upacara selamatan di dalam memperingati salah satu kebaikan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Mulawarman. Disebutkannya nama Angsuman, yaitu sebutan dewa matahari di dalam agama Hindu, memberikan kepastian kepada kita

---

[18] B.Ch. Chhabra, ibid., hlm. 373

Foto 2.4 Prasasti Sangguran di tempat penyimpanannya sekarang di Skotlandia
(*Sumber*: Srs)

bahwa setidak-tidaknya Mulawarman adalah penganut agama Hindu. Petunjuk ke arah ini lebih jelas lagi karena di dalam prasastinya yang lain disebutkan upacara sedekah yang dilakukan oleh Mulawarman bertempat di waprakeswara, sebidang tanah yang dianggap suci. Di dalam upacara itu telah dihadiahkan sebanyak 20.000 ekor sapi untuk para brahmana, sehingga untuk memperingati kejadian tersebut para brahmana itu merasa bahwa sudah pada tempatnya jika mereka dirikan sebuah yupa.

Waprakeswara adalah suatu tempat suci untuk mengadakan persajian, disebutkan dalam 2 prasasti di antara 7 prasasti *yupa*. Menurut Krom, *waprakeswara/baprakeswara* berasal dari kata vapra / vapraka yang berarti pagar, jadi *waprakeswara* adalah suatu tempat yang berpagar, mungkin semacam punden desa.[19]

Menurut Poerbatjaraka, *waprakeswara* atau *baprakeswara* adalah nama lain dari *Agastya* atau *Haricandana*. Agastya adalah pendeta (rsi), murid penting Dewa Siwa, dan dianggap menjadi perantara dewa dengan manusia.[20]

Menurut Hariani Santiko, *waprakeswara* bukan kuil, karena dalam prasasti *yupa* disebut sebagai *ksetra*, bukan sebuah *prasada*.[21] Kebiasaan memberikan benda-benda upacara untuk persembahan kepada dewa adalah kebiasaan pada zaman Weda. Jadi, diperkirakan *waprakeswara* dalam prasasti *yupa* adalah lapangan suci untuk bersaji sesuai dengan aturan kitab Weda dan Brahmana. Di dalam prasasti-prasasti dari Jawa, baprakeswara merupakan nama yang disebut bersama *Haricandana* dan A*gastya* dalam bagian kutukan, seperti dalam prasasti: Sugih manek 837 S, Gilikan 1, Sangguran, dan Sarangan 851 S, yang menyebut Baprakeswara, Haricandana, dan Agasti mahar†si.[22]

Yang menarik adalah penyebutan raja Mulawarman seperti raja Yudhistira yang mengalahkan raja-raja lain. Masih menjadi pertanyaan apakah dengan menyebut nama Yudhistira berarti cerita Mahabharata sudah dikenal secara meluas? Juga apakah disebutkannya Mulawarman mengalahkan raja-raja lain berarti sudah ada kerajaan lain kecuali kerajaan Mulawarman? Ataukah yang dimaksud raja-raja lain sebenarnya hanya semacam kepala suku atau pemimpin suatu kelompok masyarakat?

Dengan keterangan-keterangan tersebut dapat dipastikan bahwa agama yang dipeluk oleh Sang Raja Mulawarman ialah agama Siwa, agama yang kemudian sangat umum di tanah Jawa; dan para brahmana, yang disebut di dalam Sang Mulawarman itu, pastilah brahmana yang beragama Siwa. Dari

---

19 H. Santiko, Amerta, 11, 1989, hlm. 2

20 R.Ng. Poerbatjaraka 1926

21 H. Santiko, op. cit., hlm. 3

22 Ibid., hlm. 3–6

bunyi semua prasastinya dapat diduga bahwa Mulawarman adalah seorang raja yang sangat baik hubungannya dengan kaum brahmana. Ini dibuktikan dengan kenyataan, pada setiap prasastinya selalu dikatakan, bahwa *yupa-yupa* yang mengagungkan namanya itu, semuanya didirikan oleh kaum brahmana, sebagai semacam pernyataan terima kasih atau penghormatan kepada sang raja, atas kebaikan-kebaikannya terhadap mereka.

B. Tarumanagara

1. Sumber-Sumber

Di dalam bukunya *Geographikè Hyphègèsis*, ahli ilmu bumi Yunani purba bernama Claudius Ptolemaeus, ketika menyebutkan daerah-daerah di Timur Jauh, antara lain menyebutkan sebuah kota bernama Argyrè, yang terletak di ujung barat Pulau Iabadiou. Nama Iabadiou ini dapat disamakan dengan nama dalam bahasa Sanskerta, *Yawadwipa,* yang berarti Pulau Jelai dan menurut para sarjana, besar sekali kemungkinannya bahwa yang dimaksudkan adalah Pulau Jawa. *Argyrè* berarti perak, dengan demikian diduga dapat dikaitkan dengan Merak, yang memang terletak di sebelah barat Pulau Jawa. Di samping itu, juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Iabadiou tidak mengacu kepada Pulau Jawa, tetapi kepada Pulau Sumatra, karena di Sumatra juga didapatkan jelai atau bahkan mungkin mengacu ke Kalimantan Barat Daya.[23]

Berita lainnya yang juga tidak dapat dipastikan kebenarannya ialah berita Cina yang berasal dari tahun 132 M. Di dalam berita itu disebutkan bahwa raja Ye-tiao yang bernama Pien, meminjamkan meterai mas dan pita ungu kerajaannya kepada maharaja Tiao-pien. Menurut dugaan sarjana Prancis G. Ferrand, Ye-tiao dapat disamakan dengan Yawadwipa, sedangkan Tiao-pien merupakan lafal Cina dari nama Sanskerta Dewawarman.[24] Sayang sekali kita tidak memiliki bukti-bukti lain mengenai tokoh ini, sehingga tidak pula dapat berbicara banyak tentangnya.

Masih ada berita Cina lainnya, berasal dari kira-kira tahun 250 M, yang menyebutkan daerah yang belum dapat ditentukan ketepatan lokasinya. Di dalam berita tersebut dikatakan bahwa ada sebuah daerah bernama Tu-po, yang sangat dekat lafalnya dengan Cho-po, yang di dalam bahasa Sanskerta berbunyi Jawaka. Dalam berita yang lebih akhir disebut Cho-ye, oleh Silvain Levi dianggap sama dengan Jawa, tetapi oleh G. Ferrand disesuaikan

---

[23] N.J. Krom, Hindoe-Javaansche Geshiedenis. 1931, hlm. 59

[24] Ibid., hlm. 61– 62

dengan kata Sanskerta jaya, dan karenanya dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya.[25] Di dalam naskah India sendiri, nama Yawadwipa sudah dikenal dalam Ramayana, pada bagian yang mengisahkan pasukan kera mencari Sita yang diculik di daerah-daerah di sebelah timur, sedangkan tentang Yawadwipa sendiri dikatakan bahwa di sana terdapat tujuh buah kerajaan yang menghasilkan perhiasan, pulau-pulau emas dan perak, negara yang kaya akan tambang emas.[26]

Berita-berita dari luar negeri yang telah disebutkan itu, belum ada satu pun yang jelas mengacu kepada kerajaan Tarumanagara. Bukti-bukti tentang kerajaan ini, terutama didapatkan di daerah yang diperkirakan menjadi daerah kerajaan tersebut, sedangkan berita-berita luar terutama berasal dari Cina.

Sedemikian jauh, sumber-sumber yang berhubungan dengan negara ini, boleh dikatakan sedikit sekali. Sampai saat ini yang sudah diketahui hanyalah tujuh buah prasasti batu, berita Cina yang masing-masing berasal dari Fa-hsien tahun 414[27], dinasti Soui dan T'ang[28] dan arca-arca Rajar-si,[29] Wisnu Cibuaya 1[30] dan Wisnu Cibuaya 2.[31] Di samping itu, prasasti Kota Kapur (Bangka) diduga sedikit banyak berhubungan dengan daerah ini. Dari seluruh sumber itu pun, kedua buah arca yang didapatkan di Cibuaya mungkin kurang meyakinkan hubungannya dengan Tarumanagara, karena arca-arca tersebut masing-masing berasal dari abad VIII dan IX M.[32]

a. Prasasti

Prasasti Ciaruteun (Ciampea, Bogor) yang sebelumnya dikenal dengan nama prasasti Ciampea, ditemukan di Sungai Ciaruteun, dekat muaranya dengan Cisadane. Yang menarik perhatian dari prasasti ini ialah lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahatkan di sebelah atas hurufnya. Prasasti ini terdiri dari empat baris, ditulis dalam bentuk puisi India dengan irama

---

25 Ibid., hlm. 62

26 Ibid., hlm. 63

27 W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 7

28 J.L. Moens, "Çrivijaya, Java en Kataha", TBG, 77, 1937, hlm. 363

29 W.F. Stutterheim, "De Archaeologische Verzamelingen", TBG, 5, 1938, hlm. 138 J.L. Moens, "Was Purnawarman van Taruma een Saura?", TBG, 80, 1940, hlm. 93–109

30 J. Boissellier, "Le Visnu de Tjibuaja (Java Occidental) et le statuaire de Sud-Est Asiatique", Atribus Asiae, XXII (3), 1959, hlm. 210–216

31 R.M. Sutjipto Wirjosuparto, "The Second Visnu Image of Cibuaya in West Java", MISI, I (2), 1963, hlm. 170–187

32 Ibid., hlm. 173

(a)

(b)

Foto 2.5 (a) Arca Wisnu Cibuaya I dan II, batu, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas); (b) Arca Rajarsi, perunggu, Jawa Barat, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Esh)

anustubh. Melihat bentuknya, prasasti ini mengingatkan adanya hubungan dengan prasasti raja Mahendrawarman I dari keluarga Palla yang didapatkan di Dalavanur.[33] Prasasti ini berbunyi sebagai berikut:

vikkrantasyavanipateh

çrimatah purnnavarmmanah

tarumanagarendrasya

vishnoriva padadvayam

Terjemahan:

ini (bekas) dua kaki, yang seperti kaki dewa Wisnu, ialah kaki Yang Mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia.[34]

Prasasti Pasir Koleangkak didapatkan di bukit yang bernama sama, termasuk daerah perkebunan Jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Di dalam prasasti itu dijumpai nama negara, yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Brandes, dan menurut bacaannya berbunyi *tarumayam*.[35] Sementara itu, ada yang mencoba menghubungkan kata *utsadana* yang terdapat pada bait ke-2 prasasti tersebut, dengan nama sebuah sungai besar yang letaknya tidak demikian jauh dari tempat itu, yaitu Cisadane,[36] tetapi pada umumnya tafsiran ini tidak diterima para sarjana yang lain. Bunyi prasasti ini sebagai berikut:

çriman= data krtajño naripatir = asamo yah pura

[ta]r[u]maya[m] nama çri-purnnavarmma

pracuraripuçarabhedyavikhyajatavarmmo

tasyedam = padavimbadvayam = arinagarotsadane nityadaksam bhaktanam yandripanam = bhavati

sukhakaram çalyabhutam ripunam

Terjemahan:

Gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya – yang termasyhur Sri Purnnawarmman – yang sekali waktu (memerintah) di Taruma dan yang baju zirahnya yang terkenal (= varmman) tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya, yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh, hormat

[33] J.Ph. Vogel, "The Earliest Sanskrit Inscriptions of Java," POD, I, 1925, hlm. 22

[34] R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 12

[35] J.L.A. Brandes, 1910, hlm. 125

[36] C.M. Pleyte, "Uit Soenda's Voortijd", Het Daghet, I, 1905/1906, hlm. 178

Foto 2.6 Prasasti Ciaruteun, Bogor
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya.[37]

Prasasti Kebonkopi terletak di kampung Muara Hilir, Cibungbulang. Yang menarik dari prasasti ini ialah adanya dua tapak kaki gajah yang dipersamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Prasasti ini juga ditulis dalam bentuk puisi *anustubh*, dengan huruf yang lebih kecil bentuknya jika dibandingkan dengan prasasti-prasasti Purnawarman yang lain. Bunyinya sebagai berikut:

uu jayaviçalasya tarume[ndra]sya ha[st]inah uu

[*aira*] *vatabhasya vibhatidam = padadvayam*

Terjemahan:

Di sini tampak sepasang tapak kaki ... yang seperti Airawata, gajah penguasa taruma (yang) agung dalam ... dan (?) kejayaan.[38]

Prasasti Tugu yang didapatkan di Tugu, Jakarta[39] merupakan prasasti yang terpanjang dari semua peninggalan Purnawarman. Seperti juga prasasti lainnya, prasasti ini pun berbentuk puisi *anustubh*, tulisannya dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. Ada beberapa hal menarik dari prasasti ini dibandingkan dengan prasasti-prasasti Purnawarman lainnya. Pertama, di dalamnya disebutkan nama dua buah sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Candrabhaga dan Gomati, yang ternyata telah menimbulkan pelbagai tafsiran para sarjana. Kedua, walaupun tidak lengkap, prasasti ini merupakan satu-satunya prasasti Purnawarman yang menyebutkan unsur penanggalan. Ketiga, prasasti ini menyebutkan dilakukannya upacara selamatan oleh brahmana disertai dengan seribu ekor sapi yang dihadiahkan. Keempat, prasasti ini menyebutkan dua buah nama lain di samping Purnawarman, sehingga setidak-tidaknya dapat dipergunakan untuk menentukan siapa sebenarnya Purnawarman.

Tentang nama Candrabhaga yang disebutkan dalam prasasti Tugu, Poerbatjaraka beranggapan, bahwa itu tentulah nama sungai di India yang diberikan kepada sebatang sungai di Pulau Jawa. Melalui etimologi, sarjana ini sampai pada kesimpulan, bahwa nama itu sekarang dikenal dengan nama Bekasi, yang diduga sebagai pusat kerajaan Tarumanagara.

Prasasti Tugu untuk pertama kalinya menyebutkan penanggalan, yang sayang sekali tidak memuat angka tahun yang pasti, hanya menyebutkan *phalguna* dan caitra, yang bertepatan dengan bulan-bulan Februari–April

[37] J.Ph. Vogel, op. cit., hlm. 25

[38] Ibid., hlm. 27–28

[39] N.J. Krom, ROD, 1914, hlm. 19

menurut perhitungan tarikh Masehi. Karena di Jawa Barat paling lebat turun hujan pada bulan-bulan Januari dan Februari, mungkin dapat diduga, bahwa maksud pembuatan saluran itu tentulah sedikit-banyak ada hubungan dengan usaha mengatasi banjir. Adapun bunyi prasasti ini sebagai berikut:[40]

pura-rajadhirajena guruna pinabahuna
khata khyatam purim prapya candrabhagarnnavam yayau,
pravarddhamana-dvavinçad vatsare çrigunaujasa
narendradhvajabhutena çrimata purnnavarmmana,
prarabhya phalgune mase khata krsnatasmi-tithau
caitraçukla-trayodaçyam dinais siddhaikavinçakaih
ayata satsahasrena dhanusa[m] sa-çatena ca dvavinçena
nadi ramya gomati nirmalodaka,
pitamahasya rajarser vvidarya çibiravanim
brahmanair ggo-sahasrena prayati krtadaksino //

Terjemahan:

Dulu kali (yang bernama) – Candrabhaga telah digali oleh maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, (yakni raja Purnawarman) untuk mengalirkannya ke laut, setelah (kali ini) sampai di istana kerajaan yang termasyhur. Di dalam tahun kedua puluh dua dari takhta yang mulia raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya serta menjadi panji segala raja, (maka sekarang) beliau menitahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih, Gomati namanya, setelah sungai itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman yang mulia Sang Pendeta neneknda (Sang Purnawarman). Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 paro-petang bulan *Phalguna* dan disudahi pada hari tanggal 13 paro-terang bulan Caitra, jadi hanya 21 saja, sedang galian itu panjangnya 6.122 tumbak. Selamatan baginya dilakukan oleh para brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan.

Prasasti-prasasti Pasir Awi[41] dan Muara Cianten,[42] tertulis dalam aksara ikal yang belum dapat dibaca, seperti halnya dengan yang terdapat pada prasasti Ciaruteun, di sebelah gambar tapak kaki. Oleh karena itu, tidak dapat dibicarakan di sini.

---

[40] R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 13–14
[41] N.J. Krom, op. cit., hlm. 32
[42] Ibid., hlm. 28

Prasasti Cidanghiang atau Lebak, didapatkan di kampung Lebak, di pinggir Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan tahun 1947 dan berisi dua baris huruf yang merupakan satu sloka dalam metrum *anustubh.* Hurufnya Pallawa, yang dalam beberapa hal mirip dengan huruf pada prasasti Tugu. Adapun bunyi prasasti ini sebagai berikut.

vikranto 'yam vanipateh prabhuh satyapara(k) ra (mah)

narendraddhvajabhutena çrimatah purnnavarmmanah

Terjemahan:

Inilah (tanda) keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari raja dunia, yang mulia Purnawarman, yang menjadi panji sekalian raja.[43]

b. Berita Cina dari Abad VII Masehi

Dalam catatan perjalanannya, I-tsing (abad VII M) menyebutkan beberapa buah negara yang terletak di sebelah selatan, di antaranya Mo-ho-sin, yang diduga terletak di Pulau Jawa, sebelah barat Ho-ling, dan ada kemungkinan terletak di Jawa Barat.[44] Karena dari zaman yang sama ada pula berita yang menyebut nama To-lo-mo, apakah tidak mungkin bahwa kedua nama itu sebenarnya menunjukkan satu daerah yang sama, ataukah pada masa itu di Jawa Barat terdapat dua kerajaan yang setidak-tidaknya dikenal oleh Cina?

Berita Cina lainnya yang berasal dari dinasti Soui mengatakan bahwa pada tahun-tahun 528 dan 535, datang utusan dari To-lo-mo yang terletak di sebelah selatan. Demikian pula halnya yang terjadi pada tahun 666 dan 669, berita dinasti T'ang awal mengatakan datangnya utusan dari negara yang sama. Menurut berita ini, letak To-lo-mo di sebelah tenggara, di antara 'Tcht'e-t'ou dan Tan-tan menuju ke P'o-li.[45] Dari Tan-tan yang letaknya belum diketahui, untuk menuju ke To-lo-mo, orang harus berlayar ke arah timur atau tenggara. Karena diperkirakan bahwa Tcht'e-t'ou adalah lafal Cina dari Patalung,[46] sedangkan P'o-li disesuaikan dengan Bali,[47] rupanya dapat dipastikan, bahwa yang dimaksud dengan To-lo-mo adalah sebuah daerah di Jawa Barat. Karena dari peninggalan abad V M diketahui adanya sebuah negara bernama Tarumanagara, secara fonetik dapatlah dipertanggungjawabkan, jika yang dimaksud dengan To-lo-mo adalah Tarumanagara.

---

[43] Laporan Tahunan Dinas Purbakala RI, 1954, hlm. 5–6

[44] R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 31

[45] J.L. Moens, op. cit., 1937, hlm. 363

[46] Ibid., hlm. 362

[47] R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 28

Berlainan dengan berita-berita Cina di atas yang terutama mengabarkan hubungan diplomatik, berita Fa-hsien sangat penting untuk menyelidiki kehidupan keagamaan zaman Tarumanagara. Fa-hsien mengatakan bahwa di Ye-po-ti sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha, tetapi banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang agamanya buruk.[48]

Berita lain yang menarik ialah yang berasal dari zaman dinasti T'ang (618–906), yang di antaranya menyebutkan nama sebuah daerah bernama Ho-ling atau disebut juga Jawa, yang terletak di Lautan Selatan, di sebelah timur Sumatra dan sebelah barat Bali. Daerah ini di sebelah selatan berbataskan lautan, sedangkan di sebelah utaranya terletak Kamboja. Nama Ho-ling ini oleh para sarjana disesuaikan dengan Kalinga yang letaknya diperkirakan di Jawa Tengah Utara,[49] atau di daerah Walaing.[50]

Di dalam berita itu selanjutnya dikatakan bahwa daerah yang disebut Ho-ling menghasilkan kulit penyu, mas dan perak, cula badak, dan gading gajah, sedangkan penduduknya dikatakan membuat benteng-benteng kayu dan rumah-rumah mereka beratap daun kelapa. Disebutkan juga bahwa mereka pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa.[51]

c. Temuan Arkeologi

Kecuali sumber tertulis seperti prasasti dan berita Cina, sejumlah temuan arkeologi dapat digunakan sebagai sumber data mengenai Tarumanagara.

Arca Rajarsi termasuk arca yang tua, tetapi sayang tidak diketahui dengan pasti tempat penemuannya yang asli, hanya berdasarkan berita-berita yang sampai, diperkirakan berasal dari daerah Jakarta. Arca ini menggambarkan *rajarsi* sebagaimana disebutkan dalam prasasti Tugu[52] dan memperlihatkan sifat-sifat Wisnu-Surya, sedangkan Purnawarman sendiri dianggap sebagai penganut mazhab itu.[53] Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa arca itu adalah sebuah arca Siwa berasal dari abad XI M, berdasarkan adanya trinetra pada arca tersebut.

Arca Wisnu Cibuaya 1,[54] walaupun berasal dari abad VII M, dapat dianggap dapat melengkapi prasasti-prasasti Purnawarman. Ini memberikan contoh aliran seni di Jawa Barat. Arca ini memperlihatkan adanya beberapa persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Tanah Melayu, Siam,

---

48 W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 7

49 R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 18

50 L-C. Damais, "La Transcriptions Chinoise Ho-ling comme designation de Java", BEFEO, LII, 1964, hlm. 93–141

51 W.P. Groeneveldt, op. cit., 13

52 J. L. Moens, 1940, hlm. 94

53 Ibid., hlm. 47, 97

54 W.F. Stutterheim, op. cit., hlm. 138

dan Kamboja, dan berdasar itu dapatlah diduga, dari mana asal usul tradisi arca ini. Arca ini diduga mempunyai persamaan dengan langgam seni Pallawa di India Selatan dari abad VII–VIII M,[55] atau barangkali dengan Calukya.[56]

Arca Wisnu Cibuaya 2,[57] juga didapatkan di Desa Cibuaya, tetapi tempat aslinya tidak dapat dipastikan. Berdasarkan persamaan-persamaan yang ada pada arca itu dengan arca-arca dari seni Pala abad VII–VIII M terutama (1) jenis batu yang dipergunakan; (2) bentuk arca beserta *laksananya*; (3) bentuk badan dan (4) *makuta*, dapat dipastikan bahwa arca ini termasuk arca yang agak tua.[58] Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa Jawa Barat masih menjadi pusat seni dan agama, dan sesuai pula dengan berita Cina yang mengatakan bahwa pada abad VII M masih ada sebuah negara bernama To-lo-mo, yang dianggap merupakan lafal Cina dari Taruma.[59]

Kecuali arca Rajarsi dari dua arca Wisnu yang telah disebutkan, dari Jawa Barat didapati juga temuan-temuan arkeologi baik dari masa Tarumanagara maupun sebelumnya.

Temuan-temuan tersebut terutama didapatkan di daerah pantai utara Jawa Barat. Di Buni, Karawang pada tahun 60-an ditemukan situs dari masa prasejarah akhir yang menghasilkan gerabah-gerabah yang memiliki corak tertentu dan dikenal sebagai gerabah Buni. Persebaran gerabah Buni tidak hanya di Buni, tetapi meliputi wilayah yang cukup luas, memanjang di pantai utara Jawa Barat.[60]

Pada tahun 1984 di daerah Batujaya, Kabupaten Krawang ditemukan sejumlah unur (bukit, gundukan tanah) yang di dalamnya terdapat struktur bata. Beberapa unur telah digali secara intensif dan didapatkan struktur bata, ada yang berupa candi, ada yang berupa kolam. Salah satu candi yang sudah dipugar adalah candi Jiwa.[61] Candi ini hanya tinggal batur saja yang dindingnya antara lain berpelipit setengah lingkaran. Bagian permukaan atas batu ini bergelombang pada keempat sisinya, mungkin menggambarkan bunga padma. Di bagian tengah permukaan ini membentuk lingkaran, mungkin merupakan dasar stupa. Jika perkiraan ini benar, tentunya candi ini berlatar belakang agama Buddha.

---

[55] J. Boisselier, op. cit., hlm. 210–216

[56] R.M. Sutjipto Wirjosuparto, op. cit., hlm. 182

[57] Ibid., hlm. 170–187

[58] Ibid., hlm. 182

[59] J.L. Moens, "Çrivijaya, Yava en Kataha", TBG, LXVII, 1937, hlm. 363

[60] Made Sutayasa, 1969, hlm. 33

[61] P. Ferdinandus, 2002, hlm. 25

(a)

(b)

Foto 2.7 (a) Candi Jiwa, Batujaya, Karawang, Jawa Barat; (b) Candi Blandongan, Batujaya, Karawang, Jawa Barat (*Sumber*: Agst)

Unur lain yang telah digali adalah unur Blandongan. Di unur ini ditemukan juga candi berdenah bujur sangkar, berukuran 24,6 × 24,6 m. Pada keempat sisinya terdapat tangga. Sangat menarik bahwa di beberapa tempat pada candi Blandongan ini ada sisa-sisa *wajralepa* (pelapis dari bahan kapur/ *stucco*).[62]

Temuan lain yang sangat menarik dari candi Blandongan adalah tablet tanah liat berelief Buddha. Tablet-tablet ini ditemukan di bawah tangga.[63] Berbeda dengan tablet meterai tanah liat lain yang ditemukan di Indonesia, seperti yang ditemukan di Borobudur, Bali, dan Banyuwangi, tablet berelief dari Blandongan tidak berbentuk bulat, tetapi berbentuk segi empat, ujungnya membulat. Tablet berelief dengan bentuk yang hampir sama dengan tablet Blandongan ditemukan juga di Phattalung (Thailand) yang berasal dari abad V M. Tablet tanah liat dari situs lain (Borobudur, Pejeng, dsb) berinskripsi mantra Buddhisme dalam huruf Pre-Nagari. Beberapa tablet dari Blandongan ada yang bergores seperti tulisan, tetapi belum terbaca.[64]

Analisis C14 dari sampel arang yang ditemukan di beberapa lapisan stratigrafi di candi Blandongan menunjukkan pertanggalan dari abad II sampai XII M.[65]

Dari unur yang lain, yaitu dari *unur* Lempeng, kecuali ditemukan struktur bata juga ditemukan fragmen rangka manusia di bawah struktur bata. Analisis terhadap sampel rangka tersebut menunjukkan jenis ras Mongolid dan pertanggalan abad I SM–IV M.[66] Jadi, mungkin berasal dari komunitas sebelum masa percandian Batujaya.

Dari temuan arkeologi ini dapat diperkirakan perkembangan kerajaan Tarumanagara terus berlanjut pada abad-abad sesudah abad V M, terbukti dari adanya percandian Cibuaya dan Batujaya, meskipun prasasti tidak ditemukan lagi.

---

62 P. Ferdinandus, Ibid., hlm. 7–10

63 Ibid., hlm. 11

64 Ibid., hlm. 22

65 Ibid., hlm.30
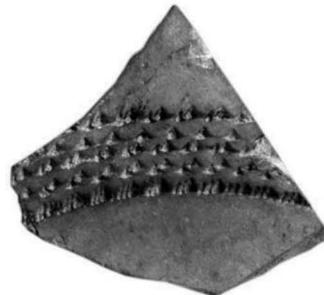
66 Hasil analisis sampel penelitian oleh Puslitbang Arkenas (belum terbit)

(a)

(b)

(c)

Foto 2.8 (a) Meterai berelief, tanah liat, Blandongan; (b) Prasasti mantra Buddhis, tanah liat, Blandongan; (c) Fragmen gerabah Arikamedu, Blandongan
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

2. Keadaan Masyarakat

Segi yang sangat penting di dalam kehidupan suatu masyarakat adalah mata pencarian masyarakat itu. Hal ini tidak hanya berarti mengenai apa yang mereka makan, tetapi juga bagaimana mereka memperoleh makanan. Berdasarkan bukti-bukti dan sumber-sumber yang terdapat sampai saat ini, dapatlah diduga bagaimana kira-kira mata pencarian penduduk zaman Tarumanagara. Kalau dugaan tentang barang-barang dagangan yang berasal dari daerah Ho-ling dapat diterima, kita memperoleh gambaran bahwa pada masa itu perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan termasuk mata pencarian penduduk, di samping pertanian, pelayaran, dan peternakan.

Berita tentang perburuan kita peroleh dari berita tentang adanya cula badak dan gading gajah yang diperdagangkan, sementara kita tahu bahwa badak dan gajah adalah binatang liar, dan untuk mendapatkan cula dan gadingnya, terlebih dahulu harus dilakukan perburuan. Perikanan barangkali dapat disimpulkan dari berita yang mengatakan bahwa kulit penyu juga termasuk barang dagangan yang banyak digemari saudagar-saudagar Cina. Kemungkinan akan adanya pertambangan, kita peroleh dari berita tentang diperdagangkannya mas dan perak yang disebutkan sebagai salah satu hasil daerah itu. Karena semuanya itu disebutkan sebagai barang dagangan, dengan sendirinya tidak usah disangsikan lagi bahwa perniagaan juga merupakan salah satu mata pencarian penduduk.

Sementara itu, kemungkinan tentang adanya pertanian dan peternakan sebagai mata pencarian, dapat kita peroleh berdasarkan sumber-sumber prasasti, terutama prasasti Tugu yang terlengkap dari semuanya itu. Pada prasasti ini disebutkan usaha pembuatan saluran yang dilakukan pada tahun kedua puluh dua pemerintahan raja Purnawarman, dan di antara kegunaannya tidak pula mustahil dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatasi banjir yang selalu melanda daerah pertanian di sekitar itu. Di samping itu, juga ditemukan beberapa alat terbuat dari batu yang erat sekali hubungannya dengan usaha pertanian dan perladangan.

Tentang usaha peternakan, memang sedemikian jauh buktinya yang meyakinkan belum kita miliki. Berita prasasti Tugu tentang penghadiahan seribu ekor sapi kepada para brahmana, belum memberikan jaminan bahwa pada masa itu memang sudah ada usaha peternakan yang memungkinkan hal itu terlaksana. Di samping itu, tidak mustahil upacara selamatan dengan penghadiahan seribu ekor sapi itu hanya merupakan nama salah satu upacara keagamaan dengan tata cara tertentu. Walaupun tentu saja tidak dapat disangsikan bahwa upacara seperti itu dianggap sebagai upacara yang bernilai tinggi dibandingkan dengan upacara-upacara selamatan lainnya.

Mengenai pelayaran, barangkali ini tidak usah disangsikan lagi, walau bagaimanapun, keadaan lingkungan kerajaan Tarumanagara bukannya tidak memberikan kemungkinan akan adanya keterampilan penduduknya di bidang ini. Di samping itu, juga tidak mustahil bahwa para pedagang Tarumanagara sendiri juga sudah melakukan usaha perniagaan dengan melakukan pelayaran sendiri ke daerah-daerah luar wilayahnya. Hal ini dimungkinkan juga karena letak Tarumanagara yang cukup strategis, di jalan niaga Nusantara.[67]

Sayang sekali dari semuanya itu, hampir tidak dapat diketahui bagaimana teknologi yang bertalian dengan mata pencarian itu. Bukti-buktinya tidak ada, sehingga tidak memungkinkan kita membicarakannya. Dari berita Cina dapat diketahui bahwa orang-orang Ho-ling mempunyai kepandaian membuat minuman keras dari mayang (= bunga kelapa), sehingga dapat dipastikan bahwa tuak sudah dikenal pada masa itu. Akan tetapi, sayang sekali, tidak dapat diketahui kapan tuak itu diminum; sebagai minuman harian, ataukah pada waktu tertentu saja. Mengenai makanan utama, sudah dapat dipastikan bahwa yang menjadi makanan utama pada waktu itu adalah beras, walaupun juga tidak dapat diketahui, dalam bentuk apa beras itu dimakan. Jika berita Cina benar, bahwa orang Ho-ling makan tidak mempergunakan sumpit atau sendok, besar sekali kemungkinan yang dimakan berupa nasi. Di samping padi, pasti dimakan pula jenis-jenis buah-buahan dan tanaman yang lain, serta daging hewan. Hanya juga tidak dapat dipastikan, hewan yang paling digemari dagingnya pada masa itu.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa perhubungan yang paling tua umurnya dilakukan melalui darat dan air.[68] Dalam masyarakat yang lebih sederhana, perhubungan lebih jarang dilakukan, hanya pada saat-saat tertentu. Dengan berkembangnya budaya, bertambah pula keinginan untuk mengadakan perhubungan dengan masyarakat luar. Kalau melihat keadaan geografis Tarumanagara, barangkali pendapat seperti itu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya hubungan niaga dengan luar negeri seperti diberitakan oleh berita Cina, jelaslah bahwa hubungan melalui air memang merupakan salah satu bukti tentang ini. Mengenai hubungan di darat, dapat diperkirakan dengan adanya data bahwa lembu merupakan hewan piaraan. Rupanya, selain untuk hadiah kepada kaum brahmana dan pertanian, hewan ini juga dipergunakan untuk melakukan hubungan dalam negeri, dari satu tempat ke tempat lain, yang tidak terlalu berjauhan letaknya.

Semua yang sudah dibicarakan yang bertalian dengan landasan ekonomi di atas, terjalin dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan semuanya itu

---

[67] Moh. Ali, Peranan Bangsa Indonesia di Asia Tenggara, 1960, hlm. 24

[68] G. Clark, Archaeology and Society, 1960, hlm. 211

[69] Ibid., hlm. 29

menjadi efektif. Jalinan itulah yang disebut organisasi sosial, yang merupakan pusat dari segala kegiatan manusia yang hidup di dalamnya, baik untuk meninggikan derajat hidupnya maupun untuk mengabadikan dirinya.[69] Berdasarkan sumber-sumber yang sangat tidak lengkap itu, dapat diperkirakan golongan-golongan masyarakat yang ada pada masa itu, ialah kaum tani, pemburu, pedagang, pelaut, penangkap ikan, dan peternak. Walaupun demikian, tidak dapat dipastikan, bagaimana pembagian kerja itu dilakukan.

Sementara itu, ditinjau dari segi budaya, setidak-tidaknya ada dua golongan dalam masyarakat itu, ialah golongan masyarakat yang berbudaya berlatar belakang agama Hindu dan golongan masyarakat yang berbudaya asli. Mengingat bahwa pada waktu itu pengaruh India boleh dikatakan ada pada taraf pertama penyebarannya, dapatlah dikatakan bahwa golongan yang pertama itu terbatas pada lingkungan kraton saja, sedangkan golongan yang kedua meliputi bagian terbesar penduduk Tarumanagara. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, kedua golongan itu tidak saling terpisah, malahan dalam beberapa hal mereka dapat bekerja sama.

Berdasarkan temuan prasasti, kita hanya mengetahui adanya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta pada masa itu. Untunglah berita Cina sedikit banyak memberikan pertolongan. Mereka menyebut adanya suatu bahasa dengan nama K'un-lun, yang dipergunakan baik di Jawa maupun di Sumatra. Jadi, K'un-lun adalah nama umum yang diberikan orang Cina, untuk menyebut bahasa yang dipergunakan di pelbagai tempat di Indonesia, yaitu suatu bahasa Indonesia yang tercampur dengan kata-kata Sanskerta.[70]

Dari berita Fa-hsien jelas bahwa pada awal abad V M, di Taruma terdapat tiga macam agama, yaitu agama Buddha, Hindu, dan agama yang "kotor". Agama Hindu paling banyak diketahui karena diperkuat pula oleh bukti-bukti prasasti dan arca.

Menurut prasasti Tugu, ayah Purnawarman berkedudukan sebagai *rajadhiraja* guru dan telah menggali terusan Candrabhaga, sedangkan Purnawarman sendiri menggali terusan Gomati. Hadiah yang diberikan oleh Purnawarman berupa seribu ekor sapi menunjukkan adanya hubungan erat dengan kepercayaan Weda.[71]

Prasasti Ciaruteun juga menunjukkan hal-hal yang dekat dengan kepercayaan Weda, karena selain menyamakan kedua kaki Purnawarman dengan kaki Wisnu, telapak kaki itu dilukiskan pula, bahkan kata *vikkranta*

---

[70] R.Ng. Poerbatjaraka, op. cit., hlm. 22

[71] J.L. Moens, 1940, hlm. 80

yang terdapat pada baris ke-1, berarti menyerang.[72] Rupanya sengaja dihubungkan dengan triwikrama, atau tiga langkah Wisnu untuk mengelilingi dunia.[73] Langkah Wisnu ini ada hubungannya dengan kitab Weda, dan bukan dengan triwikrama yang dijalankan oleh Wamana (*awatara* Wisnu) dalam usahanya untuk membinasakan Bali, menurut Purana.

Pada prasasti Jambu, Purnawarman disamakan dengan Indra yang selain dikenal sebagai dewa perang, memiliki pula sifatsifat sebagai dewa matahari.[74] Dari semua berita itu jelas bahwa kepercayaan di daerah Jawa Barat pada zaman Tarumanagara sangat erat hubungannya dengan kepercayaan Weda.[75]

Pada prasasti Pasir Koleangkak (Jambu) disebutkan bahwa perlengkapan perang Purnawarman berbentuk harnas yang tersembunyi dalam namanya sendiri, karena dalam bahasa Sanskerta *purnna* berarti sempurna,[76] sedangkan varmman berarti harnas, baju zirah.[77] Menurut mitologi India, dewa yang mengenakan baju zirah yang sempurna hanyalah Surya, yang dipuja-puja terutama oleh bangsa Saka dan Kusana. Di sana dewa matahari itu disebut Mitra atau Mitara. Setelah mereka memasuki India Utara dan India Barat, terutama di Mathura, dewa Mitra sebagai dewa matahari disesuaikan dengan dewa-dewa India seperti Siwa, Skanda, dan Aditya. Oleh para penganut dewa Mitra–Surya, terutama bangsa Saka yang gemar berperang, kepada Surya diberikan pula sifat-sifat sebagai dewa perang, sehingga diberi gelar *Ajit* dan *Kavasa*. Akhirnya ia dianggap sebagai pelindung sehingga oleh bangsa Saka dianggap sebagai dewa besar. Sebagai pelindung, dewa Mitra–Surya disebut sebagai Jagatpati (= raja dunia)–dan Gopati (= raja lembu).[78] Dibandingkan dengan sebutan Purnawarman, tampak adanya persamaan antara sifat-sifat raja ini dengan Mitra–Surya. Di dalam prasasti Ciaruteun disebutkan bahwa Purnawarman itu *vikkranta* (= menyerang atau gagah berani), dan hal ini adalah merupakan sifat khusus dewa Mithra–Surya. Pada prasasti yang sama dijumpai istilah avanipateh, yang artinya sama dengan jagatpati. Dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa agama yang dianut oleh Purnawarman, kecuali memperlihatkan anasir kepercayaan Weda, juga memperlihatkan anasir pemujaan kepada dewa Mitra–Surya.[79]

Apa yang kita ketahui tentang agama Buddha di Tarumanagara, sama sekali terbatas pada berita Fa-hsien, yang mengatakan bahwa pada waktu itu

---

[72] A .A. Macdonell, A Practical Sanskrit Dictionary, 1958, hlm. 76

[73] J.L. Moens, op. cit, hlm. 80–81

[74] Ibid., hlm. 83

[75] Ibid., hlm. 84

[76] A.A. MacDonell, op. cit., hlm. 167

[77] Ibid., hlm. 271

[78] J.L. Moens, op. cit., hlm. 91–92

[79] Ibid., hlm. 92

di sana hanya sedikit ditemui orang-orang yang beragama Buddha seperti Fa-hsien sendiri. Yang cukup menarik untuk diungkapkan ialah berita Fa-hsien tentang agama "kotor" yang telah menimbulkan pertentangan di antara para sarjana. Ada yang berpendapat bahwa yang disebut sebagai agama kotor itu ialah agama Siwa Pasupata, berdasarkan berita yang berasal dari seorang Cina bernama Huen-tsang (abad VII M), yang mengatakan adanya kaum brahmana dan pemeluk agama palsu. Karena yang dimaksudkan oleh Huen-tsang di India adalah agama Siwa Pasupata, pendapat pertama ini beranggapan bahwa agama itu pulalah yang tersebar di Tarumanagara.[80]

Sementara itu, ada pula pendapat yang menghubungkan agama kotor itu dengan agama orang Parsi (= Majusi), yang mengenal upacara penguburan dengan menempatkan jenazah demikian saja di dalam hutan. Dengan ditunjang pendapat bahwa Ye-po-ti sebagaimana diberitakan oleh Fa-hsien itu sebenarnya tidak terletak di Jawa, tetapi di Kamboja, akhirnya pendapat ini sampai pada kesimpulan seperti itu.[81] Barangkali akan lebih dapat diterima jika agama kotor itu ditafsirkan sebagai agama yang sudah lama ada sebelum masuknya pengaruh India ke Indonesia. Oleh karena agama ini mempunyai upacara-upacara yang berbeda dengan kedua agama India yang dikenal oleh Fa-hsien (Buddha dan Hindu), tidak mustahil jika disimpulkan, bahwa penamaan agama kotor itu pada dasarnya disebabkan ketidaktahuan Fa-hsien akan sistem dan kehidupan keagamaan asli Indonesia pada masa itu, yang dapat dipastikan masih dianut oleh bagian terbesar penduduk Tarumanagara. Hal ini lebih dapat diterima, apalagi jika kita ingat, bahwa Tarumanagara merupakan negara pertama di Jawa Barat yang menerima pengaruh India. Sudah dapat dipastikan bahwa tradisi-tradisi yang sudah berakar sebelumnya, tidak demikian saja hilang dengan adanya kepercayaan baru. Penggalian-penggalian prasejarah yang dilakukan di daerah Pasirangin (Bogor) lebih menunjang pendapat ini karena berdasarkan dugaan sementara dapat diketahui bahwa tradisi prasejarah di daerah tersebut yang diperkirakan menjadi pusat kerajaan Tarumanagara, masih berlangsung sampai menjelang abad X M.

---

80 J.L. Moens, TBG, 77, 1937, hlm. 396

81 Ibid., hlm. 401–402

Bab III
Kerajaan-Kerajaan di Sumatra

A. Sriwijaya

1. Masa Awal

Kawasan pesisir timur Pulau Sumatra dilihat dari sudut pandang geo-historis memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat berpengaruh dalam membentuk konfigurasi persebaran situs-situs permukiman di Sumatra. Kedudukannya yang terletak di dalam jalur pelayaran antara India dan Cina telah memungkinkan daerah-daerah pesisir di wilayah ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari barat ke timur serta sebaliknya. Sayangnya karena keterbatasan informasi tertulis dari dalam negeri, pengetahuan kita tentang Sumatra hingga pertengahan abad VII sejauh ini hanya dapat diketahui melalui pelbagai artefak atau unsur-unsur sosial budaya lainnya yang tersebar secara terbatas di beberapa daerah.[1]

Sumber-sumber kesusastraan dari luar negeri khususnya India yang menyebut tentang Sumatra antara lain Kitab *Milindapañha* yang ditulis sekitar abad I sebelum Masehi dan *Mahaniddesa* yang ditulis antara abad III Masehi menyebut nama-nama pulau seperti Jawa, Sumatra (*Suvarnnabhumi*), dan Bangka (Wangka).[2] Demikian pula sumber Cina antara 245–473 juga mencatat beberapa nama seperti *"Tu-po (cho-ye), Ho-lo-tan, Po-huang, Kan-t'o-li"*, dan *"Ko-ying"*, yang kesemuanya disebutkan terletak di daerah laut selatan. Di dalam catatan-catatan itu dijelaskan pula posisi geografisnya sebagai daerah-daerah yang terletak di wilayah kepulauan Nusantara. Oleh karena catatan-catatan itu kebanyakan dibuat oleh para pedagang/musafir dalam pelayarannya baik dari India ke Cina atau sebaliknya, mudah diduga bahwa daerah yang dikenal dan dicatat itu pun terletak di wilayah Indonesia bagian barat, setidak-tidaknya daerah yang terletak di antara Selat Malaka dan Laut Jawa.

Di antara musafir-musafir itu tercatat nama I-tsing seorang pendeta agama Buddha yang sangat termasyhur dari Cina pada abad VII yang mencatat nama-nama daerah yang langsung berhadapan dengan laut atau disebut chou yang terletak di pantai timur Sumatra. Dari barat nama-nama tersebut adalah

[1] R.P. Soejono, 1984, hlm. 145–147

[2] L-C. Damais, 1995, hlm. 85

Peta 3.1 Lokasi situs Kepurbakalaan di Pulau Sumatra

"P'o-lu-shi", selanjutnya *"Mo-lo-yu"*, *"Mo-ho-sin"*, dan *"Ho-ling"*. *"P'o-lu-shi"* oleh Wolter diidentikkan dengan Barus, suatu tempat yang terletak di pesisir barat Sumatra Utara, sedangkan "Mo-ho-sin" oleh Takakusu dianggap sebagai nama lain dari "Mukha Asin" yang identik dengan Banyu Asin.[3]

Terbatasnya sumber tertulis dari dalam negeri telah mendorong sebagian ahli yang tertarik pada bidang arkeologi berupaya meneliti aspek lain guna menjelaskan fenomena kearkeologian dari pelbagai sudut pandang. Penelitian yang dilakukan Obdeyn, Verstappen, Soekmono, dan Sartono mengenai garis-garis pantai kuno, sampai pada kesimpulan bahwa dilihat dari sudut pandang geologi dan paleogeografi pada masa Sriwijaya, garis pantai timur Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Jambi yang sekarang pada akhir abad VII masih merupakan laut.[4]

Perubahan garis pantai terjadi sebagai akibat perubahan iklim, pasang surut muka laut, proses alam yang terjadi di masa lalu, serta perkembangan lokal yang terjadi setempat. Kondisi kawasan pesisir timur Sumatra Selatan saat ini memang sangat jauh berbeda dengan gambaran ±50 tahun yang silam ketika Soekmono bersama Verstappen melacak kembali garis pantai Sriwijaya. Daerah hutan *mangrove* yang dahulu lebat dengan tanaman dominan pohon api-api (*Avecennia alba*), pohon pidada (*Sonneratia alba*), dan pohon bakau (*Rhizophora spp*), yang menjadi unsur dominan dalam pembentukan tanah *gulma/gambut* kini telah berubah menjadi lahan pertanian pasang surut. Sungai-sungai lama yang dahulu menjadi jalur transportasi yang menghubungkan pesisir dengan pedalaman, kini mulai memunculkan bukti-bukti baru yang mampu memberikan gambaran lain tentang keadaan pesisir timur Sumatra Selatan di masa lalu.

2. Jejak-Jejak Masa Sejarah

Sumatra Selatan memasuki panggung sejarah sejak munculnya kerajaan Sriwijaya kira-kira pada abad VII Masehi. Kepastian munculnya kerajaan itu ditandai oleh beberapa inskripsi, sejumlah arca-arca batu dan perunggu serta keterangan-keterangan dalam sejumlah kronik Cina. Sejak kira-kira tahun 650-an itulah sebuah kekuatan politik telah menguasai beberapa tempat khususnya di wilayah Indonesia bagian barat.

---

[3] J. Takakusu, 1896, hlm. 8; O.W. Wolters, 1986, hlm. 13

[4] V. Obdeyn; H.Th. Verstappen 1953, 1973; R. Soekmono 1955, 1958, 1979; Sartono, 1979

Munculnya kerajaan Sriwijaya menimbulkan sejumlah pertanyaan terutama berkaitan dengan masa-masa pra-Sriwijaya. Sejarah menunjukkan bahwa munculnya Sriwijaya pada abad VII secara tiba-tiba dapat dianggap lambat dibandingkan dengan terbentuknya kota-kota di Asia Tenggara daratan. Kota-kota yang telah muncul di beberapa tempat di Asia Tenggara yaitu Oc-eo, di Vietnam Selatan; U Thong, dan Chansen di Muangthai serta Beikthano di Burma. Lagi pula dari sumber-sumber Cina maupun India diketahui bahwa sejak abad III SM hingga abad I M, perhubungan lalu lintas perdagangan antara Romawi-India dan Cina sudah maju dan lintas jalur perdagangan tersebut sudah tentu juga melewati Sumatra.
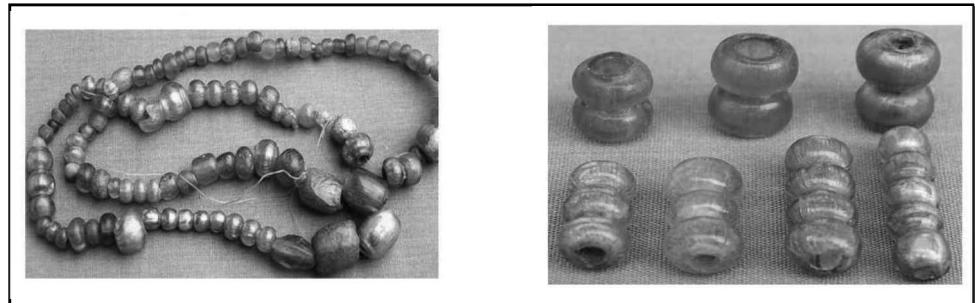
Bukti lain yang diperkirakan merupakan peninggalan-peninggalan dari masa sebelum munculnya Sriwijaya adalah arca yang ditemukan di Palembang yaitu arca Buddha dari Bukit Seguntang yang menunjukkan gaya seni Amarawati. Sekiranya arca ini dibuat pada abad VI M, maka dapat disimpulkan bahwa seratus tahun sebelum munculnya Sriwijaya tampaknya Palembang telah digunakan oleh para pendeta Buddhis sebagai tempat tinggal yang subur dan kreatif.

Pesisir timur Sumatra Selatan yang langsung berhadapan dengan Selat Bangka sebagai salah satu jalur penting bagi pelayaran telah pula meninggalkan jejak masa lalunya bukan hanya dalam bentuk tinggalan yang bernapaskan keagamaan melainkan juga tinggalan-tinggalan yang bersifat keseharian. Karangagung, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam beberapa tahun terakhir telah membuka lembaran baru cakrawala pengetahuan kita mengenai kehidupan yang berlangsung di wilayah ini di masa lampau. Penelitian arkeologi yang dilakukan sejak tahun 2000 di daerah permukiman transmigrasi Karangagung Tengah; Desa Karangmukti; dan Mulyoagung, Kecamatan Bayunglincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan telah menemukan sejumlah titik situs penting yang menyimpan bukti adanya permukiman pesisir kuno di wilayah ini. Tinggalan arkeologi yang ditemukan antara lain manik-manik yang terbuat dari batuan, kaca dan emas, bahan manik-manik kaca, tembikar polos maupun berhias, batu asah, pelandas, bandul jala, tulang vertebrata, cangkang moluska, gelang kaca, gelang emas, dan gelang perunggu serta sejumlah tiang bangunan yang dibuat dari pohon *medang* dan pohon *nibung (Actinodaphne spp., Lauraceae, dan Caryota rumphiana)*. Hasil penelitian laboratoris melalui analisis C14 menunjukkan bahwa tiang-tiang kayu tersebut berasal dari 1624 BP dan 1629 BP.[5]

---

[5] Soeroso, "Sumatra Selatan Menjelang Masa Sejarah", Fajar Masa Sejarah Nusantara, 2003, hlm. 26

(a)

(b)

(c)

Gambar 3.1 (a) Manik-manik batu, kaca, koleksi Museum Nasional; (b) Manik-manik kaca emas, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas); (c) Fragmen tiang, kayu, Karangagung, Sumatra Selatan (*Sumber*: Srs)

Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir timur Sumatra Selatan menjelang masa sejarah setidak-tidaknya sejak abad VII M telah dihuni oleh masyarakat yang menetap dengan tingkat hunian yang cukup padat, serta telah mengenal spesialisasi dalam pelbagai bidang keahlian. Ada kelompok masyarakat yang ahli di bidang kerajinan tembikar, manik-manik, pengecoran logam, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ahli bangunan. Adanya tiang kayu yang jumlahnya relatif banyak dan sebarannya relatif luas, akhirnya dapat memberi petunjuk bahwa pesisir timur Sumatra Selatan tidak pernah mengalami perubahan garis pantai yang signifikan sejak masa sebelum hingga masa sejarah, berbeda dengan yang dipercayai selama ini.

Tampaknya motivasi ekonomi yang muncul dalam kegiatan masa itu adalah pelayaran niaga dengan ciri-ciri tertentu. Ciri dominannya adalah perdagangan tersebut dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dan dari pulau yang satu ke pulau yang lain dengan membawa sejumlah dagangan tertentu tetapi tidak besar volumenya. Oleh karena barang yang mereka bawa tidak terlalu banyak dan tidak berorientasi pada investasi modal dan keuntungan, tidak mengherankan jika barang-barang yang mereka bawa juga hanya barang-barang yang mahal (mewah) yang dijual atau dipersembahkan kepada kelompok penguasa dan dari kelas yang tinggi. Selain para penjaja terdapat pula para pemilik modal yang terdiri dari para aristokrat yang mendominasi perdagangan bukan sebagai entrepreneur melainkan sebagai pemilik modal sedangkan kegiatan berdagang tetap dilakukan oleh para penjaja yang hanya memuat sebatas kapal yang mereka miliki.[6]
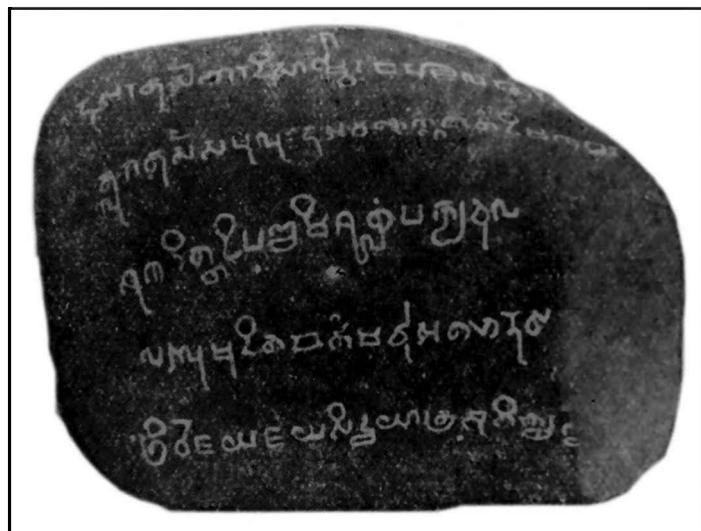
Munculnya Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan telah mengalihkan perhatian para ahli sejarah kuno Indonesia dari sejarah kerajaan Mataram. Sayangnya meskipun sudah banyak penelitian yang dilakukan, tetapi hasilnya kurang memuaskan karena banyak hal-hal yang belum dapat diungkapkan secara tuntas. Salah satu penyebabnya ialah sumber sejarah yang ada ternyata tidak cukup untuk dapat merekonstruksikan sejarah Sriwijaya dari awal hingga akhirnya.

Dari kerajaan Sriwijaya sendiri mula-mula diperoleh 6 buah prasasti, yang ditemukan tersebar di Sumatra Selatan dan Pulau Bangka, tetapi keterangan yang kita peroleh pun tidak banyak.

Prasasti tertua ditemukan di daerah Kedukan Bukit, di tepi Sungai Tatang, dekat Palembang, angka tahunnya 604 S atau 682 Masehi.[7] Sejak diterbitkan oleh Ph.S. van Ronkel pada tahun 1924, prasasti Kedukan Bukit telah banyak

---

6 Leur, 1960, hlm. 163–173

7 Pembacaan angka tahun ini oleh L-C. Damais (1955), sedangkan Poerbatjaraka (1952) dan beberapa sarjana lainnya membaca angka tahun ini 605 Saka

(a)

(b)

Gambar 3.2 (a) Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti *Siddhayatra*, Palembang (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

menarik perhatian para sarjana. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno, jumlahnya hanya 10 baris. Isinya tentang: (1) *Dapunta Hyang manalap siddhayatra*[8] dengan perahu pada tanggal 11 paro terang (*suklapaksa*), bulan *waisaka*, tahun 604 S (23 April 682 M); (2) Pada tanggal 7 paro terang bulan *Jyestha* (19 Mei 682 M) Dapunta Hyang berangkat dari Minanga[9] membawa tentara dua *laksa*[10] dan 200 peti (kosa)[11] perbekalan dengan perahu, serta 1.312 orang tentara berjalan di darat, datang di suatu tempat yang bernama ma ...;[12] (3) Pada tanggal 5 paro terang, bulan *Ãsadha*[13] (16 Juni 682 M) dengan sukacita mereka datang di suatu tempat dan membuat kota (wanua)[14] dan kerajaan Sriwijaya memperoleh kemenangan, perjalanannya berhasil dan seluruh negeri memperoleh kemakmuran.[15]

Menurut N.J. Krom, isi prasasti Kedukan Bukit ini tidak semuanya jelas, tetapi ziarah untuk mencari kekuatan gaib itu mencolok sekali. Mungkin hal ini berhubungan dengan peristiwa pendirian kerajaan Sriwijaya, dan suatu kenyataan, prasasti ini dimaksudkan untuk memperingati kejadian yang penting sekali untuk negara.[16]

---

[8] Istilah *manalap siddhayatra* ini telah banyak dibicarakan oleh para sarjana di antaranya G. Coedès (1930, hlm. 58; 1933 hlm. 1003–1004; 1935, hlm. 380; R.A. Kern, 1931, hlm. 51; N.J. Krom, 1931, hlm. 121; 1938, hlm. 404–408; Chhabra, 1935, hlm. 19–20; R.C. Majumdar, 1937, hlm. 134; W.F. Stutterheim 1935; K.A. Nilakanta Sastri, 1937; J.G. de Casparis, 1956, hlm. 1–2 dan 305

[9] Ph.S. van Ronkel (1924, 19) membaca kata ini *minanga hamwar*, sedangkan G. Coedès (1930) dan R.Ng. Poerbatjaraka (1952, 34) membacanya *minanga tamwan*. Bahkan Poerbatjaraka mengusulkan pembacaan *minanga kamwar* untuk menunjang pendapatnya bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ialah daerah Minangkabau atau sekitar pertemuan Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri

[10] Kata *laksa* diartikan oleh Chhabra 100.000, jadi dua laksa 200.000 (B.Ch. Chhabra,1935, 29), sedangkan Poerbatjaraka, Boechari, dan Casparis mengartikan dua *laksa* = 20.000

[11] Ph.S. van Ronkel (1924) dan G. Coedès tidak dapat membaca kata *kosa* ini secara lengkap. Kata ini dibaca secara lengkap oleh Poerbatjaraka (1952) dan mengartikannya dengan tempat, dalam hal ini tempat perbekalan

[12] Huruf yang tidak jelas ini oleh G. Coedès (1930, 34) dibaca matayap, sedangkan oleh N.J. Krom (1938, 25) dibaca malayu; R.B. Slametmuljana (1981) membacanya matadanau, dan Boechari (1979) membacanya mukha upang

[13] Nama bulan *Ãsadha* ini dijumpai di dalam prasasti Telaga Batu (*fragmen*) yang diterbitkan oleh J.G. de Casparis (1956, 12). Lihat juga L-C. Damais, 1955, hlm. 235 catatan 1

[14] Setelah kata *wanua* batu prasastinya aus/rusak sehingga sukar untuk memperkirakan berapa huruf yang hilang. Akan tetapi, ada kemungkinan juga bahwa kalimat di baris ke-9 ini selesai sampai kata *wanua* ini saja, artinya setelah kata wanua ini tidak ada kata lainnya lagi

[15] Lihat Boechari, 1979, hlm. 26

[16] Lihat N.J. Krom, 1931, hlm. 121

Pada tahun 1938, Krom berusaha untuk menafsirkan prasasti Kedukan Bukit ini sekali lagi. Kali ini ia menghubungkan prasasti Kedukan Bukit dengan pernyataan I-tsing bahwa sekembalinya ia dari Nalanda, Malayu telah menjadi Sriwijaya. Jadi, menurut Krom kerajaan Malayu ini ditundukkan oleh Sriwijaya pada tahun 682 M. Untuk memperkuat pendapatnya, ia mengajukan bacaan tiga huruf yang kabur sekali pada akhir baris ke-7, sehingga berbunyi malayu. Bacaan malayu oleh Krom dibantah oleh J.G. de Casparis yang tidak melihat kemungkinan adanya huruf la di antara huruf yang sudah usang tadi. Huruf yang dibaca la oleh Krom kemungkinan besar ialah huruf ka.[17]

Pendapat Krom bahwa prasasti Kedukan Bukit ini dimaksudkan untuk memperingati pembentukan negara Sriwijaya, ditentang oleh J.L. Moens. Ia berpendapat prasasti Kedukan Bukit ini dimaksudkan untuk memperingati kemenangan Sriwijaya terhadap Malayu. Karena ibu kota Malayu itu di Palembang, kemenangan Sriwijaya atas Malayu dapat juga dikatakan sebagai penguasaan daerah Palembang oleh Sriwijaya. Setelah menguasai Palembang, Sriwijaya yang semula berpusat di pantai timur Semenanjung pindah ke pantai timur Sumatra, tidak di Palembang tetapi di Muara Takus. Pemindahan pusat pemerintahan ini terjadi pada sekitar tahun 683 dan 685 M.[18]

Sehubungan dengan persoalan ini Poerbatjaraka mengatakan bahwa seandainya matayap ini benar harus dibaca sebagai *malayu* seperti yang dikemukakan oleh Krom, makin jelaslah bahwa tentara yang disebut di dalam prasasti Kedukan Bukit ini, sebelum sampai di Palembang, lebih dahulu datang ke Malayu, yakni di daerah Jambi sekarang. Ditambah lagi jika kata mudita[19] boleh diartikan mudik, yakni ke selatan ke Palembang. Oleh karena itu, seandainya dugaan ini benar, berarti dahulu ada seorang besar dari Minangkabau pergi berperang, berhenti lebih dahulu di Jambi, lalu terus ke Palembang dengan mendapat kemenangan, lalu membuat kota di daerah itu yang diberi nama Sriwijaya.[20]

Sementara itu Boechari secara meyakinkan telah berhasil membaca empat huruf di akhir baris ke-7 dari prasasti Kedukan Bukit yang sudah sangat usang. Kata itu dibaca mukha upang. Nama upang dijumpai di peta-peta kuno[21] dan masih ada sebagai nama sebuah desa kecil di sebelah timur laut Palembang di

[17] Lihat J.G. de Casparis, 1956, hlm. 13 catatan 68

[18] Lihat J.L. Moens, 1937, hlm. 333–335

[19] Kalimat itu lengkapnya berbunyi "*... datam di mu ... sukhacitta di pañcami suklapaksa wulan (asadha) laghu mudita datam marwuat wanua ... Sriwijaya jaya siddhayatra subhiksa ....*"

[20] Lihat R.Ng. Poerbatjaraka, 1952, hlm. 35

[21] Lihat V. Obdeyn, 1941, peta 6h

tepi Sungai Upang. Selain itu, Boechari juga menduga bahwa prasasti Kedukan Bukit memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapunta Hyang dan pendirian ibu kota baru atau ibu kota yang kedua di tempat ini.[22]

Masalahnya ialah apakah Desa Upang ini sama dengan toponim Mukha Upang dalam prasasti Kedukan Bukit, perlu penelitian lebih lanjut. Temuan pecahan keramik Cina di Desa Upang setelah diteliti oleh Abu Ridho, ternyata tidak ada yang berasal dari abad VII atau VIII, melainkan berasal dari abad XIV sampai abad XVIII.

Kemudian G. Coedès berpendapat bahwa prasasti Kedukan Bukit memperingati ekspedisi Sriwijaya ke daerah seberang lautan, yaitu untuk menaklukkan kerajaan Kamboja yang diperintah oleh raja Jayawarman.[23]

Prasasti lainnya ditemukan di daerah Talang Tuo, sebelah barat kota Palembang sekarang, oleh residen Westenenk pada tahun 1920. Prasasti ini terdiri dari 14 baris dalam bahasa Melayu kuno, dan ditulis dengan huruf Pallawa. Angka tahunnya 606 S atau 23 Maret 684 M. Isinya antara lain tentang pembuatan taman Sriksetra atas perintah Punta Hyang Sri Jayanasa,[24] untuk kemakmuran semua makhluk. Di samping itu, ada juga doa dan harapan yang jelas menunjukkan sifat agama Buddha.

Di Telaga Batu, dekat Palembang, juga ditemukan sebuah prasasti berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa. Prasasti ini bagian atasnya dihiasi dengan tujuh kepala ular kobra berbentuk pipih dengan mahkota berbentuk permata bulat. Lehernya mengembang dengan hiasan kalung. Hiasan ular kobra ini bersatu dengan permukaan batu datar di bagian belakang. Jumlah barisnya ada 28 dalam keadaan yang sangat aus, bahkan beberapa huruf tidak dapat dibaca. Di bagian bawah prasasti ini ada cerat (pancuran) seperti halnya yoni. Prasasti ini tidak memuat angka tahun. Menurut F.M. Schnitger, prasasti Telaga Batu ini berasal dari abad IX atau X Masehi,[25] sedangkan menurut J.G. de Casparis, prasasti ini sezaman dengan prasasti Kota Kapur, yaitu dari pertengahan kedua abad VII Masehi.[26]

---

[22] Lihat Boechari, 1979, hlm. 26

[23] G. Coedès, 1964, hlm. 24–32

[24] W.F. Stutterheim di dalam karangannya Oudheden van Bali, I, hlm. 67, membaca nama ini sebagai punta hyang *sri jayawaga,* sedangkan R.Ng. Poerbatjaraka di dalam karangannya Riwayat Indonesia, I, hlm. 35 membacanya sebagai punta hyang *sri jayanaga*

[25] F.M. Schnitger, 1931, hlm. 1

[26] J.G. de Casparis, 1956, hlm. 16

(a)

(b)

Gambar 3.3 (a) Prasasti Telaga Batu, Palembang, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti Kota Kapur, Bangka, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

Setelah sekian lama prasasti ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor D155, pada tahun 1956 diterbitkan oleh J.G. de Casparis. Prasasti ini terutama berisi kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada perintah raja. Selain itu, prasasti ini juga memuat data-data bagi penyusunan ketatanegaraan Sriwijaya, seperti penyebutan *yuvaraja* (putra mahkota), *pratiyuvaraja* (putra raja kedua), *rajakumara* (putra raja ketiga), *rajaputra* (putra raja keempat), *bhupati* (bupati), *senapati* (pemimpin pasukan), *nayaka, pratyaya, haji pratyaya* (orang kepercayaan raja?), *dandanayaka* (hakim), *tuha an vatak vuruh* (pengawas sekelompok pekerja), *addhyaksi nijavarna,*[27] *vasikarana* (pembuat pisau), *kayastha* (juru tulis), *sthapaka* (pemahat), *puhavam* (nakhoda kapal), *vaniyaga, pratisara, marsi haji, hulunhaji* (saudagar, pemimpin, tukang cuci, budak raja), *datu, dan kadatuan*.[28]

Mengenai kata *datu* ini Coedès menginterpretasikan sebagai "gubernur provinsi" dan *kadatuan* sebagai "kantor dari *datu*".[29] Interpretasi Coedès ini tidak dapat diterima oleh de Casparis sebab *kadatuan* adalah kerajaan sebagai keseluruhan. Selain itu, mungkin kerajaan ini dibagi menjadi sejumlah *mandala* yang masing-masing diperintah oleh seorang *datu*.[30]

Mengingat isinya yang berupa kutukan-kutukan, beberapa ahli berpendapat bahwa prasasti Telaga Batu ini dikeluarkan atau ditempatkan di ibu kota kerajaan.[31] Akan tetapi, Soekmono menolak pendapat tadi. Ia berpendapat prasasti Telaga Batu ini tidak mungkin dipancangkan di ibu kota kerajaan.[32] Pendapat Soekmono ini disetujui oleh Chan Chirayu Rajani.[33]

Di samping ketiga prasasti tersebut di atas, masih ada tiga prasasti lagi yaitu prasasti Kota Kapur yang ditemukan dekat Sungai Menduk di Pulau Bangka bagian barat. Prasasti ini mungkin dibawa dari luar pulau karena jenis batu yang dipakai tidak dijumpai di pulau ini. Bentuk huruf dan bahasa yang dipakai sama dengan prasasti-prasasti yang telah diuraikan terdahulu. Isi 10 baris tentang kutukan kepada mereka yang berbuat jahat, tidak tunduk dan tidak setia pada raja. Mereka ini akan celaka. Keterangan yang terpenting ialah mengenai usaha Sriwijaya untuk menaklukkan *bhumi* jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Angka tahunnya 608 S atau 28 April 686 Masehi.

---

[27] Menurut Casparis kata ini harus dibaca *adhyaksa nicavarna* yang artinya pengawas kasta rendahan (J.G. de Casparis, ibid., hlm. 32 catatan 6)

[28] Ibid., hlm. 32–37. Lihat juga Kenneth R. Hall, 1976, hlm. 61–105

[29] G. Coedès, 1930, hlm. 54 dan 67

[30] J.G. de Casparis, 1956, hlm. 18 catatan 10

[31] O.W. Wolters, 1967, hlm. 335 catatan 84

[32] R. Soekmono, 1958, hlm. 252; 1979, hlm. 79

[33] Chan Chirayu Rajani, 1974, II, hlm. 288

(a)

(b)

Gambar 3.4 (a) Arca Wisnu, batu, Kota Kapur, Bangka; sekarang di Balai Arkeologi Palembang (*Sumber*: Esh) ; (b) Candi Kota Kapur, Bangka (*Sumber*: Puslitbang, Arkenas)

Berdasarkan kalimat tadi G. Coedès berpendapat bahwa pada saat prasasti Kota Kapur ini dibuat, tentara Sriwijaya baru saja berangkat untuk berperang melawan Jawa. Adapun kerajaan yang diserangnya yaitu kerajaan Taruma, yang sejak tahun 666–669 M tidak terdengar mengirimkan utusan lagi ke Cina. Kerajaan Taruma ini merupakan inti dari ekspansi kekuasaan Sriwijaya di Jawa yang dibuktikan oleh adanya prasasti Juru Mangambat di Jawa Barat dan prasasti Gondosuli di daerah Kedu, Jawa Tengah.[34]

Sementara itu, P.V. van Stein Callenfels menduga bahwa yang dimaksud dengan kata "jawa" dalam prasasti Kota Kapur, bukanlah merupakan nama, melainkan sebagai kata sifat yang berarti "luar", artinya prasasti ini berkenaan dengan suatu ekspedisi ke luar negeri.[35] Boechari dalam hal ini berpendapat bahwa prasasti Kota Kapur dikeluarkan setelah tentara Sriwijaya kembali dari usahanya menaklukkan daerah Lampung Selatan, bukan Jawa Barat, karena Jawa Barat di dalam sumber-sumber sejarah selalu disebut Sunda.[36] Akan tetapi, melihat persaingan yang terus-menerus antara Sriwijaya dan Jawa pada abad-abad yang kemudian, Satyawati Suleiman menduga bahwa besar sekali kemungkinannya prasasti Kota Kapur merupakan bukti usaha Sriwijaya untuk pertama kalinya menundukkan Jawa yang sudah ada sejak abad V.[37]

Sekitar satu abad menjelang munculnya Sriwijaya, tampaknya pesisir timur Sumatra mulai memperlihatkan kemajuan yang berarti. Di Kota Kapur, tempat ditemukannya prasasti Kota Kapur dari masa Sriwijaya itu, para arkeolog telah menemukan 2 buah candi dari batu putih. Hasil analisis C14 atas sampel arang dari bawah candi memperlihatkan suatu usia yang cukup tua yaitu dari awal abad VI. Lagi pula pada salah satu bangunan (candi II) yang tinggal bagian kaki candinya, di bagian tengahnya terdapat sebuah batu tegak yang menancap menyerupai menhir. Pada salah satu sisi kaki candi terdapat tanda-tanda adanya saluran kecil semacam somasutra yang menghubungkan menhir itu dengan bagian sisi luar bangunan. Pada candi yang satunya (candi I) para peneliti juga menemukan 2 arca serta sejumlah fragmen tangan arca. Kedua arca tersebut menggambarkan arca Wisnu yang secara ikonografis dapat digolongkan dengan arca-arca yang berasal dari abad VI pula.[38]

Perihal pendudukan Bangka oleh Sriwijaya, di dalam prasasti Kota Kapur juga disebutkan bahwa pembuatan prasasti Kota Kapur itu dilaksanakan bertepatan waktunya dengan pemberangkatan pasukan Sriwijaya ke Bhumi

[34] G. Coedès, 1968, hlm. 83; lihat juga F.D.K. Bosch, 1941, hlm. 51

[35] P.V. van Stein Callenfels, BEFEO, XXX, 1930, hlm. 656

[36] Boechari, 1979, hlm. 25

[37] Satyawati Suleiman, 1977

[38] Soeroso, op. cit.

Jawa yang dianggap tidak berbakti ke Sriwijaya. Memerhatikan bahwa di Jawa sebelum munculnya Sriwijaya telah berkembang kerajaan Tarumanagara dengan rajanya bernama Purnawwarman yang menganut agama Wisnu serta membandingkan arca Wisnu yang ditemukan di Kota Kapur dengan arca Wisnu yang ditemukan di Cibuaya, besar kemungkinan bahwa Bhumi Jawa yang dimaksud dalam prasasti Kota Kapur itu adalah Tarumanagara. Dugaan ini diperkuat pula dengan temuan tidak kurang dari 20 bangunan candi bata di Batujaya yang diperkirakan berasal dari sekitar abad V Masehi.

Prasasti lain yang hampir sama bunyinya dengan prasasti Kota Kapur yaitu prasasti yang diketemukan oleh L.M. Berkhout tahun 1904 di daerah Karang Brahi, di tepi Sungai Merangin, cabang Sungai Batang Hari di Jambi Hulu. Prasasti ini tidak menyebut kalimat terakhir dari prasasti Kota Kapur, yang memuat angka tahun dan usaha penyerangan *bhumi* jawa. Selain itu, baris 1–4 prasasti ini ditulis dengan dialek yang berbeda dengan baris selanjutnya. Bagian ini telah beberapa kali dicoba oleh para ahli untuk memberikan artinya, dan usaha yang terakhir dilakukan oleh L-C. Damais.[39]

Menurut N.J. Krom pengeluaran prasasti-prasasti yang berisi kutukan ini boleh dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Sriwijaya.[40] de Casparis dalam hal ini berpendapat bahwa ancaman yang terdapat di dalam prasasti Karang Brahi dan Kota Kapur ditujukan terhadap musuh-musuh di dalam negeri Sriwijaya.[41]

Dari daerah Palas Pasemah ditemukan sebuah prasasti yang isinya hampir sama dengan prasasti Kota Kapur dan Karang Brahi. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1958 di tepi Sungai (Way) Pisang, anak Sungai Sekampung, Lampung Selatan. Prasasti ini seperti halnya prasasti Karang Brahi, juga tidak memuat baris terakhir prasasti Kota Kapur yang menyebut angka tahun dan serangan atas *bhumi* jawa.

Menurut Boechari, berdasarkan perbandingan bentuk hurufnya dengan prasasti-prasasti lainnya, prasasti Palas Pasemah ini diduga berasal dan akhir abad VII dan memperingati ditaklukkannya daerah Lampung Selatan oleh Sriwijaya. Kutukan yang ada dalam prasasti ini mungkin ditujukan kepada daerah *bhumi* jawa (juga di Lampung Selatan) dan daerah sekitarnya yang berani memberontak kepada Sriwijaya.[42]

---

[39] L-C. Damais, 1968; H. Kern, VG VII, 1917, hlm. 205; G. Ferrand, 1932; V. Obdeyn, 1943; W. Aichele, 1936; R.Ng. Poerbatjaraka, 1952; R.B. Slametmuljana, 1963

[40] N.J. Krom, TBG, LIX, 1921, hlm. 426–431;1931, hlm. 117

[41] J.G. de Casparis, 1956, hlm. 15–46

[42] Boechari, 1979, hlm. 31

Pada tahun 1985 di Desa Bungkuk, Kabupaten Lampung Tengah ditemukan prasasti yang sebagian rusak, sehingga tidak terbaca. Bagian yang terbaca memuat kutukan seperti prasasti Sriwijaya yang lain. Prasasti ini menyebut *datu* Sriwijaya. Prasasti ini merupakan bukti jangkauan wilayah Sriwijaya, kali ini di tepi Sungai Way Sekampung, Lampung.

Sekitar tahun 1992 sebuah prasasti batu ditemukan kembali di Boom Baru, Palembang Timur. Melihat isi bahasa dan gaya tulisannya, prasasti tersebut sama usianya dengan prasasti-prasasti Sriwijaya yang lain.

Selain dari delapan prasasti yang disebut terdahulu, masih ada beberapa prasasti singkat seperti fragmen prasasti yang ditemukan tahun 1928 di daerah Bukit Seguntang. Fragmen ini terdiri dari 21 baris dan menyebut adanya peperangan, seperti yang tertera pada baris ke-10 yang berbunyi *tida tahu pira marvyu(ha)* atau tidak tahu berapa banyak yang berperang. Kemudian baris ke-5 yang berbunyi *vañak pramiraœña* atau banyak darah tertumpah. Lalu baris ke-9 yaitu pauravirakta atau merah (oleh darah) penduduknya, serta *mamañcak yam praja* ini yang diduga berkenaan dengan peperangan itu sendiri. Fragmen ini juga memuat kutukan kepada mereka yang berbuat salah.[43]

Prasasti singkat lainnya berupa dua buah fragmen prasasti dari tanah liat. Bahasa yang dipakai bahasa Sanskerta. Prasasti pertama disimpan di Museum Nasional, Jakarta dengan no. D162, asalnya dari kampung Sabukingking, 2 Ilir bagian timur kota Palembang. Isinya tentang kemenangan raja Sriwijaya atas tentaranya sendiri yang membangkang, bukan atas musuhnya dari luar.[44] Prasasti kedua juga ditemukan di tempat yang sama dan disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan no. D163. Isinya tentang kemenangan Sriwijaya atas tentara musuh.[45]

Fragmen prasasti lain dari Telaga Batu berupa prasasti batu yang isinya melengkapi prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan no. D161. Isinya 8 baris tentang perjalanan Dapunta Hyang dan pendirian sebuah wihara.[46]

---

[43] J.G. de Casparis, op. cit., hlm. 2–6

[44] Ibid., hlm. 6–7

[45] Ibid., hlm. 8–10

[46] Mengenai hal ini Casparis mengatakan bahwa perkataan vihara ini di vanua ini berarti pembuatan suatu vihara baru atau kunjungan ke suatu vihara di daerah Telaga Batu dan berhubungan dengan berhasilnya ekspedisi Dapunta Hyang pada tahun 683 M. Vihara ini mungkin terdapat di sekitar Telaga Batu, dan F.M. Schnitger pada tahun 1935 dan 1936 pernah menemukan beberapa timbunan batu bata di daerah ini. (J.G. de Casparis, 1956, hlm. 11–14; lihat juga F.M. Schnitger, 1937, hlm. 1)

Peta 3.2 Lokasi Situs Karangagung dan Air Sugihan, di pantai timur Sumatra Selatan

Fragmen selanjutnya ditemukan di Bukit Seguntang di sebelah barat kota Palembang dan sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta dengan no. D164. Menurut Casparis prasasti ini ada hubungannya agama Buddha. Hal ini disimpulkan dari adanya kata *siksyaprajña* yang harus dibaca *sikssaprajña* atau *siksa* dan *prajña* yaitu dua pengertian dasar di dalam agama Buddha Mahayana dan beberapa sekte agama Buddha Hinayana.[47]

Beberapa prasasti pendek lain dari daerah Telaga Batu hanya berisi perkataan *srivijaya jaya siddhayatra* dan *jaya siddhayatra sarvvasatva.* Beberapa dari prasasti ini disimpan di Museum Palembang dan sebagian disimpan di Museum Nasional, Jakarta dengan nomor inventaris D156, D157, D158, D159, dan D160.

Selanjutnya sejak tahun 1933 hingga tahun 1995 ditemukan lagi sebanyak 4 buah prasasti pendek berisi perkataan *siddhayatra. jaya siddhayatra.* Keempat prasasti itu ditemukan di tengah tegal yang terletak di bagian selatan Bukit Seguntang.[48]

Dari keterangan-keterangan yang terdapat dalam prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya telah meluaskan daerah kekuasaannya mulai dari daerah Malayu di sekitar Jambi sekarang sampai ke Pulau Bangka dan daerah Lampung Selatan, serta usaha menaklukkan Pulau Jawa yang menjadi saingannya dalam bidang pelayaran dan perdagangan dengan luar negeri.

Penaklukan Pulau Bangka diduga erat hubungannya dengan penguasaan perdagangan dan pelayaran internasional di Selat Malaka. Selain letaknya yang strategis, Pulau Bangka pada masa Sriwijaya menurut Obdeyn, masih bersambung menjadi satu dengan Semenanjung Tanah Melayu termasuk di dalamnya kepulauan Riau dan Lingga. Selat Sunda juga belum ada saat itu. Jika benar demikian adanya, berarti pelayaran internasional India-Indonesia-Cina harus melalui Selat Bangka sehingga pantai timur Sumatra dan pantai utara Jawa menjadi sangat penting.[49] Namun, pendapat Obdeyn ini dibantah dengan tegas oleh Verstappen. Menurut sarjana ini kepulauan Riau dan Lingga pada masa Sriwijaya memang merupakan tanah lanjutan dari Semenanjung Tanah Melayu, tetapi Pulau Bangka dan Belitung sudah dipisahkan oleh laut.[50] Hanya mungkin laut ini masih berupa selat sempit dan dangkal sehingga belum dapat dipakai untuk pelayaran, dan lalu lintas pelayaran tetap melalui Selat Bangka.

---

[47] J.G. de Casparis, 1956, hlm. 10–11

[48] Soeroso, "Jaya-Siddhayatra Sarwwasatwa", Siddhayatra, Bulletin Balai Arkeologi Palembang, Edisi Perdana, 1996, hlm. 9

[49] V. Obdeyn dalam pelbagai karangannya yang dimuat di TAG, LVIII – LXI, 1941 – 1944

[50] Lihat Amerta no. 3, 1954, hlm. 32; Verstappen, 1973

(a) (b)

(c)

Gambar 3.5 (a) Amulet, logam, Karangagung (*Sumber*: Srs); (b) Manik-manik mutisala, Karangagung (*Sumber*: Puslitbang Arkenas), gelang kaca, Karangagung (*Sumber*: Srs); (c) Fragmen tiang nibung, situs Air Sugihan (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

Justru temuan situs permukiman kuno yang ada dari situs Karangagung, Kabupaten Musi Banyuasin, makin memperkuat dugaan kita bahwa sejak masa sebelum Sriwijaya muncul, posisi garis pantai timur Sumatra Selatan tidak pernah mengalami perubahan yang berarti hingga masa Sriwijaya. Temuan sejumlah tiang bangunan yang diduga merupakan sisa-sisa bangunan tempat tinggal kuno memperkuat dugaan bahwa jauh sebelum Sriwijaya muncul, di pesisir timur telah berkembang kehidupan masyarakat yang telah menjalin hubungan yang intensif dengan kawasan Asia Tenggara Daratan. Sebuah amulet yang menggambarkan tokoh seperti penari telah ditemukan di Karangagung dan bentuknya mirip dengan yang ditemukan oleh Malleret di Oc-eo.[51] Dapatkah situs Karangagung dan Air Sugihan yang terletak di muara Sungai Musi dikaitkan dengan Ko-ying dan Kan-t'o-li? Diharapkan penelitian di tahun-tahun mendatang dapat menjawab pertanyaan ini.

Dengan menguasai negara-negara di sekitarnya, dan Pulau Bangka Sriwijaya sepenuhnya dapat menguasai lalu lintas perdagangan dan pelayaran dari negara-negara Asia Barat dan India ke Cina dan sebaliknya, karena perahu-perahu asing semuanya terpaksa harus berlayar melalui Selat Malaka dan Selat Bangka yang dikuasai oleh Sriwijaya. Keuntungan yang diperoleh Sriwijaya dari perahu-perahu asing berlimpah-limpah. Kecuali keuntungan dari penarikan bea cukai, Sriwijaya masih memperoleh keuntungan lain dari perdagangan. Dari pernyataan I-tsing kita ketahui bahwa kapal-kapal asing itu datang di Kedah dan Malayu pada waktu-waktu tertentu. Mereka tinggal di kedua tempat itu selama beberapa lamanya sambil menunggu datangnya angin baik, baru melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuan masing-masing. Selama tinggal di pelabuhan, kapal-kapal dagang itu berkesempatan membongkar dan memuat barang-barang dagangan. Sementara itu, dari daerah Sriwijaya sendiri dihasilkan penyu, gading, emas, perak, kemenyan, kapur barus, damar, lada, dan lain-lainnya. Barang dagangan tadi dibeli oleh pedagang asing atau ditukar dengan porselen, kain katun, dan kain sutra. Selain kapal-kapal asing yang datang di Kedah dan Malayu, kapal-kapal Sriwijaya juga melakukan pelayaran ke Cina.

Satu hal yang hingga kini masih dipersoalkan oleh para ahli yaitu mengenai letak Sriwijaya. Pendapat yang banyak diikuti dan sudah dianggap sebagai suatu fakta sejarah ialah pendapat yang dikemukakan oleh G. Coedès pada tahun 1918, bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sebenarnya lokasi Sriwijaya di Palembang itu masih menghadapi kemungkinan lain. Keberatan utama tentang Palembang sebagai pusat Sriwijaya ialah

---

[51] Endang Sri Hardiati, "Temuan manik-manik dan amulet dari situs Karangagung, Sumatra Selatan sebagai bukti perdagangan kuno", Fajar Masa Sejarah, 2003, hlm. 32–33

kenyataan bahwa di daerah Palembang hanya ditemukan sedikit peninggalan-peninggalan arkeologi. Keberatan ini pertama kali dikemukakan oleh F.D.K. Bosch pada tahun 1930, lalu R.C. Majumdar. Sarjana ini berpendapat bahwa Sriwijaya harus dicari di Pulau Jawa dan selanjutnya di daerah Ligor.[52] Sementara itu, H.G. Quaritch Wales menempatkan Sriwijaya di Chaiya. Pendapatnya ini didasarkan atas penelitian di daerah Chaiya. Namun, dalam telaahnya yang lain ia menempatkan Sriwijaya di daerah Perak.[53]

Meskipun banyak keberatan dikemukakan oleh para ahli, Coedès tetap pada pendiriannya bahwa Sriwijaya terletak di pantai timur Sumatra Selatan yakni di Palembang.[54] Tentunya ia telah melengkapi pendapatnya ini dengan bukti-bukti yang lebih banyak lagi. Beberapa sarjana yang memperkuat kedudukan Palembang sebagai lokasi Sriwijaya antara lain ialah K.A. Nilakanta Sastri,[55] R.Ng. Poerbatjaraka,[56] R.B. Slametmuljana,[57] O.W. Wolters,[58] dan B. Bronsons.[59]

Berdasarkan rekonstruksi peta Asia Tenggara dengan menggunakan berita-berita Cina dan Arab, J.L. Moens sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya itu mula-mula berpusat di Kedah, tetapi kemudian berpindah ke daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Batang Mahat di daerah Muara Takus.[60]

Selanjutnya Soekmono melalui penelitian geomorfologi dan meneliti peran kota Jambi sekarang dalam sejarah Sriwijaya, berkesimpulan bahwa Jambi lebih tepat sebagai lokasi Sriwijaya daripada Palembang, karena letaknya di teluk yang dalam dan terlindung tetapi langsung menghadap ke lautan bebas tempat persimpangan jalan pelayaran antara Lautan Cina Selatan di Timur, Laut Jawa di Tenggara, dan Selat Malaka di barat-laut.[61]

---

[52] F.D.K. Bosch, OV, 1930, hlm. 155; R.C. Majumdar, BEFEO, XXIII, 1933, hlm. 121–141

[53] H.G. Quaritch Wales, IAL IX, 1935, hlm. 1–35; Lihat juga R. Soekmono, 1979, hlm. 75

[54] G. Coedès, 1936, hlm. 1–9

[55] K.A. Nilakanta Sastri, *History of Sriwijaya*, 1949, hlm. 27–35

[56] R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia, I, 1952, hlm. 35

[57] R.B. Slametmuljana, Sriwidjaja, Ende, 1963

[58] O.W. Wolters, *Early Indonesian Commerce. A study on the Origins of Srivijaya*, 1967

[59] Bennet Bronson et. al., 1974, hlm. 44 dan 59; B. Bronson dan Jan Wisseman, AP, XIX (2), 1976, hlm. 220–239

[60] Berita Cina mengatakan bahwa di ibu kota Sriwijaya bila pada tengah hari orang berdiri di tanah lapang, ia tidak mempunyai bayangan. Ini berarti ibu kota Sriwijaya ada di khatulistiwa. Karena Muara Takus ada di khatulistiwa, Moens menduga di situlah situs ibu kota Sriwijaya (J.L. Moens, 1937, hlm. 317–487)

[61] R. Soekmono, JSS, 46, 1958; LKIPN, I, 1958, hlm. 245–262; Pra Seminar Penelitian Sriwijaya, 1979, hlm. 75–83

Pendapat terbaru mengenai persoalan ini dikemukakan oleh Boechari. Menurut pendapatnya sebelum tahun 682 M ibu kota Sriwijaya ada di daerah Batang Kuantan, setelah tahun 682 M ibu kota berpindah ke Mukha Upang di daerah Palembang.[62] Akhirnya Chan Chirayu Rajani di dalam beberapa artikelnya sekuat tenaga mendesak agar Chaiya diterima sebagai ibu kota Sriwijaya. Pendapatnya ini didasarkan sumber sejarah yang tertulis dalam bahasa Thai. Dengan demikian, hingga saat ini ada lima buah lokasi yang diusulkan untuk menggantikan kedudukan Palembang sebagai ibu kota Sriwijaya.

Namun, dengan adanya temuan-temuan arkeologi akhir-akhir ini, berupa situs permukiman kuno di Karangagung dan Air Sugihan, serta temuan manik-manik, gerabah, atau keramik dari dinasti Sui, makin kuatlah pendapat Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, dengan asumsi situs Karangagung dan Air Sugihan adalah pendahulu Sriwijaya.

3. Perkembangan Selanjutnya

Dari daerah Ligor di Semenanjung Tanah Melayu ditemukan sebuah prasasti batu yang kedua sisinya bertulisan. Prasasti ini dikenal dengan sebutan prasasti Ligor. Pada sisi muka, yang biasanya disebut prasasti Ligor A,[63] disebutkan seorang raja Sriwijaya. Selain itu, juga memuat angka tahun 775 M dan pembangunan trisamaya caitya untuk Padmapani, Sakyamuni, dan Wajrapani. Sisi belakang, yang biasanya disebut prasasti Ligor B, tidak menyebutkan angka tahun meskipun prasasti ini dimulai dengan kata swasti. Prasasti Ligor B ini hanya terdiri dari 4 baris tulisan yang merupakan satu bait prasasti berbahasa Sanskerta dan setengah baris permulaan bait kedua.[64] Isinya menyebut seorang raja bernama Wisnu dengan gelar sarwarimadawimathana atau pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa.[65]

---

[62] Boechari, 1979a, hlm. 26, 28; 1979b, I hlm. 5. Toponim Mukha Upang sudah tidak di jumpai lagi, tetapi di Kecamatan Musi Banyuasin II, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, kurang lebih 45 km sebelah timur Palembang di tepi kiri Sungai Musi masih dijumpai Desa Upang. Apakah Desa Upang ini sama dengan Mukha Upang perlu penelitian lebih lanjut. Temuan keramik Cina di daerah ini menurut Abu Ridho tidak ada yang berasal dari abad VII atau VIII

[63] Penyebutan prasasti Ligor A dan B mula-mula diusulkan oleh R.C. Majumdar, karena ia beranggapan kedua prasasti ini dibuat atas perintah raja yang berlainan. Selanjutnya ia menduga bahwa pusat kekuasaan Sailendra di Semenanjung Tanah Melayu (R.C. Majumdar, BEFEO, XXXIII, 1933, hlm. 126–127)

[64] Boechari pernah menduga bahwa prasasti Ligor B itu ditulis oleh Balaputradewa, raja Sriwjjaya keturunan Sailendra, yang memerintah Sriwijaya pada pertengahan abad IX (Boechari, 1979b, appendix 3a, I, hlm. 6 catatan 6)

[65] G. Coedès, BEFEO, XVIII, 1918, hlm. 17–31; F.D.K. Bosch, TBG, LXXXI, 1941, hlm. 26–38; B.Ch. Chhabra, 1935, hlm. 22–24; K.A. Nilakanta Sastri, 1945, hlm. 125; G. Coedès, 1950, hlm. 58–70

Dari Nalanda di India bagian timur (negara bagian Bihar) ditemukan sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh raja Dewapaladewa.[66] Prasasti ini tidak menyebut angka tahun dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Diduga prasasti ini berasal dari pertengahan abad IX. Isinya tentang pendirian bangunan biara di Nalanda oleh raja Balaputradewa, raja Sriwijaya yang menganut agama Buddha. Selain itu, disebutkan juga kakek raja Balaputradewa yang dikenal sebagai raja Jawa dan bergelar *Sailendrawamsatilaka Sri Wirawairimathana*[67] atau permata keluarga Sailendra pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Ia mempunyai anak bernama Samaragrawira yang kawin dengan Tara, anak raja Dharmasetu dari Somawangsa. Disebutkan juga permintaan kepada raja Dewapaladewa untuk memberikan tanah-tanahnya sebagai *sima* untuk biara tadi.[68]

Dari dua prasasti, Nalanda dan Ligor, kita melihat adanya satu tokoh yang sama yang disebut permata wangsa Sailendra, pembunuh musuh-musuh yang sombong atau pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Kemudian berdasarkan keterangan dari prasasti Karangtengah atau disebut juga prasasti Kayumwungan, tokoh ini dapat diidentifikasi dengan Rakai Panangkaran[69] yang disebut di dalam prasasti Kalasan dan prasasti Ratu Baka dengan nama Tejahpurnnapana Panamkarana.[70]

Menurut prasasti Nalanda, tokoh Sailendrawamsatilaka ini mempunyai anak bernama Samaragrawira, yang mungkin dapat kita samakan dengan Samaratungga yang disebut di dalam prasasti Kayumwungan dari tahun 746 S

---

[66] Menurut Stutterheim, raja Dewapaladewa merupakan pengganti raja Dharmapala yang meninggal sekitar tahun 878 M (W.F. Stutterheim, 1929, hlm. 9–12)

[67] Mengenai Sailendrawangsa dapat dibaca Bab IV

[68] Hirananda Sastri, Epigraphia Indica, 17 no. 17, 1924, hlm. 310–327; F.D.K. Bosch, TBG, LXV, 1925, hlm. 509–88; J. Gonda, 1952; W.F. Stutterheim, 1929, hlm. 9–12; N.J. Krom, H.J.G., 1931. Sementara itu, Moens mengatakan bahwa ibu Balaputra dilarikan oleh Samaragravira ke Kataha ketika sedang mengandung Balaputra, sedangkan suaminya adalah raja Sailendra. Oleh karena itu, Samaragrawira bukan raja Sailendra (J.L. Moens, 1937)

[69] Uraian lebih lengkap dapat dibaca di Bab IV

[70] Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Bosch meskipun masih ragu-ragu. Ia kemudian menyamakan Sri Maharaja di prasasti Ligor dengan raja Sailendra di prasasti Kalasan dan Dharanindra di prasasti Kelurak. Ia kakek Balaputradewa yang disebut Yawabhumipala di prasasti Nalanda. Raja ini menurunkan Samaratungga (prasasti Kayumwungan) atau Samaragrawira (prasasti Nalanda), yang kawin dengan Tara putri Dharmasetu dari Somawangsa. Ia mempunyai anak Pramodawardhani (prasasti Kayumwungan) dan Balaputradewa (prasasti Nalanda), mereka semua dari keluarga Sailendra. Sedangkan keluarga Sailendra yang memerintah di Sriwijaya ialah Culamaniwarman dan Marawijayottunggawarman seperti yang disebutkan di prasasti Leiden (F.D.K. Bosch, 1952, hlm. 113–123; 1925 hlm. 509–588)

atau 824 M.[71] Samaratungga mempunyai seorang putri mahkota yang bernama Pramodawardhani. Putri ini kemudian kawin dengan Rakai Pikatan. Istrinya yang lain yaitu Tara, putri Dharmasetu raja Sriwijaya dari Somawangsa.[72] Casparis berpendapat bahwa setelah Samaratungga meninggal Rakai Pikatan dan Pramodawardhani naik takhta kerajaan Mdang. Balaputra, karena merasa dirinya juga berhak atas takhta kerajaan, kemudian menyerang Rakai Pikatan untuk merebut kekuasaan. Akan tetapi, ia dapat dikalahkan, meskipun telah mencoba bertahan di atas bukit Ratu Baka. Dalam prasasti Siwagrha kejadian ini digambarkan di tempat pengungsian yang dibangun dengan beratus-ratus batu. Akhirnya, Balaputra terpaksa melarikan diri ke Sumatra, tempat tinggal kakeknya dari pihak ibu, dan berhasil menjadi raja di Sriwijaya. Selanjutnya Balaputra mengadakan hubungan persahabatan dengan raja Dewapaladewa dari Benggala.[73] Pada saat itu raja Dewapaladewa dikenal sebagai pelindung agama Buddha dan di Nalanda terdapat perguruan tinggi agama Buddha yang banyak menarik minat para *bhiksu* dari daerah Asia Tenggara dan Cina untuk belajar di sana. Para *bhiksu* ini tidak saja belajar soal-soal keagamaan, tetapi juga mempelajari seni arca dan arsitektur. Setelah kembali ke tanah airnya, pengetahuan yang mereka peroleh diterapkan sesuai dengan keadaan setempat.[74]

Bagaimana sebenarnya keadaan di Sriwijaya pada abad IX tidak begitu jelas, khususnya mengenai pusat kerajaannya, meskipun banyak prasasti dari masa itu kita jumpai. Satu hal yang pasti ialah daerah Semenanjung Tanah Melayu tidak lagi dianggap sebagai bagian dari Sriwijaya yang saat itu masih berkuasa di Sumatra.

Dari kitab sejarah dinasti Sung kita memperoleh keterangan bahwa raja Sriwijaya[75] pada tahun 960 M ialah Se-li Hu-ta-hsiali-tan dan pada tahun 962 M She-li Wu-yeh. Kedua nama ini mungkin dapat disamakan dengan Sri

---

[71] Prasasti ini ditulis dalam dua bahasa yaitu bahasa Jawa kuno dan Sanskerta (J.G. de Casparis, 1950, hlm. 24-50)

[72] Pendapat ini mula-mula dikemukakan oleh N.J. Krom (1938–40, I, hlm. 162) dan didukung oleh F.D.K. Bosch (BKI, 108, 1952) dan diperkuat oleh G. Coedès (OE, VI, 1959, hlm. 44). Menurut J.G. de Casparis, Dharmasetu adalah anak Dharmapala dari keluarga Pala yang berkuasa di Bengal (J.G. de Casparis, 1956, hlm. 259)

[73] J.G. de Casparis, 1956, hlm. 280–330. Mengenai hal ini Boechari berpendapat bahwa kata Valaputra yang terdapat di dalam prasasti Siwagrha itu Rakai Kayuwangi, anak bungsu Rakai Pikatan, sedangkan raja yang menyerang Rakai Pikatan seperti yang disebutkan prasasti Siwagrha ialah Rakai Walaing pu Kumbhayoni. Uraian lebih terperinci dapat dibaca Bab IV

[74] Hal ini dapat kita lihat pada arca-arca dan candi-candi, yang meskipun memperlihatkan unsur-unsur seni India, tetapi unsur-unsur seni setempat juga terlihat dengan jelas (F.D.K. Bosch, 1952)

[75] Dalam kitab sejarah dinasti Sung dan Ming Sriwijaya tidak lagi disebut dengan sebutan She-li-fo-she, melainkan San-fo-tsi (G. Coedès, 1968, hlm. 320 catatan 176 R.Ng. Poerbatjaraka, 1952, hlm. 26; Soekmono, 1958 hlm. 246, dan sebagainya). Moens

Udayadityawarman.[76] Pada tahun 971, 972, 974, dan 975 M ada beberapa utusan datang di Cina, tetapi tidak menyebutkan nama rajanya, sedangkan utusan yang datang tahun 980 dan 983 M menyebutkan nama rajanya yaitu Hsia-she. Pada tahun 983 M Fa-yu pendeta Cina ketika pulang dari India setelah mempelajari kitab-kitab suci, singgah di San-fo-tsi. Di sini ia berjumpa dengan pendeta India Mi-mo-lo-she-li (Vimalasri) yang ingin pergi ke Cina untuk menerjemahkan kitab-kitab suci.[77] Pada tahun 988 M datang seorang utusan dari San-fo-tsi di Cina. Setelah ia tinggal di negeri Cina dua tahun, ia pergi ke Kanton, di sana ia mendengar bahwa negaranya diserang oleh She-p'o. Oleh karena itu, ia terpaksa tinggal setahun lagi di negeri Cina. Pada tahun 992 M ia berlayar kembali ke Campa, tetapi karena tidak ada kabar apa pun tentang negerinya, ia kembali lagi ke negeri Cina dan mohon agar kaisar suka mengeluarkan pengumuman bahwa negerinya ada di bawah perlindungan kaisar. Berita adanya peperangan antara Sanfo-tsi dan Shep'o diperkuat oleh keterangan utusan dari She-p'o yang datang pada tahun 922 M. Utusan ini mengatakan bahwa negerinya berperang terus-menerus dengan San-fo-tsi. Utusan ini membawa hadiah untuk kaisar berupa gading, mutiara, kayu cendana, sutra bersulam bunga dan emas, sutra berwarna, katun berwarna, kura-kura, pinang, pedang pendek yang tangkainya terbuat dari cula badak, tikar rotan, burung kakaktua putih, logam mulia, dan rumah-rumahan kecil dari kayu cendana. Selain itu, utusan tadi menceritakan bahwa rajanya bernama Aji Maraya, istri raja yang bukan parameswari bernama Lo-kien-si-po-li, sedangkan nakhoda kapal dagang disebut po-ho-wang dan istrinya disebut po-ho-pi-ni.[78]

Dari sumber-sumber Arab dan Persia kita juga memperoleh keterangan mengenai kerajaan Sriwijaya di Sumatra. Berita Arab yang pertama berasal dari Ibn Hordadzbeh dari tahun 844–848 M. Ia mengatakan bahwa raja Zabag disebut *maharaja,* kekuasaannya meliputi pulau-pulau di lautan timur. Hasil negerinya berupa kapur barus. Gajah banyak terdapat di sana. Pada tahun 851 M saudagar Sulayman menyebutkan tentang pelayarannya ke timur. Dikatakannya bahwa kapal mula-mula tiba di Kalah-bar yang diperintah oleh seorang raja seperti halnya Zabag. Kemudian dikatakannya ada gunung berapi di dekat Zabag. Pada tahun 902 M berita tadi diulangi oleh Ibn al-Fakih, bahwa Zabag Kalah-bar dikuasai oleh seorang raja. Di daerah ini terdapat

---

menghubungkan kerajaan San-fo-tsi dengan Samboja/Kedah dan Sriwijaya (J.L. Moens, 1937). Slametmuljana menghubungkan San-fo-tsi dengan Suwarnadwipa (R.B. Slametmuljana, 1981, hlm. 181)

[76] J.L. Moens, 1937, hlm. 457

[77] G. Coedès, 1968, hlm. 131–132

[78] W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 17–18; F. Hirth & W.W. Rockhill, 1911, hlm. 62

gunung berapi. Barang dagangannya terdiri dari cengkih, kayu cendana, kapur barus, dan pala. Pelabuhannya yang besar di pantai barat ialah Fancur (Barus). Rajanya disebut *maharaja* dan sangat kaya. Dari Ibn Rosteh, tahun 903 M, kita memperoleh keterangan bahwa *maharaja* Zabag merupakan raja yang terkaya dibandingkan dengan raja-raja di India. Sedangkan Abu Zayd, tahun 916 M mengatakan bahwa raja Zabag setiap hari melemparkan segumpal emas ke dalam danau di dekat istananya. Danau ini berhubungan dengan laut sehingga airnya payau. Raja Zabag ini menguasai banyak pulau-pulau antara lain Sribuza dan Rami. Kalah juga termasuk milik raja. Hasil buminya berupa kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, kayu hitam, kayu sapan, dan rempah-rempah. Perdagangan langsung dengan Kalah dan Oman. Pulau-pulaunya sangat subur dan penduduknya banyak. Tahun 955 M ahli geografi Mas'udi menyebutkan bahwa raja Zabag yang disebut *maharaja* menguasai banyak pulau-pulau, di antaranya Kalah, Sribuza, dan pulau-pulau lainnya di laut Cina. Rakyatnya banyak sedangkan tentaranya tidak terhitung. Dengan perahu tercepat sekalipun, orang tidak akan dapat mengelilingi pulau-pulau ini dalam waktu dua tahun. *Maharaja* Zabag mempunyai lebih banyak minyak wangi dan bahan-bahan yang berbau harum daripada yang dimiliki oleh raja-raja lain. Hasil daerahnya berupa kapur barus, cengkih, kayu gaharu, kayu cendana, pinang, pala, kapulaga, dan merica. Pelayaran dari Siraf dan Oman dikuasai oleh raja ini. Fansur menghasilkan kapur barus, sedangkan di Kalah dan Sribuza ada tambang emas dan timah.[79]

Hingga permulaan abad XI kerajaan Sriwijaya masih merupakan pusat pengajaran agama Buddha yang bertaraf internasional. Rajanya saat itu bernama Sri Culamaniwarman dan mengaku dirinya dari keluarga Sailendra. Untuk menghadapi ancaman dari Jawa,[80] Culamaniwarman mengadakan hubungan persahabatan dengan Cina dan Cola, yang saat itu merupakan dua kekuatan besar di Asia Tenggara. Pada masa pemerintahan Culamaniwarman ini, pendeta Dharmakrti salah seorang pendeta tertinggi di Suwarnadwipa dan tergolong ahli pada masa itu, menyusun kritik tentang Abhisamayalandara sebuah kitab ajaran agama Buddha.[81] Kemudian dari tahun 1011 hingga 1023 seorang biksu dari Tibet bernama Atisa datang ke Suwarnadwipa untuk belajar agama kepada Dharmakrti. Daerah kekuasaan Culamaniwarman meliputi Sriwijaya dan Kataha di Semenanjung Tanah Melayu (Kedah sekarang).[82]

---

[79] Lihat G. Ferrand, 1913–1914; juga 1922, hlm. 56–57

[80] Pada masa pemerintahan Culamaniwarman yaitu tahun 922, terjadi perang antara Sriwijaya dengan Jawa yang saat itu diperintah oleh Dharmawangsa Tguh. Dalam peperangan ini Dharmawangsa dapat mengalahkan Sriwijaya. Rupanya penguasaan Sriwijaya oleh Jawa tidak lama karena pada tahun 1003 Sriwijaya telah mengirimkan utusannya lagi ke Cina

[81] G. Coedès, 1968, hlm. 141

[82] N.J. Krom, 1931, hlm. 237; G. Coedès, 1968, hlm. 141

Gambar 3.6 (a) Arca Ganesa, batu, Palembang, koleksi Museum Badaruddin; (b) Arca leluhur dan arca Siwa, batu, Bumiayu, Muara Enim; (c) Pola hias candi, tanah liat, Bumiayu (*Sumber*: Esh)

Ternyata Sriwijaya tidak hanya mengembangkan agama Buddha, karena ada bukti yang menunjukkan perkembangan agama Hindu pada kira-kira abad VIII–IX M. Bukti tersebut adalah arca Ganesa batu berukuran besar yang ditemukan di kota Palembang pada tahun 80-an. Diperkirakan perkembangan agama Hindu ini masih berlanjut sampai kira-kira abad XI–XII M, seperti tampak pada situs Bumiayu, Kabupaten Muara Enim, yang memiliki sejumlah reruntuhan kompleks percandian.

Dari berita Cina kita memperoleh keterangan bahwa pada tahun 1003 raja Se-li-chu-la-wu-ni-fu-ma-tiau-hwa (Sri Culamaniwarmadewa) mengirim dua utusan ke Cina untuk membawa upeti. Mereka mengatakan bahwa di negaranya didirikan sebuah bangunan suci agama Buddha untuk memuja agar kaisar panjang umur. Mereka memohon agar kaisar memberikan nama dan genta. Bangunan suci itu kemudian diberi nama Cheng-tien-wa-shou.[83] Dalam tahun 1008 datang lagi satu perutusan dari raja yang bernama Se li-ma-la-pi (Sri Marawi) ke Cina. Mungkin yang dimaksud di sini ialah Sri Marawijayottunggawarman. Utusan selanjutnya datang di Cina pada tahun 1016, 1017, dan 1018.[84]

Dari keterangan di atas rupa-rupanya raja Culamaniwarman memerintah tidak lama, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Marawijayottunggawarman.[85] Sekitar tahun 1005–1006, yaitu pada masa pemerintahan ke-21 dari raja Cola yang bernama Rajakesariwarman Rajaraja I, raja Marawijayottunggawarman mendirikan sebuah bangunan suci agama Buddha di Nagipattana dengan bantuan raja Cola tadi. Bangunan ini kemudian diberi nama Culamaniwarmawihara.[86]

Hubungan persahabatan antara Sriwijaya dengan Cola kelihatannya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1017 tanpa sebab-sebab yang jelas raja Cola yang bernama Rajendracoladewa tiba-tiba menyerang Sriwijaya. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1025, seperti yang disebutkan di dalam prasasti Tanjore yang berangka tahun 1030. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Rajendracola.[87] Dalam serangan ini raja Sriwijaya yaitu Sri Sanggramawijayottunggawarman dapat ditawan oleh tentara Cola. Selain

---

[83] W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 65; G. Ferrand, 1922, hlm. 19

[84] O.W. Wolters, 1958, hlm. 604

[85] G. Coedès, 1918, hlm. 7

[86] Berita tentang pembangunan wihara di Nagipattana terdapat di dalam prasasti Leiden yang ditulis dalam dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Tamil. Bagian yang berbahasa Sanskerta ditulis tahun 1044, sedangkan yang berbahasa Tamil ditulis tahun 1046. Lihat Walter Elliot, 1878, hlm. 224; K.V. Subrahmanya Aiyer, Epigraphia Indica, XXII, hlm. 229; K.A. Nilakanta Sastri, 1949, hlm. 76

[87] Diduga terjadinya peperangan antara Sriwijaya dengan Cola mungkin erat hubungannya

Sriwijaya, Rajendracola I juga berhasil menaklukkan Kadaram (Kataha-Kedah), Panai, Malayur, Ilamuridesa (Lamuri), Ilanggasokam (Langkasuka), Madalinggam (Tambralingga), dan sebagainya. Rupa-rupanya setelah Sriwijaya ditaklukkan dan Sanggramawijayottunggawarman tertawan, kerajaan Sriwijaya tidak menjadi daerah jajahan Cola, sebab kitab sejarah dinasti Sung mencatat datangnya utusan dari raja Sriwijaya, yaitu Seli-tieh-hwa, pada tahun 1028.[88] Mungkin Se-li-tieh-hwa ini anak dari Sanggramawijayottunggawarman.

Dalam tahun 1068 sekali lagi raja Cola, Wirajayendra, menyerang Sriwijaya, hanya serangannya lebih ditujukan pada Semenanjung Tanah Melayu. Dalam serangan ini Kadaram dapat ditaklukkan, tetapi kemudian kerajaan ini dikembalikan lagi kepada rajanya yang telah bersedia menyembah kakinya.[89]

Utusan dari San-fo-tsi yang terakhir yang tercatat di dalam kitab sejarah dinasti Sung, datang di Cina pada tahun 1178. Dari berita yang ditulis oleh Chau Ju-kua kita dapat mengetahui bahwa kerajaan San-fo-tsi mulai mundur pada akhir abad XII. Chan-pi (Jambi) yang pada mulanya adalah Mo-lo-yeu, tidak termasuk dalam daerah jajahan San-fo-tsi. Menurut Ling-wai-tai-ta 1079, pada tahun 1082 dan 1088 Chan-pi mengirim utusan ke Cina atas kehendak sendiri. Mula-mula Chan-pi ada di bawah kekuasaan San-fo-tsi, tetapi setelah berperang Chan-pi mengangkat seorang raja sendiri. Tan-ma-ling, Ling-ya-si-kia, Fo-lo-an, Lan-wu-li, Sun-to, dan Kien-pi, walaupun letaknya berjauhan, termasuk daerah jajahan San-fo-tsi.[90]

Setelah untuk beberapa waktu lamanya San-fo-tsi tidak disebut-sebut di dalam berita Cina, sekitar permulaan abad XIII muncul lagi sebagai suatu negara yang cukup kuat. Chau Ju-kua menyebutkan tidak kurang dari lima belas daerah jajahannya yaitu: Pang-fang (Pahang), Teng-ya-nung (Trengganu), Ling-ya-si-kia (Langkasuka), Ki-lan-tan (Kelantan), Fo-lo-an (Kuala Berang), Ji-lo-ting (?), Cheng-mai (?), Pa-t'a (?), Tan-ma-ling (Tambralingga), Kia-lo-hi (Grahi), Pa-lin-fong (Palembang), Sun-to (Sunda), Kien-pi (Kampe), Lan-wu-li (Lamuri), dan Si-lan (Ceylon). Lebih lanjut dikatakan bahwa negeri ini menguasai laut dan mengawasi lalu lintas pelayaran asing di Selat Malaka.

dengan persaingan politik dan perdagangan laut. Di samping itu, kerajaan Cola berhasil membangun armada lautnya. Lihat juga R.C. Majumdar, 1937, II, hlm. 171 catatan 2; 1962, hlm. 338–342; K.A. Nilakanta Sastri, 1935, I, hlm. 254; 1949, hlm. 79 catatan 13; 1940, hlm. 286; G. Coedès, 1918, hlm. 4–5, 9; E. Hultzsch, 1891, II, hlm. 105

88 Se-li-tieh-hwa mungkin lafal Cina untuk Sri Dewa. W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 65–66; G. Ferrand, 1922, hlm. 20

89 Lihat K.A. Nilakanta Sastri, BEFEO, XL, hlm. 289 catatan 1

90 P. Wheatley, 1959; F. Hirth dan W.W. Rockhill, 1911, hlm. 66 catatan 18, 67–72; K.A. Nilakanta Sastri, 1940, hlm. 294; R.C. Majumdar, 1937, II, hlm. 193

91 F. Hirth dan W.W. Rockhill, 1911, hlm. 62; G. Ferrand, 1922, hlm. 13

Jika ada kapal melalui Selat Malaka tanpa singgah, lalu diserang dan semua penumpangnya dibunuh. Selain itu, dikatakan Sanfo-tsi mengadakan hubungan dagang dengan Jong-ya-lu di Timur. Ibu kotanya dikatakan terletak di tepi air; penduduknya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika rajanya keluar, ia naik perahu dengan dilindungi oleh payung sutra dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya ini sangat pandai dan tangkas di dalam peperangan, baik di air maupun di darat. Keberaniannya tidak ada bandingannya.[91]

Dari uraian tadi kita dapat mengetahui mengapa dalam abad XIII Sriwijaya dapat berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang besar dan kuat, serta menguasai sebagian besar Sumatra, Semenanjung Tanah Melayu, dan sebagian Jawa Barat (Sunda).

Dalam sejarah dinasti Ming dikatakan bahwa San-bo-tsai (Sanfo-tsi) pada tahun 1376 telah ditaklukkan oleh Jawa. Setelah San-bo-tsai jatuh, kerajaan Jawa sendiri juga mulai mendekati keruntuhannya sehingga tidak dapat mengawasi daerah ini, akibatnya bajak-bajak Cina berhasil menguasai daerah itu dan menyusun semacam pemerintahan di bawah pimpinan Liang-tau-ming, bajak dari daerah Nan-hai (Kanton). Daerah Palembang kemudian dikuasai oleh Ch'en Tsu-yi, juga seorang bajak laut. Meskipun demikian mereka ini masih mengakui kedaulatan Majapahit.[92]

Mulai permulaan abad XV muncul beberapa kerajaan Islam di bagian utara Pulau Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu.[93] Hal ini menyebabkan berakhirnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Sumatra dan sekitarnya.

4. Struktur Birokrasi

Dibanding dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya di zaman kuno Indonesia, Sriwijaya menunjukkan kekhasannya. Kerajaan Mataram jelas adalah sebuah negara agraris yang mengutamakan pengamanan tata pemerintahan dalam negeri. Sejumlah besar prasasti menunjukkan birokrasi yang memerhatikan sekali pelaksanaan pelbagai aturan untuk menjamin ketenangan dalam negeri. Di samping prasasti-prasasti yang berisi pujian kepada dewa-dewa, telah ditemukan sejumlah besar prasasti yang mencatat pelaksanaan suatu keputusan raja, lengkap dengan perincian saksi dan hadiah yang mereka terima dalam peristiwa tersebut. Telah pula ditemukan prasasti-prasasti yang mencatat penyelesaian hukum sengketa antara sesama warga

---

92 W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 69; G. Ferrand, 1922, hlm. 25–28

93 G. Coedès, 1968, hlm. 243–245; Armando Cortesão; 1944, I, hlm. 108; II, hlm. 248; R.O. Windstedt, 1940, hlm. 150; 1917, hlm. 171

masyarakat. Prasasti- prasasti demikian belum pernah ditemukan di daerah Sriwijaya. Prasasti Sriwijaya yang telah ditemukan pada umumnya berasal dari abad VII atau VIII, yaitu masa awal tumbuhnya Sriwijaya sebagai suatu kekuatan. Dari prasasti-prasasti tersebut timbul kesan bahwa masa itu adalah masa penaklukan. Tentara Sriwijaya bergerak di seluruh negeri dalam suatu usaha pasifikasi.

Menarik pula bahwa sebagian dan prasasti-prasasti itu mengandung ancaman kutukan yang ditujukan antara lain kepada keluarga raja sendiri. Walaupun hal tersebut kedengaran aneh, ada pendapat yang menganggap hal itu mungkin karena keluarga raja yang diancam itu memang berada di luar pengawasan langsung. Mereka adalah anak-anak raja yang diberi kekuasaan di daerah-daerah.

Jika keadaan tersebut benar, itu menunjukkan suatu sikap keras dari raja yang berkuasa. Suatu sikap yang tidak menghendaki kebebasan bertindak yang terlalu besar pada para penguasa daerah. Sikap demikian ini sebenarnya tidak mengherankan untuk suatu negara yang hidup dari perdagangan.

Suatu negara yang hidup dari perdagangan, berarti penguasanya harus menguasai jalur-jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan tempat barang-barang itu ditimbun untuk diperdagangkan. Penguasaan jalur-jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan ini dengan sendirinya memerlukan pengawasan langsung dari penguasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau raja Sriwijaya tidak dapat membenarkan sikap tidak setia, meskipun hanya sedikit, termasuk dari anaknya sendiri.

Walaupun masih banyak yang belum jelas mengenai sejarah Sriwijaya pada saat ini, apa yang telah tampak menggambarkan kepada kita sebuah negara maritim yang besar, karena ikut dalam perdagangan internasional yang menghampiri daerahnya. Dalam proses tersebut Sriwijaya telah mengembangkan ciri-ciri yang khas. Ciri-ciri ini berbeda dengan ciri-ciri kerajaan Mataram misalnya, yang merupakan sebuah kerajaan yang lebih bersifat agraris.

Sebagai sebuah negara maritim yang berdagang, Sriwijaya telah mengembangkan suatu tradisi diplomasi yang menyebabkan kerajaan tersebut lebih metropolitan sifatnya. Untuk dapat mempertahankan perannya sebagai negara berdagang, Sriwijaya lebih memerlukan kekuatan militer yang dapat melakukan gerakan ekspedisioner dari sebuah negara agraris. Suatu penguasaan langsung atas daerah kekuasaannya lebih mutlak diperlukan daripada di sebuah negara agraris, seperti yang umum berkembang di Pulau Jawa dan memberikan kekuasaan serta kebebasan yang cukup besar kepada para penguasa daerah atau rakai-nya.

Sebaliknya kelangsungan negara Sriwijaya lebih tergantung dari pola-pola perdagangan yang berkembang, padahal pola-pola tertentu tidak sepenuhnya dapat dikuasainya. Seperti terbukti dari perkembangan sejarahnya, ketika orang-orang Cina mulai ikut berdagang di kawasan selatan, peran Sriwijaya berkurang sebagai pangkalan utama perdagangan antara Asia Tenggara dengan Cina. Sejak abad XII, Sriwijaya hanyalah salah satu tempat yang dikunjungi pedagang-pedagang Cina. Peran ini semakin berkurang setelah orang-orang Cina membawa sendiri keperluan mereka ke negerinya. Tempat-tempat penghasil barang dagangan yang tadinya mengumpulkan barang dagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhan di daerah kekuasaan Sriwijaya, tidak perlu lagi berbuat demikian karena para pedagang Cina menyinggahi pelabuhan-pelabuhan mereka. Utusan dari negeri-negeri ini makin banyak muncul di istana kaisar Cina. Daerah-daerah taklukan Sriwijaya di sepanjang pesisir Selat Malaka, mulai bertindak sebagai negeri yang langsung memberikan upeti ke negeri Cina. Dengan demikian, mereka dianggap setaraf dengan Sriwijaya. Negeri itu antara lain Kampe dan Lamuri di Sumatra Utara.

Tumbuhnya kerajaan-kerajaan di Jawa relatif lebih stabil, karena dasar agrarisnya, di samping itu juga karena mengembangkan suatu birokrasi yang mengandung potensi sebagai pendukung perkembangan ke arah terjadinya suatu negara agraris yang juga berdagang.

Pada abad X mulai timbul bentrokan-bentrokan antara Sriwijaya dengan kerajaan Mataram, Jawa Timur. Utusan Sriwijaya yang datang di Kanton pada tahun 988, dalam perjalanannya pulang, tertahan di Cina Selatan. Mereka terpaksa kembali lagi ke Cina. Pada tahun 992, mereka berusaha kembali lagi ke Sriwijaya, tetapi di Campa mereka mendengar negerinya sedang berperang dengan Jawa. Mereka kembali lagi dan menghadap kaisar untuk memohon dekrit yang dapat mengatur keadaan di kawasan selatan. Apakah dekrit itu diperoleh? Tidak jelas. Bagaimanapun juga, jelas bahwa Sriwijaya tidaklah sama kedudukannya di Asia Tenggara dengan satu-dua abad sebelumnya. Kerajaan-kerajaan lain di Indonesia mulai berusaha merebut hegemoni yang berada di tangan Sriwijaya.

Dari uraian di atas jelas bahwa struktur kerajaan Sriwijaya sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, karena berbeda dengan struktur kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang telah lebih banyak diketahui berkat banyaknya peninggalan prasasti dan karya sastra.

5. Hubungan dengan Luar Negeri

Sumatra merupakan pulau besar di Indonesia bagian barat yang terdekat letaknya dengan daratan Asia Tenggara. Di antara Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu, suatu jazirah yang merupakan bagian dari daratan Asia

Tenggara, hanya terdapat sebuah selat yang tidak begitu lebar, yaitu Selat Malaka. Kedudukan geografis ini merupakan suatu faktor yang besar pengaruhnya pada sejarah yang dialami oleh pulau ini.

Dari berita Cina abad V dapat diketahui adanya sebuah negara yang disebut Kan-t'o-li. Letaknya di sebuah pulau di laut selatan. Menurut para peneliti, Kan-t'o-li adalah sebuah negeri di Sumatra.[94] Kan-t'o li mengirimkan utusan ke negeri Cina sejak abad V hingga lebih kurang pertengahan abad VI. Setelah itu namanya tidak disebut-sebut lagi dalam berita-berita Cina. Nama ini baru muncul kembali pada abad XIV dalam berita Cina yang menjelaskan bahwa Sriwijaya pada waktu dahulu disebut Kan-t'o-li.

Berita terakhir sebelum berita abad XIV mengenai Kan-t'oli ialah mengenai kedatangan utusan dari negeri ini di Cina pada tahun 563. Berita Cina yang menyebutkan kedatangan utusan dari Sumatra yang berikutnya berasal dari tahun 644 atau awal 645 M. Negeri yang mengirim utusan tadi disebut Mo-lo-yeu. Dalam berita-berita Cina selanjutnya tidak ada sebutan tentang sebuah negeri di Sumatra yang mengirimkan utusan ke negeri Cina kecuali Sriwijaya. Hubungan yang erat antara Sriwijaya dengan istana kaisar Cina merupakan salah satu ciri dari sejarahnya.

Hubungan antara Sriwijaya dengan negeri di luar Indonesia bukan hanya dengan Cina. Sebuah prasasti raja Dewapaladewa dari Benggala, yang dibuat pada akhir abad IX menyebutkan sebuah biara yang dibuat atas perintah *Balaputradewa, maharaja* dari *Suwarnadwipa*. Prasasti ini dikenal dengan sebutan prasasti Nalanda.

Sebuah prasasti raja Cola lainnya, yaitu prasasti dari Rajaraja I, di India Selatan menyebut *Marawijayottunggawarman* raja dari *Kataha* dan *Sriwisaya* telah memberikan hadiah sebuah desa untuk diabdikan kepada sang Buddha yang dihormati di dalam *Culamaniwarmawihara*, yang telah didirikan oleh ayahnya di kota *Nagipattana* (Negapatam sekarang). Prasasti ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang berbahasa Sanskerta, yang dibuat pada tahun 1044 dan bagian yang berbahasa Tamil, yang dibuat pada tahun 1046.

Selain hubungan baik dengan kerajaan Cola tadi, ada pula perang antara kedua kerajaan ini, yaitu pada masa pemerintahan raja pengganti Rajaraja I, yang bernama Rajendracoladewa I.

Berbeda dengan hubungan luar negeri kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, jelas sekali bahwa hubungan luar negeri Sriwijaya lebih aktif sifatnya. Bukan hanya di India Sriwijaya menaruh minat pada bangunan agama, melainkan juga di negeri Cina. Pada awal abad XI, *maharaja*

---

94 N.J. Krom, 1931, hlm. 84. Sisa-sisa permukiman kuno yang ditemukan di situs Karangagung dan Air Sugihan (daerah muara Sungai Musi) pada penelitian sejak tahun 2000 mungkin dapat dikaitkan dengan berita Cina ini

Sriwijaya memperbaiki sebuah kuil Taoist di Kanton. Karya-karya I-tsing yang ditulisnya di Sumatra pada tahun 689 dan 692 menunjukkan betapa masyhurnya Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Pertumbuhan pusat itu hanya mungkin jika negeri itu terbuka untuk hubungan dengan luar negeri. Hubungan luar negeri yang demikian aktif dari Sriwijaya tentu bukan suatu hal yang tidak bermakna. Hal itu tidak akan terjadi jika tidak disebabkan oleh suatu kepentingan tertentu.

Kemasyhuran Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha tentu bukan hasil suatu perkembangan dalam waktu yang singkat, dan selanjutnya juga tidak hilang begitu saja.

Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat. Hal ini ternyata dari pelbagai usaha untuk kepentingan agama ini, yang sampai meluas ke luar negeri. Kecuali tindakan-tindakan nyata tadi, yang dapat diketahui dari prasasti Nalanda dan prasasti Leiden, dalam berita Cina juga terdapat uraian mengenai ketaatan raja Sriwijaya terhadap agamanya, yaitu agama Buddha.

I-tsing mengatakan, bahwa di negeri Fo-shih yang dikelilingi oleh benteng, ada lebih dari seribu orang pendeta Buddha yang belajar agama Buddha seperti halnya yang diajarkan di India (Madhyadesa). Jika seorang pendeta Cina ingin belajar ke India, untuk mengerti dan membaca kitab Buddha yang asli di sana, ia sebaiknya belajar dahulu setahun dua tahun di Fo-shih, baru setelah itu ia pergi ke India. Pada waktu kembali dari belajar di Universitas Nalanda (India), I-tsing tinggal di Foshih selama empat tahun, yaitu antara tahun 685 dan 689, untuk menerjemahkan kitab Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Rupanya pekerjaan ini terlalu berat untuknya, karena itu ia pulang ke Kanton pada tahun 689 dan kembali lagi ke Sriwijaya bersama dengan empat orang pembantunya. Di Sriwijaya ia menulis bukunya (2 buah).[95] Tahun 692 ia mengirimkan kedua bukunya ke Cina, sedangkan ia sendiri baru kembali ke negerinya pada tahun 695.[96]

6. Perkembangan Perdagangan

Letak geografis Sumatra yang telah disinggung sebelumnya sesungguhnya baik sekali untuk turut serta dalam kegiatan perdagangan internasional yang mulai berkembang antara India dengan daratan Asia Tenggara sejak awal tarikh Masehi. Berita Cina menyebutkan bahwa adat di Kan-t'oli sama dengan adat di Kamboja dan Campa, ini berarti bahwa bagi orang-orang Cina atau sumber berita mereka, keadaan di ketiga tempat tadi sama. Hal ini hanya dapat terjadi jika di antara ketiga tempat itu terjadi hubungan yang cukup intensif.

[95] Kedua buku ini telah diterbitkan oleh Edouard Chavannes (1894) dan J. Takakusu (1896)

[96] G. Coedès, 1968, hlm. 82

Dengan sendirinya perkembangan perdagangan di dua tempat di daratan Asia Tenggara tadi juga berpengaruh di Sumatra. Besar kemungkinan bahwa dunia perdagangan di Sumatra sejak semula telah terlibat langsung dalam perdagangan dengan India. Letak Selat Malaka mengundang perdagangan di daratan Asia Tenggara untuk meluas ke selatan. Pada saat negeri Cina terbuka untuk hasil-hasil Asia Tenggara, suatu hal yang baru terjadi setelah perdagangan dengan India berkembang, penduduk Sumatra khususnya di pantai timur, bukan awam lagi dalam perdagangan internasional.

Keadaan tersebut di atas berkembang terus hingga saat orang-orang Cina datang sendiri ke kawasan selatan untuk berdagang.

Hal ini terjadi pada abad XII. Sejak masa itu Sumatra tidak tampak lagi sebagai kesatuan. Pada tahun 1178, kapal-kapal Cina sudah berlabuh di Lamuri di Sumatra Utara sambil menunggu angin musim yang baik.[97] Pelbagai kerajaan kecil di Sumatra mulai mengirimkan utusan mereka, seperti Kampe yang terletak di pantai timur Sumatra Utara. Kemudian tumbuh kerajaan Malayu yang menggantikan kedudukan Sriwijaya. Akan tetapi, kerajaan Malayu ini tidak pernah tumbuh menjadi suatu kekuasaan tunggal seperti halnya kerajaan Sriwijaya.

Seperti diutarakan oleh Wolters, kemampuan melayari lautan saja belum dapat menumbuhkan suatu kekuatan perdagangan.[98] Di samping kemampuan pelayaran harus pula ditumbuhkan kepercayaan dunia perdagangan. Para pedagang harus yakin bahwa berdagang dengan tempat itu akan mendatangkan keuntungan. Keyakinan ini tentu tidak perlu selalu disebabkan para pedagang tertarik kepada kondisi yang disediakan, tetapi dapat juga karena memang tidak ada alternatif lain. Agaknya Sriwijaya mengembangkan keadaan yang disebut belakangan ini. Berkat armadanya yang kuat ia berhasil menguasai daerah-daerah yang potensial dapat menjadi saingannya. Dengan cara ini ia menyalurkan barang-barang dagangannya ke pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya. Dari berita-berita Cina dapat disimpulkan bahwa Sriwijaya adalah salah satu pusat perdagangan antara Asia Tenggara dengan Cina yang terpenting.

Untuk kepentingan perdagangannya, Sriwijaya tidak keberatan untuk mengakui Cina sebagai negara yang berhak menerima upeti. Ini adalah sebagian dari usaha diplomatiknya untuk menjamin agar Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negeri lain di Asia Tenggara, sehingga akan merugikan perdagangan Sriwijaya. Demikian baiknya kedudukan Sriwijaya dalam perdagangan dengan Cina hingga melalui perutusannya ia dapat mengusulkan perubahan-perubahan terhadap perlakuan para pejabat

---

[97] O.W. Wolters, 1970, hlm. 42

[98] O.W. Wolters, 1967, hlm. 135–155

perdagangan Cina di Kanton terhadap barang-barang Sriwijaya yang dirasakan merugikan.[99]

Perdagangan dengan Cina dan India telah memberikan keuntungan besar kepada Sriwijaya. Kerajaan ini telah berhasil mengumpulkan kekayaan yang besar. Raja Sriwijaya termasyhur karena kekayaannya. Sebuah legenda yang dikutip dalam sumber-sumber Cina menceritakan bahwa raja membuang sebungkal emas ke dalam sebuah kolam pada tiap hari ulang tahunnya.[100] Lepas dari benar tidaknya kisah tersebut, tetapi jelas sekali bahwa kekayaan kerajaan atau raja adalah suatu hal yang banyak dipercakapkan orang.

Selain memiliki kekuatan yang dapat menghilangkan niat untuk bersaing dan kekayaan yang termasyhur, Sriwijaya juga memenuhi kewajibannya kepada mereka yang berdagang dengannya serta menjamin keamanan jalur-jalur pelayaran yang menuju ke Sriwijaya. Perkembangan perdagangan pada masa itu tentu juga mengundang kemungkinan gangguan terhadapnya. Suatu hal yang merisaukan para pedagang dan sering disebut dalam kisah-kisah perjalanan ialah kegiatan para bajak laut. Sampai abad X Sriwijaya rupa-rupanya dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam kisah-kisah perjalanan masa itu tidak terdapat keluhan mengenai bajak laut di wilayah Sriwijaya.

Diduga pola pengamanan yang ditempuh adalah dengan memasukkan kepala-kepala kelompok bajak laut dalam ikatan dengan kerajaan. Mereka mendapat bagian yang ditentukan oleh raja dari hasil perdagangan. Dengan demikian mereka menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan. Dengan sendirinya, mereka justru akan berusaha agar kepentingan mereka jangan dirugikan oleh kelompok-kelompok bajak laut lain yang tidak menyertai pengaturan tersebut. Cara ini menjadikan bajak laut pengaman pada jalur-jalur pelayaran. Tentu pengaturan demikian hanya akan berjalan jika raja cukup mempunyai kewibawaan. Kewibawaan riil yang dilandasi kekuatan pengawasan yang disegani dan kewibawaan berdasarkan mitos yang dikembangkan. Salah satu kewibawaan rill adalah hasil diplomasinya dengan Cina. Karena Sriwijaya merupakan sebuah negara yang mengirim upeti ke negara Cina, Cina berkewajiban memberi perlindungan jika diperlukan. Hubungan dengan Cina tersebut tentu disebarluaskan dan menjadi suatu faktor pencegah keinginan untuk merugikan Sriwijaya oleh negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara. Walaupun hal ini tidak dapat mencegah serangan dari raja Cola.

---

[99] Ibid., hlm. 152

[100] O.W. Wolters, 1970, hlm. 42–43

B. Malayu

1. Masa Awal

Dari kitab sejarah dinasti Liang diperoleh keterangan bahwa antara tahun 430–475 Masehi beberapa kali utusan dari Ho-lo-tan dan Kan-t'o li datang di Cina. Ada juga utusan dari To-lang P'o-hwang. Kan-t'o li ini terletak di salah satu pulau di laut selatan. Adat kebiasaannya serupa dengan di Kamboja dan Campa. Hasil negerinya yang terutama pinang, kapas, dan kain-kain berwarna. Dalam kitab sejarah dinasti Ming disebutkan bahwa San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-t'o li.[101]

Menurut G. Ferrand, Kan-t'o-li di dalam berita Cina ini mungkin sama dengan Kandari yang terdapat di dalam berita dari Ibn Majid yang berasal dari tahun 1462 Masehi. Karena San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-t'o-li, sedangkan San-fo-tsi diidentifikasikan dengan Sriwijaya, Ferrand menafsirkan Kan t'o-li letaknya di Sumatra dengan pusatnya di Palembang. Kemudian Tolang Po-hwang disamakan dengan Tulangbawang.[102] Dalam hubungan ini Poerbatjaraka juga menduga bahwa Tolang dan Po-hwang yang disebut di dalam sejarah dinasti Liang, merupakan sebuah kerajaan di daerah aliran Sungai Tulangbawang, Lampung. Kerajaan Tulangbawang ini kemudian ditaklukkan oleh kerajaan lain karena berita Cina hanya sekali saja menyebut kerajaan ini.[103]

Sementara itu, J.L. Moens mengidentifikasikan Singkil Kandari dalam berita Ibn Majid dengan Kan-t'o-li di dalam kitab sejarah dinasti Liang dan Ming, sedangkan yang dimaksud dengan Sanfo-tsi ialah Malayu.[104]

Pendapat lain mengenai Kan-t'oli dikemukakan oleh J.J. Boeles. Ia mengatakan bahwa Kan-t'o li yang disebut di dalam berita Cina itu mungkin ada di Muangthai Selatan. Pendapatnya ini didasarkan atas adanya sebuah desa yang bernama Khantuli di pantai timur Muangthai Selatan.[105] Pendapat Boeles ini ditentang oleh O.W. Wolters yang mengatakan bahwa Kan-t'o-li itu tidak mungkin ada di Muangthai Selatan, karena di Desa Khantuli sama sekali tidak diketemukan keramik Cina dari zaman Sung lama. Ia cenderung untuk menempatkan Kan-t'o-li di Palembang, karena San-fo-tsi biasa dihubungkan dengan Palembang.[106]

---

[101] W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 62

[102] G. Ferrand, 1919, hlm. 238–241

[103] R.Ng. Poerbatjaraka, 1952, hlm. 25

[104] J.L. Moens, 1937, hlm. 380–381

[105] J.J. Boeles, 1967, hlm. 291–297

[106] O.W. Wolters, 1970, Appendix A, hlm. 181–183

Identifikasi Kan-t'o-li dengan Kandali atau Singkil Kandari juga dikemukakan oleh Obdeyn. Oleh karena Kan-t'o-li dianggap sama dengan San-fo-tsi, kemungkinan besar Kan-t'o-li di Sumatra Selatan.[107] Akan tetapi, pendapat umum di antara para ahli ialah, bahwa Kan-t'o-li diperkirakan di pantai timur Sumatra Selatan, yang daerah kekuasaannya meliputi daerah-daerah Palembang dan Jambi. Penelitian lebih intensif di situs Karangagung dan Air Sugihan diharapkan dapat memastikan lokasi Kan-t'o-li.

Sebuah kisah yang menarik ialah sebagai berikut: "Pada masa pemerintahan kaisar Hia-wu (452–464) Kan-t'o-li mengirimkan seorang utusan dengan pelbagai barang berharga sebagai upeti. Pada tahun 504, raja Kan-t'o-li yang bernama K'iu-t'ansieu-pa-t'o-lo (Gautama Subadra) bermimpi seorang pendeta Buddha menganjurkan untuk memberi penghormatan kepada kaisar Cina. Setelah ia bangun ia membuat sebuah lukisan seorang kaisar Cina. Lukisan itu kemudian dibandingkan dengan sebuah lukisan kaisar Cina yang dibawa oleh utusannya yang kembali dari negeri Cina. Ternyata lukisan yang dibuat oleh raja mirip sekali dengan lukisan dari Cina. Anaknya yaitu Wijayawarman, mengirimkan utusan membawa sepucuk surat yang berisi puji-pujian terhadap kaisar yang menganut agama Buddha.[108] Dari berita-berita ini tampak sekali bahwa raja Kan-t'o-li berusaha sekali untuk menyenangkan perasaan kaisar Cina. Hal ini dapat kita mengerti karena negara Cina memang merupakan sebuah negara besar yang dapat menjadi pasar yang baik bagi perdagangannya. Hasil yang terutama dari Kan-t'o-li ialah kain-kain berwarna, kapas, dan pinang.

Selanjutnya dari kitab sejarah dinasti T'ang kita menjumpai untuk pertama kalinya pemberitaan tentang datangnya utusan dari daerah Mo-lo-yeu di Cina pada tahun 644 dan 645. Nama Mo-lo-yeu ini mungkin dapat dihubungkan dengan kerajaan Malayu, yang letaknya di pantai timur Sumatra dengan pusatnya di sekitar Jambi.

Sekitar tahun 672 Masehi I-tsing, seorang pendeta Buddha dari Cina, dalam perjalanannya dari Kanton menuju India, singgah di She-li-fo-she[109] selama enam bulan untuk belajar sabdavidya atau tata bahasa Sanskerta. Menurut I-tsing ada sekitar 1.000 orang pendeta di She-li-fo-she yang menguasai pengetahuan agama seperti halnya di Madhyadesa (India). Dari

[107] V. Obdeyn, 1941, hlm. 336–337

[108] Coedès, 1968, hlm. 55; Krom, 1931

[109] S. Beal yang mula-mula menempatkan She-li-fo-she di tepi Sungai Musi dekat kota Palembang, tetapi pada tahun 1886 ini nama Sriwijaya belum dikenal (S. Beal, 1886)

She-li-fo-she I-tsing berlayar ke Mo-lo-yeu dengan menggunakan kapal raja. Ia tinggal di Mo-lo-yeu selama dua bulan. Selanjutnya ia berlayar ke Kedah (Chieh-cha)[110] selama lima belas hari. Pada bulan ke-12 ia meninggalkan Kedah menuju ke Nalanda, ia berlayar selama dua bulan. Ketika kembali dari Nalanda pada tahun 685, I-tsing singgah lagi di Kedah. Kemudian pada musim dingin ia berlayar ke Mo-lo-yeu yang sekarang telah menjadi Fo-she-to, dan tinggal di sini sampai pertengahan musim panas, lalu ia berlayar selama satu bulan menuju Kanton.[111] Dari keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa sekitar tahun 685 kerajaan Sriwijaya telah mengembangkan kekuasaannya, dan salah satu negara yang ditaklukkannya ialah Malayu.

Mengenai letak Malayu ini ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Ada yang menduga Malayu ini letaknya di daerah Jambi sekarang. Akan tetapi, dari sumber-sumber yang kemudian, orang mengatakan Malayu letaknya di Semenanjung Tanah Melayu.[112]

Dari berita I-tsing kita tahu bahwa dalam perjalanan dari India ke Cina orang melalui pelabuhan Malayu. Dari pelabuhan ini orang naik perahu ke arah utara menuju Kwang-tung. Pelayaran dari Sriwijaya ke Malayu memakan waktu lima belas hari lamanya. Dari Malayu untuk menuju ke Chieh-cha orang harus berganti arah yaitu ke utara dan lamanya pelayaran lima belas hari. Jika demikian jarak antara Malayu dengan Sriwijaya kurang lebih sama dengan jarak Malayu-Kedah (Chieh-cha).

Satu hal yang menarik perhatian dari cerita perjalanan I-tsing ialah pernyataan bahwa dari Malayu ke Kedah ia "berganti arah". Menurut Moens berarti arah Malayu – Sriwijaya haruslah barat laut – tenggara, karena arah Malayu – Kedah ialah tenggara – barat laut. Berdasarkan hal ini Moens menempatkan Sriwijaya sebelum pindah ke daerah Muara Takus, terletak di daerah timur jazirah Malaka. Pernyataannya ini ia hubungkan dengan prasasti Kedukan Bukit, yang menurut anggapannya merupakan peringatan penguasaan Malayu oleh Sriwijaya. Setelah penguasaan Malayu, pusat kerajaan Sriwijaya tidak berpindah ke Palembang tetapi ke daerah Muara Takus.[113]

Slametmuljana berdasarkan keterangan I-tsing menyimpulkan bahwa pada abad VII, Malayu terletak di muara Sungai Batanghari atau sama dengan

---

[110] P. Wheatley, 1961, hlm. 41–42
[111] E. Chavannes, 1894; J. Takakusu, 1896
[112] N.J. Krom, 1931
[113] J.L. Moens, 1937, hlm. 330

kota Jambi sekarang.[114] Sementara itu, Soekmono menyatakan bahwa dari segi arkeologinya tidak ada bahan yang dengan meyakinkan dapat menyokong pendapat Moens untuk menempatkan Sriwijaya di Muara Takus. Ditambah dengan hasil rekonstruksi pantai daerah Pekanbaru dan Rengat, yang tidak menghasilkan unsur-unsur yang cukup kuat untuk menempatkan Sriwijaya di daerah khatulistiwa, kiranya dapat disimpulkan bahwa kedudukan Jambi menjadi semakin kuat sebagai pusat Sriwijaya, kalau saja dapat dipastikan bahwa Malayu bukan di Jambi letaknya.[115]

Pendapat terbaru mengenai letak Malayu dikemukakan oleh Boechari dalam analisisnya mengenai perjalanan I-tsing dari Sriwijaya ke India, terutama mengenai perjalanan dari Malayu ke Kedah. Dalam berita I-tsing disebutkan bahwa setelah sampai di Malayu, pelayaran berubah arah untuk menuju Kedah. Malayu ini letaknya di sebelah Selatan Kedah dan pelayaran ke Kedah memakan waktu lima belas hari, seperti halnya pelayaran Sriwijaya ke Malayu. Oleh karena itu, Malayu ini haruslah terletak di tengah perjalanan Sriwijaya (di daerah Batang Kuantan) ke Kedah, yaitu kira-kira 3° di sebelah Utara khatulistiwa, di pantai timur Sumatra dekat Sungai Asahan atau di pantai barat Malaysia dekat Port Swettenham. Dalam hal ini ia lebih cenderung untuk menempatkan Malayu di pantai timur Sumatra sebab I-tsing harus mengubah arah pelayarannya untuk mencapai Kedah.[116]

2. Perkembangan Selanjutnya

Setelah penaklukan Malayu oleh Sriwijaya sekitar tahun 685, untuk jangka waktu yang lama kita tidak menjumpai nama Malayu disebut-sebut dalam sumber-sumber sejarah. Baru pada pertengahan terakhir abad XIII kita jumpai lagi nama Malayu di dalam kitab Pararaton[117] dan kitab Nagarakrtagama, pupuh XLI, 5.[118]

Di dalam kedua sumber itu disebutkan bahwa pada tahun 1275 raja Kertanagara mengirimkan tentaranya ke Malayu. Pengiriman pasukan ini dikenal dengan sebutan *Pamalayu.* Letak Malayu yang sangat strategis di pantai timur Sumatra dekat Selat Malaka, memegang peran penting dalam dunia pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka, yaitu antara India dan Cina dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Sementara itu,

---
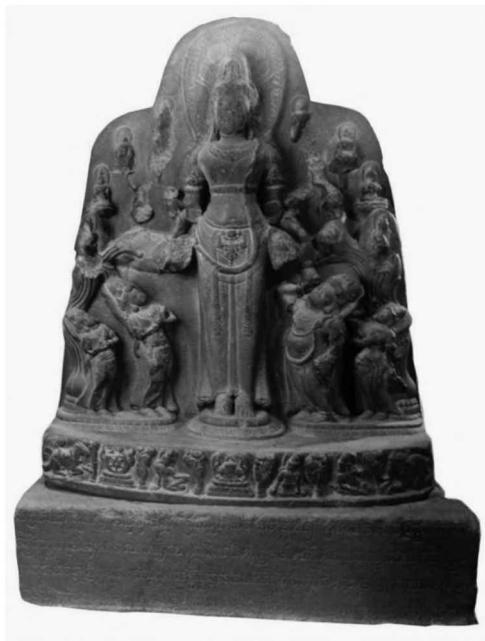
[114] R.B. Slametmuljana, 1981, hlm. 19

[115] R. Soekmono, 1979, hlm. 82

[116] Boechari, 1979, hlm. 30

[117] J.L. Brandes, 1920

[118] H. Kern, VG , VII, 1917; VG, VIII, 1918

(a)

(b)

Gambar 3.7 (a) Arca Amoghapasa, batu, Sungai Langsat, Sumatra Barat, koleksi Museum Nasional; (b) Prasasti Saruaso, Pagarruyung, Sumatra Barat
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

pengaruh kerajaan Mongol sudah tidak terbendung lagi. Tahun 1281 tentara Mongol sudah mulai menyerbu Campa. Tahun 1287 Pagan jatuh ke tangan tentara Mongol.[119] Kemudian tahun 1280, 1281, 1286, dan yang terakhir tahun 1289 Kubhilai Khan mengirimkan utusan ke Singhasari minta agar raja Kertanagara mau mengakui kekuasaannya. Akan tetapi, semua perutusan tadi diusir kembali setelah mukanya dirusak.[120]

Melihat kenyataan ini, rupa-rupanya ekspedisi Pamalayu mempunyai hubungan erat dengan ekspansi kerajaan Mongol yang sedang giat dilancarkan oleh Kubhilai Khan untuk menguasai daerah Asia Tenggara dan juga dalam rangka politik perluasan kekuasaan kerajaan Singhasari. Ekspedisi ini berhasil menjalin hubungan persahabatan antara Singhasari dan Malayu. Untuk mempererat persahabatan ini pada tahun 1208 S atau 1286 Masehi raja Sri Kertanagara Wikramadharmottunggadewa, mengirimkan sebuah arca Buddha Amoghapasalokeswara beserta empat belas pengiringnya ke Malayu (*suvarnabhumi*) sebagai hadiah. Penempatan arca ini di *Dharmasraya* dipimpin oleh 4 orang pejabat tinggi dari Jawa. Pemberian hadiah ini membuat seluruh rakyat Malayu sangat bergirang hati terutama rajanya yang bernama Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Keterangan mengenai hadiah dari raja Kertanagara ini tertulis pada bagian lapik (alas) arca Amoghpasera itu sendiri. Arca ini ditemukan kembali di daerah Sungai Langsat dekat Sijunjung, di daerah hulu Sungai Batanghari.[121]

Setelah peristiwa ini, tidak diperoleh keterangan lainnya mengenai keadaan di Sumatra, baru kemudian pada masa pemerintahan Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwardhani (1328–1350) kita memper-oleh sedikit keterangan tentang daerah Malayu. Rupa-rupanya kerajaan Malayu ini muncul kembali sebagai pusat kekuasaan di Sumatra, sedangkan Sriwijaya setelah adanya ekspedisi Pamalayu dari raja Kertanagara, tidak terdengar lagi beritanya.

Dari prasasti-prasasti yang banyak ditemukan di daerah Minangkabau, dapat diketahui bahwa pada pertengahan abad XIV ada seorang raja yang memerintah di *Kanakamedini* (pulau emas),[122] yang bernama Adityawarman, anak dari Adwayawarman. Nama ini dikenal juga di dalam prasasti yang dipahatkan pada arca Mañjusri di candi Jago dan berangka tahun 1341.[123]

---

[119] D.G.E. Hall, 1968, hlm. 158, 192

[120] W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 22

[121] Prasasti dari Padang Roco ini diterbitkan oleh N.J. Krom dalam VMKAWAL, 5th series, II, 1916, hlm. 306. Lihat juga G. Ferrand, JA., 1922, hlm. 179–181; G. Coedès, 1968, hlm. 201, 232; C.M. Pleyte, TBG, XLIX, 1906, hlm. 171, 177; N.J. Krom, IHJIK, hlm. 131–133; F.M. Schnitger, 1937, hlm. XVI dan 1939, hlm. IV

[122] H. Kern, VG, VII, 1917, hlm. 219

[123] J. Brandes, 1909, hlm. 99–116

(a)

(b)

Gambar 3.8 (a) Candi Bahal I, Padang Lawas, Portibi, Sumatra Utara; (b) Candi Si Pamutung, Padang Lawas, Portibi, Sumatra Utara (*Sumber*: Skw)

Di dalam prasasti ini disebutkan ia bersama-sama dengan Gajah Mada telah menaklukkan Pulau Bali.

Sebenarnya Adityawarman adalah putra Majapahit keturunan *Malayu,* dan sebelum menjadi raja di Malayu, ia pernah menjabat kedudukan *wrddha-mantri* di Majapahit dengan gelarnya Aryadewaraja pu Aditya. Segera setelah ia berkuasa di Sumatra, ia menyusun kembali kerajaan yang diwariskan oleh Mauliwarmadewa, yang kita kenal memerintah sekitar tahun 1286.

Pada tahun 1347, setelah Adityawarman meluaskan daerah kekuasaannya sampai ke daerah Pagarruyung (Minangkabau), ia mengangkat dirinya menjadi seorang *maharajadhiraja* dengan gelarnya Udayadityawarman atau Adityawarmodaya Pratapaparakramarajendra Maulimaliwarmadewa.[124] Meskipun demikian, Adityawarman masih tetap menganggap dirinya sebagai sang mantri terkemuka dari Rajapatni di Majapahit dan mengaku masih sedarah dengan putri itu.

Dari prasasti-prasastinya kita dapat mengetahui bahwa Adityawarman adalah penganut agama Buddha dan menganggap dirinya sebagai penjelmaan Lokeswara. Anggapan ini sesuai dengan sistem kalacakra seperti halnya raja-raja Majapahit.[125] Adityawarman memerintah hingga sekitar tahun 1375, yaitu tahun terakhir dari prasastinya yang diketahui.[126] Penggantinya ialah anaknya yang bernama Ananggawarman, hanya kita tidak mengetahui kapan ia menggantikan kedudukan ayahnya.[127]

Dalam kitab sejarah dari dinasti Ming disebutkan bahwa pada tahun 1376 Ma-la-cha Wu li (Maharaja Mauli)[128] dan Ma-la-cha Pao-lin-pang (Maharaja Palembang) mengirimkan utusan ke Cina.

C. Panai

Hingga saat ini sangat sedikit sumber sejarah yang membicarakan kerajaan Panai, dan tampaknya nama kerajaan di Sumatra itu tidak banyak diketahui. Sumber tertulis yang paling awal menyebut nama kerajaan Panai adalah prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh raja Rajendra I pada tahun 1030 (Rajendracoladewa). Dapat dipastikan bahwa kerajaan Cola tersebut adalah nama kerajaan di India Selatan. Dalam prasasti itu disebutkan tentang penyerangan

[124] J.L. Moens, TBG, LXXVII, 1937, hlm. 457

[125] J.L. Moens, TBG, LXIV,1924, hlm. 558–579

[126] H. Kern, VG, VI. 1916, hlm. 257–261

[127] N.J. Krom, 1916, hlm. 338

[128] W.P. Groeneveldt, 1960; G. Ferrand, 1922, hlm. 25; J.L. Moens, 1937, hlm. 457; G. Coedès, 1968, hlm. 243

Gambar 3.9 (a) Relief raksasa menari, bata, Candi Bahal I; (b) Relief penari, batu, Candi Pulo, Padang Lawas, koleksi Museum Nasional; (c) Singa, batu, Candi Si Pamutung; (d) Makara, batu, Candi Si Topayan (*Sumber*: Skw)

raja Rajendra terhadap raja Sailendra yang bernama Sanggramawijayotunggawarman dari kerajaan Kadaram. Dapat diperkirakan bahwa yang dimaksud dengan kerajaan Sailendra di sini ialah kerajaan Sriwijaya. Lebih lanjut disebutkan bahwa setelah penyerangan terhadap Sriwijaya serta menghancurkan rajanya, maka yang menjadi target penyerangan berikutnya adalah kerajaan Panai. Di dalam prasasti Tanjore itu juga dinyatakan nama-nama kerajaan yang berhasil ditaklukkan antara lain kerajaan Kadaram (Kataha-Kedah), Pannai, Malayur, Ilamuridesa (Lamuri), Ilanggasokam (Langkasuka), Madalinggam (Tambralingga), dan lain-lain. Diduga nama-nama tersebut adalah nama-nama kerajaan kecil yang berada di Sumatra yang dianggap merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya.

Namun, kelihatannya penyerangan terhadap kerajaan Sriwijaya dan sekutu-sekutunya tersebut tidak berarti telah meruntuhkan kerajaan Sriwijaya secara keseluruhan. Dalam berita Cina disebutkan bahwa pada tahun 1028 masih disebutkan tentang adanya utusan dari Sumatra yang membawa upeti dari raja Se-li-tieh-hwa. Diduga raja ini merupakan keturunan dari Sanggramawijayatunggawarman.

Kata "Pannai" sebagaimana disebutkan di dalam prasasti itu memiliki bermacam-macam pengertian. Panai dapat diartikan sebagai "Watered by Rivers". Namun, terjemahan tersebut diperbaiki oleh Wheatley pada tahun 1961 yang menyatakan bahwa karena kata Pannai dalam bahasa Tamil berarti tanah pertanian, karena itu secara sederhana kata Pannai dalam prasasti Cola tersebut dapat diterjemahkan sebagai "*well-watered fields (of) Sriwijaya*".[129]

Di manakah lokasi kerajaan Panai? Hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Coedès misalnya menyebutkan bahwa kerajaan Panai itu terletak di pesisir timur pulau Sumatra di muara sungai, dekat Desa Labuhan-bilik.[130] Sarjana yang lain lebih cenderung menempatkan kerajaan Panai di bagian barat Sumatra, karena lebih dekat dengan pelabuhan Barus dan Sibolga. Sampai sekarang pulau kecil di dekat Barus masih disebut Panai.[131]

Sangat disayangkan bahwa sumber-sumber tertulis dari dalam negeri yang menyebutkan mengenai keberadaan kerajaan itu sangat sedikit sehingga informasi lebih lanjut mengenai kerajaan ini hanya mengandalkan pada hasil-hasil penelitian arkeologi. Kita pun tidak tahu apakah kerajaan Panai itu juga mempunyai hubungan dengan kerajaan Sriwijaya pada masa itu.

---

[129] R. Mulia, The Ancient Kingdom of Panai and the Ruins of Padang Lawas (North Sumatra), Bulletin of the RCAI, 14, 1980, hlm. 1

[130] Ibid., hlm. 5

[131] Ibid., hlm. 7

Sumber dari luar yang lain yang menyebut tentang kerajaan Panai berasal dari Cina. Oleh para sarjana diperkirakan bahwa kerajaan Panai menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya di Sumatra pada tahun 1000 AD. Schnitger misalnya, menyebutkan bahwa nama "Pu-ni atau Po-li" dalam sumber Cina ditujukan untuk kerajaan Panai itu.[132]

Menurut berita Cina pada abad ke-5 terdapat sebuah kerajaan yaitu P'o-li, mengirim upeti. Namun, para sarjana meragukan tentang keletakannya. Ada juga yang menyebut P'o-li itu di Kalimantan, ada pula yang menempatkannya di pesisir Sumatra Utara, ada pula yang menempatkannya di pesisir barat Semenanjung Tanah Melayu, di Asahan, Sumatra Utara, dan ada pula yang menempatkannya di Pulau Bangka, bahkan Paul Pelliot menempatkan P'o-li identik dengan Bali. I-tsing, seorang pendeta agama Buddha dari Cina yang beberapa kali mengunjungi dan tinggal di Sumatra menyebutkan bahwa P'o-li secara samar-samar terletak di sebelah timur Barus, tetapi letaknya jauh di pedalaman. Selanjutnya, Hsu Yun-ts'iao memperkirakan bahwa Panai tidak lain adalah di sekitar kompleks percandian Padang Lawas.[133] Oleh karenanya, kita dapat memperkirakan bahwa kerajaan Panai pada abad ke-6 itu adalah kerajaan yang berlatar belakang agama Buddha.

Pada abad ke-10 diperkirakan kerajaan Panai telah berkembang dan menjadi kerajaan yang penting di Sumatra dan oleh karenanya tidak mengherankan apabila Rajendra I dari kerajaan Cola melakukan penyerangan pada tahun 1025 AD. Namun, tampaknya serangan tersebut tidak berhasil menghancurkan Panai karena terbukti pada abad-abad berikutnya justru kerajaan itu berkembang, dan bahkan berhasil membangun pelbagai karya monumental seperti kompleks percandian Padang Lawas. Sangat disayangkan meskipun bangunan-bangunan yang didirikan di Padang Lawas cukup banyak, tidak ada satu pun yang memiliki prasasti yang menyebutkan nama kerajaan atau raja. Tulisan-tulisan singkat yang dipahatkan pada lembaran emas lebih mengenai mantra ajaran-ajaran Tantris yang berkembang saat itu. Dapat dikemukakan bahwa Raja Kertanagara dari Singhasari, Adityawarman dari Sumatra Barat dan Kubilai Khan dari Mongol adalah penganut setia dari ajaran tersebut.

Satu-satunya sumber dari dalam negeri yang menyebut kerajaan Panai adalah *Nagarakrtagama,* sebuah naskah sastra yang ditulis pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit. Di dalam naskah tersebut dinyatakan bahwa Panai merupakan salah satu kerajaan/wilayah yang menjadi target penaklukan oleh Majapahit dalam rangka penyatuan Nusantara.

---

132 Ibid., hlm. 2

133 Ibid.

Meskipun dalam sumber tertulis nama Panai hanya dikenal dalam kitab *Nagarakrtagama* itu pun berasal dari abad ke-14, nama tersebut dikenal pula dalam pelbagai istilah yang hidup di masyarakat. Kata Panai masih melekat di dalam nama sebuah sungai (Sungai Panai) yang merupakan anak Sungai Barumun yang mengalir hingga Selat Malaka. Di sepanjang Sungai Panai inilah ditemukan kompleks percandian yang lebih dikenal dengan nama kompleks percandian Padang Lawas. Namun, di manakah persisnya letak kerajaan Panai yang diserang oleh kerajaan Cola pada abad ke-11 itu?

Bab IV
Kerajaan Mataram Kuno

A. Wangsa Sailendra

1. Asal Usul Wangsa Sailendra

Istilah *Sailendrawangsa* dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 700 Saka (778 M).[1] Kemudian istilah itu muncul pula di dalam prasasti dari Desa Kelurak tahun 704 Saka (782 M),[2] di dalam prasasti Abhayagiriwihara dari bukit Ratu Baka tahun 714 Saka (792 M),[3] dan di dalam prasasti Kayumwungan tahun 746 Saka (824 M).[4] Yang amat menarik perhatian ialah bahwa istilah *Sailendrawangsa* itu muncul pula di luar Jawa, yaitu di dalam prasasti Ligor B[5], Nalanda, dan Leiden.

Prasasti-prasasti tersebut semuanya menggunakan bahasa Sanskerta, dan tiga di antaranya – kecuali prasasti Kayumwungan – menggunakan huruf siddham, bukan huruf Pallawa atau huruf Jawa kuno sebagaimana umumnya prasasti-prasasti di Jawa. Kenyataan ini ditambah dengan kenyataan bahwa ada beberapa nama wangsa di India dan daratan Asia Tenggara yang sama artinya dengan Sailendra, yaitu raja gunung, menimbulkan pelbagai teori

---

1 F.D.K. Bosch, "De inscriptie van Keloerak", TBG, LXVIII, 1928, hlm. 27–62, J.L.A. Brandes, "Een nagari-opschrift; gevonden tusschen Kalasan en Prambanan", TBG, XXXI, 1886, hlm. 240–260

2 Ibid., hlm. 1–56

3 J.G. de Casparis, *Inscripties uit de Çailendra-tijd. Prasasti Indonesia I*, 1950, hlm. 21–22; "Note on cultural relation between Ceylon and Jawa", Artibus Asiae, XXIV, 1961, hlm. 241–248

4 J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I, hlm. 38–41

5 G. Coedès, "Le royaume de Sriwijaya, "BEFEO, XVIII, 1918, hlm. 29–31. Prasasti Ligor ini bertulisan pada dua sisinya. Pada sisi A terdapat prasasti dari raja Sriwijaya yang tidak disebut namanya, berangka tahun 697 Saka (775 M). Pada sisi B terdapat prasasti yang hanya terdiri atas 4 baris, ternyata tidak diselesaikan. Pada sisi B inilah terdapat nama raja yang mengaku dirinya terlahir dari wangsa Sailendra. Masalah yang timbul ialah mengenai angka tahunnya. Adakah prasasti Ligor B ini berasal dari tahun yang sama dengan prasasti Ligor A, atau lebih muda? Boechari (1979) pernah mengemukakan dugaan bahwa prasasti Ligor B dikeluarkan oleh raja Balaputradewa, raja Sriwijaya yang mengaku sebagai cucu raja Jawa dari wangsa Sailendra yang bergelar Sri Wirawairimathana; jadi kira-kira tiga perempat abad lebih muda dari prasasti Ligor A.

tentang asal usul wangsa Sailendra di Jawa itu. R.C. Majumdar beranggapan bahwa wangsa Sailendra di Indonesia, baik yang di Jawa maupun yang di Sriwijaya, berasal dari Kalingga di India Selatan.[6] G. Coedès lebih condong kepada anggapan bahwa wangsa Sailendra di Indonesia itu berasal dari Fu-nan atau Kamboja. Menurut pendapatnya ejaan Fu-nan dalam berita berita Cina itu berasal dari kata Khmer kuno *vnam* atau *bnam* yang berarti gunung; dalam bahasa Khmer sekarang phnom. Raja-raja Fu-nan disebut *parwatabhupala*, yang berarti raja gunung sama dengan kata Sailendra. Setelah kerajaan Fu-nan itu runtuh sekitar tahun 620 M, ada anggota wangsa raja-raja Fu-nan itu yang menyingkir ke Jawa, dan muncul sebagai penguasa di sini pada pertengahan abad VIII M, dengan menggunakan nama wangsa Sailendra.[7]

J. Przyluski menunjukkan bahwa argumentasi Coedès itu di*dasa*rkan atas tafsiran yang meragukan dari satu bait di dalam prasasti Kuk Prah Kot, yang menurut Coedès merupakan petunjuk bahwa raja-raja Sailendra di Jawa menganggap dirinya keturunan wangsa Sailendra Fu-nan. Menurut Przyluski istilah wangsa Sailendra itu menunjukkan bahwa raja-raja itu menganggap dirinya berasal dari Sailendra yang berarti raja gunung, dan merupakan sebutan bagi Siwa = Girisa. Dengan perkataan lain, raja-raja wangsa Sailendra di Jawa itu tentu menganggap leluhurnya ada di atas gunung. Hal ini merupakan petunjuk baginya bahwa istilah Sailendra itu asli Indonesia.[8]

Pendapat-pendapat tersebut di atas telah dibahas oleh Nilakanta Sastri, dan ia sendiri mengajukan pendapat bahwa wangsa Sailendra di Jawa itu berasal dari daerah Pandya di India Selatan.[9] Akhirnya, J.L. Moens, dalam salah satu karangannya yang menarik perhatian, mengemukakan pendapat bahwa wangsa Sailendra itu berasal dari India Selatan, yang semula berkuasa di sekitar Palembang, tetapi pada tahun 683 M melarikan diri ke Jawa karena serangan dari Sriwijaya dari Semenanjung Tanah Melayu.[10]

Di antara pendapat-pendapat di atas yang kemudian banyak dianut ialah pendapat G. Coedès, lebih-lebih setelah J.G. de Casparis dapat menemukan istilah Waranaradhirajaraja di dalam prasasti dari candi Plaosan Lor,

---

6 R.C. Majumdar, "Les rois Çailendra de Suvarnadvipa", BEFEO, XXXIII, 1933, hlm. 121–144

7 G. Coedès, "On the origin of the Çailendras of Indonesia", JGIS, vol. I, 1934, hlm. 66–70

8 J. Przyluski, "Çailendrawamça", JGIS, vol. II, 1935, hlm. 25–36

9 K.A. Nilakanta Sastri, "Origin of the Çailendras", TBG, LXXV, 1935, hlm. 605–611

10 J.L. Moens, "Çrivijaya, Yava en Kataha", TBG, LXXVII, 1937, hlm. 317–487; terutama hlm. 435–436. Karangan ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan agak disingkat, dan terbit dalam Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 17,2, 1940, hlm. 1–10, 4 peta, oleh R.J. de Touche

juga prasasti Kelurak, dan ia mengidentifikasikan Waranara itu dengan Narawaranagara atau Na-fu-na di dalam berita-berita Cina, yaitu pusat kerajaan Fu-nan setelah berpindah dari Wyadhapura atau T'e-mu setelah mendapat serangan dari Chen-la di bawah pimpinan Bhawawarman dan Citrasena pada pertengahan kedua abad VI M.[11] Selanjutnya de Casparis mengatakan bahwa setelah pindah ke Na-fu-na yang biasa dilokasikan di dekat Angkor Borei ada di antara raja-raja itu yang pergi ke Jawa dan berhasil mengalahkan raja yang berkuasa di sana, yaitu Sañjaya dan keturunan-keturunannya. Jadi, menurut de Casparis, di Jawa mula-mula berkuasa wangsa raja-raja yang beragama Siwa, tetapi setelah kedatangan raja dari Na-fu-na itu yang berhasil menaklukkannya, di Jawa Tengah terdapat dua wangsa raja-raja, yaitu raja-raja dari wangsa Sañjaya yang beragama Siwa, dan para pendatang baru itu, yang kemudian menamakan dirinya wangsa Sailendra, yang beragama Buddha. Pendapat de Casparis itu diilhami oleh F.H. van Naerssen, yang melihat bahwa di dalam prasasti Kalasan tahun 778 M, yang berbahasa Sanskerta ada dua pihak, yaitu pihak raja wangsa Sailendra, yang hanya disebut sebagai Permata wangsa Sailendra tanpa nama, dan Rakai panangkaran, raja bawahannya dari wangsa Sañjaya.[12]

Selanjutnya de Casparis mencoba mengadakan rekonstruksi jalannya sejarah kerajaan Mataram sampai dengan pertengahan abad IX M dengan landasan anggapan bahwa sejak pertengahan abad VIII M ada dua wangsa raja-raja yang berkuasa, yaitu wangsa Sailendra yang berasal dari Fu-nan, dan penganut agama Buddha Mahayana, yang berhasil menaklukkan raja-raja dari wangsa Sañjaya yang beragama Siwa. Raja-raja wangsa Sañjaya itu, sejak Rakai panangkaran hanya berkuasa sebagai raja bawahan, dan dalam beberapa kesempatan pembangunan candi-candi membantu raja wangsa Sailendra dengan memberikan tanah-tanah sebagai *sima* bagi candi-candi itu.[13] Pendapat de Casparis ini dikembangkan lagi oleh F.D.K. Bosch, dengan perubahan-perubahan di sana-sini.[14]

Pendapat bahwa wangsa Sailendra itu berasal dari luar Indonesia (India atau Kamboja) ditentang oleh R.Ng. Poerbatjaraka. Ia merasa amat tersinggung membaca teori-teori tersebut, seolah-olah bangsa Indonesia ini sejak dahulu kala hanyalah mampu untuk diperintah oleh bangsa asing.

---

[11] J.G. de Casparis, Selected inscriptions from the 7th to the 9th century A.D., Prasasti Indonesia II, 1956, hlm. 184–185, terutama catatan no. 39

[12] F.H. van Naerssen, "The Sailendra Interregnum", India Antiqua, 1947, hlm. 249–253

[13] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I, 1950; Prasasti Indonesia, II, 1956

[14] F.D.K. Bosch, Çrivijaya, de Çailendra-en de Sañjayavamça", BKI, 108, 1952, hlm. 113–123

Menurut Poerbatjaraka, Sañjaya dan keturunan-keturunannya itu ialah raja-raja dari wangsa Sailendra, asli Indonesia, yang semula menganut agama Siwa, tetapi sejak Rakai panangkaran berpindah agama menjadi penganut agama Buddha Mahayana. Sebagai salah satu alasan ia menunjuk kepada kitab *Carita Parahyangan*, yang antara lain memuat keterangan bahwa Rahyang Sañjaya telah menganjurkan anaknya Rahyangta panaraban, untuk meninggalkan agama yang dianutnya, karena ia ditakuti oleh semua orang. Nama Rahyangta panaraban diidentifikasikannya dengan Rakai panangkaran.[15]

Penemuan prasasti batu berbahasa Melayu kuno di Desa Sojomerto, Kabupaten Pekalongan, dan sebuah prasasti batu berbahasa Sanskerta yang tidak diketahui dengan jelas asalnya[16] dan kini disimpan di Museum Adam Malik, mungkin sekali memperkuat anggapan Poerbatjaraka. Prasasti dari Sojomerto itu menyebutkan Dapunta Selendra, nama ayah dan ibunya, yaitu Santanu dan Bhadrawati, dan istrinya yang bernama Sampula. Masih ada tokoh lagi yang disebut di dalam prasasti yang sayang sekali namanya tidak terbaca seluruhnya. Demikian pula istilah yang menunjukkan hubungan antara tokoh ini dengan Dapunta Selendra tidak terbaca seluruhnya. Tokoh ini diberi predikat Hyang, jadi mungkin sekali tokoh yang telah diperdewakan, dan dianggap sebagai leluhur Dapunta Selendra.[17]

Sebagaimana *Isana*wangsa berpangkal kepada Pu Sindok yang bergelar Sri *Isana*wik*rama*dharmmottunggadewa dan Rajasawangsa berpangkal kepada Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa[18] tentunya Sailendrawangsa berpangkal

---

15 R.Ng. Poerbatjaraka, Çrivijaya, de Çailendra-en de Sañjayavamça, BKI, 114, 1956, hlm. 254–264. Karangan Bosch dan Poerbatjaraka ini telah disalin ke dalam bahasa Indonesia, dan diterbitkan oleh penerbit Bhratara, 1975

16 Menurut keterangan Bapak Adam Malik, penjual prasasti itu mengatakan batu itu berasal dari Jawa Barat. Akan tetapi, ada keterangan dari seorang kolektor di Solo yang mengatakan kepada Boechari bahwa batu itu berasal dari dekat Sragen, di sebelah timur Solo, dan di tempat itu masih dijumpai sisa-sisa bangunan dari bata. Kolektor itu masih menyimpan sebuah kepala arca Buddha yang indah buatannya, terbuat dari terakota. Mengingat kebiasaan penjual barang purbakala yang tidak pernah mau menyebut tempat asal barang yang dijualnya, dan mengingat isi prasasti itu, mungkin sekali keterangan kolektor di Solo itu yang benar

17 Boechari, "Preliminary report on the discovery of an Old Malay inscription at Sojomerto", MISI, III, no. 2 & 3, Oktober 1966, hlm. 241–251

18 Sebetulnya masih ada satu nama wangsa lagi yang dijumpai di dalam Sejarah Kuno Indonesia, yaitu Girindrawangsa. Istilah ini ditemukan di dalam kitab Lubdhaka karangan Pu Tan Akung, yang semula dikira berasal dari zaman Kadiri. Akan tetapi, karena ada raja-raja Majapahit yang bergelar dengan unsur Girindra, dan mengingat pula pernyataan bahwa di dalam Nagarakertagama Ken Angrok disebut anak Girindra (Nag., 40, 2), Girindrawangsa itu tentulah menunjukkan wangsa raja-raja Majapahit, mungkin merupakan cabang dari keturunan keturunan Rajasa/Ken Angrok

kepada seorang leluhur yang gelarnya mengandung unsur Sailendra. Di dalam prasasti Sojomerto itu dijumpai nama Dapunta Selendra, yang jelas merupakan ejaan Indonesia dari kata Sanskerta Sailendra. Sesuai dengan asal usul nama-nama wangsa yang lain itu dapatlah di sini disimpulkan bahwa wangsa Sailendra itu berpangkal kepada Dapunta Selendra. Kenyataan bahwa ia menggunakan bahasa Melayu kuno di dalam prasastinya menunjukkan bahwa ia orang Indonesia asli, mungkin sekali berasal dari Sumatra, karena di Sumatralah dijumpai lebih banyak prasasti yang berbahasa Melayu kuno.[19]

Dari prasasti Sojomerto itu jelas bahwa Dapunta Selendra ialah penganut agama Siwa. Kapan dan apa sebabnya raja-raja wangsa Sailendra itu mulai menganut agama Buddha mungkin dapat diketahui dari prasasti milik Bapak Adam Malik, yang untuk sementara disebut dengan nama prasasti Sangkhara. Prasasti ini berbahasa Sanskerta, tetapi sayang yang diketemukan kembali hanya bagian akhirnya. Rupa-rupanya prasasti ini dituliskan di atas dua batu, tetapi batu yang pertama yang memuat permulaan prasasti tidak ada. Dengan demikian, tidak diketahui kapan prasasti ini dikeluarkan – kalaupun ada angka tahunnya. Melihat bagian belakang prasasti yang tidak rata, dan ada bagian yang merupakan tonjolan, rupa-rupanya prasasti ini dahulu ditempatkan dalam suatu bangunan.

Bagian yang tersisa berisi keterangan bahwa pada suatu ketika ayah raja Sangkhara jatuh sakit, dan selama delapan hari ia sangat menderita karena panas yang membakar. Akhirnya ia meninggal tanpa dapat disembuhkan oleh pendeta gurunya. Oleh karena itu, raja Sangkhara merasa takut kepada sang guru yang dianggapnya tidak benar, dan ia lalu meninggalkan kebaktian kepada Sangkhara (Dewa Siwa). Bagian penutup prasasti memang membayangkan bahwa raja Sangkhara itu kemudian menjadi penganut agama Buddha, karena antara lain dikatakan bahwa ia telah memberikan anugerah kepada *bhiksusanggha*.[20]

---

[19] Dalam hal ini masih ditunggu penelitian dari para ahli lingustik historis untuk menentukan daerah asal bahasa Melayu kuno itu, sebab di Jawa Tengah juga dijumpai beberapa prasasti lain yang berbahasa Melayu kuno

[20] Prasasti ini belum diterbitkan; tetapi telah dibaca oleh Boechari. Sebenarnya tafsiran ini masih agak meragukan. Hal ini terletak pada penafsiran kalimat yang berbunyi: *so yan tyaktanyabhaktir jagadasiwaharac chankarac chankarakhyah. Terutama kasus ablatif jagadasiwaharac chankarac* itu. Mungkin kalimat ini dapat diterjemahkan dengan ia, yang bernama Sangkhara, yang meninggalkan kebaktian kepada yang lain-lain, (antara lain) dari Siwa yang melenyapkan ketidaktenter*aman*n dunia? Memang kedengarannya agak janggal, tetapi mengingat bagian akhir prasasti membayangkan bahwa raja Sangkhara itu menjadi penganut agama Buddha dengan memberi anugerah kepada bhiksusanggha, mungkin sekali kejanggalan itu bersumber kepada kekurangpahaman penulis prasasti, yang mungkin sekali seorang pendeta pribumi, akan tata bahasa Sanskerta. Karena raja meninggalkan kebaktian kepada Siwa, kalimatnya dinyatakan dengan kasus ablatif, yang pada umumnya

Kalau tafsiran itu benar, di sini dijumpai suatu sumber prasasti yang memberikan keterangan tentang perpindahan agama dari agama Siwa ke agama Buddha, dan raja yang berpindah agama itu ialah raja Sangkhara yang hingga kini belum pernah ditemui namanya di dalam sumber-sumber yang telah dikenal sebelumnya.

Prasasti ini tidak lengkap hingga tidak diketahui angka tahunnya. Akan tetapi, dari segi palaeografi dapat diperkirakan bahwa prasasti ini berasal dari pertengahan abad VIII M. Mungkin sekali ini merupakan bukti epigrafis dari teori Poerbatjaraka yang di*dasa*rkan atas keterangan di dalam kitab Carita Parahyangan. Dengan perkataan lain, mungkin sekali pendapat Poerbatjaraka mengenai asal usul wangsa Sailendra benar, yaitu bahwa mereka itu orang Indonesia asli, dan bahwa hanya ada satu wangsa, wangsa Sailendra, yang anggota-anggotanya semula menganut agama Siwa. Akan tetapi, sejak pemerintahan Rakai panangkaran[21] menjadi penganut agama Buddha Mahayana, untuk kemudian pindah lagi menjadi penganut agama Siwa sejak pemerintahan Rakai Pikatan.

2. Ho-ling dan Kañjuruhan

Munculnya wangsa Sailendra itu bersamaan dengan perubahan dalam penyebutan Jawa di dalam berita-berita Cina. Kalau sebelumnya, yaitu dalam abad V M, berita-berita Cina dari zaman dinasti Sung Awal (420–470 M) menyebut Jawa dengan sebutan She-p'o, berita-berita Cina dari zaman dinasti Tang (618–906 M) menyebut Jawa dengan sebutan Ho-ling sampai tahun 818 M, untuk kemudian berubah lagi menjadi She-p'o mulai tahun 820 sampai tahun 856 M.[22] Seperti telah dikatakan, prasasti Sojomerto itu mungkin sekali berasal dari pertengahan abad VII M, dan berita Cina yang pertama menyebut Ho-ling berasal dari tahun 640 M. Berita-berita dari zaman dinasti Tang ada dua versi, yaitu Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu (618–906 M). Berita tentang

menunjukkan gerakan dari suatu arah yang lain (dari Siwa ke Buddha). Menurut tata bahasa Sanskerta yang benar, mungkin kalimat di atas harus diterjemahkan dengan ia yang bernama Sangkhara, yang meninggalkan kebaktian kepada yang lain-lain kecuali kepada Siwa. Dengan terjemahan semacam itu harus ditafsirkan bahwa raja Sangkhara lalu menjadi penganut agama Siwa, yang kurang sesuai dengan keterangan pada akhir prasasti yang membayangkan bahwa ia menjadi penganut agama Buddha. Yang menarik perhatian lagi ialah keterangan bahwa raja Sangkhara menyebut gurunya sebagai "guru yang tidak benar (*anrtaguru*)"

21 Di sini perlu dikemukakan pendapat bahwa mungkin sekali gelar lengkap dari Rakai panangkaran ialah Rakai panangkaran Dyah Sangkhara Sri Sangg*rama*dhananjaya

22 Lihat L-C. Damais, "Etudes Sino-Indonésiennes, III, La transcription chinois Ho-ling comme designation de Java", BEFEO, tome LII, 1964, hlm. 140–141

Holing antara lain sebagai berikut: Ho-ling yang juga disebut She-p'o, terletak di laut selatan. Di sebelah timurnya terletak P'o-li dan di sebelah baratnya terletak To-p'o-teng. Di sebelah selatannya adalah lautan, sedang di sebelah utaranya terletak Chen-la.[23] Tembok kota dibuat dari tonggak-tonggak kayu. Raja tinggal di sebuah bangunan besar bertingkat, beratapkan daun palem(?), dan ia duduk di atas bangku yang terbuat dari gading. Dipergunakan pula tikar yang terbuat dari kulit bambu. Kalau makan, orang tidak menggunakan sendok atau sumpit, tetapi dengan tangan saja. Penduduknya mengenal tulisan dan sedikit tentang ilmu perbintangan.

Ho-ling menghasilkan kulit penyu, emas dan perak, cula badak, dan gading. Kerajaan ini amat makmur; ada sebuah gua(?) yang selalu mengeluarkan air garam (*bledug*, Jw.). Penduduk membuat minuman keras dari bunga kelapa (atau bunga aren). Bunga pohon ini panjangnya dapat mencapai tiga kaki, dan besarnya sama dengan tangan orang. Bunga ini dipotong, dan airnya ditampung dijadikan minuman keras; rasanya amat manis, tetapi orang cepat sekali mabuk dibuatnya. Di Ho-ling banyak perempuan yang berbisa; apabila orang mengadakan hubungan kelamin dengan perempuan-perempuan itu, ia akan luka-luka bernanah dan akan mati, tetapi mayatnya tidak membusuk.

Di daerah pegunungan ada sebuah daerah yang bernama Lang-pi-ya; raja sering pergi ke sana untuk menikmati pemandangan ke laut. Apabila pada pertengahan musim panas orang mendirikan gnomon setinggi 8 kaki, bayangannya akan jatuh ke sebelah selatannya, dan panjangnya dua kaki empat inci.

Dalam masa Chen-kuan (627–649 M), raja Ho-ling, bersama dengan raja To-ho-lo dan To-p'o-teng, mengirimkan utusan ke Cina menyerahkan upeti. Kaisar memberikan surat jawaban dengan dibubuhi cap kekaisaran, dan ketika utusan dari To-ho-lo meminta kuda-kuda yang baik, permintaan itu dikabulkan oleh Kaisar. Utusan dari Ho-ling datang lagi pada tahun-tahun 666, 767, dan 768 M. Utusan yang datang pada tahun 813 M (atau 815 M) mempersembahkan empat budak *sheng-chih* (jenggi), burung kakatua yang bermacam-macam warnanya, burung *p'in-chia*(?), dan benda-benda yang lain. Kaisar amat berkenan hatinya, dan memberikan anugerah gelar kehormatan kepada utusan itu. Utusan itu mohon agar gelar itu diberikan saja kepada

[23] W.P. Groeneveldt menyalin kalimat ini dengan: it lies on the eastern side of Sumatera (= P'o-li), on the western side of Bali (= To-p'o-teng). Semestinya P'oli diidentifikasikan dengan Bali, sedang To-p'o-teng dianggap sebagai suatu tempat di Sumatra. J.L. Moens melokalisasikan To-p'o-teng itu di Semenanjung Tanah Melayu

adiknya. Kaisar amat terkesan akan sikap itu, dan memberi anugerah gelar kehormatan kepada keduanya.

Pada tahun 674 M rakyat kerajaan itu menobatkan seorang perempuan sebagai ratu yaitu ratu Hsi-mo. Pemerintahannya meskipun sangat keras akan tetapi adil. Barang-barang yang terjatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya. Pada waktu raja orang-orang Ta-shih mendengar berita semacam itu, ia mengirim pundi-pundi berisi emas untuk diletakkan di jalan di negeri ratu Hsi-mo. Setiap orang yang melewatinya menyingkir; sampai tiga tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuhnya. Pada suatu hari putra mahkota yang lewat di situ tanpa sengaja telah menginjaknya. Ratu sangat marah, dan akan memerintahkan hukuman mati terhadap putra mahkota. Para menteri mohon pengampunan baginya. Akan tetapi, ratu mengatakan bahwa karena yang bersalah adalah kakinya, kaki itu harus dipotong. Sekali lagi para menteri mohon pengampunan; akhirnya ratu memerintahkan agar jari-jari kaki putra mahkota itu yang dipotong, sebagai peringatan bagi penduduk seluruh kerajaan. Mendengar hal itu raja Ta-shih takut dan mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan ratu Hsi-mo.

Raja tinggal di kota She-p'o (She-p'o-tch'eng), tetapi leluhurnya yang bernama Ki-yen telah memindahkan pusat kerajaan ke timur, ke kota P'olu-chia-ssu. Di sekeliling She-p'o ada 28 kerajaan kecil, dan tidak ada di antaranya yang tidak tunduk. Ada 32 pejabat tinggi kerajaan, dan yang terutama di antara mereka ialah ta-tso-kan-hsiung.[24] Menurut berita dalam Ying-huan-tchelio perpindahan itu terjadi dalam masa T'ien-pao (742–755 M.).[25]

Berdasarkan keterangan mengenai panjangnya bayangan gnomon di tengah musim panas itu orang harus menetapkan letak Ho-ling ada pada 6°8' LU, jadi tidak mungkin ada di Jawa. Akan tetapi, ada kemungkinan juga bahwa penulis Hsin-T'ang shu itu telah membuat dua kekeliruan, yaitu bahwa mestinya waktunya di tengah musim dingin, dan bahwa bayangan gnomon itu jatuh di sebelah utaranya. Kalau pembetulan ini diterima, Ho-ling terletak pada 6°8' LS,[26] jadi di pantai utara Jawa. Pemecahan semacam

---

24 W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 12–15

25 P. Pelliot, "Deux itineraires", hlm. 225, catatan no. 2. L-C. Damais menyebutkan bahwa berita perpindahan itu termuat dalam Yuan-che-lei-pin yang ditulis pada tahun 1669 M, dan bahwa perpindahan itu terjadi dalam masa T'ien-pao, antara tahun 742 dan 775 M atau tahun 664 dan 667 Saka (L-C. Damais, BEFEO, LII, fasc. 1, 1964, hlm. 138). Rupa-rupanya di sini terdapat beberapa salah cetak. Bandingkan karangannya sebelumnya Bibliographie Indonésienne, II, BEFEO, XLVIII, 1957, hlm. 607–649

26 Auguste Barth, "Le pelerin chinois I-tsing", hlm. 14, catatan no. 1

ini sesuai dengan lokalisasi Lang-pi-ya di Desa Krapyak dekat Gunung Lasem.[27] L-C. Damais mengidentifikasikan Holing dengan Walaing.[28] Identifikasi itu mungkin secara fonetis memang dapat dipertanggung-jawabkan, tetapi sepanjang yang dapat disimpulkan dari sumber epigrafi, Walaing yang memang sering disebut sebagai nama tempat di dalam pelbagai prasasti,[29] tidak merupakan pusat kerajaan. Dari prasasti-prasasti diketahui bahwa kerajaan wangsa Sailendra itu disebut Mataram, dan ibu kotanya disebut Medang, sampai ke zaman pemerintahan Pu Sindok. Letak ibu kota Medang memang berpindah-pindah, tetapi tidak pernah ada Medang i Walaing. Desa Medang memang dijumpai mulai dari daerah Bagelen di Jawa Tengah sampai di dekat Madiun di Jawa Timur, tetapi yang terbanyak ialah antara Purwodadi-Grobogan dan Blora. Lokasi di daerah ini sesuai pula dengan keterangan tentang adanya gua yang selalu mengeluarkan air garam, dan memang di Desa Kuwu di daerah Purwodadi-Grobogan itulah hingga kini masih dijumpai apa yang dalam bahasa daerah disebut *bledug*, dan orang di situ membuat garam dari *bledug* itu.

Ratu Hsi-mo atau *Sima* dalam bahasa Indonesia, mungkin pengganti atau salah seorang pengganti Dapunta Selendra. Perlu dicatat di sini bahwa pada masa pemerintahan *Sima* itu di Ho-ling telah ada seorang pendeta agama Buddha yang termasyhur bernama Yoh-na-p'o-to-lo atau Jñanabhadra.[30] Ia telah membantu seorang pendeta Cina, Hwi-ning (664–666 M), dalam menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Ini berarti bahwa setidak-tidaknya kedua pendeta itu dapat berdiskusi dalam satu bahasa yang mereka kuasai bersama, di samping bahasa Sanskerta, bahasa Cina atau bahasa daerah, yang di dalam berita-berita Cina disebut bahasa K'un-lun.

Yang mereka terjemahkan ialah Nie-p'an (Nirwana) dari Sang Buddha dan pembakaran jenazahnya. Menurut keterangan I-tsing ternyata naskah ini berbeda dengan naskah *Nirwana* dari aliran Hinayana. Ini juga ternyata dari keterangan I-tsing yang mengatakan bahwa naskah yang diterjemahkan itu termasuk dalam *Ngo-ki-muo* (Agama), yang tergolong dalam kitab-kitab

---

27 E.W. van Orsoy de Flines, "Hasin, Medang, Kuwu, Langpi-ya", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 424–429

28 L-C. Damais, BEFEO, LII, fasc. i, 1964, hlm. 93–141

29 Di dalam prasasti mana saja nama Walaing itu ditemukan dapat dilihat dalam karya Damais, "*Répertoire Onomastique* de l'Épigraphie Javanaise (jusqu'à Pu Sindok Sri *Isana*wik*rama* Dharmmotunggadewa)", BEFEO, tome LXVI, 1970, s.v. Walaing

30 E. Chavannes, trans., "Voyages des pelerins bouddhistes: Les religieux eminents qui allerent chercher la loi dans les pays d'Occident, memoir compose a l'epoque de la grand dynastie T'ang par I-tsing", 1894

sutra yang pertama dari aliran Hinayana. Dari keterangan I-tsing diketahui pula bahwa di pulau-pulau di Laut Selatan, termasuk di Ho-ling, hampir semua penduduknya menganut agama Buddha Hinayana terutama dari aliran Mulasarwastiwada.[31]

Keterangan I-tsing itu bertentangan dengan kenyataan bahwa Dapunta Selendra adalah penganut agama Siwa; dan demikian pula tentunya pengganti-penggantinya sampai dengan Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya. Akan tetapi, mengingat bahwa di Jawa ini tidak selalu rakyat mengikuti agama yang dianut oleh rajanya, sebagaimana antara lain ternyata dari banyaknya peninggalan-peninggalan candi kecil yang berlandaskan agama Siwa di sekitar candi Borobudur,[32] masalah agama itu tidak perlu merupakan keberatan terhadap anggapan bahwa sampai pemerintahan Sañjaya raja-raja wangsa Sailendra adalah penganut agama Siwa.

Dalam masa pemerintahan ratu *Sima* itu ada ancaman dari raja Ta-shih. Istilah Ta-shih merupakan transkripsi dari Tajika, yang biasa digunakan untuk menyebut orang-orang Arab di India. Timbul pertanyaan apakah yang dimaksudkan dengan raja Ta-shih yang hendak menyerang Ho-ling itu. Mungkinkah di kepulauan Indonesia pada abad VII M itu sudah ada orang-orang Arab (atau yang oleh orang Cina dianggap sebagai orang Arab) yang menetap dan merupakan suatu kelompok masyarakat tersendiri?[33]

Prasasti Hampran dan prasasti Sangkhara itu berasal dari suatu masa yang bersamaan dengan terjadinya perpindahan ibu kota kerajaan Ho-ling dari She-p'o-tch'eng ke P'o-lu-chia-sse, seperti yang tertera dari berita Cina dari zaman rajakula T'ang. Seperti telah disebutkan, berita Cina itu mengatakan bahwa raja Ho-ling tinggal di kota She-p'o, tetapi nenek moyangnya yang bernama Ki-yen telah memindahkan ibu kotanya ke timur, ke P'o-lu-chia-sse. Karena

---

31 J. Takakusu, *Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago* (A.D. 671–695) by I-tsing, 1966, hlm. 10. Mengenai identifikasi K'un-lun dengan bahasa Melayu, atau bahasa pengantar di kepulauan Indonesia, lihat antara lain G. Ferrand, "Le K'ouen-louen, et les anciennes navigations inter-océaniques dans les mars du sud", JA, N.C. Serrie, XIII, 1919. Juga Sylvain Levi, "K'ouen-louen et Dvipantara", BKI, 88, 1931, hlm. 621–627. A.H. Christie, "The name K'un-lun as an ethnic term", Comptes Rendus du XXXII[e] *Congress International des Orientalis*, 1954, hlm. 297; N.J. Krom, HJG, 1931, hlm. 109–110

32 Moendardjito, Laporan Penelitian Bowongan, 1976

33 Tentang hal ini lihat W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 14. Juga G. Ferrand, JA, 1924, hlm. 242; Tibbets dalam karangannya, "Pre-Islamic Arabia and South-East Asia", JMBRAS, XXIX, 1956, hlm. 122–208, sampai kepada kesimpulan bahwa sampai dengan abad VI M orang-orang Arab tidak berlayar lebih ke timur dari pantai barat India. Akan tetapi, dalam abad-abad berikutnya memang ada pedagang-pedagang Arab (Ta-shih) dan Persia (Po-pase) yang sampai ke Cina. Lihat tentang hal ini antara lain G.F. Hourani, *Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times,* 1951, hlm. 62–63; 66

selanjutnya disebut-sebut ta-tso-kan-hiung, yang oleh Boechari ditafsirkan sebagai "Daksa, saudara/raja/yang gagah berani,[34] maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini ialah Rakai Watukura Dyah Balitung, yang memerintah antara tahun 899–911 M.

Masalahnya sekarang siapakah Ki-yen itu, dan apa sebabnya ia memindahkan pusat kerajaannya. Seperti telah dikatakan pemindahan pusat kerajaan itu biasanya terjadi apabila kota itu telah diserbu oleh musuh. Akan tetapi, antara tahun 742–755 M itu tidak ada satu sumber pun yang memberitakan adanya serangan. Apa yang kira-kira terjadi antara tahun itu adalah pergantian pemerintahan dari Sañjaya ke Rakai panangkaran. Kalau Sangkhara itu dapat diidentifikasikan dengan Rakai panangkaran – sehingga nama lengkap raja ini ialah Rakai panangkaran Dyah Sangkhara Sri Sangg*rama*dhananjaya – maka pergantian itu disertai pula dengan perubahan agama yang dianut oleh raja; dan ini mungkin dapat menimbulkan pergolakan.[35] Mungkin masih ada anggota keluarga raja yang lain yang masih taat kepada agama leluhurnya, yaitu agama Siwa, dengan mungkin masih mempertahankan guru mereka. Mungkin juga Bhanu di dalam prasasti Hampran itu salah seorang anggota wangsa Sailendra yang diserahi sebagai penguasa daerah, yang masih tetap menganut agama Siwa.

Apakah Rakai panangkaran yang memindahkan pusat kerajaannya lebih ke timur dari daerah Kedu, yaitu lembah di lereng gunung Merapi? Kesulitannya ialah bahwa pertama-tama harus tahu dahulu letak She-p'o-tch'eng (Yawapura), pusat kerajaan Rakai Watukura Dyah Balitung. Apakah di daerah Kedu, ataukah di daerah sekitar Prambanan, ataukah di daerah Purwodadi–Grobogan?, yang terang sudah tidak lagi di daerah Pekalongan/ Banyumas. Andaikata dapat ditunjukkan bahwa Rakai Watukura berpusat kerajaan di daerah Kedu mengingat gelar *rakai*nya yang menunjukkan bahwa ia mempunyai daerah lungguh di daerah Kedu Selatan,[36] – mungkin sekali Rakai

---

[34] Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino Çri Sanggramawijaya Dharmmaprasadottunggadewi," LKIPN, II, 1962, hlm. 54–84; Rakryan *mahamantri* i hino. A study on the highest court dignitary of Ancient Java up to the 13th century A.D. ,"*Journal of the Historical Society*", University of Singapore, 1967–68, hlm. 7–20

[35] Kitab Carita Parahyangan memberi keterangan bahwa Rahiyang Sañjaya telah menyuruh anaknya, Rahiyangta panaraban, untuk tidak menganut agama yang dianutnya. Ini juga membayangkan adanya pergantian agama. Keterangan Poerbatjaraka yang mengatakan bahwa Rakai panangkaran itu berganti agama setelah ayahnya Sañjaya menempatkannya di Sriwijaya, (*Riwayat Indonesia, I*, 1952) tidak perlu rasanya dibahas di sini

[36] R.Ng. Poerbatjaraka, "Enkele oude plaatsnamen besproken", TBG, LXXII, 1932, hlm. 514–520, terutama hlm. 515, yang menyebutkan bahwa Desa Watukura masih ada hingga sekarang, di Kecamatan Bubutan, Kabupaten Purworejo, di sebelah barat Kali Bogowonto, dekat pantai selatan

panangkaran telah memindahkan pusat kerajaannya ke sekitar Prambanan, atau di daerah Purwodadi–Grobogan. Seperti yang akan dikemukakan dalam uraian selanjutnya, Rakai panangkaran telah membangun pelbagai candi, antaranya candi Sewu yang mestinya berfungsi sebagai candi kerajaan, khusus untuk pemujaan dewa tertinggi, yaitu Mañjusri, dan candi Kalasan.[37]

Dengan uraian tersebut seolah-olah Ki-yen sudah diidentifikasikan dengan Rakai panangkaran. Seperti telah ditunjukkan oleh L-C. Damais mungkin sekali nama Ki-yen itu tidak lengkap, mestinya Lo-ki-li-yen, yang merupakan transkripsi dari gelar *rakarayan*, atau *lo-ki-yen* yang merupakan transkripsi dari *rakryan*.[38] Jadi, Ki-yen bukan nama, melainkan hanya gelar; maka dapat diidentifikasikan dengan siapa saja yang bergelar *rakarayan*. Mengenai lokasi P'o-lu-chia-sse memang belum didapat penyelesaian yang memuaskan. Yang dapat dikatakan di sini barulah bahwa p'o-lu itu dapat merupakan transkripsi dari *waru*. Nama tempat Waru atau yang mengandung unsur Waru memang banyak sekali, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Akan tetapi, mungkin *Waru* harus dicari di sekitar Rembang, karena memenuhi syarat dekat dengan Krapyak, suatu tempat yang sering dikunjungi raja untuk menikmati pemandangan laut.[39]

Bagaimana kalau ternyata Rakai Watukura Dyah Balitung bertakhta di daerah Prambanan atau Purwodadi–Grobogan? Tentulah harus dibayangkan bahwa nenek moyangnya telah memindahkan pusat kerajaan lebih ke timur lagi, mungkin sampai ke Jawa Timur. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa hingga kini para sarjana cenderung untuk menghubungkan berita perpindahan pusat kerajaan Ho-ling ke timur itu dengan munculnya prasasti Dinoyo di daerah Malang yang berangka tahun 682 Saka (21 November 760 M).[40]

---

[37] Mungkin candi Plaosan Lor dan candi Borobudur juga dibangun pada masa pemerintahan Rakai panangkaran, sebagai candi-candi kerajaan yang berlandaskan agama Buddha Mahayana

[38] L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne, II", BEFEO, tome XLVIII, 1957, hlm. 646–647. Juga "Études Sino-Indonésiennes, I, Quelques titres javanais de l'époque des Song", BEFEO, L, 1960, hlm. 1–29; EEI, V; BEFEO, XLIX, 1958, hlm. 10–12

[39] G. Ferrand pernah mengemukakan pendapat bahwa P'o-lu-chia-sse itu merupakan transkripsi dari Baruyasik, dan mengidentifikasikannya dengan Waruh Gresik, yang sekarang masih tertinggal pada nama Gresik di Jawa Timur (Le K'ouen-louen, hlm. 304 catatan no. 3); J.L. Moens, Çrivijaya, Yawa en Kataha, hlm. 382–386, melokasikan P'o-lu-chia-sse di Barus, di sebelah selatan Kedah

[40] N.J. Kroms, HJG, 1931, hlm. 147; R.Ng. Poerbatjaraka: Riwajat Indonesia, I, 1952, hlm. 61–66; G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, 1968, hlm. 90; R.Ng. Poerbatjaraka, Agastya in den Archipel, diss, 1926, hlm. 109–110; R.A. Kern, "Joartan wedergevonden?", BKI, 102, 1943, 539-553, terutama pada hlm. 546, Kern menyangsikan apakah Ki-yen dapat disamakan dengan raja yang mengeluarkan prasasti Dinoyo, karena ia berpendapat bahwa Ki-yen itu bukan raja, hanya seorang pangeran

Di dalam prasasti Dinoyo itu diperingati pembuatan arca Agastya dari batu hitam dengan bangunan candinya oleh raja Gajayana, sebagai pengganti arca Agastya yang telah dibuat dari kayu cendana oleh nenek moyangnya. Gajayana adalah anak raja Dewasingha yang telah memerintah kerajaan di bawah naungan api Putikeswara. Setelah Dewasingha mangkat anaknya yang semula bernama Limwa, menggantikan duduk di atas takhta kerajaan Kañjuruhan, dengan nama Gajayana. Ia beranak perempuan yang bernama Uttejana, yang kawin dengan Jananiya. Gajayana memang pemuja Agastya, dan setelah ia melihat arca Sang Maharesi yang dibuat oleh nenek moyangnya dari kayu cendana, ia memerintahkan kepada para pemahat untuk membuat arca batu hitam yang indah dan bersama para pembesar dan rakyat ia memerintahkan pembangunan sebuah candi yang indah untuk Sang Agastya. Pada hari Jumat tanggal 21 November 760 M arca itu ditahbiskan oleh para pendeta yang paham akan kitab-kitab Weda, beserta para pertapa, para *sthapaka*, dan rakyat. Pada kesempatan itu raja menganugerahkan sebidang tanah, sapi yang gemuk-gemuk dan sejumlah kerbau, serta budak laki-laki dan perempuan sebagai penjaganya. Demikian pula raja menganugerahkan segala sesuatu untuk keperluan para pendeta, seperti untuk keperluan pemujaan api dan untuk persembahan caru bagi Sang Maharesi, dan untuk keperluan penyucian diri dan sebuah bangunan yang besar dan permai untuk tempat beristirahat para pengunjung, lengkap dengan persediaan padi jelai, tempat tidur, dan pakaian. Dua bait terakhir prasasti ini berisi kutukan bagi mereka yang tidak menjunjung tinggi amanat raja, dan sebaliknya mengharapkan kesejahteraan bagi mereka yang ikut memperbesar jasa dengan memelihara bangunan suci itu beserta segenap kelengkapannya.[41]

Isi prasasti tersebut mungkin berkaitan dengan nama sebuah kerajaan di Jawa Timur yang bernama Kañjuruhan. Nama ini rupa-rupanya hingga sekarang masih ada dalam nama sebuah desa tidak jauh dari Dinojo, tempat penemuan prasasti, yaitu Desa Kejuron di tepi Kali Merto. Di sebelah utara Desa Kejuron itu masih ada peninggalan candi yang memiliki ciri-ciri arsitekturnya termasuk bangunan candi yang tua, yaitu candi Badut. Apakah memang candi Badut itu yang disebutkan di dalam prasasti ini sebagai candi untuk pemujaan Agastya belumlah dapat dipastikan, karena di sekitarnya,

---

41 F.D.K. Bosch, "De Sanskrit inscriptie op den steen van Dinaja", TBG, LVII, 1916, hlm. 410–444; "Het Lingga-heiligdom van Dinaja", TBG, LXIV, 1924, hlm. 227–286; J.G. de Casparis, "Nogmaals de Sanskrit-inscriptie op den steen van Dinojo, TKNAG, LXXXI, 1941, hlm. 499–513; F.D.K. Bosch, De Sanskrit-inscriptie op de steen van Dinaja", OV, 1923, hlm. 29–35

Foto 4.1 Candi Badut, Dinoyo, Jawa Timur
(*Sumber*: BP3, Jawa Timur)

yaitu di desa Merjosari, Besuki, dan Ketawang Gede juga ditemukan sisa sisa bangunan kuno yang menunjukkan ciri-ciri arsitektur yang sama.[42]

Poerbatjaraka mengidentifikasikan Gajayana dengan Ki-yen di dalam berita Cina yang memindahkan pusat kerajaan Ho-ling ke timur. Fonetis identifikasi ini kurang dapat di terima.[43] Lagi pula ada keberatan yang lebih men*dasa*r, yaitu kenyataan bahwa di dalam prasasti ini disebut-sebut arca Agastya dari kayu cendana yang telah dibuat oleh nenek moyang raja Gajayana. Selain itu, dari kata-kata di dalam prasasti terbayang bahwa sebelumnya raja Dewasingha, ayahnya, telah memerintah dengan tenang di kerajaan Kañjuruhan. Jadi, tidak mungkinlah kiranya Gajayana diidentifikasikan dengan Ki-yen. Bahkan mungkin harus disimpulkan bahwa kerajaan Kañjuruhan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerajaan Ho-ling atau Mataram di Jawa Tengah. Apabila yang dimaksud dengan arca Agastya dari kayu cendana yang telah dibuat oleh nenek moyang raja Gajayana itu tidak lain dari sebuah patung pemujaan nenek moyang yang biasa dibuat oleh kesatuan masyarakat yang belum menganut agama Hindu/Buddha, jadi semacam mulabera, yang kemudian, setelah kelompok itu menganut kebudayaan India dan berkembang menjadi suatu kerajaan, ditingkatkan menjadi semacam patung *dewaraja*.[44] Kalau demikian halnya, Dewasingha dan Gajayana itu ialah keturunan kepala daerah yang menguasai Kejuron dan sekitarnya, yang telah mengangkat dirinya menjadi raja dalam gaya India, lengkap dengan upacara pentahbisannya.

Kerajaan Kañjuruhan itu tidak lama berkembangnya. Mungkin kemudian kerajaan itu ditaklukkan oleh Mataram, dan penguasa-penguasanya dianggap sebagai raja bawahan dengan gelar Rakryan Kanuruhan. Gelar ini mulai muncul di dalam prasasti raja Watukura Dyah Balitung, dan kedudukannya menjadi

---

42 Prasasti Dinoyo itu ditemukan terputus menjadi tiga bagian. Bagian yang tengah ditemukan di Desa Dinoyo, sedang bagian atas dan bagian bawah ditemukan di Desa Merjosari, kira-kira 2 km di sebelah barat Dinoyo. Mengingat kasus di Gunung Wukir dan prasasti Canggal, mungkin sekali prasasti Dinoyo ini asalnya justru dari Merjosari, yang memang ternyata menghasilkan sisa-sisa bangunan. De Casparis menduga bahwa batu prasasti itu berasal dari Desa Kejuron, pendapat ini mungkin kurang dapat diterima karena Kejuron mungkin justru merupakan pusat kerajaan, sedang prasasti itu tentulah tidak didirikan di pusat kerajaan, tetapi di dekat candinya

43 L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne, II," BEFEO, tome XLVIII, 1957, hlm. 645–647. Yen memang dapat merupakan transkripsi dari yana, tetapi ki tidak mungkin sama dengan gaja. Huruf yang berbunyi ki itu, selain merupakan transkripsi dari ka juga dapat menggantikan kata Sri, untuk gaja biasa dipakai bunyi ngo-jo

44 Hermann Kulke, *The Devaraja Cult*, hlm. 26. Kesimpulan ini dihasilkan dalam pembicaraan pribadi antara Hermann Kulke dan Boechari di Borobudur pada tanggal 9 Juli 1979

amat penting dalam zaman Dharmmawangsa Airlangga dan zaman Kadiri.[45] Mungkin sekali memang Rakai Watukura yang menaklukkan Kañjuruhan itu, karena dari raja ini didapatkan prasasti Kubu-kubu tahun 827 Saka (17 Oktober 905 M), yang menyebut bahwa pada zaman pemerintahannya telah terjadi penyerangan ke Banten, dan Banten dapat dikalahkan.[46] Berdasarkan nama-nama tempat yang lain di dalam prasasti ini mungkin Banten itu harus dicari di daerah Jawa Timur.

3. Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya

Sebelum membicarakan masalah perpindahan pusat kerajaan itu baiklah terlebih dahulu disebutkan di sini beberapa sumber prasasti dari masa sebelum perpindahan itu. Pertama-tama disebutkan di sini prasasti di Desa Lebak, Kecamatan Grabag (Magelang), di lereng Gunung Merbabu, yang lebih dikenal dengan nama prasasti Tuk Mas.[47] Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu alam yang besar yang berdiri di dekat suatu mata air. Hurufnya Pallawa yang tergolong muda, dan bahasanya Sanskerta. Menurut analisis palaeografis dari Krom prasasti ini berasal dari pertengahan abad VII M.[48] Isinya pujian kepada suatu mata air yang keluar dari gunung, menjadi sebuah sungai yang mengalirkan airnya yang dingin dan bersih melalui pasir dan batu-batu, bagaikan Sungai Gangga.[49]

Di atas tulisan itu dipahatkan bermacam-macam *laksana* dan alat-alat upacara antara lain cakra, sangkha, trisula, kundi, kapak, gunting, kudi, pisau, tongkat, dan empat bunga padma. *Laksana-laksana* itu jelas menunjuk kepada agama Siwa. Dapat dibayangkan bahwa mata air itu dianggap sebagai sumber

---

[45] J.G. de Casparis, "Nogmaals de Sanskrit-inscriptie op den steen van Dinojo," TKNAG, LXXXI, 1941, hlm. 499–513. Sebetulnya *rakryan* kanuruhan sudah muncul dalam prasasti Kañcana tahun 782 Saka (860 M), jadi dalam masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Akan tetapi, prasasti ini adalah prasasti tinulad, yang ditulis kembali pada zaman Majapahit. Nama kanuruhan juga terdapat di antara tulisan-tulisan singkat pada candi-candi perwara percandian Loro Jonggrang yang diperkirakan candi induknya ditahbiskan pada tahun 856 M. Percandian ini ternyata belum selesai seluruhnya, sehingga nama kanuruhan dapat saja tertera di situ pada masa pemerintahan Rakai Watukura

[46] Boechari, Prasasti Koleksi Museum Nasional, Jilid I, Jakarta, 1985/1986, hlm. 155–159

[47] H. Kern, "Het Sanskrit-inscriptie van Tuk Mas (Dakawu, res. Kedu; ± 500 A.D.)", VG, VII, hlm. 201–204

[48] Krom, HJG, 1931, hlm. 103. Pendapat diperkuat oleh J.G. de Casparis, Indonesian Palaeography, 1975, hlm. 23–24

[49] Di sini disajikan transkripsi Boechari:
kwacit parwwatasanujata
kwacic chilawaluka nirggateyam
kwacit prakirnna subhasitatoya sam-
prasutam — . . — waganga
Transkripsi ini agak berbeda dari transkripsi H. Kern

air yang suci, dan bahwa di dekatnya tentu ada as*rama* pendeta-pendeta yang mengelola sumber air tersebut.[50]

Prasasti yang kedua adalah prasasti Canggal, yang berasal dari halaman percandian di atas Gunung Wukir di Kecamatan Salam, Magelang. Prasasti ini berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta, dan berangka tahun 654 Saka (6 Oktober 732 M). Dalam bait pertama dikatakan bahwa raja Sañjaya telah mendirikan lingga di atas bukit pada tanggal 6 Oktober tahun 732 M. Lima bait berikutnya berisi puji-pujian kepada Siwa, Brahma, dan Wisnu, dengan catatan bahwa untuk Siwa sendiri tersedia tiga bait. Bait ke-7 memuji-muji Pulau Jawa yang subur dan banyak menghasilkan gandum (atau padi) dan kaya akan tambang emas. Di Pulau Jawa itu ada sebuah bangunan suci untuk pemujaan Siwa yang amat indah, untuk kesejahteraan dunia, yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang suci, antara lain Sungai Gangga. Bangunan suci itu terletak di wilayah Kuñjarakuñja. Dua bait berikutnya ditujukan kepada raja Sanna, yang memerintah dengan lemah lembut bagaikan seorang ayah yang mengasuh anaknya sejak kecil dengan penuh kasih sayang, dan dengan demikian ia menjadi termasyhur di mana-mana. Setelah ia dapat menaklukkan musuh-musuhnya, ia memerintah untuk waktu yang lama dengan menjunjung tinggi keadilan bagaikan Manu. Akan tetapi, setelah ia kembali ke surga untuk menikmati jasa-jasanya yang amat banyak, dunia ini terpecah dan kebingungan karena sedih kehilangan pelindungnya. Tiga bait terakhir ditujukan kepada pengganti Sanna, yaitu Raja Sañjaya, anak Sannaha, saudara perempuan Raja Sanna. Ia seorang raja yang gagah berani, yang telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya, bagaikan Raghu ia juga dihormati oleh para pujangga karena dipandang sebagai raja yang paham akan isi kitab-kitab suci. Ia bagaikan Meru yang menjulang tinggi, dan meletakkan kakinya jauh di atas kepala raja-raja yang lain. Selama ia memerintah dunia ini yang berikatpinggangkan samudra dan berdada gunung-gunung, rakyatnya dapat tidur di tepi jalan tanpa merasa takut akan penyamun dan bahaya yang lain. Dewi Kali hanya dapat menangis-nangis karena tidak dapat berbuat apa-apa.[51]

Dari prasasti itu diketahui bahwa pada tahun 732 M Raja Sañjaya yang jelas beragama Siwa telah mendirikan sebuah lingga di atas bukit. Mungkin bangunan lingga itu adalah candi yang hingga kini masih ada sisa-sisanya di atas Gunung Wukir, mengingat bahwa prasastinya memang berasal dari

---

50 Krom, HJG, 1931, hlm. 102–103

51 H. Kern, "De Sanskrit-inscriptie van Canggal (Kedu), uit 654 Çaka", VG, VII, hlm. 115–128. Lihat juga R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia, I, hlm. 50–60. B.Ch. Chhabra, Expansion of Indo-Aryan Culture during Pallava Rule as evidenced by inscriptions, hlm. 34–37

(a)

(b)

Foto 4.2 (a) Candi induk Gunung Wukir, Salam, Magelang; (b) Candi perwara, Gunung Wukir, Salam, Magelang
(*Sumber*: Esh)

halaman percandian itu.[52] Pendirian lingga mungkin sekali memperingati kenyataan bahwa ia telah dapat membangun kembali kerajaan dan bertakhta dengan aman tenteram setelah menaklukkan musuh-musuhnya. Seperti yang dapat disimpulkan dari kata-kata pada bait ke-9 yang menerangkan mangkatnya raja Sanna, Sanna itu gugur dalam peperangan karena diserang oleh musuh[53]. Mungkin sekali kembalinya Sañjaya di atas takhta kerajaan itu terjadi pada tahun 717 M, yaitu tahun permulaan tarikh Sañjaya, yang hanya digunakan oleh Daksa di dalam tiga prasastinya.[54]

Sanna, Sannaha, dan Sañjaya mungkin sekali keturunan-keturunan Dapunta Selendra, sehingga mereka pun masuk anggota wangsa Sailendra. Hal ini antara lain dapat disimpulkan dari daftar raja-raja yang disebutkan di dalam prasasti Mantyasih.[55] Di situ Sañjaya disebut sebagai raja yang pertama yang bertakhta di Medang. Ia kemudian disusul oleh Rakai panangkaran, yang jelas menamakan dirinya Permata wangsa Sailendra. Mungkin di antara Dapunta Selendra dan *Sima*, atau antara *Sima* dan Sanna, masih ada seorang raja lagi yang hingga kini belum ditemukan di dalam sumber sejarah.[56]

---

52 Prasasti Canggal ini ditemukan kembali di dua tempat. Bagian yang terbesar ditemukan di Desa Canggal di bawah bukit, tetapi ada potongan kecil dari bagian bawah prasasti yang ditemukan di halaman percandian candi Gunung Wukir. Karena itu disimpulkan bahwa tempat asal prasasti ini adalah di halaman percandian di atas bukit

53 R.Ng. Poerbatjaraka, "De Carita Parahyangan", TBG, LVI, 1914, hlm. 257–280; R.Ng. Poerbatjaraka, "Çrivijaya, de Çailendra–en de Sañjayawamça", BKI, 114, 1956, hlm. 254–264. Atja; *Tjarita Parahijangan, Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka XVI M*, 1968. Musuh ini mungkin sekali berasal dari Galuh seperti yang termuat dalam kitab Carita Parahyangan. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa Sanna kemudian melarikan diri ke Gunung Merapi, tetapi kemudian Sañjaya dapat kembali menduduki takhta kerajaan

54 Ketika L-C. Damais menulis mengenai tahun Sañjaya dalam "EEI, II, La date des inscriptions en ere de Sañjaya", BEFEO, tome XLV, fasc. 1, 1951, hlm. 42–63, baru dua prasasti yang ditemukan yang memakai tahun Sañjaya, yaitu prasasti Taji Gunung yang berangka tahun 194 Sañjaya (910 M) dan prasasti Timbanan Wungkal yang berangka tahun 196 Sañjaya (913 M). Sekarang ditambah lagi dengan prasasti Tihang yang berangka tahun 198 Sañjaya (914 M)

55 Mengenai prasasti Mantyasih dan daftar raja-raja yang termuat di dalamnya akan dibicarakan dalam uraian selanjutnya

56 Ini tidak lebih dari suatu dugaan, tetapi di*dasa*rkan kenyataan di dalam sejarah kuno bahwa raja yang keempat setelah pendiri wangsa akan mengalami musibah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa raja Kertanagara, yang merupakan raja keempat dari Rajasawangsa, dan Dharmmawangsa Teguh yang merupakan raja keempat dari *Isana*wangsa juga mengalami musibah. Dalam hal ini mungkin Sanna ialah raja yang keempat sesudah Dapunta Selendra

Foto 4.3 Arca Ganesa, Candi Banon, Magelang, koleksi Museum Nasional
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

Dapat dipahami mengapa raja Sañjaya disebut sebagai raja pertama yang bertakhta di Medang. Seperti telah dikatakan penda*rama*ya, yaitu raja Sanna, telah diserang oleh musuh, dan rupa-rupanya gugur dalam pertempuran. Mungkin sekali ibu kota kerajaan juga telah diserbu dan dijarah. Oleh karena itu, setelah Sañjaya dinobatkan menjadi raja, perlu dibangun ibu kota yang baru, dengan istana yang baru disertai dengan pembangunan candi untuk pemujaan lingga kerajaan.[57] Mungkin ini berhubungan dengan kepercayaan bahwa istana yang telah diserbu oleh musuh itu sudah kehilangan tuahnya. Hal itu dapat dilihat berkali-kali dalam sejarah Nusantara sampai ke zaman Surakarta.[58] Istana yang dibangun oleh Sañjaya itu terletak di Poh Pitu. Akan tetapi, di mana letak Poh Pitu itu hingga sekarang belum dapat ditentukan.

Yang menarik perhatian adalah keterangan bahwa di Pulau Jawa ada sebuah bangunan suci untuk pemujaan Siwa di daerah Kuñjarakuñja yang dikelilingi oleh sungai-sungai suci, yang terutama di antaranya adalah Sungai Gangga. Candi yang manakah yang dimaksud itu? Adakah candi itu sama dengan candi untuk lingga yang dibangun oleh Sañjaya di Gunung Wukir? Ataukah sebuah candi yang lain yang belum dapat diidentifikasikan? Yang terang bukanlah candi Prambanan, karena candi Prambanan itu baru diresmikan tahun 856 M, seperti yang dapat disimpulkan dari prasasti Siwagerha[59]. Tentunya yang harus dicari adalah candi Siwa yang dibangun oleh raja sebelum Sañjaya. Mungkinkah yang dimaksudkan dengan candi Siwa di dalam prasasti Canggal itu candi Banon dekat candi Mendut, yang hanya tinggal arca-arcanya saja yang besar dan bercorak "klasik"? Letak candi ini memang di suatu daerah di antara Sungai Progo dan Sungai Elo, jadi sesuai dengan pemerian di dalam prasasti, dengan menduga bahwa yang dimaksud dengan Sungai Gangga itu adalah Kali Progo, sebagai sungai yang terbesar di daerah ini. Mengingat besarnya arca-arcanya memang pantas untuk suatu candi kerajaan.[60]

Tentang nama Kuñjarakuñja Poerbatjaraka pernah mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksudkan adalah daerah Sleman sekarang, berdasarkan arti kata Kuñjarakuñja, yaitu hutan gajah, dan adanya daerah

---

[57] Bandingkan F.D.K. Bosch, "Het lingga-heiligdom van Dinojo, TBG, LXIV, 1924, hlm. 227–286. Lihat juga Hermann Kulke, The Devaraja Cult. Data Paper: no. 108, Southeast Asia Program, Dept. of Asian studies, Cornell University, 1978, terutama hlm. 26–29

[58] Boechari, "Some considerations on the problem of the shift of Mataram's center of government from Central to East Java in the tenth century A.D.", Bulletin of the Research Centre of Archaeology, no. 10, 1976

[59] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, 1956, hlm. 280–330

[60] N.J. Krom, Inleiding tot de Hindu-Javaansche Kunst, I, 1923, hlm. 327–328. Arca-arcanya kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta

Foto 4.4 Candi Sewu, Klaten, Jawa Tengah
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

wanua ing alas i saliman di dalam tiga prasasti pada batu *sima*.[61] Pendapat itu sekarang harus diragukan kebenarannya, karena nama daerah di dalam ketiga prasasti tersebut – sekarang ditambah dengan tiga batu lagi yang memuat nama daerah itu – harus dibaca *wanua* ing alas i salimar.[62] Lagi pula kata *kuñjarakuñja* dapat juga berarti hutan Ficus Religiosa atau hutan pohon bodhi dan sejenisnya, karena kata *kuñjara* tidak hanya berarti gajah, tetapi nama beberapa jenis pohon, antara lain pohon bodhi (Ficus religiosa).[63]

Bahwa Sañjaya dikatakan telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya memang dapat dipahami. Peristiwa yang serupa juga dapat dilihat nanti pada raja Dharmmawangsa Airlangga, yang juga harus menaklukkan kembali raja-raja bawahan yang sebelumnya mengakui kemaharajaan Dharmmawangsa Teguh. Tentu demikian pula halnya dengan raja Sañjaya. Setelah Sanna diserang oleh musuh dan pusat kerajaannya dihancurkan, tentu ada di antara raja-raja kecil yang semula mengakui kemaharajaannya yang lalu menganggap dirinya tidak terikat hubungan sebagai raja bawahan lagi dari *maharaja* Holing,[64] karena itu setelah Sañjaya berhasil menduduki takhta kerajaan kembali dengan membangun pusat kerajaan baru, ia harus menaklukkan raja-raja yang tidak mau lagi mengakui kemaharajaannya.[65]

Prasasti berikut ialah prasasti Hampran tahun 672 Saka (24 Juli 750 M).[66] Prasasti ini ditulis di atas batu alam yang besar di Desa Plumpungan dekat Salatiga. Bahasanya Sanskerta, dan hurufnya bukan lagi huruf Pallawa, tetapi huruf Jawa kuno. Jadi, inilah huruf Jawa kuno yang tertua di dalam prasasti yang berangka tahun. Isinya memperingati pemberian tanah di Desa Hampra

---

61 R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia, I, 1952, hlm. 57–58

62 L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne, II, BEFEO, tome XLVIII, 1957, hlm. 607–649; R.Ng. Poerbatjaraka, Riwajat Indonesia, I, 1952, hlm. 66

63 Monier Williams, "A Sanskrit-English Dictionary ... s.v. *kuñjara* ....

64 Memang sampai sekarang tidak diketahui apa nama kerajaan di Jawa Tengah ini sebelum masa pemerintahan Sañjaya. Nama Mataram mungkin baru dipakai sejak Sañjaya, ia bergelar Rakai Mataram, demikian pula nama Medang sebagai pusat kerajaan. Carita Parahyangan menyebut nama kerajaan Sanna dan Sañjaya itu Galuh. Memang dari prasasti Sojomerto dan beberapa prasasti lain yang hingga kini belum dapat dibaca, tetapi jelas menggunakan huruf Pallawa, yang ditemukan di daerah Pekalongan, mungkin sekali pusat kerajaan wangsa Sailendra itu mula-mula di daerah Pekalongan sekarang

65 Carita Parahyangan menyebutkan bahwa Sañjaya bahkan menaklukkan Malayu, Khmer, dan Cina. Mengingat bahwa sampai sekarang belum dapat dipastikan nilai sejarah dari kitab Carita Parahyangan itu, keterangan tersebut tidak dipermasalahkan di sini

66 J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I, 1950, hlm. 1–11

[n J yang terletak di wilayah Trigramwya,[67] oleh orang yang bernama Bhanu demi kebaktian terhadap Isa, dengan persetujuan dari sang Siddhadewi.[68]

Menurut de Casparis Bhanu itu seorang raja dari wangsa Sailendra, mengingat bahwa di dalam prasasti Ligor B ada nama raja Wisnu, dan di dalam prasasti Kelurak ada nama raja Indra.[69] Ia berpendapat bahwa Bhanu itu tentu penganut agama Buddha, karena Isa merupakan nama lain dari sang Buddha. Akan tetapi, pendapat itu kurang meyakinkan karena di dalam prasasti Hampran itu Bhanu tidak memakai gelar kerajaan. Bahwa Isa merupakan nama lain dari Buddha tidak dapat dibuktikan; istilah itu biasanya dipakai untuk menyebut Siwa.[70]

Ditinjau dari segi palaeografi mungkin prasasti Sangkhara harus diletakkan antara prasasti Canggal dan prasasti Hampran, atau segera sesudah prasasti Hampran. Seperti telah disinggung sebelumnya, prasasti ini berisi keterangan bahwa raja Sangkhara telah meninggalkan kebaktian yang lain-lain, juga terhadap Siwa, setelah ia merasa takut kepada gurunya yang tidak benar (*anrtagurubhayas*) yang rupa-rupanya dianggap telah membuat ayahnya sakit dan wafat. Di dalam bait sebelumnya dikatakan bahwa ayahnya itu telah berjanji untuk melaksanakan apa yang telah dikatakan oleh sang guru, karena ia memang mau taat kepadanya. Raja Sangkhara kemudian membangun sebuah prasada yang indah, karena ingat akan janjinya sendiri. Dalam bait terakhir ada pujian terhadap bhiksusanggha. Pujian inilah yang memberi bayangan bahwa raja Sangkhara itu lalu menjadi penganut agama Buddha. Lebih-lebih mengingat keterangan dari seorang kolektor di Solo yang

---

[67] Poerbatjaraka mengusulkan pembetulan pembacaan nama menjadi Trigosti (*trigramwyamahitam diganti dengan trigostyasahitam*), dan mengidentifikasikan tempat ini dengan Salatiga, berdasarkan tafsiran bahwa sinonim *trigosti* ialah trisala. Trisala ini dalam kaidah bahasa Indonesia menjadi Salatiga. Akan tetapi, menurut pengamatan Boechari atas cetakan kertas maupun pada batu aslinya pembacaan *trigramwyamahitam* itu tidak perlu diragukan

[68] J.G. de Casparis menafsirkan Siddhadewi itu dengan de volmaakte vorstin; dalam pikirannya terbayang seorang ratu, meskipun ia tidak berani berspekulasi lebih jauh mengenai tokoh itu. Mengingat kata anumatam yang berhubungan dengan Siddhadewi ini mungkin sekali yang dimaksudkan dengan kata itu bukanlah seorang ratu melainkan seorang dewa perempuan. Atau, barangkali seorang ratu yang telah meninggal? Mengingat bahwa ada juga istilah sang siddha dewata untuk menyebut seorang yang telah meninggal dan telah diperdewakan

[69] Mengenai nama Indra di dalam prasasti Kelurak itu kemudian de Casparis meralatnya. Berdasarkan pengamatan lebih lanjut, pembacaan *dharanindranamma* harus dibetulkan menjadi *dharanindarena* (de Casparis, "New evidence ...", hlm. 241–248). Jadi, di dalam prasasti Kelurak itu tidak ada nama Indra

[70] L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne. XI. Les publications épigraphiques du Service Archeologique de l'Indonésie", BEFEO, tome LIV, 1968, hlm. 295–521, terutama hlm. 308–315

Foto 4.5 Candi Plaosan, Klaten, Jawa tengah
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

mengatakan bahwa prasasti itu berasal dari suatu tempat yang masih ada sisa-sisa bangunannya yang berlandaskan agama Buddha, sekalipun mungkin bangunan itu tidak terlalu besar, dan terbuat dari bata.[71]

4. Rakai panangkaran **dan Pengganti-Penggantinya**

Dari uraian di atas dapatlah digambarkan bahwa Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya telah membangun kembali kerajaan setelah raja Sanna gugur dalam pertempuran karena serangan musuh, dan pusat kerajaannya dihancurkan. Pada tahun 717 M Sañjaya dinobatkan menjadi raja di Medang yang mungkin terletak di Poh Pitu. Pada tahun 732 M, ia mendirikan bangunan suci untuk pemujaan lingga di atas gunung Wukir, sebagai lambang telah ditaklukkannya lagi raja-raja kecil di sekitarnya yang dahulu mengakui kemaharajaan raja Sanna.

Akan tetapi, pada suatu ketika ia jatuh sakit dan meninggal dalam penderitaan yang amat sangat, selama delapan hari karena ingin mematuhi apa yang dikatakan oleh gurunya. Anaknya yang bernama Sangkhara, atau mungkin lengkapnya Rakai panangkaran Dyah Sangkhara Sri Sangg*rama*dhananjaya, karena takut akan Sang Guru yang tidak benar lalu meninggalkan agama Siwa, menjadi penganut agama Buddha Mahayana, dan memindahkan pusat kerajaannya ke timur, mungkin di sekitar Sragen di sebelah timur Bengawan Solo, atau ke daerah Purwodadi–Grobogan. Ia lalu membangun serangkaian candi-candi kerajaan, antara lain candi Sewu untuk pemujaan Mañjusri, sebagaimana dapat diketahui dari prasasti Kelurak tahun 704 Saka (26 September 782 M), candi Plaosan Lor yang melambangkan kesatuan kerajaan,[72] dan candi Borobudur untuk pemujaan pendiri rajakula Sailendra.[73] Ia juga membangun candi Kalasan pada tahun 700 Saka (778 M)

---

[71] Bahwa bangunan terbuat dari bata tidak perlu harus ditafsirkan sebagai bangunan yang tidak dibangun oleh raja. Candi Banon yang juga terbuat dari bata, tetapi arca-arcanya terbuat dari batu dalam ukuran yang besar, dan pahatannya memang indah, sehingga tidak mungkin kiranya candi Banon itu dibangun oleh raja bawahan

[72] Fragmen yang ada di Museum Nasional telah diterbitkan oleh J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, 1956, hlm. 175–206. Kemudian bagian sebelah kiri prasasti ini ditemukan di sawah di depan candi Plaosan, dan ternyata dahulu prasasti ini dibuatkan sebuah bangunan khusus, yang ditempatkan tepat di tengah-tengah di antara dua dwarapala di luar tembok keliling candi. Diharapkan angka tahun prasasti ini dapat terbaca pada fragmen yang ditemukan di depan candi Plaosan itu

[73] J. Dumarçay sampai kepada kesimpulan bahwa candi Borobudur mulai dibangun pada pertengahan kedua abad VIII M berdasarkan penelitian atas tahap-tahap pembangunan candi itu (J. Dumarçay, "Histoire architecturale du Borobudur", Memoires Archeologiques, no. XII, EFEO, 1977). Sebelumnya di dalam karangan singkat ia menunjukkan adanya 5 tahap pembangunan candi Borobudur, dan tahap terakhir dimulai pada permulaan abad X M ("Elements pour une histoire architecturale du Borobudur", BEFEO, tome LX, 1973, hlm.

(a)

(b)

Foto 4.6 (a) Candi Kalasan, Sleman, DIY; (b) Gapura Candi Ratu Boko, Sleman, DIY
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

dan mungkin sebuah bangunan lagi di bukit Ratu Baka, karena ada prasasti berbahasa Sanskerta di bukit ini tahun 700 Saka (778 M) dan mungkin juga sebuah biara di bukit Ratu Baka, karena ada prasasti di bukit Ratu Baka berbahasa Sanskerta dari tahun 714 Saka (792 M) yang memperingati pembangunan Abhayagiriwihara.[74] Masih ada sisa-sisa bangunan candi Buddha yang besar, seperti arca-arca Buddha dan Boddhisatwa di Bogem dan di Desa Boyolali. Arca-arca Bogem amat besar, pantas diletakkan dalam candi kerajaan.

Prasasti-prasasti yang disebutkan di atas, yaitu prasasti Kalasan tahun 778/779 M, prasasti Kelurak tahun 782 M, prasasti Abhayagiriwihara dari bukit Ratu Baka tahun 792 M, dan prasasti dari candi Plaosan Lor semuanya menggunakan huruf siddham dan berbahasa Sanskerta. Ini pun merupakan suatu hal yang baru. Sebagaimana diketahui huruf siddham itu banyak dipakai di India Utara dan di Sri Lanka. Kemungkinan besar bahwa Rakai panangkaran, setelah meninggalkan gurunya yang lama, lalu berpindah agama dan mengambil seorang guru baru yang menganut agama Buddha, dan berasal dari India Utara atau Sri Lanka. Di dalam prasasti Kelurak memang disebutkan adanya seorang guru dari Gaudidwipa yang telah memimpin upacara pentahbisan arca Mañjusri (di candi Sewu). Gaudi atau Gauda ada di daerah Benggala.[75] Di dalam prasasti Abhayagiriwihara disebutkan adanya hubungan dengan Sri Langka.[76] Penggunaan huruf siddham itu hingga kini diketahui hanya terbatas pada keempat prasasti itu, dan kemudian didapatkan pula pada meterai-meterai tanah liat yang berisi mantra-mantra agama Buddha (formula ye-te), baik di Jawa Timur (Banyuwangi), Bali (Pejeng, Tampaksiring, Buleleng), dan di Sumatra (Palembang).[77] Ada juga prasasti di Bali yang menggunakan huruf siddham, tetapi berbahasa Bali kuno, yaitu prasasti dari

105–115, ill., terutama hlm. 109). Dalam pembicaraan pribadi dengan Boechari, Dumarçay dapat menyetujui anggapan Boechari bahwa Borobudur mulai dibangun pada pertengahan kedua abad VIII M

74 Transkripsi fragmen yang telah ditemukan pada pertengahan abad yang lalu terdapat dalam karangan F.D.K. Bosch, "De inscriptie van Kelurak", TBG, LXIII 1928, hlm. 1–64. Prasasti ini dibicarakan oleh J.G. de Casparis dalam disertasinya (Prasasti Indonesia, I, 1950, hlm. 11–24). Pada tahun 1960 ditemukan lagi beberapa potong prasasti ini di pendopo teras di bukit Ratu Baka (Prasasti Indonesia, II, hlm. 341–343), dan de Casparis membicarakan beberapa bait yang memuat keterangan tentang hubungan antara Sri Lanka dan Indonesia ("New evidence ...", hlm. 241–248). Di sini disebutkan bahwa prasasti ini berangka tahun 714 Saka (792 M), dan menyebut Tejahpurnnapanna panamkarana, atau Rakai panangkaran

75 F.D.K. Bosch, TBG, LVIII, 1928, hlm. 30

76 J.G. de Casparis, "New evidence ...", AA, XXIV, 1961, hlm. 241–248

77 Mengenai isi mantra-mantra yang tertera pada meterai-meterai di Bali itu lihat W.F. Stutterheim, Oudheden van Bali, I dan II, 1930. Lihat juga Putu Budiastra dan Wayan Widia, Stupika tanah liat koleksi Museum Bali, 1977/1978

Sanur dari tahun 835 Saka (914 M). Anehnya bagian prasasti ini yang berbahasa Sanskerta menggunakan huruf Kawi atau Jawa kuno.[78] Di Jawa Timur huruf siddham muncul dalam abad XIII M pada bagian belakang arca Amoghapasa dari perunggu yang merupakan replika dari arca Amoghapasa dari Padang Roco dekat Sungai Langsat, dan pada sandaran arca-arca dari candi Jago dan candi Singasari.[79]

Di dalam prasasti Kelurak itu Sang Permata wangsa Sailendra juga disebut Sri Warawiramardana, yang berarti pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Gelar ini juga dijumpai di dalam prasasti Ligor B yang terdapat di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu dipahatkan pada bagian belakang prasasti raja Sriwijaya yang tidak disebut namanya, yang biasanya disebut prasasti Ligor A, dan berangka tahun 775 M. Prasasti Ligor B, sekalipun mulai dengan kata swasti, yang di dalam prasasti-prasasti Jawa kuno biasanya mengawali angka tahun, ternyata tidak bertarikh. Prasasti ini ternyata juga hanya berisi 4 baris tulisan yang merupakan bait prasasti berbahasa Sanskerta, dan setengah baris yang merupakan permulaan bait kedua. Di sini disebut nama raja Wisnu, pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa, dan karena ia keturunan wangsa Sailendra, ia bergelar Sri Maharaja.[80] Mungkin bait kedua dan selanjutnya akan menyebut anak cucunya sampai raja yang menulis prasasti ini.[81] Juga di dalam prasasti Nalanda dari raja Dewapaladewa, yang berasal dari kira-kira pertengahan abad IX M, dijumpai nama ini. Di dalam prasasti ini ia disebut sebagai kakek raja Balaputradewa, dengan sebutan Raja Jawa, permata wangsa Sailendra, Sri Wirawairimathana. Ia mempunyai anak bernama Samaragrawira yang kawin dengan Tara, anak raja Dharmasetu dari Somawangsa. Dari perkawinan ini lahirlah raja Balaputradewa, raja Sriwijaya, penganut agama Buddha, yang telah mendirikan biara di Nalanda, dan minta kepada raja Dewapaladewa untuk memberikan tanah-tanahnya sebagai *sima* bagi biara tersebut.[82]

---

[78] L-C. Damais, "La Colonnette de Sanur, Etudes Balinais I", BEFEO, tome XLIV, 1951, hlm. 121–128

[79] J.G. de Casparis, Indonesian Palaeography, 1975, hlm. 35–37, 60–62

[80] G. Coedès, "Le Royaume de Çriwijaya", BEFEO, tome XVIII, 1918, hlm. 17–31; F.D.K. Bosch, "De inscriptie van Ligor", TBG, LXXXI, 1941, hlm. 26–33; B.Ch. Chhabra, Expansion, hlm. 22–24. Transkripsi dan terjemahan prasasti ini dimuat juga di dalam K.A. Nilakanta Sastri, History of Sriwijaya, hlm. 125; G. Coedès,"Le Sailendra, tueur des heros ennemis", Bingkisan Budi, 1950, hlm. 58–70

[81] Boechari pernah mengemukakan dugaan bahwa prasasti Ligor B itu ditulis oleh Balaputradewa, raja Sriwijaya keturunan Sailendra, yang memerintah Sriwijaya pada pertengahan abad IX M ("Report in research on Sriwijaya", Country Report SPAFA Workshop on Sriwijaya), March 1979, note 6, hlm. 6, Appendix 3a

[82] Hirananda Shastri, Epigraphia Indica, 17, No. 17, 1924, hlm. 310–327; J. Gonda, Twenty five Sanskrit inscriptions, 1948, F.D.K. Bosch, "Een oorkonde van het grote klooster te Nalanda, TBG, LXV, 1925, hlm. 509–588
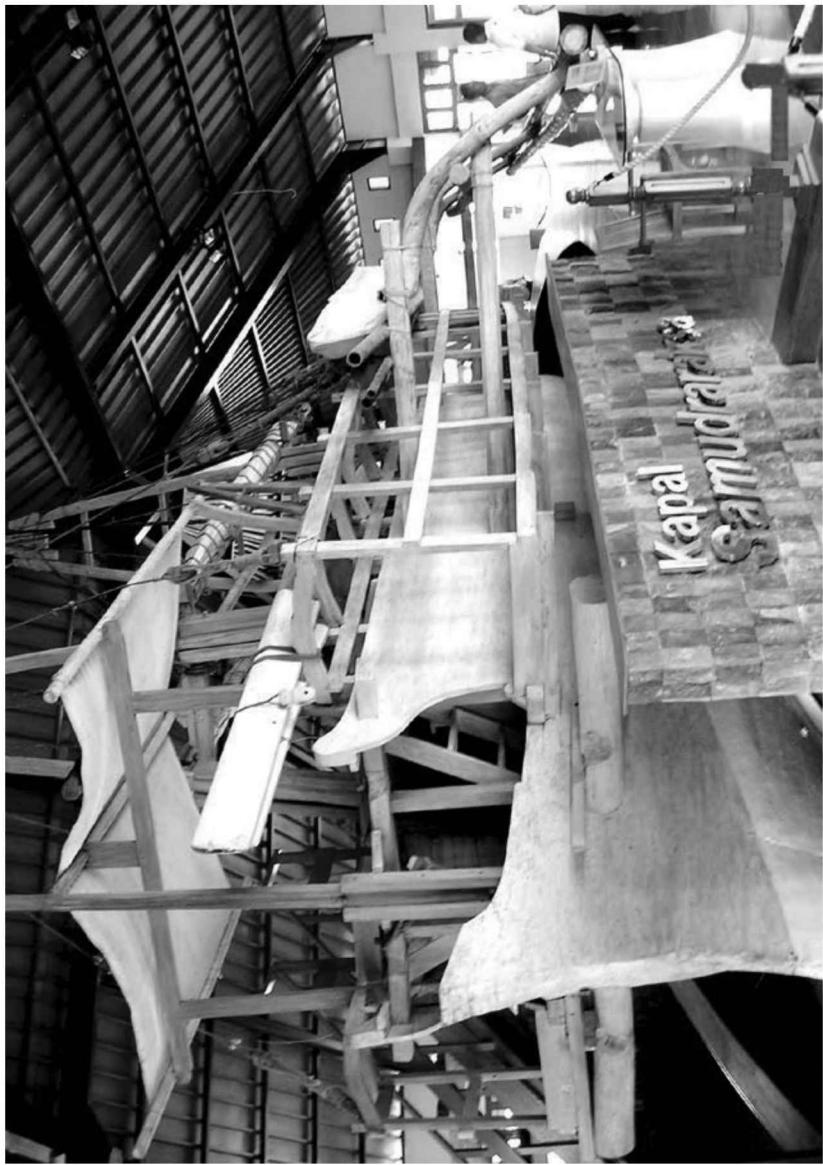
Foto 4.7 Kapal Samudradaksa, dibuat tahun 2003 oleh Philip Arnold Beale dan As'ad Abdullah, berdasarkan relief Borobudur, pada tahun yang sama berlayar sampai ke Accra, Ghana, Afrika. Sekarang dijadikan museum di Borobudur (*Sumber*: Srs)

Tentulah di sini dihadapkan dengan satu tokoh yang sama yang disebut Permata wangsa Sailendra. Pembunuh musuh-musuh yang sombong, atau pembunuh musuh-musuh yang gagah perwira. Berdasarkan prasasti Kelurak tokoh ini dapat diidentifikasikan dengan Rakai panangkaran yang disebut di dalam prasasti Kalasan dan Ratu Baka dengan sebutan Tejahpurnnapanna panamkarana.[83] Menurut prasasti Nalanda, Rakai panangkaran beranak Samaragrawira, yang dapat kiranya disamakan dengan Samaratungga di dalam prasasti Kayumwungan yang berangka tahun 746 Saka (26 Mei 824 M).[84]

Prasasti Kayumwungan itu ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuno. Bagian yang berbahasa Sanskerta berisi keterangan tentang raja Samaratungga, permata wangsa Sailendra, dan anaknya perempuan yang bernama Pramodawarddhani. Putri ini telah mendirikan sebuah bangunan suci agama Buddha dengan nama Srimad Wenuwana dan mentahbiskan arca Sri Ghananatha di dalamnya, pada hari Kamis Legi, *paringkelan* Tunglai, tanggal 26 Mei tahun 824 M. Bagian yang berbahasa Jawa kuno menyebutkan Rakarayan Patapan pu Palar suami istri, yang pada hari bulan yang sama memberikan tanah sawah di Waluang, di Babadan, yang masuk wilayah /... /[85] di Kisir yang masuk wilayah Kayumwungan, di Santwi Karung yang masuk wilayah Petir, di Kaliru/nga/n dan Kuling yang masuk wilayah Tri Haji, seluruh sawah yang memerlukan benih sebanyak 16.5 amet padi, sebagai *sima* bagi bangunan suci tersebut. Penetapan *sima* itu di*saksi*kan oleh pejabat dari desa-desa sekelilingnya. Mengingat nama desa-desa itu dapat diperkirakan bahwa tanah sawah yang dijadikan *sima* itu terdapat di daerah Parakan-Temanggung.

Menurut J.G. de Casparis prasasti ini memperingati pembangunan candi Borobudur, Pawon, dan Mendut oleh Samaratungga dan Pramodawarddhani.[86] Akan tetapi, pendapat ini kurang meyakinkan, dan memang berdasarkan suatu salah pengertian. Menurut de Casparis Wenuwana ialah tempat Sang Buddha pertama kali membeberkan ajarannya, dan ia melihat

---

83 Di dalam karangannya tersebut Bosch (1925) sudah sampai kepada kesimpulan ini, sekalipun masih agak ragu-ragu. Akan tetapi, kemudian pendapatnya itu diubahnya ("Çriwijaya, de Çailendra-en Sañjayawamça". Lihat silsilah yang tertera pada hlm. 123). Dengan ini diharapkan bahwa nama Dyah Pañcapanna *pana*mkarana, yang masih sering dijumpai di dalam buku-buku pelajaran sejarah Indonesia, tidak dipakai lagi

84 J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I, hlm. 24–50

85 De Casparis membaca kalimat ini *mawaih sawah sima arikiwa luang ing babadan imah ri* ... k. Diusulkan pembetulan: *mawaih sawah sima arik i waluang ing babadan imah ri* .... Nama tempat yang terakhir itu tidak terbaca. Lihat P.J. Zoetmulder, "Boekbespreking: Himansu Bhusan Sarkar, Corpus of the Inscriptions of Java", 2 vols, 1972, BKI, 132, 1976, hlm. 188–192

86 J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I
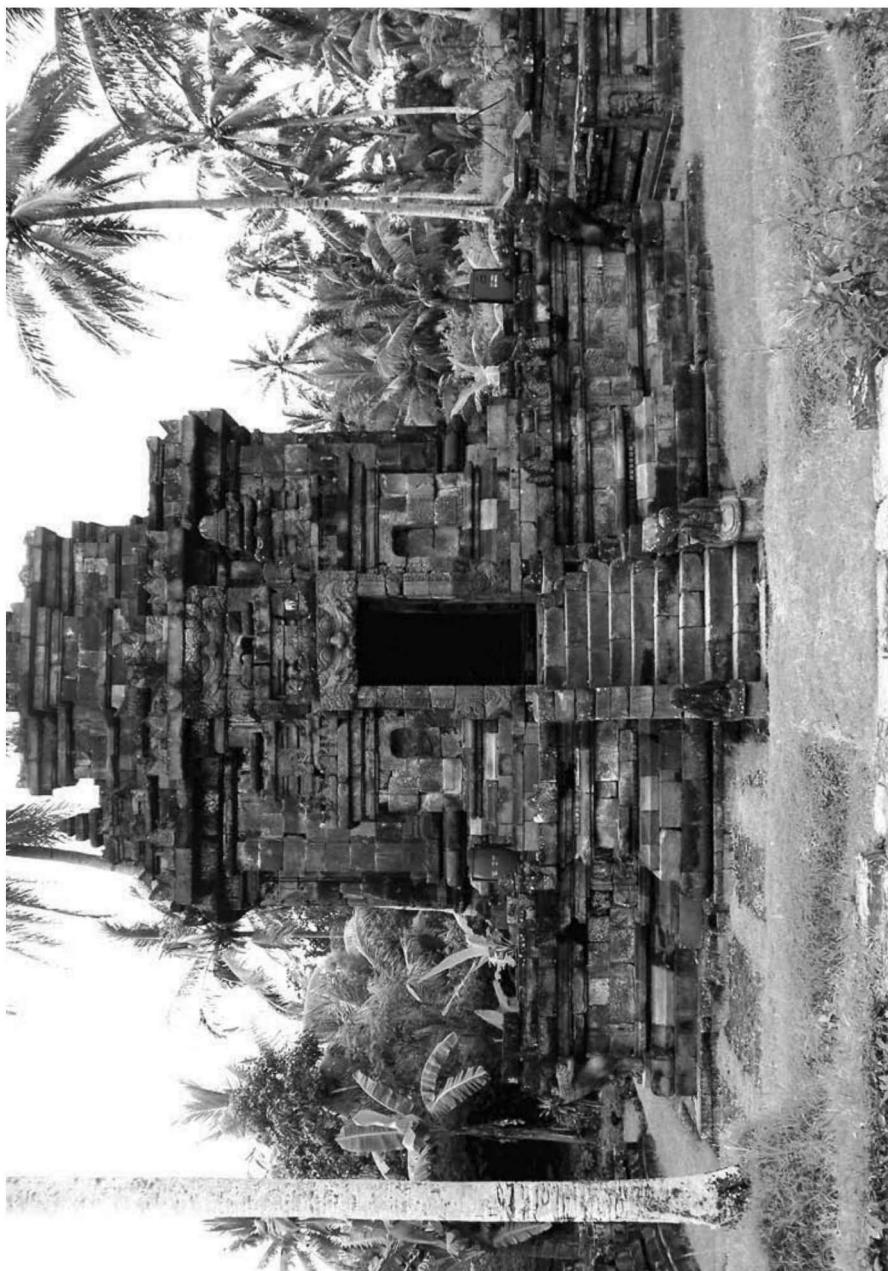
Foto 4.8 Candi Ngawen, Muntilan, Jawa Tengah
(*Sumber:* Esh)

adegan ajaran pertama itu dipahatkan di bawah arca induk candi Mendut berupa dharmmacakra yang diapit oleh dua ekor kijang. Dari lukisan ini saja semestinya ia ingat bahwa tempat Sang Buddha pertama kali membeberkan ajarannya itu ialah Mrgadawa atau Taman Kijang, dan bukan Wenuwana. Poerbatjaraka, dalam kesempatan menyanggah disertasi de Casparis itu, mengemukakan pendapat bahwa Wenuwana itu harus diidentifikasikan dengan candi Ngawen, berdasarkan alasan bahwa kata ngawen itu berasal dari kata ka-awi-an, yang berarti tempat bambu, atau tempat yang banyak bambunya, yang lebih sesuai dengan pengertian Wenuwana.[87] Memang candi ini cukup jauh letaknya dari Parakan – Temanggung, tetapi pada prinsipnya tidak perlu keberatan, karena tanah *sima* dapat saja jauh letaknya dari candinya; *sima* yang demikian itu biasa disebut *angsa*. Akan tetapi, kalau prasasti Kayumwungan itu dibaca dengan saksama, Srimad Wenuwana itu harus dicari di daerah Parakan – Temanggung juga, karena di situ dikatakan bahwa candi itu dibangun di desa ini (*iha grame*). Sayang hingga sekarang tidak ditemukan sisa-sisa bangunan agama Buddha yang pantas diidentifikasikan dengan candi dalam prasasti itu di daerah ini.

Yang menarik perhatian ialah bahwa prasasti ini terdiri atas dua bagian dan ditulis dalam dua bahasa. Bagaimana hubungan antara Samaratungga dengan Rakarayan Patapan pu Palar? Mungkinkah Rakarayan Patapan pu Palar itu seorang anggota wangsa Sailendra yang tetap menganut agama Siwa, dan berfungsi sebagai kepala daerah dengan memperoleh daerah Patapan sebagai lungguhnya? Pada waktu kerabatnya yang berkuasa sebagai *maharaja* membangun candi Buddha di daerahnya, ia menyumbangkan tanah-tanah untuk dijadikan *sima* bagi bangunan suci itu. Inilah kiranya jawaban yang paling dapat diterima atas pertanyaan tersebut.

Rakai Patapan sendiri ada juga membangun bangunan suci di wilayah kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat dari prasasti Sang Hyang Wintang (Gondosuli I), yang berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditulis di atas batu alam yang besar, terdapat di Desa Gondosuli, di dekat sisa-sisa bangunan candi beragama Siwa. Sayang sekali tidak ada angka tahunnya. Di dalam prasasti itu diperingati pembangunan candi yang disebut dengan istilah sang hyang haji di sebelah utara prasada yang bernama Sang Hyang Wintang. Memang sekitar dua kilometer dari Desa Gondosuli itu ada sisa-sisa bangunan lagi dari batu yang berlandaskan agama Siwa.

---

[87] Lihat juga L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne, II", BEFEO, tome XLVIII, 1957, hlm. 607–649

Pentahbisan bangunan suci itu dipimpin oleh seorang *sthapaka* yang putus dalam ilmunya, bernama Dang Karayan Siwarjita. Untuk bangunan itu disediakan pula tanah-tanah *sima*-nya, yaitu di Tanah Bunga, di Pragaluh, di Pamandyan, di Tiru Ayun, di Wunut, di Pawijahhan, di Kayu Ara Mandir, di Wangun Waharu, di Mundu, di Kakalyan, dan di Tarukan, seluruhnya memerlukan benih sebanyak 41 lattir(?).[88]

Yang menarik perhatian di sini adalah bahwa prasasti ini mulai dengan menyebut ibu dari Rakarayan Partapan dan istrinya, saudara-saudaranya, dan yang te*rama*t menarik adalah nama paman Dang Karayan Partapan, yaitu Wisnurata. Mungkinkah Wisnu ini sama dengan Wisnu dalam prasasti Ligor B, permata wangsa Sailendra yang juga disebut pembunuh musuh-musuh yang sombong tiada bersisa, alias Rakai panangkaran? Kalau tambahan rata ditafsirkan sebagai kata Sanskerta, mungkin sekali ia kependekan dari kata uparata yang dapat berarti telah meninggal. Dengan perkataan lain, pada waktu Rakai Patapan pu Palar mengeluarkan prasasti Gondosuli itu pamannya, Wisnu atau Rakai panangkaran, sudah meninggal. Kalau dugaan ini benar, sudah jelas siapa Rakai Patapan itu; ia seorang anggota wangsa Sailendra, kemenakan Rakai panangkaran – dalam hal ini mungkin ibunya adalah adik Rakai panangkaran – yang masih setia kepada agama Siwa. Jadi, ia saudara sepupu Samaratungga.[89]

Ada lagi seorang Rakai Patapan dengan nama Pu Manuku, yaitu di dalam prasasti Munduan tahun 728 Saka (21 Januari 807 M) dan di dalam prasasti Tulang Air tahun 772 Saka (15 Juni 850 M). Di dalam prasasti Munduan itu Rakai Patapan pu Manuku membatasi tanah-tanah di Munduan dan Haji Huma, untuk dianugerahkan kepada hambanya yang bernama Sang Patoran, dengan diberi kewajiban untuk menggembalakan kambing. Orang yang ditugaskan menggembalakan kambing bernama sang Madmak. Ia lalu membuat perumahan di tempat ketinggian di tanah-tanah tersebut. Oleh karena itu, perumahan itu dinamakan di Walawindu. Selanjutnya daerah itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak jual beli, dan semua denda-denda atas semua pelanggaran hukum di daerah itu tidak perlu dibayarkan kepada Rakai Patapan. Ketentuan itu berlaku bagi Sang Patoran dan mereka

[88] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, I, hlm. 50–73

[89] Di belakang nama Wisnurata itu terdapat keterangan *sarabhara di nayaka watak wunut*, yang oleh de Casparis diterjemahkan dengan *hij is belast met de functie van nayaka over het ressort Bunut*. Terjemahan ini tidak mengikuti kaidah; untuk memperoleh terjemahan semacam itu diharapkan kalimat Melayu kunonya berbunyi sarabhara/ . . /*nayaka* di watak wunut. Kata sarabhara dapat berarti penuh kekuatan, tetapi juga "minta bantuan". Karena ada bagian kalimat yang berbunyi di *nayaka watak wunut*, rasanya lebih tepat kalimat itu diterjemahkan dengan: (Pada suatu ketika ia) minta bantuan kepada *nayaka* di wilayah Wunut. Pada peristiwa apa Wisnurata itu minta bantuan kepada *nayaka* di wilayah Wunut itu tidak ada sumber yang menerangkan

yang tinggal di Walawindu (sebagai gembala kambing). Penetapan *sima* itu di*saksi*kan oleh semua patih di wilayah Patapan, yaitu dari Kayumwungan dan Mantyasih, dan pejabat-pejabat dari Air Warungan, Petir, Pandakyan, dan pejabat Desa Munduan dan Haji Huma.[90]

Prasasti Tulang Air yang didapatkan kembali sebanyak dua prasasti di atas batu yang cukup besar, berasal dari dekat candi Perot, di daerah Temanggung. Kedua batu berisi naskah yang sama; sayang sekali yang satu keadaannya cukup parah karena aus. Prasasti kedua cukup baik, hanya ada bagian-bagian yang aus di tengah bawah.[91] Isinya keterangan tentang penetapan *sima* di Desa Tulang Air oleh Rakai Patapan pu Manuku pada hari Minggu Pahing, *paringkelan* Tunglai, hari-bulan 15 Juni 850 M. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Rakai Pikatan. Disusul kemudian dengan daftar para pejabat tinggi kerajaan, para pembantu mereka yang hadir pada penetapan *sima*, para pejabat daerah dan pejabat desa yang bertindak sebagai *saksi*. Struktur prasasti semacam itu dijumpai pada prasasti Wanua Tengah tahun 785 Saka (10 Juni 863 M), yang menetapkan *sima* ialah Rakai Pikatan pu Manuku, sedang yang menjadi raja ialah Rakarayan Kayuwangi pu Lokapala. Mengingat persamaan struktur itu, dan kenyataan bahwa di dalam daftar raja-raja Mataram yang terdapat di dalam prasasti Mantyasih, Rakai Kayuwangi disebut setelah Rakai Pikatan, dan Rakai Pikatan sesudah Rakai Garung, de Casparis mengidentifikasikan Rakai Patapan pu Palar dengan Rakai Garung.[92]

Identifikasi itu memang sulit dibuktikan secara meyakinkan, kecuali kalau pada suatu ketika dijumpai nama Rakai Garung pu Palar sezaman dengan Rakai Patapan pu Palar. Bahwa nama Rakai Patapan itu berubah lebih mudah menerangkannya. De Casparis mengemukakan pendapat bahwa nama Pu Manuku itu dipakai oleh orang-orang yang telah mengundurkan

---

90 Moh. Oemar, "Prasasti Munduan", Makalah pada Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970

91 OJO, V dan VI; J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, hlm. 211–243

92 Prasasti Indonesia, I, 1950, hlm. 124–126. Memang ini merupakan kesimpulan yang logis. Akan tetapi, harus dicari contoh-contoh perubahan gelar *rakai* yang dapat cukup meyakinkan. Selama ini perubahan gelar *rakai* itu terbatas pada para pejabat tinggi kerajaan dan para pangeran, misalnya *rakai wka* naik menjadi *rakai* halu atau sekali dijumpai dalam zaman Dharmmawangsa Airlangga seorang Rakai Pangkaja naik menjadi Rakai Halu, tetapi itu memang anugerah raja kepada adiknya, yang memang ada hak untuk menyandang gelar halu. Selama ini perubahan gelar *rakai* yang menyangkut pergantian daerah lungguh sebagai penguasa daerah biasa (bukan pejabat tinggi kerajaan di pusat) belum pernah dijumpai. Dalam hal ini alasan de Casparis adalah bahwa di salah satu prasasti pernah disebutkan wihara i garung, dan mungkin karena amat terkenalnya biara di Garung itu, daerah Garung juga disebut Patapan (= pertapaan) (Prasasti Indonesia, I, hlm. 125). Sampai sekarang ada kota kecamatan yang bernama Garung di lereng barat Gunung Sindoro, di sebelah utara Wonosobo. Dari nama-nama tempat di pelbagai prasasti diperoleh kesan bahwa Patapan harus dicari di sebelah timur Gunung Sindoro dan Sumbing

diri dari pemerintahan, seperti Rakai Patapan dan Rakai Pikatan. Masih dapat ditambah lagi dengan Rakryan Kalangbungkal dyah Manuku di dalam prasasti Kasugihan tahun 829 Saka (8 November 907 M), yang mungkin dapat diidentifikasikan dengan Rakai Watuhumalang yang sudah mengundurkan diri dari pemerintahan.[93] Akan tetapi, dengan munculnya Rakai Patapan pu Manuku di dalam prasasti Munduan tahun 807 M, keterangan itu menjadi kurang meyakinkan.[94]

Rakarayan i Garung sendiri pernah juga mengeluarkan prasasti, yaitu prasasti Garung tahun 741 Saka (21 Maret 819 M). Di dalam prasasti ini ia tidak memakai gelar *sri maharaja*. Akan tetapi, di situ dikatakan bahwa perintahnya diturunkan kepada Sang Pamgat Amrati pu Mananggungi, agar daerah Mamrati dibebaskan dari beberapa jenis pungutan.[95] Jadi, kalaupun dia bukan seorang raja, sekurang-kurangnya ia seorang penguasa daerah yang otonom. Dengan dimuatnya nama Rakai Garung dalam deretan nama raja-raja yang pernah memerintah di Mataram, dapatlah disimpulkan bahwa ia adalah anggota wangsa Sailendra yang tetap menganut agama Siwa, dan menjabat penguasa daerah dengan kekuasaan swantantra, pada waktu Samaratungga berkuasa.

Tinggal sekarang masalah Rakai Panunggalan dan Rakai Warak. Mengenai dua tokoh ini tidak ada sumber lain yang dapat memberi keterangan, kecuali dari prasasti Mantyasih dan Wanua Tengah III yang berangka tahun 830 Saka (908 M).[96] Prasasti Wanua Tengah yang juga dikeluarkan oleh Rakai Watukura dyah Balitung seperti halnya prasasti Mantyasih memuat daftar nama-nama raja Mataram Kuno. Nama-nama raja yang disebutkan dalam kedua prasasti tidak sama. Jika dalam prasasti Mantyasih, daftar tersebut hanya menyebutkan urutan nama-nama raja yang memerintah di Medang (*rahyang*

---

[93] Boechari pernah menyokong pendapat itu dengan mengatakan bahwa mungkin kata manuku, yang di dalam kamus Jawa kuno di artikan menyerang dapat juga dianggap mengandung arti yang sama dengan kata manungku (puja) atau *manekung* dalam bahasa Jawa sekarang, yang berarti mengheningkan cipta, bersemedi, dan lain-lain (Boechari, "Prof. Dr. R.M.Ng. Poerbatjaraka. Ahli epigrafi perintis hangsa Indonesia", MISI, djilid II, no. 2, 1964, hlm. 124, catatan no. 4)

[94] Meskipun demikian, untuk sementara identifikasi Rakai Patapan pu Palar dengan Rakai Patapan pu Manuku dapat diterima. Bagian nama itu, yaitu garbhajanmanama, dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan dari orang yang memakainya. Dapat saja Rakai Patapan pada tahun 807 M memakai nama Pu Palar karena sedang/baru menyerang musuh, sedang pada tingkat terakhir hidupnya ia memakai nama Pu Manuku dalam pengertian bersemedi, yaitu setelah ia mengundurkan diri dari segala kegiatan keduniawian

[95] R.Ng. Poerbatjaraka, "Transcripties van koperen platen," OV, 1920, hlm. 136; R. Goris, "De Oude-Javaansche inscripties uit het Sri-Wedari museum te Soerakarta", OV, 1928, hlm. 65

[96] Prasasti ini belum diterbitkan, akan tetapi pernah dibaca oleh Kusen dan Boechari pada tahun 1983 ketika prasasti ini ditemukan

ta rumuhun ri mdang ri poh pitu) dan gelar mereka saja, dalam prasasti Wanua Tengah III selain nama-nama mereka juga memuat kapan raja-raja tersebut naik takhta. Selain itu, nama-nama raja yang disebut lebih banyak jumlahnya dari yang disebut dalam prasasti Mantyasih, juga ada nama raja yang berbeda seperti Rakai Panunggalan yang disebut dalam prasasti Mantyasih setelah Rakai panangkaran dan sebelum Rakai Warak, dalam prasasti Wanua Tengah III nama itu tidak ada dan sebagai gantinya ada tokoh yang disebut Rake panaraban (784–803 M). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rakai Panunggalan sama dengan Rake panaraban. Sri Maharaja Watuhumalang dalam prasasti Mantyasih disebut sebagai Rake Wungkalhumalang dyah Jbang dalam prasasti Wanua Tengah III. Mengingat kata watu sinonim dengan wungkal, dipastikan bahwa Rake Wungkalhumalang dyah Jbang adalah Watuhumalang (894–898 M). Sementara itu, Sri Maharaja Rakai Warak dalam prasasti Mantyasih, dalam prasasti Wanua Tengah III disebut Rake Warak Dyah Manara. Setelah meninggal ia dipusarakan di Kelasa (*san lumah i kelasa*).

Ada empat raja yang tidak disebutkan dalam prasasti Mantyasih, yaitu Dyah Gula (5 Agustus 827–24 Januari 828 M), Dyah Tagwas (5 Februari–27 September 885 M), Rake Panumwangan Dyah Dewendra (27 September 885–27 Januari 887), dan Rakai Gurunwangi Dyah Bhadra yang hanya menjadi raja selama 28 hari sebelum melarikan diri dari keratonnya. Menurut Kusen, perbedaan daftar nama-nama raja dalam prasasti Mantyasih dan Wanua Tengah III disebabkan oleh perbedaan latar belakang dikeluarkannya prasasti. Prasasti Mantyasih diterbitkan dalam rangka melegitimasikan dirinya sebagai pewaris takhta yang sah, sehingga yang disebutkan hanya raja-raja yang berdaulat penuh atas seluruh wilayah kerajaan. Dyah Gula, Dyah Tagwas, Dyah Dewendra, dan Dyah Badhra tidak dimasukkan dalam daftar karena mereka tidak pernah berdaulat penuh di wilayah kerajaan Mataram Kuno. Hal ini terlihat dari singkatnya masa pemerintahan mereka karena digulingkan dari takhta. Prasasti Wanua Tengah III dikeluarkan sehubungan dengan perubahan-perubahan status sawah sebagai *sima* di Wanua Tengah, sehingga semua penguasa yang mempunyai sangkut paut dengan perubahan status sawah disebutkan. Nama Sañjaya sebagai cikal bakal kerajaan Mataram Kuno pun tidak disebutkan karena status sawah di Wanua Tengah III sebagai *sima* baru dimulai pada masa pemerintahan Rake panangkaran.[97]

---

[97] Lihat Kusen, "Raja-raja Mataram Kuno dari Sanjaya sampai Balitung, sebuah rekonstruksi berdasarkan Prasasti Wanua Tengah III", Berkala Arkeologi, Tahun XIV, Edisi Khusus, 1994, hlm. 92

Kembali kepada prasasti Mantyasih, mungkin gelar *sri maharaja* yang diberikan kepada Rakai Panunggalan dan Rakai Warak itu agak berlebihan; sebab dalam kenyataannya yang mengeluarkan prasasti dengan gelar *maharaja* adalah anggota wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Dapatlah diperkirakan bahwa sejak Rakai panangkaran berpindah agama ke agama Buddha Mahayana dengan mendatangkan guru dari India atau Srilangka, ia berkuasa sebagai *maharaja* dengan mendirikan bangunan-bangunan suci kerajaan, seperti candi Plaosan, Sewu, dan Borobudur. Sementara itu, anggota wangsa Sailendra yang lain yang tetap menganut agama Siwa berkuasa sebagai kepala-kepala daerah atau raja-raja kecil dengan daerah kekuasaan masing-masing secara otonom. Seperti dalam prasasti Sang Hyang Wintang, Rakai Patapan pu Palar menyebut daerah kekuasaannya dengan *yang rajya diraksa iya sabañakna yang desa itas tatah purwwa daksina pascima uttara itas tatah*, tetapi dari nama-nama desa di dalam prasasti itu dan di dalam prasasti Kayumwungan, wilayah kekuasaan Rakai Patapan itu memang terbatas. Demikian pula halnya dengan Rakai Panunggalan dan Rakai Warak.[98] Jadi, dalam sejarah kerajaan Mataram tidak pernah ada dua wangsa, yang satu asli Indonesia dan beragama Siwa, yang selama ini disebut Sañjayawangsa, yang lain berasal dari luar Indonesia dan beragama Buddha, yang selama ini disebut Sailendrawangsa, melainkan hanya satu wangsa, yaitu wangsa Sailendra, yang anggota-anggotanya ada yang beragama Siwa dan ada yang beragama Buddha Mahayana. Dapunta Selendra, pendiri wangsa ini, sampai kepada raja Sañjaya menganut agama Siwa, lalu Rakai panangkaran berpindah ke agama Buddha Mahayana karena takut akan guru ayahnya yang dianggapnya tidak benar (*anrta*). Di sinilah lalu timbul dua cabang dari wangsa ini. Sebagian masih

[98] Suwadji Syafei pernah mengemukakan pendapat bahwa mungkin sekali Jayawarman II dari Kamboja dapat diidentifikasikan dengan Rakai Panunggalan (Suwadji Syafei, "What historical relations were there between Cambodia and Indonesia from the eight to the ninth century?", Majalah Arkeologi, Th. I. no. 1, 1977, hlm. 31–41). Pendapat ini kurang meyakinkan karena Rakai Panunggalan di dalam prasasti Mantyasih disebut di antara *rahyang ta rumuhun ri mdang ri poh pitu* = yang diperdewakan dahulu di Medang di Poh Pitu; dengan perkataan lain Rakai Panunggalan itu berkuasa dan meninggal serta kemudian diperdewakan (dibuatkan candi pemujaan arwahnya) di Medang. Kalaupun benar bahwa Yawa yang di dalam prasasti Sdok Kak Thom dan beberapa sumber yang lain itu adalah Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah atau kerajaan Mataram, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang lain. Mungkin saja seorang *rakai* yang lain di luar yang disebut di dalam daftar raja-raja dalam prasasti Mantyasih yang berpetualang ke Kamboja dan berhasil menjadi raja di sana. Kalau keterangan dalam Carita Parahyangan mengenai serangan Sañjaya ke Khmer itu dianggap mengandung kebenaran, mungkin ada seorang pangeran Khmer yang ikut pasukan Sañjaya kembali ke Jawa, mendapat pendidikan di sini, lalu pada suatu ketika ia kembali ke Kamboja. Ingat misalnya kasus Adityawarman, yang setelah mengabdi di Majapahit lalu kembali ke Malayu menjadi *Maharaja* di negeri leluhurnya sendiri itu

tetap menganut agama Siwa, seperti Rakai Panunggalan, Rakai Warak, dan Rakai Garung, dan mungkin dalam deretan anggota wangsa Sailendra yang tetap menganut agama Siwa ini dapat dimasukkan Bhanu dan Rakai Patapan.

Rakai panangkaran yang berpindah agama ke Buddha Mahayana memerintah sebagai Maharaja cukup lama, sekurang-kurangnya sejak kira-kira tahun 750 sampai sekitar tahun 792 M. Ia digantikan oleh Samaratungga, yang mempunyai anak sekurang-kurangnya dua orang. Yang tertua, yang menjadi putri mahkota, adalah Pramodawarddhani. Yang kedua, mungkin dari permaisuri yang lain, yaitu Tara, yang kemungkinan berasal dari Sriwijaya, ialah Balaputradewa. Mungkin Rakai Patapan pu Palar, sekalipun ia membantu memberikan tanah-tanah sebagai *sima* bagi pembangunan candi oleh Samaratungga dan anaknya, berambisi untuk menjadi *maharaja*. Dalam hal ini rupa-rupanya lalu diadakan perkawinan antarkeluarga, yaitu Pramodawarddhani, putri mahkota, dikawinkan dengan Rakai Pikatan, anak Rakai Patapan pu Palar, yang tetap menganut agama Siwa.

Setelah Samaratungga meninggal atau mengundurkan diri dari pemerintahan, Rakai Pikatan menggantikannya sebagai *maharaja* di Medang. Karena ia menganut agama Siwa, ia memerintahkan membangun candi kerajaan yang lain yang berlandaskan agama Siwa, yaitu percandian Loro Jonggrang di Prambanan. Ini diketahui dari prasasti Siwagerha tahun 778 Saka (12 November 856 M).[99] Kemudian untuk menunjukkan bahwa ia tidak ingin sama sekali mengabaikan candi kerajaan yang dibangun oleh Rakai panangkaran, yaitu candi Plaosan Lor, dan mungkin juga untuk menjaga perasaan permaisurinya, yaitu Pramodawarddhani yang beragama Buddha, ia menambahkan sekurang-kurangnya dua candi perwara berupa bangunan *stupa* pada percandian itu. Ini dapat dilihat dari tulisan pada dua bangunan *stupa* di kanan kiri jalan masuk ke candi induk sebelah utara, yang bertulisan *astupa sri maharaja rakai pikatan, dan anumoda rakai gurunwangi dyah saladu.*[100] Bahwa bangunan atau tulisan di atas bangunan *stupa* itu merupakan tambahan pada waktu kemudian dari waktu pembangunan percandian itu dapat dilihat dari perbedaan tulisannya dengan tulisan pada candi perwara yang lain. Kenyataan ini tidak dibicarakan oleh J.G. de Casparis.

Sebelum membicarakan prasasti Siwagerha lebih mendalam, lebih baik menyebutkan sumber-sumber prasasti yang lain dari masa sebelumnya. Pertama-tama adalah prasasti berbahasa Melayu kuno dari Gondosuli

---

[99] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, hlm. 280–330

[100] J.G. de Casparis, "Short inscriptions from Candi Plaosan Lor", Berita Dinas Purbakala, no. 4, 1950

yang berangka tahun 749 Saka (17 Mei 827 M). Prasasti ini memperingati persembahan dari Dang Puhawang Glis, seorang nakhoda kapal, bersama istri dan anaknya (?), berupa sebuah alat penanak nasi (*pangliwetan*), sebuah lampu (padamaran), empat tempat api pemujaan (?) (pamapi hyangngan) dan sebuah genta upacara (curing),[101] sebagai *tanda* bakti dan *tanda* bahwa Dang Puhawang Glis tidak lupa kepada *sima*-nya. Persembahan itu di*saksi*kan oleh beberapa orang pendeta [di suatu bangunan suci yang diberi persembahan oleh Dang Puhawang Glis itu].[102]

Di sini yang perlu dipermasalahkan adalah adanya seorang nakhoda kapal (*dang puhawang*) yang berbahasa Melayu kuno, yang memberi persembahan kepada suatu bangunan suci, dan rupa-rupanya juga pernah mempersembahkan *sima* untuk bangunan suci itu, yang ada di Desa Gondosuli sekarang. Seperti telah disebutkan, di Desa Gondosuli itu ada sisa bangunan dan batu prasasti berbahasa Melayu kuno dari Dang Karayan Partapan Ratnamaheswara Sida Busu Plar atau Rakai Patapan pu Palar. Kalau Rakai Patapan itu memakai bahasa Melayu kuno, mungkin berasal dari Sumatra. Mungkinkah Dang Puhawang Glis itu juga seorang nakhoda kapal dari Sumatra, yang memperlihatkan kebaktiannya terhadap suatu bangunan suci yang dibangun oleh orang-orang sesukunya yang kini memegang tampuk pimpinan kerajaan Medang? Mungkinkah juga di sekitar Gondosuli itu dahulu ada sekelompok masyarakat keturunan pendatang-pendatang dari Sumatra yang berbahasa Melayu kuno? Dalam hal ini mengingatkan kita pada prasasti Mañjusrigrha di candi Sewu tahun 792 M yang juga berbahasa Melayu kuno.

Sebuah prasasti tinulad berangkat tahun 762 Saka (18 Juli 840 M) yang ditulis kembali di zaman Majapahit ternyata agak kacau isinya. Prasasti ini menyebut nama raja Sri Lokapala Hariwangsottunggadewa. Nama ini oleh L-C Damais diidentifikasikan dengan Rakai Kayuwangi, karena di dalam prasasti Wanua Tengah II tahun 863 M ia bergelar Rakai Kayuwangi pu Lokapala.[103] Akan tetapi, dari sumber lain yaitu prasasti Siwagerha diketahui bahwa Rakai Kayuwangi baru dinobatkan sebagai raja pada tahun 856 M. Lagi pula di dalam prasasti ini disebut sebagai Rakryan Mahamantri i hino

---

[101] Tafsiran genta upacara untuk curing diberikan oleh Jaap Kunst. Ia juga menunjuk kepada kemungkinan bahwa curing itu sama dengan apa yang disebut celuring dalam bahasa Jawa, yaitu alat gamelan. Di Bali sampai sekarang ada kata curing untuk menyebut alat gamelan berupa gambang gangsa, dalam bahasa Jawa semacam saron. Akan tetapi, Kunst mengatakan bahwa curing dalam bahasa kuno berbeda dengan curing di Bali sekarang (Jaap Kunst, Hindu-Javanese Musical Instruments. Translation Series no. 12, KITLV, 1968, s.v. curing)

[102] OJO, III, L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 134

[103] L-C. Damais, "Epigrafische aanteekeningen, I, Lokapala-Kayuwangi", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 1–26

Daksottama, dan sebagai Rakryan Mahamantri i halu Pratipaksaksaya.[104] Seperti diketahui bahwa Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya ialah nama *rakryan mahamantri i hino* pada zaman pemerintahan Rakai Watukura dyah Balitung. Dengan kekacauan itu sangat diragukan kebenaran isi prasasti ini, yang memperingati penetapan sebagai *sima* tanah di Waharu-Kuti oleh raja disebabkan oleh hamba bulenya sang raja yang bernama Si Kale. Disebut juga dua orang anak raja, yaitu Cañcu Makuta dan Cañcu Manggala. Cañcu Makuta menempati *kuti* yang sebelah barat, sedang Cañcu Manggala menempati *kuti* yang sebelah timur.

Daerah *sima* untuk *kuti* itu kemudian dibebaskan dari pelbagai macam pungutan, Cañcu Makuta dan Cañcu Manggala mendapatkan hak-hak istimewa. Selain itu, ada lagi tanah *sima* untuk abdi raja di Campaga, di sebelah timur Waharu. Perintah raja untuk menetapkan daerah Waharu dan Campaga itu dibaca oleh Samgat Tirwan, dan didengarkan/di*saksi*kan oleh pejabat desa-desa di sekelilingnya.

Yang lebih penting adalah prasasti Tri Tpusan tahun 764 Saka (11 November 842 M).[105] Prasasti ini memuat keterangan tentang penetapan Desa Tri i Tpusan menjadi *sima* bagi *kamulan* di Bhumisambhara, terdiri atas sawah para *nayaka* yang memerlukan benih 8 hamat, sawah kepunyaan winkas yang memerlukan benih sebanyak 8 hamat dan sawah kepunyaan kedua orang *wadwa* huma yang memerlukan benih sebanyak 8 hamat oleh Sri Ka*rama*an yang diperintahkan untuk memberi batas-batas *sima* itu ialah Sang Darukap suami istri, dan beberapa pejabat dari Kayumwungan, Mantyasih, dan Patapan. Upacara penetapan *sima* itu dihadiri oleh pejabat dari desa-desa di sekelilingnya, yang memberi petunjuk bahwa daerah *sima* itu terletak antara Parakan dan Temanggung. Kemudian oleh Sri Ka*rama*an ditunjuk untuk menjadi *mula* pada waktu penetapan *sima* itu ialah anak dari Sang Darukap yang bernama Si (. . .) nanta dan Pu Pangkara, keduanya penduduk Desa Rukap.

J.G. de Casparis berpendapat bahwa Sri Ka*rama*an berarti Yang Mulia Sri Ratu dan diidentifikasikannya dengan Pramodawarddhani. *Kamulan* di Bhumisambhara itu diidentifikasikannya dengan candi Borobudur, yang dianggapnya sebagai candi untuk pemujaan cikal bakal wangsa Sailendra, berdasarkan istilah *kamulan* yang ditafsirkan sebagai "tempat *mula*" atau "tempat akar" wangsa Sailendra. Banyak keberatan telah diajukan terhadap identifikasi ini, terutama terhadap caranya ia sampai kepada identifikasi Bhumisambhara dengan Borobudur.[106]

---

104 A.B. Cohen Stuart, KO, II

105 Prasasti Indonesia, I, 1950, hlm. 73–95

106 Lihat antara lain, L-C. Damais, "Bibliographie Indonésienne, V", BEFEO, tome LI, 1963, hlm. 535–582
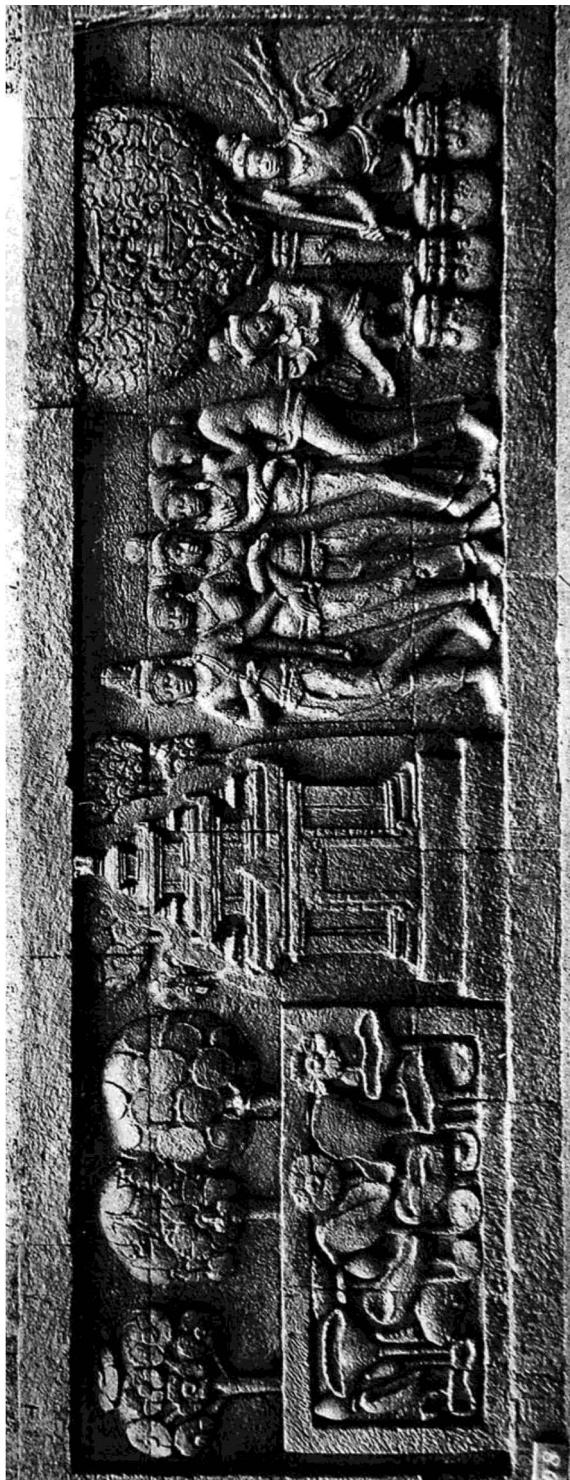
Foto 4.9 Relief Candi Borobudur, kaki tertutup, no. 0147 menggambarkan adegan di surga (*Sumber*: Puslitbang, Arkenas)

Di sini dapat ditambahkan lagi keberatan terhadap identifikasi itu, yaitu kenyataan bahwa pada akhir prasasti dikatakan Sri Ka*rama*an menetapkan dua orang anak Sang Darukap menjadi *mula*. Jabatan *mula* memang dijumpai dalam pelbagai prasasti.[107]

Di dalam prasasti Mantyasih, Desa Mantyasih disebut *sima* kapatihan karena yang mendapat anugerah adalah lima orang patih di Mantyasih; di dalam prasasti Sangguran disebut *sima* kajurugusalyan di Mañanjung, karena ada jabatan juru gusali, yaitu ketua para pandai besi; di dalam prasasti Balingawan disebut *sima* kamulan, karena semula Desa Balingawan itu selalu diganggu oleh penjahat sehingga penduduk sering harus membayar denda atas pembunuhan gelap dan perkelahian gelap yang mengakibatkan seseorang menderita luka-luka. Di dalam prasasti Telang ada istilah kamulan dan rumah kamulan yang jelas tidak ada hubungannya dengan tempat pemujaan cikal bakal Desa Telang, karena yang menjadi pokok pembicaraan dalam prasasti itu ialah tempat penyeberangan. Berdasarkan itu semua dapatlah disimpulkan di sini bahwa Desa Bhumisambhara itu ialah *sima* kamulan, karena dianugerahkan kepada pejabat mula. Sayang sekali hingga sekarang belum jelas apa tugas seorang *mula* dalam masyarakat Jawa kuno.

Lain daripada itu, untuk sampai kepada lokasi Bhumisambhara di Borobudur, de Casparis harus membuat peta keletakan desa-desa yang disebut di dalam prasasti Mantyasih sedemikian rupa hingga Tpusan ada di sebelah selatan Kedu. Untuk itu, ia mulai menghitung dari sebelah barat daya, padahal tidak pernah ada suatu sistem kepercayaan di Jawa ini yang mulai menghitung dari arah itu. Biasanya orang menghitung dari sebelah timur, dan kalau ini dilakukannya, ia akan menemukan Tpusan di sebelah timur laut Kedu, seperti keadaannya sekarang ini. Sampai sekarang ada Desa Tepusan di sebelah timur laut Kedu.[108]

Yang perlu dipermasalahkan lagi di sini ialah tafsiran Sri Ka*rama*an sebagai Yang Mulia Seri Ratu. Salah satu alasan yang dikemukakan de Casparis ialah bahwa di dalam kitab Udyogaparwa bahasa Jawa kuno, Yudhistira menyebut ibunya, Kunti, dengan sebutan Sri Ka*rama*an.[109] Di dalam prasasti Sukun dari tahun 1083 Saka (1161 M) terdapat keterangan yang menyebutkan *wadwa sri karamaan* di antara para *wadwa haji, wadwa rakryan sri parameswari, wadwa rakryan binihaji, wadwa rakryan mahamantri i hino*, dan lain-lain. Jelas bahwa Sri Ka*rama*an bukan permaisuri atau selir raja. Kalau alasan de Casparis di atas dipegang secara konsekuen, dengan memerhatikan keterangan di dalam prasasti baru ini, harus disimpulkan bahwa Sri Ka*rama*an ialah Ibu Suri.

---

107 L-C. Damais, "*Rêpertoire Onomastique*", s.v. *mula, kamulan*, hlm. 528–529, 876–878

108 Lihat peta topografis sheet no. 47/XL–C Temanggung, 1938

109 Prasasti Indonesia, I, hlm. 85–86

Nama Sri Ka*rama*an dijumpai pula pada empat candi perwara percandian Plaosan Lor, yaitu pada candi-candi perwara no. I/18, I/19, II/21 dan II/22, jadi empat buah candi perwara yang mengelompok di sudut barat laut. Berdekatan dengan candi perwara yang bertulisan *anumoda sri karamaan* itu terdapat tiga candi perwara yang bertulisan dharmma *sri maharaja*, yaitu candi perwara I/17, I/21, dan III/24.[110] Kelihatan bahwa ada hubungan yang erat antara Sri Maharaja dan Sri Ka*rama*an. Siapakah Sri Maharaja yang dimaksudkan di sini? Apakah ia Rakai Pikatan seperti yang telah dikatakan oleh de Casparis, berdasarkan kenyataan bahwa memang Sri Maharaja Rakai Pikatan tertera pada dua candi perwara? Akan tetapi, seperti yang telah dikatakan di atas, Candi Plaosan Lor itu mungkin sekali mulai dibangun oleh Rakai panangkaran, dan bahwa Rakai Pikatan membuat beberapa perubahan pada percandian itu, dan karena itu tulisan *asthupa sri maharaja rakai pikatan* dan *anumoda rakai gurunwangi dyah saladu* itu berlainan bentuk hurufnya.[111] Akan tetapi, bentuk tulisan pada candi perwara yang lain, terutama jika memerhatikan bentuk wi*rama*, menunjuk pada masa antara pertengahan abad VIII M (prasasti Kañjuruhan dan prasasti Sangkhara) dan pertengahan abad IX M (prasasti-prasasti Rakai Kayuwangi), jadi kira-kira sezaman dengan Rakai Patapan, Samaratungga, dan Rakai Pikatan. Kalau demikian halnya mungkinkah yang dimaksudkan dengan Sri Maharaja dalam pertulisan pada beberapa candi perwara itu adalah Samaratungga, yang telah melanjutkan pembangunan yang telah dimulai oleh ayahnya? Kalau demikian halnya, Sri Ka*rama*an ialah ibu Samaratungga, permaisuri Rakai panangkaran. Bahwa ibu Rakai panangkaran masih hidup sampai tahun 842 M, memang agak kurang masuk akal, seperti yang terlihat dari prasasti Tri Tpusan.

Mengingat itu semua rasa-rasanya memang Sri Maharaja di dalam pertulisan pada candi-candi perwara itu ialah Rakai Pikatan, dan Sri Ka*rama*an adalah ibunya. Mungkinkah ibunya itu saudara Samaratungga, putri Rakai panangkaran, yang menganut agama Buddha? Kalau demikian halnya, di sini terdapat perkawinan keluarga yang cukup berbelit-belit. Dari segi kronologi hal itu dapat diterima. Yang masih merupakan *tanda* tanya ialah nama-nama pejabat yang tertera pada candi-candi perwara yang lain. Sekalipun mungkin apa yang diketahui sampai sekarang belum lengkap, apa yang ada ternyata berbeda dari pejabat-pejabat masa Rakai Pikatan (prasasti Tulang Air tahun 850 M) dan Rakai Kayuwangi (856–883 M). Mungkinkah nama-nama itu tidak

---

[110] J.G. de Casparis, "Short inscription ..." hlm. 8–12 dan p1. I

[111] Bandingkan P1. IX dengan p1. II–VIII pada karangan de Casparis tersebut

diganti oleh Rakai Pikatan, dan tetap merupakan nama-nama pejabat dari masa pemerintahan Samaratungga, dan bahkan juga dari masa Rakai panangkaran? Sayang sekali pada waktu ini dugaan itu belum dapat dilacak kebenarannya karena tidak ada prasasti Rakai panangkaran dan Samaratungga yang memberi keterangan tentang struktur birokrasi pada zaman pemerintahan masing-masing. Yang menarik perhatian adalah bahwa prasasti yang memperingati pembangunan candi ini, yang ditulis dengan huruf siddham dan berbahasa Sanskerta, dan ditempatkan dalam bangunan khusus di depan percandian, didapatkan kembali dalam keadaan hancur, padahal prasasti itu tebalnya lebih dari 30 cm. Apakah prasasti itu dahulu sengaja dihancurkan? Ataukah dihancurkannya itu pada abad-abad kemudian saja, yang dilakukan oleh pemilik tanah di masa prasasti itu berdiri?

Masih ada satu masalah yang mesti dipecahkan, yaitu mengapa tulisan pada *stupa* perwara di kanan kiri jalan masuk ke candi induk utara itu bentuk tulisannya berlainan, dan juga tidak seindah huruf pada bangunan yang lain. Tulisan pada *stupa* perwara II/14 dan III/15 itu letaknya juga agak istimewa, yaitu pada *harmika*, dan tidak pada pelipit atas kaki candi seperti pada candi-candi perwara yang lain. Permukaan *harmika* itu pun tidak/belum dipahat secara halus, yang membayangkan bahwa tulisan di situ masih bersifat sementara. Jika dugaan ini benar, perbedaan bentuk huruf itu disebabkan orang yang memahatkannya di situ bukanlah penatah prasasti yang sebenarnya, tetapi hanya tukang biasa. Bagaimanapun juga, di sini masih diperlukan petunjuk-petunjuk yang lain untuk dapat memberi keterangan yang lebih baik tentang perbedaan tulisan itu.

Baiklah sekarang kembali kepada prasasti Siwagerha tahun 856 M. Prasasti ini dituliskan dalam bahasa Jawa kuno dengan bentuk kawya, suatu unicum hingga saat ini. Menurut de Casparis di belakangnya ada bekas-bekas prasasti yang ditulis dengan huruf siddham, tetapi sudah tidak dapat dibaca sama sekali, dan yang agak berbeda bentuknya dengan bentuk siddham dari prasasti Kalasan, Kelurak, Plaosan, dan Ratu Baka (Abhayagiriwihara). Sayang sekali bahwa bagian atas prasasti ini sudah usang, sehingga ada kira-kira 6 baris yang hampir tidak terbaca sama sekali.[112] Yang merupakan unicum lagi adalah bahwa ada bagian prasasti ini yang ditulis dalam bahasa sandi, yang hingga kini belum dapat ditafsirkan.

Prasasti ini mulai dengan menyebut raja muda yang telah menang, dan karena itu dikehendaki oleh seluruh kerajaan untuk memerintah di tanah Jawa. Ia penganut agama Siwa, dan memiliki sifat-sifat yang layak untuk menjadi raja.

[112] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, hlm. 280–330

Oleh karena itu, ia dinobatkan di istana Medang yang terletak di Mamratipura. Setelah itu, raja Jatiningrat meninggal,[113] dan kerajaan diserahkan kepadanya, yang bernama Dyah Lokapala. Seluruh rakyat, dari keempat as*rama* dan para ulama yang terkemuka, merasa aman dan tenteram. Menyusul kemudian tiga bait puji-pujian kepada Dyah Lokapala, yang rupa-rupanya anak bungsu raja yang memerintah sebelumnya. Ada terselip keterangan tentang sesuatu yang telah berlangsung tepat satu tahun lamanya, disusul dengan disebutkannya tempat pengungsian yang terdiri atas beratus-ratus batu.

Bait-bait berikutnya menggambarkan sebuah bangunan suci agama Siwa (Siwagerha) secara terperinci, yang bangunan serta arca induknya ditahbiskan pada hari Kamis Wage, *paringkelan* Warukung, hari bulan 12 November 856 M. Setelah itu, sungai dipindahkan, karena ia menyentuh lapangan percandian.[114] Prasasti ditutup dengan keterangan mengenai penetapan sima-nya yang di*saksi*kan oleh para pejabat. Ditambah lagi dengan sima yang sebenarnya sudah sampai pada batas waktunya, dikembalikan statusnya menjadi sima lagi, dengan kewajiban mempersembahkan pemujaan kepada arca dalam bangunan suci itu.[115] Uraian dalam bahasa sandi itu terdapat di antara bait-bait yang menguraikan percandian ini.

De Casparis menginterprestasikan prasasti ini sebagai sumber sejarah yang memperingati babak terakhir perjuangan antara wangsa Sañjaya dengan wangsa Sailendra. Menurut pendapatnya, Rakai Patapan Pu Palar ialah

---

113 Yang diterjemahkan dengan meninggal di sini adalah kata uparata, yang oleh de Casparis diterjemahkan dengan mengundurkan diri dari pemerintahan. Memang kedua-duanya mungkin betul. Dalam hal ini de Casparis mengatakan bahwa nama Jatiningrat dipakai oleh raja yang mendahului Dyah Lokapala setelah ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi pendeta, karena Dharmawangsa Airlangga juga memakai gelar itu setelah tidak memerintah lagi. Akan tetapi, ada juga kemungkinan yang lain, yaitu bahwa kata *asilih tananan*, yang menggambarkan perpindahan kekuasaan kepada Dyah Lokapala, mengandung arti kiasan untuk suatu perebutan kekuasaan dengan kekerasan senjata. Dalam pengertian ini Sang Prabu Jatiningrat itu telah diserang oleh Dyah Lokapala, dan gugur dalam pertempuran

114 De Casparis menerjemahkan kalimat *luah ya inalihaken apan yanitik palmahan* dengan sungai dipindahkanlah supaya masuk ke dalam lapangan percandian, dengan argumentasi bahwa diperlukan air suci bagi para pengunjung dan pemuja dalam percandian itu, yang ada di dalam lapangan percandian. Akan tetapi, kata apan tidak mungkin berarti supaya, tetapi selalu berarti karena

115 Kalimatnya berbunyi *hana ta ya sima puput waluy ya sima ... ya ta winaluyaken kinon mamuja pratidina tan malupa ri kang gawai nya.* Pada umumnya sima ditetapkan sampai ke akhir zaman (tka ri dlaha ning dlaha). Akan tetapi, ada contoh, yaitu di dalam prasasti Mantyasih, bahwa sima bagi kelima patih di Mantyasih itu ditetapkan bagi mereka untuk dinikmati oleh mereka, masing-masing selama tiga tahun. Dengan perkataan lain, daerah Mantyasih dan daerah Kuning itu ditetapkan sebagai sima hanya untuk jangka waktu lima belas tahun

anggota Sañjayawangsa. Dialah yang mulai memberontak melawan penjajahan wangsa Sailendra dengan mengeluarkan prasasti Sang Hyang Wintang yang berbahasa Melayu kuno. Karena ngeri menghadapinya, Samaratungga, raja wangsa Sailendra, menyerahkan anak perempuannya, Pramodawarddhani, untuk dikawinkan dengan anak Rakai Patapan, yaitu Rakai Pikatan. Dialah yang kemudian menggantikan duduk di atas takhta kerajaan di Jawa ini. Melihat keadaan ini, adik Pramodawarddhani, yaitu Balaputra, yang ibunya putri dari Sriwijaya, mengadakan perlawanan, menyerang Rakai Pikatan. Akan tetapi, ia dapat dikalahkan, dan sesudah ia gagal mempertahankan kedudukannya di atas bukit Ratu Baka, yang di dalam prasasti Siwagerha itu digambarkan sebagai tempat pengungsian berupa beratus-ratus batu, maka ia kembali ke Sumatra dan menjadi raja di Sriwijaya. Kemudian ia mengadakan hubungan dengan raja Dewapaladewa dari Benggala, dan di dalam prasasti Nalanda ia menyebut asal usulnya dengan mengakui cucu dari raja Jawa, keturunan wangsa Sailendra, yang disebutnya pembunuh musuh-musuh yang gagah berani.

Setelah Rakai Pikatan berhasil mengalahkan Balaputradewa, ia mentahbiskan candi induk percandian Loro Jonggrang, lalu mengundurkan dari pemerintahan, menjadi pertapa. Pemerintahan diserahkannya kepada anaknya, Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi.

Pada *dasa*rnya rekonstruksi itu memang masuk akal. Akan tetapi, dengan bertitik dari anggapan bahwa hanya ada satu saja wangsa raja-raja di Jawa Tengah, yaitu wangsa Sailendra, cerita sejarah tersebut harus diubah sedikit. Telah dikatakan bahwa Rakai Patapan adalah anggota wangsa Sailendra yang tetap menganut agama Siwa. Ia berambisi pula untuk menjadi *maharaja*; maka diadakan perkawinan antara anak Rakai Patapan, yaitu Rakai Pikatan dengan Pramodawarddhani, anak Samaratungga. Anak tertua Rakai Pikatan ternyata seorang putri, yaitu Rakai Gurunwangi Dyah Saladu. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan itu rupa-rupanya ada serangan dari musuh, yang sayang sekali tidak diketahui identifikasinya. Serangan itu dapat dihalau oleh anak Rakai Pikatan yang bungsu (*walaputra*), yaitu Dyah Lokapala atau Rakai Kayuwangi. Atas keberhasilannya menghalau musuh itu, rakyat menghendaki supaya ia yang dijadikan calon pengganti raja, dan bukan Rakai Gurunwangi, maka dinobatkanlah Dyah Lokapala di Medang di Mamratipura. Rakai Pikatan mengundurkan diri dari pemerintahan, menjadi pertapa dengan gelar Sang Prabhu Jatiningrat. Peristiwa ini disusul dengan pentahbisan arca induk dalam percandian Loro Jonggrang di Prambanan.

Boechari pernah mengemukakan dugaan bahwa yang menyerang Rakai Pikatan itu ialah Rakai Walaing pu Kumbhayoni, yang mungkin sekali masih anggota wangsa Sailendra pula, dari cabang yang menganut agama
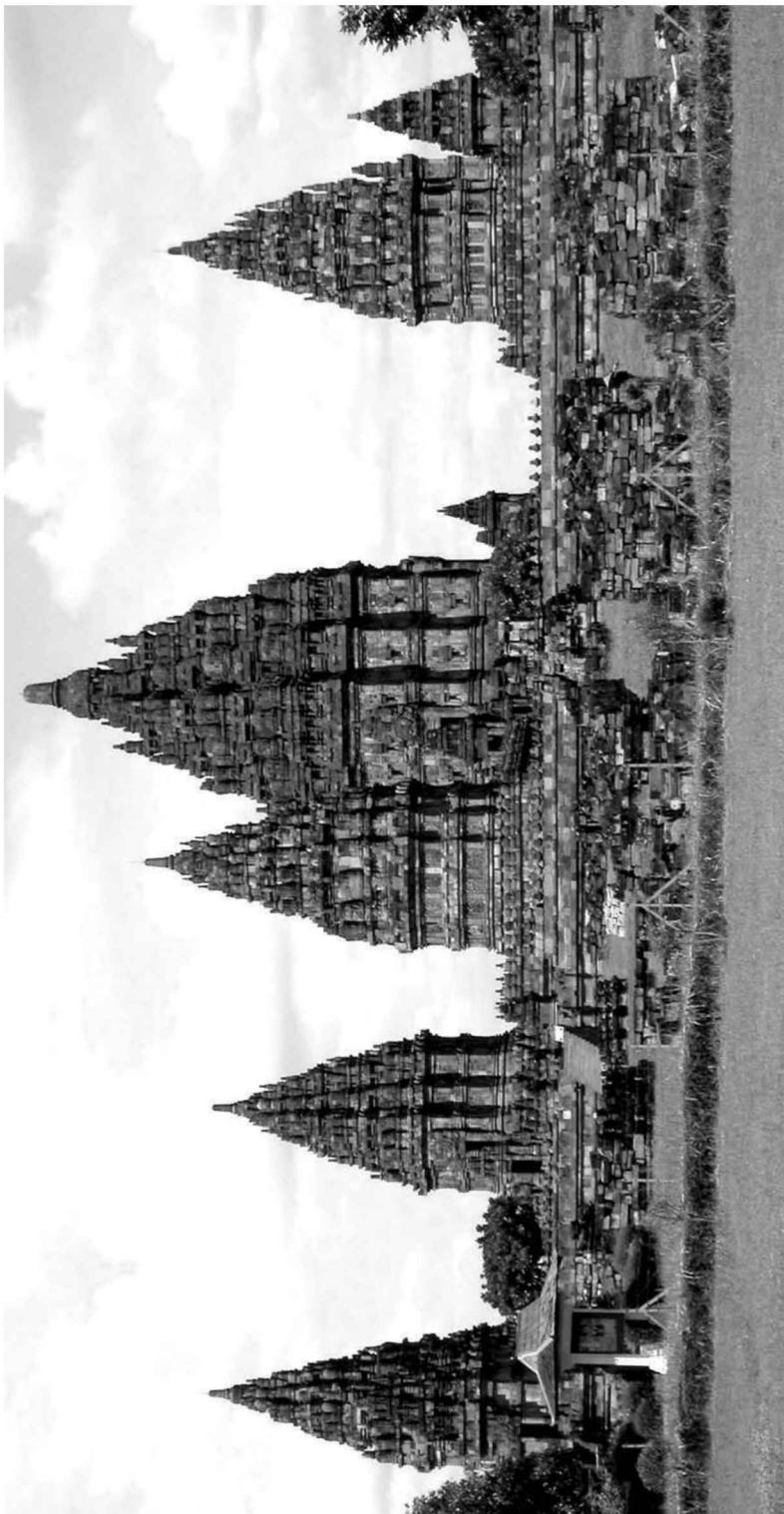
Foto 4.10 Kompleks percandian Loro Jonggrang, Prambanan, Jawa Tengah
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

Siwa, terutama pemuja Agastya. Memang Kumbhayoni adalah nama lain dari Maharesi Agastya. Rakai Walaing ini dikenal dari tujuh prasasti yang ditemukan di Bukit Ratu Baka, yaitu satu dari Desa Pereng, satu dari Desa Dawangsari, tiga dari pendopo teras, dan dua buah tidak diketahui asalnya yang tepat. Semuanya berbahasa Sanskerta, dengan huruf Jawa kuno. Dua prasasti terakhir itu memuat angka tahun, yaitu 773 Saka (856 M), sedang prasasti dari Desa Pereng berangka tahun 784 Saka (25 Januari 863 M).

Lima di antara prasasti-prasasti itu memperingati pendirian lingga untuk pemujaan Siwa dalam pelbagai aspeknya, dengan nama-nama yang berlainan, yaitu Krttikawasalingga, Tryamwakalingga, Sambhulingga, dan yang satu lagi, karena hanya sepotong yang diketemukan kembali, tidak mengandung nama lingganya, tetapi menyebut Siwa dengan nama Pinakin.[116]

Prasasti Pereng atau prasasti Wukiran ditulis dalam dua bahasa, yaitu Sanskerta dan Jawa kuno. Isinya mulai dengan puji-ujian dalam bahasa Sanskerta kepada Siwa. Disusul dengan puji-pujian kepada batu prasasti, yang sekalipun ada di pinggir jalan, ia menghalau segala kejahatan; sekalipun ia "kosong", tetapi ia membawa kesejahteraan, karena diliputi oleh sifat-sifat kedewaan; sekalipun ia dikelilingi oleh perkemahan perang,[117] ia suci, dan karena itu ia dipuja oleh semua orang. Disusul dengan satu bait puji-pujian kepada yang bernama Walaing.

Kemudian menyusul bagian yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, dalam susunan seperti prasasti Jawa kuno yang memperingati penetapan sima pada umumnya. Isinya menerangkan bahwa pada hari Senin hari bulan 25 Januari tahun 863 M Rakai Walaing pu Kumbhayoni, cicit Sang Ratu di Halu, dan tempat asal neneknya di Jangluran, memberi sebidang sawah di Wukiran seluas dua *tampah*, nama sawah itu Tamwahurang, untuk persembahan caru bagi Sang Hyang Winaya. Sebagaimana biasa keterangan ini disusul dengan daftar pejabat yang bertindak sebagai pelaksana dan *saksi* penetapan sima itu, yang ditutup dengan kutukan terhadap mereka yang berani menghapuskan status sima tersebut.

Dua bait berbahasa Sanskerta yang mengikuti keterangan ini menyebutkan bahwa Sang Kalasaja atau Kumbhayoni telah membangun sebuah candi yang bernama Bhadraloka, demi kesejahteraan anak cucunya, dengan pengharapan semoga selanjutnya di dunia ini selalu ada kebahagiaan, ketaatan terhadap

---

[116] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, hlm. 244–279; 341–343

[117] Kata siwira dapat juga berarti semacam padi-padian. Kern memberi sebagai kemungkinan terjemahan ini, dengan membayangkan batu prasasti itu didirikan di tengah-tengah lapangan yang ditumbuhi semacam padi-padian liar (Kern, VG, VI, hlm. 281–282)

dewa-dewa, kebijakan, keluhuran budi, dan kemurahan hati, termasuk bagi para pendeta dan raja-raja. Hendaknya jangan ada permusuhan, penyakit, dan kebencian. Sebagai penutup terdapat daftar daerah-daerah yang masuk wilayah Sang Kumbhayoni yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno, yaitu wilayah Tunggang Dawet, Langka Sereh, Wulakan di Wala (Air Terjun di suatu Gua), Walaing, dan Lodwan.[118]

Prasasti yang terakhir ternyata memuat silsilah Rakai Walaing pu Kumbhayoni, mulai dari buyutnya. Seperti yang diketahui dari prasasti Wukiran, Kumbhayoni menyebut dirinya cicit dari Sang Ratu di Halu. Jadi, rupa-rupanya tokoh inilah yang disebut sebagai pangkal silsilahnya. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta, dengan huruf Jawa kuno yang amat rapi pemahatannya. Sayang sekali tidak lengkap, hanya kira-kira dua pertiga bagian yang sebelah kiri yang sampai kepada kita. Anehnya, bagian yang hilang itu justru memuat nama-nama buyut, kakek, dan ayah Rakai Walaing, seolah-olah dahulu sengaja dihilangkan oleh golongan yang menentangnya.

Prasasti ini mulai dengan puji-pujian kepada Siwa. Kemudian disebutkan buyut Rakai Walaing pu Kumbhayoni, yang sayang sekali namanya hilang. Demikian juga halnya dengan nama anaknya, cucunya, dan cicitnya; setiap kali kalimat berbunyi: dari padanya terlahir, anak laki-lakinya, dan keturunannya,[119] selalu terputus, dan anehnya potongan itu menyerong, sehingga kelihatan benar bahwa orang sengaja menghilangkan nama-nama itu. Pada akhir prasasti disebutkan daerah-daerah yang dikuasai oleh Kumbhayoni, yaitu Tunggang Dawa, Langkapura, Nirjjhara, dan Walaing. Jadi, sama dengan yang disebut di dalam prasasti Wukiran, hanya kurang satu, yaitu Lodwan, yang mungkin ada pada bagian prasasti yang hilang.

Yang menarik perhatian adalah bahwa di dalam salah satu prasasti yang memperingati pendirian lingga itu Rakai Walaing disebut penakluk Walaing (walainggajetra), dan pelindung Walaing (Walainggagoptra), dan ia dipuja-puja sebagai Lembu jantan di antara orang-orang lain (nararsabha). Prasasti dari Dawangsari (Haralingga) menyebut leluhur Kalasodhbawa atau Kumbhayoni berasal dari Akhandalapura, seperti seorang dewa yang turun dari langit dengan sinar yang berkilauan bagaikan bulan di langit yang cerah. Prasasti Tryamwakalingga mengatakan bahwa Sri Kumbhaja terlahir

[118] H. Kern, "Het Sanskrit op een Steen afkomsting (van Pereng), uit (de buurt van) Prambanan (785 Çaka)", VG, VI, hlm. 277–286; N.J. Krom, "Epigrafische Bijdragen. II. De inscriptie van Pereng", BKI, 75, 1919, hlm. 8–24; A.B. Cohen Stuart, KO, XXIII; R.Ng. Poerbatjaraka, Agastya in den Archipel, Diss, 1926, hlm. 48–49

[119] Dalam bahasa Sanskertanya kalimat itu mulai dengan: *tasmat prasuto ... tasya sunur ...; tasyanwa (wayo) ...*

dari keturunan raja yang memerintah di Jawa (Yawakhyapura), tanah yang semuanya dapat tumbuh (*bhumi sarwwabhawe*).[120]

Jelas kiranya bahwa Rakai Walaing pu Kumbhayoni itu ialah keturunan seorang raja di Jawa, tetapi leluhurnya berasal dari Akhandalapura. Nama ini mengingatkan kepada Akhandalapura, nama lain dari Indrapura.[121] Memang ini terdapat di mana-mana sebagai nama ibu kota kerajaan, baik di Campa, di Kamboja, di Semenanjung Tanah Melayu dan di Sumatra, tetapi tidak pernah ada di Jawa.[122] Akan tetapi, mengingat apa yang telah disebutkan tentang asal usul wangsa Sailendra dan prasasti Sojomerto, Akhandalapura itu harus dicari di Sumatra. Keterangan di dalam prasasti Haralingga ini memperkuat dugaan bahwa leluhur wangsa Sailendra di Jawa berasal dari Sumatra. Dengan perkataan lain, Rakai Walaing pu Kumbhayoni dianggap sebagai seorang anggota wangsa Sailendra.

Di dalam prasasti Wukiran ia menyebut dirinya cicit Sang Ratu di Halu. Di dalam prasasti Sambhulingga[123] dikatakan bahwa Kumbhayoni terlahir dari keturunan raja yang memerintah di Musalakhyarastra. Kata musala berarti antan, jadi sama dengan halu. Dapat disimpulkan bahwa Sang Ratu di Halu itu sama dengan raja yang memerintah di Musalakhyarastra, dan sama dengan raja yang memerintah di Yawakhyapura. Dengan adanya istilah Musalakhyarastra itu harus ditarik kesimpulan bahwa Halu ialah nama suatu daerah.[124] Mungkin sekali nama daerah ini kemudian melekat kepada seorang pangeran yang mendapat daerah Halu sebagai daerah lungguh, yaitu Rakarayan i Halu, yang menurut Boechari ialah adik putra mahkota.[125] Kalau dugaan itu benar, Sang Ratu di Halu itu adalah adik dari salah seorang raja yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan perhitungan kronologi, kemungkinan besar ia adik Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya. Dapatlah dipahami mengapa Rakai Walaing pu Kumbhayoni berusaha untuk merebut kekuasaan. Seperti telah dikatakan, Rakai Pikatan adalah anak Rakai Patapan

---

[120] De Casparis membaca sarggabhawe, dan menganggapnya sebagai toponim. Akan tetapi, ia menambahkan keterangan bahwa sarggabhawa sebagai nama tempat (atau daerah) tidak pernah dijumpai. Mengingat bahwa huruf ga dan wa sama-sama bulat di atas, dan hanya berbeda dalam kenyataan bahwa huruf ga terbuka di bawah sedang huruf wa tertutup, Boechari mengusulkan pembacaan sarwwabhawe dalam arti semuanya menjadi, sebagai sebutan bagi tanah Jawa. Dengan perkataan lain, tanah Jawa disebutkan sebagai tanah yang amat subur; apa pun dapat tumbuh di sana

[121] Di dalam prasasti suku kata yang pertama memang dieja dengan a pendek. Mungkin sekali ini disebabkan mantranya menghendaki suku kata yang laghu (pendek)

[122] Lihat Prasasti Indonesia, II, hlm. 262

[123] Prasasti ini belum diterbitkan, tetapi pokok isinya sudah dimuat dalam Prasasti Indonesia, II, hlm. 341–342. Juga Boechari telah mentranskripsikannya

[124] Bandingkan dengan keterangan mengenai Raja Airlangga

[125] Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino ...", hlm. 60–61

Pu Palar, dan cucu dari adik perempuan Rakai panangkaran. Sebagai cicit adik laki-laki Sañjaya, Rakai Walaing merasa lebih berhak dari Rakai Pikatan, sekalipun sebenarnya Rakai Pikatan duduk di atas takhta kerajaan Mataram itu berkat perkawinannya dengan Pramodawarddhani, putri mahkota raja Samaratungga, yang menganut agama Buddha.

Perang perebutan takhta pun terjadi antara Rakai Pikatan melawan Rakai Walaing, yang menurut prasasti Siwagerha berlangsung sampai satu tahun. Anak bungsu Rakai Pikatan, yaitu Rakai Kayuwangi pu/dyah Lokapala sebagai pemimpin pasukan yang gagah berani berhasil memukul mundur Rakai Walaing, yang mengungsi ke atas Bukit Ratu Baka dan membuat benteng pertahanan di sana. Karena strategisnya lokasi ini, Rakai Kayuwangi mengalami kesulitan untuk menggempurnya, sehingga Rakai Walaing sempat mendirikan pelbagai bangunan untuk lingga bagi Siwa dalam pelbagai aspeknya, sebagai upaya magis untuk memperoleh kemenangan. Ia juga membuat silsilah untuk menunjukkan bahwa ia berhak atas takhta kerajaan Mataram. Di bukit Ratu Baka itu memang pernah ditemukan oleh Crawfurd sebuah arca batu yang digambarkannya sebagai sebuah arca Siwa Mahadewa menghancurkan Tripurantaka, tetapi keadaannya sudah rusak, dan J.W. Ijzerman juga melihat sebuah arca dewa-dewi sedang berpelukan, yang mengingatkan kita kepada *alingganamurti* seperti yang disebutkan dalam prasasti Tryamwakalingga.[126]

Akhirnya Rakai Kayuwangi berhasil juga menggempur benteng pertahanan di bukit Ratu Baka itu. Prasasti yang memuat silsilah Rakai Walaing pu Kumbhayoni itu sengaja dirusak, dengan menghilangkan nama-nama ayah, kakek, dan buyutnya.[127]

Dengan berhasilnya Rakai Kayuwangi memukul mundur Rakai Walaing, dialah yang dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya, Rakai Pikatan, dan bukan kakaknya, putri mahkota Rakai Gurunwangi dyah Saladu. Hal ini tentu akan menimbulkan kericuhan pula seperti yang diuraikan lebih lanjut.

Seperti telah disebutkan, Rakai Kayuwangi pu/dyah Lokapala dinobatkan menjadi raja pada tahun 856 M. Ia bertakhta di Medang yang terletak di Mamratipura. Keterangan di dalam prasasti Siwagerha ini membayangkan bahwa keraton Medang dipindahkan ke Mamratipura, mungkin karena Rakai Walaing pada suatu ketika berhasil menyerbu ke dalam kota Medang

---

[126] Prasasti Indonesia, II, hlm. 269, dan catatan no. 105, 106, 107

[127] Sekalipun telah diusahakan pencarian sejak tahun 1954 di sekitar pendopo teras, hingga sekarang bagian kanan prasasti ini, yang memuat nama-nama leluhur Rakai Walaing, belum juga ditemukan. Mungkinkah dahulu bagian ini benar-benar dihancurleburkan sehingga tidak mungkin lagi ditemukan kembali?

yang lama, yang sayang sekali tidak diketahui lokasinya. Rakai Kayuwangi memerintah sampai kira-kira tahun 883 M.[128] Ada sekitar 50 prasasti yang ditemukan dari masa pemerintahannya, sekalipun tidak semuanya dikeluarkan oleh raja sendiri. Yang memuat nama raja Rakai Kayuwangi hanya 12 buah.

Dari sekian banyak prasasti itu hanya satu yang memuat keterangan di bidang sejarah politik. Lainnya hanya berisi keterangan tentang penetapan sima untuk suatu bangunan suci, baik oleh raja sendiri maupun oleh seorang pejabat kerajaan atau pejabat daerah. Sebagian memang berupa batu sima yang berisi prasasti tentang penetapan suatu daerah sima. Prasasti yang memuat keterangan sejarah ialah prasasti Wuatan Tija tahun 802 Saka (10 Desember 880 M). Dikatakan bahwa Rakryan Manak dibawa oleh adiknya yang bernama Rakryan Landhayan, dan diturunkan di Tangar, tetapi lalu membakar diri di Taas.[129] Dyah Bhumijaya melarikan diri ke arah selatan, ke arah laut, dan sampai di Desa Wuatan Tija. Pejabat Desa Wuatan Tija menyelamatkannya, dan ia diantarkan kembali kepada raja. Amat sukacitalah hati paduka Sri Maharaja Rake Lokapala, karena itu Desa Wuatan Tija dianugerahkan kepada anaknya Dyah Bhumijaya itu, dilepaskan dari wilayah Samgat Wintri.[130]

Di sini disebut nama raja Rake Lokapala. Tentulah ini kesalahan dari pengutip prasasti, prasasti ini memang tinulad, meskipun tidak terlalu banyak selisih waktunya dengan prasasti yang asli r yang mestinya menulis Rakai Kayuwangi pu Lokapala.[131] Rupa-rupanya telah terjadi suatu intrik dalam istana. Dapat diperkirakan bahwa Rakryan Manak adalah salah seorang permaisuri atau selir raja. Ia dengan anaknya, Dyah Bhumijaya, telah dilarikan oleh adiknya, yaitu Rakryan Landhayan. Apa motif penculikan itu kurang jelas. Sesampainya di Tangar Rakryan Manak dapat melarikan diri bersama anaknya, tetapi entah bagaimana, ia memilih bunuh diri di Desa Taas. Dyah Bhumijaya berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan para pejabat desa Wuatan Tija,

---

[128] Ini adalah angka tahun prasasti Kalirungan, yaitu tahun 805 Saka bulan Phalguna, atau 1 Februari 884 M. L-C. Damais pernah menghitung pertanggalan prasasti ini, dan menduga bahwa prasasti ini berangka tahun 804 Saka. Akan tetapi, menurut Boechari yang telah membaca prasasti aslinya di Museum Leiden, angka tahunnya jelas 805 Saka, dan unsur-unsur harinya ialah *wu/rukung, u/manis/, sa/naiscara/, bukan wa(s), u/manis/, /anggara*. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Rakai Kayuwangi sendiri, seperti yang ternyata dari sisi belakang baris ke-8. Bagian sebelah kiri prasasti ini putus, sehingga nama raja pada permulaan baris ke-2 hilang

[129] Yang diterjemahkan dengan membakar diri di sini adalah kata maturun apuy

[130] F.D.K. Bosch, OV, 1926, hlm. 60, W.F. Stutterheim, "Epigraphische aantekeningen. II. Een oorkonden van Rake Lokapala uit het Zuidergebergte", TBG, LXXV, 1935, hlm. 420–467

[131] Bandingkan L-C. Damais, "Epigraphische aantekeningen. I. Lokapala-Kayuwangi", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 1–26

yang kemudian mengantarkannya kembali ke istana. Oleh karena itu, Desa Wuatan Tija dijadikan desa perdikan bagi Dyah Bhumijaya.

Nama Rakryan Landhayan dijumpai lagi di dalam prasasti Wulakan tahun 849 Saka (14 Februari 923 M).[132] Di dalam prasasti ini Sri Maharaja dyah Wawa menyebut dirinya anak *kryan ladheyan sang lumah ring alas* (yang meninggal atau dicandikan di hutan). Mungkin sekali keterangan yang meninggal atau dicandikan di hutan itu erat hubungannya dengan usahanya menculik kakaknya yang menjadi istri raja Rakai Kayuwangi, beserta anaknya. Karena gagal dalam usahanya itu ia melarikan diri masuk hutan dan meninggal di dalam pelarian, atau ia tertangkap oleh pasukan raja Rakai Kayuwangi yang mengejarnya, dan ia dibunuh di dalam hutan tempat ia menyembunyikan diri.

Rupa-rupanya intrik dalam istana tidak terbatas pada satu kejadian itu saja. Terbukti setelah Rakai Kayuwangi ada beberapa raja penggantinya yang hanya memerintah dalam waktu yang pendek. Mereka itu adalah Dyah Tagwas yang memerintah delapan bulan, Rake Panumwangan Dyah Dewendra memerintah selama satu tahun empat bulan karena digulingkan dari takhta, dan Rake Gurunwangi dyah Bhadra yang hanya memerintah dua puluh delapan hari sebelum ia melarikan diri dari keratonnya. Rake Gurunwangi dyah Bhadra mengeluarkan prasasti Munggu Antan tahun 808 Saka (9 Februari 887 M).[133] Jika melihat waktu dikeluarkannya, prasasti tersebut dikeluarkan beberapa hari sebelum dia turun dari takhta pada tanggal 24 Februari 887 M. Selain dari prasasti Wanua Tengah III dan Munggu Antan, pada empat candi perwara di percandian Plaosan Lor terdapat nama Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Gurunwangi dyah Ranu. Untuk kedua tokoh tersebut masih perlu dipertanyakan, tetapi Dyah Saladu mengingatkan pada nama Rakai Pikatan yang disebutkan dalam prasasti Wanua Tengah III, yaitu Rakai Pikatan dyah Saladu. Apakah tidak mungkin sebelum menjadi raja yang mempunyai daerah lungguh di Pikatan, sebelumnya mempunyai daerah lungguh di Gurunwangi. Dengan disebutkannya ada beberapa raja yang naik takhta setelah Rakai Kayuwangi, makin jelas banyak intrik-intrik di istana. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa pengganti Rakai Kayuwangi bukan putra mahkotanya, yaitu Rakai Hino pu Aku, melainkan Dyah Tagwas.[134]

---

132 R. Goris, "De oud-javaansche inscripties uit het Sri Wedari Museum te Soerakarta", OV, 1928, hlm. 63–70

133 OJO, XVIII

134 Lihat Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino ...", hlm. 68. Menurut Boechari *rakryan mahamantri i hino* sampai zaman wangsa Rajasa ialah putra mahkota

Sementara itu, ditemukan prasasti yang menyebut nama Rakai Watuhumalang, tetapi tidak dengan gelar Sri Maharaja, yaitu prasasti Panunggalan tahun 818 Saka (15 November 896 M).[135] Di dalam prasasti ini ia bergelar haji, yang dalam masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga dari zaman Kadiri biasa digunakan oleh seorang raja bawahan atau penguasa daerah. Ini menarik perhatian karena dalam di dalam daftar raja-raja dalam prasasti Mantyasih ia diberi gelar Sri Maharaja, dan memperkuat dugaan bahwa pemberian gelar Sri Maharaja itu pada beberapa tokoh dilebih-lebihkan.

Masih ada seorang Maharaja lagi, yaitu Maharaja Rake Limus dyah Dewendra di dalam prasasti Poh Dulur tahun 812 Saka (19 Oktober 890 M).[136] Prasasti ini tinulad, dan redaksinya agak kacau. Akan tetapi, dalam prasasti Wanua Tengah III disebut Rake Panumwangan dyah Dewendra. Apakah tokoh tersebut adalah tokoh yang sama, meskipun daerah lungguh yang disebutkannya berbeda, dan prasasti tersebut pun dikeluarkannya setelah dyah Dewendra telah turun takhta. Akan tetapi, jika melihat bahwa prasasti Poh Dulur adalah prasasti tinulad, ada kemungkinan salah dalam menyalin angka tahunnya, bisa saja kedua tokoh tersebut mengacu pada orang yang sama.

Tidak banyak yang dapat diceritakan tentang tiga tokoh itu, karena masing-masing hanya meninggalkan satu prasasti, itu pun tidak ada yang mengandung keterangan sejarah yang penting. Hanya perlu dicatat adanya nama Sang Hadyan Palutungan, adik Sang Pamgat Munggu, yang disebut sebagai istri dari yang diperdewakan di Pastika[137] di dalam prasasti Munggu Antan. Bahwa yang diperdewakan di Pastika itu ialah seorang raja, dapat dilihat dari prasasti Wintang Mas A dan Wintang Mas B, tahun 841 Saka (12 Oktober 919 M).[138] bhatara di Pastika dan sang hyang dharmma (bangunan suci) di Pastika sudah ada disebut di dalam beberapa prasasti Rakai Kayuwangi. Di dalam prasasti-prasasti itu dikatakan bahwa bangunan suci di Pastika itu ialah dharmma dari Rakai Weka pu Catura, yang kemudian naik tingkat menjadi Rakai Halu; mungkin sekali ia adik Rakai Kayuwangi, tetapi lahir dari selir (binihaji). Dengan perkataan lain, yang diperdewakan di Pastika itu mungkin sekali ialah ayah Rakai Weka pu Catura dan Rakai Kayuwangi, yaitu Rakai Pikatan.

---

[135] KO, IX

[136] Boechari, Prasasti Koleksi Museum Nasional, Jilid I, Jakarta, 1985/1986, hlm. 107–109

[137] *tatkala* sang *pamgat* munggu ari nira sang hadyan palutungan binihaji sang dewata ing pastika sumusuk ikeng *sima* i munggu antan

[138] KO, XX. Di dalam prasasti ini disebut *sri maharaja sang lumah i pastika.* Angka tahun prasasti Wintang Mas A hilang, tetapi oleh L-C. Damais dikatakan berasal dari sekitar tahun 915 Saka

Kemudian muncul tokoh yang cukup menarik, yaitu Sri Maharaja Rakai Watukura dyah Balitung Sri Dharmmodaya Mahasambhu. Dari pemerintahannya yang berlangsung selama kira-kira 12 tahun (899–911 M) ditemukan kembali sekitar 45 prasasti – tidak termasuk yang rangkap –, baik di atas batu maupun di atas perunggu. Yang menarik ialah bahwa dalam sebagian prasastinya yang terdapat di Jawa Timur ia memakai gelar abhiseka Sri Iswarakesawa Samarottungga, yaitu di dalam prasasti Watukura tahun 824 Saka (27 Juli 902 M)[139] dan prasasti Kinewu tahun 829 Saka (20 November 907 M).[140] Gelar abhiseka ini tidak dipakai di dalam prasasti-prasastinya yang di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dan kenyataan – pada waktu dikemukakannya pendapat-pendapat itu – bahwa prasastinya yang tertua berasal dari Jawa Timur, yaitu prasasti dari perkebunan Penampihan di lereng Gunung Wilis, tahun 820 Saka,[141] beberapa sarjana mengemukakan pendapat bahwa Rakai Watukura ialah seorang pangeran dari Jawa Timur, yang dapat naik takhta kerajaan Mataram di Jawa Tengah, karena perkawinan dengan putri mahkota kerajaan Mataram. Kemudian ia membangun percandian Loro Jonggrang di Prambanan, karena itu pada candi tersebut terdapat ciri-ciri arsitektur Jawa Timur.[142]

Pendapat yang mengatakan bahwa Rakai Watukura dyah Balitung berasal dari Jawa Timur kurang meyakinkan. Gelar *rakai*-nya justru menunjukkan bahwa ia seorang penguasa daerah di Jawa Tengah, karena Watukura diperkirakan ada di daerah Kedu Selatan.[143] Lain daripada itu kemudian ternyata bahwa prasastinya yang tertua berasal dari Jawa Tengah, yaitu prasasti Telahap tahun 820 Saka (11 Maret 899 M).[144] Bahwa ia naik takhta karena perkawinan mungkin dapat disimpulkan dari prasasti Mantyasih tahun

---

[139] F.H. van Naerssen, Oud Javaansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen, Diss, 1940, hlm. 82–105. Transkripsi lempeng pertama ada di OJO, XXIV

[140] OJO, XXVI

[141] OJO, XXI. Prasasti ini ternyata kurang dapat dipercaya isinya karena mungkin sekali merupakan pemalsuan

[142] W.F. Stutterheim, "Tjandi Loro Djonggrang en Oost Java", BKI, 90, 1933, hlm. 267–299; "De stichter der Prambanan Tempels", Djawa, XX, 1940, hlm. 218–233; R. Goris, "De eenheid der Mataramsche dynastie", FBG, I, 1929, hlm. 202–206; N.J. Krom, HJG^2, 1931, hlm. 170–175; J.L. Moens, "Loro Djonggrang en Prambanan. Van een sprookje dat verkelijkheid was", De Ronde Tafel, Coordinated Sociaal-economisch, Cultureel en Politiek Weekblad, 2e Jaargang, no. 48, 31 Juli 1948, hlm. 4 dan 12–13

[143] R.Ng. Poerbatjaraka, "Enkele oude plaatsnamen besproken", TBG, MCCII, 1933, 514–520

[144] L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 117–118. Lihat juga A.S. Wibowo, "Sedikit tentang tahun permulaan pemerintahan Balitung", MISI, II/2, Juni 1964, hlm. 147–154

829 Saka (11 April 907 M).[145] Prasasti ini memperingati pemberian anugerah sima kepada 5 orang patih di daerah Mantyasih karena jasa-jasa mereka telah mempersembahkan kerja bakti pada waktu perkawinan raja, telah menjaga keamanan di Desa Kuning, yang penduduknya selalu merasa ketakutan,[146] dan karena tidak pernah alpa dalam mempersembahkan kebaktian kepada bangunan suci Malangkuseswara, Puteswara, Kutusan, Silabhedeswara, dan Tuleswara. Bahwa perkawinan raja disebutkan di dalam prasasti memang sesuatu yang langka,[147] dan mungkin sekali menunjukkan bahwa perkawinan itu amat penting artinya bagi Rakai Watukura, dan bahwa mungkin sekali tanpa perkawinan itu ia tidak pernah duduk di atas takhta kerajaan Mataram.

Mungkin sekali ia yang meluaskan kekuasaan ke Jawa Timur. Memang ada satu prasasti yang dapat ditafsirkan sebagai sumber keterangan mengenai perluasan kekuasaan itu, yaitu prasasti Kubu-kubu tahun 827 Saka (17 Oktober 905 M).[148] Prasasti ini memperingati pemberian anugerah raja kepada Rakryan Hujung dyah Mangarak dan Rakryan Matuha Rakai Majawuntan berupa sebidang tanah tegalan di Desa Kubu-kubu yang dijadikan sima. Pembatasan daerah sima itu dilakukan oleh Dapunta Mañjala, Sang Manghambin, Sang Diha, Sang Dhipa, dan Dapu Hyang Rupin. Adapun sebabnya kedua orang itu mendapat anugerah raja ialah karena mereka itu telah berhasil mengalahkan Bantan. Masalahnya sekarang ialah di mana letak Bantan itu. L-C. Damais pernah mengemukakan dugaan bahwa Bantan ialah Bali. Sebagai alasan dikemukakannya kenyataan bahwa beberapa nama tempat dan nama jabatan di dalam prasasti tersebut terdapat juga di dalam prasasti-prasasti Bali, seperti Batwan, Burwan, Air Gangga, Sang Bukit, Kulapati, dan Reke.[149]

Akan tetapi, alasan itu kurang meyakinkan. Batwan sebagai nama tempat juga terdapat di dalam sebuah prasasti dari Jawa Timur, yaitu prasasti tembaga dari Gunung Gaprang dekat Tuban.[150] Istilah kulapati juga banyak terdapat di dalam prasasti-prasasti dari Jawa Timur.[151] Kata Burwan yang oleh Damais dianggap sebagai nama tempat, sebenarnya merupakan bagian dari kata

---

145 W.F. Stutterheim, "Een belangrijke oorkonde uit de Kedu", TBG, LXVII, 1927

146 *"sangka yan makweh bwat haji iniwenya sri maharaja kala ni warangan haji, len sangke kapujan bhatara i malangkuseswara. ing puteswara. i kutusan, i silabhedeswara i tuleswara ing prati warsa. muang sangka yan antaralika katakutan ikanang wanwa i kuning"*

147 Satu-satunya prasasti lain yang menyebut perkawinan adalah prasasti Pucangan yaitu perkawinan putri raja Dharmmawangsa Teguh, mungkin sekali dengan raja Airlangga

148 Boechari, Prasasti Koleksi Museum Nasional, hlm. 155–159

149 L-C Damais, EEI, IV, hlm. 20–103, BEFEO, XLVI, 1952. Lihat juga A.S. Wibowo, "Balitung menyerang Bali", Buletin YAPERNA, no. 11 Th. III 1976, hlm. 73

150 Boechari, Prasasti Koleksi Museum Nasional, hlm. 155–159

151 Lihat L-C Damais, *Répertoire Onomastique, s.v. kulapati*

katuhaburwan yang berarti tempat para tuhaburu, sedang bukti sebagai nama orang ada juga terdapat di dalam prasasti Waharu yang berasal dari Jawa Timur.[152] Tinggal nama Air Gangga yang hingga kini belum pernah dijumpai di dalam prasasti-prasasti di Jawa; tetapi nama-nama tempat dengan unsur air banyak sekali di dalam prasasti.[153]

Dapat ditambahkan di sini bahwa Hujung sebagai daerah "lungguh" Rakryan Hujung, dan Majawuntan, bentuk k*rama* dari Majawuri, daerah lungguh Rakai Majawuntan, harus dicari di Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari pelbagai prasasti.[154] Daerah Kubu-kubu juga mesti dicari di Jawa Timur, karena desa-desa sekelilingnya (tpi siring) yang mengirim wakil-wakil sebagai *saksi* pada waktu desa tersebut ditetapkan menjadi sima, yaitu desa-desa Batwan, Barsahan, Tal Tal, Unggah Sri, Kasu(gi)han, Pañjara, Buñjal, Wrnwang, Katuhaburwan, Skarpandan, sebagian besar di antaranya terdapat di dalam prasasti-prasasti di Jawa Timur.[155]

Meskipun demikian, kemungkinan Rakai Watukura dyah Balitung memerintahkan kedua pejabat di Jawa Timur itu untuk menyerang Bali, dan setelah berhasil mendapat anugerah *sima* Desa Kubu-kubu yang terletak di Jawa Timur, masih belum tertutup sama sekali. Hanya sampai sekarang belum ditemukan sumber sejarah di Bali sendiri yang dapat memberi petunjuk tentang adanya penyerangan kerajaan Mataram yang berhasil atas pulau itu pada permulaan abad X M. Selain itu, harus diingat pula bahwa Bantan merupakan bentuk k*rama* dari bala, balu, bara, dan bari. Bara misalnya, dapat saja merupakan nama tempat di Jawa, baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Haruskah Bali hanya semata-mata menunjuk kepada pulau Dewata yang terkenal itu? Di dalam prasasti Wulakan tahun 8(49) Saka (14 Februari 928 M)[156] terdapat nama tempat Wali (Rawali), yang dapat juga dieja Bali.

Yang pasti adalah bahwa dengan adanya prasasti Kubu-kubu itu ada petunjuk bahwa Rakai Watukura Dyah Balitung telah meluaskan kekuasaannya ke timur. Seperti telah dikemukakan, mungkin sekali kerajaan Kañjuruhan yang muncul pada pertengahan abad VIII M, dan berpusat

---

[152] OJO, IX

[153] Sebagai contoh dapat disebut di sini: Air Aten, Air Barangan, Air Bulang, Air Buwung, Air Hijo, Air Hulu, Air Kali, Air Papi, Air Pelung, Air Pyal, (Lihat L-C. Damais, *Répertoire Onomastique*, s.v. air)

[154] Lihat *Répertoire Onomastique*, pada kata-kata yang bersangkutan. Majawuntan juga terdapat di antara tulisan-tulisan singkat pada candi-candi perwara percandian Loro Jonggrang

[155] Lihat L-C. Damais, *Répertoire Onomastique*, pada kata-kata yang bersangkutan

[156] R. Goris, OV, 1928, hlm. 66

di sekitar Malang sekarang, telah tunduk kepada kerajaan Mataram, dan kemudian menjadi daerah taklukan yang dikuasai oleh seorang *rakai*, yaitu Rakarayan Kanuruhan.[157] Gelar ini memang pertama kali muncul dalam prasasti Watukura, dan di antara tulisan-tulisan singkat pada candi-candi perwara percandian Loro Jonggrang.[158]

Tindakan Rakai Watukura yang perlu dicatat pula adalah pembuatan tempat penyeberangan di Paparahuan (Desa Praon dekat Wonogiri sekarang), di tepi Bengawan Solo. Untuk itu, telah ditetapkan menjadi sima Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan yang diabadikan dalam prasasti Telang tahun 825 Saka (11 Januari 904 M).[159] Rakai Watukura membuat tempat penyeberangan itu untuk melaksanakan nazar seorang raja yang telah memerintah sebelumnya, yaitu *haji dewata sang lumah ing satasrngga* (= raja yang telah diperdewakan dan dimakamkan di Satasrngga). Siapa tokoh ini, yang juga disebut di dalam prasasti Poh tahun 827 Saka (17 Juli 905 M) dengan sebutan *maharaja sang lumah ing satasrngga*,[160] belum dapat diidentifikasikan. Satasrngga mungkin sekali harus dicari di sekitar pegunungan Dieng, seperti yang dapat disimpulkan dari prasasti Kuti tahun 762 Saka (18 Juli 804 M),[161] di dalam prasasti itu Gunung Satasrngga disebut sesudah Gunung Dihyang.

Yang diperintahkan untuk membuat tempat penyeberangan adalah Rakai Wlar pu Sudarsana. Setelah selesai dibuat tempat penyeberangan dengan tambatan perahunya, dua buah perahu dan dua buah lagi untuk cadangan, serta tempat penjagaannya,[162] maka pejabat desa-desa di sekeliling ketiga desa yang ditetapkan menjadi sima dimintai persetujuan tentang diadakannya tempat penyeberangan itu. Semuanya memberikan persetujuan mereka. Adapun kewajiban para petugas penyeberangan itu ialah melayani orang-orang yang melewati jalan itu setiap hari tanpa memungut bayaran. Mereka itu mendapat imbalan dari hasil pajak yang masuk dari Desa Telang, Mahe, dan Paparahuan sebanyak 9 *masa* emas setiap tahun.

Yang menarik perhatian dari masa pemerintahan Rakai Watukura adalah disebutkannya dua orang nenek raja di dalam prasasti, yaitu Nini Haji Rakai

---

157 Lihat Supra, hlm. 228

158 Prasasti Indonesia, II, hlm. 311 catatan no. 112

159 W.F. Stutterheim, "Een vrij overzetveer te Wonogiri", TBG, LXXIV, 1934, hlm. 269–295

160 W.F. Stutterheim, "De inscriptie van Randoesari, I", INI, afl., 1, 1940, hlm. 3–28

161 KO, II

162 Yang diterjemahkan dengan tempat penjagaan di sini adalah kata *kamulan*. Kata ini berasal dari kata *mula*, suatu nama jabatan yang sebenarnya belum jelas apa tugasnya. Akan tetapi, dari prasasti Balingawan tahun 813 Saka (13 April 891 M; OJO, XIX –XX) dapat diperkirakan bahwa mereka itu antara lain berkewajiban menjaga keamanan

Wwatan Pu Tammer di dalam prasasti Poh, dan Rakryan Sañjiwana di dalam prasasti Rukam tahun 829 Saka (19 Oktober 907 M).[163] Di dalam prasasti Poh itu perintah raja Rakai Watukura dyah Balitung diterima oleh Rakryan Mapatih i Hino pu Daksa dan Nini Haji Rakai Wwatan pu Tammer, untuk menetapkan Desa Poh dengan anak-anak desanya, yaitu Rumasan dan Nyu, menjadi sima bagi sang hyang caitya (bangunan suci pendharmaan), dan untuk mengelola bangunan silunglung dari Sang Dewata Sang Lumah ing Pastika. Mungkin tokoh ini, yang juga dijumpai di dalam prasasti-prasasti Rakai Kayuwangi, adalah kakek Rakai Watukura dyah Balitung, suami Rakai Wwatan pu Tammer.[164]

Di dalam prasasti Rukam diperingati perintah raja untuk menetapkan menjadi sima Desa Rukam yang masuk wilayah pusat kerajaan,[165] bagi Rakryan Sañjiwana Nini Haji, karena desa itu pernah hancur oleh letusan gunung. Kewajiban sima itu adalah memberi persembahan kepada bangunan suci di Limwung dan membuat sebuah kamulan. Penghasilan pajak Desa Rukam sebanyak 5 *dharana* perak dan pilih mas (?) sebanyak 5 *masa* hendaknya dipersembahkan kepada bangunan suci di Limwung itu, dan penduduknya berkewajiban melakukan kerja bakti *(buñcang haji)* untuk pengelolaan kamulan.

Akan tetapi, karena Rakai Wwatan pu Tammer itu disebut bersama dengan Rakryan Mapatih i Hino pu Daksa, sedang di atas telah dikatakan bahwa mungkin sekali Daksa itu ipar Rakai Watukura, Rakai Wwatan pu Tammer mungkin sekali nenek pu Daksa, dan nenek permaisuri raja. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa Rakryan Sañjiwana ialah nenek raja sendiri secara langsung. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa nama Rakryan Sañjiwana itu masih melekat pada salah satu candi di dekat Prambanan, yaitu candi Sojiwan. Candi ini berlandaskan agama Buddha. Jika benar candi ini

---

[163] Titi Surti Nastiti dkk., Tiga prasasti dari masa Balitung, 1982, hlm. 23–28 dan 26–54

[164] W.F. Stutterheim, INI, afl. 1, hlm. 3–28

[165] Di dalam prasasti disebut *wanua* i rukam *wanua* jro. Ada kemungkinan kalimat ini harus ditafsirkan *wanua* i rukam mwang *wanua* i jro. Akan tetapi, karena pada bagian akhir prasasti tidak disebut Desa Jero, tidak boleh tidak yang dijadikan sima itu hanyalah Desa Rukam; dan *wanua* i jro harus dianggap sebagai keterangan dari *wanua* i rukam. Istilah i jro, yang berarti di dalam, mungkin harus disejajarkan dengan apa yang biasa dijumpai pada akhir daftar para *mangilala drawya haji*, yaitu *watek i jro ityewamadi*. Di sini *watek i jro* harus ditafsirkan sebagai golongan yang ada di dalam (lingkungan istana). Di dalam prasasti Taji Gunung (OJO, XXXVI) dijumpai istilah i jro turus. Istilah ini mengingatkan kita kepada berita-berita Cina yang mengatakan bahwa ibu kota kerajaan dengan istana rajanya dikelilingi oleh tembok atau pagar dari tonggak-tonggak kayu (turus). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu *wanua* i rukam *wanua* i jro di sini disalin dengan Desa Rukam yang masuk wilayah pusat kerajaan, atau jika meminjam istilah dari zaman Mataram Islam harus menganggap Desa Rukam itu masuk dalam wilayah *kutanagara* atau *nagari ageng*

merupakan tempat pendarmaan Rakryan Sañjiwana, mestinya ia seorang penganut agama Buddha. Mungkinkah Rakryan Sañjiwana itu sama dengan Sri Pramodawarddhani, anak Samaratungga, yang kawin dengan Rakai Pikatan? Sedang Rakai Wwatan adalah istri Rakai Pikatan yang lain, yang menganut agama Siwa? Jika benar demikian, Sang Dewata Sang Lumah i Pastika adalah gelar anumerta raja Rakai Pikatan.[166]

Masalah petugas pajak yang berusaha memungut lebih banyak daripada yang semestinya dibayar oleh penduduk untuk kepentingan diri sendiri rupa-rupanya sudah dikenal juga pada zaman dahulu. Dalam masa pemerintahan Rakai Watukura dyah Balitung ada dua prasasti yang memberi petunjuk tentang hal itu, yaitu prasasti Luitan tahun 823 Saka (16 April 901 M)[167] dan prasasti Palepangan tahun 828 Saka (906 M).[168]

Di dalam prasasti Luitan dikatakan bahwa pada hari Kamis Kliwon, *paringkelan* Was, tanggal 16 April 901 M, penduduk Desa Luitan yang termasuk wilayah Kapung menghadap Rakryan Mapatih i Hino, mengadukan bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan. Mereka merasa bahwa tanah mereka diukur dengan satuan *tampah* yang lebih kecil daripada satuan *tampah standa*r. Mereka itu yakin bahwa sawahnya hanya 1 lamwit dan 7 *tampah*, dan bahwa mereka hanya sanggup mempunyai *katik* (?) sebanyak empat orang. Mereka mohon kepada Rakryan Mapatih i Hino dan Rakryan i Pagarwesi untuk memerintahkan mengukur kembali sawah-sawah mereka itu.

Permohonan mereka itu dikabulkan, dan ternyata bahwa satuan *tampah* yang digunakan dahulu hanyalah 2/3 satuan *tampah standa*r. Memang sawah penduduk Luitan itu hanyalah 1 lamwit dan 7 *tampah*. Dengan perkataan lain, dalam hal ini para pejabat pajak di daerah Kapung hendak mencari keuntungan untuk diri sendiri sebanyak 33 1/3% dari pajak yang semestinya dibayar oleh penduduk.

---

166 Bahwa bangunan suci di Pastika itu suatu bangunan suci yang amat penting, ternyata dari masih disebutkannya di dalam kitab *Nagarakrtagama* di antara *dharmma lepas* yang berlandaskan agama Siwa, berupa prasada haji (Nag., 76, 2.). Bahwa Prapañca menyebut bangunan-bangunan suci yang ada di Jawa Tengah tidaklah perlu dianggap sebagai suatu hal yang amat mus*tahil*, sebab pada zaman Majapahit daerah Jawa Tengah tetap dihuni orang; dan seperti diketahui bahwa ada juga bagian-bagian kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Tengah, seperti Lasem dan Pajang. Tentunya banyak candi yang masih berfungsi, dan candi-candi tempat pendarmaan raja-raja wangsa Sailendra tentunya masih diagungkan. Mungkin sekali Prapañca juga menyebut candi Borobudur, yaitu di antara kasugatan kabajradharan (Nag., 77, 3)

167 Titi Surti Nastiti, op. cit., hlm. 12, 29

168 F.D.K. Bosch, "Een koperen plaat van 848 Çaka", OV, 1917, hlm. 88–89

Di dalam prasasti Palepangan dikatakan bahwa rakyat Desa Palepangan berselisih pendapat dengan *sang nayaka* yang bernama Bhagawanta Jyotisa. Menurut *sang nayaka* sawah rakyat Desa Palepangan itu luasnya 2 lamwit, yang harus dibebani pajak sebanyak 6 *dharana* perak setiap *tampah*-nya. Karena sawah mereka itu tidak sampai sekian luasnya, dengan sendirinya mereka itu tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang ditentukan. Oleh karena itu, mereka menghadap Rakryan Mahamantri i Hino pu Daksa dengan permohonan agar sawah mereka itu diukur kembali dengan menggunakan ukuran *tampah* *standa*r kerajaan (*tampah* haji), karena mereka itu yakin bahwa sawah mereka panjangnya hanya 100 depa *sihwa* (?) dan lebarnya 30 depa *sihwa* (?).

Permohonan itu dikabulkan, dan ternyata bahwa sawah mereka hanya 1 lamwit 7a *tampah*, dan dengan demikian pajak yang harus dibayar adalah 5 *kati* dan 5 *dharana* perak. Akhirnya, semua rakyat mendapat prasasti. Karena 1 lamwit sama dengan 20 *tampah*, maka jelas *sang nayaka* hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri 12,5 × 6 *dharana* perak = 75 *dharana* perak, atau kira-kira 31%.[169]

Dari masa pemerintahan Rakai Watukura dyah Balitung ditemukan 1 prasasti yang berisi keputusan pengadilan (*jayapatra*), yaitu prasasti Guntur tahun 829 Saka (22 Juli 907 M).[170] Masalahnya adalah bahwa pada hari Rabu Pon, *paringkelan* Mawulu, tanggal 12 paro terang seorang yang bernama Pu Tabwel, penduduk Desa Guntur yang masuk wilayah punpunan dari biara di Garung, diinterogasi oleh Sang Pamgat Pinapan pu Gawul dan istrinya yang bernama pu Gallam. Ada pengaduan dari Sang Dharmma, penduduk Desa Wurakung, yang telah sia-sia menagih utang kepada pu Tabwel sebanyak 1 *suwarna* emas. Pu Tabwel tidak mau membayar karena yang berutang ialah istrinya yang bernama Si Campa, saudara Sang Dharmma, tanpa sepengetahuannya. Si Campa meninggal dunia tanpa anak.

Pada waktu kedua pihak dipanggil lagi menghadap pengadilan, Sang Dharmma tidak hadir. Akhirnya ia dikalahkan, karena di selain tidak hadir dalam persidangan, menurut undang-undang yang berlaku pada zaman dahulu, utang istri tanpa sepengetahuan suaminya, apalagi kalau suami istri itu tidak beranak, tidak menjadi tanggungan suaminya apabila si istri yang berutang itu meninggal. Pu Tabwel lalu diberi surat jayapatra dengan

[169] Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah apakah sawah seluas 1 lamwit 7a *tampah* itu milik seluruh penduduk Desa Palepangan, atau hanya milik satu orang. Soalnya sawah itu hanya seluas kira-kira 150 × 45 m^2, atau hanya setengah hektare lebih sedikit

[170] J.L.A. Brandes, "Een *jayapatra*, of acte van eene rechterlijke uitspraak van Çaka 849", TBG, XXXII, 1889, hlm. 93–148

di*saksi*kan oleh para pejabat agar masalah utang itu tidak diungkit-ungkit lagi di kemudian hari.

Masa pemerintahan Rakai Watukura dyah Balitung yang kira-kira 12 tahun rupa-rupanya berlangsung dengan aman, kecuali adanya kerusuhan di Desa Kuning di sekitar Gunung Sindoro dan Sumbing, yang disebut di dalam prasasti Mantyasih dan penaklukan Bantan – di mana pun juga lokasinya – yang diperingati di dalam prasasti Kubu-kubu. Akan tetapi, intrik di dalam keraton berjalan terus. Daksa atau Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya, yang menjabat *rakryan mahamantri i hino* (putra mahkota) ternyata bukan anak Rakai Watukura, kemungkinan besar iparnya. Dari berita Cina dari zaman dinasti Sung ia disebut ta-tso-kan-hiung, yang oleh Boechari ditafsirkan sebagai Daksa, saudara [raja] yang gagah berani.[171] Ia tetap berusaha untuk dapat duduk di atas takhta kerajaan Mataram sebagai pewaris yang lebih berhak. Untuk menunjukkan bahwa ia keturunan Sañjaya, semasa masih menjabat *rakryan mahamantri i hino* ia mengeluarkan prasasti dengan menggunakan tarikh Sañjaya, yaitu prasasti Taji Gunung tahun 194 Sañjayawarsa (21 Desember 910 M),[172] dan setelah menjadi raja ia mengeluarkan lagi dua prasasti dengan tarikh Sañjaya, yaitu prasasti Timbanan Wungkal tahun 196 Sañjayawarsa (11 Februari 913 M),[173] dan prasasti Tihang yang memuat dua angka tahun, yaitu tahun 198 Sañjayawarsa dan 836 Saka (914 M).

Dapatlah diperkirakan bahwa pergantian dari Rakai Watukura dyah Balitung kepada Rakai Hino pu Daksa tidak berjalan dengan wajar. Apalagi jika dilihat bahwa di dalam prasasti Taji Gunung itu Rakyan Mahamantri i Hino pu Daksa menetapkan Desa Taji Gunung menjadi sima bersama dengan Rakryan Gurunwangi. Di dalam prasasti Timbanan Wungkal dikatakan bahwa perintah raja Daksa turun kepada Rakryan Mapatih i Halu, Sirikan dan Weka, dan Rakryan Gurunwangi dan Samgat Tiruan. Gelar Rakryan Gurunwangi

---

[171] Boechari, "Rakyan Mahamantri i Hino ..." hlm. 67. Lihat juga Boechari, "Rakyan Mahamantri i Hino. A study ...", hlm. 7–20

[172] OJO, XXXVI. Angka tahun ini dibaca oleh Brandes sebagai 694 Sañjayawarsa, yang diikuti oleh N.J. Krom (HJG², 1931, hlm. 191 catatan no. 1). R. Goris mengusulkan pembacaan 172 atau 174 Sañjayawarsa ("De eenheid der Mataramsche dynastie", FBG, I, 1929, hlm. 202). Akan tetapi, berdasarkan perhitungan unsur-unsur penanggalannya, L-C Damais membacanya sebagai 194 Sañjayawarsa, yang sama dengan 910 M, sehingga dapat diketahui bahwa Sañjayawarsa mulai pada tahun 717 M, yang mungkin merupakan tahun permulaan pemerintahan Rakai Mataram Sang Ratu Sañjaya. (L-C. Damais, "Études d' Épigraphie Indonésienne. II. La date des inscriptions en ere de Sañjaya", BEFEO, tome XLV, fasc. 1, 1951, hlm. 42–63)

[173] OJO, XXXV. Brandes membaca angka tahunnya sebagai 693 Sañjayawarsa, yang diikuti oleh Krom, sedang Goris membacanya sebagai 176 Sañjayawarsa. Pembacaan 196 ini mengikuti perhitungan L-C. Damais

dijumpai pada candi-candi perwara candi Plaosan Lor yaitu Rakai Gurunwangi dyah Saladu, dan Rakai Gurunwangi dyah Ranu.[174]

Yang menarik perhatian adalah bahwa di antara tulisan pada candi-candi perwara percandian Plaosan Lor terdapat juga nama Pu Daksa, dengan gelar Sang Kalungwarak, yaitu pada suatu candi perwara berdampingan dengan yang bertulisan dharmma sri *maharaja*. Dalam deretan yang sama dijumpai berturut-turut Sang Rasbang pu Manju, Rakai Wanwa Galuh, Rakai Gurunwangi dyah Ranu, Sang Ram*raman* pu Singha, dan Sang Watuhumalang pu Tguh.

Memang sulit untuk membuktikan bahwa Rakai Gurunwangi dyah Ranu identik dengan Sri Maharaja Rakai Gurunwangi di dalam prasasti Munggu Antan, dan Sang Watuhumalang pu Tguh identik dengan Sri Maharaja Rakai Watuhumalang, dan Sang Kalungwarak pu Daksa dengan Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya. Gelar Rakai memang mengikat. Dua orang yang memakai gelar *rakai* yang sama mungkin sekali suami istri, atau dapat juga anak, yang mewarisi daerah lungguh ayahnya. Jadi, memang ada kemungkinan mengidentifikasikan Rakai Gurunwangi dyah Ranu/ Saladu dengan Sri Maharaja Rakai Gurunwangi, dan Sang Watuhumalang pu Tguh dengan Sri Maharaja Raka Watuhumalang. Akan tetapi, agak sulit mengidentifikasikan Sang Kalungwarak pu Daksa dengan Rakryan Mapatih i Hino pu Daksa dan Sri Maharaja Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya, sekalipun ada juga contoh di dalam sejarah kuno bahwa seorang pemegang daerah lungguh tertentu menjadi hino atau halu, seperti Rakai Pagarwesi pu Wirawik*rama* di dalam prasasti Ayam Teas tahun 822 Saka (901 M) dan prasasti Panggumulan tahun 824 Saka (902 M), yang kemudian menjadi Rakai Halu (Watutihang) pu Wirawik*rama* di dalam prasasti Telang tahun 825 Saka (904 M), prasasti Poh tahun 827 Saka (905 M), prasasti Rabwan tahun 827 Saka (905 M),[175] prasasti Kandangan tahun 828 Saka (906 M), prasasti Mantyasih 829 Saka (907 M), dan prasasti Sangsang 829 Saka (907 M). Juga, seorang Rakai Pangkaja Dyah Tumambong menjadi Rakai Halu dyah Tumambong di dalam prasasti Terep tahun 954 Saka. Jadi, tidak mus*tahil* bahwa Sang Kalungwarak pu Daksa identik dengan Rakryan Mapatih i Hino pu Daksa, yang kemudian menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya.

---

[174] J.G. de Casparis berpendapat yaitu bahwa Dyah Saladu adalah putra mahkota, sedang Dyah Ranu adalah istrinya ("Short inscriptions from candi Plaosan Lor", Berita Dinas Purbakala, no. 4, 1950, hlm. 23). Bandingkan Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino ...", hlm. 68

[175] Boechari, "A dated bronze bell from Pekalongan (North Central Java)", ASAIHL Seminar on Fine Arts of Southeast Asia, Bangkok, 1964, hlm. 121–131

Kalau demikian halnya, Rakai Gurunwangi, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, dan Rakai Kalungwarak pu Daksa adalah anak-anak atau sekurang-kurangnya kerabat dekat raja Rakai Pikatan. Gara-gara Rakai Kayuwangi sebagai anak bungsu dinobatkan menjadi raja pengganti Rakai Pikatan karena kehendak rakyat, terjadilah intrik-intrik dan perebutan kekuasaan di kalangan para pangeran. Lebih-lebih setelah dalam kemelut itu Rakai Watukura dyah Balitung, yang secara langsung tidak mempunyai hak atas takhta kerajaan, menjadi raja karena perkawinan dengan seorang putri raja yang memerintah sebelumnya. Pu Daksa bersekongkol dengan Rakai Gurunwangi – tidak jelas apakah ia identik dengan Sri Maharaja Rakai Gurunwangi dalam prasasti Munggu Antan, atau barangkali anaknya – untuk merebut takhta kerajaan dari Rakai Watukura dyah Balitung. Setelah berhasil menjadi raja, Rakai Gurunwangi diberi kedudukan sejajar dengan para pangeran di eselon pertama. Yang perlu mendapat perhatian adalah kenyataan bahwa di dalam deretan itu tidak dijumpai seorang *rakryan mapatih i hino*. Apakah penunjukan putra mahkota merupakan masalah yang peka sehingga tidak dilakukan oleh Daksa?

Bahwa ada hubungan kekerabatan yang dekat antara Daksa dengan Rakai Pikatan dapat kiranya dilihat dari keterangan di dalam prasasti Wintang Mas A yang angka tahunnya hilang, tetapi terang berasal dari pemerintahan Daksa.[176] Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa Dyah Dewa, Dyah Babru, dan Dyah Wijaya memperlihatkan sebuah prasasti kepada raja Daksa, yaitu anugerah yang mereka terima dari Sri Maharaja Sang Lumah i Pastika yang membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak kepada penguasa daerah Mangulihi, tetapi mereka diwajibkan memberi persembahan kepada Sang Hyang Dharmma di Wintang Mas. Sekarang persembahan mereka kepada Sang Hyang Dharmma itu dihalang-halangi oleh Samgat Mangulihi Dang Acaryya Bhuti.[177] Raja memerintahkan agar anugerah Sri Maharaja Sang Lumah i Pastika itu jangan diubah-ubah.[178] Seperti telah dikatakan di atas tokoh ini kemungkinan besar identik dengan raja Rakai Pikatan.

---

[176] KO, XX

[177] Di dalam prasasti dikatakan *sangka yan sinukerta pamuatnya de samgat mangulihi dang acaryya bhuti*. Istilah *sukerta* sebenarnya berarti pekerjaan yang baik, telah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Rupa-rupanya dalam peminjaman istilah bahasa Sanskerta itu telah terjadi perubahan arti, sehingga *sukerta* dalam hal ini berarti disturbing (Lihat J. Gonda, Sanskrit in Indonesia, hlm. 371)

[178] Yang menarik perhatian adalah bahwa di dalam prasasti ini kata-kata raja Daksa itu seolah-olah dikutip: Mengapa mesti mengubah anugerah Sang Dewata di Pastika kepada Sang Hyang Dharmma di Wintang Mas? Bukankah telah ditetapkan bahwa kewajibannya adalah memberi persembahan kepada *bhatara* Haricandana setiap tiga tahun tanpa kecuali

Tidak ada peristiwa sejarah yang penting yang termuat di dalam beberapa prasasti raja Daksa yang telah ditemukan. Hanya ada satu hal yang barangkali perlu dicatat di sini, yaitu bahwa di dalam prasasti Sugih Manek tahun 837 Saka (13 September 915 M)[179] disebut permaisuri raja di antara mereka yang memperoleh persembahan, dengan sebutan Rakryan Binihaji Parameswari. Ada lagi satu prasasti dari masa pemerintahan Daksa yang cukup menarik, bukan karena disebutkannya suatu peristiwa sejarah politik, melainkan suatu tindakan keagamaan. Prasasti itu berupa dua lempengan kecil, satu dari emas dan satu dari perak, berasal dari Desa Pesindon, Kabupaten Wonosobo, berangka tahun 836 Saka (14 Agustus 914 M). Di dalam prasasti itu disebut bahwa pada hari Minggu Pon, paringkelan Tunglai, tanggal 14 Agustus 914 M, Dang Hyang Guru Siwita telah menyucikan diri bersama istrinya.[180] Sayang tidak jelas dengan upacara bagaimana ia menyucikan dirinya.

Rupa-rupanya perebutan kekuasaan di antara para pangeran tetap berjalan terus. Pu Daksa memerintah tidak lama. Pada tanggal 21 Desember 910 M ia masih menjabat Rakryan Mahamantri i Hino, dan prasasti yang pertama menyebutnya sebagai *maharaja* berasal dari tanggal 11 Februari 913 M. Rupa-rupanya ia naik takhta pada tahun 911 atau 912 M, sedangkan prasasti yang terakhir menyebutnya sebagai raja berangka tahun 13 September 915 M, yaitu prasasti Sugih Manek tersebut. Karena prasasti pertama raja yang menggantikannya, yaitu Rakai Layang Dyah Tlodhong Sri Sajjana Sanmatanuraga Tunggadewa, berasal dari tanggal 12 Juli 919 M, agak sulit untuk menentukan dengan agak tepat kapan Daksa itu turun takhta. Hanya dapat dikatakan di sini bahwa ia memerintah tidak lebih dari 8 tahun.

Seperti telah dikatakan, Daksa tidak menunjuk seorang putra mahkota (hino). Ternyata Rakai Layang dyah Tlodhong juga bukan pejabat eselon pertama dalam masa pemerintahan Daksa, yang biasanya diduduki para pangeran, putra-putra raja, atau kaum kerabat raja yang terdekat. Di dalam prasasti Poh Galuh atau Er Kuwing, yang sayang sekali angka tahunnya hilang, terang berasal dari masa pemerintahan Daksa,[181] dijumpai seorang

---

[179] OJO, XXX

[180] K.F. Holle, "Beschreven metalen plaatjes van desa Pesindon", TBG, XXV, 1879, hlm. 464 dan seterusnya. ROD, 1914, hlm. 331 (di bawah No. 1119). H. Kern, "Beschreven metalen plaatjes van Pesindon (Bagelen) (826 Çaka)", VG, VII, hlm. 11–15. Bersama dengan prasasti ini diketemukan pula beberapa arca emas dan perak, berupa satu arca Siwa, arca Siwa-Parwati, dan sebuah lingga emas, 5 arca Siwa, 2 arca Parwati, sebuah arca Siwa-Parwati, sebuah arca Brahma, sebuah arca Wisnu, 4 arca perempuan yang belum jelas identifikasinya, sebuah *prabhamandala*, dan lapik sebuah lingga, semuanya dari perak. Juga ada kristal bulat dengan embanannya dari perak

Rakryan Layang di antara pejabat yang menerima persembahan, rupa-rupanya sebagai penguasa atas Desa Poh Galuh dan Er Kuwing yang ditetapkan oleh raja menjadi sima.[182] Akan tetapi, kemungkinan Rakryan Layang di sini identik dengan Sri Maharaja Rakai Layang dyah Tlodhong agak tipis, karena kemungkinan lebih besar ia seorang perempuan, sekalipun ia termasuk golongan bangsawan tinggi, karena persembahan yang diterimanya disebut kain, dan bukan *wdihan*, dari jenis *kalyaga*, yang biasanya diterima oleh pejabat eselon pertama.[183] Mengingat hal itu kemungkinan besar Rakryan Layang dalam prasasti Poh Galuh itu adalah putri raja, dan Sri Maharaja Rakai Layang dyah Tlodhong ialah suaminya. Bagaimanapun juga, ia bukan orang yang ditetapkan sebagai calon pewaris takhta kerajaan. Dengan perkataan lain, ia naik takhta karena berhasil merebut kekuasaan dari pewaris yang sah.

Seperti telah dikatakan, agak sulit mengatakan kapan Pu Daksa turun takhta dengan perkataan lain sulit juga menentukan kapan Rakai Layang dyah Tlodhong mulai memerintah. Jarak antara terminus post quem dan terminus ante quem lebih dari 3a tahun. Pada tanggal 7 Maret 927 M, yaitu tanggal prasasti Hariñjing C, rupa-rupanya ia masih memerintah, karena di dalam prasasti itu masih disebut Rake Sumba sebagai salah seorang Sang Pamgat Momahumah. Pada tanggal 14 Februari 923 M, yaitu tanggal prasasti Wulakan,[184] Rake Sumba dyah Wawa sudah menjadi raja. Rakai Layang dyah Tlodhong memerintah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi tidak lebih dari 12 tahun.

Keterangan yang cukup penting terdapat di dalam prasasti Lintakan tahun 841 Saka (12 Juli 919 M).[185] Di dalam prasasti ini diperingati penetapan hutan di Lintakan yang masuk wilayah Malintaki dan hutan di Tunah yang masuk wilayah Pinapan menjadi sima, dan penetapan kewajiban mengairi sima itu bagi sebuah parit yang ada di Weru yang masuk wilayah Manganjar dan di Marhyang. Ada sebidang sawah di Desa Kasugihan seluas 1 *tampah*, yang terletak disebelah timur tanah di Tunah dan Lintakan, dibeli raja dari

---

[181] KO, XVII

[182] Desa Poh Galuh dan Er Kuwing itu disebut watak Layang, jadi termasuk daerah lungguh Rakryan Layang. Sayang sekali nama Rakryan Layang itu sendiri tertera pada bagian kiri prasasti yang hilang

[183] Persembahan untuk perempuan biasanya disebut kain, dengan satuannya hlai atau wlah, sedang untuk laki-laki disebut *wdihan*, dengan satuannya yugala. Kain jenis *kalyaga* sering diterima sebagai persembahan oleh raja sendiri; juga oleh *rakryan mahamantri i hino*, i halu, i sirikan, i wka, dan *samgat* tiruan. Jadi, jelas kiranya bahwa Rakryan Layang itu seorang putri raja

[184] R. Goris, "De Oude-Javaansche inscripties uit het Sri Wedari Museum to Soerakarta", OV, 1928, hlm. 63–70

[185] KO, I

penduduk Desa Kasugihan seharga 1 *kati*, 13 dharana, dan 6 *masa* perak, dan ikut ditetapkan menjadi sima. Kewajiban sima itu ialah mempersembahkan caru di caitya (bangunan suci) ayah raja yang ada di Turu Mangambil. Tanah-tanah yang dijadikan sima itu terletak di sebelah selatan tembok keraton, karena itu semua pejabat kerajaan dengan juru bicaranya mendapat persembahan.[186]

Di dalam prasasti ini raja menyebutkan tempat pendharmaan ayahnya yang ada di Turu Mangambil. Dengan menyebutkan ayahnya itu, kuatlah dugaan bahwa ia bukan pewaris takhta yang sah. Hal yang serupa akan dapat dilihat nanti pada raja yang berikut, yaitu Rakai Sumba dyah Wawa. Keterangan yang juga menarik di dalam prasasti ini ialah bahwa raja telah membeli tanah dari rakyat Desa Kasugihan. Memang ada beberapa prasasti lagi yang menyebutkan bahwa raja membeli tanah dari rakyat. Masalah ini akan dibicarakan di dalam uraian selanjutnya.

Dalam masa pemerintahan Rakai Layang anugerah Sang Lumah i Pastika kepada Dyah Dewa dan Dyah Babru untuk tidak lagi membayar pajak kepada Samgat Mangulihi dipermasalahkan lagi. Sekarang Samgat Mangulihi dang Acaryya Bamadewa, mungkin sekali pengganti Dang Acaryya Bhuti, yang menghalang-halangi persembahan kedua orang itu kepada Sang Hyang Dharmma i Wintang Mas. Rupa-rupanya Dyah Wijaya telah meninggal karena tidak lagi disebut di dalam prasasti. Kedua orang itu memperlihatkan prasasti mereka kepada putra mahkota, yaitu Rakryan Mapatih i Hino pu Ketuwijaya. Sekali lagi putra mahkota mengukuhkan anugerah Sang Dewata Sang Lumah i Pastika kepada Dyah Dewa dan Dyah Babru. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 919 M.[187]

Masalah yang rupa-rupanya memerlukan penanganan kembali dalam masa pemerintahan Rakai Layang dyah Tlodhong adalah masalah bendungan di Kali Hariñjing. Pada hari Rabu Legi, paringkelan Haryang, tanggal 19 September 921 M, raja memerintahkan agar perintah (raja) yang didharmakan

---

[186] *ikeng lmah sinusuk. lmah kidul ni turus ike. kmitan i mamrati tilimpik ike. kunon matannyan ilu tanda rakryan kabeh kinanan pasak pasak. muan parujar nira.* Seperti telah dikatakan di atas istilah turus ditafsirkan sebagai tembok kota, dalam hal ini pusat kerajaan (ibu kota kerajaan), yang terbuat dari batang-batang kayu, seperti yang digambarkan di dalam beberapa berita Cina

[187] Prasasti ini diperingati dengan prasasti Wintang Mas B tahun 841 Saka. Rupa-rupanya Pu Ketuwijaya memerintahkan menulis pengukuhan oleh raja Daksa dan pengukuhannya sendiri pada satu prasasti, sehingga prasasti Wintang Mas itu memuat dua tanggal, yang masing-masing memperingati pengaduan Dyah Dewa, Dyah Babru, dan Dyah Wijaya kepada raja Pu Daksa, dan pengukuhan yang diberikan oleh raja (Wintang Mas A), dan pengaduan kepada putra mahkota Pu Ketuwijaya serta pengukuhannya kembali (Wintang Mas B)

di Kwak, yaitu penetapan sima bagi Bhagawanta Bari di Culanggi,[188] yang telah membuat bendungan di Kali Hariñjing, dikukuhkan lagi untuk anak-anaknya, yang tersebar di desa-desa Culanggi, Wulahya, Waruk, Sambung, dan Wilang. Desa-desa mereka itu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, kecuali hanya 1 *suwarna* perak pada tiap tanggal 3 bulan Caitra yang harus dipersembahkan kepada raja, Desa Wilang dikenai 4 *masa* dan Desa Wulahya 1 *masa*. Kemudian pada hari Rabu Legi, paringkelan Was, tanggal 7 Maret 927 M, anak-anak Bhagawanta Bari di Culanggi sebanyak 12 orang memperlihatkan prasasti mereka kepada Rake Hino pu Ketudhara, atas saran dari Sang Pamgat Momahumah, mohon prasasti itu ditulis di atas batu. Permohonan itu dikabulkan. Rupa-rupanya prasasti yang kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta, ialah prasasti yang ditulis di atas batu atas perkenan Pu Ketudhara itu, yang memperingati tiga peristiwa sejak tahun 726 Saka (25 Maret 804 M).[189]

Sebuah prasasti yang merupakan keputusan pengadilan memuat keterangan yang cukup menarik. Di dalam prasasti ini dipermasalahkan status kewarganegaraan Sang Dhanadi, penduduk Desa Wurudu Kidul yang masuk wilayah Halaran. Dikatakan bahwa pada hari Sabtu Wage, paringkelan Was, tanggal 20 April tahun 922 M, Sang Dhanadi diberi surat jayapatra oleh *Sang Pamgat i Padang pu Bhadra, Samgat Lucem pu Ananta, tuhan i kanayakan pu Suming* dan juru lampuran Rake Rongga. Adapun sebabnya ialah karena pada suatu hari Sang Dhanadi ditegur oleh Sang Pamgat Manghuri yang bernama Wukajana, dikira ia seorang *weka Kilalan* pada *manghuri*.[190] Maka ia mengadukan halnya kepada sang *tuhan* di Padang di *pakaranan* semua.[191]

---

188 P.V. van Stein Callenfels, "De inscriptie van Soekaboemi", MKAW-L, serie B, deel 78, no. 4, 1934, hlm. 115–130, ill; van Stein Callenfels membaca *sang lumah ri twak dan bhagawanta bari i wulanggi.* Huruf ta dan ka, demikian pula wa dan ca amat mirip satu dengan yang lain. L-C Damais membaca Bhagawanta Dhari. Memang pada baris yang ketiga orang dapat ragu antara ba dan dha; tetapi setelah diperhatikan benar tempat-tempat yang lain di dalam prasasti ini di sini dipilih pembacaan *Bari*

189 Di atas prasasti jelas tertera angka tahun 706 Saka. Akan tetapi, berdasarkan unsur-unsur penanggalannya L-C. Damais menetapkan bahwa angka tahun yang benar ialah 726 Saka (EEI, IV, hlm. 187–189)

190 *Kilalan* berasal dari kata *kilala* yang berarti menikmati (Zoetmulder, BKI, 132, 1970, hlm. 191). Jadi, *Kilalan* berarti yang dinikmati, dalam arti kelompok orang yang berkewajiban membayar pajak. Ternyata ia dikira orang asing, keturunan Khmer. Memang orang-orang asing, yang tentunya bekerja sebagai pedagang, disebut *wargga Kilalan* dalam beberapa prasasti dari zaman raja Airlangga

191 Arti kata pakaranan di sini belum jelas. Mestinya berasal dari kata *karana* yang berarti sebab. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah "tempat sebab-sebab pertikaian antara beberapa pihak diselidiki?" Dengan perkataan lain, diduga bahwa pakaranan adalah sidang pengadilan

Maka dipanggillah semua kaum-kaum keluarga Sang Dhanadi untuk ditanyai apakah nenek moyang Sang Dhanadi, kakeknya, neneknya, adalah *weka Kilalan* pada Sang Pamgat Manghuri. Didatangkan pula orang-orang yang tidak memihak, keturunan penduduk asli,[192] yang dapat menunjukkan bahwa nenek moyang Sang Dhanadi bukanlah *weka Kilalan* pada masa pemerintahan raja-raja yang memerintah sebelumnya. Datanglah orang-orang yang netral itu dari Desa Gerih, Kahuripan, dan Paninglaran. Mereka itu semuanya dengan tanpa ragu-ragu dan berani angkat sumpah menyatakan bahwa memang nenek moyang Sang Dhanadi, kakeknya, neneknya, buyutnya, semuanya adalah penduduk asli, dan bukan *weka Kilalan* pada Sang Pamgat Manghuri.

Akan tetapi, 16 hari kemudian ia menghadap ke pengadilan lagi. Soalnya ada seorang yang bernama Sang Pamariwa yang mendapat anugerah tanah di Manghuri dari Sang Pamgat Juru di Madandar. Maka Sang Pamariwa pada suatu hari memerintahkan Sang Dhanadi untuk memungut pajak di daerah Manghuri, karena ia disangka seorang keturunan Khmer. Karena Sang Dhanadi takut dikira berbuat yang tidak semestinya, maka ia menghadap ke pengadilan, mengadukan masalahnya. Maka Sang Pamariwa dipanggil menghadap untuk menjelaskan duduk persoalannya. Akan tetapi ia tidak mau datang, sekalipun sudah dikirim surat panggilan sampai dua kali. Maka ia dianggap kalah perkaranya, dan Sang Dhanadi sekali lagi diberi surat jayapatra, agar di kemudian hari status kewarganegaraannya tidak dipermasalahkan lagi.

Dari prasasti Wurudu Kidul itu diperoleh keterangan tentang adanya orang-orang asing yang menetap di kerajaan Mataram. Rupa-rupanya mereka itu yang mempunyai status yang berbeda dengan penduduk asli. Yang jelas ialah bahwa orang asing merupakan kelompok orang yang berkewajiban membayar pajak, yang mungkin disebabkan mereka itu merupakan kelompok pedagang yang kaya. Mungkin di samping usaha dagangnya mereka juga bertindak sebagai lintah darat, meminjamkan uang kepada penduduk atau bahkan para pejabat daerah atau desa yang memerlukan uang dalam jumlah yang banyak pada suatu kesempatan. Yang menarik perhatian ialah bahwa sampai pada masa pemerintahan raja Airlangga (1019–1042 M) di antara orang-orang asing itu tidak disebut orang Cina. Baru dalam zaman Majapahit ada keterangan bahwa ada orang Cina yang menetap di Indonesia.

Kapan pemerintahan Rakai Layang dyah Tlodhong berakhir, tidak diketahui. Pada tahun 849 Saka (14 Februari 928 M) muncul nama raja Dyah

---

[192] Yang diterjemahkan dengan penduduk asli di sini ialah kata wwang yukti yang secara harfiah berarti orang besar, benar

Wawa, yang menyebut dirinya anak *kryan ladheyan sang lumah ring alas*.[193] Nama Kryan Ladheyan mengingatkan kepada nama Rakryan Landayan di dalam prasasti Wuatan Tiga, adik ipar Rakai Kayuwangi pu Lokapala. Jadi jelas, bahwa ia bukan anak Rakai Layang dyah Tlodhong.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Dyah Wawa itu sama dengan Sri Ketudhara Manimantaprabha Prabhusakti Triwik*rama* yang menjabat *rakryan* mapatih i hino pada masa pemerintahan Rakai Layang dyah Tlodhong, karena dhara sama artinya dengan wawa (membawa).[194] Terhadap anggapan ini ada keberatan, yaitu kenyataan bahwa di dalam prasasti Hariñjing C tahun 849 Saka (7 Maret 927 M) perintah dikeluarkan oleh Rake Hino pu Ketu atas saran dari dua orang *pamgat* momahumah, yaitu Rake Sumba dan Sang Pamgat Anggehan Sang Parpat. Seperti telah diketahui bahwa Dyah Wawa mempunyai gelar *rakai*, Rakai Sumba atau Rakai Pangkaja. Kalau diidentifikasikan Sang Pamgat Momahumah Rakai Sumba dengan Rakai Sumba dyah Wawa berdasarkan persamaan gelar *rakai*-nya sebagai indikasi daerah lungguhnya, pendapat bahwa Dyah Wawa sama dengan Sri Ketudhara tidak dapat dipertahankan. Apalagi Sri Ketudhara juga disebut Pu Ketuwijaya di dalam prasasti Wintang Mas B tahun 841 Saka (12 Oktober 919 M).[195] Kalau anggapan itu benar, jelas bahwa Rakai Sumba dyah Wawa telah merebut kekuasaan dari putra mahkota, yaitu Rakryan Mapatih i Hino pu Ketuwijaya, atau Sri Ketudhara Manimantaprabha Prabhusakti Triwik*rama*. Sebagai anak Rakryan Landhayan, adik ipar Rakai Kayuwangi, memang ia tidak berhak atas takhta kerajaan Mataram.

Keterangan yang menarik dari masa pemerintahan Rakai Sumba dyah Wawa terdapat di dalam prasasti Sangguran, tahun 850 Saka (2 Agustus 928 M).[196] Dikatakan bahwa raja dan Rakryan Mapatih i Hino pu Sindok telah bernazar untuk menjadikan Desa Sangguran suatu perdikan dari *bhatara* di suatu bangunan suci yang ada di daerah sima kajurugusalyan di Manañjung. Yang menarik di sini ialah disebutkannya sima khusus bagi para juru gusali, yaitu para pandai (besi, perunggu, tembaga, dan emas). Di samping itu, telah disebutkan adanya sima kapatihan, yaitu sima yang dianugerahkan kepada patih-patih di Mantyasih yang telah berjasa kepada raja Rakai Watukura

---

193 Di dalam prasasti Wulakan. Lihat R. Goris, "De Oud-Javaansche inscripties uit het Sri-Wedari museum te Soerakarta", OV, 1923, hlm. 63–70

194 R.Ng. Poerbatjaraka, "Naschrift op Dr. W.F. Stutterheim: Was Sindok in een vorstendynastie ingehuwd?", TBG, LXXII, hlm. 622–625

195 KO, XX

196 OJO, XXXI

Dyah Balitung. Jadi, mungkin pada masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa ada sekelompok pandai, atau seorang pemuka pandai, yang berjasa kepada raja.[197]

Ada beberapa prasasti yang lain dari masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa, yaitu prasasti Air Kali,[198] prasasti Kinawe tahun 849 Saka (28 Februari 928 M)[199], prasasti Kambang Sri B (Jedung)[200] dan prasasti dari Blota[201], tetapi sayang sekali semuanya dalam keadaan amat aus, sehingga masih sulit untuk dibaca dan diketahui isinya.

Masa pemerintahan Rakai Sumba berakhir dengan tiba-tiba, mungkin sekali karena letusan Gunung Merapi yang terhebat dalam sejarahnya. Menurut R.W. van Bemmelen letusan itu demikian dahsyatnya sehingga sebagian besar puncaknya lenyap dan terjadi pergeseran lapisan tanah ke arah barat daya sehingga terjadi lipatan yang antara lain membentuk Gunung Gendol, karena gerakan tanah itu terbentur kepada lempengan pegunungan Menoreh. Sudah barang tentu letusan itu disertai gempa bumi, banjir lahar, dan hujan abu dan batu-batuan yang sangat mengerikan.[202] Bencana alam ini mungkin merusak ibu kota Medang dan banyak daerah permukiman di Jawa Tengah, sehingga oleh rakyat dirasakan sebagai pralaya atau kehancuran dunia.

Kaum kerabat raja dan pejabat tinggi kerajaan, serta rakyat yang daerahnya tertimpa bencana itu lari mengungsi ke arah timur, karena gempa yang terhebat tentunya melanda daerah sebelah barat daya Gunung Merapi. Di Jawa Timur, di daerah yang sudah dikenal ada penguasa daerah yang tunduk kepada Mataram, yaitu daerah Kanuruhan, Pu Sindok membangun ibu kota baru, yaitu di Tamwlang.[203] Sesuai dengan landasan kosmogonis kerajaan, kerajaan baru itu dianggap sebagai dunia baru, dengan tempat-tempat pemujaan yang baru, dan diperintahkan oleh wangsa yang baru pula. Meskipun Pu Sindok sebenarnya masih anggota wangsa Sailendra,

---

[197] Hal ini mengingatkan kepada cerita di dalam kitab Pararaton tentang Mpu Gandring, yang keturunan-keturunannya mendapat hak-hak istimewa dari Sri Rajasa. Dapat diharapkan bahwa keturunan-keturunan Mpu Gandring itu mendapat anugerah sima kajurugusalyan

[198] H. Kern, VG, VII, 1917, hlm. 179–185

[199] OJO, XXXII

[200] OJO, XXXIIL

[201] OJO, XXXIV

[202] R.W. van Bemmelen, The Geology of Indonesia, 1949, hlm. 560–562, Boechari, "Some considerations on the problem of the shift of Mataram's Center", Bulletin of the Research Centre of Archaeology of Indonesia, no. 10, 1976, hlm. 15–16

[203] Keterangan tentang ibu kota Tamwlang itu didapatkan di dalam prasasti Turyyan tahun 851 Saka (929 M)

mengingat kedudukannya sebagai *rakryan* mapatih i halu dan i hino pada masa pemerintahan Rakai Layang dan Rakai Sumba, ia dianggap sebagai pendiri wangsa baru, yaitu wangsa *Isana*.

B. Wangsa Isana

1. Asal Usul Wangsa Isana

Istilah wangsa *Isana* dijumpai di dalam prasasti Pucangan, di bagian yang berbahasa Sanskerta. Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Airlangga pada tahun 963 Saka (1041 M).[204] Bagian yang berbahasa Sanskerta itu mulai dengan penghormatan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang disusul dengan penghormatan kepada raja Airlangga. Selanjutnya dimuat silsilah raja Airlangga, mulai dari raja Sri *Isana*tungga atau Pu Sindok. Sri *Isana*tungga mempunyai anak perempuan, bernama Sri *Isana*tunggawijaya, yang menikah dengan Sri Lokapala, dan mempunyai anak bernama Sri Makutawangsawarddhana, yang di dalam bait ke-9 sengaja disebut keturunan wangsa *Isana*.

Seperti yang dapat dilihat, dari silsilah tersebut maka pendiri wangsa ini adalah Pu Sindok Sri *Isana*wikramma Dharmmotunggadewa. Mengingat kedudukannya di dalam masa pemerintahan Rakai Layang dyah Tlodhong dan Rakai Sumba dyah Wawa, yaitu berturut-turut sebagai *rakryan* mapatih i halu dan *rakryan* mapatih i hino, yang biasanya hanya dapat dijabat oleh kaum kerabat raja yang dekat, tentulah ia masih anggota wangsa Sailendra. Akan tetapi, karena kerajaan Mataram di Jawa Tengah mengalami kehancuran karena letusan Gunung Merapi yang mahadahsyat, sehingga dalam anggapan para pujangga hal itu dianggap sebagai pralaya (kehancuran dunia pada akhir masa Kaliyuga), sesuai dengan landasan kosmogonis kerajaan-kerajaan kuno haruslah dibangun kerajaan baru dengan wangsa yang baru pula. Oleh karena itu, Pu Sindok, yang membangun kembali kerajaan di Jawa Timur, dianggap sebagai cikal bakal wangsa baru, yaitu wangsa *Isana*.

Rupa-rupanya kerajaan yang baru itu tetap bernama Mataram, sebagai mana ternyata dari prasasti Paradah tahun 865 Saka (943 M)[205] dan prasasti Añjukladang tahun 859 Saka (937 M).[206] Ibu kotanya yang pertama adalah Tamwlang. Nama ini terdapat pada akhir prasasti Turyyan tahun 851 Saka

---

[204] H. Kern, "De Steen van den berg Penanggungan (Surabaya), thans in't Indian Museum te Calcutta", VG, VII, 1917, hlm. 83–114

[205] OJO, XLVIII

[206] OJO, XLVI

(929 M).[207] Letak Tamwlang, yang hingga kini hanya ditemui di dalam prasasti Turyyan itu saja, mungkin di dekat Jombang sekarang, di sana masih ada Desa Tambelang.

Kedudukan Pu Sindok dalam keluarga raja-raja yang memerintah di Mataram itu memang dipermasalahkan. Poerbatjaraka berpendapat bahwa Pu Sindok adalah menantu Wawa, berdasarkan prasasti Cunggrang yang menyebut *sang siddha dewata rakryan bawa yayah rakryan binihaji sri parameswari dyah kebi* (yang telah diperdewakan, Rakryan Bawa, ayah Sri Parameswari dyah Kebi). Rakryan Bawa diidentifikasikannya dengan Rakai Sumba dyah Wawa. Selain itu, Poerbatjaraka juga mengemukakan alasan lain, yaitu bahwa Pu Sindok bergelar abhiseka yang mengandung unsur kata dharmma, yang menurut pendapatnya menunjukkan bahwa raja yang bergelar demikian itu naik takhta karena perkawinan.[208]

Stutterheim membantah pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa pertama nama Bawa itu harus dibaca Bawang, karena jelas ada anuswara di atas huruf wa. Selain itu, raja Wawa tidak pernah bergelar Rakai atau Rakryan Wawa, tetapi Rakai Sumba atau Rakai Pangkaja dyah Wawa.[209] Lagi pula k*e*bi berarti nenek. Oleh karena itu, Stutterheim berkesimpulan bahwa yang diperdewakan di Cunggrang itu ialah Rakryan Bawang p-u Partha, yang selalu muncul di dalam prasasti-prasasti Rakai Kayuwangi, ayah nenek Pu Sindok. Nenek Pu Sindok itu ialah permaisuri Daksa, yang disebut di dalam prasasti Limus (Sugih Manek) tahun 837 Saka (915 M).[210] Dengan perkataan lain, Pu Sindok adalah cucu Daksa.[211]

Akan tetapi, seperti yang telah dikemukakan, Pu Sindok pernah memangku jabatan Rakai Halu dan Rakryan Mapatih i Hino, yang menunjukkan bahwa

---

[207] J.G. de Casparis,"Where was Pu Sindok's Capital situated", dalam H.I.R. Hinzler (ed.) Studies in South and Southeast Asia Archeology, Jilid 2, 1989, hlm. 39–52

[208] R.Ng. Poerbatjaraka, "De naam Dharmawangça", TBG, LXX, 1930, hlm. 171–183

[209] W.F. Stutterheim, "Was Sindok in een vorstendynastie ingehuwd?", TBG, LXXII, 1932, hlm. 618–621

[210] OJO, XXX, A. 30

[211] W. F. Stutterheim, "Epigraphica. IV. Nog eens Sindok's dynastieke positie", TBG, LXXV, 1935, hlm. 456–462. Sebenarnya di dalam prasasti-prasasti Rakai Kayuwangi tidak pernah dijumpai nama Rakryan Bawang pu Partha, yang ada ialah Samgat Bawang pu Partha. Karena kedudukan rakryan dan *pamgat* sesungguhnya berbeda, perlu juga dicari kemungkinan yang lain. Di dalam masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung Daksa menjabat sebagai *rakryan mahamantri i hino*, ada juga rakryan bawang, yaitu Rake Bawang pu Manglawan di dalam prasasti Ayam Teas tahun 822 Saka atau 901 M. (W.F. Stutterheim, JBG, V, 1938, hlm. 121–122) dan Rakryan Bawang Dyah Sra/h/wana di dalam prasasti Kaladi tahun 831 Saka (909 M)

ia pewaris takhta kerajaan yang sah, siapa pun ayahnya. Jadi, ia tidak perlu harus kawin dengan putri mahkota untuk dapat menjadi raja.[212]

Pu Sindok sekurang-kurangnya memerintah sejak tahun 929 M sampai dengan 948 M. Dari masa pemerintahannya didapatkan sekitar 20 prasasti yang sebagian besar tertulis di atas batu. C.C. Berg mengatakan bahwa semua prasasti atas nama raja Pu Sindok itu adalah prasasti palsu, yang dibuat para pujangga raja Dharmmawangsa Airlangga, karena raja ini memerlukan pengesahan (legitimasi) dengan menciptakan leluhur (wangsakara). Untuk itu para pujangga memilih nama seorang pejabat tinggi dalam zaman Mataram sewaktu masih berpusat di Jawa Tengah, yaitu Pu Sindok. Silsilah raja Dharmmawangsa Airlangga kemudian diumumkan di dalam prasasti Pucangan. Dengan perkataan lain, ia berpendapat bahwa tidak pernah ada seorang raja yang bernama Pu Sindok dalam sejarah Indonesia. Salah satu alasannya adalah kenyataan bahwa semua prasasti Pu Sindok itu strukturnya sama saja hingga membosankan.[213]

Terhadap pendapat itu dapat dikemukakan keberatan, antara lain bahwa memang prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja mempunyai ciri-ciri yang sama, yang membedakannya dengan prasasti yang dikeluarkan oleh raja yang lain.[214] Selain itu, dapat dicatat di sini bahwa tempat pendarmaan Pu Sindok ada disebut di dalam prasasti, yaitu *Isana*bhawana, yang disebut di dalam prasasti Kamalagyan dan di dalam prasasti Pucangan.[215] Ini menunjukkan bahwa Pu Sindok benar-benar pernah ada dalam sejarah karena di dalam masyarakat Jawa kuno rasanya tidak mungkin orang menyebut bangunan suci tempat memuja arwah seseorang kalau tokohnya dan bangunan suci itu tidak benar-benar ada. Selain itu, andaikan Pu Sindok itu tidak pernah ada, lalu apa yang terjadi antara tahun 927 M dan 949 M?

Sebagian besar prasasti Pu Sindok berkenaan dengan penetapan sima bagi suatu bangunan suci, kebanyakan atas permintaan pejabat atau rakyat suatu desa. Yang ditetapkan menjadi sima atas perintah raja sendiri hanyalah Desa Linggasutan dan sawah ka*kati*kan(?) di Añjukladang. Di dalam

---

212 Bandingkan Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino ...", 1962, hlm. 55–83

213 C.C. Berg, "Javanese historiography. A synopsis of its evolution", dalam D.G.E. Hall (ed.), Historians of Southeast Asia, 1963, hlm. 18. Lihat juga C.C. Berg, "Het rijk van de vijfvoudige Buddha", VKNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel LXIX, no. 1, hlm. 24–25

214 Boechari, "Çri Maharaja Mapañji Garasakan", MISI, jilid IV, no. 1, 2, 1968, catatan no. 12 hlm. 15

215 *"pitung çri maharaja haji dewata sang lumah ring isanabajra* (Pucangan A. 13–14), *makamukhya bhuktyan sang hyang dharmma ring isanabhawana mangaran ing surapura"* (OJO, LXI, A. 9)

216 OJO, XXXIX, L-C. Damais, EEI, IV, 1955, hlm. 56

prasasti Linggasutan tahun 851 Saka (929 M)[216] dikatakan bahwa raja telah memerintahkan agar Desa Linggasutan yang termasuk wilayah Rakryan Hujung, dengan penghasilan pajak sebanyak 3 (?) emas dan kewajiban kerja bakti seharga 2 *masa* setiap tahunnya,[217] ditetapkan menjadi sima dan dipersembahkan kepada *bhatara* di Walandit,[218] untuk penambah biaya pemujaan terhadap *bhatara* di Walandit setiap tahunnya. Hal itu memang telah menjadi niat raja.

Di dalam prasasti Añjukladang tahun 859 Saka (937 M)[219] dikatakan bahwa raja Pu Sindok telah memerintahkan agar tanah sawah ka*kati*kan (?) di Añjukladang[220] dijadikan sima, dan dipersembahkan kepada *bhatara* di sang hyang prasada kabhaktyan di Sri Jay*amerta*, dharmma dari Samgat Añjukladang. Itu merupakan anugerah raja bagi penduduk Desa Añjukladang. Sayang sekali prasasti ini bagian atasnya usang sehingga tidak jelas apa sebabnya penduduk Desa Añjukladang itu mendapat anugerah raja. Menurut J.G. de Casparis prasasti Añjukladang itu mengandung keterangan tentang adanya serbuan dari Malayu (Sumatra). Tentara Malayu bergerak sampai dekat Nganjuk, tetapi dapat dihalau oleh pasukan raja di bawah pimpinan Pu Sindok yang waktu itu masih belum menjadi raja. Atas jasanya yang besar terhadap kerajaan itu Pu Sindok kemudian diangkat menjadi raja.[221] Sayang sekali bahwa prasasti Añjukladang itu belum terbaca seluruhnya. Apa yang terdapat dalam transkripsi Brandes tidak membayangkan adanya peperangan itu, sekalipun ada juga didapatkan kata jayastambha, yaitu keterangan bahwa di tempat sang hyang prasada itu dibangun pula jayastambha, yaitu tugu kemenangan.[222]

---

217 Apa yang tertera pada transkripsi Brandes kurang jelas. Mungkin ada kekurangan entah karena salah cetak, atau kekurangan dari penulis prasasti, yaitu angka di belakang kata *kati*k (?) dan keterangan mengenai jumlah emas itu

218 Oleh J.G. de Casparis "Oorkonde uit het Singosarische (midden 14^{e} eeuw A.D.)", INI, afl. 1, 1940, hlm. 52, Walandit diperkirakan ada di Desa Wonorejo, Malang

219 OJO, XLVI. Angka tahun prasasti itu hanya terbaca angka ratusan dan satuannya saja. Brandes membacanya 8–7, tetapi berdasarkan unsur-unsur penanggalannya Damais menetapkan angka tahunnya sebagai 859 Saka. Memang angka 7 mirip dengan angka 9, sama-sama memiliki semacam *tanda* layar di atasnya (L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 156–158)

220 Pada bagian ini prasastinya usang sehingga nama Añjukladang di tempat ini tidak ada dalam transkripsi Brandes. Akan tetapi, berdasarkan pembacaan di bagian lain dapat diketahui bahwa di sini diharapkan kalimat yang berbunyi "*kumonakan ikanang lmah sawah kakatikan iyañjukladang tutugan i tanda susukan ....*"

221 J.G. de Casparis, Airlangga, Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar pada FKIP Universitas Airlangga, Surabaya, 1958

222 *Parnnaha nikanang lmah unggwani sang hyang prasada ateherang jayastambha. Mungkin de Casparis* telah berhasil membaca lebih banyak dari Brandes

Bhatara i Walandit juga dijumpai lagi di dalam prasasti Muñcang tahun 866 Saka (944 M).[223] Di dalam prasasti ini diperingati perintah raja untuk menetapkan sebidang tanah di sebelah selatan pasar di Desa Muñcang yang masuk wilayah Rakryan Hujung menjadi sima oleh Samgat (...) Dang Acaryya Hitam, untuk mendirikan prasada kabhaktyan bernama Siddhayoga, tempat para pendeta melakukan persembahan kepada *bhatara* setiap hari, dan mempersembahkan bunga kepada *bhatara* di Sang Hyang Swayambhuwa di Walandit.

Rupa-rupanya Rakryan Hujung, yang ternyata bernama Pu Madhuralokarañjana, amat besar amalnya di bidang keagamaan. Di dalam prasasti Gulung-gulung tahun 851 Saka (929 M)[224] ia mohon kepada raja agar diperkenankan menetapkan sawah di Desa Gulung-gulung dan sebidang hutan di Bantaran menjadi sima, dengan tujuan menjadikannya tanah wakaf (dharmmak*s*etra) berupa sawah bagi bangunan suci Rakryan Hujung yaitu mah*a*prasada di Himad. Penghasilan sawah tersebut juga diperuntukkan bagi persembahan kepada Sang Hyang Kahyangan di Pangawan, berupa seekor kambing dan 1 pada beras, yang diadakan setahun sekali pada waktu ada upacara pemujaan bagi *bhatara* yang ada di Pangawan itu. Hal itu disebabkan dahulu kala Kahyangan di Pangawan itu ada di Gunung Wangkedi. Oleh karena itu, sebenarnya hanya ada satu *bhatara* yang dipuja, baik di Pangawan maupun di Himad. Kalau sedang diadakan pemujaan di Pangawan, Himad mengikuti saja apa yang dilakukan di Pangawan, demikian pula sebaliknya. Upacara pemujaan di kedua bangunan suci itu dilakukan pada tiap equinox, yaitu pada saat matahari melintasi garis khatulistiwa pada bulan Maret dan September. Selain itu, di dalam prasasti Gulung-gulung itu masih disebutkan lagi beberapa daerah sima, yaitu di Batwan, di Guru, di Air Gilang, di Gapuk, dan di Mbang (?), yang berkewajiban pula memberi persembahan kepada Sang Hyang Prasada di Himad pada tiap equinox, dengan perincian kewajiban masing-masing daerah sima itu.

Di dalam prasasti Jeru-jeru tahun 852 Saka (930 M)[225] Rakryan Hujung mohon kepada raja agar diperkenankan menetapkan Desa Jeru-jeru yang merupakan anak Desa Linggasutan yang masuk wilayah Rakryan Hujung sendiri,[226] menjadi tanah wakaf berupa sawah bagi bangunan suci Rakryan Hujung, yaitu Sang Sala di Himad. Permohonan itu dikabulkan raja.

---

[223] OJO, LI

[224] OJO, XXXVIII

[225] OJO, XLIII

[226] Belum jelas benar apa yang dimaksudkan dengan anak desa (*ranak ni wanua i linggasutan watak hujung*) di dalam prasasti. Apakah berarti dukuh yang ada di bawah kepala Desa Jeru-jeru, atau salah satu desa di dalam kelompok yang merupakan kesatuan *pañaturdesa* atau *pangastadesa*, dengan Jeru-jeru sebagai pusatnya

Bangunan suci di Walandit yang memperoleh beberapa daerah sima atas persetujuan dan perintah Pu Sindok itu ternyata masih ada dalam zaman Majapahit; sebagaimana ternyata dari prasasti Himad/Walandit yang sayang tidak berangka tahun, tetapi dikeluarkan pada waktu Gajah Mada menjabat rakryan mapatih di Janggala dan Kadiri.[227] Di dalam prasasti ini disebutkan tentang persengketaan antara penduduk Desa Walandit dengan penduduk Desa Himad mengenal status dharma kabuyutan di Walandit, yang oleh penduduk Desa Walandit dikatakan berstatus swatantra, dan berhak penuh atas Desa Walandit, sebagaimana telah dikukuhkan oleh prasasti yang bercap kerajaan Pu Sindok.[228]

Menurut J.G. de Casparis, Walandit itu terletak di Desa Wonorejo sekarang di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dahulu Desa Wonorejo itu bernama Balandit. Pada peta topografi, lembar XLII 54–D (1918–1923) masih dijumpai dukuh bernama Blandit, yang masuk wilayah Desa Wonorejo.[229] Oleh karena itu, apabila di dalam prasasti Muñcang disebut *sang hyang swayambhuwa i walandit*, bangunan suci itu diidentifikasikannya dengan suatu candi untuk pemujaan Gunung Bromo, karena Swayambhu ialah nama lain dari Dewa Brahma, dan kenyataan bahwa Desa Wonorejo tidak seberapa jauh dari Gunung Bromo itu.

Penetapan sima atas permintaan pejabat atau rakryan dijumpai dalam beberapa prasasti yang lain. Dapat disebutkan di sini penetapan sebidang sawah di Desa Paradah menjadi sima kabikuan oleh para warga *wahuta* di Paradah.[230] Pembelian sawah dan tanah pagagan di Taging di Desa Paradah oleh Sang Sluk untuk dijadikan sima dan dipersembahkan kepada Sang Hyang Dharmma Kamulan, sebagai tindakan amal Sang Sluk (*i punya sang Sluk*) dan agar hendaknya turun-temurun pada anak cucu cicit piutnya.[231] Permohonan Dang Acaryya /?/ kepada raja untuk mengukuhkan status sima kabikuan di Poh Rinting.[232] Penetapan sebidang sawah ka*kati*kan di Desa Hering yang masuk wilayah Margganung, tetapi di bawah kekuasaan Wahuta Hujung, dan tanah perumahan sebagai sima oleh Samgat Margganung pu Danghil bagi

---

[227] J.G. de Casparis, "Oorkonde uit het Singosarische ...", hlm. 50–61

[228] *maka wyakti hanang prasasti sendok lanchita, makarasa magehaken sang hyang dharma kabuyutan, an swatantradeg rining* (baca: ringgit) *jataka punpunan hetu*

[229] J.G. de Casparis, op. cit., hlm. 51

[230] Prasasti Paradah I tahun 856 Saka (934 M), OV, 1915, hlm. 68

[231] Prasasti Paradah II tahun 865 Saka (943 M), OJO, XLVIII

[232] Prasasti Poh Rinting tahun 851 Saka (929 M), OJO, XL. Sayang sekali nama dang acaryya itu tidak terbaca

sebuah biara yang telah dibeli oleh Pu Danghil dan istrinya yang bernama Dyah Pendel seharga 16 *suwarna* emas. Dengan demikian, dua orang suami istri itu sama-sama berbuat amal.[233] Terakhir dapat disebutkan di sini persembahan Dapungku i Manapujanma berupa sebidang sawah untuk dijadikan sima bagi Sang Hyang Prasada Kabhaktyan di daerah Pangurumbigyan di Kampak.[234]

Prasasti Turyyan tahun 851 Saka (929 M) memberi keterangan tentang permohonan Dang Atu pu Sahitya untuk memperoleh sebidang tanah bagi pembuatan bangunan suci. Permohonan itu dikabulkan raja, dan diambilkan sebidang sawah di Desa Turyyan yang menghasilkan pajak sebesar 3 *suwarna* emas. Pajak yang dihasilkan Desa Turyyan setahun ialah 1 *kati* dan 3 *suwarna* emas; yang 3 *suwarna* itulah yang dianugerahkan kepada Dang Atu. Ditambah lagi dengan sebidang tanah tegalan di sebelah barat sungai dan tanah di sebelah utara pasar Desa Turyyan. Tanah yang di sebelah barat sungai itu untuk tempat mendirikan bangunan suci, dan penduduknya hendaknya bekerja bakti membuat bendungan terusannya sungai tadi, mulai dari Air Luah; sedang tanah di sebelah utara pasar itu untuk kamulan dan pajak yang 3 *suwarna* emas itu, sebagai sumber biaya pemeliharaan bangunan suci. Selebihnya dijadikan sawah untuk tambahan sawah sima bagi bangunan suci itu.

Prasasti Turyyan itu hingga kini masih di tempat aslinya, yaitu di Dukuh Watu Godeg, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Turen (nama asli), Kabupaten Malang. Mungkin penelitian lebih saksama dapat mengungkapkan letak bendungan itu (atau waduk?) di masa dahulu.

Ada juga prasasti yang memperingati pembuatan bendungan, yaitu prasasti Wulig tahun 856 Saka (935 M). Di dalam prasasti itu disebutkan perintah Rakryan Binihaji Rakryan Mangibil, rupa-rupanya permaisuri atau salah seorang selir Pu Sindok,[235] kepada Samgat Susuhan agar memerintahkan penduduk Desa Wulig; Pangiketan, Padi Padi, Pikatan, Panghawaran, dan Busuran untuk membuat bendungan, dengan peringatan jangan hendaknya ada yang berani mengusik-usiknya, atau menyatukan bendungan itu (?) tidak ... di waktu malam,[236] dan mengambil ikannya di waktu siang. Pada tanggal

---

233 Prasasti Hring tahun 856 Saka (934 M), OJO, XLVII. Kalimat yang menyebut tujuan berbuat amal itu berbunyi: *mateher ta samgat anakbi dyah pendel umilu makadharmma ikang wihantan kinalihannira mwang samgat margganung pu danghil*

234 Prasasti Kampak angka tahunnya tidak terbaca, OJO, LII

235 Sering kali pemakaian istilah *parameswari* dan binihaji tidak konsisten; binihaji tidak selalu harus ditafsirkan sebagai selir, karena ada juga dijumpai istilah *rakryan binihaji parameswari*

236 Sayang prasastinya agak usang sehingga ada beberapa kata yang tidak jelas terbaca *baryya/11/i rikane dawuhan muang umajara kamu te pangu/12/ pullakna dawuhan. te lyenu ... ikana weluran/13/ri wengi nguniwaih umalappa iwaknya i rahina*

8 Januari 935 M Rakryan Binihaji meresmikan ketiga bendungan yang ada di Desa Wuatan Wulas dan Wuatan Tamya.

Permaisuri Pu Sindok muncul pula di dalam prasasti Geweg tahun 855 Saka (933 M)[237] dan prasasti Cunggrang tahun 851 Saka (929 M).[238] Di dalam prasasti Geweg itu Pu Sindok tidak memakai gelar *maharaja*, tetapi rakryan *sri mahamantri* dan sang permaisuri disebut Rakryan Sri Parameswari Sri Warddhani pu Kbi. Di dalam prasasti Cunggrang sang permaisuri disebut Rakyan Binihaji Sri Parameswari Dyah Kbi. Seperti telah disebutkan di atas Stutterheim berpendapat bahwa tokoh ini bukanlah permaisuri Pu Sindok, melainkan neneknya. Akan tetapi, karena kata kbi itu didahului oleh pu dan dyah, yang biasa mendahului nama orang, agak sulit menerima tafsiran Stutterheim itu.[239] Di sini lebih condong untuk menerimanya sebagai permaisuri (*rakryan binihaji parameswari*) yang namanya Pu atau Dyah Kebi. Mengapa dalam prasasti Geweg Pu Sindok memakai gelar *rakryan sri mahamantri* belum dapat dijelaskan di sini.

Di dalam prasasti Cunggrang diperingati perintah Pu Sindok untuk menetapkan Desa Cunggrang yang masuk wilayah Bawang, di bawah pemerintahan langsung dari Wahuta Wungkal, dengan penghasilan pajak sebanyak 15 *suwarna* emas, dan kewajiban kerja bakti senilai 2 *kupang*, dan *kati*k sebanyak ... orang,[240] menjadi sima bagi pertapaan di Pawitra dan bagi sang hyang prasada silunglung sang siddha dewata rakryan bawang, ayah rakryan *binihaji sri parameswari dyah kebi* (bangunan suci tempat pemujaan arwah Rakryan Bawang yang telah diperdewakan, yaitu ayah dari permaisuri raja yang bernama Dyah Kebi. Tugas kewajiban penduduk daerah yang dijadikan sima itu ialah memelihara pertapaan dan prasada, juga memperbaiki bangunan pancuran di Pawitra (*umahayua sang hyang tirtha pañcuran i pawitra*).

Ada juga sawah pakarungan (?) di Pamuatan seluas 2 suku (jung), dan di Kasungkan seluas 2 suku, serta *kati*k sebanyak ... orang anugerah

---

237 OJO, XLV. Sayang sekali prasasti ini amat usang

238 OJO, XLI, prasasti ini juga amat usang. Untung ada turunannya pada tembaga yang jauh lebih baik keadaannya. Turunan ini telah diterbitkan oleh W.F. Stutterheim, "Een oorkonde op koper uit het Singosarische", TBG, LXV, 1925, hlm. 208–281

239 Kalau benar yang dimaksudkan ialah nenek raja, dapat diharapkan suatu istilah khusus, seperti halnya untuk Ibu Suri ada istilah Sri K*arama*an, dan bukan *rakryan sri parameswari* pu ibu atau dyah ibu. Ada juga istilah *rakryan* ibu, sekalipun *rakryan* biasanya mendahului nama tempat yang merupakan daerah lungguh *rakryan* yang bersangkutan

240 Angka yang menunjukkan jumlah *katik* itu ternyata tidak ditulis di dalam prasasti. Pada baris ke-4 lempengan pertama terbaca: gawai ku 2. anggahan (baca: pangguhan) ma su 15. *katik prana*/?/. Juga pada baris ke-8 penulis prasasti tidak mencantumkan jumlah *katik* (*katik prana*/?/ku 2)

raja kepada permaisurinya, yang ikut dijadikan sima sebagai sumber pembiayaan pemujaan arwah mertua raja (Rakryan Bawang) di Prasada, dan biaya pemujaan di pertapaan di Tirtha pada tanggal 3 tiap bulan, dan biaya persembahan caru setiap harinya. Dengan ditetapkannya Desa Cunggrang menjadi sima punpunan, ia tidak lagi diperintah oleh Rakryan Bawang Watu (atau Rakryan Jasun Wungkal). Dengan menganggap Dyah Kebi sebagai permaisuri Pu Sindok, kemungkinan besar bahwa Rakryan Bawang, ayah sang permaisuri, ialah Rakryan Bawang Dyah Srawana yang dijumpai di dalam prasasti-prasasti raja Rakai Watukura Dyah Balitung.

Ada juga penetapan sima yang bukan atas perintah raja, melainkan oleh Rakryan Kanuruhan Dyah Mungpah. Ia menganugerahkan sebidang sawah di/?/ yang masuk wilayah Kanuruhan kepada Sang Bulul supaya digunakan untuk menanam bunga-bungaan, sebagai tambahan kepada amalnya/?/. Memang rupa-rupanya Sang Bulul telah mempunyai nazar demikian, maka pada waktu ia memohon kepada Rakryan Kanuruhan untuk melaksanakan nazarnya itu, permohonannya dikabulkan, bahkan Rakryan Kanuruhan menambahinya. Peristiwa ini diperingati dengan prasasti Kanuruhan tahun 856 Saka (935 M) yang dipahatkan di belakang sandaran sebuah arca Ganesa, dan keadaannya terputus di bagian atas sebelah kiri.[241]

Dapat dilihat bahwa memang tidak ada peristiwa di bidang politik yang terdapat di dalam prasasti Pu Sindok. Kalaupun ada, hanya samar-samar saja dan terdapat dalam prasasti tembaga yang tinulad (diturun pada waktu yang lebih kemudian). Antara lain keterangan di dalam prasasti Waharu IV tahun 853 Saka (931 M),[242] dikatakan bahwa penduduk Desa Waharu telah mendapat anugerah raja, karena penduduk Desa Waharu di bawah pimpinan Buyut Manggali senantiasa berbakti kepada raja, ikut berusaha agar raja menang dalam peperangan, dengan mengerahkan senjata, tanpa ingat siang ataupun malam dalam mengikuti bala tentara raja, sambil membawa panji-panji dan segala macam bunyi-bunyian, pada waktu raja hendak membinasakan musuh-musuhnya yang dianggap sebagai perwujudan kegelapan.

Prasasti Sumbut tahun 855 Saka (933 M)[243] yang sayang sekali hanya ada dua lempeng yang pertama saja, memberi keterangan bahwa Pu Sindok telah

---

[241] Edi Sedyawati, Pengarcaan *Ganesa Masa Kadiri* dan Singhasari. Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian, LIPI-RUL, 1994, hlm. 554–555

[242] KO, VII, I.a. 7. *sambandha. gati wargga /II.a.1/ haji an nityasa sustu bhakti mamrihaken ri sri maharaja rin samarakayya makacihna sañjata wargga haji /2/ sara dhirotsaha sanukasuranya maka rahineng wni saha doja. tabetabehan umiring bala paduka sri maha/3/raja anrarah umilanaken sakahananing satru kanken andhakarawasarira*

[243] F.D.K. Bosch, "Een koperen plaat uit het Sidoardjosche", OV, 1925, hlm. 50. Lempeng ke-2 ditranskripsikan dalam KO, VII

(a)

(b)

Foto 4.11 (a) Petirtaan Jalatunda, Trawas, Jawa Timur; (b) Petirtaan Belahan, Trawas, Jawa Timur (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

memberi anugerah sima Desa Sumbut kepada Sang Mapañji Jatu Ireng, yang telah berjasa ikut menghalau musuh bersama penduduk Desa Sumbut, dengan tujuan agar kedudukan raja di atas singgasana dapat langgeng.

Rupa-rupanya perpindahan pusat kerajaan ke Jawa Timur tidak perlu disertai dengan penaklukan-penaklukan. Hal ini dapat dipahami karena sejak Rakai Watukura dyah Balitung kekuasaan kerajaan Mataram telah meluas sampai ke Jawa Timur. Bahwa mungkin ada juga di sana-sini raja bawahan atau penguasa setempat yang tidak mau tunduk, dan perlu dikuasai dengan kekuatan senjata, bukanlah hal yang mus*tahil*. Adanya prasasti Waharu dan prasasti Sumbut memang membayangkan adanya kemungkinan tersebut. Bahwa pusat kerajaan Pu Sindok juga mengalami perpindahan mungkin juga berhubungan dengan adanya serangan musuh. Seperti telah disebutkan, ibu kota kerajaan yang pertama terletak di Tamwlang. Akan tetapi, di dalam prasasti Paradah dan prasasti Añjukladang ibu kota kerajaan disebutkan ada di Watugaluh (*kadatwan ri mdang ri bhumi mataram i watugaluh*). Mungkin ibu kota itu ada di Desa Watugaluh sekarang, di dekat Jombang di tepi Kali Brantas.

Dari sekian banyak bangunan suci yang disebutkan di dalam prasasti-prasasti Pu Sindok, belum ada satu pun yang dapat dilokalisasikan dengan tepat. Prasasti Añjukladang menyebutkan adanya Candi Lor dan sekarang di dekat Berbek, Kabupaten Nganjuk ada rerun*tuhan* candi. Akan tetapi, apakah memang Candi Lor itu yang dimaksud di dalam prasasti, belum dapat dipastikan, sekalipun sisa bangunan itu menunjukkan ciri-ciri candi Jawa Tengah.[244] Di dekat tempat lokasi prasasti Cunggrang di lereng timur Gunung Penanggungan ditemukan beberapa peninggalan tempat pemandian, antara lain di Belahan, yang tidak jauh di atas lokasi prasasti. Akan tetapi, apakah Sang Hyang Tirtha Pañcuran di Pawitra itu dapat diidentifikasikan dengan salah satu di antara peninggalan-peninggalan tersebut belumlah dapat dipastikan. Nama Pawitra mungkin sekarang menjadi Betra, di sekitar tempat itu juga. Th.A. Resink pernah mengemukakan pendapat bahwa pemandian Belahan berasal dari masa pemerintahan Pu Sindok.[245]

---

[244] N.J. Krom, IHJK, II, hlm. 27

[245] Th. A. Resink, "Belahan of een mythe ontluisterd", BKI, 123, 1967, hlm. 250–266; "Belahan or a myth disspeled", Indonesia, no. 6, 1968, hlm. 2–37. Masih ada beberapa sisa candi lagi yang oleh Krom dianggap berasal dari abad X M, berdasarkan persamaan ciri-ciri dengan candi di Jawa Tengah, yaitu candi Gunung Gangsir dekat Bangil, dan candi Sanggariti di Batu (Malang). Candi ini dibangun di atas sumber air yang dianggap ke*rama*t dan mempunyai daya penyembuhan. Candi Sumbernanas dekat Blitar oleh Stutterheim bahkan dihubungkan dengan masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung (W.F. Stutterheim, "Oudheidkundige aantekeningen: X. De ouderdom van tjandi Soembernanas", BKI, 86, 1930. hlm. 305–308

Sebenarnya diharapkan adanya suatu peninggalan arkeologi yang dapat diidentifikasikan dengan candi kerajaan, sebagai pengganti percandian Loro Jonggrang, sebagai lambang Mahameru untuk pusat kerajaan yang baru di Jawa Timur. Akan tetapi, hingga kini belum ada peninggalan candi di Jawa Timur yang dapat dianggap sebagai candi kerajaan itu. Candi *pana*taran, sesuai dengan namanya yang mengingatkan kepada istilah pura penataran di Bali, mungkin sekali berfungsi sebagai candi kerajaan, tetapi untuk masa kemudian, yaitu sejak zaman Kadiri. *Sang hyang dharma ring isanabhawana*, yang dapat dianggap sebagai candi pemujaan *wangsakara* dinasti *Isana* sebagai pengganti candi Borobudur untuk wangsa Sailendra, hingga kini juga belum dapat diidentifikasikan. Apakah *sang hyang swayambhuwa i walandit* dapat dianggap sebagai bangunan suci untuk pemujaan dewa yang tertinggi, dalam hal ini Dewa Brahma, juga belum dapat dipastikan.

2. Dharmmawangsa Teguh

Setelah pemerintahan Pu Sindok ada masa gelap sampai masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga. Dalam masa 70 tahun itu tercatat hanya tiga prasasti yang berangka tahun yang ditemukan, yaitu prasasti Hara-Hara tahun 888 Saka (966 M)[246] prasasti Kawambang Kulwan tahun 913 Saka (992 M)[247] dan prasasti Lucem tahun 934 Saka (1012–1013 M).[248] Prasasti Hara-Hara berisi keterangan tentang pemberian tanah sima oleh Pu Mano, yang telah diwarisinya dari nenek moyangnya, yang terletak di Desa Hara-Hara, di sebelah selatan perumahannya, kepada Mpungku di Susuk Pager dan Mpungku di Nairañjana yang bernama Mpu Buddhiwala, untuk digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan suci (*kuti*). Sebagai sumber pembiayaan pemeliharaan dan biaya upacara di dalam bangunan suci tersebut, ditebuslah sawah yang terletak di sebelah selatannya seluas 3 *tampah*, yang telah digadai oleh Mpungku Susuk Pager dan Mpungku di Nairañjana.

Prasasti Kawambang Kulwan boleh dikatakan belum diterbitkan sebagaimana mestinya. Apa yang terdapat dalam transkripsi Brandes sebagian kecil permulaannya saja, itu pun hanya dibaca satu sisi, sedang prasasti ini

---

[246] OJO, LV. Sayang prasasti ini tidak lengkap, yang ditemukan satu lempeng permulaannya saja

[247] OJO, LVII

[248] H. Kern, VG, VIII, hlm. 79 dan seterusnya. Angka tahun prasasti ini, yang tertulis dengan huruf kuadrat, oleh H. Kern dan L-C. Damais (EEI, IV, cat. 243) dibaca 924, tetapi mengingat kemungkinan asal huruf kuadrat ini dari Bali, sedang di Bali angka seperti itu biasanya menunjukkan angka 3, di sini dipilih pembacaan 934, sebagaimana pembacaan N.J. Krom (TBG, LIII, 1911, hlm. 248)

ditulis melingkar. Yang dapat ditangkap ialah bahwa prasasti ini memuat anugerah raja/?/ kepada Samgat Kanuruhan pu Burung berupa sima di Desa Kawambang Kulwan, agar Sang Pamgat Kanuruhan mendirikan suatu bangunan suci pemujaan dewa (an padamla parhyangan). Melihat angka tahunnya, prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Dharmmawangsa Teguh. Sayang nama rajanya belum terbaca; yang ada ialah nama pejabat tinggi yang menerima hadiah, yaitu Pu Dharmmasangg*rama*wikranta.

Suatu peristiwa unik yang diperingati dengan prasasti yang dipahat pada batu alam yang besar ialah perbaikan jalan oleh Samgat Lucem pu Ghek (atau Lök), dan penanaman pohon beringin oleh Sang Apañji Tepet. Rupa-rupanya pohon beringin itu ditanam di tempat permulaan atau akhir jalan yang diperbaiki itu. Peristiwa ini diperingati dengan prasasti Lucem yang ditulis dengan huruf kuadrat yang besar-besar.[249]

Jadi, memang boleh dikata gelaplah masa antara Pu Sindok dan Dharmmawangsa Teguh. Hanya dari prasasti Pucangan diketahui bahwa Pu Sindok mempunyai anak perempuan yang cantik karena kesucian hatinya, bagaikan angsa betina yang bersayap yang tinggal di Danau Manasa yang permai,[250] nan indah, yang senantiasa amat dicintai oleh raja sekalian angsa, yang memerintah sebagai ratu dengan nama Sri Isanatunggawijaya. Ia bersuamikan raja Sri Lokapala, raja yang bijaksana, memesonakan, dan termasyhur karena kesucian budinya. Mereka berputra Sri Makutawangsa-warddhana, putra wangsa Isana, amat masyhur karena keberaniannya. Ia dilahirkan untuk menjadi permata dunia; dan karena jiwanya selalu tertuju kepada kesejahteraan semua makhluk, ia telah menjadikan dunia ini aman dan makmur, dan bagaikan Wisnu yang berkilauan tiada taranya ia menghancurkan gajah-gajah musuh-musuhnya. Ia mempunyai anak perempuan yang amat cantik, yang merupakan kebahagiaan Pulau Jawa. Oleh ayahnya ia diberi nama Gunapriyadharmmapatni, yang juga terkenal di pulau-pulau yang lain. Ia yang juga bernama Mahendradatta, kawin dengan Udayana, yang berasal dari wangsa raja-raja yang termasyhur. Mereka mempunyai anak laki-laki yang amat tampan, yang diberi nama Erlanggadewa, bagaikan Rama yang terlahir dari Dasaratha, tetapi ia melebihinya karena sifat-sifat dan kemampuannya. Ia memang lebih dari siapa saja di dalam negara.

---

[249] Kitab Calon Arang menyebut penanaman pohon beringin di sepanjang jalan

[250] Dalam menerjemahkan bait ini H. Kern bertolak dari anggapan bahwa kata-katanya dapat ditafsirkan rangkap. Oleh karena itu, *akalusamanasavaramya* dan *sugatapaksasaha* diterjemahkan dua kali, yang pertama *sugatapaksasaha*, diterjemahkan dengan yang bersayap nan indah, dan penganut agama Buddha. Masalah agama ini akan dibicarakan lebih lanjut

Mengenai masa pemerintahan Sri Isanatunggawijaya dan suaminya Lokapala, demikian pula masa pemerintahan Makutawangsawarddhana, tidak ada suatu sumber apa pun yang lain yang dapat memberi keterangan. Hanya perlu dicatat di sini tentang nama Makutawangsawarddhana itu, yang secara harfiah berarti pelanjut wangsa yang bermahkota atau pelanjut wangsa raja. Ditambah dengan penekanan bahwa ia "putra wangsa Isana", hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun anak laki-laki dari permaisuri merupakan pewaris takhta yang paling ideal.

Baru dalam *dasa*warsa terakhir dari abad X M, muncul beberapa keterangan sejarah. Pertama dapat disebut di sini kitab *Wirataparwwa*, terjemahan ke dalam bahasa Jawa kuno dari kitab senama dalam bahasa Sanskerta. Di sini terdapat angka tahun, yang mungkin sekali menunjukkan waktu ditulisnya kitab tersebut, yaitu tahun 918 Saka (996 M). Ada juga disebut nama raja yang memerintah pada waktu itu, yaitu Sri Dharmmawangsa Teguh Anantawik*rama*.[251] Nama ini tidak disebutkan di dalam prasasti Pucangan.[252] Akan tetapi, ada prasasti lain yang menyebut nama itu, yaitu prasasti raja Jayawarsa Digwijaya Sastraprabhu dari Dukuh Sirahketing, Desa Dedingin, Kabupaten Ponorogo dari tahun 1126 Saka (1204 M).[253] Di dalam prasasti ini Sri Jayawarsa menyebut dirinya cucu anak Sang Apañji Wijay*amerta*warddhana, yang kemudian bergelar abhiseka sebagai raja Sri Isana Dharmmawangsa Teguh Anantawikramottunggadewa.

---

[251] H.H. Juynboll, "Drie boeken van het Oudjavaansche *Mahabharata*", 1893. Mengenai angka tahunnya lihat L-C. Damais, EEI, IV hlm. 62

[252] Dalam bait ke-13 terdapat nama Dharmmawangsa. Kalimatnya berbunyi:
sri dharmmawangsa iti purwwayawadhipena.
sambandhina gunaganasrawanotsukena
ahuya sadaram asau swasutawiwahan
drak sarwatha prathitakirttir abhun mahatma.
(= ia, Sri Dharmmawangsa, oleh raja Jawa yang memerintah sebelumnya, yang masih anggota keluarganya, yang senang mendengar tentang semua kemahirannya, dipanggil dengan hormat pada perkawinan dengan putrinya sendiri. Sesudah itu maka termasyhurlah kebesaran jiwanya di mana-mana). Nama ini pernah diidentifikasikan dengan Dharmmawangsa Teguh (H. Kern, VG, VII, hlm. 93). Pendapat ini telah dibantah oleh C.C. Berg, yang mengatakan bahwa dharmmawangsa iti pada permulaan bait itu, berdasarkan tata bahasa, tidak mungkin merupakan nama dari *purwwayawadhipa*, tetapi nama dari orang yang dipanggil (asau), yaitu Dharmmawangsa Airlangga (C.C. Berg, "De *Arjunawiwaha*. Er-langga's levensloop en bruiloftslied? BKI, 97, 1938, hlm. 52–53)

[253] W.F. Stutterheim, "Koning Teguh op een oorkonde?" TBG, LXXX, 1940, hlm. 345–366. Oleh L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 123–124, angka tahun prasasti itu dibaca 1126 Saka (1204 M). Pembacaan Damais ini ditunjang oleh prasasti dari raja Jayawarsa di Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Ponorogo, yang berangka tahun 1102 Saka (prasasti Mruwak)

Jelas bahwa memang ada raja yang bernama Sri Isana Dharmmawangsa Teguh Anantawikramottunggadewa, yang berdasarkan kitab *Wirataparwa*,[254] memerintah dalam *dasa*warsa terakhir abad X M, dan mungkin sampai tahun 1017 M. Melihat gelarnya yang mengandung unsur Isana ia jelas keturunan Pu Sindok secara langsung. Kemungkinan besar ia anak Makutawangsa-warddhana, jadi saudara Mahendradatta Gunapriya-dharmmapatni. Ia menggantikan ayahnya duduk di atas takhta kerajaan Mataram, sedang Mahendradatta kawin dengan Udayana, yang ternyata seorang raja dari wangsa Warmmadewa di Bali. Dapat dipahami sepenuhnya mengapa Airlangga menyebut dirinya masih anggota keluarga dari raja Dharmmawangsa Teguh.

Rupa-rupanya Bali pada waktu itu ada di bawah pengaruh Jawa. Hal itu dapat pula diduga berdasarkan kenyataan bahwa sejak munculnya suami istri Udayana dan Gunapriyadharmmapatni prasasti-prasasti di Bali mulai menggunakan bahasa Jawa kuno. Sayang tidak ada sumber lain yang dapat memperjelas hubungan antara Jawa dan Bali pada waktu itu. Agak lebih terang sedikit adalah hubungan antara Jawa dan Sriwijaya. Sriwijaya (San-fo-chi) secara teratur mengirimkan utusan ke Cina antara tahun 905 M sampai tahun 1178 M, sedang dalam waktu yang bersamaan boleh dikatakan hampir tidak ada utusan dari Jawa (She-p'o). Hanya ada berita yang menarik, yaitu adanya utusan dari Jawa ke Cina pada tahun 992 M.

Berita itu menyebutkan bahwa pada bulan ke-12 tahun 992 M raja Mu-lo-ch'a mengirim tiga orang utusan, yaitu T'o-Chan, P'u A Li, dan Li-t'o-na-chia-teng membawa upeti yang terdiri atas gading, mutiara, dan sutra yang disulam dengan bunga-bungaan dengan benang emas, sutra dari pelbagai warna, kayu cendana, barang-barang dari katun dengan pelbagai warna, kulit penyu, perangkat sirih pinang, keris yang berhulukan cula badak dan emas, tikar rotan yang bergambar burung kakaktua putih, dan sebuah model rumah-rumahan kecil dari kayu cendana, berhiaskan pelbagai barang berharga.[255]

Sesudah perjalanan yang makan waktu 60 hari utusan itu tiba di Kabupaten Ting Hai di distrik Ming (di Provinsi Che-Chiang sekarang). Di sana pengawas perdagangan yang bernama Chang Suhsien mengirim laporan kepada kaisar tentang kedatangan utusan itu. Mereka itu berpakaian seperti utusan dari Possu yang datang sebelumnya. Dengan bantuan seorang penerjemah mereka itu menceritakan bahwa seorang pedagang besar Cina yang mempunyai banyak kapal-kapal, berasal dari Chien-ch'i telah sering

---

[254] Namanya juga disebut di dalam kitab Adiparwa dan kitab Bhismaparwa. H.H. Juynbool, Adiparwa, 1906. J. Gonda, "Het Oud-Javaansche Bhismaparwa", Bibliotheca Javanica, 7, 1936

[255] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 17–19. Juga di sini dimasukkan pembetulan dan tambahan dari Oei Soan Nio

datang di Jawa, dan kini dengan bantuannya mereka datang menghadap Kaisar mempersembahkan upeti. Mereka itu mengatakan bahwa rajanya disebut Hsia-chih-ma-lo-yeh (= Haji Maharaja), istri raja disebut Lo-chien-so-p'o-li (Rakryan [Sri Parame]swari), dan bahwa di kerajaan, mereka terdapat pejabat-pejabat tetap. Dalam bahasa mereka pengawas perdagangan disebut po-ho-wang (= puhawang), dan istrinya disebut po-ho-pi-ni (puha[wang] bini).[256]

Utusan itu juga menceritakan bahwa negaranya (She-p'o) sedang bermusuhan dengan San-fo-ch'i (Sriwijaya); kedua negara itu selalu berperang. Keterangan ini diperkuat dengan keterangan dari utusan kerajaan Sriwijaya yang datang di Cina pada tahun 988 M. Utusan itu bernama P'u-ya-t'o-li. Pada tahun 992 M ada berita dari Kanton yang mengatakan bahwa utusan itu, yang telah meninggalkan ibu kota kekaisaran pada tahun 990 M, tertahan di Kanton karena mendengar bahwa kerajaannya diserbu tentara Jawa. Dalam musim semi tahun 992 M ia berlayar ke Campa, tetapi karena belum ada berita yang menggembirakan ia kembali ke Cina untuk meminta surat Kaisar.[257] L-C. Damais pernah juga mengemukakan pendapat bahwa serbuan dari Jawa itu terjadi pada masa pemerintahan Dharmmawangsa Teguh, dan bahwa ekspedisi ke Sumatra itu ada juga meninggalkan bukti berupa prasasti batu, yaitu prasasti Hujung Langit (Bawang) di daerah Sumatra Selatan tahun 919 Saka (997 M), yang berbahasa Jawa kuno.[258]

Sayang prasasti itu belum diterbitkan, dan memang sulit dibaca karena usang. Oleh karena itu, hendaknya lebih berhati-hati menarik suatu kesimpulan yang demikian jauh dari prasasti ini. Akan tetapi, kalaupun benar pernah ada serangan Dharmmawangsa Teguh atas Sriwijaya, serangan itu tidak berpengaruh banyak pada kedaulatan Sriwijaya, karena sejak tahun 1003 M datang lagi utusan-utusan Sriwijaya ke Cina secara teratur sampai tahun 1178 M.[259]

Dharmmawangsa Teguh yang begitu berambisi untuk meluaskan kekuasaannya sampai ke luar Pulau Jawa ternyata mengalami kerun*tuhan* di tangan seorang raja bawahannya sendiri. Prasasti Pucangan, baik yang

---

[256] Tafsiran baru ini diberikan oleh L-C. Damais, "Études Sino-Indonésiennes. I. Quelques titres javanais de l'epoque des Song', BEFEO, tome L. fasc. I, 1960, hlm. 1–35

[257] Groeneveldt, Notes ..., hlm. 64–65

[258] L-C. Damais, "Une trace de l'expedition de Dharmmawangsa San-Fo-Ts'i?", XXIIe Congres International des Orientalistes, 1953, 1957, hlm. 323–324. Mengenai angka tahun prasasti itu lihat L-C. Damais, EEI, IV. hlm. 130–133. Juga: "Études soumatranaises. l. La date de l'inscription de Hujung Langit (Bawang), BEFEO, tome L, 1962, hlm. 275–288

[259] W.P. Groeneveldt, Historical Notes ..., hlm. 65–67

berbahasa Sanskerta maupun yang berbahasa Jawa kuno, memberitakan tentang kerun*tuhan* itu. Bagian yang berbahasa Sanskerta mengatakan bahwa tidak lama sesudah perkawinan Airlangga dengan putri Teguh, ibu kota kerajaan yang sekian lama melebihi keindahan istana Dewa Indra, hancur menjadi abu. Karena ulah Dewi Kali itu, Airlangga, masuk hutan tanpa diiringi hamba-hambanya, kecuali Narottama.[260]

Yang berbahasa Jawa kuno mengatakan di bagian sambhandha, yaitu sebab-sebab mengapa raja Dharmawangsa Airlangga menetapkan desa-desa Barahem, Pucangan, dan Bapuri menjadi sima untuk tempat mendirikan pertapaan bagi para resi, bahwa hal itu telah dinazarkan oleh Sri Baginda pada waktu Pulau Jawa mengalami pralaya pada tahun 939 Saka (1017 M),[261] yaitu pada waktu Haji Wurawari maju menyerang dari Lwaram. Seluruh Pulau Jawa tampak bagai lautan, banyak pembesar yang meninggal, pertama-tama Sri Maharaja (Dharmmawangsa Teguh), yang kemudian dicandikan di dharmma parhyangan di Wwatan pada bulan Caitra tahun 939 Saka (antara 21 Maret dan 21 April 1017 M).

Jadi, bagian yang berbahasa Jawa kuno lebih banyak memberi keterangan tentang akhir masa pemerintahan Dharmmawangsa Teguh itu, yaitu karena diserang oleh raja bawahan dari Wurawari. Letak Wurawari telah dilokalisasikan oleh B. Schrieke di daerah Banyumas sekarang, di sebelah selatan Karang Kobar.[262] Sedangkan Lwaram, mengingat kemungkinan pusat kerajaan Dharmmawangsa Teguh ada di sebelah utara Maospati (daerah Madiun) sekarang,[263] mungkin sekali harus dilokalisasikan di Desa Ngloram di

---

260 R.Ng. Poerbatjaraka, "Strophe 14 van de Sanskrit-zijde der Calcutta-steen", TBG, LXXXI, 1941, hlm. 425–437

261 Angka tahun ini pernah dibaca sebagai 928 Saka oleh Krom dan Kern (1006 M), tetapi oleh Poerbatjaraka dibaca sebagai 939 Saka. Pembacaan inilah yang benar

262 B. Schrieke, "Ruler and Realm in Early Java", Indonesian Sosiological Studies, part 2, 1955, hlm. 215, 294

263 Ternyata di Sendang Kamal, Kecamatan Maospati tempat penemuan prasasti Kawambang Kulwan, masih ada tiga batu prasasti lagi. Hanya satu yang masih terbaca sebagian, itu pun tidak di bagian permulaan sehingga tidak dapat diharapkan ditemukan angka tahun dan nama rajanya, sedang yang dua sudah aus sama sekali. Di Kecamatan Maospati itu, di Desa Pedo, Tegalturi, dan Sumberrejo, ada juga prasasti batu, yang sayang sekali juga sudah aus sama sekali. Ke sebelah barat, di daerah Kabupaten Magetan, ada lagi tiga prasasti batu, sayang sekali juga sudah amat usang. Hanya satu yang dapat dibaca sebagian, dan ternyata memuat daftar nama penduduk desa yang menerima anugerah prasasti, seperti pada prasasti raja Dharmawangsa Airlangga. Ditilik dari segi paleografi mungkin sekali prasasti itu berasal dari masa pemerintahan Teguh atau Airlangga

tepi Bengawan Solo, di sebelah selatan Cepu.[264] Karena serangan Haji Wurawari itu terjadi tidak lama sesudah perkawinan Airlangga dengan putri Teguh,[265] dapat diperkirakan bahwa mungkin sekali ia berambisi untuk mendampingi putri mahkota menggantikan Teguh di atas takhta kerajaan. Akan tetapi, rupa-rupanya telah dipilih pangeran dari luar Jawa, sekalipun masih kemenakan raja sendiri.[266] Untuk melampiaskan kekecewaannya, ia melakukan serangan tiba-tiba terhadap Sri Maharaja yang membawahinya itu. Kalau dugaan ini benar, dapatlah dipahami mengapa ibu kota Teguh dapat hancur menjadi abu, karena mendapat serangan yang tidak diduga.[267]

Yang mungkin dapat memperkuat dugaan di atas adalah kenyataan bahwa Haji Wurawari tidak menduduki ibu kota kerajaan Mataram, tetapi kembali ke tempat asalnya. Seperti yang akan dikemukakan selanjutnya ia termasuk salah seorang penguasa daerah yang ditaklukkan oleh Dharmmawangsa Airlangga. Jadi, ia telah cukup puas dengan berhasil melampiaskan sakit hatinya, karena tidak berhasil menjadi menantu Teguh.

Seperti yang dapat dilihat dari prasasti Pucangan itu, Dharmmawangsa Teguh dicandikan di Wwatan. Sekarang masih ada Desa Wotan di daerah Kecamatan Maospati. Akan tetapi, sayang tidak ada berita tentang penemuan sisa-sisa bangunan candi di Desa Wotan itu, sehingga desa itu tidak dapat diidentifikasikan dengan Wwatan yang disebut di dalam prasasti Pucangan.

Yang mungkin dipertanyakan Adalah mengapa Dharmmawangsa Teguh kerajaannya berpusat di daerah Madiun, sedang Pu Sindok mungkin mula-mula di daerah Malang, dan kemudian di dekat Jombang, dan Airlangga di sekitar daerah Ngimbang, di sebelah utara Jombang-Mojokerto. Perpindahan pusat kerajaan memang suatu hal yang biasa, seperti yang telah dikemukakan. Akan tetapi, mengenai perpindahan pusat kerajaan dari daerah Jombang ke daerah Maospati pada masa pemerintahan Dharmmawangsa Teguh sama sekali tidak ada sumber yang dapat memberi penjelasan.[268]

---

[264] Poerbatjaraka pernah mengemukakan pendapat bahwa Lwaram itu ialah Ngloram di daerah Kudus (?)

[265] Mengingat gaya bahasa prasasti yang berbahasa Sanskerta yang memberitakan kejadian itu, malah dapat ditafsirkan bahwa serangan itu terjadi pada waktu sedang dirayakan pesta perkawinan Airlangga (*atha bhasmasad abhavad* ... dan seterusnya)

[266] Boechari, "Rakryan Mahamantri i Hino ...", hlm 60 dan 74

[267] J.G. de Casparis dalam Airlangga, 1958, mengemukakan pendapat bahwa serangan Haji Wurawari itu didukung oleh raja Sriwijaya, sebagai tindakan balas dendam terhadap Teguh yang menyerang Sriwijaya sekitar tahun 990 M

[268] Perlu diingatkan bahwa dua prasasti raja Jayawarsa yang mengaku cicit Dharmmawangsa Teguh, terdapat di daerah Kabupaten Ponorogo

3. Airlangga

Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Dharmmawangsa Airlangga dapat menyelamatkan diri dari serangan Haji Wurawari, dan masuk hutan dengan hanya diikuti seorang hambanya yang bernama Narottama. Keterangan yang lebih terperinci terdapat dalam bagian yang berbahasa Jawa kuno. Dikatakan bahwa pada waktu terjadi serangan itu ia baru berumur 16 tahun, masih amat muda dan karena itu belum banyak pengalaman dalam peperangan dan belum begitu mahir menggunakan alat-alat senjata. Akan tetapi, karena ia penjelmaan Wisnu, ia tidak dapat binasa oleh kekuasaan *mahapralaya*. Ia kemudian tinggal di hutan di lereng gunung,[269] bertemankan para pertapa yang suci kelakuannya, diikuti seorang hambanya yang amat setia bernama Narottama. Dialah abdi yang te*rama*t teguh dalam kesetiaan, mengikuti raja ke mana saja ia pergi tanpa mau berpisah, ikut berpakaian kulit kayu, dan makan apa saja yang dimakan oleh para pertapa yang tinggal di hutan.

Selama di hutan Airlangga tidak pernah melupakan pemujaan terhadap dewa-dewa siang dan malam. Karena itulah para dewa amat besar cinta kasihnya kepadanya, dan mengharapkan agar ia memperoleh pohon keinginan untuk melindungi dunia, menggantikan kedudukan leluhurnya, memperoleh kebahagiaan kerajaan, menambah kebahagiaan dunia, memperbaiki semua bangunan suci, dan menghancurkan semua kekuatan jahat di dunia.[270] Pada tahun 941 Saka (1019 M)[271] ia direstui oleh para pendeta Siwa, Buddha,

---

[269] Kata wanagiri dalam kalimat manganti ti humbanging wanagiri pernah dipandang sebagai nama tempat, yaitu Wanagiri. Akan tetapi, berdasarkan bagian prasasti yang berbahasa Sanskerta, yang mengatakan bahwa Airlangga masuk hutan (*vanayagat*), kata wanagiri itu di sini diterjemahkan dengan hutan di (lereng) gunung

[270] Dalam beberapa hal terjemahan ini agak berbeda dengan terjemahan Poerbatjaraka

[271] Sebetulnya ada juga masalah mengenai tahun penobatan Airlangga itu, yaitu adanya prasasti Silet tahun 940 Saka (9 Maret 1019 M). Sayang prasasti itu ditemukan kembali dalam keadaan pecah berkeping-keping, sehingga nama raja yang mengeluarkan prasasti itu tidak terbaca. Ada dua nama, yaitu ... Sanawikramottunggadewa dan Srisanawijaya maharaja." Menurut pendapat Damais, yang pertama ialah Pu Sindok, sedang yang kedua ialah anaknya, yang di dalam prasasti Pucangan disebut Sri Isanatunggawijaya. Di sini ia diberi gelar maharaja untuk menunjukkan bahwa dialah yang menggantikan ayahnya duduk di atas takhta kerajaan, dan bukan suaminya. Di dalam prasasti Pucangan itu memang juga dikatakan bahwa ia memerintah (*rarajña rajñi*). Lihat Damais, "EEI, III, hlm. 62–63, catatan No. 8", juga EEI, IV hlm. 233–234. Akan tetapi, siapakah yang mengeluarkan prasasti ini? Apakah Dharmmawangsa Airlangga sebelum ia resmi ditahbiskan oleh para pendeta? Mungkinkah disebutkannya Pu Sindok dan Sri Isanatunggawijaya di dalam prasasti Silet itu untuk menunjukkan haknya atas takhta kerajaan? Mungkinkah karena itu prasasti ini dahulu sengaja dihancurkan oleh pihak yang tidak setuju dengan dinobatkannya Airlangga sebagai raja? Memang perlu dicatat di sini bahwa banyak prasasti dari masa pemerintahan Airlangga yang didapatkan kembali dalam keadaan hancur berkeping-keping, seperti

dan Mahabrahmana sebagai raja dengan gelar Rake Halu Sri Lokeswara Dharmmawangsa Airlangga Anantawikramo-ttunggadewa, karena dinobatkan di Halu setelah membuat patung piutnya yang dicandikan di Isanabajra.

Mengenai tahun penobatan Airlangga itu semula ada permasalahan, karena mengikuti pembacaan Kern atas tahun itu di bagian yang berbahasa Sanskerta yang ternyata salah. Kern membaca tahun penobatan itu locana agni vadane (= 932 Saka/1010 M). Ternyata candrasangkala itu harus dibaca *sasalañ*chana abdi vadane (= 941 Saka), sama dengan angka tahun di bagian yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno; jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Pembacaan kembali angka-angka tahun pada bagian yang berbahasa Sanskerta menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara bagian yang berbahasa Sanskerta itu dengan bagian yang berbahasa Jawa kuno, seperti yang akan ditunjukkan dalam uraian selanjutnya.

Mengenai masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga lebih banyak keterangan didapatkan karena banyak prasasti yang ditemukan kembali, meskipun belum seluruhnya diterbitkan. Selain itu, prasasti Pucangan cukup banyak memberi informasi tentang peristiwa-peristiwa dari masa pemerintahannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, prasasti Pucangan yang berbahasa Sanskerta memuat silsilah Airlangga, dan silsilah itu memang dibuat oleh para pujangga untuk memberi pengesahan kepadanya. Tentulah dipertanyakan mengapa ia harus disahkan dengan membuat silsilah? Andaikata tidak terjadi serangan Haji Wurawari yang menyebabkan kehancuran pusat kerajaan Medang, barangkali silsilah itu tidak perlu dibuat, karena ia dapat menggantikan duduk di atas singgasana kerajaan mendampingi permaisurinya yang memang pewaris takhta. Kemungkinan besar istrinya itu, yaitu putri mahkota, ikut terbunuh dalam serbuan Haji Wurawari. Ini memang dapat dibayangkan, kalau anggapan bahwa Haji Wurawari itu menyerbu pusat kerajaan Dharmmawangsa Teguh dengan tujuan melampiaskan sakit hatinya karena tidak dapat mempersunting putri mahkota itu. Kalau dugaan itu benar, dimuatnya silsilah Airlangga untuk melegitimasikan dirinya itu dapat dipahami sepenuhnya. Jadi, ia mau menunjukkan bahwa ia benar-benar masih keturunan Pu Sindok, pendiri dinasti Isana.

Meskipun sudah ada silsilah itu tentu ada juga pihak-pihak yang masih juga merasa tidak puas sebab tidak mungkin rasanya semua keturunan Pu

---

prasasti Pandan, prasasti Garung, prasasti Turun Hyang, dan sebuah prasasti lagi dari Desa Watutulis, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan yang kini disimpan di Museum Pu Tantular di Surabaya. Masalah ini akan diuraikan lagi lebih lanjut

Sindok binasa karena serangan Haji Wurawari itu. Selain itu, tentu ada juga di antara sekian banyak raja bawahan Teguh dahulu yang kini tidak lagi merasa terikat pada kewajiban tunduk kepada Maharaja di Medang. Sebagian besar masa pemerintahan Airlangga dipenuhi dengan peperangan menaklukkan kembali semua raja bawahan itu.

Pada tahun 943 Saka (1021 M) raja Airlangga telah memberi anugerah sima kepada penduduk Desa Cane yang masuk wilayah tinghal *pinghay*, karena mereka telah berjasa menjadi "benteng" di sebelah barat kerajaan, senantiasa memperlihatkan ketulusan hatinya mempersembahkan bakti kepada raja, tiada gentar mempertaruhkan jiwa raganya dalam peperangan, agar Sri Maharaja memperoleh kemenangan.[272] Ternyata, di sini bahwa musuh pertama-tama diharapkan datang dari sebelah barat, ini memang dapat dipahami, karena Wurawari ada di sebelah barat kerajaan Mataram.

Kemudian dapat dilihat raja memberi anugerah kepada Dyah Kaki Ngadu Lengen berupa penetapan Desa Kakurugan sebagai sima, ditambah dengan bermacam-macam hak istimewa, karena ia telah memperlihatkan kebaktian yang amat tinggi terhadap raja, tidak pernah segan-segan menjalankan segala perintah raja, tanpa pandang hujan ataupun panas, seolah-olah dijadikan kaki dan tangan Sri Maharaja.[273] Sayang prasasti ini ditemukan turunannya saja dari masa kemudian, sehingga nama yang agak aneh itu tidak dapat diteliti kebenarannya; apakah memang demikian nama pejabat tersebut ataukah ia sebenarnya bernama lain, tetapi di dalam turunan ditulis demikian.

Prasasti Pucangan memberikan keterangan tentang penyerangan-penyerangan raja atas musuh-musuhnya mulai tahun 951 Saka (1029 M) sampai tahun 959 Saka (1037 M). Pertama-tama Airlangga menyerang ke Wuratan dan mengalahkan rajanya yang bernama Wisnuprabhawa pada bulan Phalguna tahun 951 Saka (15 Februari 1030 M).[274] Rupa-rupanya raja ini ialah anak dari seorang raja yang ikut menyerang Dharmmawangsa Teguh hingga terjadi pralaya. Tahun berikutnya (952 Saka = 1030 M) raja mengalahkan Haji

---

[272] OJO, LVIII. Di dalam prasasti ini disebutkan nama-nama penduduk desa yang mendapat anugerah sima itu

[273] Prasasti Kakurugan, tahun 945 Saka (1023 M), KO, III dan V

[274] Di dalam transkripsi Brandes nama ini dibaca Bhismaprabhawa. Di dalam transkripsi Kern angka tahun pada bagian yang berbahasa Sanskerta tidak terbaca. Pengamatan lebih teliti atas cetakan kertas prasasti Pucangan itu memberi pembacaan angka tahunnya sebagai, *tan candrabhutavadane sakarajavarse* (= 951 Saka) eka*dasi* sudika ... phalgunemat // jadi tanggal 11 paro terang bulan Phalguna, tahun 951 Saka, atau 15 Februari 1030 M

Wengker, yang bernama Panuda yang hina seperti Rawana.[275] Rupa-rupanya raja ini lari meninggalkan keratonnya di Lewa,[276] tetapi dikejar terus ke Desa Galuh dan Barat,[277] dan pada tahun 953 Saka (1031 M) anaknya dapat dikalahkan, dan keratonnya dihancurkan tiada bersisa.

Pada tahun 954 Saka (1032 M) tiba giliran Haji Wurawari mendapat serangan Airlangga. Raja dengan diiringkan oleh Rakryan Kanuruhan Pu Narottama dan Rakryan Kuningan Pu Niti menyerbu dari Magehan (Magetan?). Dengan dikalahkannya Haji Wurawari itu lenyaplah segala perusuh (hanitu = makhluk halus yang jahat) di tanah Jawa. Suatu hal yang menimbulkan masalah ialah bahwa bagian yang berbahasa Sanskerta berisi keterangan tentang seorang ratu perempuan yang gagah perkasa bagaikan raksasa. Akan tetapi, dengan tiada gentar raja menyerbu ke daerah kekuasaannya yang sulit dicapai pada tahun 954 Saka, dan bagaikan ular naga yang menyemburkan api, raja membakar hangus daerah di sebelah selatan itu. Setelah memperoleh rampasan yang banyak, dan membagikannya kepada anggota pasukannya, di tengah-tengah para pendeta dan pertapa ia cukup memperoleh kemasyhuran saja.

Apakah keterangan itu berarti bahwa pada tahun 954 Saka itu yang berkuasa di Wurawari bukan lagi penguasa yang menyerbu keraton Dharmmawangsa Teguh, tetapi penggantinya, seorang perempuan? Masalah yang lain lagi ialah lokasi Wurawari. Kalau bagian yang berbahasa Sanskerta, itu juga mengenai Wurawari, daerah ini harus dicari di sebelah selatan, dan bukan di sebelah barat seperti yang telah dikemukakan.

---

[275] Memang di dalam transkripsi Kern ditulis *adhamapanuda*, tetapi ada kelihatan *tanda* wisargga di belakang ma, sehingga harus dibaca *adhamah panudabhidhanas*. Dengan demikian, kata *adhama*, yang berarti hina itu bukan sebagian dari nama, melainkan keterangan saja. Di dalam buku-buku sejarah terdahulu (a.l. Krom; HJG[2], hlm. 256) nama raja ini ditulis Adhamapanuda. Juga di sini angka tahun di bagian yang berbahasa Sanskerta tidak terbaca oleh Kern. Tahun itu berbunyi dalam sengkalan: varsse sakasya yamabhuta-ile rajendro (= 952 Saka)

[276] Kata ini tidak jelas lagi karena batunya usang. Brandes membacanya Lewa, OJO, LXII, sisi depan baris ke-22, sedang Kern hanya membaca huruf akhirnya saja. Krom mengusulkan pembacaan Rawa, dengan memberi catatan bahwa baik Rawa maupun *Lewa* sebagai nama tempat kurang meyakinkan bunyinya (HJG[2], hlm. 256). Temuan prasasti baru dari masa pemerintahan Wisnuwarddhana (prasasti Mula/Malurung, tahun 1177 Saka/1255 M) memuat nama Lewa yang diperintah oleh Sri Sahajaya. Mungkin pembacaan Lewa oleh Brandes memang benar, dan tempat ini mungkin sama dengan nama yang terdapat di dalam prasasti Mula Malurung itu

[277] Galuh dan Barat disebutkan di antara tempat-tempat suci di dalam kitab *Nagarakrtagama* (Nag., 78, 4 dan 5). Jadi, di sini kita tidak perlu membayangkan Galuh di Jawa Barat (cf. Krom, HJG[2], hlm. 256)

Pada tahun yang sama ada peristiwa lain, yaitu kekalahan yang dialami Airlangga, sehingga ia terpaksa meninggalkan keratonnya di Wwatan Mas dan melarikan diri ke Patakan. Peristiwa itu diperingati dengan prasasti Terep tahun 954 Saka (21 Oktober 1032 M).[278] Akan tetapi, siapa musuh yang menyerbunya tidak disebut. Mungkinkah Haji Wurawari yang terlebih dahulu menyerbunya? Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada Rakai Pangkaja dyah Tumambong, adik raja sendiri, karena telah berjasa pada waktu raja harus menyingkir dari Wwatan Mas ke Patakan. Di Desa Terep Rakai Pangkaja bersembunyi di dalam suatu pertapaan, dan di situ ia menemukan arca Bhatari Durga. Ia berdoa dan memohon kepada Sang Bhatari agar raja memperoleh kemenangan dalam peperangan. Ia berjanji jika permohonan itu terkabul ia akan mohon agar Desa Terep, tempat pertapaan itu, ditetapkan menjadi sima. Kini, setelah raja dapat mengalahkan musuhnya itu, dan kembali bertakhta di atas singgasana permata, Rakai Pangkaja dyah Tumambong Mapañji Tumanggala menghadap raja dan mengajukan permohonannya. Dikabulkanlah permohonan itu, yaitu ditetapkannya pertapaan tempat pemujaan Bhatari sebagai daerah swatantra, termasuk sawah, kebun, dan sungainya, dan ditambah lagi dengan anugerah gelar halu. Selanjutnya ia bergelar Rake Halu Dyah Tumambong.

Ada suatu peristiwa yang rupa-rupanya tidak dicantumkan di dalam prasasti Pucangan, yaitu ditaklukkan dan dibunuhnya raja Hasin. Peristiwa itu diperingati dengan prasasti Baru tahun 952 Saka (28 April 1030 M).[279] Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada rakyat Desa Baru dengan menetapkan Desa Baru sebagai sima. Adapun jasa rakyat Desa Baru adalah karena mereka telah memberikan layanan sebagaimana mestinya pada waktu raja dengan segenap tentaranya menginap di Desa Baru dalam perjalanannya menyerbu Hasin. Pada waktu itu memang raja bernazar untuk menjadikan Desa Baru sebagai sima apabila raja menang dalam peperangan dan berhasil mengalahkan raja Hasin. Kini, setelah raja Hasin berhasil dibunuh, raja diingatkan oleh Samgat Landayan Rarai pu Bama dan Samgat Lucem Rarai pu Manuritan akan nazarnya itu; jangan sampai raja dikatakan sebagai raja yang mengingkari kata-katanya (mitthyawacana).

Peristiwa penaklukan raja di Hasin itu tentulah terjadi sebelum tanggal 28 April 1030 M. Mungkin juga bahkan sebelum raja memberi anugerah kepada rakyat Desa Cane. Di mana letak Hasin belum dapat dikatakan dengan pasti.

---

[278] Machi Suhadi, "Prasasti Terep", Manusia Indonesia, IV (1–2), 1970, hlm. 38 –46; L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 65–66

[279] OJO, LX

E.W. van Orsoy de Flines pernah mengemukakan pendapat bahwa Hasin terletak di daerah Ngasinan.[280] Kalau dugaan de Flines itu benar, Hasin ada di daerah sebelah barat kerajaan Dharmmawangsa Airlangga.

Rupa-rupanya Haji Wengker memberontak lagi, meskipun daerahnya selalu didatangi tentara raja pada tiap bulan Asuji. Pada tahun 957 Saka Haji Wengker meninggalkan keratonnya di Tapa, dan melarikan diri ke daerah yang sulit dicapai, meninggalkan anak istri, kekayaan, dan semua kendaraan kerajaan. Baru pada tahun 959 Saka ia dapat ditangkap di Kapang. Bagian yang berbahasa Sanskerta mengatakan bahwa raja Airlangga dengan tentaranya yang tidak terbilang banyak menyerbu ke arah barat pada tahun 957 Saka (20 Agustus 1035 M). Raja yang diserbu bernama Wijaya(warmma). Akan tetapi, baru pada tahun 959 Saka (3 November 1037 M)[281] dengan menggunakan taktik yang diajarkan oleh Wisnugupta, raja Wijayawarmma ditangkap oleh rakyatnya sendiri, lalu dibunuh.

Dengan terbunuhnya raja Wijayawarmma dari Wengker itu, selesailah kampanye penaklukan raja Airlangga. Ia pun duduk di atas singgasana dan meletakkan kakinya di atas kepala musuh-musuhnya. Dalam bagian yang berbahasa Sanskerta, ini terjadi pada bulan Karttika tahun 959 Saka (10 November 1037 M). Semua musuh mulai dari sebelah timur, selatan, dan barat telah dapat ditaklukkannya.[282] Kini untuk melepas nazarnya raja membangun pertapaan di Gunung Pugawat (= Pucangan).

Semula para ahli berpendapat bahwa Pucangan atau Pugawat itu ada di Gunung Penanggungan.[283] Akan tetapi, Stutterheim menunjukkan bahwa gunung itu mesti dicari di sekitar daerah Ngimbang, mengingat bahwa sebagian besar prasasti Airlangga, terutama yang ditulis di atas batu, terdapat di sekitar daerah Ngimbang.[284]

Jadi, seminggu setelah terbunuhnya raja Wijayawarmma dari Wengker Airlangga mengadakan pasowanan besar dengan dihadap oleh semua raja bawahan yang telah berhasil ditaklukkannya lagi. Sehari sesudah itu

---

[280] E.W. van Orsey de Flines, "Hasin - Medang - Kuwu - Lang - pi - ya",TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 424–426

[281] Kern membaca angka tahun ini sebagai munisarandhre (957 Saka), tetapi bacaan yang benar ialah *mukhasararandhre* (959 Saka)

[282] Dari uraian dalam prasasti Pucangan, baik yang berbahasa Sanskerta maupun yang berbahasa Jawa kuno, tidak jelas raja-raja mana yang dimaksudkan dengan raja yang berkuasa di sebelah timur. Yang jelas disebut ialah yang ada di sebelah selatan (Haji Wurawari dan/atau ratu yang seperti raksasi), dan yang di sebelah barat (Haji Wengker)

[283] G.P. Rouffaer, NBG, 1909, hlm. 180–182; H. Kern: VG, VII, hlm. 113

[284] W.E. Stutterheim, "Oudheidkundige aantekeningen: XLVIII. Waar lag Erlangga's kluizenarij van den Pucangan?", BKI, 95, 1937

[285] OJO, LXI

keluarlah prasasti Kamalagyan yang memperingati pembuatan bendungan[285] di Waringin Sapta. Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa raja telah menetapkan pengurangan pajak-pajak yang harus diserahkan ke kas kerajaan dari Desa Kamalagyan sewilayahnya, yang masuk wilayah Pangkaja. Dari Desa Kamalagyan sendiri, termasuk pajak hasil sawah, pagagan, kebun sirih, tepian-tepian, sungai dan rawa-rawanya, yang pajaknya seluruhnya sebesar 17 *suwarna*, 14 *masa*, 4 *kupang*, dan 4 *satak*, dikurangi 10 *suwarna* untuk diserahkan kepada raja pada tiap bulan Asuji (September–Oktober) untuk kepentingan bendungan di Waringin Sapta itu. Dari daerah Kalagyan Sandangan, yang pajaknya 2 *suwarna* dan 10 *masa* emas, dikurangi 2 *suwarna* untuk diterimakan kepada *wargga* hatur (?) untuk kepentingan bendungan itu juga, dan dari Kakalangan yang pajaknya 1 *masa* dan 2 *kupang*, dikurangi 1 *masa* untuk diterimakan kepada *wargga* patih untuk kepentingan bendungan itu. Sementara itu, pajak-pajak perdagangan di desa itu berupa mata uang perak tidak dikurangi.[286]

Adapun sebabnya raja mengambil tindakan demikian ialah karena Bengawan (Brantas) sering kali menjebolkan tanggul di Waringin Sapta, sehingga banyak desa-desa di bagian hilir yang kebanjiran, antara lain desa-desa Lasun, Pañjuwan, Sijanatyesan, Pañjiganting, Talan, Dasapangkah, dan Pangkaja, demikian pula daerah-daerah *sima, kalang, kalagyan, thani jumput,* biara-biara, bangsal-bangsal (untuk para pertapa) kamulan, bangunan suci tempat pemujaan dewa, dan pertapaan-pertapaan, yang terutama di antaranya ialah daerah labapura bagi Sang Hyang Dharmma ring Isanabhawana di Surapura.[287] Akibat banjir yang selalu datang itu sawah-sawah hancur, dan pajak yang masuk menjadi sangat kurang. Tidak sekali dua kali rakyat membuat tanggul, tetapi tidak berhasil menanggulangi banjir yang setiap tahun datang. Raja pun mengerahkan seluruh rakyat yang terkesan akan kilauan jasa-jasa raja untuk mulai bekerja bakti memuat bendungan.[288]

---

[286] Teks bahasa Jawa kunonya berbunyi: *pirak salumari ri desanya patahilanya tan piriten.* Kata *salumari* dipandang berasal dari kata lari bergerak jadi pirak salumari ri desanya disalin dengan semua uang perak yang bergerak di desa itu, atau dalam istilahnya sekarang omzet perdagangan. Memang dari perdagangan dipungut pajak dalam jumlah tertentu

[287] Teks bahasa Jawa kunonya berbunyi: *mammukhya bhuktyan sang hyang dharmma ring isanabhawana mangaran ing surapura.* Seperti telah disebutkan, bangunan suci yang bernama isanabhawana itu ialah tempat pendharmmaan Pu Sindok

[288] *"samangkana ta sri maharaja lumkas umatagaknikang tanayan thani sakalon de ni kirtti pratapa sri maharaja. inatag kapwa pangrabdha mabuñcang hajya madawuhan". Dalam transkripsi Brandes ditulis sakalrare nikerke mritapa*, yang telah diberi keterangan panjang lebar oleh R.M. Soetjipto Wirjosoeparto ("Apa sebabnya Kediri dan daerah sekitarnya tampil kemuka dalam sejarah?", LKIPN -I, seksi D, 1958)

Selesailah sudah pembuatan bendungan oleh raja, kukuh kuat sehingga terbendunglah aliran sungai, dan kini aliran Sungai Brantas dipecah menjadi tiga ke arah utara. Bersukacitalah mereka yang berperahu ke arah hulu, mengambil dagangan di Hujung Galuh, termasuk para pedagang dan nakhoda dari pulau-pulau lain yang berkumpul di Hujung Galuh. Penduduk desa yang sawahnya kebanjiran dan hancur, amat bersenang hati sekarang, karena sawah-sawah mereka dapat dikerjakan lagi berkat bendungan yang dibuat oleh raja. Oleh karena itu, bendungan di Waringin Sapta itu mereka sebut bendungan Sri Maharaja. Akan tetapi, kemudian raja berpikir akan kemungkinan banyaknya orang yang hendak menghancurkan karya besar itu. Oleh karena itu, raja memerintahkan agar penduduk Desa Kamalagyan dengan *kalagyaninya* yang tinggal di tanah-tanah sekitar bendungan itu sebagai penjaga, untuk mengantisipasi semua orang yang hendak menghancurkan bendungan itu. Untuk itu, mereka mendapat bagian pajak seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu jumlah yang dikurangkan dari pajak yang semestinya disetor ke kas kerajaan.[289]

Sekalipun prasasti ini kemudian memuat puji-pujian terhadap raja sebagai ratu cakrawati (penguasa dunia) yang menyirami dunia ini dengan air *amerta* yang penuh kasih sayang, menghujankan jasa dan kemasyhuran, dengan memperbaiki semua bangunan dan tempat-tempat suci serta daerah-daerah yang merupakan sima, sebagai pendewasaan keremajaan masa pemerintahannya di *mandala* Pulau Jawa, karena itu raja menyebarluaskan perbuatan darma supaya ditiru oleh rakyatnya agar berlomba-lomba berbuat kebajikan, tetapi dari kalimat yang menyatakan bahwa raja mengkhawatirkan akan adanya usaha-usaha yang hendak menghancurkan semua jasa-jasa yang diperbuat, kelihatan bahwa Airlangga masih belum yakin benar akan ketaatan seluruh wilayah kerajaan pada pemerintahannya. Seperti telah dikatakan, prasasti Kamalagyan itu dikeluarkan hanya seminggu tambah sehari setelah ia berhasil mengalahkan raja Wijayawarmma, raja terakhir yang masih belum tunduk.

Keadaan itu memperkuat dugaan bahwa putri mahkota, anak perempuan Dharmmawangsa Teguh, ikut terbunuh di dalam serbuan Haji Wurawari. Dialah pewaris takhta kerajaan yang sah, yang tentunya berkedudukan sebagai Rakryan Mahamantri i Hino di masa pemerintahan ayahnya. Meskipun

---

[289] *umiwyö ikang samanana sakahaywakna sang hyang dawuhan*. Kata *umiwyö* biasa berarti melayani, menjamu. Akan tetapi, di sini pengertian demikian tentu tidak sesuai, sebab mereka justru harus mencegah jangan sampai ada orang yang dapat menghancurkan bendungan itu. Kata *umiwyö* diterjemahkan mengantisipasi dalam pengertian menanggulangi atau melawan orang yang hendak menghancurkan bendungan itu

kemudian, Airlangga diberi kedudukan sebagai Rakai Halu, dan ditahbiskan sebagai raja di wilayah yang menjadi lungguh seorang Rakai Halu, yaitu pewaris takhta yang kedua, bagi sebagian para penguasa daerah (para *samya haji*) hal itu dipandang kurang meyakinkan. Bagi mereka itu Airlangga mungkin sekali tetap dipandang sebagai orang luar.[290]

Keterangan yang menarik di dalam prasasti Kamalagyan adalah bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengurangan pajak itu berlaku sejak Airlangga bertakhta di Kahuripan. Prasasti Cane menyebutkan bahwa penetapan Desa Cane sebagai sima berlaku surut sejak raja bertakhta di Wwatan Mas. Prasasti Terep menyebutkan peristiwa serangan musuh sehingga Airlangga terpaksa meninggalkan Wwatan Mas dan lari ke Patakan. Rupa-rupanya pusat kerajaan Airlangga mula-mula ialah Wwatan Mas itu. Akan tetapi, setelah pada tahun 1032 M diserbu musuh, raja memindahkan pusat kerajaannya ke Kahuripan, sekalipun ia dapat mengalahkan lagi musuhnya yang menyerbu Wwatan Mas itu. Kemudian pada prasasti Pamwatan yang berangka tahun 964 Saka (19 Desember 1042 M) dituliskan dengan huruf kuadrat yang besar di sisi depan atas kata *dahana*, yang mungkin sekali menunjukkan nama pusat kerajaan yang baru lagi, yaitu Dahanapura. Bahwa pusat kerajaan Airlangga yang terakhir ialah Dahana dapat dipahami karena setelah kerajaan dibagi dua, bagian yang pertama disebut Pangjalu dengan pusatnya Daha, sedang bagian yang kedua disebut Janggala.

Sebetulnya prasasti Turun Hyang A, yang diperkirakan berasal dari tahun 958 Saka (1036 M) telah menyebutkan bahwa tidak ada lagi musuh, dan karena itu Airlangga menepati janjinya untuk menetapkan Desa Turun Hyang sebagai sima.[291] Jadi, keterangan di dalam prasasti ini bertentangan dengan keterangan di dalam prasasti Pucangan, yang menyebutkan bahwa baru pada tahun 959 Saka (1037 M) raja Wijayawarmma dibunuh, sehingga Airlangga dapat duduk di atas singgasana dengan meletakkan kakinya di atas kepala musuh-musuhnya. Akan tetapi, anakronisme itu dapat juga diterangkan dengan mengutip keterangan di dalam prasasti Pucangan yang mengatakan bahwa Wijayawarmma, Haji Wengker, telah ditaklukkan pada tahun 957 Saka, dan lari meninggalkan istananya, dan juga disebutkan di situ pembuatan pertapaan yang diberi nama Sri Wijayasrama. Ada yang mengatakan bahwa

---

[290] Perlu dicatat di sini bahwa silsilah yang dicantumkan di dalam prasasti Pucangan itu dibuat menjelang akhir masa pemerintahan Airlangga; itu pun ditulis dalam bahasa Sanskerta, sehingga hanya dapat dibaca oleh segolongan kecil saja dari rakyat, yaitu para pendeta dan sebagian kecil golongan penguasa di tingkat pusat

[291] OJO, LXIV. Mengenai angka tahunnya lihat Boechari,"Çri Maharaja Mapañji Garasakan", MISI djilid IV, no. 1, 2, 1968, hlm. 1–26

nama ini ada sangkut pautnya dengan hubungan Airlangga dengan kerajaan Sriwijaya.[292] Nama itu juga dapat diberikan kepada pertapaan tersebut sebagai peringatan atas kemenangan-kemenangan Airlangga atas semua musuhnya seperti yang disebutkan di dalam prasasti Turun Hyang itu.

Mulai dari prasasti Cane sampai dengan prasasti Kamalagyan menyebutkan sebagai *rakryan mahamantri i hino* seorang putri, yaitu Sri Sanggramawijaya Dharmmaprasadottunggadewi. Akan tetapi, di dalam prasasti Pucangan, demikian pula di dalam prasasti Pandan tahun 964 Saka (19 Desember 1042 M)[293] yang menjabat hino ialah Sri Samarawijaya Dhamasuparnnawahana Teguh Uttunggadewa, seorang laki-laki. Rupa-rupanya antara 11 November 1037 M dan 6 November 1041 M Sanggramawijaya digantikan oleh Samarawijaya karena hal-hal yang belum jelas.

Suatu hal yang menarik perhatian ialah bahwa Samarawijaya memakai nama dengan unsur Teguh. Apakah telah terjadi suatu intrik di dalam istana? Benarkah dugaan bahwa putri mahkota Dharmmawangsa Teguh yang dikawinkan dengan Dharmmawangsa Airlangga telah terbunuh dalam serangan Haji Wurawari sehingga kedudukan Airlangga di atas takhta kerajaan Mataram memang dapat dipersengketakan? Bahwa setelah sekian lama memerintah dengan menetapkan anaknya yang tertua, Sanggramawijaya, yang bukan cucu Teguh, atau ibunya bukan putri mahkota, sebagai *rakryan mahamantri i hino* (putri mahkota) lalu muncul anak laki-laki Dharmmawangsa Teguh yang kebetulan dapat selamat dari serbuan Haji Wurawari untuk menuntut haknya? Karena itulah terpaksa Sanggramawijaya digantikan oleh Samarawijaya? Dalam hubungan ini perlu para pembaca diingatkan akan raja Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu, yang dalam prasasti Sirahketing tahun 1204 M menyebut dirinya cucu atau keturunan anak Dharmmawangsa Teguh. Mengapa yang disebut anak Dharmmawangsa Teguh, dan bukan Teguh sendiri?

Yang perlu dikemukakan di sini adalah kenyataan bahwa bahasa Jawa kuno di dalam prasasti-prasasti Airlangga merupakan bahasa prosa yang indah, berbeda dengan bahasa Jawa kuno di dalam prasasti-prasasti yang sebelumnya. Rupa-rupanya raja Airlangga mempunyai seorang pujangga yang ulung. Ini kelihatan dari satu-satunya hasil karya *sastra* dari masa

---

[292] Krom HJG², hlm. 262 sq; juga J.G. de Casparis, Airlangga, 1958

[293] Prasasti Pandan ditemukan kembali dalam keadaan hancur berkeping-keping. Beberapa bagian dapat disambung kembali, dan kini disimpan di Museum Trowulan, Jawa Timur. Prasasti ini belum diterbitkan, sedangkan prasasti Pamwatan masih ada di tempat asli, yaitu di Desa Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Prasasti ini juga belum diterbitkan

pemerintahan Airlangga yang sampai kepada kita, yaitu kitab *Arjunawiwaha*. Kitab ini berisi gubahan dari satu episode *Mahabharata*, yaitu pada waktu Arjuna disuruh bertapa oleh saudara-saudaranya untuk mohon senjata yang ampuh yang dapat memberi kemenangan kepada para Pandawa di dalam perang Bharata yang akan terjadi. Kitab ini digubah oleh pujangga Pu Kanwa sebelum tahun 939 Saka. Angka tahun yang tepat memang tidak disebut, tetapi pada bait terakhir Pu Kanwa menulis bahwa seolah-olah inilah pertama kali Pu Kanwa menggubah kakawin, tetapi kini hatinya bingung karena segera harus mengiringkan raja Airlangga ke medan perang.[294] Dari kalimat ini jelas bahwa kitab itu digubah pada waktu masih ada raja-raja yang harus ditaklukkan oleh Airlangga.

C.C. Berg berpendapat bahwa kitab *Arjunawiwaha* itu digubah untuk melambangkan riwayat raja Airlangga sendiri.[295] Ternyata ada sedikit penyimpangan dari kitab *Mahabharata* dalam hal ini Wanaparwa, yaitu kalau di dalam Wanaparwa dikatakan bahwa Arjuna, setelah selesai menjalankan tugas membunuh raja raksasa Niwatakawaca hendak diberi anugerah oleh dewa-dewa untuk tinggal selama 7 tahun di keindraan bersama para bidadari ia menolak, karena ia pertama-tama ingat akan tugas yang diberikan oleh saudara-saudaranya untuk mohon senjata sakti kepada para dewa. Kini, setelah ia berhasil memperoleh senjata itu, ia mau segera kembali ke dunia melaporkan hasilnya kepada kakaknya, Yudhisthira. Oleh karena itu, di dalam Wanaparwa dikatakan bahwa Arjuna kemudian dikutuk oleh Tilottama menjadi seorang banci. Di dalam *Arjunawiwaha* gubahan Pu Kanwa, Arjuna menerima dinobatkan sebagai raja di keindraan dengan dikelilingi para bidadari, terutama Suprabha dan Tilottama. Versi demikian ini sebenarnya untuk memungkinkan cerita *Arjunawiwaha* itu dipertunjukkan sebagai lakon wayang yang dapat selesai dalam satu malam, dengan alur yang terarah.

Bahasa dari kitab *Arjunawiwaha* memang boleh dikatakan yang terindah di antara karya-karya *sastra* Jawa kuno, di samping kitab *Ramayana Kakawin*.

C. Keadaan Masyarakat

Di samping stratifikasi sosial berdasarkan pembagian kasta seperti yang ternyata dari pelbagai prasasti,[296] ada lagi stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi maupun kedudukan sosial berdasarkan kekayaan materiil. Dalam kenyataan stratifikasi sosial masyarakat Jawa kuno bersifat kompleks dan

---

294 R.Ng. Poerbatjaraka, "*Arjuna Wiwaha*. Tekst en Vertaling", BKI, 82, 1926, hlm. 181–305

295 C.C. Berg,"*Arjuna Wiwaha*. Er-langga's levensloop en bruiloftslied?", BKI, 97, hlm. 64–94

296 Terdiri dari *mon brahmana, ksatrya, waisya, sajanmanya*

tumpang tindih. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa dari seorang kasta *brahmana*, kasta yang tertinggi, dapat menduduki jabatan dalam struktur birokrasi tingkat pusat atau tingkat watak, dapat juga di tingkat desa (*wanua*), tetapi dapat juga tidak mempunyai suatu jabatan. Ada juga orang dari kasta *ksatrya* yang dapat menduduki jabatan keagamaan di tingkat pusat, seperti sang *pamgat* tiruan misalnya, dan dapat juga menjadi pertapa dan tinggal di suatu biara.

Di sini akan disajikan gambaran dalam garis besarnya saja, dimulai dengan golongan elite di tingkat pusat. Di ibu kota kerajaan, yang menurut berita-berita Cina dikelilingi oleh dinding, baik dari batu bata maupun dari batang-batang kayu,[297] terdapat istana raja yang juga dikelilingi oleh dinding. Di dalam istana itulah berdiam raja dan keluarganya, yaitu permaisuri, selir-selir, dan anak-anaknya yang belum dewasa, dan para hamba istana (*rama haji, watek i jro*). Di luar istana, masih di dalam lingkungan dinding kota, terdapat kediaman putra mahkota (*rake hino*), dan tiga orang adiknya (*rakai halu, rakai sirikan*, dan *rakai wka*), dan kediaman para pejabat tinggi kerajaan. Telah dikatakan bahwa pejabat tinggi kerajaan itu terdiri atas pejabat-pejabat keagamaan dan kehakiman, yaitu mereka yang bergelar sang *pamgat*, dan pejabat sipil yang bergelar *rakai*.[298] Mereka itulah yang merupakan kelompok elite birokrasi yang tertinggi. Rumah-rumah mereka itu terletak di dalam kampung khusus di dalam lingkungan tembok kota, tempat mereka tinggal bersama para hamba mereka masing-masing.[299]

Di dalam lingkungan tembok kota itu juga tinggal para pejabat sipil yang lebih rendah, yaitu para *mangilala drawya haji* yang jumlahnya mungkin sampai kira-kira 300 orang, bersama-sama dengan keluarga mereka. Seperti telah dikatakan, sebagian terbesar di antara *mangilala drawya haji* itu ialah abdi dalem keraton, termasuk di dalamnya pasukan pengawal istana (*magalah, mamanah, magandi*),[300] para pandai emas, pandai perunggu, pandai tembaga, pandai besi, dan lain-lain.[301]

---

[297] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 10–12

[298] F. Hirth and W.W. Rockhill, Chau Ju-Kua, hlm. 76

[299] W.F. Stutterheim, "De kraton van Majapahit: VKI, VII, 1948, hlm. 131. Di kota Yogyakarta dan Surakarta sampai sekarang masih terdapat kampung-kampung yang bernama Kadipaten (kampung tempat kediaman Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota), Kepatihan (kampung tempat kediaman patih), Notoprajan (kampung tempat kediaman Pangeran Notoprojo), Gondokusuman (kampung tempat kediaman Pangeran Gondokusumo), dan lain-lain

[300] Di kota Yogyakarta hingga sekarang masih ada kampung yang bernama Numbakanyar dan kampung Nyutran, kampung-kampung yang dahulu ditempati oleh pasukan pengawal istana yang bersenjatakan tombak (galah) dan *pana*h

[301] Kampung-kampung Gemblakan, Sayangan, Kepandean masih dikenal di lingkungan beberapa kota pra-industri

Jadi, di dalam lingkungan tembok ibu kota kerajaan tinggal kelompok elite dan non-elite, raja dan keluarganya mengambil tempat tersendiri. Hubungan antara raja secara langsung dengan kelompok non-elite sulit terlaksana, sedang dengan kelompok elite birokrasi saja hubungan itu hanya terjadi secara formal. Menurut berita-berita Cina, raja tiap hari mengadakan pertemuan dengan putra mahkota, para pangeran, para pejabat tinggi kerajaan, dan pendeta penasihat raja.[302] Dalam pertemuan semacam itu perintah raja diturunkan melalui putra mahkota, yang meneruskannya kepada para pejabat tinggi kerajaan. Mereka itu menyampaikan perintah raja kepada utusan daerah yang datang menghadap mengajukan suatu permohonan kepada raja, atau memerintahkan petugasnya untuk menyampaikan perintah raja itu ke daerah yang bersangkutan.

Biasanya raja mengambil keputusan setelah mendengarkan pendapat dari para pejabat yang hadir. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini prasasti Sarwadharmma tahun 1191 Saka (31 Oktober 1269 M).[303] Di dalam prasasti ini diperingati permohonan rakyat dari desa-desa yang menjadi punpunan *sang hyang sarwwadharmma* di wilayah Janggala dan Pangjalu agar mereka itu dibebaskan dari ikatan *thanibala*, sehingga tidak perlu lagi membayar bermacam-macam pungutan. Permohonan itu disampaikan kepada sang Ramapati dan *rakryan apatih* dan *mpungku dharmmadyaksa* Mapañji Tan Utama. Sang Ramapati memang tugasnya memikirkan kelestarian semua bangunan suci (*sang hyang sarwwadharmma*), lagi pula memang sebenarnya ada anugerah dari raja Wisnuwarddhana membebaskan *sarwwadharmma* dari ikatan *thanibala*, yaitu pada waktu yang menjabat *dharmmadhikarana* adalah Sang Apañji Pati Pati. Diperlihatkanlah prasastinya oleh Mapañji Tan Utama kepada sang Ramapati.

Ketiganya menghadap raja, memohon agar keputusan raja Wisnuwarddhana membebaskan *sarwwadharmma* dari ikatan *thanibala* dikukuhkan kembali. Permohonan itu dikemukakan di dalam persidangan lengkap. Sang Ramapati mengatakan bahwa sebaiknya status swatantra dari wilayah *sarwwadharmma* itu dikukuhkan kembali agar raja tetap teguh duduk di atas singgasana, menjadi payung seluruh Pulau Jawa dan menjadi dewa tertinggi bagi semua raja bawahan di seluruh wilayah Janggala dan Pangjalu.

---

302 Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 16; F. Hirth and W.W. Rockwill Chau Ju-Kua, hlm. 76

303 OJO, LXXIX. Prasasti ini diambil sebagai contoh, karena di dalamnya dengan jelas disebutkan pendapat-pendapat dari para pejabat. Menurut hemat kami, sekalipun di dalam prasasti-prasasti yang lain tidak ada keterangan demikian, tata tertib persidangan yang dipimpin oleh raja tentulah seperti apa yang dikemukakan di dalam prasasti Sarwwadharmma itu

Kata-kata sang Ramapati itu disokong oleh Rakryan Apatih, dan diresapkan oleh Sang Apañji Tan Utama.[304] Raja sangat berkenan akan apa yang dikemukakan oleh ketiga pejabat itu, dan permohonan mereka itu dikabulkan.[305]

Di dalam prasasti Baru tahun 952 Saka (28 April 1030 M) raja Airlangga diingatkan oleh Samgat Landayan Rarai pu Bama dan Samgat Lucem Rarai pu Mañuritan akan janjinya untuk menjadikan Desa Baru sewilayahnya suatu daerah sima, karena jasa-jasa rakyat Desa Baru pada waktu raja dan pasukannya menginap di desa itu dalam perjalanan menyerang musuh di Hasin. Kedua pejabat itu mengatakan jangan sampai orang mengatakan raja ingkar janji.[306] Hal itu dikemukakan di dalam persidangan lengkap juga.

Perintah raja adakalanya dikeluarkan atas permohonan rakyat. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini prasasti Kinewu tahun 829 Saka (20 November 907 M). Prasasti ini menyebutkan pemberian anugerah raja kepada pejabat atau penduduk Desa Kinewu yang masuk wilayah Randaman. Penyebabnya ialah karena ada permohonan dari pejabat/penduduk Desa Kinewu untuk menambah sawah mereka.[307] Semula sawah mereka ditaksir luasnya 6 lamwit 3 *tampah*, dan harus mempunyai katik 28 orang serta menyerahkan gawai sebanyak 8 *masa*.[308] Mereka itu merasa tidak mampu untuk membayar pajak seperti yang telah ditetapkan itu. Oleh karena itu, mula-mula mereka itu menghadap kepada Rakryan i Randaman Pu Wama, memohon

---

304 *mangkana rasa ni hatur sang ramapati, winuri wuri de ni hatur rakryan apatih piniresepaken de ni sang apañji tan utama*

305 *pitowi pwan kakawaça de ni hatur ning pada wagmimaya. sarisaryyanghaturaken heyopadeya. karana çri maharaja. an wawang manganumoda ri hatur sang ramapati. dinulur de rakryan apatih sacchaya mwang sang apañji tan utama*

306 OJO, LX, *pinituturan pwa paduka çri maharaja de samgat landayan rarai pu bama mwang samgat lucem rarai pu mañuritan, dadi ning kadi sira prabhu mitthyawacana. an hana prarithana ri pangulem i ri kanang thani ri baru an sima parnnahanikang thani ring baru*

307 OJO, XXVI. Di dalam prasasti dikatakan *rama* di Kinewu yang mendapat anugerah raja. Seperti telah ditunjukkan, istilah *rama* dipakai untuk menyebut pejabat desa. Akan tetapi, di sini ada keraguan, apakah memang pejabat desa ataukah penduduk Desa Kinewu yang dimaksudkan, karena masalahnya ialah penetapan pajak yang melebihi kekuatan ekonomis mereka. Di dalam prasasti lain, misalnya di dalam prasasti Baru (OJO, LX) ka*raman*, yaitu kumpulan para *rama*, jelas berarti penduduk desa

308 Istilah katik belum jelas artinya. Di dalam beberapa prasasti terdapat kesan bahwa katik ialah orang yang berhubungan dengan pengolahan sawah, dan seolah-olah ada keharusan memiliki jumlah *katik* yang sebanding dengan luas tanah yang dimiliki. Istilah gawai biasanya dianggap sebagai singkatan istilah gawai haji, yang merupakan sinonim dari buat haji, yaitu kewajiban mengerahkan tenaga orang untuk kerja bakti bagi kepentingan raja atau kerajaan. Akan tetapi, di dalam pelbagai prasasti gawai sering dinyatakan dengan sejumlah uang

agar diperbolehkan menambah sawah mereka, disertai pembayaran uang emas sebanyak 3 kati 1 *suwarna*, seekor kerbau, *masuya* (?) 1 *suwarna*, ditambah lagi 2 *suwarna* emas untuk Sang Juru. Akan tetapi, kemudian Rakryan Randaman itu meninggal dan dicandikan di Tambla, tanpa (sempat) menambah sawah pejabat/penduduk Desa Randaman itu. Mereka itu lalu menghadap raja dengan menyerahkan pembayaran 5 kati emas, termasuk untuk putra mahkota dan para pangeran serta sang *pamgat* Tiru Ranu. Yang menyampaikan permohonan mereka itu kepada raja ialah Samgat Momahumah i Mamrata pu Uttara, *pratyaya* di Randaman yang bernama Rake Hamparan, pu Watabwang, dan pu Dumba. Permohonan mereka itu dikabulkan, dan diputuskan oleh raja bahwa luas tanah sawah mereka itu hanya 6 lamwit, dan harus mempunyai katik 12 orang, serta berkewajiban menyerahkan gawai 6 masa.[309] Keluarnya keputusan itu di*saksi*kan oleh semua para *pangurang* ing kabandharyyan (= para petugas pemungut pajak di tingkat pusat).

Keputusan dan perintah raja itu disampaikan secara tertulis. Sang *citralekha* (juru tulis) menulis keputusan/perintah raja itu di atas ripta (lontar), dan itulah yang dibawa ke daerah. Oleh karena itu, di dalam beberapa prasasti sering dijumpai bahwa rakyat yang memegang prasasti ripta itu mohon agar prasastinya dipindahkan ke atas batu, supaya tahan sampai akhir zaman. Dalam kasus seperti prasasti Baru yang didapatkan dalam bentuk prasasti batu, ternyata prasasti tersebut disebut *tamra prasasti* (prasasti tembaga), dan banyak sekali kepala keluarga yang memperoleh anugerah menyimpan prasasti tembaga; ada kira-kira 400 orang.[310] Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah raja memerintahkan untuk menulis 400 lebih prasasti di atas tembaga, ataukah seperti biasanya keputusan raja itu ditulis di atas lontar, untuk kemudian diturun di atas tembaga dan batu oleh pejabat daerah yang membawahi Desa Baru. Sulit rasanya membayangkan bahwa raja memerintahkan menulis 400 lebih prasasti tembaga di ibu kota kerajaan, untuk kemudian dibawa ke Desa

---

[309] Dari ikhtisar ini jelas bahwa masalahnya ialah bahwa pejabat/penduduk Desa Kinewu itu pajaknya ditetapkan terlalu banyak dengan menetapkan luas sawah mereka lebih dari yang sebenarnya. Dalam hal ini yang membingungkan adalah istilah yang digunakan di dalam prasasti, yaitu *mamalaku manglebiha sawah* = mohon untuk menambah sawah. Apakah di sini maksudnya mereka itu mohon menambah areal sawah sehingga sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam surat penetapan pajak, yaitu 6 lamwit 3 *tampah*, sedangkan sawah mereka sebenarnya hanya 6 lamwit saja? Rupa-rupanya raja memutuskan untuk mengurangi saja jumlah pajak yang harus mereka tanggung, dan tidak memperkenankan mereka membuka 3 *tampah* lagi sebagai tambahan

[310] Pada bagian yang memuat daftar nama-nama keluarga yang menerima anugerah prasasti itu batunya aus di beberapa tempat, sehingga ada beberapa nama yang hilang tidak terbaca

Baru untuk dibagikan.[311] Hanya perlu diperhatikan kenyataan bahwa tulisan pada prasasti-prasasti batu dari masa pemerintahan seorang raja, apabila prasasti itu merupakan keputusan raja, biasanya indah dan rapi bentuknya, seolah-olah ditulis oleh seorang *citralekha* kerajaan, sedang tulisan pada prasasti yang bukan keputusan raja kurang indah dan rapi.[312] Bahkan ada prasasti yang tulisannya jelek, ini membayangkan prasasti ini tidak ditulis oleh seorang *citralekha* profesional.[313]

Memang sudah sewajarnya bahwa raja dapat mempekerjakan ahli-ahli yang terbaik di dalam kerajaan. Tidak saja *citralekha*, tetapi juga arsitek, pemahat, penatah, juru sungging, dalang, penari, pesinden, para pandai (pandai emas, perak, tembaga, dan perunggu), dan lain-lain. Juga putra mahkota, para pangeran yang lain dan para pejabat tinggi kerajaan mempunyai seniman-seniman di pelbagai cabang tadi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa ibu kota kerajaan merupakan pusat kebudayaan yang menjadi teladan bagi pusat-pusat kebudayaan daerah. Terutama tentang seni tari terdapat keterangan dalam beberapa hasil su*sastra* Jawa kuno, yaitu bahwa raja sendiri pada waktu-waktu tertentu naik panggung ikut menari. Dalam bidang arsitektur ada keterangan dalam berita-berita Cina bahwa istana raja merupakan bangunan yang terbesar dan terindah dalam kerajaan. Memang di samping kemampuan ekonomis yang lebih kuat, pada nenek moyang kita ada konsepsi tentang hubungan antara kawula dan gusti, yang tidak memungkinkan seorang bawahan (kawula) melebihi atasannya (gusti) dalam hal apa pun.

Putra mahkota, para pangeran yang lain dan para pejabat tinggi kerajaan – kecuali *pangkur*, *tawan*, dan *tirip* – mempunyai daerah lungguh di luar ibu kota kerajaan, sebagaimana ternyata dari adanya daerah-daerah yang disebut *watak hino* (daerah lungguh putra mahkota), *watak hino* (daerah *lungguh rakai Halu*), *watak sirikan*, *watak wka*, *watak halaran*, *watak dalinan*, *watak wadihati*, dan

---

311 Di dalam prasasti Baru itu memang tidak dikatakan bahwa rakyat Desa Baru berbondong-bondong menghadap raja untuk memohon desanya ditetapkan menjadi sima. Seperti telah dikatakan di atas inisiatif menjadikan Desa Baru daerah sima justru datang dari istana

312 Dapat dibandingkan tulisan pada prasasti Sang Hyang Wintang dan prasasti Wayuku, misalnya, yang dikeluarkan oleh seorang Rakai, dengan tulisan pada prasasti Siwagerha yang dikeluarkan oleh raja. Sepintas lalu saja sudah kelihatan bahwa prasasti Siwagerha ditulis oleh seorang *citralekha* yang mahir, sedang kedua prasasti yang lain itu juru tulisnya kurang baik tulisannya

313 Sebagai contoh dapat disebut di sini prasasti Malenga dari raja Mapañji Garasakan. Sekalipun bahasanya baik, tulisannya sangat jelek hingga agak sulit dibaca. Rupa-rupanya ada penduduk Desa Malenga yang menyusun sendiri prasasti itu

watak makudur.[314] Tidak jelas apakah mereka itu masing-masing mempunyai puri di daerah watak mereka. Kemungkinan besar tidak, karena daerah lungguh seorang pejabat dapat diganti atau ditukar-tukar oleh raja. Akan tetapi, mereka itu mempunyai pejabat-pejabat di daerah watak mereka. Pejabat-pejabat itulah yang merupakan elite birokrasi daerah. Selain itu, ada juga penguasa-penguasa daerah yang bergelar *rakai*, *pamgat*, haji atau *samya haji*, yang tidak merupakan pejabat tinggi kerajaan. Mereka itu mempunyai puri, karena kedudukan mereka sebagai penguasa daerah bersifat turun-temurun.[315] Di dalam puri itu mereka itu hidup sebagai raja kecil, termasuk di dalamnya dayang-dayang, seniman-seniman (penari, pesinden, penabuh gamelan, dan lain-lain), *citralekha*, pasukan pengawal, dan lain-lain.[316] Seperti telah dikatakan di atas mereka itu mempunyai pejabat-pejabat yang mengurusi segala segi pemerintahan, baik segi keagamaan maupun segi sipil, di dalam wilayah kekuasaannya. Dapat diharapkan adanya kota-kota dalam ukuran yang lebih kecil dari ibu kota kerajaan, yang juga dikelilingi oleh tembok.[317] Kota-kota itu pun merupakan pusat-pusat kebudayaan di daerah.

Selain ibu kota kerajaan dan kota-kota yang merupakan pusat wilayah watak, tentunya dahulu ada juga kota-kota pelabuhan. Sayang sekali kita tidak mengenal lebih dari satu nama kota pelabuhan di zaman Mataram Kuno berdasarkan pelbagai sumber, yaitu kota Hujung Galuh di Jawa Timur, di muara Sungai Brantas.[318] Menurut prasasti Kamalagyan pelabuhan Hujung Galuh selalu *rama*i dikunjungi oleh perahu-perahu dagang dari pulau-pulau yang

---

[314] Tentang daerah watak pejabat yang lain, seperti *watak manghuri, watak langka, watak tañjung*, dan *watak tiruan*, misalnya, hingga sekarang belum ditemukan petunjuknya di dalam pelbagai prasasti. Mengenai *pamgat* tiruan dapat dicatat di sini bahwa mungkin ada sinonimnya, yaitu *pamgat* tiruranu. Kalau dugaan ini benar, dapat dipastikan bahwa ia mempunyai daerah lungguh, karena di dalam beberapa prasasti ada dijumpai daerah watak tiruranu. Hal itu dapat dipahami karena seperti yang telah dikatakan di atas, ia seorang bangsawan tinggi, mungkin anak raja atau paman atau kaum kerabat raja yang terdekat, yang setaraf kedudukannya dengan hino, halu, sirikan, dan wka

[315] Tentu saja ada juga kemungkinan seorang penguasa daerah dicopot kedudukannya oleh raja dengan tidak lagi memberikan hak waris atas kedudukan itu kepada anak-anaknya; misalnya penguasa daerah itu memberontak dan tidak berhasil merebut kekuasaan, seperti misalnya Haji Wurawari yang kemudian dapat ditaklukkan lagi oleh Airlangga. Mungkin bukan anaknya yang dijadikan Haji Wurawari oleh raja

[316] Perlu juga dicatat di sini kemungkinan adanya kota-kota yang tidak kalah besarnya dengan ibu kota kerajaan, misalnya kota-kota pelabuhan. Kota-kota itu dapat berkembang karena merupakan pusat kegiatan ekonomi

[317] Keterangan tentang puri seorang penguasa daerah itu sayang sekali hanya dapat ditemui di dalam kitab-kitab kidung dari zaman Majapahit dan sesudahnya

[318] Berdasarkan prasasti Kamalagyan, OJO, LXI

lain,[319] apalagi setelah Airlangga berhasil membuat bendungan di Waringin Sapta pada tahun 1037 M. Tidak hanya pedagang-pedagang dari pulau-pulau yang lain di Nusantara yang singgah di Hujung Galuh, tetapi mungkin juga pedagang-pedagang dari kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara. Hal itu dapat disimpulkan dari disebutkannya orang-orang asing dari Asia Selatan dan daratan Asia Tenggara di dalam pelbagai prasasti raja Airlangga, di antara para *wargga Kilalan*. Dapatlah dibayangkan bahwa pelabuhan Hujung Galuh, sebagaimana halnya pelabuhan-pelabuhan di mana pun juga, memperlihatkan keanekaragaman penduduknya. Sayang sekali bahwa hingga kini para ahli arkeologi belum dapat menemukan lokasi Hujung Galuh itu.

Hingga kini belum berhasil ditemukan keterangan tentang pengelolaan pelabuhan-pelabuhan pada zaman Mataram Kuno. Apakah ada semacam syahbandar seperti pada zaman kemudian, tidaklah diketahui dengan pasti. Di antara jabatan-jabatan yang dikenal dari pelbagai sumber belum ada yang dapat dikenali sebagai pengelola pelabuhan. Jadi, di antara gelar para *rakai* tidak ada yang menunjukkan sebagai seorang penguasa daerah pelabuhan.[320]

Di luar kota-kota tersebut terdapat desa-desa (*wanua*), yang diatur oleh para pejabat desa (*rama*). Penduduk desa (anak *wanua*, anak *thani*) pada umumnya hidup dari bertani, berdagang kecil-kecilan, dan mengusahakan kerajinan rumah. Selain itu, ada juga orang-orang yang hidup dari memburuh atau menjadi hamba (*rama, dasa/dasi*). Kalau diperhatikan nama-nama penduduk desa di dalam pelbagai prasasti kelihatan bahwa sebagian besar di antara mereka itu memakai nama-nama Indonesia asli, seperti Si Gorotong, Si Kloteng, Si Guwar, Si Wadag, Si Keni, dan Si Kasih.[321] Hanya sebagian kecil penduduk desa yang memakai nama yang diambil dari bahasa Sanskerta seperti Si Brahma, Si Ramya, dan Si Ananta. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan India tidak terbatas pada golongan elite di pusat dan daerah, tetapi ada juga penduduk desa yang dapat mengenyam pendidikan membaca kitab-kitab suci dan menulis. Seperti yang telah dikatakan, tidak boleh dibayangkan bahwa tingkatan melek huruf pada zaman Mataram Kuno amat sangat rendahnya.

Untuk menjamin loyalitas para penguasa daerah, sri maharaja antara lain mengambil cara perkawinan. Sebagai contoh dapat disebut di sini keterangan di dalam prasasti Munggu Antan yang menyebut Sang Hadyan Palutungan,

---

319 *tka ri para puhawang para banyaga sanka ri dwipantara samañuten ri hujung galuh*

320 Di dalam *Répertoire Onomastique* karangan L-C. Damais, dalam daftar kata-katanya terdapat istilah rakryan hujung galuh dan sang pamagat hujung galuh. Ternyata ini merupakan kesalahan karena gelar itu tidak dijumpai di dalam prasasti Kubu-kubu

321 Lihat L-C. Damais, *Répertoire Onomastique*; pada daftar nama orang dengan predikat si

adik Sang Pamgat Munggu, yang menjadi salah seorang istri atau selir Sang Dewata ing Pastika atau Rakai Pikatan. Contoh lain ialah Pu Kbi, permaisuri atau nenek Pu Sindok, yang disebut sebagai anak Rakryan Bawang. Juga Pu Padmanabhi, salah seorang istri atau selir raja Rakai Kayuwangi, kemungkinan besar ialah anak seorang pejabat keagamaan atau penguasa daerah, yaitu Sang Pamgat Tgang Rat yang bernama Dang Acaryya Widyasiwa. Hubungan perkawinan antara seorang pejabat tinggi kerajaan dengan seorang anak pangeran dijumpai contohnya di dalam prasasti Taji tahun 823 Saka (8-IV-901 M), yang menyebut Rakai Sri Bharu Dyah Dheta, anak Rakarayan i Wungkaltihang (atau Rakai Halu) Pu Sanggrama-dhurandhara, yang menjadi istri Sang Pamgat Demung pu Cintya.[322]

Adanya hubungan antardaerah itu membayangkan adanya sarana perhubungan antara daerah yang satu dengan yang lain, sekalipun mungkin dalam bentuk yang sederhana. Mengingat perkiraan akan kepadatan penduduk Pulau Jawa di dalam zaman Mataram Kuno, dan mengingat gambaran yang diberikan oleh sumber-sumber Belanda dari abad XVII, dapat dibayangkan bahwa daerah watak yang satu mungkin terpisah dari daerah watak yang lain oleh daerah yang masih berupa hutan belukar, tetapi ada jalan yang menghubungkan kedua daerah watak itu, bagaimanapun kondisinya. Gambaran itu diperkuat dengan data di dalam pelbagai prasasti dari masa Rakai Watukura Dyah Balitung sampai dengan Pu Sindok, yang menyebut pejabat dari wilayah watak A yang berasal atau bertempat tinggal di suatu desa yang masuk ke dalam wilayah watak B.

Keterangan semacam itu dapat juga ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa wilayah-wilayah watak yang bersangkutan memang saling berbatasan. Kalau benar demikian, gambarannya menjadi suatu Pulau Jawa yang beberapa daerahnya yang luas berpenduduk padat, yang terbagi atas beberapa daerah watak, yang terpisah oleh hambatan alami dari daerah luas lain yang juga berpenduduk padat. Daerah yang berpenduduk padat itu diperkirakan terdapat di lembah-lembah yang merupakan daerah aliran sungai, seperti misalnya daerah aliran Bengawan Solo, daerah aliran Sungai Opak, daerah aliran Sungai Progo, daerah aliran Sungai Elo, daerah aliran Sungai Bogowonto, Serayu, Serang, Tuntang, Lusi, Brantas. Suatu survei di daerah sekitar Kedu-Temanggung menghasilkan adanya kelompok-kelompok permukiman yang terdapat di daerah aliran sungai-sungai, dengan menggunakan artefak yoni sebagai indikasi permukiman.[323]

---

[322] OJO, XXIII

[323] Bambang Budi Utomo, 1981, skripsi sarjana hlm. 134 dst. Bandingkan dengan gambaran yang diberikan oleh B. Schrieke di dalam bukunya Indonesian Sociological Studies, book II, The Realm, hlm. 102–120

Prasasti-prasasti yang terdapat di daerah Kedu-Temanggung juga membayangkan bahwa daerah itu padat penduduknya, sebagaimana terlihat dari banyaknya desa-desa yang disebut di dalamnya. Prasasti Mantyasih misalnya, menyebut 24 desa di sekeliling Desa Mantyasih, yang diperkirakan ada di sekitar Parakan sekarang. Beberapa di antara desa-desa tpi siring itu ada juga disebut di dalam prasasti Sang Hyang Wintang yang dipahat pada sebuah batu besar di Desa Gondosuli, di sebelah selatan Parakan; ada juga sebagian yang disebut di dalam prasasti Kayumwungan (Karangtengah), prasasti Tri Tpusan, dan prasasti Rukam. Di dalam prasasti Sang Hyang Wintang disebutkan bahwa Desa Tanah Bunga mempunyai 10 desa tpi siring; prasasti Tri Tpusan menyebut 26 desa; prasasti Kayumwungan menyebut 16 desa; dan prasasti Rukam menyebut 7 desa tpi siring, 9 dari Desa Rukam dan 21 desa lain mengirimkan wakil-wakilnya sebagai *saksi*. Dari kelima prasasti itu saja sudah didapatkan hampir 100 desa di daerah Kedu-Temanggung.

Adanya kelompok-kelompok permukiman itu tidak saja terbawa oleh unsur-unsur geografis dan ekologis, tetapi juga karena adanya sistem permukiman. Beberapa prasasti menyebut istilah *pañaturdesa* dan *pangastadesa*, yaitu kelompok desa yang terdiri atas 5 desa dan 9 desa (empat desa mengelilingi desa induk, dan 8 desa mengelilingi desa induk).[324]

Sistem permukiman *mañcapat* itu mungkin ada hubungannya dengan hari-hari pasaran yang lima. Mungkin pada hari Kaliwuan pasar diadakan di desa induk, pada hari Umanis pasar diadakan di desa yang ada di sebelah timur, pada hari Pahing di desa yang ada di sebelah selatan, pada hari Pon di desa yang di sebelah barat, dan pada hari Wage di desa yang ada di sebelah utara.[325]

1. Landasan Kosmogonis

Sebelum membicarakan struktur kerajaan Mataram secara khusus, perlu dikemukakan pendapat R. von Heine Geldern yang mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara mempunyai suatu landasan kosmogonis yaitu kepercayaan akan harus adanya suatu keserasian antara

---

324 Lihat F.D.E. van Ossenbruggen, "De oorsprong van het Javaansche begrip montjapat, in verband met primitieve classificaties", di dalam VMKAW–L, seri ke-5 jilid 3, 1917, hlm. 6–44. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia: Asal-usul konsep Jawa tentang mancapat, dalam hubungannya dengan sistem-sistem klasifikasi primitif. Seri terjemahan no. 49 (1975)

325 Lihat L-C. Damais, "Études Javanaises, III. A propos des couleurs symboliques des points cardinaux", BEFEO, tome LVI 1969, hlm. 75–118

dunia manusia ini (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos).[326] Menurut kepercayaan ini manusia selalu berada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang terpancar dari bintang-bintang dan planet-planet. Kekuatan-kekuatan itu dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan perdamaian atau bencana kepada manusia, tergantung dari dapat atau tidaknya individu, kelompok-kelompok sosial, terutama kerajaan, menyerasikan hidup dan semua kegiatannya dengan gerak alam semesta. Orang dapat memperoleh keserasian itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk astrologi, alamat-alamat yang menunjukkan akan datangnya keberuntungan atau bencana, dan perlambang-perlambang yang lain. Kerajaan dapat memperoleh keserasian dengan alam semesta jika ia disusun sebagai bayangannya, sebagai kosmos dalam bentuk kecil.[327]

Menurut ajaran agama Hindu, alam ini terdiri atas suatu benua pusat berbentuk lingkaran, yang bernama Jambudwipa. Benua ini dilingkari oleh tujuh lautan dan tujuh daratan, dan semuanya itu dibatasi oleh suatu pegunungan yang tinggi. Di tengah-tengah Jambudwipa berdiri Gunung Meru sebagai pusat alam semesta. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi Gunung Meru itu. Di puncaknya terdapat kota dewa-dewa, yang dikelilingi oleh tempat tinggal ke delapan dewa penjaga mata angin (Lokapala).

Gambaran alam dalam agama Buddha agak berbeda dengan gambaran di atas. Akan tetapi, pada dasarnya ada juga persamaan, yaitu bahwa sebagai pusat alam semesta tetap Gunung Meru. Ia dilingkari oleh tujuh lautan dan tujuh pegunungan. Di luar deretan pegunungan yang ketujuh terdapat samudra yang melingkar, dan di sini terdapat empat benua yang terletak di keempat penjuru mata angin. Benua yang di sebelah selatan disebut Jambudwipa, tempat tinggal manusia. Keseluruhannya itu dilingkari oleh deretan pegunungan yang tinggi, yang disebut Cakrawala. Di puncak Meru terdapat surga 33 dewa-dewa dengan kota Sudarsana, tempat Dewa Indra bersemayam sebagai raja sekalian dewa. Di lereng Meru terdapat surga yang terendah, tempat tinggal Catur Lokapala (empat dewa penjaga mata angin). Di atas surga para dewa masih ada lagi surga-surga yang lain, yang jumlahnya berbeda-beda dalam pelbagai sumber. Pada umumnya disebut 24 surga.[328]

---

326 R. von Heine Geldern, "Conceptions of State and Kingship in South-east Asia", FEQ, vol. 22, Nov. 1942, hlm. 15–30. Suatu versi yang berisi beberapa perubahan diterbitkan oleh Cornell University sebagai Data Paper no. 18 (1956). Versi ini telah disalin ke dalam bahasa Indonesia oleh Deliar Noor

327 Ibid.

328 Ibid Bandingkan juga dengan R. von Heine Geldern, "Weltbild and Bauform in Südostasien", WBKKA, Band IV (1930), hlm. 28–78)

Foto 4.12 Gunung Penanggungan, yang dianggap gunung suci pada masa Indonesia kuno
(*Sumber*: Puslitbang, Arkenas)

Sayang sekali bahwa dari zaman Mataram Kuno tidak ada satu pun naskah tentang teori ketatanegaraan. Meskipun demikian, ada juga beberapa petunjuk tentang adanya konsepsi kosmologis yang melandasi struktur kerajaan Mataram Kuno. Di dalam prasasti Canggal dikatakan tentang raja Sañjaya bahwa ia sebagaimana Raghu, telah menaklukkan raja-raja tetangga yang mengelilinginya.[329] Selama ia memerintah dunia ini, yang berikat pinggangkan samudra dan berdada gunung-gunung, rakyat dapat tidur di tepi-tepi jalan tanpa merasa takut akan pencuri dan bahaya-bahaya yang lain. Ungkapan circles of neighbouring rulers dan gambaran bahwa dunia berikatpinggangkan samudra dan berdada gunung-gunung mengingatkan akan gambaran alam semesta yang melukiskan Jambudwipa lingkari oleh lautan dan deretan pegunungan. Dapat juga ini dikembalikan kepada doktrin *mandala* yang diuraikan secara terperinci di dalam kitab *Kautilya Artha-çastra* (bab 6–9).

Sumber lain ialah berita Cina dari zaman dinasti T'ang. Di dalam Hsin T'ang-shu dikatakan tentang kerajaan Ho-ling atau She-p'o bahwa raja tinggal di kota She-p'o (She-p'o-tch'eng), tetapi leluhurnya yang bernama Ki-yen memindahkan pusat kerajaannya ke timur, ke Po-Iu-kia-sseu. Di sekelilingnya ada 28 kerajaan-kerajaan kecil, dan tidak ada satu di antaranya yang tidak tunduk. Ada 32 pejabat tinggi kerajaan, dan yang terutama di antaranya ialah ta-tso-kan-hiung.[330] Angka 28 dan 32 itu tentulah angka-angka simbolis, yang disesuaikan dengan adanya 7 daratan yang melingkari Jambudwipa, yang dinyatakan dengan 7 × 4, yaitu 7 kerajaan di setiap penjuru mata angin, dan 32 pejabat tinggi kerajaan disesuaikan dengan 32 dewa-dewa bawahan dewa Indra.

Di dalam kenyataannya angka-angka itu tidak boleh diharapkan sesuai. Dari sumber-sumber prasasti hanya dapat disimpulkan bahwa kerajaan Mataram Kuno terdiri atas daerah pusat kerajaan, yaitu ibu kota kerajaan dengan istana sri maharaja dan tempat tinggal para putra raja dan kaum kerabat yang dekat, para pejabat tinggi kerajaan dan para abdi dalem, daerah-daerah watak, yaitu daerah-daerah yang dikuasai para rakai[331] dan

---

[329] (*raja gauryadi - gunyo raghur iva vijitaneka - samanta - cakrah = circles of neighbouring rulers*)

[330] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, 1960, hlm. 13

[331] Ada pendapat yang mengatakan bahwa gelar rakai itu berasal dari pokok kata raka, yang berarti kakak, saudara tua, dan menyimpulkan bahwa para rakai itu dipilih di antara para rama (W.F. Stutterheim, *"lets over raka on rakarayan naar aan-leiding van* Sindok's *dynastieke positie"*, TBG, LXXII, 1933, hlm. 159–171; L-C. Damais, "Epigrafische aantekeningen VIII Centraal gezag of koninkrijkjes?", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 22–26; F.H. van Naerssen, "Some aspects of the Hindu-Javanese kraton", JOSA, 2, 1963, hlm. 14–19; *"The economic and administrative history of early Indonesia"*, Handbuch der Orientalistik, 7ter Band., 1977; Soepomo Surjohudojo, "Some aspects of kingship in Ancient Java", Paper presented at the 30th Congress of Human Sciences of Asia and North Africa Mexico City, 1976. Akan tetapi,

para pamgat, dan wanua, yaitu desa-desa yang diperintah oleh para pejabat desa (rama). Di antara para rakai dan pamgat itu ada yang berkedudukan sebagai pejabat tinggi kerajaan, dan ada yang sebagai kepala daerah secara turun-temurun.

Di dalam prasasti-prasasti dari zaman Mataram Kuno dijumpai ±100 daerah watak. Setiap daerah watak meliputi sejumlah desa, yang sayang sekali gambarannya belum jelas hingga sekarang, karena tidak semua desa di dalam wilayah satu watak berperan di dalam peristiwa yang diperingati dengan penerbitan prasasti, sehingga tidak pernah disebut.[332] Ternyata tidak semua nama daerah watak itu sesuai dengan gelar-gelar rakai dan pamgat. Ada daerah watak yang tidak dijumpai persesuaiannya dengan gelar rakai dan pamgat, dan sebaliknya ada juga gelar rakai dan pamgat yang tidak dijumpai daerah watak-nya.[333] Memang harus diakui bahwa pengertian tentang daerah watak itu hingga kini belumlah lengkap.[334]

2. Struktur Birokrasi

Di dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno, raja (sri maharaja) ialah penguasa tertinggi. Sesuai dengan landasan kosmogonis, raja

---

Boechari mengatakan bahwa gelar itu ialah kependekan dari gelar *rakarayan i*, yang berasal dari pokok kata raya yang berarti besar (Boechari, "Some considerations", hlm. 4). Memang dalam prasasti-prasasti Jawa kuno dijumpai kependekan-kependekan yang menyimpang dari kaidah yang diketahui, misalnya rai, yang merupakan kependekan dari raina ni, yang berarti ibunya, asal dari pokok kata ina, gelar bhre ialah singkatan dari *bhatara i*

[332] Sebagai contoh dapat disebutkan di sini *wanua* i panggumulan watak puluwatu, yang berarti Desa Panggumulan yang termasuk wilayah sang Pamgat Puluwatu (prasasti Panggumulan, tahun 902 M, F.D.K. Bosch, "De oorkonde van Kembang Arum", OV, 1925, hlm. 41–44). Pamgat Puluwatu bukan pejabat kerajaan, melainkan seorang penguasa daerah. Contoh yang lain misalnya *wanwa i pi lang watak pangilhyang* yang berarti "Desa Pilang yang masuk wilayah Rake Panggilhyang", dan rake Panggilhyang ialah seorang pejabat kerajaan (prasasti Wurutunggal tahun 911 M, OJO, XXIX)

[333] Sebagai contoh dapat disebutkan di sini *watak pear* (prasasti Mulak I tahun 878 M (KO XI); prasasti Kwak I tahun 879 M (OJO, XII); prasasti Kwak II tahun 879 M. (KO, XIII); prasasti Kiringan tahun 917 M (belum diterbitkan); dan prasasti Lintakan tahun 919 M (KO, 1). Hingga sekarang belum pernah dijumpai gelar rakai *pear* atau pamgat *pear* di dalam prasasti. Sebaliknya ada gelar rake *mandyangin* (prasasti Kinewu tahun 907 M, OJO, XXVI), tetapi belum pernah dijumpai watak *mandyangin*. Ada gelar pamgat tiruan, seorang pejabat tinggi kerajaan setingkat dengan para putra raja (hino, halu, dan sirikan), tetapi belum pernah dijumpai nama desa yang termasuk wilayah tiruan (watak tiruan)

[334] Memang tidak dapat diharapkan bahwa semua prasasti yang ditulis di masa yang lampau ditemukan kembali. Kalaupun itu mungkin, tidak pula dapat diharapkan bahwa semua gelar rakai dan pamgat, dan nama semua desa-desa dan daerah-daerah watak yang ada pada zaman dahulu disebutkan di dalam prasasti-prasasti, karena tidak dapat diharapkan bahwa semuanya berperan dalam peristiwa yang diabadikan dalam prasasti-prasasti itu

ialah penjelmaan dewa di dunia. Hal itu ternyata dari gelar abhiseka dan puji-pujian kepada raja di dalam pelbagai prasasti dan kitab-kitab su*sastra* Jawa kuno sejak raja Airlangga. Dari zaman Mataram Kuno hanya ada dua orang raja yang bergelar abhiseka dengan unsur tunggadewa, yaitu Bhujayottungadewa di dalam prasasti dari Candi Plaosan Lor[335] dan Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajjanasanmatanuragatungadewa.

Untunglah bahwa masih ada naskah *Ramayana Kakawin* yang sampai kepada kita.[336] Di dalam bagian yang berisikan uraian tentang *rajadharmma* (tugas kewajiban seorang raja), yaitu bagian yang merupakan ajaran Rama kepada adiknya Bharata[337] dan kepada Wibhisana,[338] dijumpai antara lain ajaran *astabrata*, yaitu perilaku yang delapan. Dikatakan bahwa di dalam diri seorang raja berpadu 8 dewa-dewa, yaitu Indra, Yama, Suryya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni.[339] Sebagai Indra, yang di sini masih dianggap dewa hujan, raja hendaknya menghujankan anugerah kepada rakyatnya, sebagai Dewa Yama (= Dewa Maut) ia harus menghukum para pencuri dan semua penjahat, sebagai Dewa Suryya (= Dewa Matahari), yang senantiasa mengisap air secara perlahan-lahan, raja hendaknya menarik pajak dari rakyatnya sedikit demi sedikit sehingga tidak memberatkan, sebagai Dewa Soma (= Dewa Bulan) ia harus membuat bahagia seluruh dunia dengan senyumnya yang bagaikan *amerta*, sebagai Dewa Wayu (= Dewa Angin), yang dapat menyelusup ke tempat-tempat yang tersembunyi, raja harus senantiasa mengetahui hal ikhwal rakyatnya dan semua gejolak di kalangan pelbagai lapisan masyarakat, sebagai Kuwera (= Dewa Kekayaan) raja hendaknya menikmati kekayaan duniawi, sebagai Waruna (= Dewa Laut) yang bersenjatakan jerat, raja haruslah menjerat semua penjahat, dan sebagai Agni (= Dewa Api) ia harus membasmi semua musuhnya dengan segera.[340]

---

[335] Mungkin sekali ini ialah gelar abhiseka salah seorang raja yang disebutkan di dalam daftar prasasti Mantyasih. Akan tetapi, karena rupa-rupanya angka tahun prasasti ini tertera pada bagian yang hilang, belum dapat dipastikan raja siapa yang bergelar abhiseka Bhujayottunggadewa itu. J.G. de Casparis berpendapat bahwa raja ini ialah Rakai Pikatan (Prasasti Indonesia, II, hlm. 175–206)

[336] Mengenai umur *Ramayana Kakawin* di sini dianut pendapat R.Ng. Poerbatjaraka "De dateering van het Oud-Javanese *Ramayana*", Gedenkschrift 75 jarig bestaan Kon.Inst. 4 Juni 1926, hlm. 265–272, yang memperkirakan *Ramayana* digubah pada sebelum masa Sindok. Pada pendapat ini diperkuat oleh P.J. Zoetmulder dalam Kalangwan, A survey of Old Javanese Literature. Translation Series, no. 16. KITLV, 1974, hlm. 294

[337] RK, III, 53– 85

[338] RK, XXIV, 43–86

[339] Ajaran *Astabrata* ini dapat dikembalikan kepada kitab *Manawadharmmaçastra* (F. Buhler: The laws of Manu, Tjok, Rai Sudhartha dan Gde Pudja, *Manawa Dharmamaçastra* (*Manu Dharmaçastra*) atau *Weda Smrti* compendium Hukum Hindu, 1978

[340] Lihat juga Boechari, "*Astabrata*", Medan Bahasa, jilid VIII, no. 5, 1958

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa seorang raja harus berpegang teguh kepada dharmma, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa (wnang wigraha anugraha), bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak-gejolak di kalangan rakyatnya, berusaha agar rakyat senantiasa memperoleh rasa tenteram dan bahagia, dan dapat memperlihatkan wibawanya dengan kekuatan angkatan perang dan harta kekayaannya.[341]

Kalau sejak raja Airlangga sampai munculnya wangsa Rajasa raja-raja menggunakan gelar abhiseka yang berarti penjelmaan Wisnu, hal itu mungkin berlandaskan konsepsi yang lain lagi, meskipun masih juga termasuk landasan konsepsi kosmologis, yaitu apa yang oleh B. Schrieke disebut konsep kaliyuga.[342] Konsepsi ini dipergunakan oleh nenek moyang kita untuk membenarkan fakta sejarah tentang tergulingkannya seorang maharaja oleh raja bawahannya. Sebagai dewa di dunia sebenarnya kedudukan seorang maharaja tidak dapat diganggu gugat. Apabila terjadi juga penggulingan seorang maharaja oleh raja bawahannya atau oleh raja dari mandala yang lain, kejadian itu di dalam sumber sejarah disebut dengan istilah pralaya, yaitu kehancuran dunia pada akhir zaman Kaliyuga, sebagai sesuatu yang tidak terelakkan.[343]

Kehancuran kerajaan Dharmmawangsa Teguh karena serangan Haji Wurawari pada tahun 1016 M disebut dengan istilah pralaya di dalam prasasti Pucangan.[344] Dharmawangsa Airlanga yang kemudian berhasil membangun kembali kerajaan yang runtuh itu disebut sebagai penjelmaan Wisnu, sehingga tidak binasa karena kekuasaan mahapralaya.[345] Runtuhnya kerajaan Singhasari (raja Kertanagara) karena serangan Jayakatwang, raja bawahan dari Gelang Gelang di dalam kitab *Nagarakrtagama* digambarkan sebagai kembalinya tatanan dalam zaman Kaliyuga.[346] Konsepsi ini rupa-rupanya sudah dikenal dalam abad VII M, karena di dalam prasasti Canggal dikatakan bahwa setelah raja Sañjaya berhasil membangun kembali kerajaan yang hancur pada masa

---

[341] Bandingkan Boechari, "Epigraphic evidence on kingship in Ancient Java", MISI, jilid V, no. 1, 1973, hlm. 119–125. Lihat juga S. Supomo, "Some aspects of kingship in Ancient Java", 1976

[342] B. Schrieke, "Ruler and Realm in Early Java", Indonesian Sociological Studies, part two, 1955, hlm. 77–81

[343] Bandingkan Mircea Eliade, The myth of the eternal return, or Cosmos and history, Bollingen Series XLVI, 1971

[344] *ri kala ning pralaya ring yawadwipa i rikang çakakala 938 ri prahara haji wurawari masö mijil sanke lwaram*

[345] *kunang ri saksatiran wisnumurtti rumaksa ning sarbwadewata. mahaken tan ilwa kawaca de ni panawara ning mahapralaya*

[346] N*ag, 44, 1. tatkala sri narendra krtanagara mulih ring buddha bhawana. trasang rat dukha harohara kadi maluya rehnyan kaliyuga*

raja Sanna,[347] dan kerajaan menjadi aman sejahtera, Dewi Kali hanya menangis-nangis karena tidak dapat berbuat apa-apa.[348]

Contoh-contoh tentang digulingkannya seorang *maharaja* oleh seorang penguasa daerah atau oleh *maharaja* dari *mandala* yang lain memang tidak banyak. Yang sering terjadi ialah perang saudara, atau perebutan kekuasaan di antara para pangeran, yang disebabkan raja di zaman dahulu, di samping *parameswari* – ada juga yang *parameswari*nya lebih dari seorang – masih mempunyai banyak sekali selir yang dapat memberikan anak laki-laki kepada raja. Perang saudara dan perebutan kekuasaan di antara para pangeran itu terjadi pada masa sesudah Rakai Kayuwangi pu Lokapala sampai ke masa pemerintahan Pu Sindok, dan pada masa sesudah raja Airlangga.[349]

Sebenarnya telah ada ketentuan mengenai hak waris atas takhta kerajaan, yaitu bahwa yang pertama-tama berhak untuk menggantikan duduk di atas takhta kerajaan ialah anak-anak raja yang lahir dari *parameswari*. Sampai pada zaman rajakula Rajasa putra mahkota bergelar *rakai* hino atau *rakarayan* mapatih i hino. Perlu segera dicatat di sini bahwa ia tidak harus putra raja yang sedang memerintah. Ia dapat juga adik, kemenakan, paman, atau kerabat dekat yang lain, asal masih seketurunan secara langsung. Dengan perkataan lain, dengan diterimanya institusi kerajaan sebagai bentuk ketatanegaraan oleh nenek moyang kita, timbul pula pengertian wangsa.

Masih ada dua orang lagi yang berhak menggantikan duduk di atas takhta kerajaan, dan memperoleh tempat di dalam hierarki pemerintahan, yaitu *rakarayan i halu* dan *rakarayan i sirikan*.

Ini sesuai dengan berita Cina dari zaman dinasti Sung, yang mengatakan bahwa tiga orang putra raja bertindak selaku raja muda. Hal ini sesuai pula dengan keterangan yang terdapat di dalam prasasti Telaga Batu dari kerajaan

---

[347] Kehancuran raja Sanna itu dilukiskan dengan kata-kata yang hampir serupa dengan kata-kata di dalam kitab *Nagarakrtagama* yang menggambarkan kerun*tuhan* kerajaan Singhasari karena serangan Jayakatwang. Berdasarkan hal tersebut Poerbatjaraka berpendapat bahwa raja Sanna telah diserang oleh musuh dan gugur dalam pertempuran (R.Ng. Poerbatjaraka Riwajat Indonesia, djilid I, 1952; Çrivijaya, de Sañjaya en de Çailendrawamça". BKI, deel 114, 1958, hlm. 254–264). Karangan terakhir itu telah disalin ke dalam bahasa Indonesia, dan diterbitkan oleh penerbit Bhratara, seri terjemahan, no. 50, 1975). Pendapat itu mendapat dukungan dari Kitab Carita Parahyangan, yang menyebutkan bahwa Sang Sena telah diserang oleh Rahyangta Purbasora dari Galuh (R.Ng. Poerbatjaraka, "De Carita Parahyangan", TBG, LIX, 1920, hlm. 403–416; Atja, Tjarita Parahijangan. Titilar karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi, 1968)

[348] Prasasti Canggal, bait ke-12

[349] Lihat Boechari, "Rakryan *mahamantri* i hino. A study on the highest court dignitary of Ancient Java up to the 13th century A.D.", Journal of the Historical Society, University of Singapore, 1967/1968, hlm. 7–20

Sriwijaya, yang menyebut *yuwaraja*, *pratiyuwaraja*, dan *radjakumara*. Masih ada satu lagi pejabat yang menilik gelarnya tentulah putra raja juga, yaitu *rakai wka*.[350]

Di dalam prasasti-prasasti dari zaman pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura dijumpai seorang pejabat lagi yang kedudukannya setingkat dengan para putra raja itu, yaitu *pamgat* tiruan. Gelar *pamgat* menunjukkan bahwa ia seorang pejabat keagamaan. Ternyata dari prasasti-prasasti dari masa rajakula Rajasa *pamgat* tiruan ialah seorang upapatti atau pejabat kehakiman. Bahwa kedudukannya setingkat dengan para putra raja, yaitu hino, halu, sirikan, dan wka, dapat dilihat dari jumlah pasak-pasak (persembahan) yang diterimanya pada upacara penetapan *sima*, yang ternyata sama jumlah dan jenisnya. Hanya dalam beberapa prasasti *rakai* hino menerima lebih banyak dari keempat orang yang lain.

Di bawah kelima orang itu masih ada sejumlah pejabat kerajaan di tingkat pusat. Jumlahnya tidak sama di dalam pelbagai prasasti, tetapi rupa-rupanya yang terlengkap menunjukkan 12 orang pejabat, yaitu *rake halaran*, *rake pangilhyang*, *rake wlahan*, *pamgat manghuri*, *rake langka*, *rake tañjung*, *pangkur*, *tawan* atau *hañangan*, *tirip*, *pamgat* wadihati, dan *pamgat makudur*. Di dalam upacara penetapan *sima* mereka itu menerima pasak-pasak yang sama jumlah dan jenisnya, yang menunjukkan bahwa mereka itu sama kedudukannya dalam hierarki pemerintahan. Akan tetapi, apa tugasnya dalam pemerintahan belum jelas semua. Hanya beberapa saja di antara mereka itu yang diketahui tugasnya. Pamgat *manghuri*, misalnya, di dalam prasasti-prasasti dari zaman wangsa Rajasa ternyata menduduki jabatan upapatti, seperti *pamgat* tiruan. Pamgat wadihati dan *pamgat makudur* selalu dijumpai sebagai pejabat yang memimpin upacara penetapan *sima*. Pangkur, *tawan*, dan *tirip* rupa-rupanya bertugas mengurusi pajak-pajak yang masuk ke perbendaharaan kerajaan. Di dalam pelbagai prasasti yang berisikan peringatan penetapan *sima* sering dijumpai keterangan bahwa daerah *sima* itu tidak boleh lagi dimasuki oleh pembesar yang tiga, yaitu *pangkur*, *tawan*, dan *tirip*, dan sekalian para *mangilala drawya haji*.[351] Di dalam prasasti Kalasan tahun 778 M mereka itu disebut *adeçaçastrin* dan *deçadhyaksa* dan *mahapurusa*. J.G. de Casparis berpendapat bahwa *deçadhyaksa* di sini harus ditafsirkan sebagai inspektur wilayah, dan

---

[350] Mungkin timbul dugaan bahwa *rakai wka* ialah anak raja dari selir, mengingat bahwa tidak pernah ada seorang raja yang bergelar *rakai wka*. Akan tetapi, ada keterangan di dalam prasasti Rakai Kayuwangi yang menyebutkan bahwa *rakai wka* Pu Catura kemudian menjadi *rakai* halu Pu Catura (prasasti Ramwi tahun 882 M, KO, XV)

[351] *tan katamana de san manak katrini pankur tawan tirip muan saprakara nin manilala drabya haji kabaih* (prasasti Telang, tahun 903 M)

adeçaçastrin sebagai yang senjatanya mencapai daerah-daerah, sedangkan istilah *mahapurusa* dianggapnya sebagai terjemahan dari orang besar atau pembesar. Memang istilah ini secara harfiah sama dengan istilah *sang mana*.[352]

Yang menarik perhatian ialah bahwa sepanjang sejarah kuno Indonesia ketiga pejabat itu tidak pernah dijumpai mempunyai gelar *rakai* atau *pamgat*, dan tidak pernah pula dijumpai desa-desa yang watak *pangkur*, watak *tawan*, atau watak *tirip*, yang berarti bahwa mereka itu tidak mempunyai daerah lungguh. Tidak mengherankan bahwa adakalanya mereka itu dimasukkan ke dalam *mangilala drawya haji*, yaitu mereka yang menikmati kekayaan raja, dalam arti "mendapat gaji tetap" dari perbendaharaan kerajaan.[353]

Mengenai tugas *rake halaran*, *rake pangilhyang* atau *palarhyang*, *rake wlahan*, *rake langka*, dan *rake tañjung* hingga sekarang belum didapatkan keterangan yang menjelaskannya. Sekalipun istilah panggilhyang jelas arti katanya, yaitu memanggil dewa, tetapi sama sekali tidak ada petunjuk bahwa pejabat ini tugasnya ialah memanggil atau mendatangkan dewa atau arwah orang yang telah meninggal dalam suatu upacara. Lagi pula, kalau tugasnya memang demikian, diharapkan pejabat itu berasal dari golongan agama, sehingga ia bergelar *pamgat*, dan bukan *rakai*.

Itulah 17 pejabat tinggi kerajaan di tingkat pusat yang terdapat di dalam prasasti-prasasti. Mereka itu menerima perintah raja, tanpa dibedakannya kedudukan mereka seperti halnya di dalam prasasti-prasasti sejak zaman raja Dharmmawangsa Airlangga. Akan tetapi, kita dapat membedakan adanya sekurang-kurangnya dua kelompok dengan melihat jumlah dan jenis pasak-pasak yang mereka terima. Masih ada satu lagi gelar yang dijumpai beberapa kali dalam zaman Mataram Kuno, yaitu *rake pagarwsi*. Adakalanya ia disebut di antara kelompok pertama, dan adakalanya di antara kelompok kedua.[354]

---

[352] J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia, II, hlm. 220–221 (catatan no. 48)

[353] Di dalam prasasti Timbanan Wungkal tahun 913 M (OJO, XXXV) a. 9: "saprakara ning *mangilala drawya haji kabaih pangkur tawan tirip*...". Ada pendapat yang mengatakan bahwa *mangilala drawya haji* ialah petugas pemungut pajak (F.H. van Naerssen, Oud-Javaansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen, Disertasi, 1941, hlm. 12–19, The Economic and Administrative History of Early Indonesia; H.Bh. Sarkar, Corpus of the Inscriptions of Java, 2 vols., 1972); P.J. Zoetmulder mengatakan bahwa kata mangilala dalam istilah itu lebih baik diberi arti menikmati (Review atas H.Bh. Sarkar, Corpus, BKI, 136, 1976, hlm. 188–192). Kalau ada sinonimnya yang berbunyi maminta drawya haji, istilah ini tidaklah harus ditafsirkan sebagai pejabat yang minta apa yang menjadi hak raja dari rakyat, tetapi pejabat yang minta kekayaan raja, dalam arti minta gaji tetap dari perbendaharaan kerajaan

[354] Di dalam prasasti Ayam Teas tahun 901 M (W.F. Stutterheim, JBG, V (1938, hlm. 121–122), prasasti Pangumulan tahun 902 M (F.D.K. Bosch, OV, 1925, hlm. 41–44) dan prasasti Kubu-kubu tahun 905 M. (Boechari, Prasasti Koleksi Museum Nasional, Jilid I, 1985/1986, hlm.

Ada lagi satu pejabat yang hingga sekarang hanya dijumpai di dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Timur, yaitu *rakryan* kanuruhan. Ia dijumpai di dalam prasasti-prasasti Balingawan tahun 891 M (OJO, XIX), prasasti Kubu-kubu tahun 905 M, prasasti Sugih Manek tahun 915 M (OJO, XXX), dan prasasti Sangguran tahun 928 M (OJO, XXXI). Gelar kanuruhan ditemukan juga di antara tulisan-tulisan singkat pada salah satu candi perwara Candi Loro Jonggrang di Prambanan pada deretan yang sebelah timur. Sebagai pejabat di dalam hierarki pemerintahan pusat ia dijumpai hanya di dalam prasasti Kubu-kubu. Menurut J.G. de Casparis kanuruhan berasal dari nama kerajaan, yaitu kerajaan Kañjuruhan yang disebut di dalam prasasti Dinojo tahun 760 M,[355] yang berpusat di sekitar Malang sekarang. Rupa-rupanya kerajaan Kañjuruhan itu pada suatu ketika ditaklukkan oleh raja Mataram, dan keturunan raja-rajanya tetap berkuasa sebagai penguasa daerah dengan gelar *rakryan* kanuruhan. Mungkin saja ia sebagai penguasa daerah menyumbangkan satu candi perwara pada percandian Loro Jonggrang yang merupakan candi kerajaan.

Rakryan kanuruhan mulai tampak sebagai pejabat dalam hierarki pemerintahan pusat sejak zaman Pu Sindok. Pada masa pemerintahan raja Dharmmawangsa Airlangga ia merupakan pejabat yang terpenting sesudah para putra raja. Keadaan ini terus berlangsung sepanjang zaman Kadiri. Dalam zaman ini ia disebut sebagai yang terutama di antara pada *tanda rakryan ring pakirakiran*.[356]

Itulah gambaran yang diperoleh dari sumber prasasti tentang birokrasi di tingkat pusat kerajaan. Raja didampingi oleh para pangeran, di antaranya putra mahkota, dan seorang pejabat kehakiman; mereka itu ialah *rakarayan* mapatih i hino, i halu, i sirikan, i wka, dan *pamgat* tiruan. Di bawah mereka itu terdapat sejumlah pejabat, di antaranya pejabat kehakiman, pejabat pajak, dan pejabat keagamaan, tetapi yang khusus mengurusi penetapan *sima*. Beberapa di antaranya belum diketahui apa tugasnya di dalam pemerintahan. Golongan yang kedua ini mungkin sekali merupakan para pelaksana pemerintahan.

155–159), *Rakai Pagarwsi* disebut segera sesudah Rakai Wka, masuk kelompok pertama, sedang di dalam prasasti Sangsang tahun 907 M (F.H. van Naerssen, BKI, 95, 1937, hlm. 441–446) ia disebut sesudah sang *pamgat* tiruan, dan masuk kelompok kedua. Istilah *pagarwsi* (dieja *pagar wwasi*) pertama kali muncul di dalam prasasti Sang Hyang Wintang (Gondosuli) yang berbahasa Melayu kuno (Prasasti Indonesia, I, hlm. 50–73)

355 J.G. de Casparis, "Nogmaals de Steen inscriptie van Dinojo", TBG, LXXXI, 1949, hlm. 449

356 tatkala *ajña çri maharaja ... tinadah de rakryan mahamantri i hino ... uminsor i para tanda rakryan ring pakirakiran makabehan makadi rakryan kanuruhan.* Di dalam zaman Majapahit ia tetap anggota kelompok *tanda rakryan ring pakirakiran*, tetapi tidak yang terpenting; dalam zaman ini yang terpenting adalah *rakryan mapatih*

Berita-berita Cina yang menyangkut masalah birokrasi di kerajaan Mataram tidak juga banyak menolong dalam mengungkapkan selengkapnya masalah ini. Berita dari zaman rajakula T'ang (Hsin-T'ang-shu) mengatakan bahwa ada tiga puluh dua pejabat tinggi, dan yang pertama di antara mereka ialah ta-tso-kan-hiung.[357] Berita dari zaman rajakula Sung mengatakan: tiga orang putra raja bertindak sebagai raja muda, dan ada pejabat yang bergelar *samgat* dan empat *rakryan*, yang bersama-sama menyelenggarakan negara sebagaimana para menteri di Cina. Mereka itu tidak memperoleh gaji tetap, tetapi pada waktu-waktu tertentu memperoleh hasil bumi dan barang-barang lain semacamnya. Kemudian menyusul 300 pegawai sipil, yang dipandang setingkat dengan siu-tsai di Cina (pejabat yang lulus ujian jabatan tingkatan terendah); mereka itu mencatat dan mengelola pajak-pajak yang masuk. Mereka itu mempunyai 1.000 pejabat rendahan, yang mengurusi tembok dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, lumbung-lumbung padi, dan para prajurit. Pemimpin angkatan perang memperoleh gaji 10 tail emas tiap setengah tahun; dan ada 30.000 anggota angkatan perang yang digaji setengah tahun sekali sesuai dengan pangkat masing-masing.[358]

Berita yang pertama itu pernah ditafsirkan sebagai berita yang khusus berkenaan dengan masa pemerintahan Rakai Watukara Dyah Balitung, sebab ta-tso-kan-hiung ditafsirkan sebagai Daksa, saudara raja yang gagah berani.[359] Kenyataannya memang Daksa memegang jabatan *rakryan mapatih i hino* dalam pemerintahan Rakai Watukura, jadi sebagai calon pengganti raja. Akan tetapi, mengenai jumlah pejabat memang sulit diterangkan, karena seperti yang telah disebutkan di atas data epigrafis dari zaman ini hanya menunjukkan 17 atau 18 pejabat tinggi kerajaan, termasuk putra mahkota.

Berita yang kedua lebih terperinci, dan dalam beberapa hal memang sesuai dengan data epigrafis. Sudah diketahui adanya tiga, bahkan sebenarnya empat orang putra raja yang duduk dalam hierarki pemerintahan. Akan tetapi, bahwa selanjutnya ada *samgat* dan 4 *rakryan* tidaklah sesuai, karena kenyataannya ada 4 *samgat* dan 5 orang *rakryan*. Keterangan bahwa mereka itu tidak memperoleh gaji tetap, tetapi memperoleh hasil bumi setengah tahun

---

[357] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 13

[358] Ibid., hlm. 16–17. Bandingkan juga L-C. Damais, "Études Sino Indonésiennes. I. Quatre titres javanaises de l'epoque de Song. S'eu-ma-ki-lo-ki-lien", BEFEO, tome L, 1960, hlm. 1–29

[359] Mungkinkah berita ini agak kacau, dan sekali lagi menunjuk kepada pejabat golongan pertama, yaitu *pamgat* tiruan dengan *rakryan mapatih i hino*, i halu, i sirikan, dan i wka? Kalau benar demikian, ini memperkuat dugaan bahwa *rakai wka* ialah anak raja dari selir, yang tidak berhak menggantikan duduk di atas takhta kerajaan

sekali dapat ditafsirkan bahwa mereka itu memperoleh tanah lungguh, dan harus hidup dari penghasilan daerah lungguh-nya. Oleh karena itu, dapat dipahami jika berita Cina itu mengatakan bahwa mereka itu memperoleh hasil bumi setengah tahun sekali, sebab dapat dibayangkan bahwa wakil-wakil yang mengurusi daerah lungguh mereka itu setiap habis panen datang mengantarkan hasil bumi dan hasil-hasil yang lain kepada para pejabat itu, yang tinggal di ibu kota, di sekeliling istana raja.

Yang lebih sulit mengidentifikasikannya ialah 300 pejabat sipil dengan 1.000 pegawai rendahannya. Seperti yang telah dikemukakan, pejabat yang diperkirakan mengurusi perbendaharaan kerajaan ialah *pangkur*, *tawan*, dan *tirip*. Istilah *tawan* sinonimnya ialah *hañangan*, yang berarti rampasan.[360] Akan tetapi, jumlah pejabat yang mende*kati* angka 300 ialah para *mangilala drawya haji*, itu pun jika diikutsertakan data dari zaman Singhasari dan Majapahit. Kalau dijumlahkan semua jabatan yang termasuk *mangilala drawya haji* itu sampai 214 jabatan,[361] tetapi prasasti-prasasti zaman Mataram biasanya menyebut tidak lebih dari 70 jabatan; sedang daftar yang terpanjang dijumpai di dalam prasasti-prasasti raja Dharmmawangsa Airlangga, yang menyebut sampai lebih dari 100 jabatan. Di antara para *mangilala drawya haji* itu memang ada beberapa yang jelas tugasnya berhubungan dengan masalah perpajakan, misalnya *wilang thani* atau wilang *wanua*, yang secara harfiah berarti penghitung tanah atau penghitung desa. Jadi, ia dapat dipersamakan dengan pejabat pendaftaran tanah atau petugas sensus. Sudah barang tentu penghitungan tanah dan penduduk itu ialah untuk kepentingan perpajakan. Tuha dagang mungkin sekali mengurusi pajak perdagangan, *tuhan judi* mungkin sekali mengurusi pajak perjudian, juru jalir mengurusi pajak perempuan tunasusila, pulung padi mungkin sekali mengurusi lumbung padi, *pangurang* mungkin merupakan istilah untuk pemungut pajak pada umumnya. Akan tetapi, banyak di antara para *mangilala drawya haji* itu yang tidak mungkin dihubungkan dengan masalah perpajakan, seperti *widu mangidung* (= pesinden), *marumbai* (= ?), *maguñjai* (= ?), *mamrsi* (= tukang cuci?), dan *rama haji*.

Dengan perkataan lain, kebanyakan di antara para *mangilala drawya haji* itu ialah abdi dalem kraton, yang menikmati kekayaan raja dalam arti menerima gaji tetap dari perbendaharaan kerajaan. Dalam hal ini mungkin juga tuha dagang, *tuhan judi*, juru jalir, ialah abdi dalem yang mengurusi perdagangan di lingkungan ibu kota kerajaan, yang mengurusi para bandar judi atau bandar judi itu sendiri, dan juru jalir ialah germo di dalam lingkungan ibu kota kerajaan.

---

[360] Mungkinkah *tawan* (= tawa-an) berarti tawanan?

[361] Boechari, "Manfaat studi bahasa dan *sastra* Jawa kuno untuk Sejarah dan Arkeologi", Majalah Arkeologi, th. I no. 1, hlm. 5–30

Demikianlah, jika untuk mengidentifikasikan 300 pejabat sipil itu saja sudah sulit, apa lagi yang 1.000 pegawai rendahan. Sama sekali tidak ada data epigrafis yang memungkinkan identifikasi pejabat-pejabat itu kecuali mungkin dengan apa yang disebut *wadwa* (abdi), antara lain *wadwa haji*, *wadwa rakryan* para juru, hamba *rakryan ryyawan*, hamba *rakryan rajaputra*, *rajaputri*, hamba *rakryan* strihaji, hamba *rakryan mahamantri*, hamba *rakryan sri parameswari*, seperti yang terdapat antara lain dalam prasasti Baru tahun 1030 M.[362] Akan tetapi, jumlahnya tentulah tidak dapat diketahui dengan pasti.

Para pejabat tinggi kerajaan dan para pangeran yang menduduki jabatan di dalam hierarki pemerintahan tingkat pusat, baik yang bergelar *rakai* maupun *pamgat*, lebih banyak tingkat di lingkungan ibu kota kerajaan. Sudah tentu untuk mengelola daerah lungguh mereka itu mempunyai pejabat-pejabat di daerah masing-masing. Demikian pula halnya dengan para penguasa daerah yang bergelar *rakai* atau *pamgat*.

Sayang sekali prasasti-prasasti tidak memberikan data yang lengkap tentang struktur birokrasi di tingkat watak itu. Putra mahkota, para pangeran, dan pejabat tinggi di tingkat pusat hanya disebut mempunyai bawahan *parujar* (= juru bicara), *citralekha* (= juru tulis), dan *pangurang* (= pemungut pajak). Adakalanya disebut juga *pitungtung* ni *parujar*[363], dan *tuhan* sebagai bawahan sang *pamgat* wadihati dan sang *pamgat makudur*. Tempat kedudukan pejabat-pejabat tingkat watak itu sering kali disebut juga di dalam prasasti. Sebagai contoh dapat disebut di sini bahwa *parujar* dari *rakai* hino berkedudukan di Kandamuhi, *citralekha*-nya berkedudukan di Watuwarani; *parujar* dari *rakai* halu berkedudukan di Wimga (sering juga tertulis Wisaga); *parujar* dari *rakai* sirikan berkedudukan di Hujung Galuh, *citralekha*-nya di Dharmasinta; *parujar* dari *rakai wka* berkedudukan di Wiridih dan *citralekha*-nya di Halang Manuk, dst.[364] Keterangan-keterangan itu didapatkan di dalam prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Watukura sampai ke masa pemerintahan Pu Sindok.

Lebih terperinci ialah keterangan mengenai pejabat-pejabat di bawah para penguasa daerah. Seorang Rakai Patapan misalnya, disebut mempunyai bawahan *tuhan ning nayaka*, *parujar* atau *parwuwus*, ma*tanda* (= pembawa pataka atau cap),[365] *tuhan* (atau juru) *ning kalula* (= tua-tua dari para abdi), *tuhan ning*

---

362 OJO, LX

363 Untuk kata *pitungtung* ada sinonimnya, yaitu pihujung, yang secara harfiah dapat diberi arti "orang yang ada di depan". Mungkinkah ia semacam kurir yang selalu ditugaskan untuk menjadi penghubung antara pejabat di pusat dan daerah?

364 Lihat L-C. Damais, *Répertoire Onomastique*; Ribut Darmosutopo, dkk., *Répertoire Onomastique* prasasti-prasasti dari Sindok sampai dengan Airlangga, s.v. *parujar*, *citralekha*, *pangurang*

lampuran (tua-tua dari para pesinden),[366] *tuhan ning mangrakat* atau manapal (= tua-tua dari para penari topeng), dan *tuhan ning wadwa rarai*.[367]

Seorang Rakarayan i Pagarwsi[368] dan seorang Rakryan Kalangbungkal dyah Manuku[369] disebut mempunyai bawahan yang lebih banyak, yaitu *tuhan* (atau juru) *ning kanayakan*, ma*tanda*, *parujar*, *juru ning lampuran*, *juru ning kalula*, *juru ning manapal*, *juru ning wadwa rarai*, *manunggu* (?), *citralekha*, *pangurang* ing *wanua* (pemungut pajak di desa-desa), dan seorang pejabat lagi yang di dalam prasasti Jurungan tahun 876 M dieja *mangaseakan* (= mempersembahkan), tetapi di dalam prasasti Kasugihan tahun 907 M dieja *amasangaken* (= mempersiapkan?)[370] Masih ada lagi pejabat yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok bawahan seorang penguasa daerah, yaitu *patih* atau *pinghay* dan *parujar*-nya dan *wahuta* dengan *pitungtung*-nya.

Keterangan yang lebih sistematis dijumpai di dalam prasasti Poh tahun 905 M tentang bawahan Sang Pamgat Kiniwang pu Bnat, penduduk Desa Kawu yang berstatus *sima* kapatihan. Bawahannya yang utama ialah juru *ning kanayakan*, patih, dan *wahuta*. Juru *ning kanayakan* membawahi beberapa orang *pangurang*, yaitu 5 orang yang langsung di bawah Sang Pamgat Kiniwang seorang *pangurang* sang rakring[371] dan seorang *pangurang* manimpiki. Patih membawahi 4 orang patih lampuran, seorang di antaranya berkedudukan di Desa Kawu, tempat tinggal patih dan Pamgat Kiniwang dan 2 orang *parujar*, sedang *wahuta* membawahi pihujung dan *wahuta* lampuran dengan pihujung-nya.

Bahwa seorang *pamgat* penguasa daerah mempunyai bawahan *tuhan ning kanayakan*, patih, dan *wahuta* juga diperoleh datanya di dalam prasasti Panggumulan tahun 902 M. Di dalam prasasti itu disebutkan bahwa Sang Pamgat Puluwatu pu Kunir mempunyai bawahan *tuhan ning kanayakan*, 2 orang

---

365 Untuk arti kata *tanda* lihat P.J. Zoetmulder, Old-Javanese English Dictionary (1982), sv. *tanda*

366 Ibid., sv. lampur

367 Data ini diperoleh dari prasasti Tulang Air tahun 850 M (de Casparis: Prasasti Indonesia, II. 231–236) dan prasasti Mantyasih tahun 907 M (W.F. Stutterheim, TBG, LXVII, 1927)

368 Data dari prasasti Jurungan tahun 876 M

369 Data dari prasasti Kasugihan tahun 907 M (R.Ng. Poerbatjaraka; OV, 1922, hlm. 85)

370 Sebenarnya kedua istilah itu menunjuk ke jabatan yang masih kurang jelas di dalam beberapa prasasti Rakai Watukura Dyah Balitung yang lain dijumpai amasangakan, dan tidak pernah ada jabatan *mangaseakan*

371 Kring dan manimpiki ialah jabatan-jabatan yang biasanya termasuk kelompok *mangilala drawya haji*. Apakah *pangurang* sang rakring dan *pangurang* manimpiki itu pejabat di tingkat watak yang bertugas memungut pajak atas hal-hal yang di pusat dikelola oleh kring dan manimpiki?

patih, dan seorang *wahuta*. *Tuhan i kanayakan* membawahi *tuhan i lampuran*, patih membawahi tunggu durung (= penunggu lumbung padi) dan *parujar*, *wahuta* juga membawahi tunggu durung, dan ada *wahuta* winkas wkas serta *wahuta* lampuran dengan pihujung-nya.[372]

Dari data tersebut dan dari prasasti-prasasti yang lain dapat kiranya disimpulkan bahwa jabatan di tingkat watak, baik di bawah seorang *rakai* maupun seorang *pamgat*, yang terutama ialah juru (atau *tuhan*) *ning kanayakan*, patih, dan *wahuta*. Jabatan yang penting pula ialah *citralekha*, man*tanda*, dan *parujar*. Pemungut pajak dikoordinasikan oleh *tuhan ning kanayakan*, demikian pula juru ning *wadwa rarai*[373], *juru ning kalula*, juru ning mangrakat, dan juru ning mawuat haji (= pemimpin yang mengurusi orang-orang yang harus bekerja bakti untuk kepentingan kerajaan atau kepentingan umum). Setoran pajak dan upeti dalam bentuk yang lain diurusi oleh pejabat *mangaseakan* atau *amasangaken*. Pengelolaan penghasilan daerah watak dilakukan di bawah pengawasan patih, yang dalam hal ini dibantu oleh pejabat *parttaya* atau *pratyaya*.[374] Seorang patih mempunyai *parujar* sendiri.

Pengelolaan lumbung-lumbung padi diurusi oleh ketiga pejabat utama itu karena masing-masing ternyata mempunyai tunggu durung. Demikian pula halnya dengan pesinden (atau penyanyi yang ngamen berkeliling?), karena dijumpai jabatan *tuhan* ning lampuran, patih lampuran, dan *wahuta* lampuran. Wahuta mengoordinasikan beberapa macam urusan. Di samping *wahuta* lampuran dijumpai *wahuta* winkas wkas, *wahuta* manguwu, *wahuta* lbur putih, *wahuta maweas*, dan *wahuta* kulumpang.[375] Semua *wahuta* itu, demikian pula sang *wahuta* sendiri, rupa-rupanya membawahi *pitungtung* atau pihujung,

---

[372] Masih banyak prasasti-prasasti lain yang memberi data tentang birokrasi tingkat watak, tetapi terlalu banyak untuk disebutkan satu demi satu

[373] Untuk istilah ini ada sinonimnya, yaitu *wadwa dmit* (= abdi kecil). Dengan adanya istilah ini timbul keraguan dalam menafsirkan istilah tersebut. Apakah yang dimaksud dengan *wadwa rarai/dmit* itu abdi yang terdiri atas anak-anak atau apa yang dikenal dengan istilah sekarang "wong cilik", yaitu rakyat jelata

[374] Kata *parttaya* ialah kesalahan tulis dari *pratyaya*, yang mestinya dieja *pratyaya*, yang berarti "petugas yang mengurusi aya" (= pendapatan). Dapat dibayangkan bahwa tidak hanya pendapatan yang dicatat, tetapi juga pengeluaran (wyaya)

[375] Apa tugas masing-masing *wahuta* itu kurang jelas. Arti katanya dapat diketahui, seperti *winekas wekas*, yang berarti diberi pesan atau diberi pelajaran; manguwu dari kata kuwu yang berarti kemah atau rumah sementara (= gardu penjagaan untuk keamanan wilayah?), atau kepala wilayah: *maweas* yang tentunya berhubungan dengan masalah beras; kulumpang yang dapat diartikan lumpang (untuk menumbuk padi dll.) atau yoni yang selalu disebut dalam upacara penetapan *sima*; lbur putih yang dapat berarti menghancurkan sesuatu yang berwarna putih

karena itu dijumpai *pitungtung* ning *wahuta* lampuran, *pitungtung* winkas, dan *pitungtung* ri pakuwuan. Di samping itu, ada *pitungtung* ri umah[376] dan ada jabatan kalima.[377] Ada seorang pejabat lagi yang perlu disebut di sini, yaitu hulu kuwu (= kepala atau pemimpin para kuwu), yang rupa-rupanya berkedudukan langsung di bawah penguasa daerah.

Sebenarnya diharapkan tugas administrasi pemerintahan di tingkat *wanua* dibagi ke dalam dua urusan, yaitu urusan sipil dan urusan keagamaan, termasuk urusan peradilan. Akan tetapi, pembagian semacam itu ternyata tidak tampak dari data prasasti. Bahkan timbul beberapa pertanyaan, antara lain mengapa *pratyaya* ditempatkan di bawah patih, sedangkan *pangurang* ditempatkan di bawah *tuhan ning kanayakan*. Mungkinkah hal itu untuk memudahkan pengawasan dan saling kontrol?

Yang perlu dicatat pula ialah masalah domisili pejabat-pejabat itu. Data prasasti menunjukkan bahwa bawahan seorang *rakryan mapatih i hino* atau i halu, dan para pejabat tinggi yang lain tidak selalu tinggal di suatu desa yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan para pangeran dan para pejabat itu. Sebagai contoh dapat disebut di sini *parujar* dari Rakryan Mapatih i Hino Sri Daksa yang bernama Pu Tunggang, ia berkedudukan di Kandamuhi, dan bertempat tinggal di Desa Gunungan yang masuk ke dalam wilayah Tangkilan. Demikian pula halnya dengan *parujar* dari Rake Halaran Pu Tlodung yang bernama Pu Batu; ia berkedudukan di Desa Waru dan bertempat tinggal di Desa Hinapit yang masuk ke dalam wilayan Weka.[378]

Keadaan serupa didapati pada bawahan seorang penguasa daerah. Sebagai contoh dapat disebut di sini bawahan dari Rakryan Kalangbungkal dyah Manuku. Ia membawahi seorang juru *ning kanayakan* yang bernama Sang Jalupangan, penduduk Desa Saninai yang masuk ke dalam wilayah Wunutbunut; seorang *juru ning lampuran* yang bernama Sang Padali, penduduk Desa Walakas yang masuk ke dalam wilayah Walakas; seorang juru ning *wadwa rarai* yang bernama Sang Tamwalang, penduduk Desa Tanggalan yang masuk wilayah Dalinan; seorang *juru ning kalula* yang bernama Sang Danu, penduduk Desa Satidan yang masih ke dalam wilayah Kilipan; seorang juru

[376] Pitungtung ri umah tentunya bertugas di rumah sang *wahuta*, sedang *pitungtung* ri pakuwuan bertugas di kemah atau gardu penjagaan keamanan, terutama di desa-desa perbatasan wilayah watak

[377] Juga tugas seorang kalima tidak diketahui sekalipun arti katanya cukup jelas, yaitu orang yang kelima atau kelima-limanya

[378] Data ini diperoleh dari prasasti Poh tahun 905 M, yang berbunyi: 1.b.14. "... *parujar i hino san kandamuhi pu tungan, anak wanua i gununan watak tankilan* I.b.17. ... *parujar i halaran san ra wanu pu batu anak wanua i hinapit watak wka*"

tulis (*citralekha*) yang bernama Sang Rawungu, penduduk Desa Wurupangung yang masuk wilayah Manimpiki.[379] Sebaliknya ada juga penguasa daerah yang sebagian besar bawahannya tinggal di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, bahkan sedesa dengannya. Sebagai contoh ialah bawahan dari Sang Pamgat Kiniwang pu Bnat, penduduk Desa Kawu yang berstatus *sima* kapatihan. Dari 21 orang pejabat bawahannya ada 4 orang yang tinggal di Desa Kawu, 7 orang di desa-desa yang masuk wilayah Kiniwang, 5 orang tinggal di wilayah yang lain, sedang yang 5 orang lagi tidak disebut tempat tinggalnya.[380]

Bawahan para pangeran, pejabat tinggi kerajaan, penguasa daerah, baik yang bergelar *rakai* maupun *pamgat*, ada juga yang bergelar *rakai* dan *pamgat*. Sebagai contoh ialah bawahan Rakryan i Watutihang pu Sangg*rama*-dhurandhara; ada dua orang *tuhan ni kanayakan*, yaitu Rake Waskar Tal pu Pudraka dan Rake Pakambingan pu Pandawa; lalu seorang *tuhan* ni lampuran, yaitu Rake Wawu Hyang pu Manu, seorang *tuhan ni dwaraga*, yaitu Rakai Simwathayu pu Parwwata; dan seorang *tuhan* ni ma*tanda*kan (= tua-tua dari para penari), yaitu Samgat Gunung Tanayan pu Basu.[381] Seorang Rakryan Kalangbungkal dyah Manuku membawahi seorang *tuhan ni kanayakan* yang bergelar Rake Hni.[382] Seorang patih di Kayumwungan bergelar Rake Ondo, dan seorang *citralekha* bergelar Rake Pilang.[383] Seorang patih lampuran, bawahan Samgat Kiniwang pu Bnat, bergelar Rakai Wadara.[384] Seorang juru *kanayakan*, bawahan seorang *rakai* hino, bergelar Samgat Gunungan dan bernama pu Tuntun.[385] Rakryan *Bawang Mapapan dyah Sahasra* membawahi 3 orang juru *kanayakan* yang bergelar *rakai* dan *pamgat*, yaitu Pamgat Wrikwrik Sang Rahi, Rakai panangkilan, dan Samgat Lua Sang Kirana.[386] Masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat disebutkan di sini.[387]

Biasanya gelar *rakai* dan *pamgat* diikuti oleh nama tempat, yaitu nama wilayah kekuasaannya atau "lungguh"-nya, yang biasanya disebut watak. Akan tetapi, hingga kini di antara nama-nama yang telah disebutkan hanya

---

[379] Data dari prasasti Kasugihan tahun 907 M, I.a. 2–6

[380] Data dari prasasti Poh tahun 905 M, II.a. 8–17

[381] Data dari prasasti Kayu Ara Hiwang tahun 901 M, A. 14–21. (OJO, XXII)

[382] Data dari prasasti Kasugihan tahun 907 M, A. 2

[383] Data dari prasasti Mantyasih I tahun 907 M, I.b. 17, dan prasasti Wurutunggal tahun 912 M, B. 4 (OJO, XXIX)

[384] Data dari prasasti Poh tahun 905 M, II.a. 13–14

[385] Data dari prasasti Sangguran tahun 928 M., b.4 (OJO, XXXI)

[386] Data dari prasasti Panggumulan III (Biota) A. j-k. (OJO, XXXIV, A. 10–11)

[387] Contoh lain dapat dicari di dalam L-C. Damais, *Répertoire Onomastique*, dengan melihat daftar pejabat yang bergelar *rakai* dan *pamgat* dengan varian-variannya

watak Lua yang pernah dijumpai di dalam prasasti.[388] Meskipun demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pejabat-pejabat di bawah para pangeran, pejabat tinggi kerajaan, dan para penguasa daerah yang harus menyelenggarakan pemerintahan di wilayah watak itu tidak digaji tetap berupa mata uang, tetapi memperoleh daerah lungguh juga. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa ada daerah-daerah watak yang lebih kecil di dalam wilayah watak yang besar. Sebagai petunjuk yang dapat membenarkan anggapan tersebut ialah disebutnya *wanua* i kasugihan watak ugihan di dalam prasasti Kayu Ara Hiwang sedang di dalam prasasti Poh dijumpai *wanua* i ugihan watak dalinan. Dalam hal ini wilayah watak dalinan, daerah lungguh Sang Pamgat Dalinan, jelas lebih luas dari daerah watak ugihan. Contoh yang lain ialah *wanua* i wuatan sugih watak wulakan di dalam prasasti Panggumulan, sedang di dalam prasasti Wulakan tahun 927 M, dijumpai *wanua* i wulakan watak puluwatu.[389] Masih banyak lagi contoh yang dapat disebutkan.

Gambaran yang muncul ialah seperti keadaan di Jawa sejak abad XVII M, yaitu para bupati/adipati membawahi beberapa orang wedana yang masing-masing mempunyai lungguh, para wedana membawahi beberapa orang panewu yang juga mempunyai lungguh masing-masing, dan panewu membawahi kepala-kepala desa. Para pejabat bawahan itu pada waktu-waktu tertentu harus menghadap atasannya, dan pada kesempatan semacam itu menggunakan sarana transportasi yang ada, yaitu kuda atau kereta kuda atau pedati.

Yang masih perlu disoroti sekarang ialah adanya pejabat-pejabat bawahan yang bertempat tinggal di luar wilayah kekuasaan atasannya, misalnya, seorang *citralekha* i hino yang bertempat tinggal di suatu desa yang masuk ke dalam wilayah sirikan, seorang *parujar* i wka yang bertempat tinggal di suatu desa yang masuk wilayah layuwatang atau seorang *parujar* i halaran yang bertempat tinggal di suatu desa yang masuk wilayah *weka*. Suatu jawaban yang mudah, tetapi mungkin merupakan anakronisme, ialah bahwa orang dahulu bebas mencari pekerjaan ke mana saja dan bahwa seorang pejabat dapat menerima orang dari mana saja asal memenuhi syarat-syaratnya.[390] Kemungkinan yang lain ialah adanya hubungan keluarga dengan penguasa daerah atau salah seorang pejabat di daerah watak itu, yang kemudian memberi rekomendasi

---

[388] Di dalam prasasti Lintakan tahun 919 M, 11.a. 4 : pihujung i *pangkur* si nanda anak banua i lua watak lua (KO, I)

[389] Di dalam prasasti Wukiran tahun 863 M Desa Wulakan masuk dalam wilayah kekuasaan Rakai Walaing pu Kumbhayoni

[390] Hingga kini belum ditemukan petunjuk tentang adanya ujian jabatan bagi calon-calon pejabat pemerintahan di kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Ujian semacam itu ada di kerajaan-kerajaan di Cina

supaya orang yang meskipun tinggalnya di wilayah yang lain itu ditunjuk untuk memangku suatu jabatan di wilayah sang penguasa daerah. Semuanya itu hingga kini belum dapat dibuktikan.

Kemungkinan yang lain lagi ialah pergeseran daerah lungguh. Misalnya saja *citralekha* i hino yang dikatakan bertempat tinggal di Desa Tamalinggang yang masuk wilayah Sirikan. Mungkin sekali Desa Tamalinggang itu sebelumnya memang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Rakai Hino, tetapi kemudian raja mengadakan perubahan penentuan daerah lungguh dan menentukan Desa Tamalinggang menjadi bagian dari lungguh Rakai Sirikan, dengan atau tanpa mengganti desa untuk dimasukkan ke dalam daerah lungguh Rakai Hino.[391] Ini tidak lebih dari suatu dugaan, tetapi bahwa memang ada pergeseran daerah lungguh seseorang pejabat didapatkan petunjuknya di dalam prasasti. Sebagai contoh Desa Mantyasih yang di dalam prasasti Panggumulan tahun 902 M disebut watak *makudur*, di dalam prasasti Rukam tahun 907 M disebut watak *patapan* Desa Kahuripan yang di dalam prasasti Poh tahun 905 M disebut watak lunturan, di dalam prasasti Lintakan tahun 919 M disebut watak *pagarwsi*; Desa Lua yang di dalam prasasti Panggumulan disebut watak wurutunggal dan di dalam prasasti Poh disebut watak wurusiki, dan di dalam prasasti Lintakan disebut watak *Tañjung*.

Jadi, seperti halnya dengan raja-raja Mataram sejak abad XVII M raja-raja Mataram Kuno juga berhak mengadakan pergeseran daerah lungguh para pangeran, pejabat tinggi kerajaan dan para penguasa daerah. Selain pergeseran dalam penetapan daerah lungguh, dapat dicatat pula adanya pergeseran jabatan dan penggantian pejabat atau mutasi-mutasi jabatan. Dalam hal ini boleh dikatakan bahwa setiap raja baru mengangkat pejabat-pejabat baru di tingkat pusat, dan hampir tidak ada pejabat dari masa pemerintahan sebelumnya yang dipertahankan. Pengecualian hanya terdapat pada diri Pu Agra, yang dalam masa pemerintahan Rakai Pikatan, di dalam prasasti Tulang Air tahun 850 M, menjabat sebagai *pangkur*, di dalam masa pemerintahan Rakai Kayuwangi muncul sebagai *rakryan* mapatih i halu,[392] Pu

---

[391] Ada petunjuk dalam menerima dugaan ini, harus berhati-hati, yaitu adanya *parujar* i halaran dan *parujar* i *manghuri* yang sama-sama tinggal di Desa Hinapit yang masuk wilayah Rakai Wka (watak wka) di dalam prasasti Rukam. Juga harus diyakinkan dahulu bahwa yang dimaksud adalah desa yang sama, mengingat banyaknya homonimi di dalam nama-nama desa di Jawa

[392] Tentu saja harus diingat kemungkinan bahwa kita tidak berhadapan dengan orang yang sama, meskipun namanya sama. Dalam hal pu Agra ini misalnya dilihat bahwa di dalam prasasti-prasasti Rakai Kayuwangi ada nama pu Agrapinda sebagai *tirip*. "Kenaikan" pangkat dari *pangkur* ke *rakryan* mapatih i halu rasa-rasanya memang agak kurang meyakinkan, mengingat bahwa kedudukan yang terakhir itu biasanya dijabat oleh putra atau kerabat raja yang berhak menggantikan duduk di atas takhta kerajaan. Lebih masuk

Manu yang di dalam prasasti Tulang Air menjabat *pamgat* dalinan di dalam masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dijumpai sebagai *pamgat* wadihati,[393] Pu Rañjan yang di dalam masa pemerintahan Rakai Kayuwangi menjabat *tawan*, di dalam masa pemerintahan Rakai Watukura muncul sebagai *pangkur*; Pu Cakra yang di dalam masa pemerintahan Rakai Watukura menjabat *samgat manghuri*, di dalam masa pemerintahan Rakai Layang Dyah Tlodhong muncul sebagai *pamgat* tiruan; Pu Ketuwijaya yang di dalam masa pemerintahan Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya menjabat *rakryan* mapatih i halu kemudian menduduki jabatan *rakryan mapatih i hino*, dalam masa pemerintahan Rakai Layang, dan Pu Sindok yang dalam masa pemerintahan Rakai Layang menduduki jabatan *rakryan* mapatih i halu kemudian menjabat *rakryan mapatih i hino* dalam masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa.

Perkecualian terdapat pada Sri Maharaja Rakai Hino Pu Sindok, yang seperti diketahui memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pejabat-pejabat tingkat pusat dari masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa, sepanjang nama-namanya dapat diketahui dari prasasti-prasastinya,[394] dipertahankan. Mungkin hal itu disebabkan singkatnya masa pemerintahan Rakai Sumba.

Selain itu, diperoleh data tentang adanya mutasi jabatan dalam masa pemerintahan seorang raja. Dalam masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dapat dilihat bahwa Pu Catura, yang semula berkedudukan sebagai *rakai wka*, naik pangkat menjadi *rakai* halu menggantikan Pu Agra, sedang kedudukannya sebagai *rakai wka* digantikan oleh Pu Uding. Pu Wirawik*rama*, yang dalam permulaan masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung berkedudukan sebagai *rakarayan* i *pagarwsi* (penguasa daerah), naik pangkat menjadi *rakryan* mapatih i halu menggantikan Pu Sangg*rama*dhurandhara, sedang kedudukannya sebagai *rakai pagarwsi* digantikan oleh Pu Yayak. Dyah Sahasra, yang dalam masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa dan permulaan masa pemerintahan Pu Sindok berkedudukan sebagai *rakryan/samgat* bawang mapapan, naik pangkat menjadi *rakryan mapatih i hino*, tetapi kemudian turun menjadi *rakryan* mapatih i halu. Di dalam masa pemerintahan Pu Sindok itu

---

akal adalah mutasi dari jabatan *pangkur* ke *tirip*, karena kedua jabatan itu, bersama dengan jabatan *tawan*, merupakan satu kelompok *sang manak katrini*

[393] Mengenai Pu Manu itu perlu dicatat di sini bahwa ia baru muncul di dalam prasasti Kwak tahun 879 M. Sebelumnya yang menjabat sebagai *pamgat* wadihati ialah Pu Managih dalam tahun 873 M, Pu Manghutangi (mungkin dianggap sebagai sinonim dari kata managih) dalam tahun 876 M dan Pu Manuduk dalam tahun 877 M, maka dapat dipahami jika identifikasi Pu Manu dari masa pemerintahan Rakai Pikatan dengan Pu Manu dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi itu diragukan

[394] Sayang sekali prasasti-prasasti Rakai Sumba Dyah Wawa sudah aus sehingga tidak semua nama-nama para pejabat tingkat pusat diketahui

diketahui bahwa Dyah Balyang, yang berkedudukan sebagai *rakai wka* sejak masa pemerintahan Rakai Sumba Dyah Wawa, digantikan oleh Pu Baliswara sejak tahun 934 M.

Kenaikan pangkat dari *rakai wka* menjadi *rakai* halu, dari *rakarayan* i *pagarwsi* menjadi *rakai* halu dan dari *rakryan/samgat* bawang menjadi *rakryan mapatih i hino* mungkin disebabkan orang-orang tersebut amat berjasa kepada raja. Sebagai contoh dapat disebut kasus Rakai Pangkaja Dyah Tumambong yang telah berjasa kepada raja Dharmmawangsa Airlangga. Di samping anugerah berupa penetapan Desa Terep sebagai *sima*, ia mendapat juga anugerah gelar halu, sehingga selanjutnya ia bergelar Rakai Halu Dyah Tumambong. Adapun diturunkannya lagi kedudukan Dyah Sahasra dari hino menjadi halu mungkin disebabkan semula Pu Sindok belum mempunyai anak dari permaisuri yang dapat ditunjuk sebagai putra/putri mahkota, sehingga Dyah Sahasralah yang diberi kedudukan sebagai hino. Akan tetapi, mungkin sekali setelah ada putra/putri mahkota yang lebih berhak, ia diturunkan menjadi calon pengganti yang kedua (halu). Sayang bahwa di dalam prasasti-prasasti yang menyebut Dyah Sahasra sebagai *rakai* halu tidak disebut siapa yang memegang gelar *rakai* hino.[395] Penggantian Dyah Balyang dengan Pu Baliswara sebagai *rakai wka* mungkin sekali disebabkan Dyah Balyang meninggal dunia atau memang dicopot dari kedudukannya karena telah berbuat kesalahan terhadap raja. Ini tidak lebih dari kemungkinan teoretis karena hingga sekarang belum ditemukan contoh konkret di dalam prasasti tentang adanya pejabat yang dipecat dari jabatannya karena berbuat kesalahan terhadap raja.

Kita juga melihat adanya mutasi di kalangan pejabat tingkat watak. Citralekha dari Rakai Sirikan Pu Rakap misalnya, di dalam prasasti Humanding dan Jurungan tahun 875 dan 876 M bernama Siwaprasada, sedang di dalam prasasti Taragal tahun 880 M bernama Siwacitta, dan kelihatan pula dengan jelas perbedaan tulisan pada prasasti itu dengan tulisan pada kedua prasasti yang terdahulu.

Parujar dari Rakryan Mapatih i Halu di dalam prasasti Panggumulan tahun 902 M ialah Si Wiryya, penduduk Desa Pakalangkyangan yang masuk wilayah Pagarwsi, sedang di dalam prasasti Poh tahun 905 M ialah Pu Damodara, penduduk Desa Pandawuan yang masuk wilayah Tiruranu. Parujar dari Rakai Sirikan di dalam prasasti Panggumulan ialah Si Agra, penduduk Desa Singha yang masuk wilayah Hino, sedang di dalam prasasti Poh ialah Pu Ayuddha, penduduk Desa Truwanban yang masih wilayah Tiruranu. Di

---

[395] Dari prasasti Pucangan diketahui bahwa Pu Sindok mempunyai anak perempuan dari permaisuri yang tentunya berkedudukan sebagai putri mahkota (hino), yaitu Sri *Isana*tunggawijaya

dalam prasasti Gulung-gulung tahun 929 M dan prasasti Jeru-jeru tahun 930 M, *pangurang* dari Sang Pamgat Wadihati ialah Sang Ra Wungu, sedang di dalam prasasti Añjukladang tahun 937 M ialah Sang Parapak. Pangurang dari Sang Pamgat Makudur tetap Sang Ra Kwel. Kita juga melihat bagaimana Pu Sindok mempertahankan *citralekha*-nya sejak ia menjabat *rakryan mapatih i hino* pada masa pemerintahan Rakai Pangkaja/Sumba Dyah Wawa sampai ia sendiri menjadi raja. Citralekha itu bernama Laksana, yang di dalam prasasti Sangguran menjabat *citralekha* i hino, tetapi di dalam prasasti Paradah tahun 943 M menjabat *citralekha* i *sri maharaja*.

Pergantian penguasa daerah dalam masa pemerintahan seorang raja dijumpai contohnya di dalam masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung. Di dalam prasasti Rumwiga I tahun 904 M disebut sebagai Pamgat Rumwiga Sang Parasi, penduduk Desa Wiruwiru yang masuk wilayah Sigaran, tetapi di dalam prasasti Rumwiga II yang dikeluarkan kurang dari setahun kemudian disebut sebagai Pamgat Rumwiga Pu Tka, penduduk Desa Tangkilan yang masuk wilayah Tangkilan. Bersamaan dengan itu terjadi pula penggantian pejabat bawahannya, yaitu Sang Diwal oleh Pu Candra sebagai juru *wadwa rarai*, Sang Pagut oleh Pu Sogara sebagai juru kalula dan Sang Plata oleh Pu Leuwyan sebagai juru mangrakat.[396]

Dalam hal ini mungkin penggantian penguasa daerah itu disebabkan Sang Parasi telah membuat kesalahan jabatan dengan memperkenankan para pejabat desa mohon pengurangan pajak dan membatasi kekuasaannya, sehingga Desa Rumwiga mengalami kemunduran.[397] Di bawah penggantinya diadakan ketentuan pungutan pajak yang baru sehingga Desa Rumwiga dihidupkan kembali.[398]

---

[396] Apa yang terjadi dengan pejabat-pejabat yang lain tidak diketahui, yaitu juru *kanayakan*, juru lampuran, mamasangakan, dan hulu kuwu, karena prasasti Rumwiga II tidak menyebutkannya; sebaliknya prasasti Rumwiga II menyebut pejabat-pejabat lain yang tidak ada di dalam prasasti Rumwiga 1, yaitu patih, *wahuta*, dan juru ning mawuat haji

[397] Rumwiga I: Ia.1 ... *tatkala ramanta i rumwiga umandeh panguhka (2) nni wanua ni umari ta yan hinanyan mamuat awaknya, rin magha sansanan wtua ni pamuatnya, pinda pamuatnya ri satahun pira (3) k kati 4 muan mari ta ya mawwan muan mari ta san pamgat wasa pramana rin dawuhan mari ta yan pawalagantan mari ta yan palañjan.* (= pada waktu pejabat Desa Rumwiga mengurangi penghasilan (pajak) desanya, berhentilah mereka (= mereka tidak lagi) ditaksir dalam mempersembahkan (hasil) daerahnya, pada bulan Magha dan Sangsangan (?) keluarnya persembahan mereka. Jumlah persembahan mereka dalam setahun ialah 4 *kati*. Mereka tidak lagi mempersembahkan (?) dan Sang Pamgat (Rumwiga) tidak lagi berwenang atas bendungan, mereka itu tidak lagi membayar pajak walagara dan mereka itu tidak lagi membayar pajak *lañja*

[398] Rumwiga II: I.b.10 ... *jari samwah ni kanan rama sinanmata sanka ri pariksinanya* (= maka permohonan para pejabat desa itu dikabulkan karena kemundurannya/kehancurannya). II.a. 13 ... *samankana kwaih ramanta i rumwiga mapulun tandas sumamwahakan anugraha rakryan mahamantri ri kahuripakna nikang wa (14) nua i rumwiga* (= demikianlah banyaknya pejabat Desa

Prasasti-prasasti memberikan keterangan yang lebih terperinci tentang pejabat di tingkat *wanua* (desa). Pejabat desa secara umum disebut *rama* yang berarti ayah yang terhormat.[399] Sebutan yang lengkap dijumpai di dalam prasasti Poh tahun 827 Saka (17 Juli 905 M). Di sini dijumpai kalimat *rama magman i poh i ri kanan wanna si nusuk anun kabayan pratisara i kahaywakna nikan wanua i poh,* yang berarti pejabat desa yang memegang (perintah) di Desa Poh. Untuk istilah *magman* memang ada sinonimnya, yaitu *mangagam kon* (= menyandang perintah), dalam arti orang yang berhak mengeluarkan perintah.

Keterangan yang terperinci mengenai pejabat-pejabat desa itu dijumpai di dalam prasasti-prasasti dari masa pemerintahan Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura. Sesudah itu, sampai dengan zaman Kadiri istilah *rama* masih dijumpai di dalam prasasti-prasasti, tetapi sudah jarang yang diikuti dengan perincian macam-macam jabatan di desa seperti pada zaman Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura. Di dalam beberapa prasasti dari raja Dharmmawangsa Airlangga istilah ka*rama*n lebih tepat disalin dengan para kepala rumah tangga,[400] sedang dalam beberapa prasasti dari zaman Kadiri dijumpai istilah kabayan untuk *rama*.[401]

Dari prasasti-prasasti zaman Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura terkumpul sekitar 30 macam jabatan *rama magman*, tetapi hanya 10 jabatan yang sering disebut, sedang beberapa jabatan lain hanya muncul sekali saja. Sepuluh macam jabatan yang sering disebut ialah *gusti, kalang dan/atau tuha kalang, winkas, tuha wanua, parujar, hulair, wariga, tuhalas, tuha wereh,* dan *hulu wras*. Yang hanya satu kali muncul di dalam prasasti ialah *mula, mangatag, mataman, matahun, makalangkang, danda,* dan *hulu turus.* Mungkin istilah terakhir itu ada sinonimnya, yaitu mawatas. Jabatan-jabatan yang lain ialah pangumwigyan, patih, mapkan, juru, tuha buru, makajar, kalima, hulu wuatan, hulu kuwu, wadahuma, dan tuha gusali.

Rumwiga yang bermusyawarah memohon anugerah Rakryan Mahamantri dihidupkannya kembali Desa Rumwiga) (bandingkan dengan terjemahan Machi Suhadi, Prasasti Rumwiga, dalam Berkala Arkeologi, th. IV no. 1, 1983, hlm. 39; 44)

399 Istilah *rama* memang secara konsisten dieja dengan a panjang, yang menunjukkan bahwa kata itu berasal dari kata ama dengan mendapat awalan ra. Di dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia ama menang berarti ayah. Akan tetapi, untuk pengertian ayah, prasasti menggunakan istilah *rama* yang dieja dengan a pendek; misalnya dalam ungkapan si gupi *rama* ni jawil (Si Gupi, ayahnya Jawil). Dengan keterangan seperti itu dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa istilah kabayan mungkin sekali berasal dari kata bhaya (Skr.), yang berarti bahaya

400 Antara lain di dalam prasasti Cane (OJO, LVIII) dan di dalam prasasti Baru (OJO, LX)

401 Antara lain di dalam prasasti Padlegan (OJO, LXVII) dan prasasti Jaring (OJO, LXXI)

Sayang sekali bahwa hingga kini belum ada sumber yang dapat menjelaskan apa fungsi masing-masing pejabat desa itu. Ada beberapa yang dapat diperkirakan dari arti katanya, misalnya, tuha *wanua*, yang mungkin merupakan orang yang tertua di suatu desa, dan karena itu dianggap sebagai kepala desa.[402] Hulair merupakan kontraksi dari bentuk hulu air, yang memberi kesan bahwa tugasnya ialah mengurusi masalah pengairan di desa.[403] Tuha alas, yang mungkin sekali merupakan istilah untuk menyebut pejabat desa yang mengurusi hutan yang ada di dalam wilayah desanya; wariga, yang di Bali sekarang masih berarti semacam buku primbon untuk menentukan hari baik bulan baik, mungkin istilah untuk pejabat yang dapat menghitung kapan hari baik bulan baik bagi suatu pekerjaan di desa; tuha *wereh* mungkin pemimpin para pemuda pemudi di desa;[404] *parujar*, yang ada sinonimnya yaitu *parwuwus*, biasa disalin dengan juru bicara;[405] *winekas* tentunya berasal dari kata *weka*s yang dapat berarti akhir atau pesan, sehingga *winekas* mungkin sekali merupakan sebutan bagi seorang pejabat desa yang tugasnya menyampaikan berita-berita kepada penduduk atau kepada desa tetangganya; hulu wras mungkin bertugas masalah persediaan beras/padi di desa, sehingga mungkin sekali istilah itu merupakan sinonim dari makalangkang, yang berarti pejabat yang mengurusi lumbung padi; mapkan ialah pejabat yang mengurusi pasar; *mataman* mungkin pejabat yang mengurusi taman-taman; tuha buru ialah pejabat yang mengurusi masalah perburuan binatang di hutan;[406] tuha gusali ialah pejabat yang mengurusi para pandai (besi, emas, perak, tembaga, dan perunggu); hulu wuatan mungkin sekali pejabat yang mengurusi jembatan jembatan;[407] hulu turus atau mawatas mungkin sekali pejabat yang mengurusi perbatasan antara desa yang satu dengan yang lain, atau mengurusi batas-batas tanah penduduk.[408]

Akan tetapi, istilah-istilah yang lain masih sulit diterangkan. Misalnya saja kalang atau tuha kalang.[409] Yang selama ini sering dihubungkan dengan

---

402 Bandingkan dengan istilah matoa di Sulawesi Selatan

403 Bandingkan dengan istilah mantri ulu ulu yang masih ada hingga sekarang di Jawa

404 Bandingkan dengan istilah kasinoman di Bali

405 Bandingkan dengan pabicara di Sulawesi Selatan

406 Di dalam bahasa Jawa sekarang masih ada istilah tuwo buru

407 Perhatikan sebuah relief di candi Borobudur yang menggambarkan kegiatan penduduk membangun jembatan

408 Masalah batas tanah merupakan masalah yang penting sehingga di dalam kitab kitab hukum merupakan satu bab tersendiri, yang disebut *kawiwadaning wates* (lihat F.H. van Naerssen, "De *astadasawyawahara* in het Oud-Javaansch, BKI, 100, 1941

409 Tuha kalang tentunya pemimpin atau ketua dari para kalang. Mengingat seringnya prasasti-prasasti dari zaman Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura menyingkat kalimat-kalimat,

pengertian *wong kalang*, yaitu kelompok orang yang hidup di dekat hutan di beberapa daerah terpencil di Pulau Jawa, yang hidup dari menebang kayu,[410] sehingga istilah kalang atau tuha kalang ditafsirkan sebagai tukang kayu. Mengingat pentingnya kedudukan tuha kalang di dalam pemerintahan desa, karena seringnya ia disebut di dalam pelbagai prasasti sebagai wakil desa tertentu pada upacara penetapan *sima*, dan bahwa untuk pengertian tukang kayu ada juga istilah *undahagi*, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa kalang atau kalangan mempunyai pengertian lingkaran, yaitu suatu tempat untuk keperluan menyabung binatang (ayam, kambing, babi hutan, dll.) atau adu ketangkasan antara para warga desa atau untuk upacara tertentu, pengertian tukang kayu untuk kalang atau tuha kalang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Demikian pula halnya dengan istilah mangatag, yang tentunya berasal dari kata atag yang berarti perintah, matahun yang mungkin berasal dari kata tahun,[411] *danda* yang artinya hukuman, *mula* yang berarti akar atau permulaan atau asal, kalima yang berasal dari kata lima,[412] hulu kuwu, dan lain-lain. Sekalipun arti katanya diketahui, tidak terbayang jabatan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu.

Di samping *rama magman*, pemerintahan desa mengenal apa yang disebut *rama marata*. Kalau *rama magman* selalu disusul dengan perincian macam-macam jabatan, *rama marata* tidak disusul dengan nama jabatan, tetapi hanya nama orangnya. Timbullah kesan bahwa mereka itu tidak lagi *mangagam kon* (= memegang perintah). Sebutan ini menggambarkan bahwa pejabat desa itu dipilih untuk waktu tertentu, dan setelah selesai masa jabatannya, dan dipandang oleh masyarakat desanya masih cukup berwibawa karena kebijakannya, ia dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang tua di desa yang dianggap mampu memberikan pandangan-pandangan atau nasihat yang

---

sering harus menyalin istilah 'kalang dengan ketua atau pemimpin para kalang", lebih-lebih kalau istilah kalang itu dipakai dalam pengertian pejabat desa (*rama magman*)

410 Mengenai *wong kalang* itu telah ada bacaan yang cukup luas, karena rupa-rupanya kehidupan kelompok ini cukup menarik perhatian para peneliti di masa yang lalu. Lihat a.l. bibliografi mengenai masalah ini di dalam Boechari, "Manfaat studi bahasa dan *sastra* Jawa Kuno Ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi", Majalah Arkeologi, th. I, no. 1, 1977, hlm. 5–30

411 Ada kemungkinan bahwa asal katanya ialah tahu, yang berarti mahir, sehingga dapat kiranya istilah ma-tahu-en ditafsirkan sebagai orang yang bertugas memahirkan orang lain dalam sesuatu pekerjaan

412 Mungkinkah kalima ada hubungannya dengan sistem permukiman, yaitu *pañatur desa,* yang meliputi satu desa induk dengan empat desa yang mengelilinginya, sehingga kalima berarti empat orang kepala dari empat desa yang mengelilingi desa induk

berharga demi kelancaran roda pemerintahan desa.[413] Kemudian menyusul kelompok ibu-ibu rumah tangga (*rainanta*), kelompok muda-mudi (*rara* dan *were wereh*; atau dengan sebutan laki-laki *wadwa*n, matuha manwam) dan kelompok anak-anak (*wadwa rarai*), yang masih belum jelas apa perannya dalam organisasi pemerintahan desa.

Yang perlu dicatat di sini ialah bahwa jumlah pejabat desa tidak sama di desa yang satu dengan di desa yang lain. Ada yang hanya 10 atau 12 pejabat desanya, tetapi Desa Jurungan di dalam prasasti Jurungan tahun 798 Saka (30 Desember 876 M) mengenal 42 pejabat desa dengan 51 *rama marata*. Di antara sekian banyak pejabat desa itu terdapat 10 orang hulu air, termasuk 2 orang hulu air perempuan. Yang menimbulkan masalah yang belum dapat dipecahkan ialah bahwa ada 6 orang tuha *wanua*, termasuk di antaranya 4 orang tuha *wanua* perempuan. Adakah Desa Jurungan itu sedemikian luasnya hingga memerlukan lebih dari seorang tetua desa, ataukah di dalam prasasti ini disebutkan pejabat Desa Jurungan sebagai desa induk dengan desa-desa yang merupakan kesatuan wilayah dengannya (anaking *wanua*). Yang menarik perhatian pula ialah bahwa di dalam lebih dari 20 prasasti dari masa Rakai Watukura tidak pernah di sebut jabatan tuha alas, tuha buru, dan hulu wuatan, sedang jabatan hulu air hanya sekali saja disebut.

Ternyata di dalam prasasti-prasasti para *rama magman* itu semuanya memperoleh jumlah pasak-pasak yang sama, yang berarti bahwa mereka itu semuanya dianggap sejajar kedudukannya. Jadi, tidak seperti di tingkat pemerintahan pusat atau di tingkat watak, yang mengenal beberapa eselon.

Bagaimana mekanisme jalannya pemerintahan pada zaman dahulu dapat dilihat dari prasasti-prasasti yang memperingati penetapan *sima* dan yang menyangkut masalah perpajakan. Biasanya ada permintaan dari rakyat melalui para *rama* untuk menetapkan desanya menjadi *sima*, atau ada permohonan peninjauan kembali jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sejumlah *rama* lalu menghadap kepada pejabat di tingkat watak, yang kemudian mengantarkannya menghadap raja. Pada saat raja sedang dihadap oleh segenap pejabat kerajaan, masalahnya diajukan kepada raja melalui

[413] Pada zaman Majapahit dapat dilihat hal yang sejajar di kalangan pejabat tinggi kerajaan, yaitu yang disebut *mantri wriddha inggitajña*, yang secara harfiah berarti menteri tua yang tahu akan tata cara. Dapat dilihat bahwa di antara mereka itu ada yang menjabat dmung atau kanuruhan atau jabatan yang lain dalam masa pemerintahan raja sebelumnya. Di dalam pemerintahan desa mungkin pergantian jabatan itu terjadi setiap kali ada pergantian kepala desa (tuha *wanua*). Sayang sekali hingga sekarang tidak pernah dijumpai susunan pejabat desa tertentu dalam dua periode yang berlainan

[414] Mungkin dalam zaman Rakai Kayuwangi dan Rakai Watukura jabatan ini dipegang oleh sang *pamgat* tiruan

hierarki yang ada. Dengan mendengarkan pertimbangan-pertimbangan para pejabat kerajaan, terakhir dari sang *rajapurohita*, yaitu pendeta kerajaan,[414] raja menjatuhkan putusannya. Titah raja itu pertama-tama diterima oleh putra mahkota dan para pangeran, lalu diteruskan kepada pejabat eksekutif. Dalam hal penetapan *sima*, dibuatlah surat keputusan yang ditulis oleh *citralekha* kerajaan di atas daun lontar (ripta). Dalam hal permohonan peninjauan kembali jumlah pajak karena salah ukur luas tanah, raja atau putra mahkota memerintahkan pejabat di daerah yang bersangkutan mengukur kembali, dengan di*saksi*kan oleh utusan dari putra mahkota.[415]

Surat keputusan berupa prasasti di atas daun lontar itu kemudian dibawa oleh pejabat daerah yang datang menghadap bersama para *rama* ke desa yang ditetapkan menjadi *sima*.[416]

Dipersiapkanlah upacaranya. Pada kesempatan itu ada *citralekha*, entah dari pusat entah dari daerah, tetapi dalam hal terakhir tentunya dipilih *citralekha* yang terbaik, yang mengutip prasasti itu ke atas batu yang ditempatkan di tengah daerah yang ditetapkan menjadi *sima*.[417]

3. Sumber Penghasilan Kerajaan

Jalur birokrasi yang sama dapat dilihat pula pada penarikan pajak. Pajak ditarik di desa-desa oleh pejabat di tingkat watak yang membawahi desa-desa itu, kemudian para penguasa daerah (*rakai* dan *pamgat* atau para *samya haji*) mempersembahkannya kepada raja setiap habis panen, jadi dua kali setahun. Beberapa prasasti menyebut bulan Asuji dan Karttika sebagai bulan penyerahan pajak, yaitu bulan Oktober–November.[418] Pejabat tingkat watak yang bertugas memungut pajak itu disebut *pangurang*; ada juga istilah

[415] Contoh kasus semacam ini ialah apa yang diperingati di dalam prasasti Palepangan tahun 828 Saka (15 Agustus 906 M) (F.D.K. Bosch, OV, 1917, hlm. 88; H.B. Sarkar, JGIS, V, 1939, hlm. 124–130), dan di dalam prasasti Luitan tahun 823 Saka (diterbitkan oleh Titi Surti Nastiti dkk., Tiga Prasasti dari Masa Balitung, 1982, hlm. 12, 29

[416] Apakah ada permohonan penetapan *sima* atau peninjauan pajak yang ditolak oleh raja tidak pernah diketahui karena hingga kini belum pernah ditemukan arsip kerajaan yang mencatat segala peristiwa yang diperbincangkan oleh raja dengan segenap pejabatnya

[417] Prasasti-prasasti yang memperingati penetapan *sima* biasanya berbunyi: ... t*atkala ajña sri maharaja ... tinadah de rakryan mapatih i hino, halu, sirikan, wka. mwan samgat tiruan. umingsor i para tanda rakryan rin pakirakiran makabehan ... kumonaken ikanan wanua i ... susuken sima ni* ... yang artinya: ... pada waktu perintah raja ... diterima oleh *rakryan mapatih i hino*, halu, sirikan, *weka*, dan *samgat* tiruan, turun kepada semua para *tanda rakryan rin pakirakiran* memerintahkan agar desa .... dibatasi untuk dijadikan *sima*

[418] Misalnya di dalam prasasti Sugihmanek (OJO, XXX) prasasti Turun Hyang A dari masa pemerintahan Airlangga (OJO, LXIV), dan prasasti Padlegan (OJO, LXVII)

pratyaya untuk menyebut pejabat pemungut pajak. Di pusat kerajaan semua pemasukan pajak diurus oleh *pangkur*, *tawan*, dan *tirip*. Di tingkat pusat itu ada pula petugas yang khusus mencatat luas pelbagai jenis tanah di seluruh kerajaan dan ketetapan pajaknya (wilayah *thani* atau wilang *wanua*). Oleh karena itu, sering dijumpai di dalam pelbagai prasasti keterangan bahwa suatu daerah atau sebidang tanah di suatu daerah yang ditetapkan menjadi *sima* mempunyai penghasilan pajak (pangguhan) sebanyak sekian mata uang emas atau perak dan mempunyai kewajiban kerja bakti (gawai) dengan mengerahkan sekian orang setiap tahunnya; sering juga kewajiban kerja bakti itu dinilai dengan uang.[419]

Rupa-rupanya yang dimaksud dengan pangguhan itu semata-mata ialah hasil bumi karena prasasti-prasasti masih menyebutkan macam-macam pajak lain. Menurut berita Cina rakyat harus membayar pajak sebanyak 10% dari hasil tanahnya.[420] Ada juga keterangan yang menyatakan bahwa pajak tanah ditentukan berdasarkan luas tanahnya. Keterangan itu terdapat di dalam prasasti Palepangan, yang menyebutkan bahwa rakyat Desa Palepangan dikenai pajak sebesar 6 *dharana* perak setiap *tampah*.

Di samping pajak hasil bumi dan pajak tanah rakyat harus juga membayar pajak perdagangan dan pajak usaha kerajinan. Pajak yang dikenakan kepada para pedagang (*masamwyawahara*) dan pengrajin (*misra*) tidak diketahui ketentuannya, karena prasasti-prasasti hanya menyebutkan bahwa di dalam daerah yang telah ditetapkan menjadi *sima* ada jumlah tertentu yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Misalnya, pada perdagangan binatang ternak batas bebas pajak ialah untuk kerbau 30 ekor, untuk sapi 40 ekor, untuk kambing 80 ekor, dan untuk itik satu wantayan.[421] Untuk para pengrajin juga harus ada ketentuan tentang harus dikenakan pungutan pajaknya, yaitu bahwa pajaknya harus dibagi tiga. Dalam hal daerah *sima* itu

---

419 Misalnya di dalam prasasti Sugihmanek dapat dibaca: ... *sumusuk ikanang wanwa i limus watek kanuruhan gawai ma mwan anaknya i tampuran pangguhan tapak su 10 ma* .... Di dalam prasasti Ramwi tahun 804 Saka (KO, XV; Boechari: Prasasti, 1985/1986, hlm. 40) terdapat keterangan: *muan pinta kasih ni kanan rama i ramwi i rakarayan, mamala ku ya inandeh gawainya. gawainya tumwayan domas. gawainya manke samas.* (= dan permohonan para *rama* Desa Ramwi kepada Rakarayan (i Halu), mohon agar kewajiban kerja baktinya dikurangi; kewajibannya sebelumnya ialah 800 (orang), sekarang 400 (orang)

420 W.P. Groeneveldt, Historical Notes, 1969, hlm. 16

421 Misalnya di dalam prasasti Linggasuntan, tahun 851 Saka (OJO, XXXIX): A. (21)... k*apwa ikang masamwyawahara hana i sima hiningan kwaihanya anung tan knana drabya haji tlung tuha (22) ni sasamwyawahara yan pangulang kbo 30 sapi 40 wdus 80 andah sawantayan .... Istilah wantayan* masih belum jelas artinya. Di dalam prasasti Gulung-gulung digunakan istilah satarub untuk penjualan itik (OJO, XXXVIII)

diperuntukkan suatu bangunan suci, maka sepertiga dari pungutan pajak dari para pengrajin itu harus dipersembahkan kepada *bhatara* yang dipuja di dalam bangunan suci itu, sepertiga kepada yang mengelola *sima*, dan sepertiga tetap diserahkan ke kas kerajaan.[422] Dalam hal *sima* itu untuk orang yang berjasa, yang sepertiga untuk orang yang berjasa dan mendapat anugerah *sima* itu, dan tidak untuk dipersembahkan kepada *bhatara*.[423] Akan tetapi, adakalanya seluruh pungutan pajak dari para pengrajin itu dipersembahkan kepada *bhatara*.[424] Jadi, tidak jelas berapa persen dari penghasilan para pengrajin itu harus diserahkan sebagai pajak ke kas kerajaan.

Beberapa prasasti memberikan keterangan bahwa ada pungutan tertentu yang dikenakan ring salawang salawang (= dikenakan atas setiap pintu). Keterangan ini dijumpai di dalam prasasti Watukura tahun 824 Saka (27 Juli 902 M),[425] yang menyebut pungutan lain di samping pajak atas tanah, yaitu *pangraga skar* (persembahan bunga) yang harus dipersembahkan pada tiap bulan purnama di bulan Jyestha (bulan Juni) dan di bulan Caitra (April). lni harus ditafsirkan bahwa setiap rumah atau kepala keluarga harus memberi persembahan bunga pada setiap bulan purnama di bulan April dan Juni.[426]

Dapat dibayangkan bahwa setiap kepala keluarga itu tidak hanya semata-mata memberikan persembahan bunga. Adanya pejabat *wilang thani* atau wilang *wanua*, yang secara harfiah berarti "menghitung tanah" atau "menghitung desa", memberi gambaran bahwa pada zaman dahulu sudah ada sensus penduduk. Dapat diperkirakan bahwa tugas pejabat itu tentunya bukan hanya menghitung jumlah desa dan tanah-tanah yang dapat dikenai

---

[422] Di dalam prasasti Linggasuntan itu juga: A: 18 ... *kunong ikang misra mañambul mañawring manglakha mangapus ... (20) ... kapwa ya tribhagan drabya haji nya saduman mara i bhatara saduman mara i sang makmitan sima sa (21) duman mara i sang mangilala drabya haji r ....*

[423] Misalnya di dalam prasasti Hring tahun 859 Saka (OJO, XLVII): B. 32 ... *kapwa ya tlung duman drabya hajinya saduman mare samgat marga (33) nung pu danghil saduman mara i ri kang punta makmitan sima ....*

[424] Misalnya di dalam prasasti Gulung-gulung: .... A. 27 ... *bhatara ri prasada atah pramana i sadrabya (28) hajinya*

[425] F.H. van Naerssen, OudJavaansche Oorkonden. hlm. 2–86 A.(2) ... *muang pangraga ska (3) r. ma ku 2, bras ku 1. ring salawang, muwah ma ku 1, bras, ku 1, ring salawang, karyya pananam purnnama ning (4) jyesta, muwah ma ku 1, bras ku 1, ring salawang, purnnama ning cetra*

[426] Dari beberapa prasasti dapat dibayangkan bahwa persembahan bunga itu berupa keranjang yang berbentuk bulat atau persegi, yang berisi bunga yang masih segar, seperti yang dapat dibaca di dalam prasasti Poh Galuh (KO, XVII) dari masa pemerintahan raja Daksa. Di dalam prasasti itu dapat dibaca: I. b(10) ... *magawaya raga wlu 6 raga pasagi 6 mesya kambang tan alayu, muang nilot (11) palasari, pawuata i sri maharaja pisan ing satahun ....* Jadi, persembahan bunga itu merupakan buat haji, seperti yang jelas terlihat dari prasasti Taji (OJO, XXIII); *buathajya nya mangraga kamwang angkan tahun ....*

pajak di seluruh kerajaan – dalam pengertian mempunyai daftar desa dan tanah, yang diterimanya dari pejabat-pejabat di tingkat watak –, tetapi juga menyusun daftar jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga dengan mata pencahariannya masing-masing. Dengan demikian, setiap kepala keluarga mempunyai kewajiban membayar pajak sesuai dengan penghasilannya, baik sebagai petani atau sebagai pedagang atau pengrajin, atau sebagai apa saja yang menjadi mata pencahariannya.

Mengenai yang terakhir itu ada keterangan di dalam beberapa prasasti, yaitu apa yang disebut *wargga Kilalan*, yang berarti warga desa yang dikenai kewajiban membayar pajak. Di samping orang-orang asing, yaitu orang-orang dari India (*kling, aryya, pandikira, drawida*), Sri Langka (singhala), Vietnam (campa), dan Kamboja (kmir), terdapat juga sena mukha (pemimpin pasukan perang), hawang dari kata puhawang, yang berarti nakhoda kapal dagang? *huñjeman* (?), *warahan* (?), *mapadahi* (penabuh gendang), *kicaka* (penari), *terimba* (?), *awayang* (dalang? atau penari wayang orang?), *atapukan* (penari topeng), *abañol* (pelawak), dan *salaran* (?).[427] *Mapadahi, kicaka, tarimba, awayang, atapukan,* dan *abañol* sering kali memeriahkan upacara penetapan *sima* di desa dengan mendapat imbalan uang.[428]

Tentang orang-orang asing yang menetap di Jawa sebagai pedagang, dan menjadi warga yang berkewajiban membayar pajak, sudah disebutkan sepintas lalu.[429] Anehnya daftar orang-orang asing itu hanya terdapat di dalam beberapa prasasti dari masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga, meskipun dari prasasti Wurudu Kidul dapat diketahui bahwa di kerajaan Mataram waktu masih berpusat di daerah Jawa Tengah sudah ada orang-orang asing yang menetap. Di zaman Majapahit dijumpai juru kling dan juru cina di antara para *mangilala drawya haji*, yaitu para abdi dalem keraton yang mengurusi para pedagang dari India dan Cina yang menetap di ibu kota kerajaan Majapahit, dan mungkin juga yang menetap di pelbagai tempat yang lain di wilayah kerajaan Majapahit di Jawa. Di dalam beberapa prasasti raja Dharmmawangsa Airlangga yang disebut *wargga Kilalan* tidak ada disebut orang-orang Cina. Mungkin sekali memang pedagang-pedagang Cina belum berlayar sendiri ke Asia Tenggara dan Asia Selatan sampai dengan abad XI M.

Bahwa *senamukha* termasuk *wargga Kilalan* memang agak membingungkan, berita-berita Cina dari zaman Dinasti Sung mengatakan bahwa panglima

---

[427] Daftar ini antara lain dijumpai di dalam prasasti Cane (OJO, LVIII) prasasti Patakan (OJO, LIX) dan prasasti Turun Hyang A (OJO, LXIV)

[428] Dapat dilihat a.l. di dalam prasasti Watukura, prasasti Panggumulan (F.D.K. Bosch, OV, 1925, hlm. 41–45), prasasti Poh (W.F. Stutterheim, INI, afl.1, hlm. 4–7), dll.

[429] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, 1960, hlm. 16

angkatan perang mendapat gaji setengah tahun sekali sebanyak 10 *tahil* emas, dan bahwa tentara kerajaan terdiri atas 30.000 orang yang juga digaji dua kali setahun sesuai dengan pangkat masing-masing.[430] Dengan keterangan itu diduga bahwa *senamukha* itu dimasukkan ke dalam golongan *mangilala drawya haji*. Mengapa ia dimasukkan ke dalam golongan warga yang harus ditarik pajak, belum ada sumber yang menerangkannya. Mungkinkah karena pekerjaan memimpin pasukan perang itu tidak merupakan pekerjaan tetap karena memang pada zaman dahulu tidak ada tentara bayaran kecuali pasukan pengawal raja/istana, sehingga seorang pemimpin pasukan itu di waktu damai harus mencari nafkah dengan pekerjaan yang lain?

4. Ekonomi

Beberapa prasasti memberi keterangan selintas tentang kegiatan ekonomi pedesaan itu. Di atas telah disinggung sedikit tentang para pedagang dan pengrajin dalam bagian yang membicarakan masalah perpajakan. Di dalam prasasti Panggumulan disebut adanya orang-orang yang menjual beras dari Desa Tunggalangan ke pasar di Desa Sindingan. Tidak dijelaskan apakah mereka itu memikul berasnya atau membawa berasnya dengan pedati; istilahnya di dalam prasasti hanyalah *mahawan* (= melalui jalan). Data prasasti menggambarkan bahwa barang dagangan ada yang dipikul (pinikul dagangannya), ada yang dibawa dengan pedati (magulungan), dan ada yang dibawa dengan perahu (maparahu). Dengan disebutnya pedati dan perahu sebagai sarana transportasi untuk membawa barang dagangan terbayang adanya perdagangan antardesa dan antarwilayah.

Adanya beberapa istilah untuk menyebut pedagang, yaitu *abakul*, *adagang*, dan *banyaga*; istilah *masamwyawahara* mungkin dipakai dalam pengertian umum. Belum jelas apakah ketiga istilah terdahulu itu dipakai untuk secara tegas membedakan besar kecilnya jumlah barang dagangan masing-masing. Jan Wisseman dalam salah satu karangannya mengajukan pendapat bahwa *abakul* ialah pedagang eceran, sedang *banyaga* ialah pedagang besar yang

---

[430] Mungkin sekali apa yang disebut *magalah*, *mamanah*, dan *magandi* di antara para *mangilala drawya haji* ialah anggota pasukan pengawal raja/istana, yaitu pasukan yang bersenjatakan tombak, yang bersenjatakan *panah* dan yang bersenjatakan gada. Pasukan semacam inilah yang mungkin di dalam kitab Pararaton disebut pasukan bhayangkara. Akan tetapi, apakah jumlahnya sampai 30.000 orang seperti yang dikatakan di dalam berita Cina dari dinasti Sung itu masih meragukan. Mungkin jumlah itu ialah jumlah seluruh pasukan yang dapat dikerahkan oleh raja pada waktu perang, yang terdiri atas penduduk laki-laki yang sanggup memegang senjata, warga dari para pangeran dan para pejabat tinggi kerajaan sehingga dapat dikatakan menjadi prajurit di waktu perang merupakan buat haji (B. Schrieke, Ruler and Realm, hlm. 127 dst.)

melakukan perdagangan antarpulau dan mungkin juga internasional; dan *adagang* mungkin semacam grosir.[431]

Yang diperdagangkan di pasar desa pertama-tama ialah hasil bumi, seperti beras, buah-buahan, sirih pinang, dan buah mengkudu.[432] Juga hasil industri rumah tangga, seperti alat perkakas dari besi dan tembaga, pakaian, payung, keranjang, dan barang-barang anyaman, kajang, kepis, gula, arang, dan kapur sirih. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan ayam serta telurnya juga diperjualbelikan.[433]

Di samping perdagangan antardesa dan antarwilayah watak pada zaman Mataram Kuno, masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga dan pada zaman Kadiri berkembang pula perdagangan antarpulau dan perdagangan internasional. Prasasti Gondosuli II menyebut seorang dang puhawang. Prasasti Kamalagyan menyebut pada nakhoda dan pedagang besar dari pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang lain yang datang di Hujung Galuh, pelabuhan di Jawa Timur. Pada relief candi Borobudur tertera beberapa kapal layar besar yang bercadik, yang jelas menggambarkan kapal dagang Indonesia.[434] Beberapa prasasti raja Dharmmawansa Airlangga menyebut orang-orang asing dari Asia Selatan dan Daratan Asia Tenggara di antara para *wargga Kilalan*. Mereka itu tentulah pedagang yang menetap di Jawa untuk waktu tertentu.

Prasasti-prasasti tidak menyebut komoditas ekspor, dan hanya ada satu barang yang mungkin sekali diimpor, yaitu kain buatan India (*wdihan* buat kling). Akan tetapi, data tentang masalah ekspor-impor itu diperoleh dari berita-berita Cina. Ekspor dari pelabuhan-pelabuhan di Jawa terdiri atas hasil bumi dan hutan Pulau Jawa sendiri dan dari pulau-pulau yang lain, terutama dari Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Komoditas ekspor itu antara lain ialah garam yang dihasilkan di pantai utara Pulau Jawa, terutama di daerah Kembang dan Tuban, kain katun dan kapuk, sutra tipis dan sutra kuning, damas, kain brokat berwarna-warni, kulit penyu, pinang, pisang raja, gula tebu,

---

[431] Jan Wisseman Christie, Patterns of Trade in Western Indonesia: Ninth Through Thirteenth Centuries A.D, vol. I, Disertasi, 1982, hlm. 224–231

[432] Ubi-ubian (*mulaphala*), sekalipun pernah disebut dalam konteks lain, tidak pernah disebut sebagai barang dagangan. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa umbi-umbian tidak diperdagangkan; soalnya hanyalah karena prasasti-prasasti tidak menyebut semua yang diperjualbelikan

[433] Keterangan tentang barang dagangan itu diperoleh dari bagian prasasti yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pajak perdagangan dan hasil kerajinan (*masamwyawahara* dan *misra*)

[434] Th. van Erp, "Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van Boroboedoer", NION, 8 1923–1924, hlm. 227–255; G.J. van der Heide, "De samenstelling van Hindoe-vaartuigen Uitgewerkt naar beeldwerken van den Boroboedoer", NION, 12, 1928, hlm. 343–357

kemukus, cula badak, mutiara, belerang, gaharu, kayu sepang, kayu cendana, cengkih, pala, merica, damar, kapur barus, tikar pandan, dan gading gajah. Adapun barang-barang yang diimpor, baik untuk konsumsi di Jawa sendiri maupun untuk diekspor kembali antara lain ialah sutra dan payung sutra dari Cina, pedang buatan Timur Tengah dan India yang amat bagus kualitasnya, nila dan lilin batik, belanga besi berkaki tiga, piring dan mangkuk bervernis, keramik Cina, terutama keramik biru-putih, warangan, tikar pandan, merica, pala, kapur barus, gading, emas, perak, dan tembaga.[435]

Keramik Cina dan Vietnam ditemukan kembali dalam jumlah yang besar dan dalam bermacam ragam bentuk hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Keramik Cina yang tertua yang ditemukan di Indonesia berasal dari zaman Dinasti Han (286 SM–220 M), sekalipun jumlahnya tidak banyak. Baru dalam zaman dinasti T'ang (618–906 M) impor keramik Cina bertambah banyak.[436]

Pedagang-pedagang asing yang datang di Pulau Jawa diperlakukan dengan baik sekali. Mereka itu diberi penginapan dan makan dengan cuma-cuma. Dalam transaksi perdagangan digunakan mata uang, tetapi berita Cina menyebut masih adanya dagang barter; mungkin yang terakhir itu dilakukan dengan suku-suku di pedalaman pulau-pulau di luar Jawa.

Berita Cina dari zaman Dinasti Sung mengatakan bahwa di Jawa orang menggunakan potongan-potongan emas dan perak sebagai mata uang. Hukuman badan tidak dikenal. Semua pelanggar hukum dikenai denda dalam uang emas yang besarnya disesuaikan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Hanya perampok dan pencuri dihukum mati.[437] Chau Ju-Kua hanya menyebut mata uang yang dibuat dari campuran perak dengan tembaga dan timah yang dipotong seperti dadu dan diberi cap. Enam puluh biji mata uang ini bernilai 1 *tahil* emas, dan 32 biji sama dengan a *tahil*. Mata uang ini dikenal sebagai uang Jawa (she-p'o-kin).[438]

Prasasti-prasasti menyebutkan istilah-istilah untuk satuan mata uang emas dan perak, yaitu *suwarna*, *masa*, dan *kupang*. Untuk mata uang perak digunakan istilah *dharana* sebagai padanan *suwarna*. Satu *suwarna* atau satu

---

[435] Paul Wheatley, "Geographical notes on some commodities involved in Sung maritime trade," JMBRAS, vol. 32, part 2, 1959. Chau Ju-Kua, On the Chinese and Arab Trade, Edited and translated by F. Hirth and W.W. Rockhill, 1966

[436] E.W. van Orsoy de Flines, Guide to the Ceramic Collection of Museum Pusat Jakarta, 1972; Abu Ridho, The World's Greatest Collections, vol. III, 1978; Sumarah Adhyatman, Keramik Kuno yang Ditemukan di Indonesia, Jakarta, 1981

[437] Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 16

[438] Chau Ju-Kua, On the Chinese and Arab Trade, hlm. 78; 82

tahil sama dengan 16 *masa* dan sama dengan 64 *kupang*. Masih ada lagi mata uang yang disebut dengan istilah *wsi* (= besi) dan dihitung dengan satuan ikat. Dapat dibayangkan bahwa mata uang ini berlubang untuk dapat diuntai dalam satu ikatan yang terdiri atas 50 biji. Mungkin yang dimaksud dengan *wsi* ini ialah uang kepeng Cina ditemukan dalam jumlah yang besar di Jawa dan di Bali. Juga mata uang emas dan perak ditemukan kembali di pelbagai tempat di Jawa dan di Bali.[439]

Ada keterangan yang menarik di dalam prasasti Bendosari dari masa pemerintahan raja Hayam Wuruk.[440] Prasasti ini merupakan keputusan pengadilan (*jayapatra*). Yang bersengketa ialah pihak Aki Santana Mapañji Sarana dan teman-temannya melawan Sang Apañji Anawung Harsa sebagai juru bicara dari teman-temannya di *Sima* Tiga, mengenai status tanah di pelbagai tempat seluas 67 lirih. Sang Apañji Anawung Harsa menyatakan bahwa pihaknyalah yang berhak atas tanah-tanah itu, karena dahulu telah digadaikan kepada Canggah (pitung) seharga satu setengah takar perak, yaitu pada waktu tanah Jawa tidak mempunyai senjata mata uang.[441] Ungkapan yang terakhir ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa mengenal sistem mata uang, tetapi pada suatu ketika – dalam hal ini masa hidup canggah Sang Apañji Anawung Harsa r uang amat sulit didapat. Hal itu mengingatkan pada keadaan di Cina yang pada suatu ketika mengalami defisit dalam neraca perdagangannya, dan mata uang Cina mengalir ke luar negeri, sehingga perlu dikeluarkan instruksi kekaisaran untuk melarang ekspor mata uang Cina.[442]

5. Hukum
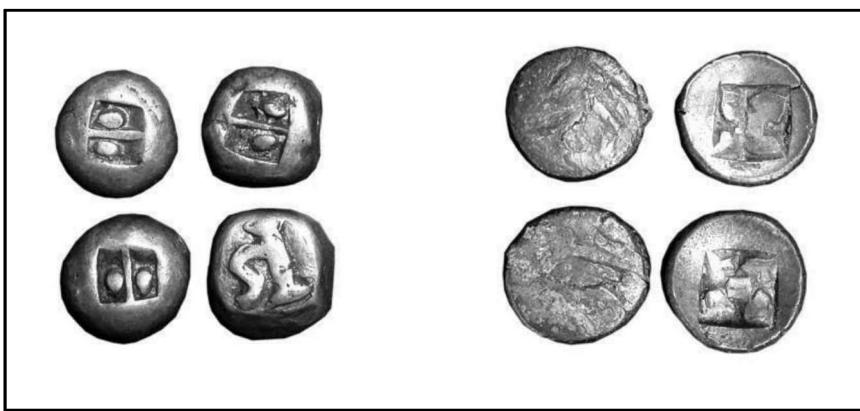
Sumber penghasilan kerajaan dan pemerintah daerah yang lain adalah denda-denda yang dikenakan atas segala macam tindak pindana. Di dalam prasasti-prasasti disebut *sukha duhkha*, yang di dalam naskah-naskah hukum disebut hala hayu; denda-denda itu di dalam prasasti juga disebut drawya haji. Keterangan yang terperinci mengenai tindak pindana dengan ketentuan dendanya terdapat di dalam naskah-naskah hukum (*agama*), yang sayang sekali

[439] J.A. van der Chijs, De numismatische verzameling, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

[440] OJO, LXXXV. Prasasti ini lempengan pertamanya hilang sehingga tidak diketahui angka tahunnya, tetapi masih menyebut nama Hayam Wuruk pada permulaan lempeng ke-2

[441] duk punan bhumi jawa tan pagagaman pisis. Ungkapan ini tidak berarti bahwa Pulau Jawa tidak mengenal sistem uang

[442] F. Hirth and W.W. Rockhill, Chau Ju-Kua, hlm. 81–82

(a)

(b)

Foto 4.13 (a) Mata uang emas dan perak, dari masa Mataram kuno; (b) Mata uang kepeng Cina, koleksi Museum Balaputra Dewa, Palembang
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

belum banyak diterbitkan. Ternyata tidak ada naskah hukum yang berasal dari zaman Mataram Kuno dan Kadiri. Dilihat dari bahasanya naskah-naskah hukum yang ditemukan berasal dari masa akhir Majapahit bahkan mungkin dari masa sesudah Majapahit runtuh, dan ditulis di kerajaan-kerajaan di Bali. Hal ini tidak perlu mengherankan karena dapat dibayangkan bahwa naskah-naskah hukum yang menjadi pegangan para hakim itu tentu tidak ditulis di atas logam karena akan menjadi terlalu berat dan mahal. Naskah-naskah itu tentulah ditulis di atas lontar, yang tidak akan tahan lebih dari seratus tahun. Lagi pula tentunya setiap kali harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik isi maupun bahasanya.[443]

Dari beberapa naskah hukum Jawa kuno yang ditemukan dapat diketahui merupakan olahan dari naskah-naskah hukum di India. Antara lain kitab *Purwadhigama*, *Kutaramanawa* atau *Siwasasana*,[444] dan *Swarajambhu*.[445] Naskah-naskah yang lain belum diteliti sama sekali.[446] Menurut penelitian van Naerssen memang ada petunjuk bahwa naskah-naskah hukum Jawa kuno itu ditulis kembali pada waktu-waktu kemudian. Hal itu dapat dilihat antara lain dari kenyataan bahwa nama-nama mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran denda ada yang masih menggunakan nama mata uang India (*krsnala*, *dharana*, dan *pana*), ada yang menggunakan nama mata uang Jawa kuno (*ma*, *su*, dan *ku*),[447] dan ada yang tidak disebut nama mata uangnya, tetapi jumlahnya amat besar, misalnya 4.000, 8.000, 20.000, dan 40.000. Yang terakhir ini merupakan ciri naskah-naskah yang muda. Menurut pendapat Boechari yang terakhir itu menunjukkan satuan uang "kepeng" yang merupakan petunjuk bahwa naskah itu tentu ditulis di Bali.

---

[443] Bahwa dalam zaman Mataram, yang jelas pada masa pemerintahan raja Dharmmawangsa Teguh sudah ada naskah hukum ternyata dari disebutkannya *sang hyang Siwasasana* di dalam prasasti Kawambang Kulwan (OJO, LVII) tahun 913 Saka (20 Januari 992). Sayang sekali nama raja di dalam prasasti Kawambang Kulwan itu sudah tidak dapat dibaca lagi; hanya dari angka tahunnya dapat diperkirakan bahwa ia berasal dari masa pemerintahan raja Dharmmawangsa Teguh

[444] Naskah ini telah diterbitkan oleh J.C.G. Jonker sebagai disertasi hampir seratus tahun yang lalu (J.C.G. Jonker, Een Oudjavaansch wetboek, Vergeleken Indische rechtsbronnen. Diss, 1885). Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia dari naskah hukum itu oleh Slametmuljana, Perundang-undangan Majapahit. Beberapa naskah diakhiri dengan *iti Siwasasana*

[445] F.H. van Naerssen, "De *astadasawyawahara* in het Oudjavaansch", BKI, 100, 1941, hlm. 357–376. Naskah ini merupakan terjemahan dengan penjelasan dari Bab VIII kitab *Manawadharmmasastra* yang sudah diberi penjelasan oleh beberapa ahli hukum di India

[446] Daftar naskah-naskah hukum Jawa kuno itu dapat dijumpai di dalam Th. G.Th. Pigeaud, Literature of Java, I, 1967

[447] Istilah-istilah itu merupakan singkatan dari *masa*, *suwarna*, dan *kupang*

Karena dari zaman Mataram Kuno tidak ada naskah hukum yang sampai kepada kita, gambaran tentang administrasi kehakiman hanya dapat disuguhkan di sini berdasarkan beberapa prasasti yang merupakan keputusan peradilan (*jayapatra*), dan keterangan tentang *sukha duhkha* yang terdapat dalam prasasti-prasasti yang lain.[448] Jumlah *jayapatra* memang tidak banyak, hanya ada tiga yang dapat dipakai di sini, yaitu prasasti Guntur tahun 829 Saka (907 M), prasasti Wurudu Kidul tahun 844 Saka (922 M), dan prasasti Tija yang lempeng pertama dan terakhirnya hilang, sehingga tidak diketahui dengan pasti angka tahunnya; hanya dari segi paleografi, yang menunjukkan persamaan-persamaan dengan prasasti Cunggrang II, dapat diperkirakan bahwa ia berasal dari masa pemerintahan Pu Sindok.[449]

Perkara yang dipermasalahkan di dalam prasasti Guntur dan Wurudu Kidul dapat diselesaikan di tingkat watak oleh seorang *pamgat*. Sudah dilihat bahwa yang diperkarakan di dalam prasasti Guntur ialah masalah utang piutang.[450] Di dalam surat keputusan itu disebutkan sebagai sebab yang pertama mengapa Sang Dharmma dikalahkan perkaranya ialah karena ia tidak hadir di persidangan. Alasan yang serupa juga digunakan terhadap Sang Pamariwa yang digugat oleh Sang Dhanadi. Sang Pamariwa sudah diperintahkan datang ke pengadilan dengan surat sampai dua kali, tetapi tidak mau datang; ia tinggal di rumah saja. Sang Pamariwa juga dikalahkan perkaranya, seperti yang disebutkan di dalam prasasti Wurudu Kidul B.

Sebagai alasan yang kedua mengapa Sang Dharmma dikalahkan perkaranya ialah karena menurut kitab hukum utang istri yang dibuat tanpa pengetahuan suaminya, apalagi kalau mereka itu tidak mempunyai anak, tidak menjadi tanggung jawab si suami. Pasal yang mengatakan demikian

---

[448] Telah dikatakan di atas bahwa tiadanya naskah hukum dari zaman Mataram tidak berarti bahwa kerajaan Mataram tidak menggunakan kitab-kitab hukum dalam menangani segala macam perkara di pengadilan. Kitab-kitab hukum dari zaman ini memang sudah tidak ada bekasnya lagi, karena naskahnya tentulah telah hancur dimakan zaman. Akan tetapi, kitab-kitab hukum yang ditemukan, yang berasal dari zaman Majapahit akhir dan sesudahnya, tentulah merupakan turunan dari kitab-kitab hukum dari zaman Mataram, yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Juga disesuaikan dengan adanya tafsiran-tafsiran baru dari para ahli hukum di India atas sumber-sumber hukum di sana, yang kemudian dibawa juga ke Indonesia

[449] W.F. Stutterheim, "Transcriptie van twee *jayapatra*'s", OV, 1925, bijlage D, hlm. 57–58. Perlu ditambahkan di sini bahwa baik prasasti Tija maupun prasasti Cunggrang II ialah prasasti tinulad

[450] *lawan tan hana parnnah ning hutang mangkana tumiba ring laki-laki ya /n/ ta/n/ pangawruh nikang laki-laki, nguniweh yan tan hana anak sambandha*

tidak terdapat di dalam naskah hukum yang diterbitkan oleh Jonker, juga tidak ada di dalam Bab VIII dari *Manawadharmmasastra*. Akan tetapi, mungkin ada di dalam naskah yang hingga kini belum diterbitkan. Andaikata mereka itu beranak, anak-anak itu mewaris utang yang dibuat oleh ibunya; dan andaikata anak-anak itu masih belum cukup umur, tentulah ayahnya yang harus menanggung. Jadi, dalam hal ini, andaikata Pu Tabwel itu mempunyai anak dengan si Campa, ia harus membayar kembali utang istrinya, sekalipun utang itu dibuat tanpa sepengetahuannya. Prasasti Guntur ini juga memberi petunjuk tentang kedudukan seorang istri, antara lain bahwa ia dapat melakukan transaksi sendiri tanpa sepengetahuan suaminya.[451]

Masalah yang diajukan di dalam prasasti Wurudu Kidul tidak terdapat di dalam naskah hukum yang dikenal. Di dalam prasasti ini dipermasalahkan status kewarganegaraan Sang Dhanadi, penduduk Desa Wurudu Kidul yang masuk wilayah Halaran. Dikatakan bahwa pada hari Sabtu Wage, *paringkelan* Was, tanggal 20 April tahun 922 M, Sang Dhanadi diberi surat *jayapatra* oleh Sang Pamgat i Padang pu Bhadra, Samgat Lucem Pu Ananta, *tuhan* i *kanayakan* Pu Suming dan juru lampuran Rake Rongga. Adapun sebabnya ialah karena pada suatu hari Sang Dhanadi ditegur oleh Sang Pamgat Manghuri yang bernama Wukajana, dikira ia seorang *weka Kilalan* pada Manghuri.[452] Ia mengadukan halnya kepada sang *tuhan* di Padang di *pakaranan* semua.[453] Dipanggillah semua kaum keluarga Sang Dhanadi untuk ditanyai apakah nenek moyang Sang Dhanadi, kakeknya, neneknya, adalah *weka Kilalan* pada Sang Pamgat Manghuri. Didatangkan pula orang-orang yang tidak memihak, keturunan penduduk asli,[454] yang dapat menunjukkan bahwa nenek moyang

---

[451] Apakah ini merupakan keadaan umum di Jawa, ataukah hanya karena kebetulan si Campa itu masih saudara Sang Dharmma, belum dapat dipastikan, karena masih banyaknya naskah-naskah hukum yang belum diterbitkan. Perlu di sini disebutkan bahwa di antara 4 orang yang berjualan beras dari Desa Tunggalangan ke pasar di Sindingan yang disebut di dalam prasasti Panggumulan seorang mungkin sekali perempuan, yaitu Si Arani, mengingat kebanyakan nama-nama perempuan berakhir dengan vokal panjang

[452] *Kilalan* berasal dari kata *kilala* yang berarti menikmati (P.J. Zoetmulder, BKI, 132, 1970, hlm. 191). Jadi, *Kilalan* berarti yang dinikmati, dalam arti kelompok orang yang berkewajiban membayar pajak. Seperti yang akan dapat dilihat di belakang ternyata ia dikira seorang asing, keturunan Khmer. Memang orang-orang asing, yang tentunya bekerja sebagai pedagang, disebut *wargga Kilalan* dalam beberapa prasasti dari zaman raja Airlangga

[453] Arti kata *pakaranan* di sini belum jelas. Mestinya berasal dari kata *karana* yang berarti sebab. Apakah yang dimaksudkan di sini ialah tempat sebab-sebab pertikaian antara beberapa pihak diselidiki? Dengan perkataan lain, diduga bahwa *pakaranan* ialah sidang pengadilan

[454] Yang diterjemahkan dengan penduduk asli di sini ialah kata wwang yukti yang secara harfiah berarti orang yang benar

Sang Dhanadi bukanlah *weka Kilalan* pada masa pemerintahan raja-raja yang memerintah sebelumnya. Datanglah orang-orang yang netral itu dari desa-desa Gerih, Kahuripan, dan Paninglaran. Mereka itu semuanya dengan tanpa ragu-ragu dan berani angkat sumpah menyatakan bahwa memang nenek moyang Sang Dhanadi, kakeknya, neneknya, buyutnya, semuanya adalah penduduk asli, dan bukan *weka kilalan* pada Sang Pamgat Manghuri.

Mungkin tidak ada naskah hukum yang mengatur masalah status kewarganegaraan seseorang. Dalam hal ini keputusan diambil berdasarkan ke*saksi*an kaum keluarga Sang Dhanadi dan penduduk asli yang netral (tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara itu) dari beberapa desa di luar desa tempat tinggal sang Dhanadi. Berdasarkan ke*saksi*an di bawah sumpah itulah keputusan pengadilan diambil.

Dari prasasti Wurudu Kidul diperoleh keterangan tentang adanya orang-orang asing yang menetap di kerajaan Mataram. Rupa-rupanya mereka itu mempunyai status yang berbeda dengan penduduk asli. Yang jelas ialah bahwa orang asing merupakan kelompok orang yang berkewajiban membayar pajak, yang mungkin disebabkan mereka itu merupakan kelompok pedagang yang kaya. Mungkin di samping usaha dagangnya mereka juga bertindak sebagai lintah darat, meminjamkan uang kepada penduduk atau bahkan kepada para pejabat daerah atau desa yang memerlukan uang dalam jumlah yang banyak pada suatu kesempatan. Yang menarik perhatian ialah bahwa sampai pada masa pemerintahan raja Airlangga (1019–1042 M) di antara orang-orang asing itu tidak disebut orang Cina. Baru dalam zaman Majapahit ada keterangan bahwa ada orang Cina yang menetap di Indonesia.

Enam belas hari kemudian setelah mendapat surat *jayapatra*, Sang Dhanadi menghadap ke pengadilan lagi, soalnya ada seorang yang bernama Sang Pamariwa yang mendapat anugerah tanah di Manghuri dari Sang Pamgat Juru di Madandar. Sang Pamariwa pada suatu hari memerintahkan Sang Dhanadi untuk memungut pajak di daerah Manghuri, karena ia disangka seorang keturunan Khmer. Karena Sang Dhanadi takut dikira berbuat yang tidak semestinya, ia menghadap ke pengadilan, mengadukan masalahnya. Sang Pamariwa dipanggil menghadap untuk menjelaskan duduk soalnya. Akan tetapi, ia tidak mau datang, sekalipun sudah dikirimi surat panggilan sampai dua kali. Ia dianggap kalah perkaranya, dan Sang Dhanadi sekali lagi diberi surat *jayapatra*, agar di kemudian hari status kewarganegaraannya tidak dipermasalahkan lagi.

Di dalam naskah-naskah hukum memang ada juga dicantumkan syarat-syarat seorang *saksi*, antara lain harus orang yang telah berkeluarga, yang

banyak anaknya, penduduk asli,[455] dan orang-orang yang tidak berkepentingan di dalam perkaranya,[456] baik dari kasta *ksatrya*, *waisya*, maupun *sudra*. Seorang brahmana tidak dapat dijadikan *saksi*, demikian pula raja sendiri, para tukang dan pandai,[457] dan para pendeta yang telah meninggalkan keduniawian.[458] Masih ada lagi ketentuan-ketentuan tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi *saksi* dalam suatu perkara di pengadilan.

Bahwa pihak yang tidak hadir dalam persidangan harus dinyatakan kalah perkaranya memang ditentukan di dalam naskah hukum.[459] Dalam kasus Sang Dharmma melawan Pu Tabwel sebenarnya ada ketentuan bahwa Sang Dharmma dapat dikenai denda, karena menagih utang tetapi tidak mau datang di pengadilan untuk menjelaskan duduk perkara utang piutang itu.[460] Akan tetapi, ternyata di dalam prasasti Guntur itu tidak ada disebutkan hukuman bagi Sang Dharmma.

Mengenai prasasti Tija telah dikatakan bahwa permulaan dan akhir prasasti itu hilang sehingga kurang jelas siapa sebenarnya yang bersengketa. Apa yang dapat ditangkap dari prasasti ini ialah bahwa mula-mula ada pengaduan dari Rakryan Jasun Wungkal kepada raja, menyatakan bahwa ia berhak atas semua pajak dari *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru, tetapi Sang Awaju i Manayuti tidak pernah menyerahkan pajak-pajak kepadanya.

---

455 Di dalam naskah *Swarajambhu* istilahnya *wwang molah hapageh ring t/h/ani*. Bandingkan G. Buhler, The laws of Manu, Bab VIII, Ps. 62

456 Di dalam *Manawadharmmasastra* istilahnya arthasambandhin (lihat G. Puja dan Tjok Rai Sudharta, *Manawadharmmasastra* (*Manu dharmmasastra*), atau *Weda Smrti*, cetakan kelima (1977/1978), buku VIII, Ps. 64. Di dalam naskah *Swarajambhu* istilahnya menjadi *wwang kapihutangan mamihutangi kunong*, jadi khusus orang yang berkepentingan di dalam soal utang piutang

457 Istilahnya di dalam naskah *Swarajambhu* ialah *undahagi* untuk menyalin kata *karuka* di dalam *Manawadharmmasastra*

458 Di dalam naskah *Swarajambhu* disebut wiku nisparigraha, yang di dalam *Manawadharmmasastra* ditulis sanghebhyo winirgatah. Sebenarnya di dalam *Manawadharmmasastra* masih disebut *kusilawa* (aktor, pemain d*rama*) sebagai golongan yang tidak dapat dijadikan *saksi* dalam pasal yang sama, tetapi tidak dimasukkan di dalam naskah *Swarajambhu*. Mungkin ini kelalaian penurun naskah *Swarajambhu*, sebab di dalam masyarakat Jawa kuno ada juga para pemain d*rama* (wayang orang, penari topeng, dan pelawak) (Lihat Man. VIII, 65)

459 Di dalam naskah *Swarajambhu* dikatakan: *hana ta wwang mawyawahara saha lawan, tan tka pwa ya ri samayanya hucapen de sang upapati, wnang kalahakna tan inucap ikang tan tka, mangkana ling ning agama, mwang rasa ning rajaniti marmmala*

460 *Swar.: hana wwang managih tan papihutang ... adharmma ngaranya ... wwang tan tuhu apihutang. ikang wwang mangkana yogya danda ... padanderiya satinagihaken lepihakna. danda nikang managih tan pahutang*

Dengan adanya pengaduan itu, raja memanggil sang awaju di Manayuti, yang dipimpin oleh Wasana dan Dinamwan.[461] Mereka ditanyai oleh raja tentang pajak-pajak dari *sima kawajwan* itu. Mereka mengatakan bahwa pajak-pajak dipakai untuk menambah pembayaran (atau menjamu?) kepada para penarik pajak yang minta lebih dari semestinya.[462] Mereka mengatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk menyerahkan pajak kepada *nayaka*, dalam hal ini Rakryan Jasun Wungkal, karena mereka sendirilah yang berhak sepenuhnya atas pajak-pajak dari *sima kawajwan*. Mereka tidak boleh menjual atau menggadaikan *sima* itu.[463]

Keterangan terakhir itu mereka berikan kepada raja karena ternyata dari prasasti itu bahwa *sima* mereka itu telah mereka jual kepada Buyut Amabaki dua puluh delapan tahun yang lalu, dan sekarang ini dinikmati hasilnya oleh Kebo Kikil.[464] Sifat pembelian itu ialah *waruk lepas*,[465] sehingga Buyut Amabaki berhak sepenuhnya atas semua pajak atas segala jenis tanah di *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru, termasuk seluruh denda-denda yang dikenakan atas segala tindak pidana di lingkungan daerah *sima* itu. Sang Awaju di Manayuti sama sekali tidak berhak lagi atasnya.

Kebo Kikil pun dihadapkan di persidangan. Sebenarnya raja masih ingat akan masalah pembelian *sima* itu oleh Buyut Amabaki, sehingga Kebo Kikil dinyatakan menang di dalam perkara ini. Apalagi ternyata bahwa ada surat akta jual beli yang dibuat oleh *rakryan* a*sima* yang menyatakan bahwa jual beli itu sifatnya *waruk lepas*, sehingga sejak saat pembelian itu Buyut Amabaki dan

---

[461] Istilah jasun wungkal merupakan sinonim dari bawang watu. Didapatkannya gelar Rakryan Jasun Wungkal ini juga memberi petunjuk bahwa prasasti ini berasal dari masa pemerintahan Pu Sindok, karena gelar ini ditemukan juga di dalam prasasti Cungggrang

[462] Apa fungsi pejabat yang bergelar sang awaju ini masih kurang jelas. Di dalam beberapa prasasti ada jabatan sang awaju haji. *Sima* yang dianugerahkan kepada awaju yang berjasa disebut *sima kawajwan*

[463] Dalam prasasti disebutkan IIb (5) *pinaka paniwönya i rikan panuran anasu wuwuh linnya. tan tinahilakenya rin nayaka mithya ta naran ika ra(6)kryan jasun wungkal yan panengguh maren nayaka drwya haji nikan sima kawajwan ri tija. lawan i haru haru, kaholan (III.b.1) de nikan awaju ri manayuti, mankana panengga nikan awaju ri manayuti. tan wnanandaken i rikan sima kawajwan, tan wnanadwal (2) waruk. tan wnanadwal lpas*

[464] Stutterheim membaca Buyut Amataki, tetapi menurut pembacaan Boechari nama itu berbunyi Buyut Amabaki. Kebo Kikil mungkin sekali anak Buyut Amabaki, yang pasti ia adalah ahli warisnya

[465] Apa arti *waruk lepas* masih kurang jelas. Mengingat persamaan antara huruf wa dan huruf ca. Timbul Haryono pernah mengusulkan pembetulan *caruk lepas*, dengan pengertian membeli tanpa pilih-pilih, semuanya dicampur. Akan tetapi, pada prasastinya memang tertera *waruk lepas*; lagi pula ada bentukan amaruk, antara lain di dalam prasasti Kañcana, juga mengenai pembelian tanah, sehingga pembacaan *waruk lepas* tidak perlu diragukan lagi

keturunan-keturunannya berhak atas segala pajak dan penghasilan yang lain dari *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru itu sampai akhir zaman, dan tidak ada lagi hak sang awaju di Manayuti dengan keturunan-keturunannya.

Ditambah lagi dengan sanggahan yang diberikan oleh awaju dari empat daerah yang lain, yaitu awaju di Mapapan, di Padang, di Pangkaja, dan di Paliñjuwan, atas keterangan awaju di Manayuti. Keempat awaju itu menyatakan bahwa mereka boleh menjual *lepas*, boleh menjual waruk, dan boleh menggadaikan *sima kawajwan*. Akan halnya pajak tanah dan hasil buminya, memang tidak harus diserahkan kepada *nayaka*, itu hak mereka sepenuhnya. Hanya *caruk lepas* dan *caruk lepas* yang harus diserahkan kepada *nayaka*.[466]

Demikianlah, tidak ada keberatan untuk menyatakan sang awaju di Manayuti sebagai pihak yang kalah perkaranya, sebab sudah ada surat akta jual beli yang dibuat oleh *rakryan* a*sima* dan disahkan oleh raja. Semestinya tidak perlu lagi persoalan status *sima* itu dipersengketakan, Apalagi telah sekian lama *sima* itu dibeli oleh Buyut Amabaki, 28 tahun tanpa ada masalah yang diajukan oleh awaju di Manayuti, maka raja mengukuhkan keputusan memenangkan pihak Kebo Kikil. Seperti yang dapat diharapkan, prasasti menyebut *saksi-saksi* yang hadir dalam persidangan itu, antara lain sejumlah *nayaka*, yang sayang sekali tidak diketahui jumlahnya, karena bagian akhir prasasti tidak ada.

Di sini dapat dilihat bahwa sidang pengadilan dipimpin oleh raja sendiri. Ini berlawanan dengan apa yang dikatakan di dalam *Manawadharmmasastra* yang menentukan bahwa raja tidak boleh menjadi hakim sendiri.[467] Ini disalin ke dalam bahasa Jawa kuno dalam naskah *Swarajambhu*.[468] Mengapa dalam kenyataannya raja sendiri yang mengajukan pertanyaan kepada tertuduh dan memutus perkaranya, belum dapat diterangkan di sini; mungkin karena masalahnya menyangkut status tanah *sima*, yang seharusnya hanya dapat diputuskan oleh raja sendiri atau atas perkenan raja.

Pangkal persoalan sebenarnya masalah pajak dari suatu *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru yang digugat oleh Rakryan Jasun Wungkal, dan diajukan kepada raja. Seperti telah dilihat di atas suatu *sima* memang tidak sepenuhnya bebas dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Yang

---

[466] Mungkin yang dimaksudkan dengan *caruk lepas* dan *caruk lepas* ialah pajak perdagangan dan usaha kerajinan. Seperti telah dikatakan di atas memang sebagian dari kedua jenis pajak itu harus diserahkan ke kas kerajaan (kepada *mangilala drwya haji*)

[467] Man.,VIII

[468] *Swar: aywa sang prabhu prihawak yan pamgatakna wyawahara, pragwiwaka nira mangkana tan, tan prihawaka*

tidak lagi dipungut oleh kerajaan hanyalah pajak atas tanah dan hasil bumi, dan hasil denda atas segala tindak pidana di dalam lingkungan *sima* itu. Pajak perdagangan (jual beli) dan usaha kerajinan tetap dipungut sebagian, dengan ketentuan-ketentuan khusus. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para awaju dari empat daerah yang maju sebagai *saksi*.

Sebagai *dasa*r keputusan untuk menyatakan bahwa pihak awaju di Manayuti kalah perkaranya ialah adanya surat akta jual beli, dan kenyataan bahwa telah 28 tahun lamanya *sima* itu dibeli oleh Buyut Amabaki dan kini dinikmati oleh ahli warisnya, yaitu Kebo Kikil. Di dalam naskah-naskah hukum ditentukan bahwa pembuktian dalam tiap persengketaan harus di*dasa*rkan atas tiga macam bukti atau *tripramana*, yaitu *saksi*, *likhita*, dan *bhukti*. Mengenai ketiga hal itu ada dua keterangan yang tidak sama bunyinya. Naskah Tatwa Wyawahara memberi keterangan sebagai berikut: *saksi* wus wus winastu de sang pandita (*saksi* yang telah direstui oleh pendeta); *likhita na inungwakneng tulis* (ditempatkan di surat/keterangan tertulis); *bhukti na ikang toya apan kna tinadah* (air yang dapat dimakan/diminum). Di dalam naskah Adigama dikatakan bahwa *saksi na wong lyan kang anawruhi* (orang lain yang mengetahui); *likhita na katon ring sapanucapnya* (kelihatan apa yang dikatakan); *bhukti na katon sagawenya de ning wong akweh* (kelihatan semua perbuatannya oleh orang banyak). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan *saksi* ialah orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan, *likhita* ialah keterangan tertulis, sedang *bhukti* ialah apa-apa yang telah diperbuat sebagai akibat dari suatu perjanjian, antara dua pihak, misalnya pembayaran cicilan atau utang dan pengambilan hasil dari suatu transaksi. Dengan demikian, jelas bahwa Kebo Kikil telah memiliki *likhita* dan *bhukti*. Bhukti saja sebenarnya sudah cukup sebab menurut naskah hukum *bhukti* mengalahkan *likhita* dan *saksi*.[469]

Bahwa di dalam prasasti dinyatakan sebagai tambahan bahwa telah sekian lamanya, yaitu 28 tahun, *sima* itu dibeli oleh Buyut Amabaki tanpa ada gugatan oleh awaju di Manayuti,[470] mungkin karena di dalam naskah-naskah hukum ada ketentuan tentang *daluwarsa*, yang istilah hukumnya ialah *leleb* atau *kedasawarsa* dalam pengertian telah lewat 10 tahun. Ketentuan mengenai lamanya sesuatu perkara telah dinyatakan telah *leleb* berbeda-beda, tergantung dari masalahnya.[471]

---

[469] Adigama, *saksi likhita* alah de ning *bhukti*

[470] III.b.5 ..., *lawan muwah atyanta lawasnya tinumbas ikan sima kawajwan i ti(6) ja lawan i haru haru. tka wwalu likur tahun. tan hana pananuwanda nikan awaju ri manayuti*

[471] Misalnya dalam naskah Adigama disebutkan: menggadaikan hamba batas *leleb*-nya 5 tahun; menggadaikan kerbau, lembu, dan kuda tiga tahun; gadai pakaian dan perhiasan dua tahun; utang yang lebih dari sepuluh tahun tidak ditagih juga *leleb*, dst.

Sayang tidak diketahui apa yang diputuskan oleh raja tentang gugatan Rakryan Jasun Wungkal. Menurut keterangan awaju di Mapapan, di Padang, di Pangkaja, dan di Paliñjuwan sebagian dari pajak perdagangan dan usaha kerajinan harus diserahkan ke kas kerajaan melalui *nayaka* (*rakai* yang membawahi daerah *sima* itu). Kita tidak tahu apakah selama 28 tahun itu Rakryan Jasun Wungkal tidak pernah menerima pajak dari *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru. Jika benar demikian perlu dipertanyakan mengapa baru setelah 28 tahun itu lewat ia mengadukan hal itu kepada raja. Apakah dalam hal ini raja akan menerapkan aturan tentang kedaluwarsa seperti halnya pada soal utang yang tidak ditagih sampai lewat sepuluh tahun? Atau Kebo Kikil harus membayar pajak yang terutang itu, yaitu yang selama 28 tahun tidak pernah dibayar olehnya maupun oleh Buyut Amabaki kepada Rakryan Jasun Wungkal? Ataukah kewajiban membayar pajak atas *sima kawajwan* di Tija dan Haru-haru itu tetap pada sang awaju di Manayuti sebagai orang yang menerima anugerah *sima* itu, sekalipun ia kemudian telah menjualnya kepada orang lain? Semua pertanyaan itu sayang sekali tidak dapat terjawab.

Telah disebutkan bahwa salah satu sumber penghasilan kerajaan ialah denda-denda atas segala tindak pidana, yang di dalam prasasti disebut *sukha duhkha*. Ungkapan di dalam pelbagai prasasti ialah: *samankana ikanang sukha duhkha kadyanganin mayan tanpa wwah, walu rumambat in natar, wipati wankay kabunan, rah kasawur in natar (in hawan), duhilaten, hidu kasirat, sahasa, hastacapala, wakcapala, mamijilaken wuri nin kikir, mamuk, mamumpan, ludan, tutan. ansa pratyansa, dandakudanda, bhandihaladi prakara ... atah pramana ri drawya hajinya.*[472]

Jelas dari kutipan itu bahwa denda-denda itu disebut juga drawya haji, dalam arti "apa yang menjadi hak milik raja". Jadi, denda-denda atas segala tindak pidana di seluruh wilayah kerajaan harus diserahkan kepada pemerintah pusat. Hanya jika sesuatu daerah ditetapkan menjadi *sima*, denda-denda itu menjadi hak orang atau desa yang mendapat anugerah *sima*, atau diperuntukkan pengelolaan suatu bangunan suci.

Pada umumnya prasasti menyebutkan tidak lebih dari 16 tindak pidana seperti yang tertera di atas. Ini tidak berarti bahwa hanya 16 macam tindak pidana itu saja yang dendanya diatur tersendiri dalam hal suatu daerah ditetapkan menjadi *sima*, sebab seperti yang dapat dilihat dari kutipan di atas, dan di hampir semua prasasti, daftar itu ditutup dengan istilah *bhandihaladi*, yang berarti *bhandihala* dan lain-lain. Memang tidak dapat mengharapkan bahwa prasasti akan menyebut segala macam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman sebab akan makan tempat yang terlalu banyak. Sama halnya

---

[472] Antara lain di dalam prasasti Hring tahun 859 Saka (937 M; OJO, XLVII) dan prasasti Baru tahun 952 Saka (1030 M; OJO, LX)

dengan penyebutan para *mangilala drawya haji*, yang sebanyak-banyaknya adalah 104 jenis.

Sebenarnya hanya ada 18 tindak pidana, yang di dalam naskah-naskah hukum disebut *astadasawyawahara*, yang diperinci lagi menjadi beberapa ratus pasal. Ke-18 macam tindak pidana itu ialah *tan kawehaning patuwawa* (tidak membayar uang jaminan), *adwal tan drwya* (menjual barang bukan miliknya), *tan kaduman ulihing kinabehan* (tidak kebagian hasil kerja sama), *karuddhaning huwus winehaken* (meminta kembali apa yang telah diberikan), *tan kawehaning upahan* (tidak memberi imbalan), *adwa ring samaya* (mengingkari janji), *alarambeknyan pamelinya* (pembatalan transaksi jual beli), *wiwadaning pinangwaken mwang mangwan* (perselisihan antara penggembala ternak dengan majikannya), *kahucapaning wates* (perselisihan tentang batas tanah), *dandaning saharsa wakparusya* (hukuman atas penghinaan dan makian), *pawrtting maling* (tingkah laku pencuri), *ulah sahasa* (tindak kekerasan), *ulah tan yogya ring laki stri* (perbuatan tidak baik terhadap suami/istri), *kadumaning drwya* (pembagian hak milik atau warisan), dan *totohan tan prani* dan *totohan prani* (perjudian dan taruhan).[473]

Melihat dua daftar tersebut jelas kiranya bahwa prasasti tidak menyebut macam-macam tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam *astadasawyawahara*. Beberapa istilah di antara *sukha duhkha* itu hingga kini belum dapat ditemukan penjelasannya di dalam naskah-naskah hukum, seperti misalnya *mayang tan pawwah* atau *mayang tan teka ring wwah*, yang secara harfiah berarti bunga kelapa atau bunga pinang yang tidak sampai menjadi buah, *walu rumambat ring natar*, yang secara harfiah berarti waluh atau labu yang menjalar di halaman, dan *angsa pratyangsa*, yang secara harfiah masih kurang jelas artinya. Hanya ada dugaan bahwa mungkin sekali istilah *angsa pratyangsa* itu ialah kekeliruan dari kata *hingsa pratihingsa* yang harus ditafsirkan dengan bunuh-membunuh. Istilah *mayang tan pawwah* mungkin dapat ditafsirkan sebagai ingkar janji (*adwa ring samaya*), atau tidak membayar utang, mengingat kenyataan bahwa naskah-naskah hukum selalu mulai dengan tan kasahuraning piutang, sedang istilah *mayang tan pawwah* selalu merupakan permulaan dari daftar *sukha duhkha*. Istilah *walu rumambat ring natar* mungkin sama dengan *kahucapaning wates*.[474]

---

[473] F.H. van Naerssen, "De *astadasawyawahara* in het Oudjavaansch", BKI, 100, 1941, hlm. 357–376. Ada terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Eva M. Hooykaas dengan judul, "The asta*dasa*wywahara in Old Javanese", JGIS, vol. XV, 1956

[474] Dugaan ini di*dasa*rkan atas asumsi bahwa jika orang menanam labu, dan menjalar di halaman sendiri tidak akan menimbulkan permasalahan, tetapi kalau ia menjalar ke halaman orang lain akan timbul persengketaan tentang siapa yang berhak memetik buahnya. Akan tetapi, tafsiran ini tidak lebih dari dugaan semata. Tanpa penjelasan di dalam naskah-naskah hukum sulit memberi tafsiran yang pasti

Istilah-istilah yang lain ada penjelasannya di dalam beberapa naskah hukum. Antara lain istilah *wipati wangkay kabunan* atau *katiban wangkay kabunan* diterangkan dengan jika terdapat mayat di pinggir desa di waktu pagi tanpa diketahui asal usulnya dan tidak dilaporkan oleh penduduk desa. Dalam hal ini penduduk desa tersebut dikenai hukuman denda. Demikian pula penduduk suatu desa akan dikenai denda apabila terdapat darah yang tertumpah di jalanan; yaitu apabila ada perkelahian yang membawa pertumpahan darah tanpa diketahui dan dilaporkan oleh penduduk desa. *Duhilaten* ialah menuduh orang berbuat sesuatu, tetapi ternyata tidak benar. Hidu kasirat diterangkan dengan meludahi orang lain; *sahasa* juga disebut sebagai salah satu macam tindak pidana di antara *astadasawyawahara*, yaitu segala macam tindak kekerasan; maka sebenarnya apa yang disebut di dalam *sukha duhkha* itu merupakan perincian dari *ulah sahasa*, yaitu memukul dengan tangan (hastacapala), memukul dengan kata-kata atau memaki-maki (wakcapala), mengancam dengan senjata tajam (*mamijilaken wurining kikir*), mengamuk (*mamuk*) mengejar musuh yang telah lari dan membunuhnya (*ludan*), bunuh-membunuh dan pukul-memukul *angsa pratyangsa* dan *danda* ku*danda*). Mamumpang ialah salah satu tindak pidana terhadap perempuan yang telah bersuami atau telah dipertunangkan (*stri larangan*); sedang istilah *bhandihala* merupakan istilah umum untuk semua perbuatan jahat.[475]

Dari naskah-naskah hukum ternyata bahwa sebagian terbesar dari tindak pidana itu dihukum dengan hukuman denda. Ada juga hukuman potong anggota badan yang bersalah, misalnya pemotongan tangan dan lidah. Pembunuhan dan pencuri, dan semua kejahatan yang termasuk *astadusta* dan *astacorah*, dihukum dengan hukuman mati. Berita-berita Cina dari Sung she juga memberitakan bahwa di Jawa tidak dikenal hukuman badan; semua kejahatan dihukum dengan denda dalam mata uang emas, yang jumlahnya sesuai dengan besar kecilnya kejahatan; hanya perampok dan pencuri yang dihukum mati.[476] Oleh karena itu, prasasti-prasasti menyebut drawya haji yang berasal dari *sukha duhkha*.

Seperti telah disebutkan, di tingkat pemerintahan pusat ada pejabat-pejabat pengadilan, yaitu sang *pamgat* tiruan dan sang *pamgat manghuri.* Di zaman kerajaan Majapahit ada tujuh orang upapatti yang diketuai oleh

---

[475] Istilah *tutan* belum dijumpai keterangannya di dalam naskah hukum

[476] W.P. Groeneveldt, Historical Notes, hlm. 16. Juga F. Hirth and W.W. Rockhill: Chau Ju-Kua, hlm. 76–77

dua orang *dharmmadhyaksa*, yaitu *dharmmadhyaksa* dari agama Buddha dan agama Siwa. Ketujuh orang upapatti itu masing-masing menguasai kitab-kitab hukum dari suatu aliran agama tertentu. Di dalam naskah-naskah hukum itu dikatakan bahwa seorang hakim haruslah seorang pendeta yang sempurna pengetahuannya akan semua kitab-kitab *sastra*, pertama-tama kitab *Dharmmasastra*, *Kutaramanawa*, *Sarasamuccaya*, *Canakya*, *Kamandaka*, dan lain-lain, dan yang tidak bingung menghadapi kesulitan dalam mencari persesuaian antara *astadasawyawahara* dan hukum adat. Pendapatnya tentang hal-hal tersebut haruslah tegas karena pengetahuannya yang mendalam akan semua kitab-kitab *sastra*. Ia harus mampu memberi keputusan dalam pengadilan atas semua persengketaan yang terjadi di antara penduduk di seluruh kerajaan.[477]

Di tingkat watak atau daerah ada juga pejabat kehakiman dengan gelar sang *samgat*. Seorang penduduk desa yang merasa dirugikan oleh pihak lain berhak mengadu ke pengadilan tingkat watak itu, seperti halnya Pu Tabwel dan Sang Dhanadi. Jika masalahnya tidak dapat diselesaikan di tingkat watak, diajukan ke tingkat pengadilan pusat. Rakryan Jasun Wungkal, misalnya, langsung mengadu kepada raja karena yang dipermasalahkan ialah pajak yang semestinya diterimanya dari suatu daerah (yang ada di bawah kekuasaannya atau menjadi bagian daerah lungguh-nya). Dalam kasus prasasti Tija ternyata raja sendiri yang memimpin sidang pengadilan. Sebenarnya raja dapat menugaskan upapatti untuk menyelesaikan masalah di pengadilan.

Persyaratan bagi seorang hakim sebagaimana dicantumkan di dalam naskah-naskah hukum itu jelas bahwa di samping kitab-kitab *sastra*, yaitu kitab-kitab hukum yang berasal dari India, hukum adat yang tidak tertulis juga merupakan *dasa*r hukum untuk memutuskan perkara-perkara di pengadilan. Di dalam prasasti-prasasti *jayapatra* dari zaman Majapahit masih disebutkan *dasa*r-*dasa*r hukum yang lain. Di dalam *jayapatra* itu dikatakan bahwa sebelum mengambil keputusan para hakim mempelajari kitab-kitab *sastra*, peraturan daerah, hukum adat, petuah orang tua-tua, dan kitab-kitab hukum, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh para hakim sejak dahulu kala.[478] Keterangan yang terakhir itu menunjukkan bahwa berlakunya perundang-undangan dari India di samping hukum adat itu sudah mulai sejak kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ini menggunakan landasan ketatanegaraan India.

---

[477] F.H. van Naerssen, "De Saptopapatti", BKI, 90, 1933, hlm. 239–258

[478] I.a.(2) *pinametaken sastradrsta. desadrsta. guru kaka. udaharana. makatangwa(3)n rasagama ri san hyan Kutaramanawadi. manamukara prawrttyacara san pandita wyawaharawicchedaka ring puhun malama*

Prasasti Parung dari masa pemerintahan raja Hayam Wuruk[479] memberikan petunjuk tentang adanya *dasa*r hukum yang lain, yaitu sumpah (masatya) kepada dewa atau tokoh yang diperdewakan.

Di samping prasasti-prasasti *jayapatra* yang telah disebutkan di atas ada beberapa prasasti lagi dari zaman wangsa Sailendra dan *Isana* yang menyebutkan tentang pelunasan utang, seperti prasasti Kurungan tahun 807 Saka (29 April 885 M) [480] dan prasasti Wurutunggal tahun 833 Saka (8 Maret 912 M)[481] dan yang menyebutkan penebusan gadai tanah, seperti prasasti Panggumulan B tahun 825 Saka (13 September 903 M)[482] dan prasasti Harahara yang berangka tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M).[483] Sebenarnya pelunasan utang atau penebusan gadai cukup dilakukan dengan hanya merobek surat utang atau surat gadai di hadapan *saksi-saksi* setelah uang pelunasan diterima. Bahwa kasus-kasus di atas diabadikan dengan prasasti tembaga mungkin sekali karena pelunasan utang dan penebusan gadai tanah itu dihubungkan dengan penetapan *sima*, seperti yang diperingati dengan prasasti Kurungan, Panggumulan B dan Hara-hara, sedang kasus pelunasan utang dalam prasasti Wurutunggal itu mungkin karena yang membayar utang ialah anak orang yang berutang.

6. Kesenian

a. Seni Sastra

Dari prasasti Wukajana jelas kiranya bahwa cerita *Mahabarata* dan *Ramayana*, dua wiracarita yang amat terkenal di India, dalam permulaan abad X M, dan mungkin juga dalam pertengahan abad IX M atau sebelumnya, sudah dikenal oleh nenek moyang kita dalam bentuk gubahan dalam bahasa Jawa kuno. Akan tetapi, naskah dari masa itu yang diketahui hanyalah *Ramayana Kakawin*. Menurut tradisi di Bali dan pendapat beberapa orang sarjana, kitab itu digubah oleh Yogiswara.[484] Akan tetapi, Poerbatjaraka dan P.J. Zoetmulder menyangsikan pendapat itu.[485] Memang ada kata *yogiswara* dalam sargga

---

[479] W.F. Stutterheim, "Oorkonde van Dang Acaryya Munindra (Randusari II)", INI, I, 1940, hlm. 3–28

[480] OJO, XXIX

[481] OJO, LV

[482] F.D.K. Bosch, "De Oorkonde van Kembang Aroem", OV, 1925, hlm. 44

[483] OJO, LV

[484] A.L. Manomohan Gosh, "On the source of the Old-Javanese *Ramayana Kakawin*". JGIS, III, 1936, hlm. 115–117; C. Hooykaas, The Old-Javanese *Ramayana Kakawin*", VKI, XVI, 1955

[485] R.M.Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja: Kepustakaan Djawa, hlm. 3; P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 233

terakhir, tetapi itu terdapat dalam kalimat yang merupakan harapan sang pujangga agar para ahli yoga yang terpelajar dan mereka yang unggul dalam kebajikan disucikan hatinya setelah membacanya.[486] Jadi, sebenarnya tidak diketahui siapa yang menggubah *Ramayana Kakawin* itu.

Hal itu agak disayangkan karena *Ramayana Kakawin* ternyata amat indah bahasanya. Sang pujangga mampu untuk menerapkan ilmu persajakan bahasa Sanskerta dalam bahasa Jawa kuno yang masuk keluarga bahasa yang lain dari bahasa Sanskerta. Ia juga menguasai bahasa Sanskerta dengan amat baik seperti yang ditunjukkan oleh Poerbatjaraka.[487] Hal itu antara lain terlihat dan kemampuan sang pujangga untuk mengalihbahasakan bagian-bagian yang amat sulit dipahami dari naskah sumbernya.

Berkat penelitian Himansu Bhusan Sarkar,[488] Manomohan Gosh,[489] C. Bulcke,[490] dan terutama oleh C. Hooykaas dapat diketahui bahwa *Ramayana Kakawin* sebagian besar bersumber dari naskah *Ravanavadha* karangan pujangga Bhatti yang berasal dari kira-kira tahun 500–650 M. Perbandingan yang amat terperinci antara *Ramayana Kakawin*, *Ravanavadha*, dan *Ramayana* karya pujangga Valmiki yang telah dilakukan oleh Hooykaas mengungkapkan bahwa sampai dengan sargga XVI penggubah *Ramayana Kakawin* mengikuti *Ravanavadha*, dengan menyisipkan hal-hal yang dianggapnya perlu dan menurut seleranya sendiri, seperti misalnya uraian tentang Niti*sastra*, uraian tentang suatu percandian Siwa, Rama menerima dan membaca surat dari Sita, tetapi mulai sargga XVII sampai akhir (sargga XXVI) ia sama sekali menyimpang dari *Ravanavadha*. Beberapa bagian dari sargga XVII s.d. XXVI ditemukan kembali dalam karya Valmiki.[491]

Uraian tentang Niti*sastra* itu terdapat pada sargga III, bait ke-53–85, yang menggambarkan waktu Rama menyuruh adiknya, Bharata, yang menyusulnya ke hutan, untuk memerintah di Ayodhya atas namanya dengan membekalinya dengan ajaran-ajaran tentang tingkah laku dan kewajiban seorang raja. Uraian tentang niti, termasuk ajaran *astabrata*, terdapat pada sargga XXIV, bait ke-43–86, sebagai ajaran Rama kepada Wibhisana yang ditetapkannya sebagai

---

[486] RK, XXVI, 50, c. sang *yogiswara* sista sang sujana suddha manah nira huwus maca sira

[487] R.Ng. Poerbatjaraka, "Het Oud–Javaansche *Ramayana*", TBG, LXXII (1932), hlm. 167 dan seterusnya

[488] Himansu Bhusan Sarkar, Indian influences on the literature of Java and Bali, Greater India Series, no. 1, 1934

[489] Manomohan Gosh, "On the source of the Old-Javanese *Ramayana Kakawin*," JGIS, III, 1936, hlm. 113–117

[490] C. Bulcke, "The three recensions of the Valmiki *Ramayana*", JOR, vol. 17, 1947

[491] C. Hooykas, VKI, XVI, appendix I dan II, hlm. 39–61

raja di Langka menggantikan kakaknya, Ravana. Uraian tentang percandian Siwa terdapat dalam sargga VIII bait 43–58. Poerbatjaraka berpendapat bahwa sang pujangga dalam membuat uraian itu membayangkan percandian Loro Jonggrang di depan matanya.[492]

Sudah disebutkan bahwa *Ramayana Kakawin* berasal dari pertengahan abad IX atau permulaan abad X M. Hal itu kita diketahui berkat penelitian Poerbatjaraka, yang men*dasa*rkan pendapatnya atas kosakata, tata bahasa – terutama adanya bentuk-bentuk yang dikonjugasikan –, dan terdapatnya nama-nama jabatan pemerintahan yang sama dengan jabatan-jabatan yang ada di dalam prasasti-prasasti sebelum Pu Sindok.[493] Poerbatjaraka kemudian menegaskan kembali pendapatnya dengan mengatakan bahwa *Ramayana Kakawin* digubah dalam masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung.[494] Karena sekarang berdasarkan prasasti Siwagrha diketahui bahwa candi Loro Jonggrang ditahbiskan pada tahun 856 M, kini cenderung setuju pada pendapat Poerbatjaraka itu.[495]

Kitab *Ramayana Kakawin* ialah satu-satunya hasil su*sastra* dari masa sebelum Pu Sindok yang sampai kepada kita.[496] Apa sebabnya maka demikian hanya dapat diduga-duga saja. Zoetmulder mengemukakan salah satu kemungkinan ialah tidak diturunnya lagi sesuatu karya *sastra* karena tidak disukai oleh generasi yang berikut. Pada waktu itu menurun karya *sastra* ialah satu-satunya cara untuk memperbanyaknya. Karena karya *sastra* itu, seperti yang dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan di dalamnya, ditulis di atas bahan yang tidak tahan lama, yaitu karas (= semacam batu tulis atau bambu

[492] R.Ng. Poerbatjaraka, op.cit., hlm. 161 dan seterusnya

[493] R.Ng. Poerbatjaraka, "De dateering van het Oud-Javaansche *Ramayana*", BKI, (1926), hlm. 165–272. Ibid., "Het Oud-Javaansche *Ramayana*", TBG, LXXII (1932); hlm. 151–214

[494] R.Ng. Poerbatjaraka dan Tardjan Hadidjaja: Kepustakaan Djawa, hlm. 2

[495] J.G. de Casparis, "A metrical Old Javanese inscription dated 856 A.D."; Prasasti Indonesia, II, 1956, hlm. 280–330; P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 231

[496] Ada satu naskah yang oleh sementara ahli dimasukkan ke dalam kelompok hasil *sastra* sebelum Pu Sindok, yaitu naskah Candakarana, atau sekurang-kurangnya bagian dari naskah itu yang bernama Ama*rama*la, karena di dalamnya disebut nama seorang raja dari wangsa Sailendra yang bernama Jitendra (Krom, HJG[2], hlm. 150–151; Poerbatjaraka, Kepustakaan Djawa, hlm. 1–2). Akan tetapi, nama Jitendra (watara) muncul dalam satu prasasti batu di Kecamatan Lengkong (Kertosono) yang dari segi palaeografi harus dimasukkan ke dalam zaman Kadiri. Mungkin juga naskah itu pertama kali dibuat pada masa Sailendra, kemudian diturun lagi diturun lagi, sampai raja Jitendrawatara juga memerintahkan menurunnya, dan penurunan naskah itu mengacaukan dua nama dan menganggap raja Jitendrawatara yang memerintah pada zaman Kadiri (?) sebagai raja dari wangsa Sailendra yang memerintah di kerajaan Mataram

yang dibelah (?)),[497] karya *sastra* yang tidak disukai lagi tentunya lama-lama hancur dan tidak ada kemungkinan untuk sampai kepada kita.[498]

Untuk hasil su*sastra* dari masa pemerintahan wangsa Sailendra di Jawa mungkin dapat diajukan keterangan yang lain. Seperti yang telah dikemukakan di muka pusat kerajaan Mataram mungkin sekali terpaksa dipindahkan ke Jawa Timur karena letusan Gunung Merapi yang terhebat dalam sejarahnya. Dapat dibayangkan bahwa raja dan kaum kerabatnya dan golongan elite yang lain yang mungkin mempunyai koleksi karya-karya *sastra* mengungsi ke Jawa Timur tanpa sempat membawa koleksinya itu. Adapun golongan elite yang tidak mengungsi karena daerahnya tidak terkena akibat letusan itu mungkin masih menyimpan karya-karya *sastra*, tetapi kenyataannya di Jawa tidak ada yang melestarikannya sesudah kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Boleh dikata hampir seluruh karya *sastra* Jawa kuno yang ada sekarang ini ditemukan kembali di Bali dan Lombok, dan ditulis dengan huruf Bali, karena orang Balilah yang melestarikannya.

Dari masa pemerintahan dinasti *Isana* lebih banyak karya *sastra* yang sampai kepada kita. Pertama-tama dapat disebut di sini naskah Sang Hyang Kamahayanikan yang memuat uraian tentang agama Buddha Mahayana.[499] Di dalam salah satu naskah disebut nama raja Pu Sindok, sekalipun dalam bentuk yang agak rusak, yaitu Sri *Isana* Bhadrotunggadewa mpu Sindok.[500] Mungkin sekali Sang Hyang Kamahayanikan dapat dikembalikan pada zaman wangsa Sailendra, karena ternyata W.F. Stutterheim dan Noerhadi Magetsari telah menggunakan isi kitab itu untuk menerangkan landasan keagamaan Candi Borobudur.[501] Adanya naskah yang menguraikan ajaran agama Buddha Mahayana dalam masa pemerintahan Pu Sindok, yang isi prasasti-prasastinya dan namanya mengesankan bahwa ia penganut agama Siwa, tidak perlu dipermasalahkan, karena sejak zaman wangsa Sailendra, agama Hindu dan agama Buddha berkembang berdampingan secara damai. Dari prasasti Kalkuta diketahui bahwa anak Pu Sindok, yaitu Sri Isanatungawijaya, ialah penganut agama Buddha (*sugatapaksasaha*).

---

[497] P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 134–135

[498] Ibid.; hlm. 43–44

[499] J. Kats, *Sang Hyang Kamahayanikan*. Uitgegeven door het KLTLV, 1910

[500] Ibid., hlm. 118

[501] W.F. Stutterheim, Tjandi Barabudur. Naam, vorm en beteekenis, 1929. Terjemahannya dalam bahasa Inggris dengan judul, Chandi Barabudur. Name, form and meaning, dalam Studies in Indonesian Archaeology. KLTLV, Translation Series, no. 1, 1956, Noerhadi Magetsari,

Menyusul kemudian 9 *parwwa* dari cerita *Mahabharata* dan 1 *kanda* dari epos *Ramayana*. Kesembilan *parwwa* itu ialah *Adiparwwa*, yaitu *parwwa* yang pertama,[502] *Sabhaparwwa*, *parwwa* yang kedua,[503] *Wirataparwwwa*, *parwwa* yang keempat,[504] *Udyogaparwwa*, *parwwa* yang kelima,[505] *Bhismaparwwa*, *parwwa* yang keenam,[506] *Asramawasana-parwwa*, *parwwa* yang kelima belas,[507] *Mosalaparwwa*, *parwwa* yang keenam belas,[508] *Prasthanikaparwwa*, *parwwa* yang ketujuh belas,[509] dan *Swargarohana-parwwa*, *parwwa* yang terakhir. Pada akhir *parwwa* yang kedelapan belas ini terdapat epilog yang menerangkan tentang kekeramatan dan kekuatan menyucikan kitab *Mahabharata*, dan berkah yang diperoleh oleh orang yang membacanya.

Satu *kanda* dari *Ramayana* yang sampai kepada kita adalah *Uttarakanda*, yaitu *kanda* yang terakhir. Apakah keenam *kanda* yang lain juga pernah dibuat dalam bahasa Jawa kuno tidak dapat diketahui. Ada dugaan bahwa hanya *Uttarakanda* itu sajalah yang disalin ke dalam bahasa Jawa kuno, karena justru bagian itulah yang tidak ada di dalam *Ramayana Kakawin*.[510] Demikian pula dapat dipermasalahkan apakah seluruh *Mahabharata* yang terdiri atas 18 *parwwa* disalin ke dalam bahasa Jawa kuno, atau hanya kesembilan *parwwa* itu saja. Dari satu episode Wanaparwa, *parwwa* yang ketiga yang tidak sampai ke tangan kita, digubah menjadi satu kakawin tersendiri, yaitu *Arjuna Wiwaha*.[511]

Kesembilan *parwwa* dan kitab *Uttarakanda* itu tertulis dalam bentuk prosa. Rupa-rupanya si penurun memegang aslinya, karena banyak kalimat-kalimat bahasa Sanskerta yang dikutip, kemudian disalin ke dalam bahasa Jawa kuno tanpa tambahan-tambahan. Itu rupa-rupanya memang kehendak raja yang memerintahkan menyalin kitab-kitab itu, sebagaimana ternyata dari permu-

---

Pemujaan *Tathagata* di Jawa pada Abad Sembilan, disertasi, Universitas Indonesia, 1982

502 H.H. Juynboll, Adiparwa, 1906

503 *Sabhaparwwa* belum diterbitkan. Menurut Poerbatjaraka (Kepustakaan Djawa, hlm. 9) bahasanya banyak yang rusak sehingga tidak mungkin lagi dikerjakan

504 H.H. Juynboll, *Wirataparwa*, 1912; A.A. Fokker, *Wirataparwa*. Opnieuw uitggegeven, vertaald en toegelich, I, 1948

505 H.H. Juynboll, "De verhouding van het Oudjavaansche Udyogaparwa tot zijn Sanskrit origineel", BKI, 59, 1914, hlm. 219–313. Beberapa cuplikan terdapat di dalam P.J. Zoetmulder, Sekar Sumawur, I. *Dewamanusaraksasadi*, 1958, Sekar Sumawur II. *Korawapandawacarita*, 1963

506 J. Gonda, "Het Oud-Javaansche Bhismaparwa", Bibliotheca Javanica, no. 7, 1936, "Aanteekeningen op het Bhismaparwa", BJ, no. 7a, 1937

507 H.H. Juynboll, Drie boeken van het Oudjavaansche *Mahabharata*, 1893

508 Kalangwan, hlm. 227

509 Ibid., hlm. 97–98

510 Ibid., hlm. 88

511 Ibid., hlm. 95–96

laan kitab *Wirataparwa*.[512] Dari kitab Adiparwa, *Wirataparwa*, Bhismaparwa, dan *Uttarakanda* diketahui bahwa raja yang memerintahkan menyalin kitab-kitab itu (*manjawaken*) ialah raja Dharmmawangsa Teguh. Kitab *Wirataparwa* bahkan memuat pertanggalan yang lengkap, yaitu hari permulaan dan akhir penyalinan atau pembacaan kitab itu dalam bahasa Jawa kuno, yaitu tanggal 15 paro gelap bulan Asuji, hari Rabu Kliwon, *paringkelan* Tungle, wuku Pahang tahun 918 Saka (14 Oktober 996 M) dan tanggal 14 paro gelap bulan Karttika, hari Kamis Wage *paringkelan* Mawulu, wuku Madangkungan tahun 918 Saka (12 November 996 M). Hanya empat *parwwa* yang terakhir mungkin dibuat kemudian, mengingat gaya bahasanya yang agak berbeda dengan *parwwa-parwwa* yang lain.

Dua buah kitab keagamaan, yaitu kitab *Brahmandapurana* dan *Agastyaparwa*, kedua-duanya dalam bentuk prosa, mungkin berasal dari masa ini juga.[513] Ada juga naskah *Brahmandapurana* dalam bentuk kakawin, tetapi berasal dari masa yang lebih muda.[514] Kedua kitab itu dari agama Hindu.

Kitab *Arjunawiwaha* (= perkawinan Arjuna) yang merupakan petikan dari Wanaparwa, yaitu bagian yang menceritakan ketika Sang Arjuna sedang bertapa di bukit Indrakila untuk memohon senjata yang ampuh kepada para dewa untuk memenangkan peperangan yang akan terjadi antara para Pandawa dan Kurawa, dan ia dimintai bantuan para dewa untuk membinasakan raksasa Niwatakawaca yang hendak menghancurkan Keindraan. Dengan bersenjatakan *panah* *pasupati* pemberian Dewa Siwa ia berhasil membunuh Niwatakawaca dan ia diberi hadiah dinobatkan sebagai raja di keindraan dan mendapatkan tujuh bidadari sebagai istrinya.

Kitab *Arjunawiwaha* itu boleh dikata merupakan permulaan *sastra* kakawin dalam bahasa Jawa kuno dalam periode Jawa Timur, dan merupakan gubahan Pu Kanwa sendiri, karena ternyata isinya banyak menyimpang dari episode yang sama dari *Mahabharata* dalam bahasa Sanskerta maupun dari *kawya Kiratarjuniya* karya pujangga Bharawi. Kitab ini digubah pada zaman pemerintahan raja Airlangga. Berdasarkan keterangan pada akhir naskah *Arjunawiwaha* yang mengatakan bahwa Pu Kanwa yang baru pertama kali itu menghasilkan karya *sastra*, merasa

---

[512] Ibid., hlm. 95. L-C. Damais, "Etudes d'Epigraphie Indonésienne, III. Liste des principales incriptions datees de I'Indonesie", BEFEO, tome XLVI, fasc. 1 (1952), hlm. 62–63, EEI, IV, Discussion de la date des inscriptions", BEFEO, tome XLVII, fasc. 1 (1955), hlm. 62

[513] Kepustakaan Djawa, hlm. 6–7. J. Gonda, "Het Oud-Javaansche Brahmanda – Purana. Prozatekst en kakawin", Bibliotheca Javanica, no. 5, 1932, BJ, no. 6, 1933, "*Agastyaparwa*, een Oud-Javaansch prozageschrift", BKI, 90, 1933, hlm. 329–419; BKI, 92, 1935, hlm. 389–458; BKI, 94, 1936, hlm. 223–285

[514] Kepustakaan Djawa, hlm. 39–40, Kalangwan, hlm. 380; 486

gelisah karena harus mempersiapkan diri untuk suatu peperangan dengan mempersembahkan doa-doa, dapat diperkirakan bahwa kitab *Arjuna Wiwaha* digubah antara tahun 1028 dan 1035 M.[515]

Menurut Poerbatjaraka, penyimpangan dari episode di dalam *Mahabharata* bukan disebabkan Pu Kanwa tidak paham bahasa Sanskerta, tetapi karena ia mau menggubah suatu cerita yang utuh yang dapat dipertunjukkan sebagai lakon wayang. Sebagaimana diketahui tema pokok dalam suatu cerita wayang biasanya ialah kekhawatiran pihak yang baik atas kemenangan sementara pihak yang jahat, pihak yang baik mencari bantuan kepada kekuasaan yang lebih tinggi, dengan bantuan kekuasaan yang lebih tinggi itu pihak yang baik mengadakan perlawanan terhadap pihak yang jahat, kemenangan pihak yang baik, dan cerita diakhiri dengan "*tañcep kayon*".[516] Seperti yang telah dikatakan di atas di dalam kitab *Arjuna Wiwaha* dijumpai keterangan yang tidak perlu diragukan lagi tentang adanya pertunjukan wayang kulit.[517]

Mungkin sekali Pu Kanwa mempunyai tujuan yang lain dalam meng-gubah kitab *Arjuna Wiwaha* itu, yaitu untuk menceritakan riwayat hidup rajanya.[518] Seperti telah disebutkan di atas Airlangga mula-mula selama hampir tiga tahun harus hidup di hutan di lereng gunung di tengah-tengah para pertapa, setelah kerajaan hancur karena serbuan Haji Wurawari. Akan tetapi, kemudian oleh rakyat dan para pendeta ia dinobatkan menjadi raja, dan kemudian berhasil menaklukkan kembali Haji Wurawari dan raja-raja yang lain yang tidak mau lagi mengakui kemaharajaannya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan antara riwayat Airlangga dan cerita Sang Arjuna, yaitu bahwa Sang Arjuna mula-mula bertapa, lalu dimintai bantuan dewa-dewa untuk membunuh raksasa Niwatakawaca, baru ia dinobatkan menjadi raja di keindraan, sedang raja Airlangga dinobatkan menjadi raja dahulu, baru kemudian menaklukkan musuh-musuhnya.

b. Seni Pertunjukan

Dalam kehidupan sehari-hari rakyat tidak terlepas dari kebu*tuhan* akan hiburan. Prasasti-prasasti dan relief candi-candi, terutama candi Borobudur dan Prambanan, banyak memberi data tentang bermacam-macam seni per-tunjukan. Pertama-tama dijumpai keterangan tentang pertunjukan wayang

---

[515] R.Ng. Poerbatjaraka, "*Arjuna Wiwaha*. Tekst en vertaling", BKI, 82 1926, hlm. 2; P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 244

[516] R.Ng. Poerbatjaraka, "... *Arjuna Wiwaha*", hlm. 4

[517] AW, V, 9

[518] C.C. Berg, "*Arjuna Wiwaha*. Er-langga's levensloop en bruiloftslied?", BKI, 97, 1938

di dalam prasasti Wukajana dari masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung. Dikatakan di dalam prasasti itu bahwa pada upacara penetapan desa-desa Wukajana, Tumpang, dan Wuru Telu menjadi *sima* bagi sebuah biara di Dalinan telah diadakan beberapa macam pertunjukan, antara lain wayang dengan dalangnya Si Galigi yang memainkan lakon Bhima Kumara. Cerita ini diambil dari *Wirataparwwa*.[519] Dalam kesempatan yang sama lakon itu juga dinyanyikan oleh seorang penari yang memerankan *Kicaka*.[520] Mungkin di sini diperoleh keterangan tentang dua macam pertunjukan wayang, yaitu wayang kulit dengan dalang Si Galigi dan wayang orang dengan petilan cerita *Kicaka* yang sedang mabuk asmara terhadap Draupadi. Keterangan yang tidak perlu diragukan lagi tentang adanya wayang kulit terdapat di dalam kitab *Arjunawiwaha* dari masa pemerintahan Dharmmawangsa Airlangga.[521]

Selain pertunjukan wayang kulit dan petilan wayang orang serta pembacaan cerita *Ramayana*, ada lagi pertunjukan lawak (mamirus dan m*abañol*). Pertunjukan lawak itu dijumpai hampir di semua prasasti yang menyebut upacara penetapan *sima* secara terperinci. Relief candi juga banyak melukiskan pelawak itu, yang mungkin merupakan prototipe tokoh-tokoh *pana*kawan pada relief candi-candi di Jawa Timur.

Tari-tarian juga sering dipertunjukkan pada upacara penetapan *sima*. Ada tari-tarian yang dapat ditarikan bersama oleh laki-laki dan perempuan, orang-orang tua dan pemuda-pemudi, dan ada juga tari-tarian khusus seperti *tuwung, bungkuk, ganding, dan rawanahasta*.[522] Sayang sekali belum dapat dikenali jenis-jenis tarian itu. Ada juga tari topeng (*matapukan*). Tari-tarian itu biasanya diiringi dengan gamelan. Ternyata prasasti dan relief candi menampilkan jenis alat gamelan yang terbatas, antara lain semacam gendang (*padahi*), *kecer* atau simbal (*regang*), semacam gambang, saron, kenong, beberapa macam bentuk kecapi (wina), seruling, dan gong.[523]

---

[519] P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 208–209

[520] B.(9) ... *kahlamannya hinyunnakan tontonan mamidu sang tangkilhyang si nalu macarita bhimma kumara mangigal kica(10)ka. si jaluk macarita ramayana mamirus mabañol si mungmuk. si galigi mawayang buat hyang macarita bimma ya kumara* (= kemudian diminta diadakan pertunjukan menyanyi oleh Si Nalu dari Tangkilhyang dengan cerita Bimma Kumara sambil menari (memerankan tokoh) *Kicaka*. Si Jaluk membaca cerita *Ramayana*, yang melawak ialah Si Mungmuk, dan Si Galigi mendalang dengan cerita Bimma Kumara)

[521] R.Ng. Poerbatjaraka, "*Arjuna Wiwaha*", BKI, 82, 1926; P.J. Zoetmulder, Kalangwan, hlm. 209–210

[522] Prasasti Paradah tahun 865 Saka (943 M., OJO, XLVIII): B.(46) ... *i tlas ning manambah mangigal yathakrama tuwung bungkuk ganding rawanahasta sampun sangkap ikanang iniga(47)lakan*

[523] Jaap Kunst, Hindu-Javanese Musical instruments. Translation Series, no. 22, KLTLV, 1968

Adanya pelbagai macam tarian yang diiringi oleh gamelan yang terbatas itu banyak dijumpai di relief candi Prambanan dan Borobudur. Di antaranya dapat dilihat tarian perang, seorang perempuan menari sendiri, adegan yang menggambarkan semacam reog di Jawa Barat, dan lain-lain.[524] Adegan perempuan yang menari seorang diri diikuti oleh beberapa orang laki-laki yang bertepuk tangan mengingatkan pada keterangan di dalam prasasti Poh yang menyebut *rara mabhramana tinonton mwang were werehnya* (= gadis yang berkeliling untuk ditonton dengan [pengiringnya] orang laki-laki); mungkin semacam *teledek* yang *ngamen* berkeliling dari desa satu ke desa yang lain.

Pelbagai macam tontonan itu tentu saja tidak hanya dipertunjukkan pada waktu ada upacara penetapan *sima*. Ada dalang, penabuh gamelan, penari dan pelawak profesional, yang memperoleh sumber penghasilan dari profesinya itu. Seperti telah dikatakan di atas para seniman itu masuk ke dalam kelompok *wargga Kilalan*.

---

[524] A.J. Bernet Kempers: Ancient Indonesian Art, gb. 87, 149–152, Ageless Borobudur, gb. 72, 153, 186, 205, 237–322

Bab V
Kerajaan Kadiri

A. Sumber-Sumber

1. Pembagian Kerajaan oleh Airlangga

Masalah-masalah pergantian kekuasaan rupa-rupanya memaksa Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, seperti yang dapat dibaca dari pelbagai sumber. Sumber pertama yang menyebut pembagian kerajaan itu ialah prasasti pada lapik arca Buddha Aksobhya yang terkenal dengan nama arca Joko Dolog, atau prasasti Wurara, tahun 1211 Saka (21 November 1289 M.).[1] Di samping itu, kitab *Nagarakrtagama*[2] dan kitab Calon Arang[3] juga menyebut pembagian kerajaan itu.

Prasasti Wurara memperingati pentahbisan arca Mahaksobhya di pekuburan Wurara, melambangkan raja Kertanagara yang telah mencapai Jina, pada tanggal 21 November 1289 M. Pada bagian permulaan prasasti ini disebutkan pendeta utama bernama Aryya Bharad. Ia telah membagi tanah Jawa menjadi dua dengan air sakti dari kendi, yang mempunyai kemampuan untuk membelah tanah karena ada dua orang raja yang saling berhadapan siap untuk berperang. Terjadilah kerajaan Janggala dan Pangjalu.[4] Kitab *Nagarakrtagama* memberi keterangan bahwa raja Airlangga telah memerintahkan pembagian tanah Jawa karena cinta kasihnya kepada dua orang anaknya yang sama-sama menjadi raja, yaitu raja Pangjalu yang bertakhta di Daha, dan ....[5]

Pembagian itu dilakukan oleh Pu Bharada, penganut agama Buddha Mahayana dari aliran Tantra, yang bertempat tinggal di Lemah Citra. Ia pernah pergi ke Bali dengan berjalan di atas air karena kesaktiannya. Dengan segala

---

1 H. Kern, "De Sanskrit-inscriptie van het Mahaksobhya-beeld te Simpang (stad Surabaya, 1211 Saka)", VG, VII, 1917, hlm. 187–197

2 *Nag*, LXVIII

3 R.Ng. Poerbatjaraka, "De Calon Arang", BKI, 82, 1926, hlm. 110–180

4 Prasasti Wurara, bait ke-3–6

5 Bait pertama ini rupa-rupanya kehilangan satu pada. Di sini kita mengharapkan keterangan mengenai kerajaan Janggala dengan ibu kotanya. Sayang kitab *Nagarakertagama* ini baru satu naskah saja yang sudah diteliti sehingga tidak dapat direkonstruksi pada yang hilang itu

senang hati ia melaksanakan pembagian itu dengan menggunakan air kendi yang dituangkannya dari udara. Batas itu ditarik dari barat ke timur sampai ke laut, tiada jauh, tetapi bagaikan perbatasan samudra pada waktu tanah Jawa mempunyai dua orang raja. Akan tetapi, ia tidak dapat melaksanakan pembagian itu dengan sempurna karena di Desa Palungan jubahnya tersangkut pohon asam, sehingga ia terpaksa turun dari udara dan berhenti di tempat itu. Pohon asam itu lalu dikutuknya hingga tetap menjadi pohon kerdil.

Di dalam kitab Calon Arang diceritakan bahwa pada suatu ketika kerajaan Airlangga ditimpa musibah wabah penyakit yang amat menyeramkan. Banyak sekali penduduk yang mati, kalau sakit pagi, sorenya ia mati, kalau sakit sore, paginya ia mati, sehingga di seluruh kerajaan mayat-mayat berserakan. Wabah itu ditimbulkan oleh seorang janda di Girah yang merasa sakit hati karena anaknya yang amat cantik tidak ada orang yang meminangnya. Akhirnya, raja meminta bantuan Pu Bharada, yang menyuruh muridnya melamar anak janda tersebut. Dengan tipu muslihat akhirnya sang janda dapat ditundukkan. Sejak saat itu, redalah wabah yang melanda kerajaan Airlangga. Selanjutnya dikatakan bahwa Airlangga merasa bingung karena harus memberi kerajaan kepada dua orang anak laki-lakinya. Ia mengutus Pu Bharada pergi ke Bali untuk meminta kerajaan di Bali bagi anaknya yang kedua. Pergilah Pu Bharada ke Bali, menyeberangi Selat Bali naik daun kekatang (keluih). Di Bali ada juga seorang pendeta sakti penasihat raja, yaitu Pu Kuturan. Ia tidak dapat menyetujui permintaan raja Airlangga, karena ia telah memperuntukkan kerajaan di Bali bagi keturunannya sendiri. Kini tidak ada jalan lain bagi Airlangga kecuali membagi tanah Jawa menjadi dua, yang melaksanakan pembagian itu Pu Bharada. Kerajaan Pangjalu di sebelah timur, dan kerajaan Janggala di sebelah barat. Akan tetapi, tidak lama kemudian raja Janggala mau menyerang saudaranya raja Pangjalu. Untung masih berhasil dilerai.

C.C. Berg menganggap pembagian kerajaan raja Airlangga itu bukan suatu fakta historis, melainkan suatu cerita yang dibuat oleh pujangga pada zaman Majapahit untuk membenarkan pembagian kerajaan yang dilakukan oleh raja Hayam Wuruk, dengan memberikan kerajaan Wirabhumi di sebelah timur kepada seorang anak perempuannya, yaitu Bhre Wirabhumi, sedang anaknya yang lahir dari parameswari, yaitu Kusumawarddhani, mewarisi takhta kerajaan Majapahit.[6]

[6] C.C. Berg, "Herkomst, Vorm en Functie der Middel-Javaansche Rijksdeelingstheorie", VKNAW, afd. Letterkunde, NR, LIX, no. 1, 1953

Dengan berhasil dibacanya prasasti Turun Hyang B (angka tahunnya tidak terbaca kecuali angka satuannya saja),[7] pendapat Berg itu harus diragukan kebenarannya. Prasasti Turun Hyang B ini memperingati pemberian tambahan anugerah kepada penduduk Desa Turun Hyang yang sebelumnya telah mendapat anugerah dari raja Airlangga (di dalam prasasti Turun Hyang A), karena jasa-jasanya membantu raja Mapañji Garasakan di dalam peperangan pada waktu raja "memisahkan diri" dari Haji Pangjalu.

Sebenarnya nama Mapañji Garasakan sudah terbaca di dalam prasasti Kambang Putih yang sayang sekali sisi depannya rusak sama sekali sehingga tidak diketahui angka tahunnya,[8] tetapi rupa-rupanya N.J. Krom tidak memerhatikannya karena prasasti ini memakai cap *garudamukha*, cap kerajaan raja Airlangga.[9] Kemudian nama raja Garasakan ini muncul lagi di dalam prasasti Malenga, yang ditemukan di Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang berangka tahun 974 Saka (22 Agustus 1052 M).[10]

Prasasti Malenga itu memperingati pemberian anugerah Raja Haji Garasakan kepada penduduk Desa Malenga karena jasa-jasanya telah membantu raja dalam peperangan melawan Haji Linggajaya, sehingga musuh itu terusir dari istananya di Tanjung. Juga prasasti Malenga ini memakai cap *garudamukha*.

Pemakaian cap kerajaan yang sama oleh dua orang raja memang baru sekali ini dijumpai. Bahkan, ada lagi raja yang ketiga yang juga menggunakan cap *garudamukha*, yaitu Sri Maharaja Sri Samarotsaha Karnnakesana Ratnasangkha Kirttisingha Jayantaka Tunggadewa, di dalam prasasti Sumengka tahun 981 Saka (31 Maret 1059 M). Yang menarik perhatian ialah bahwa di sini cap *garudamukha* itu ditambahi keterangan *jangga[la]lañchana*, yang berarti tanda dari kerajaan Janggala, dan bahwa raja menyebut dirinya dijadikan anak oleh raja almarhum (*pinaka wka de sri maharaja dewata*). Dengan keterangan ini, mungkin sekali Mapañji Garasakan, yang memisahkan diri dari raja Pangjalu, adalah raja di Janggala juga, yang memerintah sebelum Samarotsaha.

---

7 Boechari, "Sri Maharaja Mapañji Garasakan, A new evidence on the historicity of Airlangga's partition of his kingdom", MISI, jilid IV, no. 1.2, 1968, hlm. 1–26. Yang terbaca dari angka tahunnya itu ialah angka 6. Oleh Boechari diperkirakan bahwa prasasti ini berangka tahun 966 Saka (1044 M)

8 OJO, CXVIII

9 N.J. Krom, HJG², hlm. 266. Lihat juga Sejarah Nasional Indonesia II, tahun 1976, hlm. 99, yang juga menyebutkan perbaikan pelabuhan Kambang Putih oleh raja Airlangga

10 Prasasti ini belum diterbitkan

Masih ada lagi raja Janggala yang disebutkan di dalam prasasti, yaitu raja Mapañji Alañjung Ahyes Makoputadhanu Sri Ajñajabharitamawakana Pasukala Nawanamaninddhita Sasatrahetajñadewati, di dalam prasasti Bañjaran tahun 974 Saka (31 Agustus 1052 M).[11] Prasasti tembaga ini merupakan turunan yang dibuat pada zaman Majapahit, jika ditilik dari segi palaeografi. Isinya ialah pemberian anugerah raja Alañjung Ahyes kepada *samya haji* di Bañjaran (raja bawahan) karena telah berjasa membantu raja dalam usahanya untuk merebut kerajaan Janggala. Dikatakan bahwa semula raja bersembunyi di dalam pertapaan di hutan di Desa Marsma Lor. Raja Bañjaran, diikuti oleh penduduk Janggala, datang menghadap kepadanya dengan membawa kendaraan, senjata, dan panji-panji, dan mohon kepada raja agar mau menggantikan duduk di atas takhta kerajaan Janggala, atau merebut kerajaan Janggala (kumalilirana kajanggalan). Dengan pasukan ini, raja menyerbu dari Marsma dengan membunyikan genderang yang riuh, dan rupa-rupanya ia berhasil merebut kerajaan Janggala. Di dalam prasasti ini juga dijumpai kata *garudamukha*.

Menurut Boechari prasasti Turun Hyang B merupakan bukti bahwa pembagian kerajaan oleh Airlangga itu memang benar pernah terjadi. Seperti telah dikemukakan, kedudukan Airlangga di atas takhta kerajaan Mataram bukannya tidak dapat diganggu gugat, karena mungkin sekali permaisurinya ikut terbunuh dalam serangan Haji Wurawari. Akan tetapi, mungkin karena tidak ada pewaris yang sah yang dapat dinobatkan sebagai raja – mungkin kalaupun ada anak laki-laki Dharmmawangsa Teguh yang masih hidup ia masih terlalu kecil – Airlanggalah yang dijadikan raja, tetapi jelas ia diberi gelar halu, dan bukan hino. Prasasti Silet tahun 1019 M (tanggal 9 Maret) mungkin ditulis untuk melegitimasikan dirinya, dengan menyebut nama Pu Sindok dan Sri Isanatunggawijaya.[12]

Setelah dinobatkan menjadi raja pada tahun 1020 M (tanggal 1 Februari) mungkin sekali Airlangga lalu mengambil seorang permaisuri, di antara

---

[11] Prasasti ini juga belum diterbitkan. Di Desa Banjaran, Kecamatan Gunung Kendeng (Surabaya) ada batu bertulis yang amat usang, sehingga angka tahunnya tidak terbaca. Pada beberapa tempat di dalam prasasti ini dijumpai *samya haji* i bañjaran. Bentuk hurufnya memang menunjuk ke abad XI M. Sebagian nama rajanya terbaca sebagai ... itanindita Parakramottunggadewa, dan yang menjabat *rakryan mahamantri i hino* ialah Mapatih Danta Sri .... Nama Mapatih Danta sebagai *rakryan mahamantri i hino* ini juga dijumpai di dalam prasasti Bañjaran yang merupakan turunan dari zaman Majapahit itu, sedangkan nama rajanya hanya unsur itanindita yang sama. Dapat diduga bahwa prasasti Bañjaran yang ditulis di atas tembaga itu merupakan turunan dari prasasti Bañjaran yang ditulis di atas batu, yang kini masih berada di tempat yang asli (nama desanya tetap Bañjaran hingga sekarang)

[12] Mungkinkah karena itu prasasti ini kemudian dihancurkan oleh pihak yang tidak menyetujui duduknya Airlangga dan keturunannya di atas takhta kerajaan?

putri-putri kerabat raja yang masih selamat. Setelah ia mempunyai anak dari permaisurinya itu, seorang perempuan yaitu Sri Sanggramawijaya Dharmmaprasadottunggadewi, segera ditahbiskan sebagai putri mahkota, sehingga di dalam prasasti-prasasti sejak tahun 1021 M (27 Oktober) sampai tahun 1037 M (11 November) kita melihat Sanggramawijaya dalam jabatan *rakryan mahamantri i hino*. Kesulitan timbul setelah muncul anak laki-laki Dharmmawangsa Teguh yang sementara itu telah berumur lebih dari 20 tahun, yaitu Samarawijaya, menuntut haknya atas takhta kerajaan Mataram. Dengan berat hati Airlangga menyerahkan kedudukan putra mahkota kepada saudara sepupunya itu. Tidak lama setelah ia melepas nazarnya dengan membangun pertapaan di Pucangan disertai tanah-tanah *sima*-nya ia mengundurkan diri dari pemerintahan. Hal ini mungkin dapat dilihat dari prasasti Gandhakuti yang dikeluarkan pada 24 November 1042 M[13] oleh Aji Paduka Mpungku Sang Pinakacatraning Bhuwana, yaitu gelar Airlangga setelah menjadi pendeta. Di dalam prasasti ini dikatakan bahwa Aji Paduka Mpungku telah membeli tanah dari para pejabat desa (atau penduduk) Desa Kambang Sri seharga 10 suwarna dan 10 masa emas. Setelah itu ia menempatkan anaknya di bangunan suci atau pertapaan Gandhakuti di Kambang Sri dengan tetap memiliki hak-hak sebagai putra raja. Selanjutnya bangunan suci dengan tanah-tanahnya itu ditetapkan sebagai *sima*.

Mungkinkah anak yang ditempatkan di dharmma Gandhakuti di Kambang Sri itu Sanggramawijaya? Menurut tradisi di dalam Serat Kanda Resi Gentayu, raja Koripan, mempunyai lima orang anak. Yang tertua ialah perempuan, yang kemudian menjadi pertapa dan terkenal dengan nama Rara Sucian atau Dyah Kili Suci. Mungkinkah setelah Sanggramawijaya terpaksa harus melepaskan kedudukannya sebagai putri mahkota lalu memilih menjadi pertapa?[14]

Akan tetapi, tindakan itu tidak meredakan keadaan. Mungkin ada adik Sanggramawijaya yang tidak dapat menerima keputusan ayahnya, lalu hendak merebut kekuasaan. Buru-buru Aji Paduka Mpungku kembali memegang tampuk pimpinan kerajaan, seperti yang ternyata dari prasasti Pamwatan yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 1042 M jadi hanya kurang dari sebulan setelah dikeluarkannya prasasti Gandhakuti. Bahkan, ada prasasti di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang (dulu bernama Desa

---

[13] OJO, LXIII

[14] Perlu dicatat di sini bahwa di antara hak-hak sebagai putra raja itu ada yang menyiratkan bahwa ia anak laki-laki, antara lain: ring balai arabya dayang, wnang katmwananing stri larangan, dan burwan saking sangkanya kunang. Akan tetapi, karena prasasti ini tinulad, mungkin penulis prasasti mengambil saja ungkapan yang stereotip mengenai anugerah berupa hak-hak istimewa itu

Pasar Legi yang masuk Kecamatan Sambeng), yang berangka tahun 965 Saka (1043 M) yang dikeluarkan oleh raja Airlangga dengan Sri Sanggramawijaya Dharmmaprasadottunggadewi sebagai *rakryan mahamantri i hino*. Prasasti ini memuat anugerah raja kepada penduduk desa Patakan. Sayang bagian sambandha-nya tidak dapat dibaca dengan jelas lagi, padahal ada ungkapan yang mungkin memberi keterangan yang amat berharga, yaitu adanya kata ... *tan i yawadwipa. tka ri swaputra*.[15]

Mungkin sekali tidak lama sesudah itu untuk menghindari perang saudara, maka ia mengambil tindakan yang diketahuinya menyimpang dari landasan kosmogonis kerajaan, yaitu membagi kerajaan menjadi dua. Dalam hal ini mungkin sekali ia bercermin pada cerita *Mahabharata*, yang memuat peristiwa pembagian kerajaan Hastinapura menjadi dua, yaitu kerajaan Hastina dengan ibu kotanya yang lama untuk para Kaurawa yang memang berhak penuh atas takhta kerajaan Hastina, dan Amartha dengai ibu kotanya Indraprastha, yang semula berupa hutan belukar untuk para Pandawa, dari garis keturunan yang muda. Sekalipun Airlangga tahu juga bahwa pembagian kerajaan Hastina itu tidak juga membawa penyelesaian, karena ternyata kemudian terjadi juga perang Bharata (Bharatayuddha), tindakan itu ditempuhnya juga karena merupakan satu-satunya pemecahan yang ada pada saat itu. Mungkin juga tidak kebetulan bahwa kerajaan yang dibentuk kemudian diberi nama Janggala, yang berarti hutan. Samarawijaya, sebagai pewaris yang sah karena ia anak Dharmmawangsa Teguh, mendapat ibu kota yang lama yaitu Dahanapura, dan nama kerajaannya diubah menjadi Pangjalu. Anak Airlangga sendiri (entah Sanggramawijaya entah adiknya) mendapat bagian kerajaan yang kemudian diberi nama Janggala. Ibu kotanya mungkin sekali bernama Kahuripan mengingat bahwa dalam zaman Majapahit bagian yang terpenting dari kerajaan Majapahit ialah Daha dan Kahuripan.

Setelah kerajaan dibagi Airlangga kembali masuk pertapaan. Akan tetapi, tidak lama kemudian terjadi juga perang saudara itu, sebagaimana terbukti dari prasasti Turun Hyang B, yang mungkin sekali berangka tahun 966 Saka (1044 atau 1045 M). Dari uraian tersebut dapat kiranya disimpulkan bahwa Mapañji Garasakan adalah anak Airlangga, adik Sanggramawijaya Dharmmaprasadottunggadewi. Oleh karena itu, dalam keadaan yang istimewa itu, dalam masa perebutan kekuasaan, ia memakai cap kerajaan garudamukha seperti yang dipakai oleh Airlangga sendiri; demikian pula halnya raja-raja

[15] Prasasti ini belum diterbitkan. Yang amat aneh dari prasasti ini ialah bahwa ia harus dibaca dari bawah ke atas. Hurufnya tidak seindah huruf prasasti raja Airlangga yang lain

Janggala yang lain, seperti Alañjung Ahyes dan Samarotsaha. Semuanya hendak menunjukkan hubungan langsung dengan raja Airlangga. Dalam hal ini mungkin sekali Samarotsaha ialah menantu Airlangga; karena ia menyebut dirinya dijadikan anak oleh raja almarhum. Ini sesuai dengan tradisi di dalam Serat Kanda.[16]

Yang menarik perhatian dari sumber-sumber tersebut di atas ialah adanya keterangan tentang perebutan kekuasaan di Janggala sendiri, seperti yang termuat di dalam prasasti Bañjaran. Karena prasasti Bañjaran itu hanya berselisih sembilan hari dengan prasasti Malenga yang memuat keterangan tentang serbuan Mapañji Garasakan atas raja Linggajaya dari Tañjung, mungkin sekali Alañjung Ahyes (atau apa pun namanya yang sebenarnya) berebut kekuasaan dengan Mapañji Garasakan atau penggantinya (istilahnya kumalilirana kajanggalan = supaya menggantikan kedudukan sebagai raja Janggala).

Sementara itu, sama sekali tidak ada sumber mengenai kerajaan Pangjalu yang kita ketahui. Hanya ada satu prasasti tinulad yang menyebut Paduka Sri Mahadewi *siniwi ring bhumi Kadiri*, dari tahun 937 Saka (1015 M).[17] Ini tidak berarti bahwa kita langsung menganggap Kadiri sama dengan Pangjalu. Dalam hal ini terlebih dahulu perlu dipermasalahkan batas kedua kerajaan yang terjadi setelah pembagian kerajaan itu. Dalam prasasti Wurara maupun kitab *Nagarakrtagama* dan Calon Arang jelas bahwa yang dijadikan batas antara kedua kerajaan itu ialah sebuah sungai,[18] dan sungai itu mengalir dari barat ke timur sampai ke laut. Mengingat daerah persebaran prasasti Airlangga, yaitu daerah antara Bengawan Solo dan Kali Brantas antara Babat dan Ploso ke timur, kita lebih condong untuk memandang Kali Lamong sebagai batas antara kedua kerajaan itu. Prasasti Pamwwatan yang berukirkan kata Daha dengan huruf kuadrat yang besar di sisi depannya, terdapat di Desa Pamotan, di sebelah selatan Kali Lamong dan ibu kotanya Dahanapura ada di sekitar Desa Pamotan. Mapañji Garasakan yang memperoleh kerajaan Janggala jelas daerah kekuasaannya ada di sebelah utara, karena dua prasastinya, yaitu prasasti Kambang Putih dan prasasti Malenga terdapat di daerah Kabupaten Tuban. Mungkin karena perang saudara yang tidak henti-hentinya ibu kota

---

[16] Lihat Boechari, "Sri Maharaja Mapañji Garasakan", hlm. 4–8

[17] F.H. van Naerssen, Oud-Javaansche oorkonden in Duitsche en Deensche verzamelingen. Prasasti no. VII-1

[18] N.J. Krom masih memikirkan kemungkinan batas itu berupa dinding bata, yang masih diketemukan sisa-sisanya di lereng Gunung Kawi ke selatan, yaitu apa yang disebut di dalam kitab Pararaton disebut Pinggir Raksa, yang menurut Krom masih tertinggal dalam nama sungai, yaitu Kali Leksa (N.J. Krom. HJG[2], hlm. 274–275)

Dahanapura berpindah-pindah, sampai akhirnya terletak dalam wilayah Kediri sekarang.[19] Yang perlu diperhatikan pula ialah bahwa di dalam kitab Calon Arang maupun di dalam cerita-cerita Pañji, raja Kadiri dianggap lebih muda daripada raja Janggala. Di dalam kitab Calon Arang dikatakan bahwa raja Kadiri yang hendak menyerang kakaknya di Janggala. Ini jelas berlawanan dengan keterangan di dalam prasasti Turun Hyang B. Mengenai masalah tua dan muda itu, kalau dilihat dari umur saja, memang Airlangga lebih tua daripada Samarawijaya, anak Teguh, yang merupakan saudara sepupu Airlangga. Akan tetapi, kalau ditinjau dari segi hak waris, Samarawijayalah yang lebih berhak, dan karena itu mestinya dianggap sebagai mewakili garis keturunan yang tua. Oleh karena itu, Airlangga juga hanya diberi gelar halu. Mungkin sengaja dibuat suatu inversi di dalam kitab Calon Arang dan cerita-cerita Pañji itu? Ini mengingat bahwa menurut cerita *Mahabharata* yang akhirnya jaya ialah pihak Pandawa, yang mewakili garis keturunan yang muda, sedang di dalam sejarah Kadiri yang jaya ialah kerajaan Panjalu.

2. Kerajaan Pangjalu di Daha

Setelah prasasti tiga orang raja Janggala yang sudah disebutkan di atas, dan setelah ada masa gelap selama kira-kira 60 tahun, yang muncul dalam sejarah adalah Kadiri dengan ibu kotanya Daha. Prasasti yang pertama ialah prasasti Padlegan tahun 1038 Saka (11 Januari 1117 M),[20] yang dikeluarkan oleh raja Sri Maharaja Sri Bameswara Sakalabhuwanatustikarana-(Sa) rwwaniwaryyawiryya Parakrama Digjayottunggadewa. Di dalam prasasti ini diperingati anugerah raja Bameswara kepada penduduk Desa Padlegan sewilayahnya termasuk daerah kalang, kalagan, dan kabanyagan, berupa ketetapan daerah itu sebagai *sima* swatantra. Adapun sebabnya penduduk desa Padlegan memperoleh anugerah raja ialah karena pada suatu hari mereka menghadap raja dengan perantaraan Sang Juru Pangjalu Mapañji Tutusing Rat mohon diberi anugerah *sima*. Mereka itu memang telah berjasa kepada raja dengan memperlihatkan besarnya kebaktian mereka terhadap raja,

---

[19] Bahwa Dahana merupakan ibu kota daerah Kadiri antara lain terdapat di dalam prasasti Mula Malurung tahun 1177 Saka (1255 M). Di dalam prasasti itu dikatakan bahwa Sri Jaya Wisnuwardhana Mapañji Smining Rat telah mentahbiskan anaknya. Kertanagara, di Daha dengan kekuasaan di bhumi Kadiri. Rupa-rupanya dalam zaman Singhasari Majapahit yang dianggap penting ialah nama ibu kotanya, bukan wilayahnya. Oleh karena itu, tidak pernah dijumpai gelar Bhre Kadiri atau Bhre Janggala, tetapi Bhre Daha dan Bhre Kahuripan

[20] OJO, LXVII. Nama raja ini yang benar memang Bameswara bukan Kameswara (I) atau Parameswara. Lihat L-C. L-C. Damais, "Epigrafische Aantekeningen II. Kameswara-Bameswara", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 6–10

mempertaruhkan jiwa raganya agar raja memperoleh kemenangan di dalam peperangan, dan telah berhasil menjadi pasukan pelindung raja.

Dengan disebutkannya jabatan sang juru pangjalu dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1117 M kota Daha sudah tidak lagi ada di dalam wilayah Pangjalu di lembah Sungai Brantas di sebelah selatan Kali Lamong, tetapi mungkin sekali ada di daerah Kediri sekarang seperti yang dapat disimpulkan dari tempat-tempat penemuan prasasti, yang semuanya berupa prasasti batu, yang sebagian besar ada di daerah Kediri. Keterangan tentang sebab-sebab penduduk Desa Padlegan itu mendapat anugerah raja menunjukkan bahwa pada waktu itu belum tercapai stabilitas kekuasaan raja Daha. Sayang tidak ada keterangan lebih lanjut tentang peperangan yang dimaksud di dalam prasasti itu.

Ada enam prasasti raja Bameswara yang ditemukan, tetapi sayang baru dua yang telah diterbitkan, yaitu prasasti Padlegan yang telah disebutkan dan prasasti Panumbangan (I) tahun 1042 Saka (2 Agustus 1120 M).[21] Prasasti ini berisi keterangan tentang penduduk daerah Panumbangan (sekarang bernama Plumbangan) dengan lima desa yang masuk dalam wilayahnya, yang menghadap raja dan memberitahukan bahwa mereka pernah diberi anugerah prasasti di atas daun lontar (ripta) yang menetapkan daerahnya menjadi *sima* swatantra oleh raja yang dicandikan di Gajapada. Mereka itu mohon agar prasasti tersebut dipindahkan ke atas batu supaya langgeng anugerah raja almarhum kepada mereka itu. Oleh raja Bameswara permohonan itu dikabulkan, dan raja memberi tambahan anugerah berupa hak-hak istimewa kepada mereka, terutama para *kabayan*[22] dari lima desa yang masuk wilayah Panumbangan itu, yaitu *kabayan* dari Desa Palampitan, Kamburan, Padagangan, Byetan, dan *kabayan* dari daerah sebelah selatan pasar (Panumbangan?) yang bernama Anurida. Bahkan *kabayan* dari daerah di sebelah selatan pasar itu mendapat hak istimewa untuk menjabat jabatan *kabayan* turun-temurun tanpa boleh diselingi oleh orang lain. Di samping itu, ia menerima hak-hak istimewa yang lain lagi dan anugerah *sima* di Lilawan (?) yang meliputi tanah-tanah sawah pagagan, sungai, rawa-rawa, lembah, dan bukitnya semua.[23]

---

[21] OJO, LXIX

[22] Istilah *kabayan* di sini jelas menunjukkan nama suatu jabatan sipil. Akan tetapi, apa tugas *kabayan* di dalam birokrasi belumlah jelas

[23] Prasasti-prasasti lain yang belum diterbitkan, yaitu prasasti Pagiliran yang ditemukan di Desa Jajar, Kabupaten Blitar, dan berangka tahun 1042 Saka (23 Juli 1120 M), prasasti Geneng tahun 1050 Saka (30 Juli 1128 M), prasasti dari Candi Tuban tahun 1051 Saka (17 Mei 1129 M), dan prasasti dari Tangkilan tahun 1052 Saka (14 Mei 1130 M). Tiga prasasti yang terakhir itu angka tahun dan unsur-unsur penanggalannya telah dibaca oleh L-C. Damais (L-C. Damais, EEI, IV, hlm. 69–70; 143–144)

Di dalam prasasti itu disebut raja yang dicandikan di Gajapada. Tokoh ini dijumpai pula di dalam prasasti Hantang tahun 1057 Saka (7 September 1135 M) yang dikeluarkan oleh raja Jayabhaya. Akan tetapi, siapa yang dimaksudkan dengan raja yang dicandikan di Gajapada itu hingga kini belum jelas. Yang pasti hanyalah bahwa ia pasti seorang raja di Daha.

Setelah pemerintahan raja Bameswara muncul raja Jayabhaya dengan gelar selengkapnya Sri Maharaja Sri Warmeswara Madhusudana-wataranindita Suhrtsingha Parakrama Digjayottunggadewanama. Hanya tiga prasasti yang diketahui dari raja ini, yaitu prasasti Hantang tahun 1057 Saka (7 September 1135 M),[24] prasasti Talan tahun 1058 Saka (24 Agustus 1136 M),[25] dan prasasti dari Desa Jepun tahun 1066 Saka (7 Juli 1144 M).[26]

Prasasti Hantang mempunyai keistimewaan, yaitu ada tulisan dengan huruf kuadrat yang besar melintang di tengah cap kerajaan berupa Narasingha yang berbunyi pangjalu jayati (= pangjalu menang). Prasasti ini memperingati pemberian anugerah raja Jayabhaya kepada Desa Hantang dengan 12 desa yang masuk dalam wilayahnya berupa prasasti batu yang memuat pemberian hak-hak istimewa kepada penduduk Desa Hantang sewilayahnya. Adapun sebabnya ialah pada suatu ketika penduduk Desa Hantang dengan 12 desa yang masuk dalam wilayahnya datang menghadap raja dengan perantaraan guru raja yaitu Mpungku Naiyayikadarsana dengan permohonan agar prasasti yang ada pada mereka sebagai anugerah raja yang di-dharmma-kan di Gajapada dan di Nagapuspa yang ditulis di atas daun lontar dipindahkan ke atas batu, dan ditambahi dengan anugerah raja Jayabhaya sendiri.

Permohonan itu dikabulkan raja mengingat bahwa penduduk Hantang telah memperlihatkan kebaktiannya yang sungguh-sungguh terhadap raja dengan bukti bahwa mereka telah menyerahkan *cañcu tan pamusuh* dan *cañcu ragadaha* dan bahwa pada waktu ada usaha memisahkan diri (= perang perebutan takhta?) mereka tetap setia memihak kepada raja Jayabhaya.[27] Selanjutnya prasasti itu berisi perincian anugerah yang pernah diterima

[24] OJO, LXVIII. Prasasti ini telah dibahas dalam suatu skripsi doktoral oleh D.S. Setyawardhani, dengan memberikan transkripsi yang lebih tepat dari transkripsi Brandes (FSUI, 1980)

[25] OJO, LXX. Transkripsi yang lengkap telah diberikan oleh Machi Suhadi dalam skripsi doktoralnya, disertai pembahasan yang luas (FSUI, 1971)

[26] Prasasti ini belum diterbitkan. Transkripsi beberapa baris permulaannya diberikan oleh L-C. Damais (EEI, IV, hlm. 145)

[27] *... ikang wargga dalem thani ri hantang pwa tka ri wisaya 13) nya rwa wlas thani satata sustubhakti mamrih ri pageha sri maharaja ri maniratnasinghasana makawyakti ri pamwatakenya ri cañcu tan pamusuh (14) mwang cañcu ragadaha. muwah ri kala ni panuwal kewalapageh ya paksa jayabhaya.* Yang masih merupakan teka-teki di sini ialah kata *cañcu*

penduduk Desa Hantang sewilayahnya dari yang telah dicandikan di Gajapada dan di Nagapuspa, dan anugerah tambahan dari raja Jayabhaya, semuanya berupa macam-macam hak istimewa.

Yang menarik perhatian di sini ialah keterangan tentang adanya panuwal, yang di sini ditafsirkan sebagai perang perebutan takhta. Mungkin ini ada hubungannya dengan tulisan pangjalu jayati pada sisi depan prasasti ini, dan kenyataan bahwa pada masa pemerintahan Jayabhaya ini telah digubah kakawin Bharatayuddha pada tahun 1079 Saka (September 1157 M) oleh Pu Sedah dan Pu Panuluh. Sebagaimana telah dimaklumi cerita Bharatayuddha itu mengisahkan perang perebutan takhta kerajaan Hastinapura antara Kaurawa dan Pandawa. Sebelum peristiwa itu kerajaan Hastinapura telah dibagi dua; para Kaurawa sebagai pewaris takhta dari garis keturunan yang tua memperoleh pusat kerajaan Hastina yang lama, sedangkan para Pandawa dari garis keturunan yang muda memperoleh daerah yang semula berupa hutan (= janggala), dan membuat ibu kota baru bernama Indraprastha. Dalam peperangan besar itu para Pandawa memperoleh kemenangan, dan bertakhta turun-temurun di Hastinapura.

Menarik perhatian dalam kitab Bharatayuddha itu ialah keterangan bahwa semua raja, sampai kepada Sang Hemabhupati, tunduk kepada raja Jayabhaya.[28] lstilah Sang Hemabhupati itu telah menimbulkan pelbagai macam tafsiran. Ada yang menafsirkannya sebagai raja dari [pulau] Emas (= Sumatra); dengan perkataan lain ada dugaan bahwa Jayabhaya pernah menaklukkan Sriwijaya.[29] Akan tetapi, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata itu harus ditafsirkan sebagai Ratu Emas, atau kakak raja.[30] Dengan perkataan lain, raja Jayabhaya telah merebut takhta kerajaan dari putra mahkota. Keterangan ini memang sesuai dengan keterangan di dalam prasasti yang mengatakan bahwa pada waktu terjadi panuwal rakyat Desa Hantang tetap setia berpihak kepada raja Jayabhaya.

Akan tetapi, mengapa pada bagian depan prasasti dituliskan dengan huruf besar-besar kalimat pangjalu jayati? Kalau peperangan itu hanya perang perebutan takhta di Daha sendiri, sedangkan ibu kota Daha telah berpindah ke daerah Kadiri (bhumi Kadiri), tentulah kalimat tersebut tidak perlu. Ataukah Jayabhaya, sebagai pewaris takhta yang kedua, mendapatkan daerah Pangjalu di antara Kali Brantas dan Kali Lamong sebagai daerah lungguh, lalu merebut takhta kerajaan dari kakaknya, yaitu putra mahkota? Dengan keterangan ini

---

[28] Bh. Y., 1, 5

[29] HJG[2]

[30] R.M. Sutjipto Wirjosuparto, *Kakawin Bharatayuddha*, 1968, hlm. 49–53. Lihat pula disertasi R.M. Sutjipto Wirjosuparto, *Kakawin Ghatotkacaçraya*, 1960, hlm. 339–341

kalimat pangjalu jayati, keterangan di dalam prasasti tentang panuwal, dan digubahnya *Kakawin Bharatayuddha*, dapat dijelaskan secara memuaskan.

Prasasti Talan memuat keterangan bahwa penduduk Desa Talan yang termasuk wilayah Panumbangan (*thani watek panumbangan*) menghadap raja dan memperlihatkan prasasti di atas daun lontar dengan cap kerajaan *garudamukha* yang telah mereka terima dari Bhatara Guru pada tahun 961 Saka (27 Februari 1040 M). Prasasti itu menetapkan Desa Talan sewilayahnya sebagai *sima* yang bebas dari kewajiban membayar pelbagai macam pajak. Mereka itu memohon agar prasasti itu dipindahkan ke atas batu, dan ditambahi anugerah raja Jayabhaya sendiri. Karena penduduk Desa Talan itu telah memperlihatkan kesetiaannya yang amat sangat terhadap raja, permohonan itu dikabulkan, dan dipindahkanlah prasasti itu ke atas batu dengan cap kerajaan Narasingha, dan raja Jayabhaya menambah anugerah berupa pelbagai macam hak istimewa. Sayang tidak dijelaskan di dalam prasasti itu apa jasa-jasa rakyat Desa Talan itu terhadap Bhatara Guru, yaitu Airlangga, dan terhadap raja Jayabhaya.

Raja yang berikut adalah Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarwweswara Janarddhanawatara Wijayagrajasama Singhanadaniwaryyawiryya Parakrama Digjayotunggadewanama. Dua prasastinya yaitu prasasti Padlegan II tahun 1081 Saka (23 September 1159 M) dan prasasti Kahyunan tahun 1082 Saka (23 Februari 1161 M), hingga kini belum diterbitkan. Cap kerajaannya dengan demikian juga tidak diketahui namanya, tetapi di atas prasasti kelihatan seperti sesuatu yang bersayap. Berbeda dengan Jayabhaya, yang mungkin memerintah sampai lebih dari 20 tahun, Sarwweswara rupa-rupanya hanya memerintah sekitar 10 tahun, karena pada tahun 1169 M telah muncul nama raja yang lain, yaitu Sri Maharaja Rakai Hino Sri Aryyeswara Madhusudanawatararijaya Mukha ... Sakalabhuwana [tustikarana] niwaryya Parakramotunggadewanama. Hanya dua prasasti yang kita kenal dari raja ini, yaitu prasasti dari Desa Meleri, Kabupaten Blitar, tahun 1091 Saka (3 September 1169 M), dan prasasti Angin tahun 1093 Saka (13 Maret 1171 M), tetapi sayang hingga kini keduanya belum diterbitkan. Cap kerajaannya berupa lukisan Ganesa.

Raja yang kemudian muncul dalam prasasti ialah Sri Maharaja Sri Kroñcaryyadipa Handabhuwanamalaka Parakramanindita Digjayotungga-dewanama Sri Gandra. Satu-satunya prasasti dari raja ini adalah prasasti Jaring tahun 1103 Saka (19 November 1181 M).[31] Prasasti ini memuat keterangan tentang penduduk Desa Jaring sewilayahnya tua dan muda yang telah menghadap raja dengan perantaraan *senapati sarwwajala* (= panglima angkatan laut) Sang Apañji A[...] taken, memberitahukan bahwa mereka telah

[31] OJO, LXXI

memperoleh anugerah dari raja yang terdahulu (sang atita prabhu), tetapi ternyata sampai saat itu belum dapat mereka nikmati sepenuhnya. Karena itu mereka memohon agar anugerah raja yang terdahulu itu dapat hendaknya mereka terima sepenuhnya. Oleh karena mereka telah memperlihatkan kesetiaannya terhadap raja, antara lain mempertaruhkan jiwa raganya memerangi musuh raja, permohonan itu dikabulkan. Diperintahkanlah oleh raja untuk dibuat prasasti di atas batu yang memuat ketentuan-ketentuan pembebasan Desa Jaring sewilayahnya dari kewajiban membayar pelbagai macam pajak seperti yang diamanatkan oleh raja terdahulu, kemudian ditambah dengan anugerah dari raja Kroñcaryyadipa sendiri.

Sayang sekali tidak ada keterangan mengenai siapa yang dimaksud dengan raja yang terdahulu itu. Mungkin juga raja Aryyeswara, yang karena sesuatu hal tidak sempat melaksanakan sepenuhnya anugerah yang diberikannya kepada penduduk Desa Jaring. Yang menarik perhatian di sini ialah disebutkannya nama Sri Krtajaya, seolah-olah inilah nama raja yang memberikan anugerah kepada penduduk Desa Jaring, sebelum mereka itu menghadap raja Kroñcaryyadipa. Anehnya nama ini dipakai oleh raja yang memerintah sesudah raja Kameswara, seperti yang akan tampak pada uraian selanjutnya.

Yang menarik perhatian pula dari prasasti ini ialah disebutkannya *senapati sarwwajala*, yaitu panglima angkatan laut. Inilah pertama kali kita jumpai bukti di dalam prasasti tentang adanya angkatan laut kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Tidaklah berarti bahwa sebelumnya tidak ada angkatan laut. Kita ingat akan berita Cina yang mengatakan bahwa Sriwijaya diserbu oleh raja She-p'o, yaitu Dharmmawangsa Teguh. Tentulah Dharmmawangsa Teguh mempunyai angkatan laut yang kuat. Jangan lupa pula akan pelabuhan Hujung Galuh, yang menandakan bahwa Kali Brantas dapat dilayari oleh perahu-perahu besar dari pulau-pulau yang lain, dan mungkin juga dari daratan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Yang terakhir itu dibuktikan dengan disebutkannya para *wargga kilalan* yang terdiri atas orang-orang Campa, Khmer, Birma, Sri Lanka, dan dari pelbagai daerah di India, seperti Karnnataka, Pandikira (Pondichery), Kalingga, dan bahkan mungkin dari India Utara (Aryya).

Kemudian kita jumpai nama raja Kameswara dengan gelar lengkapnya Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwaryyawiryya Parakrama Digjayottunggadewanama. Hanya dua prasasti yang memuat nama raja ini, yaitu prasasti dari Desa Semanding, tahun 1104 Saka (17 Juni 1182 M) dan

prasasti Ceker tahun 1107 Saka (11 September 1185 M).[32] Hanya prasasti Ceker yang sudah diterbitkan, itu pun tidak dapat dibaca seluruhnya karena keadaan batu prasastinya yang telah aus.

Sepanjang maksudnya dapat ditangkap, prasasti ini berisi keterangan bahwa rakyat Desa Ceker sewilayahnya telah menghadap raja, dan memberi tahukan bahwa mereka telah memperoleh anugerah dari raja yang memerintah sebelumnya, dan mohon kepada raja agar anugerah itu dikukuhkan dengan prasasti di atas batu. Anugerah itu berupa pemberian hak-hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban membayar pelbagai macam pajak.

Sayang sekali justru bagian yang menyebutkan apa jasa-jasa penduduk Desa Ceker itu terhadap raja tidak dapat dibaca seluruhnya. Yang jelas hanyalah bahwa mereka itu telah membuat raja merasa amat berkenan di hati, karena telah dapat kembali ke *sima*nya di *bhumi-Kadiri*. Namun, apa yang sebenarnya telah terjadi tidaklah jelas.

Raja Daha yang terakhir ialah Srengga atau Krtajaya, dengan gelar lengkapnya Sri Maharaja *Sri Sarwweswara Triwikramawataranindita* Srenggalañchana Digjayotunggadewanama. Ada enam prasasti dari raja ini ditemukan. Yang tertua ialah prasasti dari Desa Kemulan (Kabupaten Trenggalek) tahun 1116 Saka (31 Agustus 1194 M).[33] Akan tetapi, sebelumnya ada prasasti yang memuat nama Krtajaya, yaitu prasasti dari Desa Sapu Angin, tahun 1112 Saka (1190/1191 M).[34] Menurut pendapat Damais pada waktu prasasti Sapu Angin itu dikeluarkan Krtajaya belum naik takhta, mungkin masih sebagai putra mahkota.

Prasasti terakhir raja Srengga yang diketahui adalah prasasti Lawadan tahun 1127 Saka (18 November 1205 M).[35] Para sarjana berpendapat bahwa Srengga atau Krtajaya inilah raja Daha terakhir yang telah dikalahkan oleh Ken Angrok pada tahun 1222 M. Kalau benar pendapat ini, selama 17 tahun raja ini tidak mengeluarkan prasasti, atau kalaupun ada juga prasasti-prasasti raja ini yang dikeluarkan antara tahun 1205 dan 1222 M, prasasti ini belum ditemukan. Kalau benar pendapat itu, raja ini telah memerintah hampir 30 tahun lamanya, berbeda dengan raja-raja sebelumnya, kecuali raja Bameswara, yang rata-rata

---

[32] OJO, LXXII

[33] OJO, LXXIII

[34] K.C. Crucq, "Epigraphische Aantekeningen 1", OV, 1929, hlm. 271–272. Tidak ada unsur-unsur penanggalan yang tertera pada prasasti kecuali angka tahunnya sehingga tidak mungkin menetapkan hari bulannya. Secara teoretis tahun 1112 Saka itu berlangsung dari tanggal 8 Maret 1190 sampai dengan tanggal 25 Februari 1191 M

[35] L-C. Damais, "Epigrafische Aantekeningen, III, "Çrngga-Krtajaya", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 10–15

memerintah hanya 10 tahun. Akan tetapi, kenyataan bahwa selama 17 tahun tidak ada prasasti dari raja Srengga ini memang patut dipertanyakan.

Sayang bahwa di antara enam prasasti yang ditemukan itu tidak satu pun yang dapat dibaca seluruhnya karena batunya telah usang. Hanya prasasti dari Desa Kemulan itu yang agak lumayan keadaannya. Prasasti ini memuat keterangan bahwa *samya haji* (raja bawahan?) *Katandan Sakapat* berdatang sembah ke hadapan raja dengan perantaraan Pangalasan bernama Geng Adeg, memberitahukan bahwa mereka menyimpan prasasti di atas daun lontar yang telah mereka terima dari raja yang dicandikan di Jawa, yaitu Haji Tumandah (?) dan dari Sri Rajakula (?). Mereka itu memohon agar prasasti mereka itu dipindahkan ke atas batu dengan cap kerajaan Krtajaya. Permohonan itu dikabulkan karena para *samya haji Katandan Sakapat* itu memperlihatkan kesetiaan mereka terhadap raja sebagaimana layaknya sikap hamba raja. Mereka itu telah berhasil mengembalikan raja ke atas singgasana di bhumi Kadiri, setelah sebelumnya terpaksa meninggalkan istananya di Katang Katang karena ada serangan musuh dari sebelah timur.[36] Ditulislah prasasti di atas batu yang memuat perincian anugerah Sri Tumandah dan Sri Rajakula berupa hak-hak istimewa dan pembebasan dari pelbagai macam pajak; dan ditambah lagi dengan anugerah raja Srengga sendiri berupa pemberian hak-hak istimewa.

Prasasti yang juga amat penting ialah prasasti yang sampai kini masih ada di tempat aslinya, yaitu di halaman percandian Panataran di Blitar. Prasasti Palah ini berangka tahun 1119 Saka (23 atau 27 Juni 1197 M).[37] Sayang sekali batunya sangat usang sehingga tidak dapat diberikan pembacaan yang lengkap. Apa yang perlu dicatat di sini ialah keterangan bahwa raja mengadakan pemujaan untuk Bhatara di Palah setiap hari. Rupa-rupanya Candi Panataran itu dahulu bernama Palah, atau terletak di Desa Palah. Nama Panataran baru muncul kemudian, mungkin setelah candi itu dijadikan candi kerajaan pada zaman wangsa Rajasa. Bahwa pada waktu pemerintahan raja

---

[36] Karena banyak hiaat, sebenarnya isi prasasti ini kurang jelas. Apa yang dikemukakan di atas itu hanya perkiraan berdasarkan konteks keseluruhan isi prasasti. Demikian pula tidak jelas siapa yang dimaksudkan dengan Sri Tumandah itu, yang rupa-rupanya nama dari "Yang dicandikan di Jawa", dan disebut sebagai raja yang terdahulu. Demikian pula halnya dengan Sri Rajakula, yang secara harfiah berarti keluarga raja. Kita juga belum dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan *samya haji Katandan Sakapat*. Istilah *samya haji* biasa digunakan untuk seorang penguasa daerah, sama dengan istilah rakarayan i dalam zaman wangsa Sailendra, atau *bhatara i* ... dalam zaman wangsa Rajasa. Akan tetapi, apa arti *katandan sakapat* kurang jelas. Mungkinkah *katandan* berasal dari *tanda*, yaitu sejenis jabatan? (dalam istilah *rakryan ring pakira-kiran*). Dan *sakapat* dapat diterjemahkan dengan keempat-empatnya? Bahwa para tanda itu disebut *samya haji* mungkin karena sebagai pejabat tinggi kerajaan mereka itu mendapatkan daerah lungguh sehingga merupakan "penguasa daerah" juga

[37] OJO, LXXIV

Srengga candi itu sudah merupakan bangunan suci yang amat penting dapat dilihat dari prasasti Palah itu, yang pada bagian permulaan menyebutkan beberapa pejabat keagamaan dari pelbagai tempat suci – yang sayang sekali tidak dapat terbaca seluruhnya[38] – yang mengiringi raja menurunkan perintahnya. Struktur prasasti semacam itu memang tidak lazim. Di bagian belakang prasasti ada kalimat yang hanya terbaca sebagian, yang mungkin sekali menyatakan bahwa para pejabat keagamaan itu menjadi "pariwara" raja pada waktu mengadakan pemujaan terhadap Bhatara di Palah itu.

Dua prasasti yang lain, sekalipun sudah diterbitkan, juga tidak banyak menambah keterangan tentang masa pemerintahan raja Srengga/Krtajaya ini, karena keadaan prasastinya yang sudah usang, sehingga tidak dapat dibaca dengan memuaskan. Kedua prasasti itu ialah prasasti Biri tahun 1 124 Saka (29 Agustus 1202 M)[39] dan prasasti Lawadan tahun 1127 Saka (18 November 1205 M).[40] Yang terungkap hanyalah bahwa penduduk Desa Biri dan penduduk Desa Lawadan sewilayahnya telah menerima anugerah raja, berupa pembebasan dari pelbagai pungutan pajak dan penerimaan pelbagai hak istimewa. Ada dua prasasti lagi yang belum diterbitkan, yaitu prasasti Galunggung tahun 1122 Saka (20 April 1200 M) dan prasasti dari Desa Sumberringin Kidul tahun 1126 Saka (4 April 1204 M). Ada lagi satu prasasti, tetapi bukan prasasti raja, yaitu batu bertulis dari candi Pertapan, di puncak gunung Pegat dekat Blitar. Prasasti ini berangka tahun 1120 Saka (17 Oktober 1198 M),[41] tetapi kurang memuaskan juga pembacaannya karena telah aus. Apa yang tertangkap dari isinya ialah bahwa Kaki di Subhasita memberitahukan kepada Kabuyutan di Makudutan di Manghuri selanjutnya ikut ke Sang Hyang Kabuyutan di Subhasita sampai akhir zaman.

Yang menimbulkan permasalahan ialah munculnya raja Sri Jayawarsa Digjaya Sastraprabhu di dalam prasasti dari Desa Sirahketing, Kabupaten Ponorogo, yang berangka tahun 1126 Saka (8 November 1204 M).[42] Sebuah prasasti yang lain dari raja ini ditemukan di Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Ponorogo, tidak jauh dari Desa Sirahketing. Prasasti ini

---

[38] Antara lain dapat dibaca pada prasasti itu: (3)... *i rika diwaçanyajña paduka ... (4), swara tri wikramawataranindita srnggalañcana digjayottunggadewanama maka ... (5)... gra sang k-ki sira danghyang pa – ka muwah sira ... mpungku sama ... mpungkwi wuka ... (6) swara mpungkwilokeçwara mpu maheçwara si ka ta ... mpungkwi ... mpa ... na ... (7) umingsor i tanda rakryan ri pakirakiran makabehan* dan seterusnya

[39] OJO, LXXVI

[40] OJO, LXXVII

[41] OJO, LXXV

[42] OJO, LXVI. Transkripsi yang lebih lengkap disertai pembahasan yang luas telah diberikan oleh W.F. Stutterheim (TBG, LXXX, 1940, hlm. 345–366)

berangka tahun 1182 Saka (1180 M).[43] Seperti telah disebutkan, raja Jayawarsa atau Jayaprabhu ini menyebut dirinya cucu atau keturunan dari anak Sri Isana Dharmmawangsa Tguh Anantawikramottunggadewa. Mengingat angka tahun dan tempat penemuan kedua prasasti itu dapatlah disimpulkan di sini bahwa Jayawarsa bukan raja di Daha, tetapi seorang anggota keluarga raja Daha yang mendapatkan wilayah Ponorogo sekarang (Wengker?) sebagai daerah lungguh, dan pada suatu ketika merasa dirinya cukup kuat untuk melepas dirinya dari kekuasaan kemaharajaan di Daha.

Prasasti dari Sirahketing itu berisi keterangan tentang anugerah raja Jayawarsa kepada seorang atitih (?) yang bernama Marjaya berupa pemberian hak-hak istimewa, karena Marjaya itu telah memperlihatkan kebaktiannya kepada raja. Di antara hak-hak istimewa itu terdapat hak untuk menggunakan dampar pembagian kerajaan (?). Apa yang dimaksudkan dengan dampa blah karajyan itu tidaklah jelas; tetapi di sini yang menarik perhatian ialah istilah blah karajyan itu, yang mau tidak mau mengingatkan kita kepada peristiwa pembagian kerajaan oleh raja Airlangga. Mungkinkah munculnya Jayawarsa itu berkaitan dengan masalah hak atas kerajaan yang diwariskan oleh Airlangga dan pertentangan antara keturunan Dharmawangsa Teguh secara langsung dengan keturunan Airlangga? Dalam hal ini seperti yang telah dikemukakan di atas, Jayawarsa mengaku dirinya keturunan Teguh secara langsung, sedang raja-raja di Daha ialah keturunan Airlangga, misalnya saja Jayabhaya, yang mengukuhkan kembali anugerah raja Airlangga kepada penduduk Desa Talan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa prasasti dari Sirahketing itu hampir bersamaan dengan prasasti Lawadan, yaitu prasasti yang hingga kini kita kenal sebagai prasasti terakhir atas nama raja Srengga/Krtajaya. Mungkinkah sejak tahun 1204 M itu lalu timbul "persaingan" kekuasaan antara Daha dengan daerah kekuasaan Jayawarsa, yang memperlemah posisi Daha? Perlu pula di sini dikemukakan bahwa prasasti dari Sirahketing itu mulai dengan puji-pujian kepada raja Jayawarsa sebagai penjelmaan dewa Wisnu, disembah di seluruh dunia bagaikan matahari dan bulan, dan bagaikan air amerta bagi seluruh rakyat, dan bahwa prasasti itu dibuat untuk memperingati masa pemerintahan raja yang telah berlangsung 1.000 bulan.[44] Puji-pujian semacam itu tentulah tidak pada tempatnya bagi seorang yang hanya berkedudukan sebagai *samya haji*.

---

[43] Prasasti ini telah dibaca sebagian oleh Boechari

[44] *Manggala* itu berbunyi sebagai berikut:
// o // om swastha dirghayurastu
// o // sang hyang wisnu siraçarira sira ring bhuwana
subhaga wasta ring praja swastha çri jayawarsa
digjaya çastra prabhu saphala sinembahing sa
rat saksat bhaskara candratirtha sira tamrta

Keterangan tentang keadaan Pulau Jawa pada masa ini kita dapati pula di dalam berita Cina. Chau Ju-Kua mengatakan tentang Su-ki-tan, yang merupakan bagian dari She-p'o, mempunyai daerah-daerah takluk, yaitu Pai-hua-yuan, Ma-tung, Ta-pan, Hi-ning, Jung-ya-lu atau Chung-kia-lu, Tung-ki, Ta-kang, Huangma-chu, Ma-li, Niu-lun, Tan jung-wu-lo, Ti-wu, Ping-ya, I-wu, dan Nu-ku. Oleh G.P. Rouffaer Su-ki-tan dianggap sebagai sebutan untuk Janggala,[45] tetapi B. Schrieke menganggapnya sebagai transkripsi dari Sukadana di Surabaya.[46] Bagaimanapun kedua sarjana itu berkesimpulan bahwa Su-ki-tan ialah sebuah kerajaan yang pusatnya ada di Jawa Timur. Jadi, mungkin yang dimaksudkan ialah kerajaan Kadiri dengan Daha sebagai ibu kotanya. Mungkin nama itu menunjukkan kota pelabuhannya yang terpenting di muara Kali Brantas, yang tentu dikenal pertama-tama oleh para pedagang dari luar.

Dari nama-nama tersebut di atas yang dapat diidentifikasikan dengan agak pasti hanyalah Jung-ya-lu atau Chung-kia-lu yang mungkin sekali merupakan transkripsi dari Hujung Galuh, dan Tanjung-wu-lo, yaitu Tanjungpura di Kalimantan. Identifikasi yang terakhir itu diperkuat dengan keterangan di dalam berita Chau Ju-Kua sendiri yang mengatakan bahwa daerah-daerah itu mulai dari Ta-kang terletak di pulau-pulau, jadi jelas di luar Pulau Jawa. Dengan adanya keterangan itu, mungkin sekali Ma-li ialah Bali, dan Tiwu ialah Timur (Timor), sedang tiga nama yang terakhir itu oleh G.P. Rouffaer ditafsirkan sebagai dua nama saja, yaitu Ping-ya-i dan Wu-nu-ku, yang diidentifikasikannya dengan Banggai dan Maluku. Meskipun tidak semua nama itu dapat diidentifikasikan dengan memuaskan, dapat juga dicatat di sini bahwa nama-nama itu harus dilokasikan di bagian timur kepulauan Indonesia, yang mungkin sekali menunjukkan adanya batas wilayah pengaruh antara kerajaan Sriwijaya di sebelah barat, dan kerajaan Daha di sebelah timur.

---

ri hajeng nikang sarat kabeh astwa /
ninggya sahaçracandra pangadeg nira sini
wi haneng jagat krta //

Di sini yang perlu dipermasalahkan tentulah kalimat menerangkan bahwa raja telah memerintah selama 1.000 bulan itu atau 83 tahun lebih. Dapatkah kalimat ini diterima begitu saja secara harfiah, yang berarti bahwa pada tahun 1204 M. Jayawarsa tentulah sudah berusia sekitar 100 tahun?

[45] G.P. Rouffaer, BKI, 77, 1921, hlm. 135 dan seterusnya

[46] B. Schrieke, TBG, 65, 1925, hlm. 126 ("Prolegomena tot eene Sociologische studie over de volken van Sumatra", hlm. 90–207)

Berita Cina dari zaman dinasti Sung (960–1279 M) menyebutkan adanya utusan raja Shê-p'o pada bulan ke-6 tahun 1109 M ke Cina membawa upeti. Kaisar mengadakan upacara penerimaan yang sama seperti yang diadakan pada waktu kedatangan utusan dari Chiao-Chih. Pada tahun 1129 Kaisar memberi gelar kehormatan kepada raja She-p'o,[47] dan memberikan 2.400 rumah (dalam kenyataannya hanya 1.000) untuk biaya hidupnya. Pada tahun 1132 jumlah itu ditambah dengan 500 rumah, yang dalam kenyataannya hanya 200.[48]

3. Runtuhnya Kerajaan Kadiri

Kerajaan Kadiri/Daha akhirnya runtuh pada tahun 1144 Saka (1222 M). Menurut kitab *Nagarakrtagama*, Sri Ranggah Rajasa yang bertakhta di Kutharaja, ibu kota kerajaan Tumapel di sebelah timur gunung Kawi pada tahun 1144 S (1222 M) menyerang raja Kadiri yaitu raja Sri Krtajaya. Krtajaya kalah, dan melarikan diri ke tempat para ajar di lereng [gunung] yang sunyi. Semua pengikutnya terutama para prajurit yang tertinggal di kerajaan, dapat dihancurkan.[49] Kitab Pararaton memberi versi yang lebih terperinci. Menurut Pararaton raja Kadiri bernama Dangdang Gendis, pada suatu ketika raja minta kepada para bhujangga penganut agama Siwa dan Buddha supaya menyembah kepadanya. Para bhujangga menolak karena sepanjang sejarah tidak ada bhujangga menyembah raja. Raja lalu memperlihatkan kesaktiannya dengan memancangkan tombak di tanah dengan ujungnya di atas, lalu duduk di atas ujung tombak dalam bentuk Bhatara Guru, berlengan empat dan bermata tiga. Para bhujangga tetap menolak menyembah raja, lalu melarikan diri ke Tumapel berlindung pada Ken Angrok. Sejak saat itu Tumapel tidak mengakui kekuasaan Daha.

Tidak lama kemudian para bhujangga penganut agama Siwa dan Buddha merestui Ken Angrok sebagai raja di Tumapel, negaranya bernama Singhasari, dengan gelar penobatannya Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi. Lalu ia menyerang Daha.

---

[47] W.P, Groeneveldt, "Historical notes ...", hlm. 19. Dalam catatan, Groeneveldt mengatakan bahwa gelar itu begitu panjang, dan tidak dapat disalin tanpa pengetahuan mendalam mengenai struktur birokrasi di Cina

[48] Mungkin sekali yang dimaksud ialah penunjukan rumah-rumah untuk utusan yang datang dari Jawa. Ataukah barangkali ini sekadar basa-basi, karena mungkin dalam kenyataan raja Kadiri, sebagaimana halnya para bangsawan dan pejabat kerajaan, mempunyai "daerah lungguh" yang dihitung berdasarkan jumlah kepala keluarga?

[49] *Nag*, XL, hlm. 3–4

Tentara Daha dipimpin adik raja Dangdang Gendis, Mahisa Walungan. Pertempuran terjadi di sebelah utara Ganter; tentara Daha terdesak dan Mahisa Walungan gugur dalam pertempuran, bersama dengan menterinya yang bernama Gubar Baleman. Raja Dangdang Gendis mengundurkan diri dari pertempuran, lalu kembali ke alam dewa-dewa bersama dengan segenap pengikutnya. Demikian pula halnya dengan adik-adik raja tiga orang yang semuanya perempuan ikut kembali ke alam dewa-dewa dan lenyap bersama istananya.[50]

Kitab *Nagarakrtagama* memberikan keterangan bahwa kerajaan Kadiri/ Daha runtuh pada tahun 1222 M. Berakhirlah masa kekuasaan wangsa Isana setelah memerintah selama tiga abad. Dalam kitab *Nagarakrtagama* disebutkan pula bahwa dengan ditaklukkannya Kadiri/Daha oleh Ken Angrok/Rajasa dari Tumapel, maka bersatulah Janggala dan Kadiri sama-sama beraja ke Tumapel. Di sini kita mempunyai fakta sejarah, seorang yang semula berkedudukan sebagai *samya haji* merebut kekuasaan dari maharaja. Kita dapat melihat bagaimana pengarang kitab *Nagarakrtagama* maupun Pararaton mencoba menutupi fakta bahwa raja Krtajaya dari Kadiri/Daha mati terbunuh di dalam pertempuran. Kitab *Nagarakrtagama* melukiskan bahwa raja Krtajaya melarikan diri dan bersembunyi di lereng [gunung] yang sunyi bersama para pertapa, sedang kitab Pararaton mengatakan bahwa raja Dangdang Gendis bersama para pengikutnya, saudara-saudaranya dan bahkan istananya lenyap kembali ke alam kedewaan tiada bekasnya. Inilah yang menurut B. Schrieke dinamakan usaha mempertahankan kontinuitas sejarah. Kitab Pararaton masih memberikan satu aspek lagi dari ciri penulisan sejarah Jawa, yaitu landasan konsep Kaliyuga. Seperti yang telah disebutkan di atas sebelum keruntuhannya raja Dangdang Gendis digambarkan sebagai seorang raja yang mabuk kekuasaan dengan menyuruh para bhujangga menyembah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ia telah kerasukan Dewi Kali; dengan perkataan lain dunia sudah sampai kepada zaman Kaliyuga, yang pasti akan segera disusul dengan kehancuran (pralaya).[51] Dengan penggambaran demikian itu sang pujangga ingin mengatakan bahwa fakta sejarah semestinya tidak boleh terjadi, yaitu pemberontakan seorang raja bawahan yang mengakibatkan kehancuran kerajaan pusat, tetapi tampaknya hal itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan, karena memang sudah saatnya terjadi pralaya. Peristiwa itu akan disusul dengan timbulnya kerajaan baru dengan *rajakula* baru pula, dalam hal ini kerajaan Singhasari/Majapahit dengan penguasanya raja-raja dari wangsa Rajasa (Rajasawangsa).

---

50 Par., hlm. 20

51 B. Schrieke, Ruler and Realm, hlm. 91–92

4. Temuan Arkeologi

Dari sumber prasasti diketahui bahwa kerajaan Kadiri muncul di panggung sejarah pada abad XI–XII M. Kerajaan ini semula merupakan salah satu pecahan kerajaan Airlangga yang dibagi dua menjadi Janggala dan Panjalu. Tampaknya Panjalu lebih maju sesudah beberapa kali berperang dengan Janggala. Ibu kota Panjalu berpindah-pindah akibat peperangan tersebut, dan terakhir terletak di Daha, yang lokasinya diperkirakan berada di wilayah Kediri sekarang.

Berbeda dengan kerajaan Mataram Kuno yang meninggalkan banyak candi dan arca-arcanya, kerajaan Kadiri termasuk yang sedikit mempunyai peninggalan semacam itu. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali peninggalan keagamaan. Ternyata satu per satu muncul temuan arkeologi yang tidak terduga. Rupa-rupanya lahar dari Gunung Kelud telah menutup candi-candi tersebut selama ratusan tahun.

Peninggalan arkeologi dari masa Kadiri tersebut adalah candi Gurah, petirtaan Kepung, dan candi Tondowongso.

Candi Gurah ditemukan secara tidak sengaja oleh penduduk pada tahun 1957, merupakan kompleks percandian bata yang terdiri dari candi induk dan tiga candi perwara di depannya. Percandian ini terpendam sedalam ± 5 m di bawah permukaan tanah sekarang. Struktur candi bata tersebut sudah sangat rusak, tetapi arca-arcanya yang dibuat dari batu masih utuh, yaitu arca Brahma, Surya, Candra, dan Nandi. Berdasarkan jenis-jenis arca tersebut diketahui bahwa percandian Gurah merupakan percandian Siwa, meskipun arca Siwa yang seharusnya ada di candi induk mungkin sudah pecah berkeping-keping.[52] Sesudah ekskavasi pada tahun 1959, candi ini ditutup kembali, arcanya disimpan di Museum Nasional dan Museum Istana.

Petirtaan atau pemandian suci Kepung ditemukan pada tahun 1983. Seperti juga candi Gurah, petirtaan Kepung juga terpendam di bawah timbunan lahan sedalam ±3–6 m. Petirtaan yang dibuat dari bata ini mempunyai batur dengan menara-menara yang dahulu memancarkan air. Air juga keluar dari dinding batur melalui makara batu.[53] Ekskavasi yang telah beberapa kali dilakukan belum berhasil menampakkan seluruh kolam dan batur bermenara, tetapi petirtaan ini terpaksa ditimbun kembali karena lubang ekskavasi yang sangat dalam amat rawan bahaya.

Candi Tondowongso yang berada di kecamatan yang sama dengan candi Gurah baru ditemukan pada awal tahun 2007. Candi bata ini juga terpendam

[52] Soekmono, Bulletin of the Archaeological Institute of the Republik Indonesia, No. 6, 1969

[53] Endang Sri Hardiati cs., Berita Penelitian Arkeologi no. 40, 1990

(a)

(b)

Foto 5.1 (a) Arca Candra dan Brahma, Gurah, Kediri (Sumber: Esh); (b) Arca Candra, Tondowongso Kediri (Sumber: Srs)

tanah sedalam ± 3 meter. Susunan percandian seperti candi Gurah, terdiri dari candi induk dan tiga candi perwara di depannya. Arca-arcanya yang dibuat dari batu juga sebagian sama dengan arca candi Gurah. Arca candi Tondowongso lebih banyak, yaitu sejumlah 14 buah terdiri dari 8 arca dewa, 2 fragmen arca, 2 nandi, sebuah lingga, dan sebuah yoni.

Arca-arca Tondowongso terdiri dari Brahma, Durga, Surya, Candra (2 buah), Nandiswara, Agastya, dan Ardhanari. Seperti juga arca-arca Gurah, arca Tondowongso ini menunjukkan latar belakang keagamaan Siwaisme.

Struktur candi Tondowongso sudah sangat rusak, yang tersisa hanya sebagian kaki candinya.[54]

Meskipun kondisi temuan candi-candi dari masa Kadiri ini sudah rusak, setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai corak keagamaan dan gaya kesenian masa tersebut.

B. Keadaan Masyarakat

1. Struktur Pemerintahan

Masa perkembangan kerajaan Kadiri hanya kira-kira satu abad. Dalam waktu yang relatif singkat ini tampaknya tidak banyak perubahan terjadi, terutama di bidang struktur pemerintahan. Ini terbukti dari prasasti-prasasti masa Kadiri yang masih menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya, misalnya *rakyan mahamantri i hino* sebagai "orang kedua" sesudah raja.

Namun, ada pula keterangan baru, yaitu penyebutan panglima angkatan laut (*senapati sarwwajala*) dalam prasasti Jaring. Meskipun tidak berarti pada masa sebelumnya tidak ada angkatan laut, penyebutan tersebut tentunya mempunyai makna khusus. Barangkali pada masa Kadiri ini peran angkatan laut makin besar tidak saja sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga mengamankan perdagangan inter-insuler maupun internasional.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah adanya aspek demokrasi yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja. Meskipun hal-hal seperti ini juga sudah dikenal pada masa sebelumnya, sebagian besar prasasti Kadiri memuat permohonan rakyat kepada raja agar anugerah yang sudah diterima dari raja sebelumnya dikukuhkan dalam prasasti batu, dan ditambah lagi dengan anugerah dari raja yang sedang memerintah. Permohonan kepada raja ini disampaikan melalui salah satu pejabat. Pada

---

[54] Lisa Ekawati cs., "Laporan Situs Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah", 2007, Balai Arkeologi Yogyakarta (belum terbit)

umumnya permohonan ini dikabulkan oleh raja mengingat rakyat yang memohon tersebut sudah pernah berjasa kepada raja atau menunjukkan kesetiaan terhadap raja.

Hal lain yang juga penting adalah adanya *samya haji* atau raja bawahan/ penguasa daerah dalam struktur kerajaan Kadiri. Meskipun sudah dikenal sejak periode sebelum Kadiri, tampaknya *samya haji* pada masa Kadiri cukup besar perannya dalam pemerintahan pusat kerajaan, seperti yang disebutkan dalam prasasti Bañjaran, *samya haji* di Bañjaran mendorong raja Janggala terusir untuk merebut kembali takhtanya. Kemudian dengan bantuan *samya haji* di Bañjaran dan rakyatnya raja Janggala berhasil memperoleh kembali takhtanya.

2. Agama

Corak keagamaan masa Kadiri dapat disimpulkan dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang ditemukan di wilayah Kediri. Candi Gurah dan Candi Tondowongso menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Siwa, berdasarkan jenis-jenis arcanya. Petirtaan Kepung kemungkinan besar juga bersifat Hindu karena tidak tampak adanya unsur-unsur buddhisme pada bangunan tersebut.

Beberapa prasasti menyebut nama abhiseka raja yang berarti penjelmaan Wisnu (misalnya *Sri Sarwweswara Triwikramawataranindita*). Akan tetapi, hal ini tidak langsung membuktikan bahwa Wisnuisme berkembang pada saat itu. Karena landasan filosofis yang dikenal di Jawa pada masa itu selalu menganggap raja sama dengan dewa Wisnu dalam hal sebagai pelindung rakyat dan dunia/kerajaannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa agama Hindu, khususnya pemujaan kepada Siwa, mendominasi perkembangan agama pada masa Kadiri. Hal ini tercermin dari temuan prasasti, arca-arca, maupun karya-karya sastra Jawa kuno yang berasal dari masa ini.

3. Kesenian

Pembahasan bidang kesenian dari zaman Kadiri dibatasi pada seni arsitektur saja. Dahulu orang selalu mempertanyakan mengapa masa Kadiri tidak menghasilkan candi-candi seperti periode sebelumnya atau sesudahnya. Ternyata kemudian temuan muncul satu demi satu.

Profil candi Gurah yang masih tersisa, mempunyai pelipit sisi genta pada kaki candi perwara dan candi induknya mempunyai makara pada ujung bawah tangga. Ciri-ciri ini menunjukkan gaya seni Jawa Tengah (abad

VIII–X M). Akan tetapi, arca-arcanya yang sangat indah menunjukkan gaya seni Singhasari (abad XIII M). Perbedaan gaya seni ini belum dapat dijelaskan secara memuaskan. Meskipun ada tanda-tanda bahwa candi Gurah pernah dibangun kembali (diperbesar), tampaknya arca-arca tidak berasal dari tahapan kemudian, apalagi arca-arca yang lebih tua tidak pernah ditemukan.[55]

Dari sumuran candi ditemukan bata berinskripsi yang tulisannya dari segi paleografi berasal dari abad XI–XII M. Inskripsi singkat ini dapat dipakai sebagai patokan untuk menentukan pertanggalan candi dan arca Gurah. Soekmono menyebut candi Gurah ini sebagai mata rantai yang berada di antara seni Jawa Tengah dan Jawa Timur.[56]

Seperti Candi Gurah, Candi Kepung dan Tondowongso juga memiliki ciri yang sama, yaitu pelipit sisi genta di candi Kepung dan arca-arca Tondowongso yang mirip arca Gurah. Diperkirakan ketiganya berasal dari masa Kadiri, abad XI–XII M.

Arca Gurah dan Tondowongso sangat indah. Semua masih dalam kondisi yang bagus, kecuali arca Durga Tondowongso yang aus. Arca-arca dari kedua candi ini memang seindah arca-arca Singhasari, tetapi kalau diperhatikan lebih teliti, akan tampak perbedaannya. Arca Kadiri sedikit lebih "sederhana" pada perhiasannya. Kecuali itu, juga tidak memiliki lotus yang keluar dari bonggol. Perbedaan tersebut dapat dijadikan salah satu alasan untuk menempatkan arca Gurah dan Tondowongso pada periode Kadiri.

4. Kesusastraan

Masa Kadiri disebut sebagai zaman keemasan Jawa kuno, karena dari masa ini dihasilkan karya-karya sastra, terutama dalam bentuk kakawin, yang sangat penting dan bermutu tinggi.

Dari masa Kadiri kita kenal beberapa orang pujangga dengan karya sastranya. Mereka itu ialah Pu Sedah dan Pu Panuluh yang bersama-sama menggubah kitab *Bhatarayuddha* dalam masa pemerintahan raja Jayabhaya, Pu Panuluh sendiri menggubah kitab Hariwangsa di dalam masa pemerintahan raja Jayabhaya dan kitab *Ghatotkacasraya* di dalam masa pemerintahan raja Jayakrta. Pu Dharmaja menggubah kitab Smaradahana dalam masa pemerintahan raja Kameswara, Pu Monaguna menggubah kitab *Sumanasantaka* dan Pu Triguna menggubah kitab *Krsnayana*, kedua-duanya dalam masa pemerintahan Sri Warsajaya. Masih ada lagi sebuah kitab yang berdasarkan

[55] Soekmono, Bulletin no. 6, 1969, hlm. 14

[56] Ibid., hlm. 15–16

pertimbangan kebahasaan, gaya dan penggarapan pokok ceritanya–sekalipun kurang meyakinkan–digolongkan ke dalam karya sastra dari zaman Kadiri, yaitu kitab *Bhomantaka*.[57]

Dalam kitab *Sumanasantaka* dijumpai keterangan penting, yang menyangkut tradisi yang berkenaan dengan *pitra yajña* (upacara untuk orang tua). Tradisi tersebut adalah pembuatan arca bagi raja Widarba dan permaisurinya sesudah meninggal, keduanya diarcakan sebagai *ardhanariswara,* arca ini ditempatkan di sebuah candi di halaman keraton.[58] Tradisi semacam ini belum dikenal pada masa Jawa Tengah (abad VIII–X M).

Sayangnya, karya-karya sastra masa Kadiri ini masih banyak yang perlu diteliti lagi karena sebagian belum ditranskripsi dan diterjemahkan.

---

[57] P.J. Zoetmulder, 1983, hlm. 404

[58] Ibid., hlm. 379

Bab VI
Kerajaan-Kerajaan di Bali

A. Sumber

1. Berita-Berita Tertua

Berita tertua dari bangsa asing mungkin berasal dari orang Cina. Di dalam kitab sejarah dinasti T'ang kuno,[1] disebutkan antara lain bahwa Ho-ling[2] terletak di kepulauan di lautan sebelah selatan. Di sebelah timur Ho-ling terletak P'o-li[3], di sebelah barat To-po-teng,[4] di sebelah utara Chên-la (Kamboja) dan di sebelah selatan lautan.[5]

---

1 Buku 197, 2b, 618–908 M

2 G. Schlegel mengatakan bahwa Ho-ling ada di Semenanjung Tanah Melayu (TP, 9, 1898, hlm. 285–286). Menurut G.E. Gerini sesuai dengan Chia Tan, Ho-ling terletak di sebelah timur Fo-shih (Sriwijaya, Sumatra), yaitu Semenanjung Tanah Melayu (Researches, 1909, hlm. 474–475). J.L. Moens juga menempatkan Ho-ling di Semenanjung Tanah Melayu (JMBRAS, VII, 2, hlm. 22); R. Braddel terkesan dengan pernyataan Chia Tan bahwa Ho-ling di sebelah timur Fo-shih dan pelayaran memakan waktu empat atau lima hari. Ini lebih lama sedikit dari pelayaran ke pantai utara Jawa dari Palembang melalui Selat Bangka (JMBRAS, XXIV, 1, 1951, hlm. 16–17), L-C. Damais mengidentifikasikan Ho-ling dengan Walaing atau Waleng di dalam prasasti Jawa kuno (BEFEO, LII, 1, 1964, hlm. 93–141). Selanjutnya masih banyak lagi sarjana yang membicarakan letak Ho-ling, tetapi terlalu panjang untuk disebutkan di sini

3 P. Pelliot mengindentifikasikan P'o-li dengan Bali, kemudian ia menambahkan kemungkinan P'o-li sama dengan Kalimantan ("Deux itineraires", BEFEO, IV, 1904, hlm. 283); G. Schlegel mengatakan bahwa P'o-li adalah Asahan di pantai utara Sumatra. Karena kesalahan terjemahan, menurut pendapatnya Ho-ling ada di sebelah timur P'o-li bukan di sebelah baratnya. Ia menempatkan Ho-ling di Semenanjung Tanah Melayu (TP, 9, 1898, hlm. 276–286). Kemudian W.P. Groeneveldt mengatakan P'o-li ada di pantai utara Sumatra, sedangkan Ho-ling di Jawa (Notes, 1960, 12–15 dan hlm. 84); J.L. Moens berpendapat bahwa P'o-li abad VI sama dengan Palembang, sedangkan yang abad VII di Jawa (Sriwijaya, Yava en Kataha", JMBRAS, VII, 2, 1939, hlm. 36–37); E. Bretschneider meletakkan P'o-li di Kalimantan (1871, hlm. 18): G.E. Gerini mengatakan P'o-li letaknya di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu (1909, hlm. 494); V. Obdeyn meletakkan P'o-li di Pulau Bangka atau di pantai tenggara Sumatra (TAG, 44, 1944, hlm. 50). Hsu Yun-ts'iao mengatakan P'o-li sama dengan Panei di pantai timur-laut Sumatra (Notes on Tan-tan, JMBRAS, XX, 1, 1947, hlm. 55); Dato Sir Roland Braddel mengatakan P'o-li sama dengan Kalimantan (JMBRAS, XXII, 4, 1949, hlm. 1–12)

4 Menurut Wolters yang mengutip pendapat Damais, mungkin T'o-po-teng nama untuk Sumatra, bukan Bali seperti yang dikatakan oleh Groeneveldt (1960, hlm. 12 cat. 3. Lihat L-C. Damais, BEFEO, XLVIII, 2, 1957, hlm. 612. Cf. Oey Soan Nio, 1972, hlm. 2–3

5 W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 12

(a)

(b)

(c)

Foto 6.1 (a) Stupika, Kalibukbuk, Buleleng, Bali; (b) Meterai berelief, Kalibukbuk, Buleleng, Bali (*Sumber*: A.A. Oka); (c) Meterai berinskripsi mantra Buddha, Palembang (*Sumber*: Puslitbang, Arkenas)

Selanjutnya dikatakan bahwa negeri Dva-pa-tan[6] terletak di sebelah selatan Kamboja, jauhnya dua bulan berlayar. Negeri tersebut terletak di sebelah timur Ho-ling dan di sebelah barat Mi-lich'ê,[7] sedangkan di sebelah utara terdapat lautan. Dva-pa-tan ini mungkin sama dengan Bali.

Dva-pa-tan yang terletak di sebelah timur Ho-ling mempunyai adat istiadat yang hampir sama dengan Ho-ling. Setiap bulan tanaman padinya dapat dituai, penduduknya menulis di atas daun *patra* (rontal). Mayatnya diberi perhiasan emas dan ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas kemudian dibakar dengan bau-bauan yang harum.[8]

Di dalam kitab sejarah dinasti T'ang baru[9] dikatakan bahwa Ho-ling disebut juga She-p'o. Letaknya di lautan sebelah selatan. Di sebelah timurnya P'o-li (Bali) dan di sebelah baratnya terletak To-p'o-teng (Sumatra). Di sebelah utara terletak Chên-la (Kamboja), yang jaraknya kira-kira dua bulan berlayar. Selain itu, di dalam kitab *Chu-fa-chih* bagian Suchi-tan, Bali disebut dengan nama Ma-li. Lebih lanjut kitab *Yao-i-chih-lue* menyebut nama P'eng-li yang mungkin sama dengan Pa-li atau Ma-li[10].

Setelah itu, kita tidak memperoleh keterangan apa pun mengenai Bali di dalam kitab-kitab sejarah dinasti Cina maupun berita dari bangsa asing lainnya. Mungkin hal ini disebabkan hubungan dengan Cina pada masa-masa berikutnya kurang intensif, meskipun perdagangan antara Bali dengan pulau-pulau lainnya cukup ramai pada zaman raja Anak Wungsu.

Berita tertua tentang keadaan di Bali yang berasal dari Pulau Bali sendiri berupa bulatan kecil dari tanah liat (cap, tablet) berukuran diameter sekitar 2,5 cm. Cap tanah liat tersebut disimpan di dalam stupika (stupa kecil) dari tanah liat. Cap-cap ini ditulisi mantra-mantra agama Buddha dalam bahasa Sanskerta. Mantra-mantra itu berbunyi:

Ye dharma hetu prabhawa

Hetun-tesan tathagato hyawadat

Tesan-ca yo nirodha

Ewamadi mahasramanah.

---

6 W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 58

7 Pembacaan menurut Oey Soan Nio, dalam *Beberapa catatan tentang Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese Sources by Groeneveldt*, paper untuk Panitia Penyusun Buku Standard Sejarah Nasional Indonesia, 1972, hlm. 13, sedangkan Groeneveldt membaca di dalam *Historical Notes . . .*, 1960, hlm. 58 Mili-ku

8 W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 58

9 Buku 222. 2, 3b

10 Oey Soan Nio, op. cit., hlm. 13. Di dalam kitab *Yao-i-chih-lue* ada penyebutan P'engli yang mungkin sama dengan Pa-li atau Ma-li, yaitu sebutan untuk Bali

Artinya kurang-lebih:

Keadaan tentang sebab musabab itu telah diterangkan oleh Sang Buddha (Tathagata), Sang Pertapa Agung itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya dapat menghilangkan sebab musabab itu.

Mantra tersebut dicapkan pada bulatan (tablet) tanah liat dalam huruf Pre-Nagari, oleh karena itu sering disebut meterai tanah liat atau votive-tablet. Kadang-kadang di dalam satu stupika terdapat lebih dari satu meterai tanah liat. Baik stupika maupun materai tanah liat merupakan sarana dalam melakukan ziarah ke tempat suci agama Buddha.[11]

Di Bali stupika dan meterai tanah liat ditemukan di Tatiapi, Pejeng; pura Pegulingan, Tampaksiring; dan desa Kalibukbuk, Buleleng. Di luar Bali ditemukan di Palembang, candi Borobudur, Semarang, Klaten, Gumuk Klinting (Banyuwangi), Pulau Bawen, dan candi Gentong, Trowulan.[12] Meskipun pada umumnya stupika ditemukan bersama-sama dengan meterai, ada pengecualian, seperti di Pura Pegulingan hanya ditemukan sejumlah meterai tanah liat yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak *peripih*, tanpa stupika tanah liat. Di Borobudur, hanya ditemukan stupika yang berinskripsi mantra singkat, tablet tanah liat tidak distempel dengan mantra, tetapi berelief stupa atau Bodhisattwa. Diperkirakan temuan stupika maupun meterai tersebut berasal dari abad VIII–IX M. Apakah persamaan penemuan stupika dan meterai tanah liat ini menunjukkan ada hubungan antara Bali dengan daerah-daerah tempat penemuan stupika lain, masih perlu penelitian lebih lanjut.

Berita tertua lainnya mengenai nama Bali berasal dari beberapa buah prasasti berbahasa Sanskerta yang terdapat di Pejeng. Prasasti-prasasti batu tadi sudah sangat rusak sehingga tulisannya sukar dibaca dengan jelas. Sebuah di antaranya berangka tahun *wanadrigajasakabde* (875 S) dan menyebut nama *Sri(wali)lipuram.*[13] Jelas yang dimaksud dengan (wali)lipuram yaitu sebuah kerajaan di Pulau Bali. Berlainan dengan mantra-mantra tanah liat prasasti ini ditutup dengan perkataan siwamastu (keselamatan dari dewa Siwa). Di dalam tugu Belanjong (Sanur) yang berangka tahun *sarawahnimùrti* (855 S) juga disebut nama *walidwipa* (Pulau Bali).[14]

---

11 Stupika dan meterai tanah liat selalu ditemukan dalam jumlah banyak, terkumpul di suatu tempat atau wadah. Keadaan ini memperkuat dugaan bahwa benda-benda tersebut sengaja diletakkan di suatu tempat pada waktu seseorang berziarah, mungkin dengan cara dilemparkan

12 Lihat Endang Sri Hardiati, "Candi Borobudur sebagai tempat berziarah", Warisan Budaya Bersama, 2005, hlm. 50

13 R. Goris, Prasasti Bali I (PB, I), hlm. 114–115

14 Ibid., hlm. 64–65

Perkataan wali atau bali dalam bahasa Sanskerta berarti korban yang sama artinya dengan wantan (bantan). Istilah sair wantan dan ser bantan di dalam prasasti Bali berarti pemimpin upacara korban. Kata bantan dalam prasasti Kubu-kubu (827 S) dari masa Balitung diperkirakan mengacu ke Bali. Prasasti ini menyebutkan bahwa bantan dikalahkan oleh penguasa Mataram Kuno (... alah pwa ikang bantan denira ...). Perkataan banten kemudian juga digunakan untuk menyebut nama seorang raja Bali terakhir yang merdeka yaitu Sri Astasura-ratna-bumi-banten.[15]

2. Prasasti-Prasasti Kerajaan *Singhamandawa*

Selain prasasti-prasasti yang berbahasa Sanskerta dan meterai tanah liat berisi mantra-mantra agama Buddha, kita jumpai pula beberapa buah prasasti yang menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti ini memakai unsur-unsur penanggalan dan juga angka tahun, tetapi tidak menyebut nama raja yang mengeluarkan prasasti itu. Jumlah yang ditemukan tujuh buah dan angka tahunnya antara 804 S–836 S. Prasasti ini dinamakan tipe yumu pakatahu karena kalimat permulaannya memakai perkataan yumu pakatahu (ketahuilah oleh kamu sekalian). Selanjutnya disebutkan bahwa perintah (*ajña*) diturunkan di *panglapuan*[16] di *Singhamandawa*.

Selain itu, ada delapan buah prasasti tipe yumu pakatahu yang menyebut nama Sang Ratu Sri Ugrasena dan juga menyebut *panglapuan* di *Singhamandawa*. Prasasti dari raja Ugrasena itu berasal dari 837 S–888 S.[17] Salah satu dari prasasti ini, yaitu prasasti Julah (873 S) menyebut *samohanda senapati di panglapuan, panglapuan* di *Brsabha* dan di *Baranasi*.

Di mana letak *Singhamandawa*, Brsabha, dan *Baranasi*, sampai saat ini belum dapat dijawab secara pasti. Mungkin *Singhamandawa* ini terletak di antara Kintamani (Danau Batur) dan Pantai Sanur (Belanjong), yaitu kira-kira di daerah sekitar Tampaksiring dan Pejeng atau di antara aliran sungai Patanu dan Pakerisan.[18] Beberapa tokoh orang tua di Bali yang banyak

---

15 R. Goris, op. cit., hlm. 44

16 Perkataan *panglapuan* berarti tempat melapor (pelaporan) dan berasal dari kata lapuh (lapu) yang berarti: lapor (R. Goris, PB, II, hlm. 267). Sebelum raja Udayana, *panglapuan* merupakan mahkamah atau semacam Badan Penasihat Pusat. Panglapuan yang terkenal pada waktu itu ada di *Singhamandawa*. Di dalam prasasti badan ini disebut dengan nama *"panglapuan"*, *"Samohanda"*. *"pasamaksa"* dan *"palapknan"*. Cf. R. Goris, Sejarah Bali Kuno, hlm. 13

17 R. Goris, PB, I, no. 101, 102, 104, 105. 106, 107, 108, dan 109

18 Di tepi Sungai Patanu dan Pakerisan terdapat beberapa buah sisa bangunan kuno seperti Goa Gajah (S. Patanu), Gunung Kawi, Goa Garbha dan Tegal Linggah (S. Pakerisan). Selain itu, di tepi Sungai Uos (Tukad Hos) ada sebuah bangunan kuno berupa candi ceruk bernama Jukut Paku dan di tepi Sungai Kungkang ada sebuah bangunan kuno Telaga Waja (lihat

membaca kitab-kitab lontar mengatakan bahwa *Singhamandawa* terletak di Desa Pejeng sekarang. Namun, pendapat itu hanya merupakan perkiraan belaka dan belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penelitian dan penggalian arkeologis (ekskavasi) di daerah sekitar Pejeng dan Bedulu harus ditingkatkan. Perlu ditambahkan di sini bahwa nama *Singhamandawa* mengandung unsur perkataan *singha* (singa) dan *mandawa* (pandawa?).[19] Selanjutnya nama *Brsabha* (wrsabha) berarti lembu jantan dan *Baranasi* (Waranasi) berasal dari nama kota yang terkenal di India. Hal ini dapat dibandingkan dengan nama *mpungkwing Nalnja* dari zaman Anak Wungsu yang berasal dari nama Nalanda. Di Bali sekarang terdapat beberapa nama tempat yang menggunakan unsur nama singa, yaitu Singaraja di pantai utara Bali dan dua buah desa di daerah Kabupaten Gianyar, yaitu Singapadu dan Singakerta.[20]

Prasasti tersebut di atas yang tertua berangka tahun 804 S (882 M). Isinya antara lain perintah (syuruhku) kepada senapati Danda, kumpi Marodaya,[21] dan tiga orang *bhiksu* supaya membangun pertapaan dan pesanggrahan (satra)[22] di daerah perburuan di bukit Cintamani (bangunen partapanan satra di katahan buru ... di bukit cintamani mmal).[23] Batas-batasnya ditetapkan dan mereka dibebaskan dari bermacam-macam pajak. Jika ada salah seorang *bhiksu* meninggal, warisannya diurus dan ditetapkan. Sebagian warisan itu digunakan untuk upacara kematian (*marhantuangña*), sebagian dipersembahkan kepada Hyang Api (paneken di hyang api), sebagian lainnya dipergunakan untuk membeli alat-alat perlengkapan pesanggrahan seperti periuk dan tikar (paneken ditu di satra pyunyanangku, kajadyan pamli pulu, tiker).[24] Ketiga orang *bhiksu* di atas masing-masing bernama Siwakangsita, Siwanirmmala,

---

M.M. Sukarto K. Atmodjo, "The Second Colophon of the Nagarakertagama", BKI, 129, 1973, hlm. 277–286)

19 R. Goris, PB, 11, hlm. 309

20 Di Desa Singakerta pernah digali sebuah palungan (sarkofagus) dari zaman protosejarah. Bagian tonjolan palungan ini diberi warna merah. Lihat M.M. Sukarto K. Atmodjo, "Notes on a protohistoric sarcophagus at Selasih in Bali", di dalam Majalah Arkeologi, 11/4, 1979, hlm. 61–74. Desa Singapadu sekarang terkenal dengan tontonan barong dan juga Desa Batubulan yang terletak di pinggir jalan besar Denpasar–Tampaksiring

21 Kumpi berarti ketua, pemimpin desa, nenek. Lihat PB, II, hlm. 263

22 Satra berarti tempat penginapan (dalam hubungannya dengan bangunan suci), hospitium(lihat PB, 11, hlm. 306). Sebuah desa bernama Satra sekarang terletak di sebelah utara Dausa (Kabupaten Bangli) dan di desa itu ditemukan sebuah prasasti tembaga yang menyebut nama karaman i jiken sattra. Baik nama banjar maupun Desa Satra keduanya masih dikenal di tempat itu

23 Perkataan mmal berarti kebun di daerah pegunungan. Lihat PB, II, hlm. 227. Sekarang orang menyebut mel

24 Berarti kurang lebih "supaya diserahkan kepada pasanggrahan milikku untuk membeli periuk (pulu) dan tikar (tiker)"

dan Siwaprajña. Melihat namanya dapat diduga mereka itu pendeta golongan agama Siwa.[25]

Prasasti selanjutnya berangka tahun 818 S (896 M).[26] Isinya tentang perintah (pemberian izin) kepada nayakan praddhana kumpi Ugra dan *bhiksu* Widyaruwana agar membangun sebuah kuil untuk Hyang Api di Desa Banwa Bharu. Batas-batasnya ditentukan yaitu: ke arah timur dari Minanga (hangga minanga kangin), ke arah lautan (kalod) dari bukit Manghandang (hangga bukit manghandang kalod), ke arah barat dari Sungai Tukad Batang (hangga tukad batang karuh), dan ke arah gunung (kadya) dari laut (hangga tasik kadya).[27] Penduduk Desa Banwa Bharu dibebaskan dari pelbagai macam pajak. Jika ada seorang saudagar (banyaga) mendarat, lalu mati, sebagian harta miliknya (*drbyaña*) disumbangkan kepada kuil Hyang Api tersebut. Kalau perahunya pecah, kayu-kayunya harus digunakan untuk pagar desa (*ana cakcak lañcangña kajadyan papagerangen kuta*). Hal warisan orang desa yang mati diatur oleh pemerintah.

Prasasti lain berangka tahun 833 S (911 M).[28] Isinya antara lain tentang pemberian izin kepada penduduk (anak banwa) Desa Turuñan untuk membangun kuil bagi Bhatara da Tonta. Oleh karena itu, mereka dibebaskan dari beberapa jenis pajak, tetapi mereka tetap dikenakan sumbangan untuk kuil tersebut. Beberapa jenis iuran harus dibayar setiap bulan Caitra (angken cetra)[29] dan pada tanggal sembilan bulan *Magha* (*magha mahanawami*).[30]

Apabila ada utusan raja datang melakukan persembahan dalam bulan Asuji di kuil,[31] mereka harus diberi makan dan lain sebagainya. Selanjutnya juga diatur upacara pemujaan di Guha Mangurug Jalalingga (pujan sang ratu di guha mangurug jalalingga) dan di kuil Sanghyang di Turuñan (pujan

---

[25] Umumnya *bhiksu* adalah pendeta pengemis agama Buddha, tetapi di Bali *bhiksu* rupa-rupanya juga pendeta agama Siwa (Hindu). Hal ini mengingat nama-nama mereka seperti Siwakangsita, Siwanirmmala, dan Siwaprajña. Setidak-tidaknya unsur sinkretisme sudah ada pada waktu itu

[26] R. Goris, PB, I, no. 002 berasal dari Desa Bebetin

[27] Perkataan hangga berarti batas, hingga, kangin berarti timur, kalod: arah laut, karuh: barat, kadya: arah gunung. Di Bali Selatan kadya (kaja) berarti arah utara dan kalod arah selatan. Akan tetapi, di Bali Utara kebalikannya. Perkataan dayan (den) juga berarti arah gunung (utara di Bali Selatan). Nama kota Denpasar berarti: di sebelah utara pasar. Lihat M.M. Sukarto K. Atmodjo "The Charter of Dayankayu", BKI, 128, 1972, hlm. 257–279

[28] R. Goris, PB, I, no. 003 berasal dari Desa Trunyan

[29] Caitra yaitu bulan kesembilan (Kesanga)

[30] *Magha* yaitu bulan ketujuh (Kepitu)

[31] Asuji yaitu bulan ketiga (Ketiga)

sang ratu di sanghyang di turuñan). Soal warisan diatur dan ditetapkan. Juga tentang desa-desa Hasar, Halangguras, Pungsu, dan Pañumbahan pajak-pajaknya diatur oleh pemerintah. Batas-batas Desa Turuñan juga ditetapkan dalam prasasti tersebut.

Prasasti selanjutnya berangka tahun 833 S (911 M).[32] Isi bagian permulaan sama dengan prasasti Turuñan A-I (lempeng 1 b–2a 4). Selanjutnya diatur juga perihal orang Desa Air Rawang yang tinggal di daerah Desa Turuñan di sebelah timur teluk danau (kangin eluk).[33] Yang dimaksud dengan danau di sini yaitu Danau Batur sekarang. Setiap bulan Bhadrawada (bulan kedua) Bhatara da Tonta harus dihormati, dimandikan dengan air danau (*air danu*), diborehi atau dibedaki kuning (*kumamuningin ida*), diberi cincin permata (*maciñciñciñcin mamata*) dan subang permata (*matinget-inget mamata*) oleh sahayan padang dari Desa (*banua*) Air Rawang.[34] Di bagian akhir prasasti ini dimuat sumpah kutukan (sapatha) kepada mereka yang melanggar keputusan tersebut dan akan menjelma sampai tujuh kali (*ping pitu ya mangjanma*)[35].

Selanjutnya masih ada dua prasasti yang sejenis, tetapi tidak berangka tahun. Salah satu dari kedua prasasti tersebut tidak dapat diterjemahkan karena lempengannya sangat rusak. Sebuah lagi berangka tahun 836 S (914 M) hanya terdiri dari satu lempengan.[36] Isinya tentang pemberian izin kepada kuil Ida Hyang di Bukit Tunggal paradyan Indrapura di Desa Air Tabar. Batas-batas daerah dan juga pajaknya ditetapkan oleh pemerintah (*panglapuan* di *singhamandawa*). Demikian pula tentang urusan warisan.

Prasasti lainnya juga berasal dari mahkamah (*panglapuan*) *Singhamandawa*, tetapi hanya tinggal satu lempengan dan tidak berangka tahun.[37] Isinya antara lain memberi izin kepada *bhiksu* Siwarudra, Anantasuksma, dan Prabhawa serta kepada penduduk di Simpatbunut (*anak banua di simpatbunut*) di bawah perintah kepala kehutanan, (*hulu kayu*), supaya mendirikan pertapaan di kuil Hyang Karimama yang dihubungkan dengan kuil Hyang Api (*wangunan partapanan di hyang karimama jngannangan hyangapi*). Batas-batasnya ditetapkan,

---

32 R. Goris, PB, I, no. 004 berasal dari Desa Trunyan

33 Perkataan eluk berarti teluk (Danau Batur) atau belokan. Air Rawang sekarang menjadi nama Desa Abang di sebelah barat Desa Trunyan atau di tepi selatan Danau Batur. Prasasti Air Rawang sekarang tersimpan di Pura Tulukbiyu di Desa Batur (berbatasan dengan Kintamani)

34 Sahayan berarti budak sahaya (terhadap dewa atau Bhatara da Tonta), pelayan atau penyungsung dewa tersebut

35 Lingkaran lahir-mati berulang kali itu disebut samsara (sengsara)

36 R. Goris, PB, I, no. 006 berasal dari Desa Gobleg

37 R. Goris, PB, I, no. 005 berasal dari Bangli (pura Kehen A)

yaitu terletak di sebelah timur jalan Air (*tua simayangña hangga jalan air kangin*), ke arah laut dari Ruang (*hangga ruang kalod*), di sebelah barat Sungai Air Malangit (*hangga tukad air malangit karuh*) dan ke arah gunung dari Tangkup (*hangga tangkup kadya*). Para *bhiksu* yang menjadi anggota desa harus tunduk kepada undang-undang desa tersebut. Beberapa macam pajak kemudian dibebaskan. Urusan warisan ditetapkan. Warisan itu dibedakan menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu: emas perak, budak, ternak, dan sebagainya, dipersembahkan kepada Hyang Api sebagai atithi. Golongan kedua yaitu: sawah, kebun, dan sebagainya dipersembahkan kepada kuil Hyang Tanda. Kalau ada yang mempunyai pembantu (*budak*) utangnya tidak boleh dilipatgandakan (*anada hulundang mahulun kalulandang makalula, tani kalpihan hutangña*).[38]

Selanjutnya dikatakan kalau ada orang dari jauh menyembah kuil tersebut, ia harus membayar iuran atau pajak pintu gerbang (pamuka lawang) sebesar 2 ku emas (*anada anak mañumbah di wanua dijoh pamayarn ya pamuka lawang mas ku 2*).[39] Selanjutnya dikatakan juga bahwa pertapaan kuil Hyang Karimama boleh membuka cabang-cabangnya hingga dua puluh buah banyak (*20 partapanan hinganangña kasiddhan paranakangña*).

Berdasarkan keterangan-keterangan prasasti tersebut tadi kita mengetahui bahwa di Pulau Bali sekitar abad VIII M, telah ada sebuah kerajaan yang pemerintahannya berpusat di *Singhamandawa*. Siapa nama raja yang memerintah tidak diketahui, kecuali beberapa orang pejabat tinggi pemerintahan yang disebut di dalam prasasti seperti *senapati danda, mañuratang ajña, nayakan makarun,*[40] *ser panghurwan,*[41] dan lain-lainnya.

Akan tetapi, beberapa buah prasasti yang berangka tahun 837 S–888 S ada yang menyebut nama raja Ugrasena (sang ratu sri Ugrasena) dan menyebut *panglapuan* di *Singhamandawa*. Prasasti itu juga tergolong tipe Yumu pakatahu. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Sri Ugrasena seorang raja yang pernah berkuasa di Bali dengan pusat pemerintahannya di *Singhamandawa*.

---

38 Kalula berarti budak, pembantu. Lihat PB. II, hlm. 256

39 Bahasa Bali kuno joh berarti jauh. Ku singkatan kupang. 1 suwarna (1 tahil) = 16 ma = 64 kupang. Apabila 1 tahil = 1/16 kati emas, berat masing-masing yaitu: suwarna = 0,038601 kg, masa = 0,002412 kg, kupang = 0,000603 kg. Lihat W.F. Stutterheim, INI, I, 1940, hlm. 17

40 R. Goris menduga makarun dari karun = kon (perintah) atau karun = karon (berkumpul). Lihat PB, II, hlm. 272

41 Ser panghurwan (pemimpin juru ukur). Akar kata huru (ukur). Lihat PB, II, hlm. 249

Prasasti pertama berangka tahun 837 S (915 M).[42] Isinya tentang Desa Sadungan yang ditetapkan berada di bawah pengawasan kepala kehutanan (hulu kayu). Batas-batasnya ditetapkan yaitu: terletak di sebelah timur Sungai Air Sangsang (hangga tukad air sangsang kangin), ke arah lautan dari Padang Kahiruan (hangga padang kahiruan kalod), di sebelah barat Sungai Air Malangit (hangga tukad air malangit karuh), dan ke arah pegunungan dari Wantas Sadungan dan Purunan (hangga wantas sadungan me purunan kadya).[43] Selanjutnya desa mendapat beberapa kebebasan pajak dan urusan warisan ditetapkan.

Prasasti kedua berangka tahun 839 S (917 M) dan juga menyebut Sang Ratu Sri Ugrasena. Dikatakan bahwa raja pergi ke Desa Buwunan (*tua lumaku ka buwunan*)[44] dan memberikan anugerah (*nugrahenda*) kepada pitamaha (guru pendeta) di Buwunan (bernama Ida Bhiksu Dharmmeswara),[45] pitamaha di Songan (Bhiksu Dharmmacchaya), dan pertapaan di Ptung (*partapanan da hulun bukit di ptung*). Prasasti lainnya bertarikh 844 S (922 M).[46] Isinya tentang Desa Julah yang dirusak oleh musuh sehingga banyak penduduk ditawan (*lagi tyawan bunin*). Karena itu raja membebaskan Desa Julah dari beberapa macam pajak. Kemudian batas-batas Desa Julah ditetapkan yaitu: terletak di sebelah barat Air Lutung (*hangga air lutung karuh*), ke arah laut dari Duri Lwarlwar (hangga duri Iwarlwar kalod),[47] di sebelah timur Air Hyang (hangga air hyang kangin) dan ke arah gunung dari pantai (*hanggampuhan kadya*). Menarik perhatian bahwa batas-batas desa perdikan (*sima*) tersebut dimulai dari arah barat (karuh) dan bukannya timur (*kangin*) seperti biasanya. Kecuali itu, Desa Julah diizinkan memperluas kuilnya dengan empat atau lima meru (*mamatampihang punya patpat lalima sumeruña*). Soal warisan ditetapkan oleh pemerintah dan penduduk desa diizinkan menahan perahu dan lain-lainnya yang terdampar (*taban karang*) dan disumbangkan kepada kuil untuk biaya perluasan dan upacara (*wrddhi*).[48]

---

[42] R. Goris, PB, I, no. 101, berasal dari Srokadan

[43] Mungkin wantas berarti batas. Dengan demikian, nama desanya bukan Wantas Sadungan, tetapi hanya Sadungan. Di dalam bahasa Bali kuno me berarti dan

[44] Tua = twa = ento (Bali baru) = itu

[45] Perkataan Ida berarti yang mulia, yang terhormat (honorefic prefix). Cf. da dalam perkataan datu, dalang, dapunta, raka, rabi, ratu, dll

[46] R. Goris, PB, I, no. 104 berasal dari Desa Sembiran, tetapi menyebut nama Julah. Sekarang Desa Julah terletak di tepi pantai utara Bali, di sebelah utara (bawah) Sembiran yang terletak di atas pegunungan. Di sebelah timur Julah terletak Desa Tejakula yang juga terkenal di dalam prasasti

[47] Karena terletak di pantai utara Bali, kalod di sini berarti utara (ke arah lautan)

[48] Perkataan *wrddhi* berarti tumbuh (tetapi yang dimaksud di sini memperluas)

Prasasti lainnya bertarikh 846 S (924 M),[49] isinya tentang pembebasan penduduk Kundungan dan Silihan yang semula memikul beban berat kerja rodi (anak marbuatthaji) di bawah perintah seorang Ser (pemimpin).[50] Karena tugas yang berat itulah desa menjadi rusak. Prasasti lainnya yang berangka tahun 855 S (933 M)[51] berisi tentang Desa Haran yang diizinkan membangun pesanggrahan (satra) dan kuil Hyang Api di Manasa dan Batuan. Satra tersebut untuk bermalam penduduk dan pedagang yang berjalan hilir-mudik berkelompok-kelompok menghubungkan daerah pegunungan dan dataran rendah (*yathaña kadan singgahyan anakatar jalan katba kadahulu*).[52] Batas-batasnya kemudian ditetapkan, yaitu: ke arah lautan dari Pungsu (*hangga pungsu kalod*), di sebelah barat Sungai Air Pnat (*hangga tukad air pnat karuh*), ke arah gunung dari batas Desa Muduhin (*hangga wantas muduhin kadya*), dan di sebelah timur Bukit Taradang (*hangga bukit taradang kangin*).

Prasasti Ugrasena lainnya bertarikh 857 S (935 M).[53] Isinya tentang penduduk Desa Parcanigayan (di antaranya beberapa orang *bhiksu*) yang diizinkan membangun pesanggrahan di kuil Hyang Api. Batas-batas desa kemudian ditetapkan, yaitu: terletak di sebelah barat Sungai Air Raya (*hangga tukad air raya*), ke arah laut dari Wukit Malingkir (*hangga wukit malingkir kalod*),[54] di sebelah timur Air Song (*hangga air song kangin*) dan ke arah gunung dari Luaran (*hangga luaran kadya*). Sama halnya dengan prasasti Julah (844 S), batas Desa Parcanigayan juga dimulai dari arah barat (*karuh*). Para *bhiksu* yang telah beristri diharuskan menyediakan alat-alat pesanggrahan tersebut.

Prasasti selanjutnya berangka tahun 864 S (942 M).[55] Juga tentang Desa Parcanigayan seperti halnya prasasti yang bertarikh 857 S tersebut di atas. Karena hanya merupakan turunan (*copy*), isi dan kalimatnya sangat rusak. Berlainan dengan gelar *sang ratu* di dalam prasasti lainnya, di dalam prasasti ini Ugrasena disebut dengan gelar *paduka haji*.

---

[49] R. Goris, PB, I, no. 105, berasal dari Desa Pengotan

[50] Anak berarti orang, buathaji (buncanghaji) = kerja rodi, gugur gunung (ngayah dalam bahasa Bali baru). Ser atau saih berarti pemimpin, ser nayaka = kepala nayaka. Perkataan ser (saih, seh) sekarang masih tertinggal pada pekaseh, yaitu pemimpin yang berhubungan dengan soal pengairan (subak)

[51] R. Goris, PB, I, no. 106 berasal dari Desa Batunya

[52] Berarti kurang lebih "karena itu (supaya) untuk singgah orang-orang yang berjalan (para pedagang keliling) hilir mudik menghubungkan daerah pegunungan (kadahulu) dan daerah pantai yang rendah (katba). Dalam bahasa Bali baru teben (bawah) dan luan (atas)

[53] R. Goris, PB, I, no. 107 berasal dari Desa Dausa dan disimpan di Pura Bukit Indrakila (A I)

[54] Wukit = bukit, air = yeh = sungai

[55] R. Goris, PB, I, no. 109 berasal Dausa. Pura Bukit Indrakila (BI)

Prasasti tembaga (*tamra prasasti*) terakhir yang menyebut nama Ugrasena berangka tahun 888 S (966 M). Tahun ini agak mencurigakan karena pada tahun 877 S (955 M) yang memerintah di Bali adalah Sang Ratu Sri Aji Tabanendra Warmmadewa bersama-sama dengan permaisurinya Sri Subhadrika Da(r) mmadewi.[56] Prasasti yang bertarikh 888 S berkenaan dengan putusan perkara antara orang yang kena kerja rodi (*marbuathaji*) di daerah perburuan (desa buru) dengan para pegawai pajak. Selanjutnya juga menyebut pembangunan sebuah pertapaan di daerah perburuan. Di antara bermacam-macam pajak yang menarik perhatian yaitu pajak rot.[57]

Demikianlah isi singkat beberapa buah prasasti Bali kuno yang menyebut pusat pemerintahan atau mahkamah (*panglapuan*) di *Singhamandawa*. Dapat diduga bahwa pemerintahan yang berpusat di *Singhamandawa* tersebut sudah maju dan teratur. Hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pemerintahan yang mengenal pelbagai macam jabatan, baik para senapati, pendeta (*bhiksu*), maupun para petugas lainnya. Untuk jabatan juru misalnya dikenal: *juru mangjahit kajang* (pimpinan penjahit pakaian), *juru wadwa* (pimpinan prajurit), *juru pande* (pimpinan para pandai), *juru wanyaga* (pimpinan pedagang), *juru ñuam* (pimpinan golongan pemuda atau kanak-kanak), dan *juru tunggal* (pimpinan tunggal).[58] Kelompok para nayaka misalnya: *nayakan hasba* (pengawas kuda), *nayakan buru* (pemimpin perburuan), *nayakan mas* (pengawas mas), *nayakan pamadahi* (pengawas pemukul genderang), *nayakan candana* (pengawas kayu cendana), dan lain-lainnya. Golongan *undahagi*, misalnya: *undahagi kayu* (tukang kayu), *undagi lañcang* (tukang perahu), *undagi batu* (tukang batu), dan *undagi pangarung* (tukang membuat aungan atau terowongan). Bermacam-macam jenis perahu juga sudah dikenal pada waktu itu, seperti: *parahu, lañcang, jukung, talaka, jong,* dan *bahitra.* Seniman yang dikenal pada waktu itu antara lain : *pamukul* (pemukul gamelan), *pagending* (penyanyi), *pabuñjing* (pemukul *buñjing*), *parbhangsi* (peniup suling), *partapukan* (pemain topeng), dan *parbwayang* (pemain wayang).

Soal pembagian warisan, perpajakan, perdagangan, dan upacara keagamaan sudah diatur oleh pemerintah atau *panglapuan* di *Singhamandawa*. Karena itu sudah sewajarnya apabila dikatakan bahwa pemerintahan pada waktu itu sudah berjalan lancar dan teratur.

---

56 R. Goris, PB, I no. 202

57 R. Goris menduga mungkin rot sama dengan panguwot sekarang di Bali, yaitu uang pengganti kerja rodi memperbaiki bendungan atau tanggul

58 Tunggal berarti satu, tunggal. Namun, arti *juru tunggal* kurang jelas

3. Prasasti-Prasasti Wangsa Warmmadewa

Nama Warmmadewa mulai muncul memerintah di Bali sejak tahun 835 S. Keterangan ini kita peroleh dari tiga buah prasasti batu berbentuk tugu (*pillar*) yang dipahat dengan tulisan melingkar.[59] Nama raja yang disebut di dalam ketiga prasasti itu Sri Kesariwarmmadewa.[60] Prasasti Belanjong (Sanur) menggunakan dua macam bahasa (*bilingual*) dan dua macam huruf. Anehnya, bagian yang menggunakan huruf Nagari menggunakan bahasa Bali kuno dan bagian yang menggunakan huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta. Hal ini menandakan bahwa pemahatnya mahir berbahasa Sanskerta dan Bali kuno. Prasasti Belanjong berangka-tahun *sake 'bde sara wahnimurti* atau 835 S (914 M).[61] Selain itu, tugu Belanjong juga menyebut musuh-musuh raja yang berhasil dikalahkan, yaitu di Gurun dan Suwal (... *di gurun di suwal dahumalahang musuhdho* ...). Mungkin yang dimaksud dengan Gurun yaitu Nusa Penida atau daerah Gerung di Lombok Selatan, sedangkan Suwal masih belum jelas. Akan tetapi, ada yang menyamakan Suwal dengan pantai Desa Ketewel yang terletak beberapa kilometer dari pantai Sanur (tugu Belanjong). Pendapat ini kurang beralasan karena Desa Ketewel dalam zaman raja Marakatapangkaja

---

[59] Prasasti pertama ditemukan di Belanjong (Sanur) dan telah diterbitkan oleh Stutterheim dengan judul "A newly discovered pre-nagari inscription on Bali", Acta Orientalia, XII, 1934, hlm. 126–132. Prasasti kedua berasal dari Desa Penempahan (sebelah utara Tampaksiring). Prasasti ini isinya mirip dengan prasasti Malatgede dan terdiri dari empat baris kalimat. Angka tahunnya rusak, tetapi menyebut raja Sri Kaisari. Baik Stutterheim maupun Damais menyebut nama Desa Penempahan ini keliru menjadi Penampihan. Prasasti ketiga berasal dari Desa Malatgede dan telah diuraikan di dalam dua karangan M.M. Sukarto K. Atmodjo yaitu "Penyelidikan empat buah prasasti baru di Bali, Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1967, dan "A Newly discovered pillar-inscripton of Sri Kesari Warmadewa at Malatgede", di dalam 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional; Jakarta, 1977, hlm. 150–156. Di dalam pura Desa Malatgede selain prasasti batu dari Sri Kesari juga disimpan prasasti tembaga raja Jayapangus. Prasasti terakhir menyebut nama Desa Ermalat (menjadi Malatgede atau Malatmesir sekarang) dan Panempayan (menjadi Penempahan sekarang)

[60] Perlu diperhatikan bahwa nama Kesari juga dijumpai di dalam KO terbitan Cohen Stuart, no. 17 baris ke-23. Selain itu, tradisi Bali juga mengatakan bahwa setelah jatuhnya Maya Danawa penggantinya Mpu Kuturan. Kemudian muncul Sri Wira Dalem Kelasi yang membangun sad-kayangan. Anaknya bernama Jaya-kesunu dan keluarganya (dinasti) disebut Selunding. Nama gamelan Selunding kerap kali disebut di dalam prasasti. Nama raja di dalam prasasti Belanjong (Sanur) bagian yang berbahasa Bali kuno ialah Sri Kesari, yang pada bagian yang berbahasa Sanskerta adalah Adhipatih Sri Kesari Warmmadewa. Di dalam prasasti Penempahan nama yang disebut yaitu Sri Kaisari dan di dalam prasasti Malatgede yaitu Sri Kesari (Sri Kesa . . . i). Lihat Goris. PB, I, no. 103. Menurut Goris Kesari berarti singa (PB, II, hlm. 260)

[61] Sten Konow membaca tahun ini *kheçara-vahni-murti-ganite* atau 839 S, sedangkan Damais membaca sara-vahni-murti-ganite atau 835 S. Perkataan sara (anak panah) bernilai 5 Vahni (api) bernilai 3 dan murti (badan) bernilai 8

(944 S)[62] disebut Nangka (sinonim Ketewel). Di Desa Ketewel sekarang terdapat sebuah bangunan suci yang terkenal bernama Pura Yogan Siwa Agung. Beberapa buah arca kuno tersimpan di dalam pura tersebut. Prasasti Belanjong juga menyebut nama *singha*dwalapura yang berarti negara (keraton) Singhadwala.[63] Bagaimana hubungan antara Singhadwala dan *Singhamandawa* belum jelas. Prasasti itu juga menyebut nama kutaraja yang diduga mungkin tempat tinggal raja.

Prasasti kedua ditemukan di dalam sebuah pura di Desa Penempahan yang terletak di sebelah utara Tampaksiring.[64] Bagian yang memuat angka-tahunnya pecah tetapi dapat dipastikan juga dari tahun 835 S. Nama rajanya Sri Kaisari. Prasasti yang ketiga di Desa Malatgede.[65] Angka tahunnya disebut dengan jelas 835 S. Baik prasasti Belanjong, Penempahan, maupun Malatgede, ketiga-tiganya ditulis pada bagian paro-gelap bulan Phalguna (Saka 835 wulan phalguna krsnapaksa).[66] Selain itu, prasasti Penempahan dan Malatgede juga menyebut kerajaan Sri Kesari dengan istilah parhajyan.[67]

Ketiga prasasti raja Sri Kesariwarmmadewa ini merupakan tanda kemenangan terhadap musuh-musuhnya dan prasasti demikian disebut jayastambha.[68] Isi tugu Belanjong mungkin tentang musuh-musuh Sri Kesari yang berasal dan seberang lautan atau di kepulauan lainnya, sedangkan tugu Penempahan dan Malatgede tentang musuhnya di daerah pedalaman yang berhasil ditaklukkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa kedua desa tempat temuan prasasti terletak di daerah pedalaman (pegunungan) dan tugu Belanjong terletak di tepi pantai. Selain menyebut istana raja yang terletak di Singhadwala, tugu Belanjong juga menyebut nama raja Adhipatih Sri Kesariwarmmadewa.

---

62 Prasasti Baturan (Goris no. 352) menyebut nama Desa Nangka yang dapat disamakan dengan Ketewel sekarang. Selain itu, juga menyebut nama Desa Sakar (menjadi Sakah sekarang), Sukhawati (tetap Sukawati), dan Gurang (menjadi Guang di dekat Ketewel sekarang). Nama Baturan sekarang berubah menjadi Batuan (huruf r kebanyakan dihilangkan)

63 L-C. Damais membacanya Singarccala. Mungkin Singhadwala = Singhadwara (pintu istana negara Singha). Lih. PB, II, hlm. 308

64 Dari Tampaksiring setelah melewati Manukaya (dahulu Manukraya) sampailah di Pura Gumang yang masih menyimpan beberapa buah benda purbakala (arca batu dan lingga). Di sebelah utara Pura Gumang terletak Desa Penempahan. Perlu diketahui bahwa di dalam sebuah pura di Desa Manukaya masih tersimpan prasasti batu yang menyebut atau berhubungan dengan Tirta-empul. Lih. R. Goris no. 205 (PB, I, hlm. 75–76)

65 M.M. Sukarto K. Atmodjo: "A newly discovered . . .", di dalam 50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1977, hlm. 150–156

66 Phalguna yaitu bulan kedelapan (Kaulu)

67 Perkataan parhajyan berasal dari par-haji-an dan haji = raja

68 Jayastambha berarti: tugu kemenangan (sign of victory). Juga disebut jayacihna (tanda kemenangan)

Foto 6.2 Prasasti Panempahan, Tampaksiring, Bali
(*Sumber*: A.A. Oka)

Selain keterangan tersebut di atas, kita tidak memperoleh keterangan lebih banyak tentang seluk-beluk pemerintahan raja Sri Kesariwarmmadewa. Akan tetapi, yang penting mungkin sekali raja Sri Kesariwarmmadewa merupakan cikal bakal atau pendiri (*wamsakartta*) dinasti Warmmadewa di Bali.[69]

Dua tahun sesudah prasasti Sri Kesariwarmmadewa (835 S) di Bali memerintah seorang raja bernama Sang Ratu Sri Ugrasena pada tahun 837 S.[70] Raja ini memerintah sampai tahun 864 S di istana *Singhamandawa*. Masa pemerintahannya sezaman dengan masa pemerintahan Pu Sindok di Jawa Timur. Salah satu prasastinya yang terpenting yaitu prasasti Buwunan. Isinya tentang perjalanan raja Ugrasena ke Buwunan untuk memberikan beberapa anugerah (tatkalan sang ratu Sri Ugrasena, *tua lumaku ka buwunan*, saha twa ya*nugrahenda* tua da pitamaha di buwunan, ...).[71]

Setelah pemerintahan raja Ugrasena berakhir, muncul lagi raja-raja yang memakai gelar Warmmadewa. Raja pertama adalah Sang Ratu Sri Aji Tabanendra Warmmadewa. Ia memerintah bersama dengan permaisurinya yang bernama Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Warmmadewi (Dharmmadewi).[72] Di dalam prasastinya disebut tentang "sang ratu sang siddha dewata sang lumah di Air Madatu".[73] Berdasarkan perbandingan dengan prasasti lain dapat ditentukan bahwa yang dicandikan di Air Madatu

---

[69] Di Sumatra juga dijumpai nama raja yang menggunakan akhiran Warmadewa (Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa), tetapi lebih muda dari Sri Kesariwarmmadewa di Bali. Bagaimana hubungan (kontak) antara Pulau Bali dan Sumatra masih perlu diteliti lebih mendalam. Penggunaan awalan par dan akhiran an (parhajyan) mengingatkan kita kepada unsur-unsur bahasa Melayu kuno (dalam bahasa Bali baru perkataan mai berarti mari dalam bahasa Indonesia). Lih. catatan no. 62 tentang hilangnya huruf r

[70] R. Goris, no. 101. Di dalam mitologi Hindu Ugrasena adalah kakak ibu Kresna yang kemudian dikalahkan oleh anaknya Kangsa

[71] R. Goris, no. 102, Babahan I. Hal ini dapat dibandingkan dengan keterangan yang terdapat di dalam prasasti dari daerah Banjarnegara (OJO, CIV), yaitu tentang Maharaja Dyah Gwas Sri Jayakirtiwardhana yang pergi ke Kupang, singgah di Er Hangat dan bertemu dengan Sang Hadyan Bamwuna (tka maharaja dyah gwas Sri Jayakirti (r) wardhana, mara i kupang sumapar sira ring er hangat kapangguh sang hadyan bamwuna). Di samping itu, ada lagi keterangan di dalam prasasti ini yang menunjukkan adanya hubungan dengan Jawa yaitu gelar pitamaha yang merupakan gelar kuno orang Jawa, terutama dalam prasasti dari Dihyang (Dieng). Lih. OJO, VII, OJO, XCIX. Di Bali di depan gelar pitamaha masih ditambah dengan honorific da (da pitamaha)

[72] Perkataan luhur berarti: perempuan. Dalam bahasa Bali baru menjadi luh (anak perempuan). Sebaliknya maruhani (laki-laki) kemudian berubah menjadi muani (jantan, laki-laki) dalam bahasa Bali baru

[73] Berarti lebih kurang: raja yang telah wafat dan dicandikan di Air Madatu. Lihat PB, no. 206, hlm. 12

adalah raja Ugrasena.[74] Ini berarti bahwa raja Tabanendra adalah salah seorang keturunan raja Ugrasena.

Raja Tabanendra memerintah dari tahun 877 S–889 S.[75] Akan tetapi, pada tahun 882 S muncul seorang raja lain yang bernama Indra Jayasingha Warmmadewa.[76] Keterangan yang sangat penting dari prasasti ini adalah penyebutan tentang pembuatan telaga dari sumber suci yang terdapat di Desa Manukraya. Desa ini sekarang bernama Manukaya dan pemandian suci itu adalah Tirta Empul (di dalam prasasti disebut tirtha di Air mpul), yang letaknya di dekat Tampaksiring sekarang. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa masa pemerintahan Indra Jayasingha ini tepat di tengah-tengah masa pemerintahan raja Tabanendra. Kesalahan membaca angka tahun tidak mungkin sebab Damais telah membacanya dengan sangat teliti. Satu-satunya kemungkinan yaitu raja Indra Jayasingha ini merebut kekuasaan dari tangan Tabanendra untuk beberapa tahun, tetapi kemudian dapat direbut kembali oleh Tabanendra. Sampai di mana dugaan ini benar, masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi.

Setelah itu kita jumpai seorang raja lain yang bernama Janasadhu Warmmadewa. Raja ini memerintah pada tahun 897 S. Tidak ada penjelasan lain yang dapat diperoleh dari raja ini kecuali tentang anugerah raja kepada Desa Julah. Satu hal yang penting yaitu penyebutan raja yang terdahulu yang dikatakan dicandikan di Bwah Rangga (sang ratu sang lumah di bwah rangga). Kita tidak mengetahui siapa yang dicandikan di Bwah Rangga ini, tetapi yang pasti bukan Ugrasena, sebab raja ini dicandikan di Air Madatu.[77]

---

[74] Lihat Goris, Ancient History of Bali, 1965, hlm. 16; PB, I, hlm. 12 (No. 206) dan PB, II, hlm. 186–187

[75] Angka-tahun ini berdasarkan prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja Tabanendra. Ada kemungkinan bahwa raja ini sudah berkuasa beberapa saat sebelum tahun 877 S, demikian pula akhir pemerintahannya

[76] Nama ini sesuai dengan cerita rakyat yang mengatakan bahwa Mayadanawa dikalahkan oleh Betara Indra. Mula-mula nama raja ini dibaca Candrabhaya*singha* Warmadewa oleh Stutterheim. (Oudheden van Bali, I, 1929, hlm. 68–69) dan angka-tahunnya 884 S. Menurut Damais angka tahunnya 882 S, demikian pula nama rajanya bukan Candrabhaya*singha* Warmmadewa, melainkan W(en)drajayasingha Warmmadewa. Sesuai dengan cerita rakyat yang menghubungkan Mayadanawa dengan dewa Indra, mungkin lebih baik dibaca Indrajayasingha Warmmadewa

[77] Istilah lumah i di perkirakan sama dengan dhinarma ri, yaitu istilah yang digunakan dalam prasasti maupun naskah untuk menyebut pengabadian dharmma seorang raja sesudah meninggal. Kata i atau ri menunjuk tempat didirikannya bangunan suci atau candi yang merupakan pen-dharmma-an seorang raja. Sayang tidak semua candi pendharmmaan ini dapat dikenali kembali
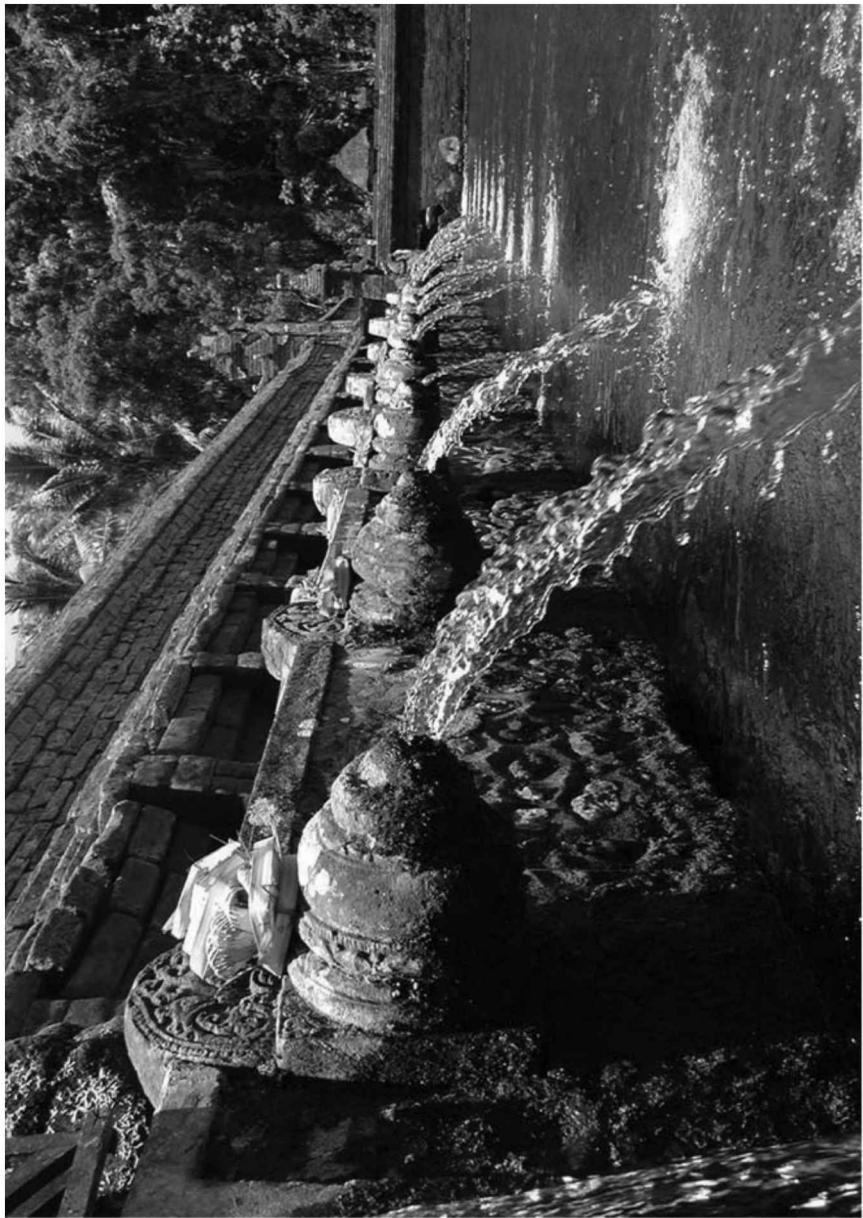
Foto 6.3 Tirta Empul, Tampaksiring, Bali
(*Sumber*: Dit. Purbakala)

Pada tahun 905 S muncul seorang raja perempuan bernama Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi. Menurut van Stein Callenfels[78] ratu ini mungkin putri dari kerajaan Sriwijaya di Sumatra atau dengan lain perkataan adanya perluasan kekuasaan Sriwijaya ke daerah ini. Pendapat van Stein Callenfels mula-mula didukung oleh Goris, tetapi Damais menduga bahwa ratu ini adalah putri Pu Sindok, Sri Isanatunggawijaya, sesuai dengan pendapat Moens. Di dalam prasasti itu disebutkan tentang Desa Air Tabar, yaitu sebuah desa yang terletak di dekat Buleleng. Juga disebut nama Bukit Tunggal yang mungkin dapat disamakan dengan bukit Sinunggal di bagian timur Buleleng (Singaraja). Selain itu, dijumpai pula nama-nama jabatan yang lazim dijumpai di dalam prasasti di Jawa, tetapi nama-nama itu tidak dikenal di Bali, seperti Makudur, Wadihati, dan Pangkaja. Mungkinkah hal ini menunjukkan adanya pengaruh Jawa di Bali? Perlu pula diketahui bahwa di salah satu museum di kota Frankfurt am Main (Jerman), ada sebuah prasasti berangka tahun 937 S dan menyebut nama Sri Mahadewi siniwi di Kadiri.[79]

Setelah masa pemerintahan Sri Wijaya Mahadewi berakhir, muncul seorang raja dari keluarga Warmmadewa. Raja itu bernama Dharmma Udayana Warmmadewa.[80] Ia memerintah bersama-sama dengan permaisurinya yang disebut Gunapriya Dharmmapatni, seorang putri dari Jawa Timur. Menurut pendapat F.D.K. Bosch, Udayana adalah anak seorang putri Kamboja yang melarikan diri ke Jawa Timur dan kemudian kawin dengan Mahendradatta.[81] Menurut J.L. Moens, ada dua tokoh yang bernama Udayana, yaitu Udayana I dan Udayana II. Udayana I memerintah di Jawa Timur dan kemudian dicandikan di petirtaan (pemandian) Jalatunda. Udayana II adalah putra Udayana I dan memerintah di Bali. Akan tetapi, sebelum Udayana II kawin dengan Mahendradatta, putri ini telah kawin dengan Dharmawangsa yang akhirnya melahirkan Airlangga.[82] Pendapat Moens ini pada umumnya disetujui oleh R. Goris.[83] Akan tetapi, Goris menambahkan bahwa Airlangga dilahirkan di Pulau Bali pada tahun 913 S.[84]

---

78 P.V. van Stein Callenfels, OV, 1924, J.L. Moens, "De Stamboom van Airlangga"

79 R. Goris, Sejarah Bali Kuno, hlm. 6. Siniwi berarti: disembah atau ditakhtakan (bertakhta)

80 Nama lengkapnya di dalam prasasti yaitu Sang Ratu Maruhani Sri Udayana Warmmadewa dan permaisurinya Sang Ratu Luhur Sri Gunapriyadharmmapatni. Lih. catatan no. 88

81 Lihat F.D.K. Bosch, "The last of the Pandavas" (Selected Studies in Indonesian Archaeology. Translation Series 5), 1961, hlm. 86 dst

82 Lihat J.L. Moens, "De Stamboom van Airlangga", TBG, LXXXIV, 1950

83 Lihat R. Goris, Ancient History of Bali, distensil oleh Fak. Sastra Univ. Udayana 1965, hlm. 23

84 Lihat R. Goris, Sejarah Bali Kuno, distensil oleh Fak. Sastra dan Budaya Gajah Mada 1960/1961, hlm. 8. Terbitan Singaraja tahun 1948, hlm. 7. Dari prasasti Pucangan dapat diketahui bahwa tahun kelahiran Airlangga yang benar yaitu 922 S (BEFEO, 46, I, hlm. 62, no. 5)

Berdasarkan nama yang dipakai Udayana, yaitu Warmmadewa, dapat diduga bahwa Udayana merupakan keturunan raja Sri Kesariwarmmadewa. Mengingat bahwa Sri Kesariwarmmadewa kemungkinan besar seorang cikal bakal Wangsa Warmmadewa di Bali, timbul dugaan bahwa raja Udayana mungkin juga dilahirkan di Bali sekitar tahun 885 S. Karena sesuatu hal, ia kemudian pindah ke Jawa Timur, mungkin karena takhta kerajaan Bali dipegang oleh Sri Janasadhu Warmmadewa (897 S) atau raja putri yang bukan wangsa Warmmadewa, yaitu Sri Wijaya Mahadewi (905 S). Di Jawa Timur, Udayana kemudian kawin dengan Mahendradatta. Menurut Bosch perkawinan itu berlangsung sebelum tahun 911 S.[85] Perkataan gempeng dan angka-tahun 899 S, serta nama Udayana yang tergores di Jalatunda,[86] menunjukkan rasa kesedihan yang mendalam.[87] Baru setelah perkawinannya dengan Mahendradatta, juga setelah Sri Wijaya Mahadewi tidak berkuasa lagi di Bali, Udayana dan permaisurinya Mahendradatta kembali ke Bali dan menaiki takhta kerajaan kira-kira tahun 911 S.

Udayana memerintah di Bali bersama-sama dengan permaisurinya sampai tahun 923 S.[88] Berdasarkan prasasti yang diketemukan dapat diduga bahwa Gunapriya mangkat antara tahun 923 S–933 S, sedangkan Udayana sendiri mangkat setelah tahun 933 S. Dugaan ini didasarkan atas prasasti Air Hawang (933 S) yang hanya menyebut nama Udayana sendiri.[89] Setelah mangkat Gunapriya dicandikan di Burwan (bhatari lumah i burwan).[90] Di Kutri yang letaknya berbatasan dengan Desa Buruan, di dalam pelinggih Pura Kedarman,

---

85 F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 96

86 Oleh Bosch nama Udayana yang tergores di candi-petirtaan Jalatunda dihubungkan dengan Legendary Udayana (Udayana di dalam cerita), meskipun ada juga Historical Udayana (Udayana di dalam sejarah) F.D.K. Bosch, op. cit., hlm. 89

87 Perkataan gempeng mungkin sama dengan gempung (Bali baru) dan berarti: remuk, hancur, sedih. Dalam bahasa Jawa baru gempung atine berarti: sedih hatinya

88 Di dalam prasastinya yang berangka tahun 911 S, 915 S, 916 S, dan 923 S selalu disebutkan nama Udayana dan permaisurinya Gunapriya bersama-sama. Suatu hal yang menarik perhatian ialah nama Gunapriya selalu disebutkan lebih dahulu, mungkin hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Gunapriya lebih tinggi daripada suaminya Udayana. Selain itu, dapat diperkirakan bahwa Gunapriya mungkin mangkat setelah tahun 923 S sebab di dalam prasasti Udayana tahun 933 S, nama Gunapriya tidak disebut lagi. Menurut Goris ia mangkat pada tahun 929 S (Ancient History of Bali, hlm. 25). Lihat juga J.L. Moens, "De Stamboom van Erlangga", TBG, LXXXIV, 1950, hlm. 141

89 R. Goris, no. 305 (PB, I, hlm. 14)

90 Desa Burwan ini mungkin sama dengan Buruan sekarang, terletak tiga kilometer di sebelah tenggara Desa Bedulu. Tentu saja luas Buruan tidak harus sama dengan Burwan pada zaman dahulu. Desa Buruan ini letaknya berdampingan dengan Desa Kutri yang merupakan lokasi tiga buah pura penting bernama Pura Puseh, Pura Bukit Darma, dan Pura Kedarman. Pura Kedarman terletak di puncak bukit, sedangkan dua buah pura lainnya di kaki bukit

terdapat sebuah arca batu menggambarkan Durga Mahisasuramardini. Arca ini menurut Stutterheim merupakan arca perwujudan Gunapriya.[91] Suaminya, yaitu raja Udayana (Dharmodayana) setelah mangkat dicandikan di Bañuwka (*bhatara lumah i bañuwka*), tetapi lokasi tempatnya belum jelas. Mungkin di Pura Yeh Mengening yang terletak di sebelah utara kekunoan Gunung Kawi, Tampaksiring.[92]

Perlu dicatat di sini tentang prasasti Ujung Hyang yang menyebut Bhatara Bañuwka (Bañuka) dua kali. Jelas yang dimaksud Bhatara Bañuwka di sini adalah Udayana. Prasasti ini menurut Damais berangka tahun 932 S, menurut Goris 962 S.

Menarik perhatian yaitu prasasti yang tersimpan di Pura Batu Madeg (di kompleks Pura Besakih). Prasasti ini berangka tahun 1893 S, tetapi di dalamnya menyebut lagi prasasti lainnya yang lebih tua dengan tahun candra sengkala (kronogram) nawasanga apit lawang atau 929 S. Prasasti ini dinamakan Bradah. Mungkin tahun 929 S memperingati kunjungan Pu Bharada yang pertama kali ke Bali sehubungan dengan mangkatnya Mahendradatta (Gunapriya). Kunjungan ini sangat penting mengingat Mahendradatta adalah keturunan raja Sindok.

Perlu juga dikemukakan di sini tentang cerita Calon Arang yang sangat terkenal dan digemari di Bali. Diduga cerita ini ada hubungannya dengan putri Gunapriya. Meskipun cerita Calon Arang bersifat dongeng, mungkin juga ada dasar-dasarnya yang benar.

Dari perkawinan Udayana dan Gunapriya lahir beberapa orang putra. Salah seorang di antaranya adalah Airlangga yang dilahirkan pada tahun 922 S di Pulau Bali. Ia kemudian pergi ke Jawa Timur untuk menikah dengan putri Dharmawangsa, yang mungkin masih kemenakan ibunya. Nama Airlangga sendiri berarti "yang melompati air". Mungkin yang dimaksud lautan sempit (segara rupek) yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali (Selat Bali). Ketika itu Airlangga berumur 16 tahun. Kerajaan Dharmawangsa yang sedang diliputi kegembiraan merayakan perkawinan putrinya dengan Airlangga, tiba-tiba

---

91 Lihat W.F. Stutterheim, Oudheden van Bali I (Het Oude Rijk van Pedjeng), diterbitkan oleh Kirtya Liefrinck Van der Tuuk, Singaraja, 1929

92 Pendapat ini dikemukakan oleh Ida Bagus Oka dari Gianyar. Ia mendasarkan dugaannya pada arti perkataan, Bañuwka yang mirip (sinonim) dengan nama Pura Yeh Mengening. Yeh atau Bañu berarti: air, sedangkan wka, oka, cening berarti: anak. Dengan demikian Yeh Mengening (Yeh Cening) = Bañu Wka (Bañuwka). Di atas sebuah bangunan Pura Yeh Mengening yang disebut prasada oleh penduduk setempat terdapat sebuah lingga batu dan di bawah pura terdapat sumber air yang jernih. Sumber air yang jernih inilah (Jawa: banyu bening) rupa-rupanya yang menyebabkan pura tersebut dinamakan Yeh Mengening (air yang bening dan jernih)

diserang oleh Haji Wurawari. Seluruh istana musnah terbakar, sedangkan Dharmawangsa terbunuh. Airlangga sempat melarikan diri dan berdiam di hutan. Baru pada tahun 936 S ia dinobatkan sebagai raja. Ia berhasil mempersatukan kembali kerajaan Dharmawangsa pada tahun 959 S. Pada waktu itu Airlangga juga membuat sebuah wihara di Pucangan. Pada tahun 964 S Airlangga mengundurkan diri dan menjadi pertapa, sampai ia mangkat tahun 971 S. Agar anak-anaknya tidak saling berebut kekuasaan, Airlangga mengirimkan Pu Bharada ke Bali meminta daerah itu untuk diberikan kepada salah seorang putranya. Akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh Pu Kuturan yang rupa-rupanya telah mempunyai calon untuk menempati takhta di Bali. Satu hal yang pasti yaitu Airlangga tidak pernah menjadi raja di Bali.

Selain Airlangga, Udayana masih mempunyai dua orang anak lagi yang lebih muda dari Airlangga, yaitu Marakatapangkaja dan Anak Wungsu. Mungkin mereka lahir di antara tahun 923 S dan 933 S. Karena Airlangga tidak pernah memerintah di Bali, yang menjadi pengganti Gunapriya dan Udayana sebagai raja di Bali adalah Dharmmawangsawardhana Marakatapangkaja Sthanottunggadewa. Keterangan ini didapat dari prasasti-prasasti Baturan (944 S),[93] Bila (945 S),[94] Songan-tambahan (945 S),[95] dan prasasti Bwahan (947 S).[96]

Dari keterangan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Marakatapangkaja memerintah di Bali antara tahun 944 S sampai tahun 947 S.[97] Masa pemerintahan Marakatapangkaja kira-kira sezaman dengan masa pemerintahan Airlangga di Jawa Timur (943 S–964 S).[98] Karena persamaan masa pemerintahannya dan persamaan unsur nama Marakatapangkaja dan Airlangga, yaitu Dharmawangsa, juga mengingat tahun wafatnya Airlangga tahun 971 S. Stutterheim berpendapat bahwa Dharmawangsawardhana Marakatapangkaja Sthanottunggadewa itu adalah Airlangga sendiri. Jadi, Airlangga telah memerintah di Jawa Timur dan Bali selama tahun 944 S–971 S. Selanjutnya

---

[93] R. Goris, no. 352

[94] R. Goris, no. 353

[95] Lihat Ktut Ginarsa, "Prasasti baru Raja Marakata," di dalam majalah BB, 1–2, 1961, hlm. 3–17; Prasasti Tengkulak A (no. 353 b)

[96] R. Goris, no. 355

[97] Masa pemerintahan raja Marakatapangkaja mulai tahun 944 S–947 S adalah berdasarkan angka tahun prasastinya yang sudah ditemukan. Dapat saja dikatakan ia memerintah sebelum tahun 944 S dan akhir pemerintahannya setelah tahun 947 S, tetapi keterangan yang pasti mengenai hal ini belum kita peroleh hingga saat ini

[98] Prasasti pertama Airlangga dari tahun 943 S (Cane, OJO, LVIII)dan prasastinya yang terakhir dari tahun 964 S (Kambangsri, OJO, LXIII)

Stutterheim mengatakan bahwa arca Amoghapasa yang ditemukan di Pura Puseh di Kutri, adalah arca perwujudan (pratistha cinandi) dari Airlangga (Marakata).[99] Akan tetapi, seperti telah dikatakan, Airlangga tidak pernah menjadi raja di Bali.

Oleh rakyatnya Marakatapangkaja[100] dipandang sebagai sumber kebenaran hukum yang selalu melindungi nasib seluruh umatnya. Hal ini jelas terlihat dari isi prasastinya. Ia selalu memerhatikan rakyatnya di mana saja seperti di Batuan (Gianyar), Sukhawati (Gianyar), Bila (Buleleng), Songan-tambahan (Tampaksiring), dan di Bwahan (tepi Danau Batur). Selain itu, Marakatapangkaja juga turut mengusahakan pembangunan prasada atau candi di Gunung Kawi (Tampaksiring).

Setelah pemerintahan Marakata berakhir, muncul Anak Wungsu sebagai penggantinya memerintah di Bali.[101] Nama lengkapnya adalah Paduka Haji Anak Wungsu (*Paduka Haji Anak Wungsunira kalih Bhatari lumah i Burwan Bhatara lumah i Bañuwka*).[102] Di antara raja-raja Bali Kuno, Anak Wungsu merupakan raja kedua yang paling aktif mencatat atau mengabadikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada zamannya. Tidak kurang dari 28 buah prasasti raja Anak Wungsu berhasil ditemukan kembali, ditambah dengan beberapa buah prasasti singkat lainnya yang terdapat di Goa Gajah, Gunung Kawi, Gunung Penulisan, dan Sangsit.[103] Jumlah ini merupakan yang kedua setelah raja Jayapangus (1099 S–1103 S)[104] dan dapat dikatakan mencolok bila dibanding dengan prasasti raja Ragajaya yang hanya sebuah.[105] Demikian pula apabila dibanding dengan prasasti raja Marakatapangkaja yang hanya 4 buah. Memang jumlah prasasti yang ditemukan tersebut dapat dikatakan kebetulan, tetapi kenyataannya prasasti dari kedua tokoh raja tersebut masih

---

[99] W.F. Sutterheim, Oudheden van Bali, I, hlm. 134; A.J. Bernet Kempers, Bali Purbakala, hlm. 49

[100] Nama Marakatapangkaja berarti: bunga teratai yang cemerlang bagaikan permata (marakata: permata, pangkaja: kembang teratai)

[101] Dari prasasti terakhir Marakata (947 S) dan prasasti pertama Anak Wungsu (971 S) terdapat masa kosong pemerintahan di Bali. Temuan prasasti di kemudian hari di Bali akan mengisi masa kosong tersebut

[102] Berarti lebih kurang: Paduka raja anak bungsu beliau berdua Bhatari yang mangkat di Burwan dan Bhatara yang mangkat di Bañuwka

[103] Dari jumlah tersebut yang mencantumkan dengan jelas nama Anak Wungsu hanyalah 18 buah prasasti saja (PB, I , hlm. 22–24)

[104] Prasasti raja Jayapangus sampai sekarang meliputi jumlah kira-kira 43 buah. Lihat Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan" . . ., dan "Bhatara Sri Luhingakung"

[105] Lihat Ktut Ginarsa "Prasasti Baru Raja Ragajaya 6 April 1155", MISI, V, I, 1973, hlm. 27–84

tersimpan dengan baik dalam jumlah yang cukup besar di dalam pura, pelinggih maupun gedong penyimpenan di Bali. Hal ini menandakan bahwa Anak Wungsu maupun Jayapangus memang banyak menghasilkan prasasti.

Anak Wungsu adalah anak Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya-dharmmapatni dan Sang Ratu Maruhani Sri Udayana Warmmadewa. Ia memerintah dari tahun 971 S sampai tahun 999 S. Di dalam prasastinya ia disebut-sebut sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan (*göng karunya pwa pinaka swabhawa paduka haji*), senantiasa memikirkan kesempurnaan dunia yang dikuasainya (nityasa kumingking sakaparipurnnakna nikang rat rinaksanira) dan ia merupakan penjelmaan dari dewa kebaikan atau dewa Hari (saksat dharmmamurti, tuhu-tuhu dharmmamurti, saksat dharmatmaja-murti atau saksat niran harimurti).

Berdasarkan prasastinya yang telah ditemukan, kita dapat memperkirakan bahwa Anak Wungsu memerintah sekurang-kurangnya selama 28 tahun. Masa pemerintahan tersebut dapat dikatakan cukup lama bila dibanding dengan raja-raja Bali kuno lainnya.[106] Hal ini hanya mungkin terjadi apabila keadaan negara cukup aman dan tenteram. Setidak-tidaknya kesukaran atau gangguan di dalam negara dapat ditanggulangi oleh Anak Wungsu dengan baik. Mengingat bahwa ibu Anak Wungsu (Mahendradatta) mangkat pada tahun 929 S, raja Anak Wungsu menaiki takhta kerajaan paling sedikit setelah berumur 42 tahun (prasastinya yang tertua 971 S). Dugaan ini berdasarkan prasasti tertua Anak Wungsu yang telah ditemukan hingga sekarang. Sampai akhir masa pemerintahannya ia mencapai usia lebih kurang 70 tahun (prasastinya yang terakhir tahun 999 S).

Suatu hal yang menarik perhatian adalah bahwa prasasti-prasasti raja Anak Wungsu ini ditemukan di daerah Bali Selatan, Bali Tengah, dan Bali Utara. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa prasasti ini dibuat dari tembaga yang ringan (karas tembagawasa) sehingga mudah dipindah-pindahkan ke tempat lain. Meskipun demikian, sejumlah prasasti Anak Wungsu masih tersimpan di tempat atau di daerah semula, seperti misalnya yang disimpan di Desa Julah (Bali Utara),[107] Trunyan (Bali Tengah), dan Sukawati (Bali Selatan).[108] Tidak mustahil temuan prasasti di kemudian hari akan menambah keterangan luasnya daerah kekuasaan Anak Wungsu.

---

[106] Bandingkan dengan Jayasakti (1055 S–1072 S), Ragajaya (1077 S), Jayapangus (1099 S–1103 S), meskipun angka-tahun tersebut hanya berdasarkan temuan-temuan prasasti hingga sekarang. Lihat juga Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan . . .", 1970, hlm. 22

[107] R. Goris, no. 441. Julah sekarang sebuah desa di bawah Sembiran. Di Desa Sembiran telah ditemukan alat-alat batu palaeolitik di samping sisa-sisa bangunan yang mempunyai sifat megalitik. Alat-alat batu itu sekarang disimpan di Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di Bedulu (Gianyar), Bali

[108] R. Goris, no. 435

Raja yang memerintah sesudah Anak Wungsu yaitu Sri Maharaja Sri Walaprabhu. Raja ini hanya meninggalkan tiga buah prasasti dan tidak satu pun di antara ketiga prasasti itu berangka tahun. Menurut Damais prasasti itu diduga berasal dari antara tahun 1001 S sampai dengan 1010 S.[109] Menarik perhatian bahwa nama Walaprabhu ini (wala = anak) mengandung arti yang sama dengan Anak Wungsu. Selain itu, ia merupakan raja pertama yang memakai gelar Sri Maharaja, sedangkan raja-raja sebelumnya umumnya menggunakan gelar Sang Ratu dan Paduka Haji. Kemudian setelah diselingi oleh beberapa orang raja lainnya, pada tahun 1247 S muncul lagi seorang raja yang menggunakan gelar rajakula Warmmadewa, yaitu Paduka Sri Maharaja Bhatara Mahaguru Dharmottungga Warmmadewa.

4. Prasasti-Prasasti Wangsa Lainnya di Bali

Setelah pemerintahan Sri Walaprabhu, muncul seorang ratu putri bernama Paduka Sri Maharaja Sri Sakalendukirana Isana Gunadharmma Laksmidhara Wijayottunggadewi.[110] Anasir nama yang panjang ini mengingatkan kita akan nama-nama beberapa raja di Bali maupun di Jawa Timur. Isana salah satu unsur nama raja Sindok,[111] Gunadharma mengingatkan nama ratu Gunapriyadharmmapatni, ibu Airlangga, Wijaya mengingatkan kita kepada ratu Sri Wijaya Mahadewi,[112] Uttunggadewi sama dengan Uttunggadewa yang merupakan unsur nama Marakata,[113] Balitung,[114] Sindok,[115] dan Airlangga.[116] Menurut Goris, anasir itu diambil dari nama-nama raja yang terdahulu (sang atita prabhu) untuk menyatakan bahwa ia keturunan dari raja-raja tersebut.

Dari raja Sakalendukirana kita hanya memperoleh tiga buah prasasti saja yang berangka tahun 1010 S, 1020 S, dan 1023 S.[117] Masa pemerintahan

---

[109] L-C. Damais, 1959, hlm. 688–689, "Si notre datation de la tombe de Gunung Kawi est exacte, il faudrait placer Walaprabhu entre 1001 et 1010 S"

[110] Nama Sakalendukirana berarti: sinar bulan yang kelihatan (sakala: kelihatan, tampak, indu: bulan, kirana: sinar)

[111] Lihat karangan R. Goris, Dinasti Warmmadewa dan Dharmawangsa di Pulau Bali, BB, V, 1957, hlm. 18

[112] R. Goris, idem, hlm. 27

[113] R. Goris, idem, hlm. 21 dst

[114] J.L.A. Brandes, OJO, XXIV (824 S) menyebut: Maharaja Rake Watukura Dyah Balitung Sri Iswara-kesawa-utsawa-tungga; OJO, XXVI (826 S): ... Sri Iswara-kesawa-samara-uttungga

[115] Sindok kerap kali disebut dengan Dharma-uttungadewa

[116] Airlangga memakai nama Anantawikrama-uttunggadewa

[117] R. Goris No. 502, 505, dan 506. Angka tahunnya hanya ditulis 110 dan 123 (tanpa angka nol). Penulisan angka tahun yang demikian juga terdapat pada prasasti Jayasakti yang hanya ditulis 172 (maksudnya 1072 S). Lihat R. Goris no. 557 (PB, I, hlm. 30)

Sakalendukirana ini sezaman dengan masa pemerintahan raja Jayawarsa di Kadiri (Jawa Timur). Setelah pemerintahan Sakalendukirana penggantinya bernama Sri Suradhipa. Ia memerintah dari tahun 1037 S (prasasti Er Tabar)[118] sampai dengan 1041 S (prasasti Latengan).[119] Raja Suradhipa digantikan oleh Sri Maharaja Sri Jayasakti.[120]

Sejak zaman Jayasakti di Pulau Bali memerintah beberapa orang raja yang menggunakan unsur nama jaya (kemenangan) seperti halnya dengan raja Jayabhaya di Kadiri. Bagaimana hubungan antara raja-raja Jawa dan Bali tersebut belum diketahui dengan jelas. Dalam zaman pemerintahan Jayasakti dan Ragajaya kitab undang-undang yang dipakai yaitu kitab *Uttara-widhi-balawan*[121] dan Rajawacana atau Rajaniti. Kitab undang-undang ini sudah

---

118 R. Goris, no. 507, M, mengenai dharmma i ertabar, karaman indrapura dan bhatara bukit-tunggal

119 R. Goris, PB, no. 508, mengenai patapan i thani latengan

120 Raja ini meninggalkan prasasti sebanyak 17 buah. Nyoman Puger menemukan sebuah prasasti Jayasakti, yaitu tembaga Pangupetan, sedangkan Sukarto menemukan empat buah yaitu prasasti Batur-Paruman-Nungnung, Dayankayu, Satra, dan Kapal. Nama-nama desa tersebut sekarang menjadi Nungnung, Denkayu, Satra, dan Kapal, meskipun mungkin wilayahnya tidak sama. Pada waktu raja Jayasakti memerintah di Bali, yang memerintah di Jawa pada waktu itu ialah raja Jayabhaya (1057–1079 S). Lihat Sukarto K. Atmodjo, "Struktur pemerintahan zaman raja Jayasakti". MISI, no. 2, Juli 1977, hlm. 38 dst. Nyoman Puger, Raja Jayasakti di Bali, Skripsi Fak. Sastra Univ. Udayana, 1961. Prasasti Batur-Taruman-Nungnung sekarang disimpan di Desa Asahduren. Prasasti Dayankayu oleh Nyoman Puger diduga dari raja Jayapangus tetapi Ktut Ginarsa mengatakan berasal dari raja Ragajaya. Tembaga Satra sudah sangat rusak. Lihat Sukarto K. Atmodjo: "Preliminary report on the copperplate inscription of Asahduren", BKI, 126. 1970 hlm. 215–227; "The Charter of Dayankayu", BKI, 128, 1972, hlm. 257–279: "The Charter of Kapal" Aspek-aspek Arkeologi, no. 2 1977, Ktut Ginarsa "Masalah pembatjaan prasasti Bandjar Gambang", Harian Suluh Marhaen, no. 204, 26 Maret 1967, hlm. 2

121 *Uttara-widhi-balawan* berarti: tempat pemujaan yang berkenaan dengan daerah utara yang sangat berkuasa. Maksudnya kitab undang-undang yang berlaku di India Utara. Keterangan ini dapat dibaca misalnya di dalam prasasti Indrapura (Depaa) dari Jayasakti (masih merupakan kemungkinan). Lihat Goris, no. 555. Prasasti itu sendiri tidak menyebut angka tahun maupun nama raja, tetapi oleh Goris diletakkan di dalam kelompok prasasti Jayasakti. Perlu diketahui bahwa prasasti itu sekarang telah hilang karena dicuri penduduk setempat dan dijual kepada orang asing yang lama bertempat tinggal di Bali (Sanur). Menurut keterangan penduduk nama Desa Depaa berasal dari kepeh paha (paha yang putus) sewaktu seorang pendeta jatuh dari pohon beringin karena mengejar kera (bojog). Karena batas-batas Desa Depaa sekarang sebagian sesuai dengan batas-batas yang disebut di dalam prasasti, di samping itu biasanya suara r hilang di dalam bahasa Bali baru, kami menduga boleh jadi nama Depaa merupakan kata rusakan dari nama Indrapura (melalui Drapura – Depua – Depaa). Perlu juga diketahui bahwa suara a di dalam bahasa Bali baru kerap kali diucapkan e (nama Desa Kawakadan dalam prasasti kuno sekarang disebut Waked, (melalui Wakad) dan terletak di daerah Kabupaten Gianyar). Depaa sekarang terletak di dekat Tajun di daerah Kabupaten Buleleng, yaitu dari Kubutambahan ke arah pegunungan (arah selatan)

dipakai sejak masa pemerintahan ratu Sakalendukirana yang memerintah di Bali pada akhir abad XI M. Kemudian dilanjutkan oleh penggantinya raja Suradhipa (1037 S–1041 S). Kedua kitab undang-undang tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok kitab Agama dan sastra Niti, yaitu kitab pedoman bagi raja-raja.[122]

Di dalam prasastinya, raja Jayasakti selalu disebut-sebut sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan. Ia dikatakan merupakan penjelmaan dewa Wisnu (wisnumurti, harimurti, atau purusottamangsa).[123]

Kecuali itu, ia juga dikatakan selalu memerhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya dengan memberikan kesempatan pada rakyatnya untuk menyampaikan usul atau keluhannya secara langsung kepada raja. Sebagai contoh misalnya prasasti Besan yang bertarikh 1070 S[124] menyebut antara lain: ... *irika diwasa karama i besan sapañjing thani, rama kabayan mangaran bapa ni langgö mwang bapa ni gajah, manambah i lbu ni paduka sri maharaja sri jayasakti* ... (... pada waktu itu seluruh penduduk Desa Besan, yaitu bapak Kabayan bernama bapak Langgö dan bapak Gajah, menyembah kepada duli paduka Sri Maharaja Sri Jayasakti ...). Berdasarkan prasasti yang sudah ditemukan raja Jayasakti memerintah lebih kurang antara tahun 1055 S dan 1072 S.

Jayasakti digantikan oleh Ragajaya. Ia memerintah pada tahun 1077 S. Berapa tahun ia memerintah tidak dapat diketahui dengan pasti karena sampai sekarang hanya satu buah prasasti yang menyebut nama Ragajaya[125]. Sebenarnya ada dua prasasti lagi yang oleh Ktut Ginarsa[126] diduga berasal dari raja Ragajaya, tetapi oleh Sukarto diperkirakan berasal dari raja Jayasakti atau Jayapangus[127].

Pada masa pemerintahan raja Ragajaya kitab undang-undang Uttara-widhi balawan dan Rajawacana juga dipergunakan. Selain itu, agama Siwa

---

[122] Lihat R. Goris, "Het huidig lontarbezit der Kirtya", di dalam Med. v.d. Kirtya Liefrinck-van der Tuuk, afl. 4, 1935 V–VI

[123] Dalam prasasti no. 551 disebut sebagai Wisnusakala (Wisnu yang kelihatan), no. 552 Wisnumurti, no. 556 A sebagai Purusottamangsa dan keturunan Wisnu, no. 557 sebagai Harimurti. Wisnu = hari = Purusottama dan murti = angsa = penjelmaan

[124] R. Goris, no. 556. Berasal dari Prasi (Prasi A)

[125] Lihat Ktut Ginarsa, "Prasasti baru raja Ragajaya ...", MISI, V, 1973, hlm. 27–84

[126] Prasasti Dayankayu dan Batur-Paruman Nungnung berasal dari Desa Asahduren dan Banjar Gambang, Ktut Ginarsa, "Masalah pembacaan prasasti Banjar-Gambang", Harian Suluh Marhaen, 1967

[127] Persoalan ini timbul karena prasasti Dayankayu (Banjar Gambang) dan Batur-Paruman-Nungnung (Asahduren) tadi tidak berangka tahun dan tidak menyebut nama rajanya. Hal ini disebabkan kedua prasasti itu tidak lengkap. Lihat M.M. Sukarto, "Preliminary report on the copperplate inscription of Asahduren", BKI, 1970 dan "The Charter of Dayankayu", BKI, 1972

dan Buddha berkembang dengan baik. Raja Ragajaya digantikan oleh raja Jayapangus pada tahun 1099 S.[128]

Zaman pemerintahan raja Jayapangus di Bali (1099 S–1103 S) hampir bersamaan waktunya dengan zaman pemerintahan Sri Gandra dari kerajaan Kadiri yang memerintah tahun 1103 S. Hal ini dapat kita ketahui dari prasasti Jaring dari daerah Blitar. Prasasti ini menyebut nama raja Sri Maharaja Sri Kroñcaryyadipa Handabhuwanapalaka Parakramanindita Digjayottunggadewa nama Sri Gandra.[129]

Untuk memberikan perbandingan yang agak jelas mengenai raja-raja yang memerintah di Jawa dan Bali sekitar masa pemerintahan raja Jayabhaya dan Jayapangus, baiklah kita perhatikan deretan nama-nama raja berikut ini:

Jawa	Bali
1 Jayabhaya (±1057 S – ±1079 S),	1 Jayasakti (± 1055 S– ± 1072 S),
2 Sarwweswara (± 1082 S),	2 Ragajaya (± 1077 S),
3 Arryyeswara (± 1093 S),	3 Jayapangus (± 1099 S–± 1103 S).
4 Kroñcaryyadipa, Gandra (± 1103 S),	
5 Kameswara (± 1107 S)	

Berdasarkan prasasti, diketahui bahwa Jayapangus menggantikan Ragajaya, dengan catatan masih terbentang "masa kosong" selama 22 tahun antara kedua raja tersebut. Apabila selama waktu itu tidak ada raja lainnya yang memerintah, dapat diperkirakan bahwa Jayapangus mungkin sekali putra Ragajaya. Perkataan pangus (indah, bagus, serasi) mungkin dapat didekatkan dengan raga (cinta, indah). Menarik perhatian bahwa pelinggih

[128] Di dalam bukunya Prasasti Bali Goris menyebutkan bahwa prasasti raja Jayapangus yang telah diketemukan kembali berjumlah 34 buah. Sampai tahun 1980 jumlah itu meningkat menjadi 43 buah. Akan tetapi, yang mengherankan yaitu hampir semua piagamnya, kecuali sebuah, berangka tahun sama (1103 S). Bahkan bulan, tanggal, hari, pasaran, dan wukunya juga sama. Satu-satunya prasasti yang berlainan tadi sekarang tersimpan di Desa Mantring (Gianyar) dan berangka tahun 1099 S. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah sebabnya dewan pemerintahan kerajaan Jayapangus menyeragamkan tahun dan tanggal di dalam lebih dari 40 buah prasastinya itu (meskipun beberapa buah di antaranya tidak berangka tahun karena ditemukan tidak lengkap). Menurut pendapat Goris, tidak mungkin prasasti yang sebanyak itu ditulis dalam waktu satu hari. Mungkin pada waktu Jayapangus memerintah banyak penduduk desa yang memohon agar undang-undang dari raja yang terdahulu (sang atita prabhu) ditetapkan kembali. Oleh sebab itu, mungkin sekali penetapannya dimulai pada tanggal dan tahun tersebut (1103 S). Meskipun tanggal dan tahunnya sama, tidak mungkin prasasti yang berpuluh-puluh itu dibuat pada waktu yang sama (sehari). Jadi, salah satu kemungkinan seperti halnya pada waktu sekarang, keputusan itu berlaku sejak tanggal dan tahun tersebut. Nama karaman (desa dengan seluruh penduduknya) yang disebut Katulikup mungkin sama dengan Desa Tulikup di dekat Gianyar. Perlu diperhatikan bahwa dari sekian banyak prasasti Jayapangus, beberapa buah di antaranya merupakan prasasti turunan (copy). Lihat M.M. Sukarto, "Struktur pemerintahan jaman raja Jayasakti", MISI, 1977, Juga R. Goris, no. 601

[129] N.J. Krom; HJG, 1931, hlm. 297

tempat menyimpan selembar prasasti perunggu (tembaga) di Desa Surabaya (Kintamani, Kabupaten Bangli) yang berbentuk meru tumpang tujuh, oleh penduduk setempat dinamakan pelinggih Ida Betara Asmarajaya[130]. Diduga prasasti tersebut merupakan kelanjutan atau lembar terakhir dari prasasti Ragajaya yang sekarang tersimpan di Desa Tejakula. Mudah diketahui bahwa nama Asmarajaya pada hakikatnya sama maknanya dengan Ragajaya atau Kamajaya. Kama adalah nama dewa asmara.

Sumber sejarah yang tidak kurang pentingnya, yaitu kitab Usana Bali (abad XVI M) menyebutkan bahwa raja Jayapangus memerintah setelah raja Jayakasunu.[131] Di dalam cerita tradisional Usana Bali disebutkan bahwa Jayakasunu[132] adalah penyelamat kerajaan Bali yang terkena malapetaka karena lalai menjalankan ibadah. Raja inilah yang dianggap menerima wahyu dewa-dewa dan mengajak rakyat kembali melakukan upacara agama yang hingga sekarang dirayakan sebagai hari raya Galungan.

Akan tetapi, nama Jayakasunu belum pernah dijumpai di dalam prasasti, sebaliknya raja-raja sebelum Jayapangus yaitu Jayasakti dan Ragajaya keduanya tidak dikenal dalam cerita tradisi. Mungkinkah Jayakasunu ini sama dengan Ragajaya atau Jayasakti? Ataukah Jayakasunu sebetulnya nama seorang raja yang memerintah di dalam "masa kosong" selama 22 tahun (antara 1077 S–1099 S) tersebut di atas?

Berdasarkan deretan nama-nama tersebut dapat diketahui bahwa pada waktu yang hampir bersamaan di Jawa dan Bali, memerintah raja-raja yang menggunakan nama yang hampir sama, yaitu Ragajaya-Jayapangus dan Jayabhaya-Kameswara. Mungkinkah hal ini terjadi secara kebetulan saja? Akan tetapi, kalau diingat kontak antara Jawa dan Bali sudah ada sejak lama, adanya persamaan nama itu memang tidak amat mengherankan.

Nama raja Jayapangus kita jumpai dalam beberapa prasasti dan kitab Manawa-kamandaka (*rumengö poh ning manawa kamandaka*).[133] Dari 43 prasasti

---

130 Ktut Ginarsa, "Prasasti baru raja Ragajaya"

131 M.M. Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan ..."

132 Pemisahan nama ini belum jelas. Jaya-kasunu, Jayaka-sunu ataukah Jaya-kasuna (kasuna = bawang putih)? Jayaka mungkin berarti: kemenangan, sunu: anak

133 Kitab tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok sastra Sasana yang terutama berisi pedoman dan peraturan bagi para pendeta. Akan tetapi, baik Niti, Sasana, dan juga Palakrta (awig-awig atau undang-undang desa) ketiga-tiganya masuk ke dalam kelompok kitab Agama. Di Jawa, kitab yang terkenal pada waktu itu terutama berbentuk kakawin, seperti kitab Bharatayuddha yang dikarang dalam zaman Jayabhaya (1079 S) dan Ghatotkacasraya yang menyebut nama raja Jayakrta. Akan tetapi, menurut Sutjipto Wirjosuparto kitab yang terakhir ini menyebut nama raja Jayabhaya. Selanjutnya di dalam zaman raja Kameswara terkenal kekawin Smaradahana yang digubah oleh Pu Dharmaja. Berlainan dengan sastra Niti, Sasana dan Palakrta yang masuk dalam kelompok Agama, maka kakawin masuk

raja Jayapangus, prasasti Katulikup (Mantring A/1099 S) hanya menyebut nama Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus, sedangkan di dalam prasasti lainnya yang berangka tahun 1103 S, raja disebut bersama dengan kedua orang permaisurinya dan namanya ditambah dengan sebutan *Arkajalañcana.*

Prasasti Jayapangus yang tersimpan di Kerobokan (Buyan-Sanding-Tamblingan) menyebut nama raja bersama-sama dengan kedua orang permaisurinya, yaitu *Paduka Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkajalañcana, saha rajapatni dwaya Paduka Sri Parameswari Indujaketana, dan Paduka Sri Mahadewi Sasangkajacihna.*[134] Tambahan nama Arkaja berarti "putra matahari" (melambangkan planet Saturnus), sedangkan Induja dan Sasangkaja berarti "putri bulan" (melambangkan planet Mercurius).[135] Dengan demikian, perkawinan raja dengan kedua orang permaisuri tersebut melambangkan perpaduan abadi antara matahari (siang) dan bulan (malam), atau Saturnus dan Mercurius.

Perkataan *lañcana, ketana, cihna,* dan *ketu,* semuanya berarti lambang atau tanda. Hal ini dapat dibandingkan dengan bahasa Jawa kuno panji yang berarti tanda atau bendera. Arjuna misalnya, ia juga dinamakan Kapi-ketu karena menggunakan panji-panji yang berlukiskan kera,[136] sedangkan bendera dewa Agni dinamakan dhuma-ketu karena berhiaskan asap.[137]

Melihat bahwa baru dalam tahun 1103 S Jayapangus menyebut nama kedua orang permaisurinya, timbul perkiraan bahwa dalam tahun 1099 S rupa-rupanya raja belum beristri. Akan tetapi, apabila pada tahun 1099 S Jayapangus memang sudah beristri, barangkali raja menganggap belum tiba waktunya nama kedua orang permaisurinya dicantumkan secara resmi di dalam prasastinya.

Mengingat bahwa kedua orang permaisuri Jayapangus menggunakan unsur nama yang searti, yaitu keduanya menyatakan dirinya sebagai "putri bulan" (indu = sasangka), timbul pertanyaan, mungkinkah kedua putri tersebut merupakan saudara kakak-beradik yang sekaligus diangkat menjadi permaisuri (rajapatni) oleh Jayapangus? Pertanyaan ini masih sukar dijawab mengingat kurangnya sumber sejarah. Bahwa seorang raja memperistri saudara kakak-beradik sekaligus memang bukan hal yang aneh dan mustahil. Bahkan,

---

dalam kelompok Itihasa (cerita epik). Demikian pula halnya dengan kitab parwa, kidung, dan gaguritan. Lihat R. Goris,"Het huiding ...", afl. 4, 1935, V–VII; R.Ng. Poerbatjaraka Kapustakan Djawi, 1953, hlm. 24; R.M. Sutjipto, Glimpses of Cultural ..., 1954, hlm. 60

134 Perkataan Jawa kuno "saha rajapatnidwaya" berarti: dengan kedua orang permaisurinya

135 R. Goris, Ancient History of Bali, 1965, hlm. 39. Perkataan indu = sasangka = bulan, arka = matahari, ja = keturunan, lahir

136 Ibid.

137 R.M. Sutjipto Wirjosuparto, "Kakawin Smaradahana sebagai tafsir Ikonografi", MISI, no. 2, 1964, hlm. 15

raja Krtarajasa (Raden Wijaya) pendiri kerajaan Majapahit juga kawin dengan empat orang saudara kakak-beradik sekaligus, semuanya putri Kertanagara (samastakrtanagaraduhita).[138] Keterangan ini dapat dilihat di dalam prasasti Gunung Penanggungan (1218 S).[139]

Permaisuri pertama raja Krtarajasa bernama Dyah Dewi Tribhuwaneswari berkedudukan sebagai Sri Parameswari, sedang yang kedua Dyah Dewi Narendraduhita sebagai Sri Mahadewi. Keterangan ini dapat dibandingkan dengan prasasti Jayapangus yang menyebut Indujaketana sebagai Paduka Sri Parameswari dan Sasangkajacihna sebagai Paduka Sri Mahadewi. Jika demikian, jelas bahwa kedudukan Indujaketana lebih tinggi bila dibandingkan dengan Sasangkajacihna.

Nama Indujaketana dan Sasangkajacihna lebih menarik perhatian lagi karena kira-kira 85 tahun sebelumnya di Bali pernah memerintah seorang ratu putri bernama Indukirana (sinar bulan purnama). Prasasti ratu tersebut yang telah ditemukan sebanyak tiga buah dan berangka tahun 1010 S, 1020 S, dan 1023 S. Nama lengkapnya Paduka Sri Maharaja Sri Sakalendukirana lsana Gunadharmma Laksmidhara Wijayattunggadewi.

Menurut Goris nama itu berarti:

1. Indu-kirana = cahaya bulan purnama,
2. Gunadharmma = keturunan dari Gunapriyadharmmapatni, yakni ibu Airlangga,
3. (hendak mengaku) Wijaya = keturunan raja Palembang (Sriwijaya),
4. (hendak mengaku) Uttungga, yakni keturunan raja Sindok di Jawa Timur.[140]

Apabila pendapat Goris benar, mungkinkah Parameswari lndujaketana dan Mahadewi Sasangkajacihna keduanya juga hendak mengaku sebagai keturunan Gunapriyadharmmapatni dan raja Sindok? Jika benar demikian, dengan menyebut nama kedua "putri bulan" di dalam prasasti 1103 S, kedudukan Sri Maharaja Haji Jayapangus semakin bertambah kuat. Apalagi jika diingat Jayapangus seorang raja yang dinyatakan menguasai satungkep balidwipamandala (seluruh Pulau Bali).

Tidak lama setelah raja Jayapangus meninggal, kedudukannya digantikan oleh seorang raja yang bernama Sri Maharaja Haji Ekajayalañcana. Ia memerintah bersama-sama dengan ibunya bernama Sri Maharaja Sri Arjayyadengjayaketana. Prasastinya berangka tahun 1122 S dan menyebut

---

[138] Berarti: semua putri raja Kertanagara. Samasta = semua, duhita = anak perempuan

[139] R.Ng. Poerbatjaraka, "Oorkonde van Krtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan", lNI, afl. 1, 1940, hlm. 38. Juga disebut prasasti Sukamrta

[140] R. Goris, Sejarah Bali Kuno, hlm. 10

nama Cintamani (sekarang Kintamani).[141] Akan tetapi, prasasti di atas bahasanya kurang baik dan ejaannya banyak yang salah. Yang menarik perhatian ialah pemakaian gelar Haji setelah gelar Sri Maharaja, sebab gelar yang demikian ini jarang kita jumpai di dalam sejarah kuno Indonesia. Gelar Haji (raja) ini mengingatkan kita kepada raja Anak Wungsu dan raja Jayapangus. Demikian pula kerajaan Sri Kesari Warmmadewa disebut dengan istilah parhajyan (prasasti Malatgede). Mungkinkah ada hubungan keluarga antara raja-raja tersebut?

Empat tahun kemudian, muncul seorang raja bernama Bhatara Guru Sri Adikuntiketana. Prasastinya berangka tahun 1126 S dan menyebut nama karaman Bangli. Raja ini oleh Goris disebut Bhatara Guru I karena kemudian ada lagi seorang raja bernama Bhatara Guru II. Selain nama Bhatara Guru Sri Adikuntiketana disebutkan juga nama putranya yaitu Bhatara Parameswara Sri Wirama. Selain itu, prasasti Bangli juga menyebut nama Sri Dhanadhirajalañcana bersama permaisurinya Paduka Bhatari Sri Dhanadewiketu. Menurut Damais, Dhanadhiraja adalah nama kehormatan untuk Kuwera, tetapi di sini dipakai sebagai nom d'oriflamme dari putra raja. Pada waktu pemerintahan raja Bhatara Guru Sri Adikuntiketana ini raja Jayawarsa memerintah di Jawa Timur (Kadiri).

Pada tahun 1182 S muncul seorang raja yang bernama Paduka Bhatara Parameswara Sri Hyang ning Hyang Adidewalañcana.[142] Prasastinya menyebut nama karaman Bulihan. Pada waktu itu yang menjadi raja di Singhasari ialah raja Wisnuwardhana. Sejak tahun 1182 S sampai 1246 S terjadi kekosongan selama 64 tahun. Mungkin hal ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di Jawa Timur.[143]

Pada tahun 1206 S raja Kertanagara dari Singhasari berhasil menaklukkan Bali. Akan tetapi, pada tahun 1214 S di Jawa terjadi huru-hara karena kedatangan ekspedisi dari negeri Cina. Kerajaan Singhasari runtuh dan kemudian muncul kerajaan baru Majapahit.

Di antara tahun 1182 S dan 1246 S ada dua buah prasasti yang berangka tahun 1218 S (prasasti Basangara)[144] dan 1222 S (prasasti Sukawana).[145] Kedua prasasti itu tidak menyebut nama raja, tetapi hanya menyebut "raja patih".

---

[141] R. Goris, no. 703

[142] R. Goris, "Raja-raja Bali sejak kerajaan Anak Wungsu sampai kemenangan Gajah Mada", BB, 17, no. 4, 1958, hlm. 7

[143] Ibid.

[144] R. Goris, no. 801. Desa Basangara sekarang berubah menjadi Basanga di dekat Pengotan (tempat penyimpanan prasasti)

[145] Goris, no. 802. Yang dimaksud Sukawana mungkin sekali Sukawana sekarang (tempat penyimpanan prasasti)

Sebutan "raja patih makakasir kbo parud" menunjukkan bahwa ia seorang bawahan dari kerajaan Majapahit.[146]

Pada tahun 1246 S muncul seorang raja lagi bernama Paduka Bhatara Guru. Oleh Goris raja ini disebut Bhatara Guru II. Ia disebut bersama-sama dengan anaknya bernama Sri Tarunajaya (kalih putunira sira paduka aji sri tarunajaya).[147] Dua bulan kemudian terbit lagi sebuah prasasti dari raja Paduka Bhatara Sri Mahaguru, tetapi tidak menyebut nama anaknya (cucunya?).[148] Dalam prasasti Tumbu yang bertarikh 1247 S disebut nama raja Paduka Sri Maharaja Sri Bhatara Mahaguru Dharmotungga Warmmadewa.[149] Munculnya kembali nama Warmmadewa dalam tahun 1247 S memang menarik perhatian sebab sejak masa Sakalendukirana tidak ada seorang raja Bali yang memakai unsur nama Warmmadewa.

Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1250 S raja Bhatara Mahaguru mangkat. Hal ini dapat disimpulkan dari prasasti Salumbung[150] yang menyebut nama Paduka Bhatara Sri Walajaya Krttaningrat bersama ibunya (ibunira) Paduka Tara Sri Mahaguru. Tulisan atau perkataan "tara" di dalam prasasti itu jelas sekali.[151] Jadi, tidak mungkin menjadi bhatara seperti pembacaan Damais.[152]

Untuk ibu seharusnya dipakai "bhatari", tetapi menurut Goris jika dibaca Bhatari Sri Mahaguru tidak mungkin, sebab Mahaguru nama seorang laki-laki. Oleh karena itu, perkataan tara harus berarti janda dari raja Mahaguru. Mungkin kata tara ini berasal dari bahasa Sanskerta tara untuk permaisuri. Tara yang berarti permaisuri (istri) dipakai di dalam prasasti Kalasan dan juga prasasti Nalanda.[153] Apabila dibandingkan prasasti tahun 1246 S dengan prasasti tahun 1250 S, hasilnya adalah raja Bhatara Guru II (yang kemudian menjadi Mahaguru) dengan anak laki-lakinya (putunira) yang bernama Tarunajaya memerintah pada tahun 1246 S. Dalam tahun 1250 S ayah Tarunajaya mangkat kemudian baru digantikan oleh Walajaya Krttaningrat bersama ibunya, janda (tara) raja Mahaguru. Nama Walaprabhu mungkin sama dengan Anak Wungsu (bala = anak), demikian pula Walajaya

---

[146] R. Goris berpendapat bahwa nama Kbo Parud bukanlah nama orang Bali, tetapi mungkin nama orang Jawa (Jawa Timur). Perkataan makakasir berarti: bernama

[147] R. Goris, no. 803. Perkataan putu dalam bahasa Jawa kuno berarti cucu. Akan tetapi, dalam bahasa Bali baru putu juga sebutan untuk anak sulung dari golongan bangsawan

[148] R. Goris, no. 804

[149] R. Goris, no. 806. Unsur uttungga oleh Goris dihubungkan dengan raja Balitung, Sindok, Airlangga, dan Marakatapangkaja

[150] R. Goris, no. 807

[151] Gambar OD 5724; Goris, "Raja-raja Bali . . . ", PB, VI, 1958, hlm. 8

[152] L-C. Damais, no. 62, hlm. 96, catatan I

[153] N.J. Krom, HJG, 1931, hlm. 142–143

= Balajaya. Karena taruna berarti anak laki-laki (pemuda) Tarunajaya (1246 S) = Sri Walajaya (1250 S).[154]

Pada tahun 1259 S yang memerintah di Bali adalah raja Paduka Bhatara Sri Astasura Ratna Bumi Banten.[155] Selain itu, ada lagi sebuah prasasti yang sangat rusak di bagian belakang arca perempuan yang disimpan di Pura Tegeh Koripan di Gunung Panulisan (sebelah utara Kintamani). Bagian yang masih dapat dibaca berbunyi "... stasura ratna bumi banten". Damais telah menentukan tahunnya 1352 S.[156] Prasasti itu memakai angka tahun berupa Candra-Sangkala mata, parasu, dan gambar ketiga kurang jelas (mungkin gunung atau lautan). Mata bernilai 2, parasu (kapak) bernilai 5 dan gunung serta lautan masing-masing bernilai 7 dan 4. Dengan demikian, Candra-sangkala itu melambangkan tahun (1)257 atau (1)254 S.[157] Meskipun begitu persoalannya juga belum jelas dan Goris tidak yakin bagaimana nama raja dari prasasti tahun 1259 S sama dengan nama raja pada prasasti yang dibaca oleh Damais 1352 S.

Perlu ditambahkan bahwa telah ditemukan arca sepasang yang berdiri di atas sebuah lapik di Pura Subak Taulan di Krobokan (sebelah barat Denpasar). Di bagian belakang arca terdapat angka-tahun 1260 S dan sebuah kalimat candrasangkala berbunyi tannana rasa pasek tunggal yang melambangkan tahun 1260 S. Mungkin arca tersebut menggambarkan raja Astasura bersama permaisurinya. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa Astasura memerintah antara tahun 1254 S (1257 S) dan 1260 S. Perkataan Astasura berarti delapan orang raksasa atau kekuatannya seperti delapan raksasa. Menurut Goris raja itu mungkin dapat disamakan dengan raja Bedaulu yang jahat dan kejam bernama Maya Danawa.

Astasura Ratna Bumi Banten adalah raja Bali terakhir yang merdeka. Enam tahun sesudah tarikh prasasti Patapan Langgaran Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali (1265 S). Rupa-rupanya raja Astasura dengan gigih berusaha supaya Bali tetap merdeka. Karena itulah ia disebut sebagai manikam Pulau Bali (ratna bumi banten). Akan tetapi, rupa-rupanya pada tahun 1260 S suasana di Bali sudah goyah dan persatuan terganggu. Hal ini diungkapkan dengan tahun tannana rasa pasek tunggal (1260 S), yang berarti tidak ada kesatuan dalam pasek (golongan).

Boleh jadi arca-arca besar yang disimpan di dalam Pura Kebo Edan di Pejeng juga berasal dari zaman kerajaan Astasura. Stutterheim mengatakan

---

[154] R. Goris, "Raja-raja Bali ...", hlm. 8

[155] R. Goris, no. 811. Prasasti Langgaran (sekarang Langgahan)

[156] L-C. Damais, no. 67, hlm. 97, catatan 7

[157] Angka 1 (untuk menunjuk ribuan) di depan hanya ditambahkan karena bagian itu telah rusak, tetapi pasti sebuah gambar yang melambangkan angka 1

bahwa arca-arca itu berasal dari abad XIII M. Di dalam Pura Kebo Edan terdapat beberapa buah arca menggambarkan raksasa (bersifat demonis). Rupa-rupanya raja Astasura ini melakukan bhairawa-marga seperti halnya raja Kertanagara dari Singhasari. Nama pura itu sendiri menunjuk ke arah perbuatan (praktik) *pañca ma* (edan = mada).

Sesudah tahun 1265 S kita jumpai prasasti-prasasti raja Majapahit. Jumlahnya ada dua buah, masing-masing berasal dari tahun 1305 S[158] dan tahun 1320 S.[159] Di dalam prasasti yang pertama disebutkan nama Paduka Sri Maharaja Rajaparameswara Sri Sakalaprajanandakarana ... Paduka Parameswara Sri Wijayarajasa Namadewabhiseka Sang Apañji Waninghyun Garbhodayanama Cañcu Kudamrta ... inadisthana sire nagare Wengker.[160] Prasasti yang kedua menyebut Paduka Bhatara Sri Parameswara Sira Sang Mokta ring Wisnubhawana.[161]

Sejak ditaklukkannya Balidwipa oleh Gajah Mada pada tahun 1265 S, kerajaan Bali dikuasai oleh keluarga raja Jawa. Mula-mula pusat pemerintahannya di daerah Samprangan,[162] tetapi kemudian dipindah ke Gelgel[163] dan Klungkung.[164] Beberapa abad kemudian yang memerintah di Klungkung tetap menganggap dirinya sebagai "wong Majapahit", artinya orang Majapahit. Bahkan sampai sekarang anggapan yang demikian masih tetap ada. Meskipun kemudian timbul kerajaan lainnya di Bali seperti di Gianyar, Mengwi, Tabanan, Karangasem, dan Buleleng, tetap Dewa Agung Klungkung yang dipandang sebagai raja yang tertinggi.

---

158 R. Goris, no. 901. Tulisan prasasti sangat indah dipahat di atas lempengan tembaga yang tebal. Isi prasasti mengenai hubungan antara Desa Her-Abang dan Pamuteran. Sekarang disimpan di Pura Tulukbiyu di Batur (selatan Kintamani)

159 R. Goris, no. 902. Mengenai pandai besi (pande wsi) dari Tambelingan. Letak desa itu mungkin di sekitar Danau Tamblingan sekarang. Lihat Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan ..."

160 Wijayarajasa adalah nama paman raja Hayam Wuruk yang berkuasa di Wengker, sedangkan nama Cañcu Kudamrta adalah nama kelahiran Wijayarajasa (cf. Par., hlm. 237, daftar II). Selain itu, ada penyebutan tentang Nalikeradwipa yang menurut Damais adalah nama Sanskerta dari daerah di Bali yaitu "nusa nyiur". Hal ini ada hubungannya dengan prasasti Poh yang berangka tahun 827 S (L-C. Damais, A70; W.F. Stutterheim, INI, 1, 4: wanua ri rumasan ring nyu)

161 Sang Mokta ring Wisnubhawana adalah nama Raden Kudamrta setelah meninggal dunia. cf. prasasti Biluluk 11, P.V. van Stein Callenfels, OV, 1918), hlm. 175r177; 1919, II, 62: L-C. Damais, A190, 196, 200. Di dalam prasasti ini kita jumpai istilah arya untuk pertama kali

162 Sekarang di sebelah timur kota Gianyar masih terdapat Desa Samplangan. Di sebelah utara Samplangan terletak sebuah bukit bernama Bukit Jati dan beberapa buah arca kuno terdapat di sekitar bukit itu

163 Gelgel disebut juga Linggarsapura. Terletak berdekatan dengan Klungkung

164 Klungkung disebut juga Smarapura

5. Temuan Arkeologi

Kecuali sejumlah prasasti yang sudah dikemukakan, beberapa temuan arkeologi juga dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Dalam tiga dekade terakhir ini terjadi penemuan-penemuan baru yang cukup signifikan bagi sejarah Bali kuno.

Temuan arkeologi tersebut terutama berupa sisa-sisa atau reruntuhan bangunan suci atau candi. Dahulu, orang sering mempertanyakan mengapa di Bali tidak ditemukan candi seperti di Jawa yang tersebar begitu banyak, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebenarnya sejak penelitian Stutterheim atas kekunoan di Bali pada tahun 1925–1926, telah diketahui adanya fragmen-fragmen bangunan candi dan miniatur candi dari batu padas di beberapa pura di Desa Pejeng dan Bedaulu. Akan tetapi, saat itu memang tidak ditemukan struktur candi yang masih insitu. Apabila kelangkaan struktur candi ini dianggap karena tidak adanya tradisi pembuatan candi pada masa Bali kuno, tentunya sangat tidak tepat, mengingat bukti-bukti perkembangan agama Hindu dan Buddha pada masa itu banyak ditemukan, baik berupa arca maupun tersirat dalam isi prasasti. Salah satu jawaban yang dapat menerangkan tidak adanya candi yang masih berdiri di Bali adalah adanya kesinambungan perkembangan agama, terutama Hindu, sejak masa Bali kuno hingga sekarang. Candi sebagai tempat pemujaan atau tempat beribadah, digunakan terus-menerus dan sedikit demi sedikit diperbaiki dan direnovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pendapat ini benar, diperkirakan pura-pura yang ada di Bali sekarang merupakan perkembangan atau kelanjutan suatu kompleks percandian. Meskipun tentunya hal ini tidak berlaku untuk seluruh pura di Bali, paling tidak terjadi pada sebagian pura, terutama yang berada di pusat perkembangan agama Hindu-Buddha pada masa Bali kuno, atau di lokasi kerajaan-kerajaan kuno. Temuan-temuan pada perempat terakhir abad ke-20 ternyata membenarkan dugaan tersebut.

Temuan-temuan arkeologi itu adalah candi Mengening, Banjar Saraseda, Tampaksiring; Pura Pegulingan, Banjar Basangambu, Tampaksiring; candi Wasan, Banjar Sakah, Sukawati, ketiganya di Kabupaten Gianyar. Temuan ke-4 terdapat di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng.

Candi Mengening diteliti pada tahun 1982, dalam ekskavasi yang dilakukan, ditemukan bilik candi dan lingga-yoni, di bawahnya ditemukan pedagingan (sesajen) berupa benda-benda emas, perak, dan tembaga, antara lain berbentuk kura-kura, naga, bunga padma, dan jarum. Candi Mengening ini sudah berhasil dibina ulang dan sekarang berdiri tegak kembali dalam bentuk

Foto 6.3 Pura Pegulingan Tampaksiring, Bali
(*Sumber*: A.A. Oka)

candi bergaya Jawa Tengah. Candi ini berlatar belakang agama Hindu.[165] Candi Mengening terletak tidak jauh dari Pura Mengening dan di dekatnya terdapat sumber air yang disebut Yeh Mengening.

Pada waktu masyarakat hendak memperbaiki pelinggih Padmasana Agung di Pura Pegulingan, ternyata mereka menemukan sisa-sisa bangunan kuno dari batu padas. Dari ekskavasi diketahui bahwa di bawah pelinggih Padmasana Agung terdapat struktur bangunan berdenah segi delapan. Fondasi struktur bangunan tersebut membentuk jari-jari dengan delapan garis sumbu, di atasnya terdapat miniatur stupa dari batu padas setinggi 80 cm. Pada salah satu sisi miniatur stupa ini terdapat semacam pintu menuju ruangan di dalam stupa tersebut. Di dalam ruangan terdapat arca Buddha kecil dari emas, dalam sikap berdiri. Kecuali miniatur stupa di dalam fondasi juga ditemukan kotak batu berisi sejumlah meterai tanah liat berinskripsi mantra Buddha. Berdasarkan bentuk miniatur stupa tersebut, struktur dibangun kembali dan sekarang telah berdiri sebuah stupa di lingkungan pura Pegulingan, semua temuan dari fondasi (miniatur stupa, arca Buddha, dan meterai tanah liat) ditempatkan atau disimpan di dalam stupa baru tersebut.[166]

Candi Wasan ditemukan di lingkungan Pura Puseh Wasan. Struktur candi yang masih tersisa adalah kaki candi. Dari fragmen bangunan yang ditemukan dalam ekskavasi, diperkirakan seluruh bangunan candi sampai atap dibuat dari batu padas. Di samping candi terdapat kolam berdinding batu padas juga. Meskipun penelitian belum selesai dan masih terus dilanjutkan, sudah diketahui latar belakang keagamaannya, yaitu Hindu didasarkan atas temuan Lingga-Yoni.[167]

Temuan dari Kabupaten Buleleng adalah sisa-sisa sebuah stupa dari bata, berdenah oktagonal, diapit oleh dua bangunan stupa perwara. Bangunan berdenah oktagonal lebih besar dibandingkan dengan kedua bangunan lainnya. Di dalam salah satu bangunan stupa perwara terdapat sumur yang menyimpan sejumlah stupika tanah liat beserta meterai berinskripsi mantra Buddha dalam huruf Pre-Nagari dan beberapa meterai berelief Buddha dan Bodhisatwa. Temuan dari Kalibukbuk ini di perkirakan berasal dari abad VIII–IX M, berdasarkan atas bentuk huruf pada meterai berinskripsi.[168]

---

[165] A.A. Gede Oka Astawa, 2006, hlm. 100

[166] Ibid., hlm. 98–99

[167] Ibid., hlm. 102–103

[168] Ibid., hlm. 100–102

B. Keadaan Masyarakat

1. Struktur Birokrasi

a. Senapati

Untuk mengetahui susunan pemerintahan raja-raja Bali pada masa lampau, terdapat banyak kesukaran. Hal ini disebabkan tidak semua raja yang pernah memerintah di Bali meninggalkan keterangan-keterangan yang dapat kita pergunakan untuk menyusun gambaran tentang susunan pemerintahan pada masa itu.

Di antara raja-raja Bali yang banyak meninggalkan keterangan tertulis berupa prasasti yaitu raja Anak Wungsu, Jayasakti, dan Jayapangus.[169] Jumlah prasasti yang ditinggalkan mereka cukup mencolok apabila dibanding dengan raja Ragajaya yang hanya meninggalkan sebuah prasasti saja. Demikian pula halnya dengan raja yang memerintah sebelum Anak Wungsu, yaitu Marakatapangkaja. Dari raja ini hanya ditemukan empat buah prasasti.[170] Ada juga raja Bali lainnya yang meninggalkan cukup banyak prasasti yaitu raja Ugrasena. Akan tetapi, sayangnya dari prasasti-prasasti itu tidak banyak diperoleh gambaran tentang susunan pemerintahan pada waktu itu. Untuk mengatasi hal ini, di sini akan dicoba digambarkan susunan pemerintahan di Bali pada masa lampau dengan mempergunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari prasasti raja Anak Wungsu, Jayasakti, Jayapangus, dan beberapa raja lainnya.

Dalam pemerintahan, raja dibantu oleh suatu Badan Penasihat Pusat. Dalam prasasti yang tertua (804 S–836 S), badan itu disebut *panglapuan*, samohanda senapati di *panglapuan*, pasamaksa, dan palapknan.[171]

Sejak masa pemerintahan Gunapriyadharmmapatni dan Udayana, Badan Penasihat Pusat itu disebut dengan istilah pakirakiran i jro makabehan. Badan ini beranggotakan:

a. Beberapa orang Senapati;
b. Pendeta Siwa dan Buddha (beberapa orang mpungku).

---

[169] Jumlah prasasti raja Anak Wungsu yang sudah diketemukan semuanya ada 28 buah, ditambah dengan beberapa prasasti singkat lainnya yang terdapat di Goa Gajah, Gunung Kawi, Gunung Panulisan, dan Sangsit. Lihat PB, I, hlm. 22 dan 24

[170] Di dalam Ancient History of Bali (Goris) diterangkan bahwa prasasti dari raja Marakata ada enam buah. Dua buah di antaranya masih diragukan karena tidak menyebut nama raja

[171] R. Goris, Sejarah Bali Kuno, hlm. 13

Istilah pakirakiran i jro makabehan ini mungkin sekali berasal dari kata kirakira[172] yang berarti petugas atau jabatan yang berkewajiban memberi tafsiran atau nasihat. Kata pakirakiran ini mungkin juga berarti pertemuan, jadi semacam pasamuhan.[173]

Menurut Goris para senapati pada masa lampau dapat dibandingkan dengan punggawa pada zaman kerajaan Gelgel dan Klungkung.[174] Di daerahnya sendiri mereka juga berkuasa di bidang kehakiman merangkap sebagai hulubalang,[175] dan juga mempunyai semacam *panglapuan* sendiri.

Pada sekitar abad IX Masehi para senapati itu terdiri dari: 1. *Senapati Sarbwa*: Kiha, Kumpi Addhi, dan Kumpi Dyah Sanat,[176] 2. *Senapati Dinganga*: Prajuna, Atri, dan Cakra, 3. Senapati Danda: Kumpi Marodaya.

Menurut prasasti dari tahun 804 S sampai dengan tahun 836 S, jumlah senapati hanya tiga orang. Selain itu, nama *Senapati Sarbwa* selalu disebut paling dahulu, kemudian menyusul *Senapati Dinganga* dan baru yang terakhir Senapati Danda yang hanya disebut sekali saja di dalam prasasti yang tertua (804 S). Selama masa antara tahun 804 S hingga tahun 836 S terjadi beberapa kali pergeseran jabatan, misalnya *Senapati Sarbwa* yang pada tahun 804 S dijabat oleh Kiha, pada tahun 818 S[177] diganti oleh Kumpi Addhi. Kemudian pada tahun 833 S[178] diganti oleh Kumpi Dyah Sanat. Sampai tahun 836 S[179] kedudukan ini tetap dipegang oleh Kumpi Dyah Sanatkumara. Hal yang sama juga terjadi pada jabatan *Senapati Dinganga*. Pada tahun 804 S yang menjadi pejabat ialah Prajuna, lalu pada tahun 818 S jabatan ini dipegang oleh Atri. Kemudian pada tahun 833 S sampai dengan tahun 836 S Cakra menduduki jabatan *Senapati Dinganga*.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Adipati Sri Kesari Warmmadewa (835 S), tidak diperoleh keterangan apa pun mengenai susunan pemerintahan pada masa itu. Hanya diketahui bahwa *panglapuan* waktu itu tidak lagi terletak di *Singhamandawa*, tetapi di Singhadwala.[180] Setelah pemerintahan Sri Kesari

---

172 R. Goris, PB, II, hlm. 261. M.M. Sukarto, "Struktur Pemerintahan . . . ", catatan no. 44

173 R. Goris, ibid.; M.M. Sukarto, ibid, catatan no. 45

174 R. Goris, Sejarah Bali Kuno, hlm. 13; M.M. Sukarto, ibid, catatan no. 48

175 Ibid; M.M. Sukarto, ibid, catatan no. 49

176 PB, I, 001, 002, 003, hlm. 53–56

177 PB, 1, 002, hlm. 45–55

178 PB, I, 003, hlm. 56–57. Perkataan kumpi berarti: ketua, orang tua, senior

179 PB, I, 005, hlm. 59–60

180 Menurut R. Goris (PB, II, hlm. 308-309), *Singhamandawa* tidak sama dengan Singhadwala. Di mana letak kedua kota (kerajaan) tersebut belum jelas

Warmmadewa yang memerintah di Bali adalah raja Ugrasena. Raja ini mulai memerintah pada tahun 837 S sampai tahun 864 S (888 S). Para Senapati pada masa pemerintahannya yaitu: 1. *Senapati Sarbwa*: Talaga dan Kumpi Anug, 2. *Senapati Dinganga*: Kumpi Gowinda dan Astra. Seperti juga pada masa-masa sebelumnya, pada masa pemerintahan raja Ugrasena juga terjadi beberapa pergeseran atau mutasi pejabat pemerintahan.

Dalam masa pemerintahan Sang Ratu Sri Haji Tabanendra Warmmadewa dan Sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Warmmadewi (Dharmmadewi) tidak diperoleh satu pun keterangan tentang jabatan Senapati di dalam prasasti yang mereka keluarkan, meskipun tidak berarti bahwa pada zaman pemerintahan Haji Tabanendra tidak dikenal jabatan Senapati.[181] Kemudian pada masa pemerintahan Sang Ratu Sri Indra Jayasingha Warmmadewa kita hanya mengetahui *Senapati Sarbwa*. Jabatan ini dipegang oleh Tuhanda. Dalam masa pemerintahan Sang Ratu Sri Janasadhu Warmmadewa kita hanya memperoleh Senapati Wrsabha saja, sedangkan Senapati lainnya tidak satu pun disebut di dalam prasastinya (897 S).

Lebih lanjut di dalam pemerintahan Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi (905 S) mulai muncul jabatan baru yaitu Senapati Dalmbunut dan Senapati Waranasi. Di samping itu, kita jumpai pula Senapati Wrsabha, *Senapati Dinganga*, dan *Senapati Sarbwa*. Nama-nama pejabatnya ialah: 1. *Senapati Sarbwa*: Sumbul; 2. *Senapati Dinganga*: Sumbul; 3. *Senapati Dalmbunut*: Toha Kulup; 4. *Senapati Waranasi*: Tuha Neko;, 5. *Senapati Wrsabha*: Ida Kumpi Tuha Masigi. Perlu ditambahkan di sini bahwa Ida Kumpi Tuha Masigi ini telah menjabat kedudukan Senapati Wrsabha sejak masa pemerintahan raja Janasadhu Warmmadewa (897 S).

Pada zaman pemerintahan Gunapriyadharmmapatni dan Udayana, Badan Penasihat Pusat dikenal dengan sebutan Senapati ser nayaka di pasamaksa palapknan makasupratibaddha atau Sang Senapati ser nayaka ring pasamaksa palapknan makabehan. Badan ini beranggotakan Mpungku Sogata Maheswara dan para Senapati. Mereka adalah: *1. Senapati Sarbwa:* Pu Mahogra*; 2. Senapati Dinganga:* Sinumbul; 3. *Senapati Pinatih:* Dyah Mahogra, Pu Tabu, Pu Maruta; 4. *Senapati Dalmbunut:* Tuha Buñcang; 5. *Senapati Wrsabha:* Tuha Pradhana, Pu Dusun; 6. *Senapati Kuturan:* Dyah Kayop, Dyah Kuting; 7. *Senapati Waranasi:* Tuha Gato; 8. *Senapati Mañiringin:* Tuha Tabu, Dyah Gawaksa.

[181] Kemungkinan ini tetap ada sebab prasasti-prasasti raja Tabanendra yang sudah diketemukan tidak lengkap, terutama bagian yang biasanya memuat nama-nama pejabat

Pada masa pemerintahan Gunapriyadharmmapatni dan Udayana juga ada mutasi di antara para pejabat Senapati. Kedudukan *Senapati Sarbwa* yang pada tahun 911 S dijabat oleh Syumbul (tahun 905 S, Sumbul) diganti oleh Pu Mahogra pada tahun 916 S. Pu Mahogra atau Dyah Mahogra ini pada tahun 915 S menjabat sebagai Senapati Pinatih. Hal ini berarti bahwa Dyah Mahogra naik pangkatnya menjadi *Senapati Sarbwa* dan gelarnya dari Dyah menjadi Pu. Hal yang sama juga terjadi dengan beberapa pejabat lainnya.

Setelah pemerintahan Gunapriya dan Udayana, pada tahun 938 S muncul seorang putri sebagai raja di Bali. Putri ini bergelar Sang Ratu Sri Sang Ajñadewi. Pada masa pemerintahannya yang menjadi *Senapati Dinganga* ialah Pu Pr*ajña*. Kemudian kedudukan Senapati Tunggalan dipegang oleh Dyah Kayop, yang pada tahun 933 S memegang jabatan *Senapati Kuturan*. Jabatan *Senapati Kuturan* pada tahun 938 S ini dipegang oleh Pu Gawaksa, yang pernah menjabat kedudukan sebagai *Senapati Mañiringin* di tahun 933 S.

Sewaktu pemerintahan raja Marakatapangkaja, kita jumpai para senapati yang terdiri dari: 1. *Senapati Balmbunut*: Pu Wijñana; 2. *Senapati Dinganga:* Pu Kandara, Pu Angharas; 3. *Senapati Tunggalan*: Pu Gosaya; 4. *Senapati Pinatih*: Pu Gupit; 5. *Senapati Danda*: Pu Mangrawas, Pu Kakiya; 6. *Senapati Kuturan*: Mapañji Putuputu; 7. *Senapati Mañiringin*: Dyah Kandara, Pu Kahaji, Mapañji Jugul; 8. *Senapati Asba*: Pu Yukti.

Berdasarkan prasasti-prasasti raja Anak Wungsu yang telah ditemukan dan meliputi masa dari tahun 971 S hingga tahun 999 S kita menjumpai sepuluh jabatan Senapati, yang terdiri dari: 1. *Sang Senapati Balmbunut*: Pu Manggala, Pu Amrta (Ambrta), Pu Jinakara; 2. *Sang Senapati Dinganga*: Pu Sahaya (Sahaja), Pu Manggala, Pu Sugin, Pu Mangurak; 3. *Sang Senapati Sarbwa*: Pu Bahuta; 4. *Sang Senapati Mañiringin*: Pu Lmbu, Pu Tatur, Pu Jinawan; 5. *Sang Senapati Wrsanten*: Pu Tatur, Pu Unggang; 6. *Sang Senapati Danda*: Pu Bodhisatwa, Pu Madon; 7. *Sang Senapati Pinatih*: Pu Manggala; 8. *Sang Senapati Kuturan*: Pu Bodhisatwa; 9. *Sang Senapati Waranasi*: Pu Surajaya; 10. *Sang Senapati Tunggalan*: ?.

Hampir di dalam semua prasastinya, kecuali sebuah, nama *Sang Senapati Balmbunut* selalu disebut pada deretan paling atas, baru kemudian disusul oleh *Senapati Dinganga*, *Senapati Sarbwa*, dan para Senapati lainnya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa di antara para Senapati yang sepuluh jumlahnya, *Senapati Balmbunut* yang menduduki tempat tertinggi. Akan tetapi, harus diingat bahwa tidak semua para Senapati disebut di dalam tiap prasasti. Misalnya prasasti Lutungan hanya menyebut enam deretan yaitu: *Senapati Balmbunut, Dinganga, Sarbwa, Mañiringin, Wrsanten,* dan *Danda;* sedangkan

prasasti Pacanigayan hanya menyebut deretan *Senapati Dinganga, Wrsanten, Mañiringin*, dan *Waranasi.*

Para Senapati pada masa pemerintahan Suradhipa, Jayasakti, Ragajaya, dan Jayapangus adalah sebagai berikut: Zaman raja Suradhipa: 1. *Senapati Balmbunut*: Pu Angharas; 2. *Senapati Dinganga*: Pu Kakiya; 3. *Senapati Sarbwa*: Pu Kahaji; 4. *Senapati Mañiringin*: Pu Yogiswara; 5. *Senapati Wrsanten*: Pu Kulahkalih.[182] 6. *Senapati Kuturan*: Pu Caken.

Kemudian zaman raja Jayasakti: 1. *Senapati Dinganga*: Mpu Kahaji, Mpu Jagahaji; 2. *Senapati Sarbwa*: Mpu Anggatanding; 3. *Senapati Mañiringin*: Mpu Singhasarana; 4. *Senapati Wrsanten*: Mpu Singhamor, Mpu Singhanada, Mpu Tanmajarah; 5. Senapati Danda: Mpu Jagahaji, Mpu Tanmajarah, Mpu Yasorana; 6. *Senapati Kuturan*: Mpu Anggamenang, Mpu Angurucuk, Mpu Curigaraga, Mpu Jagahita; 7. Senapati Waranasi: Mpu Bisatanding, Mpu Kahaji.

Pada zaman raja Ragajaya: 1. *Senapati Balmbunut*: Pu Tamajarah; 2. *Senapati Dinganga*: Mpu Kahaji; 3. *Senapati Sarbwa*: Mpu Curigaraga; 4. *Senapati Mañiringin*: Mpu Wasangsara; 5. *Senapati Wrsanten*: Mpu Singhamor; 6. Senapati Denda: Mpu Yasarana; 7. *Senapati Kuturan*: Mpu Angdonamang; 8. Senapati Waranasi: Mpu Aduwasana.

Pada zaman raja Jayapangus: 1. *Senapati Balmbunut*: Mpu Anakas; 2. *Senapati Dinganga*: Mpu Udasina, Mpu Anglawung, Mpu Daksina; 3. *Senapati Sarbwa* : Mpu Singsih, Mpu Hanuraga; 4. *Senapati Mañiringin*: Mpu Amurulung; 5. Senapati Denda: Mpu Hitawasana, Mpu Anakas; 6. *Senapati Kuturan*: Mpu Nirjanma; 7. Senapati Waranasi: Mpu Udasina.

Dari daftar nama-nama tersebut di atas terlihat bahwa ada beberapa orang yang tetap menjabat suatu jabatan pada masa raja berikutnya. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pada masa itu selain pejabat Senapati juga masih banyak terdapat para petugas lainnya. Pada zaman raja Jayapangus misalnya, terdapat petugas atau pejabat: *Samgat ser krangan, Samgat ser kahyangan, Samgat nayakan buru, Samgat caksu wsi, Samgat taji, Nayakan jawa*, dan lain-lainnya. Perkataan Ser berarti: kepala atau pemimpin. Krangan berarti: orang yang tidak mempunyai keturunan, caksu berarti: mata atau pengawas, taji berhubungan dengan sabungan ayam (pisau taji), sedangkan ser *kahyangan* berarti pemimpin atau pengawas bangunan suci. Kecuali itu, juga masih terdapat kelompok para pendeta, baik pendeta agama Siwa maupun Buddha.

---

[182] Seharusnya disebut Kulangkaling

b. Pendeta Siwa dan Buddha

Golongan kedua yaitu para pendeta, yang di dalam prasasti-prasasti yang tertua dikenal dengan sebutan *bhiksu*. Di dalam prasasti Bukit Cintamani terdapat keterangan tentang pemberian izin kepada para *bhiksu* untuk membangun pertapaan. Perintah ini diberikan kepada Senapati Danda bersama-sama dengan *bhiksu* untuk melaksanakan pembangunan pertapaan tadi (bangunen partapanan satra). Nama ketiga *bhiksu* itu adalah: Siwakangsita, Siwanirmmala, dan Siwaprajña. Kalau dilihat unsur namanya yaitu Siwa, mengingatkan kita kepada agama Siwa (Hindu).

Pada tahun 836 S untuk pertama kalinya disebutkan adanya golongan yang memegang jabatan dalam pemerintahan. Mereka itu adalah Ida Mpu Dahyang Agnisarmma, Srinaga, Bajra, dan Tri. Kedudukan mereka di dalam pemerintahan sebagai Ser Tunggalan Lampuran. Baru mulai zaman pemerintahan Udayana, golongan mpungku Sewasogata yang merupakan wakil dari agama Siwa dan Buddha selalu disebut-sebut di dalam prasasti. Golongan ini tidak saja penting sewaktu dilangsungkan upacara-upacara agama, tetapi mereka ini dianggap mempunyai kekuatan gaib (magi) yang dapat membantu serta menguatkan raja. Sampai sekarang di Bali masih dikenal pendeta istana yang disebut bagawanta.

Di dalam prasasti-prasasti, golongan pendeta agama Siwa disebut dengan gelar Dang Acaryya, sedangkan golongan pendeta agama Buddha dengan gelar *Dang Upadhyaya*. Umumnya golongan pendeta Siwa lebih menonjol dan lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan pendeta agama Buddha. Sebelum zaman Anak Wungsu bahkan hampir tidak pernah disebut pendeta Buddha yang bergelar *Dang Upadhyaya*. Di dalam prasasti zaman Anak Wungsu dan sesudahnya pun jumlah pendeta agama Siwa lebih banyak dibandingkan dengan pendeta Buddha. Sebagai contoh misalnya di dalam prasasti raja Anak Wungsu, jumlah pendeta tinggi agama Siwa yang menggunakan gelar Dang Acaryya[183] paling sedikit 21 orang, sedangkan pendeta agama Buddha yang bergelar *Dang Upadhyaya* hanyalah 4 orang. Ini pun hanya disebut di dalam prasasti Bwah yang berangka tahun 999 S dan di dalam prasasti Jalan-tngah.

Sewaktu pemerintahan raja Ragajaya dan Jayapangus jumlah Dang Acaryya juga lebih besar. Prasasti dari raja Ragajaya (1077 S) menyebut 16 orang Dang Acarrya dan 5 orang *Dang Upadhyaya*.[184] Bahkan sampai sekarang pun di Bali persentase golongan agama Siwa (pendeta Siwa) jauh lebih banyak

---

[183] Gelar Dang Acarrya kadang-kadang juga digunakan oleh pendeta agama Buddha, tetapi hal ini jarang sekali (PB, II, hlm. 209). Sebagai contoh misalnya di dalam prasasti Julah (R. Goris, no. 351) dan prasasti Air Hawang (R. Goris, no. 305)

[184] Ktut Ginarsa, "Prasasti Baru Raja Ragajaya", MISI, 1973, hlm. 40–41

jika dibandingkan dengan golongan Buddha (pendeta Buddha). Sekarang pendeta Siwa (pedanda Siwa)[185] antara lain ditandai dengan bentuk rambut (sanggul) yang disebut prucut,[186] yaitu semacam sanggul kecil di tengah-tengah kepala. Pendeta Buddha (pedanda Buddha) umumnya berambut panjang atau berkepala botak. Gelar tertinggi untuk pendeta di Bali ialah Ida Pedanda (Ida Pranda), dan untuk pendeta istana (bagawanta) disebut Ida Pedanda Agung. Pengiring pendeta dinamakan baru dan tugasnya membawa alat perlengkapan antara lain tempat sirih atau pacanangan.[187]

Selain itu para pendeta tinggi baik agama Siwa maupun agama Buddha (saiwasogata atau sogata maheswara) sewaktu pemerintahan Anak Wungsu dan pengganti-penggantinya disebut juga sebagai mpungku. Sebagai contoh Mpungkwing Haritantan (Mpungku-ing Haritantan) yang berarti yang mulia pendeta(ku) di Haritantan. Gelar Dang Acaryya tidaklah merupakan monopoli para pendeta istana saja, tetapi pejabat-pejabat lainnya seperti Samgat, Rama kabayan, dan Dewakarmma[187] boleh juga menggunakan gelar ini.

Seperti halnya para Senapati, para pendeta tinggi juga mengalami pergeseran kedudukan. Sebagai contoh pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu, Dang Acaryya Karnika pada tahun 975 S menjabat kedudukan pendeta di Kañyabhawana (prasasti Lutungan),[188] tetapi pada tahun 980 S ia menjabat kedudukan pendeta di Binor (prasasti Sukhapura).[189] Dang Acaryya Jatasmara pada tahun 975 S menjabat pendeta di Bañutiga (prasasti Lutungan), tetapi delapan belas tahun kemudian, yaitu tahun 993 S, menjadi pendeta di Dharmmahañar (prasasti Antakuñjarapada).[190] Demikian pula Dang Acaryya Gadhisa pada tahun 975 S menjabat pendeta di Lokeswarawijaya (prasasti Lutungan), tetapi dua puluh empat tahun kemudian, yaitu tahun 999 S

---

[185] Perkataan pedanda mungkin berasal dari pada ida (pada = kaki, ida = da = untuk penghormatan). Cf. Cokorda (Cokor Ida). Cokor = kaki. Jawa Sampeyan Dalem

[186] Pada waktu upacara berlangsung, pendeta Siwa juga memakai ketu. Lihat De Kat Angelino, Mudra's op Bali, 1922, gambar no. 30–36

[187] Pacanangan (bentuk krama) dari kompek atau gandek (bentuk ngoko). Perkataan baru mungkin dapat dibanding dengan nama-nama pusaka di Jawa, seperti Kyai Baru Kuping dan Kyai Baru Klinting. Selanjutnya perkataan gandek dapat dibanding dengan abdi-dalem gandek di kraton Yogyakarta yang bertugas sebagai pesuruh (Th.G.Th. Pigeaud, Javaansch-Nederlandsch Handwoordenboek, hlm. 116)

[187] R. Goris menduga dewakarmma sebagai Dorpsofferaar (yang melakukan upacara korban di desa). Lihat PB II, hlm. 237

[188] R. Goris, no. 404 a. Prasasti Lutungan sekarang disimpan di Desa Dawan

[189] R. Goris, no. 406. Prasasti Sukhapura disimpan di Desa Sangsit atau Blantih

[190] R. Goris, no. 436. Prasasti Antakuñjarapada disimpan di Pandak Bandung

menjabat pendeta di Kañyabhawana (prasasti Bayung-Bunar-Srimukha).[191] Dang Acaryya Guhyananda yang semula menjabat Samgat makarun pada tahun 975 S (prasasti Lutungan) dua puluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 995 S (prasasti Bila),[192] naik kedudukannya menjadi Mpungkwing Garudasara. Menurut Goris kedudukan Samgat lebih rendah dibandingkan Senapati, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nayaka.[193] Akan tetapi, gelar Dang Acaryya yang dipakai oleh Guhyananda baik sewaktu menjabat Samgat makarun maupun setelah menjadi Mpungku menunjukkan bahwa ia termasuk ke dalam kelompok pendeta tinggi.

Berdasarkan prasasti-prasasti tersebut di atas dapat diketahui bahwa beberapa nama tempat kadang-kadang disebut lengkap, tetapi kadang-kadang pula hanya singkatan atau persamaannya (sinonim), seperti: Bañutiga (Bañutelu), Kañya (Kañyabhawana), Lokeswara (Lokeswarawijaya), dan Winor (Binor), demikian pula mungkin Garudasara sama dengan Bañugaruda (sara bahasa Sanskerta sama dengan santen dalam bahasa Bali baru atau santan dalam bahasa Indonesia.

Dalam zaman pemerintahan Anak Wungsu sebegitu jauh kita hanya mengenal empat orang pendeta tinggi golongan agama Buddha dengan gelar *Dang Upadhyaya*. Selain itu, masih terdapat beberapa pendeta dan Samgat lain seperti halnya golongan agama Siwa. Golongan ing kasogatan misalnya mengenal Samgat mangirengiren,[194] sedangkan golongan ing kasaiwan mengenal Samgat makarun dan Samgat juruwadwa. Menarik perhatian pula bahwa agama Buddha mengenal beberapa pejabat tinggi yang disebut Wandami. Apa tugas mereka ini belum jelas, tetapi mungkin semacam juru bicara.[195]

---

[191] R. Goris, no. 436. Prasasti Bayung-Bunar-Srimukha disimpan di Desa Serai

[192] R. Goris, no.441. Prasasti Bila disimpan di Sawan atau Bila. Prasasti tersebut meskipun mengenai Desa Bila tetapi tempat penyimpanannya di Sawan. Mungkin sewaktu dibaca oleh peneliti asing (Belanda) beberapa buah prasasti yang berasal dari beberapa buah desa dikumpulkan di sebuah tempat sehingga menimbulkan kesalahan (kekeliruan). Demikian pula sewaktu dikembalikan ada beberapa yang tertukar. Namun, harus diakui bahwa banyak prasasti di Bali yang tersimpan di desa lain. Prasasti Kapal misalnya sekarang disimpan di Desa Yeh-Gangga, prasasti Kawakadan (Ked) di Taro-kaja, prasasti Katulikup (Tulikup) di Mantring, prasasti Dayan-kayu (Denkayu) di Mengwi (Banjar Gambang), prasasti Sukhawati di Pliatan, dan lain-lainnya

[193] R. Goris, op. cit., hlm. 302

[194] R. Goris, op. cit., hlm. 274

[195] Wandami dalam bahasa Sanskerta berarti: saya berbicara. Goris membandingkannya dengan parujar di dalam prasasti Jawa kuno lainnya

Selain *Pakirakiran-i jro makabehan* yang merupakan Badan Penasihat Pusat, pada masa dahulu juga masih terdapat beberapa petugas atau pejabat lain, baik yang tergolong pegawai tinggi, menengah, maupun pegawai rendah. Hanya tugas-tugas mereka mereka ini belum diketahui dengan jelas, tetapi yang penting sejak zaman dahulu telah ada pembagian tugas yang baik. Artinya persoalan yang tidak penting (kecil) cukup dilaporkan kepada petugas desa atau petugas setempat, tetapi persoalan penting (besar) lainnya kepada pejabat tinggi. Sebagai contoh misalnya, kematian seseorang harus dilaporkan kepada petugas Paramadyastha (Adhikaranakranta atau Adhikaranapura) dan tidak kepada Mpungku di Burwan.[196] Akan tetapi, kematian binatang, kerbau, dan babi cukup kepada *Sang Mathani* (semacam kepala desa) dan tidak kepada Pamwatan (Pemuat, Pemegang?) atau kepada Mpungku di Burwan.[197] Di dalam prasasti Sukhawati[198] misalnya dikatakan, apabila binatang kuda, lembu, dan lebih-lebih manusia mati terjatuh di dalam sungai, supaya dengan segera dilaporkan kepada Mpu Sthapaka (Pendeta) atau kepada Pakirakiran (Penilai), jika tidak kepada seorang di antara Paramadyastha (Penengah). Perlu dicatat bahwa golongan pejabat terkecil di desa pada waktu itu rupa-rupanya yang disebut Hatur tangganya, yaitu semacam pengatur tetangga. Jabatan itu masih tetap digunakan dalam zaman pemerintahan Jayapangus.

Kemudian masih ada beberapa orang Samgat, tetapi sampai sekarang masih sulit untuk mengetahui, apakah mereka ini masuk kelompok ing kasogatan ataukah ing kasaiwan, kecuali mereka yang sudah jelas dimasukkan ke dalam golongan agama tertentu.[199]

Para Samgat itu antara lain: *Samgat mañuratang-ajña ri hulu* (Samgat penulis perintah di atas), *ri tngah* (di tengah), *ri wuntat* (di belakang), *Samgat pituha, Samgat caksu karanapura, Samgat caksu karanakranta, Samgat hiru,* dan lain-lainnya.

Selain para Samgat, masih terdapat juga pejabat-pejabat lainnya yang tidak mungkin semua diketahui fungsinya dengan tepat. Bahkan tugas mereka pun masih gelap andaikata dapat diketahui nama jabatannya. Caksu misalnya berarti mata (mata-mata), mungkin ini merupakan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu. Nayaka berarti pemimpin, pembimbing, tetapi tugas utama mereka tidak dapat diketahui dengan pasti. Demikian pula Pasukganti

---

196 M.M. Sukarto, "Penyelidikan empat buah prasasti ...", 1967, hlm. 18

197 Desa Burwan (Buruan), sekarang terletak di dekat Kutri (sebelah barat Gianyar)

198 Goris, no. 435. Prasasti lainnya yang menyebut Sukhawati dari raja Jayapangus ditemukan di Desa Pliatan (sebelah tenggara Ubud)

199 Makarun dan samgat juruwadwa dari golongan agama Siwa

(*Pañjingganti*), Pamudi, Samgat bonbuluh (buluh = bambu?), Banjar (petugas banjar?), dan lain-lainnya. *Mañuratang* atau Panulisan berarti penulis. Akan tetapi, seperti telah diterangkan di atas, ada tiga orang penulis perintah (*ajña*), yaitu di atas (hulu), tengah (tngah), dan bawah atau belakang (wuntat). Juru gusali mungkin pejabat yang berhubungan dengan pekerjaan logam dan tugasnya mengurusi para pande wsi, pande mas, pande tambra, dan pande kangsa. Mabwat haji mungkin semacam petugas pajak sekarang atau seseorang yang melakukan tugas gugur-gunung (kerja rodi).

2. Golongan dalam Masyarakat

Struktur masyarakat di Bali pada waktu yang lampau agak sukar diketahui dengan jelas karena kurangnya bahan-bahan untuk penelitian. Akan tetapi, jika kita ingat tradisi turun-temurun di Bali pada waktu sekarang, mungkin kita dapat membayangkan bahwa suasana masyarakat pada masa dahulu sebagian masih tetap tercermin juga pada waktu sekarang. Masyarakat sebelum masa pemerintahan Gunapriya dan Udayana, hidup berkelompok-kelompok dalam suatu daerah atau wanua. Penduduknya disebut dengan istilah anak wanua. Setelah masa pemerintahan Udayana, di samping wanua (wanwa) kita juga mengenal istilah karaman[200] dan thani. [201] Penduduknya disebut anak thani atau tanayan thani.

---

[200] Perkataan karaman mempunyai beberapa arti, antara lain: kelompok para rama, desa yang dikuasai para rama. Kata rama (rama) berarti: pejabat (ayah). Juga dapat berarti: kepala desa (kepala rumah tangga). Kadang-kadang karaman juga dapat dibanding dengan pengertian kalurahan (dipimpin lurah), kabupaten (dipimpin bupati); dan lain-lain. Dalam bahasa Jawa baru kraman berarti: berontak. Yang penting di dalam prasasti terjemahan karaman harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya, apakah berarti: kelompok para pejabat (rama), kelompok para kepala keluarga (rama) atau anggota desa cf. Bali krama desa. Perkataan rama dapat dipisahkan menjadi ra honorefic, yang terhormat dan ama (ayah, ketua)

[201] Perkataan thani kerap kali dijumpai di dalam prasasti Bali. Lambat laun perkataan ini berubah menjadi tani seperti yang kita kenal sekarang. Selain itu, juga terdapat perkataan sang thani atau *Sang Mathani*. Prasasti Kawakadan dari raja Anak Wungsu memuat keterangan "ateher karaman-i kawakadan sapanjing thani wnanga yamunuha kbo sapi" (kemudian karaman di Kawakadan dengan seluruh penduduknya diperbolehkan membunuh kerbau dan sapi). Di dalam prasasti Pangupetan dari Jayasakti dikatakan tentang Desa Pangupetan yang kemudian lepas dari Desa Pacanigayan (mari sathani lawan wwang i pacanigayan). Kalimat ini berarti: tidak lagi satu ikatan, satu thani dengan penduduk (orang) Pacanigayan. Akan tetapi, di dalam prasasti Pangupetan juga terdapat perkataan: ring thani karaman-i pangupetan yang berarti antara lain: kepada penduduk Desa Pangupetan (para petani daerah Pangupetan). Nama Pangupetan dan Pacanigayan sekarang berubah menjadi Campetan dan Cenigaan di daerah sekitar Kintamani (G. Panulisan). Perlu diketahui bahwa penelitian prasasti Bali lainnya akan memberikan gambaran yang lain pula. Sama halnya dengan karaman, terjemahan thani harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya

Sebagian besar penduduk pada masa lalu rupa-rupanya hidup bercocok tanam. Hal ini jelas dari istilah anak thani yang menunjukkan adanya masyarakat agraris pada masa yang lalu, jelasnya masyarakat petani. Di desa orang-orang tua yang tergolong pandai juga mendapat penghargaan yang baik. Mereka itu hadir dalam upacara-upacara tertentu, malahan kadang-kadang bertindak sebagai saksi. Sebagai contoh misalnya di dalam prasasti Buyan-Anggas-Taryungan dari zaman raja Anak Wungsu yang menyebut golongan Tuha-tuhanya ring desanya atau Tuha-tuha. Kabayan juga tergolong seorang Tuha-tuha.

Sewaktu pemerintahan Anak Wungsu masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan caturwarna dan golongan luar kasta (budak). Pembagian menjadi caturwarna dan budak itu sebetulnya berasal dari India (agama Hindu). Sebelum raja Anak Wungsu, sumber prasasti tidak menyebutkan secara jelas pembagian masyarakat atas empat kasta meskipun kita mengetahui bahwa masyarakat telah terbagi menjadi beberapa kelompok.

Di dalam prasasti Bila yang berangka tahun 995 S, kita menjumpai keterangan antara lain sebagai berikut:

> *... yawat ikanang wwang duracara tan yatna ri anugraha paduka haji irikang karaman i bila, sapasuk thani, brahmana ksatriya wesya sudra, hadyan hulun matuha rare lanang wadwan grahasta wiku, nayaka caksu para sandhibisa, asing umunarukta anugraha paduka haji, tka ring dlahaning dlaha, tasmat kabwataknanya patyananta, ...*
>
> ... apabila orang-orang jahat yaitu yang tidak memerhatikan anugerah raja kepada Desa Bila sewilayahnya dengan seluruh penduduknya, baik kaum brahmana, ksatriya, wesya, sudra, pemimpin, budak, tua muda, laki-laki perempuan; kepala rumah tangga, pendeta, pemimpin, pengawas maupun para sandhibisa, siapa pun yang mengubah-ubah anugerah paduka raja, sampai pada akhir zaman, akan selalu dihancurkan oleh kematiannya ....[202]

Jelaslah bahwa selain empat kasta juga terdapat golongan budak (hulun)[203] yang berada di luar kasta. Bahkan, sampai sekarang masyarakat Bali tetap masih mengenal pembagian masyarakat atas empat golongan (caturwangsa)[204] dan mengenal pula istilah Jaba yang berarti luar. Memang ada yang menyamakan kaum Jaba dengan kaum Sudra, tetapi banyak pula yang

---

[202] Prasasti yang tertua hanya menyebut golongan brahmana meskipun golongan lainnya (rakyat kecil) juga pasti ada

[203] Hulun juga berarti: hamba (budak). Hulun dapat digunakan untuk melunasi utang

[204] Pembagian masyarakat atas empat golongan tersebut masih sangat terasa di Bali Selatan, dan kebanyakan masih tetap menunjukkan gelar kastanya yang tinggi seperti Ida Bagus, Ida Ayu, Cokorda, dan Anak Agung. Di Bali Utara masyarakatnya lebih demokratis, bahkan di

beranggapan bahwa kaum Jaba berada di luar Triwangsa.[205] Selain itu, mereka tidak mau dianggap golongan yang paling rendah di antara urutan empat kasta. Mereka itu merasa terhina apabila disebut Sudra, sebab jika demikian mereka merupakan golongan bawahan kaum Triwangsa.[206] Pertentangan kasta di Bali, terutama antara golongan Jaba dan golongan Triwangsa, terjadi di sekitar tahun 1925 dan 1926. Golongan Jaba mendirikan organisasi sendiri dengan nama Suryakanta (1925)[207] dan golongan lainnya, yaitu Caturwangsa Derya Gama Hindu Bali,[208] mendirikan Bali Adnyana pada tahun 1926.[209]

Menarik perhatian bahwa budak pada waktu dahulu digunakan juga untuk melunasi utang. Di dalam prasasti Bwah yang berangka tahun 999 S antara lain menyebutkan:

> *... kunong ya tan aharp ya sumahura hutangnya, srahaknanya ikang rarai hulun, irikanang pradhana ....*
>
> (... apabila ia tidak mau melunasi utangnya, supaya menyerahkan seorang budak kanak-kanak kepada pemberi utang ...)

Perlu pula dicatat bahwa kaum atasan pada waktu dahulu juga sering berbuat jahat atau menyeleweng. Oleh karena itu, pegawai tinggi maupun pegawai menengah tidak luput pula mendapat peringatan dari raja. Pendek kata segala lapisan masyarakat, siapa saja yang berani berbuat jahat, artinya

---

Desa Tejakula (Bali Utara) apabila seseorang menanyakan: "Di mana rumah Dewa anu?", maka akan dijawab: Di sini tidak ada Dewa, kalau mau cari Dewa di Bali Selatan (Bangli, Klungkung, Gianyar)

[205] Terutama golongan Suryakanta yang tidak mau dianggap sama dengan golongan Sudra. Golongan tersebut lebih mengutamakan budi, memperbaiki ekonomi, melindungi kaum Jaba, dan mengubah adat yang bertentangan dengan kemajuan zaman. Sebaliknya golongan lainnya (Triwangsa) masih memegang teguh keturunan (kasta), di samping berusaha meneguhkan agama Hindu Bali (masih mengenal kasta), meneguhkan persaudaraan, kemajuan negara, memelihara kepercayaan di antara caturwangsa, memperbaiki adat yang bertentangan dengan zaman

[206] Yang dimaksud dengan Triwangsa yaitu: Brahmana, Ksatriya, dan Waisya, sedangkan Caturwangsa yaitu: Brahmana, Ksatriya, Waisya, Sudra. Selain itu, di Bali juga dikenal istilah Jaba yang berarti: luar (cf. The Outcaste, golongan luar kasta di India). Selain itu, di Bali juga ada pembagian masyarakat menjadi golongan Wong Majapahit (orang-orang keturunan Majapahit) dan Bali Aga (Bali Asli di daerah pegunungan). Selain itu, ada juga kelompok Pasek

[207] Suryakanta dipelopori oleh seorang guru bernama Ktut Nasa, sedangkan golongan lawan antara lain dipelopori oleh Goesti Tjakratanaja

[208] Disingkat menjadi Cwadega Hindu Bali

[209] Salah seorang pelopornya yaitu I Goesti Tjakratanaja. Lihat Ngurah Bagus, "Pertentangan kasta dalam bentuk baru pada masyarakat Bali", stensilan Faksas Udayana, 1969; M.M. Sukarto, "Singaraja and the population in the Northern Coast of Bali", paper pada Second Indonesian-Dutch Historical Conference di Ujungpandang, 26–30 Juni 1978

melanggar peraturan pemerintah, baik kaum Brahmana, Nayaka, Caksu, budak, mereka ini dimasukkan ke dalam golongan kelompok orang-orang jahat (*wwang duracara*). Pelanggar-pelanggar hukum ini dikutuk oleh raja supaya selalu hidup sengsara (*sadakala manggih papa*), putus ususnya (*rantan ususnya*), diterkam harimau (*panganning mong*), digigit ular berbisa (*patuka ing ula*), disambar petir (*sambarn ing glap*), dan lain-lainnya.

Di dalam keluarga masyarakat Bali sekarang dikenal urutan sebutan untuk anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan nama pengenal: Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Akan tetapi, untuk golongan brahmana dan ksatriya, anak pertama disebut Putu.[210]

Perkataan Wayan sebetulnya berasal dari wayahan (*wayah* = tua, *Made* dari *madya* = tengah, *Nyoman* dari nom = muda, dan *Ketut* dari tut = belakang, ikut (turut)). Urutan sebutan itu jelas dimulai sejak zaman pemerintahan raja Anak Wungsu.

Di dalam prasasti Buyan-Anggas-Taryungan (tidak berangka tahun)[211] disebut empat petugas Kabayan, masing-masing Kabayan Tuha, Kabayan Tengah, Kabayan Nom, dan Kabayan Ketut. Pada masa itu penamaan tersebut diperuntukkan bagi para petugas desa tertentu (Kabayan).[212] Akan tetapi, setelah mengalami perkembangan selama beberapa ratus tahun, kemudian khusus menjadi urutan nama pengenal anak dalam keluarga yaitu *tuha* = *wayan, tngah* = *made, nom* = *nyoman*, dan *ketut.*

3. Peraturan dan Hukum

Suatu hal yang menarik perhatian pada masa itu adalah bahwa masyarakat atau rakyat mempunyai semacam kebebasan berbicara. Mengenai ini dapat diketahui dari prasasti Kawakadan yang mengatakan bahwa penduduk Desa Kawakadan (sekarang Desa Ked di daerah Gianyar) diperbolehkan berbicara apa saja yang mereka kehendaki (*wnang-ucapenya sakaharepnya ngucapa*). Tentu saja hal ini hanya dalam batas-batas tertentu dan mereka tidak boleh membicarakan tentang pendeta Mpungku Pagyaya di Burwan (*tan-ucapen-i mpungku pagyaya i burwan*).

---

[210] Dengan adanya perkawinan antara kasta yang berbeda-beda, kemudian timbul pula sebutan-sebutan baru di kalangan masyarakat. Bahkan ada juga sementara golongan yang ingin mencari tingkat kasta yang lebih tinggi

[211] R. Goris, no. 433 (Manik Liu All.)

[212] Ada yang mengatakan perkataan kabayan dari akar-kata baya = tua, cf. dalam bahasa Indonesia sebaya = setua, seumur. Burung bayan = burung kakaktua

Sebetulnya rakyat jelata dengan didampingi oleh pejabat desa, jika dipandang perlu, diperkenankan menyampaikan usul atau keluhan secara langsung kepada raja,[213] meskipun perbedaan antara raja dan rakyat jelata sangat jauh. Ini membuktikan bahwa raja Anak Wungsu,[214] Jayasakti maupun Jayapangus betul-betul memerhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Jadi, dengan demikian kita mengetahui bahwa masyarakat pada zaman dahulu tidak hanya dibebani peraturan-peraturan yang bermacam-macam, tetapi mendapat pula beberapa kebebasan antara lain hak bebas bicara dan boleh menghadap raja secara langsung.[215]

Selain itu, peraturan-peraturan mengenai perkawinan, perbudakan, kematian, pencurian, dan sebagainya diatur dengan baik. Di dalam prasasti raja Jayapangus misalnya diuraikan tentang perkawinan dengan segala peraturannya.[216] Di dalam prasasti itu dikatakan bila seseorang kawin di desanya, untuk peresmiannya supaya membayar 1 ma dengan widig mangjalinya (?)[217] sebab demikianlah peraturannya sejak dahulu. Selain itu, tidak dikenai iuran pamapas sata ring sayatangan.[218] Apabila anak cucunya laki-laki dan perempuan kawin di desanya supaya membayar iuran pasubhaganitri(?) sebanyak 1 ma kepada orang tua-tua di desanya.[219]

---

[213] Bahwa rakyat kecil boleh secara langsung menyampaikan keluhannya kepada raja terbukti misalnya di dalam prasasti Lutungan dari tahun 975 S (R. Goris, no. 404 a). Di dalam prasasti ini disebutkan bahwa pejabat hulu kayu bernama *Kunong, mañuratang bernama Mpu Atmaja,* dan *rama kabayan bapa Sudanta* bersama-sama datang bersembah kepada duli paduka raja memohon anugerah setetes air suci dan mereka semuanya (Desa Lutungan dengan seluruh wilayahnya) hendak menyerahkan diri kepada bhatara di Antakuñjarapada (*tumibaken sarintennya ri bhatara ring antakuñjarapada*)

[214] Di dalam prasasti Lutungan (R. Goris, no. 404 a) dan prasasti Turuñan (R. Goris, no. 402) raja Anak Wungsu dikatakan sebagai raja yang penuh belas kasihan (*göng karunya pwa pinaka swabhawa paduka haji*) dan senantiasa memikirkan kesempurnaan dunia yang dikuasainya (nityasa kuminking sakaparipurnakna nikang rat rinaksanira)

[215] Bandingkan dengan adat pepe (menjemur diri) di kraton Yogyakarta beberapa waktu yang lalu (terutama zaman Belanda). Artinya seseorang yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pejabat (orang) tertentu dapat mengajukan protes dan bertemu raja dengan duduk menjemur diri (pepe) di antara dua buah pohon beringin (waringin kurung) di alun-alun utara

[216] Misalnya di dalam prasasti Bahung-tringan (R. Goris, no. 552) dan prasasti Landih (R. Goris, no. 553) kita jumpai keterangan bahwa penduduk yang telah kawin, mereka harus membayar pajak, yang laki-laki membayar 1 ku sedangkan yang perempuan membayar 3 saga

[217] Widig semacam tikar, dan mangjali (anyaman). Arti sebenarnya kurang jelas

[218] Pamapas mungkin semacam pemberkatan sesuatu (bangunan). cf. bahasa Bali baru melaspas. Dari akar kata papas (paspas). Lihat PB, II, hlm. 284

[219] Di dalam prasasti Landih (R. Goris, no. 553) denda yang harus dibayar oleh seorang laki-laki yang kawin dengan seorang gadis golongan brahmana dan sebagainya lebih besar yaitu 1 ma dan 1 ku. Jika tidak mau membayar atau terlambat membayarnya, denda tadi dilipatkan menjadi 2 ma dan 2 ku

Selanjutnya di dalam prasasti ini juga disebutkan bahwa bila penduduk desa berbuat salah, misalnya ingin memperistri gadis-gadis keturunan brahmana, kasta santana, hunjeman, dan juru kling, mereka ini diharuskan membayar denda pamucuk[220] sebanyak 2 ku masing-masing. Jika tidak mau membayarnya, dendanya ditambah dengan hukuman dande (?) sebanyak 2 ku masing-masing dan tidak dikenai segala macam saji-sajian.[221]

Keterangan lain yang terdapat di dalam prasasti ini (juga di dalam prasasti lainnya) ialah tentang kematian. Apabila terdapat binatang seperti kerbau, sapi, babi hutan, dan kambing mati terjatuh ke dalam sungai atau jatuh ke dalam danau dan di semak-semak belukar di desanya, tidak usah dibuatkan tarub (bangunan kecil?), tetapi cukup diberitahukan kepada Hatur tangganya (pengatur tetangga ?) saja dan tidak dianggap berdosa serta dikenai *iuran ganagana*(?).[222] Akan tetapi, apabila lembu, kuda, lebih-lebih orang yang meninggal (salah pati) jatuh ke dalam sungai atau danau, supaya dilaporkan kepada salah seorang di antara Paramadhyastha, terutama kepada Senapati. Apabila mereka tidak mengetahui bahwa ada orang mati di desanya dan lebih dahulu diketahui oleh petugas Caksu Wruh (pengawas, petugas keamanan),[223] mereka (penduduk desa) dikenai denda tamtam(?) sebanyak 2 ma dan 2 ku masing-masing[224] apabila ada ula sawa (ular sawah) mati di dalam liangnya (pjah songgwanya)[225] tidak usah dilaporkan sama sekali karena memang tidak diketahui dari mana asalnya dan tidak menjadikan susah penduduk desa.

Jika ada binatang seperti kerbau dan sapi mati dibunuh pencuri atau ditinggalkan oleh maling di desa lain, pemiliknya diperbolehkan mengambil kembali dan tidak dituduh mengambil binatang yang ditinggalkan oleh pencuri. Peristiwa itu cukup dilaporkan kepada *Sang Mathani* (kepala desa) saja.[226] Pemiliknya tidak dikenai hukuman dan *iuran ganagana*.

---

[220] Pamucuk dari pucuk (nama kembang, daun muda, puncak). Arti sesungguhnya belum jelas

[221] Di dalam prasasti Ragajaya ada sedikit perbedaan, yaitu apabila ia tidak mau membayar denda pamucuk, ia harus dikenai denda uang 1 ma setiap orang, tetapi tidak kena *pacaksu* dan *pangiwö* serta segala macam saji-sajian. Jika ada salah seorang penduduk desa menemukan anak gadis seorang *bhiksu*, rsi, maka orang itu tidak patut dikenai denda kambang ksanika dan kalapitung

[222] Mungkin dosa ganagana(n) berhubungan dengan trigana (dharma; artha, dan kama). Lihat M.M. Sukarto, "Bhatara Sri Luhing-akung", 1980

[223] Caksu = mata; wruh = tahu (mengetahui)

[224] Tamtam mungkin dari tam (bantam, pukul, denda)

[225] Pjah songgwanya dapat dipisah menjadi pjah song-nggwanya (mati di dalam liang tempatnya). Mungkin juga songgwanya dari saunggwanya (di sembarang tempat). Jawa sakenggon-enggon

[226] Di dalam prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan disebut sang thani

Selanjutnya penduduk diperkenankan dengan senjata dadap, keris, galah, tombak, dan tameng melawan botoh jaka (?)[227] dan mengeroyok pencuri. Kalau salah seorang berhasil membunuh pencuri atau botoh jaka supaya diberi hadiah 1 ku untuk setiap penjahat yang dibunuhnya. Jadi, jelasnya apabila membunuh pencuri mendapat 1 ku, tetapi barang-barang yang ditinggalkan pencuri diserahkan kepada negara, serta tidak dibebani pujaan tarang-tarangan(?) pada waktu terjadi gerhana matahari dan bulan. Selain itu, tidak dibebani saji-sajian pawisuwa dan prayascita oleh Samgat Mañumbul.[228]

Mengenai budak (kawula) kita juga mendapat keterangan sedikit di dalam prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan. Di situ dikatakan, jika ada anak budak (rare kawula) pergi mengungsi ke Desa Buyan-Sanding-Tamblingan, anak itu tidak boleh ditangkap, ditahan, dan dipukul dengan duri walatung dan dilukai tubuhnya. Jika ada orang yang hendak menangkapnya dengan tergesa-gesa dan memukulnya dengan duri walatung (belatung), penduduk desa diperbolehkan merebutnya dan mengenai hal ini tidak menyebabkan dosa dan menimbulkan hukuman ganagana.

Kemudian di dalam prasasti Tejakula dari raja Ragajaya disebutkan bahwa jika ada salah seorang budak yang mempunyai utang dan datang mengungsi ke Desa Sabaya, orang itu tidak boleh diambil oleh tuannya dan dilarang menawan serta mengikat dengan duri walatung. Selain itu, budak tersebut tidak boleh di-iwakyangen (?) dan tidak boleh di-papatihakna (?).[229]

Namun, patutlah ia melunaskan utangnya sebanyak 4 ma setiap utang satahil, tidak seperti utang-utang yang dibayar setiap tahun dan tidak boleh dilipatgandakan dan tidak dikenai iuran kalantara (?). Apabila tuannya mengambil dengan kekerasan budaknya itu, meskipun orang itu sudah diberi tahu bahwa budaknya mengungsi ke desa, hal ini tidak dibenarkan oleh isi peraturan-prasasti Sri Maharaja. Kepadanya harus dikenai denda 3 ma suwarna dan 2 ma, kemudian ia harus menanggung dan membayar utang-utang budaknya itu.[230]

---

[227] Arti botoh jaka belum jelas. Botoh (bobotoh) berarti: pecandu permainan judi atau sabungan ayam, taruhan. Jaka berarti: jejaka, pohon aren (pohon jaka)

[228] Kurang jelas tugas samgat *mañumbul* (dari akar-kata sumbul)
Demikian pula pawisuwa juga belum jelas. Prayascita yaitu upacara memohon berkah keselamatan (ketenangan)

[229] Apakah dari pati? Tidak boleh dibunuh atau dikenai pajak kematian?

[230] Mengenai ukuran mas su, ma, lihat karangan W.F. Stutterheim di dalam INI dan juga M.M. Sukarto, "Struktur masyarakat Jawa kuno pada Zaman Mataram Hindu dan Majapahit," distensil oleh Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gajah Mada, tahun 1979

Dari uraian di atas kita memperoleh sedikit gambaran tentang masyarakat yang dibebani peraturan-peraturan yang ketat dan sejumlah besar pajak atau iuran (lebih dari 70 macam), tetapi mereka dapat secara langsung menyampaikan kesulitannya kepada raja.

Apabila di Jawa kita mengenal sistem pembagian warisan tribhagan, di Bali sistem pembagian warisan menjadi tiga bagian juga dikenal. Di dalam prasasti-prasasti yang paling tua, istilah yang dipergunakan tidak jelas. Meskipun demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian warisan menjadi tiga tersebut ada.

Di dalam hal penerimaan warisan, hak laki-laki lebih besar daripada hak perempuan. Sebagai contoh misalnya di dalam prasasti Bukit Cintamani[231] disebutkan bahwa jika ada orang desa suami istri tidak mempunyai anak, istrinya meninggal, maka suaminya mendapat dua bagian dari hartanya (maruhani dua bhagi). Apabila si suami meninggal, istrinya hanya memperoleh sebagian saja dari hartanya (babini habhagi). Apabila kedua orang itu meninggal, hartanya yang berupa emas perak, alat-alat rumah tangga dari perunggu dan tembaga, budak-budak, sapi, dan juga kerbau, setelah dikurangi 4 masaka untuk keperluan upacara penguburannya (marhantuangna),[232] sisanya diserahkan kepada Hyang Api (paneken di hyang api). Jika di antara hartanya itu terdapat huma, ladang, dan kebun supaya disumbangkan kepada Hyang Tanda.[233]

Apabila orang yang mati itu seorang *bhiksu* dan tidak mempunyai keluarga, ia mendapat 2 masaka untuk upacara kematiannya dan sebagian dari warisannya dipakai untuk membeli alat-alat keperluan pesanggrahan (satra). Kemudian jika ada saudagar mendarat lalu mati, semua harta miliknya disumbangkan kepada Hyang Api. Kalau perahunya pecah, kayu-kayunya harus dipakai untuk pagar kota (... *anada tua banyaga turun ditu, paneken di hyang api, parunggahña, ana mati ya tua banyaga, parduan drbyaña prakara, ana cakcak lañcangña kajadyan papagerangen kuta* ...).[234]

Pada masa pemerintahan Marakata kita jumpai istilah patlun atau tribhagan. Hanya istilah ini dipakai untuk pembagian hasil pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah (*drbya haji*), seperti halnya yang kita jumpai di

---

[231] Berangka-tahun 804 S. Disimpan di Desa Sukawana (Sukawana A1)

[232] Marhantuhantu, matiwatiwa adalah upacara kematian

[233] Letak (kuil) Hyang Tanda belum jelas, mungkin di sekitar Cintamani (sekarang Kintamani)

[234] Prasasti Bharu (818 S), II b, baris 3, 4. R. Goris, no. 002 (Bebetin A1)

dalam prasasti-prasasti di Jawa. Cara membagi patlun ini masih tetap dipakai hingga masa pemerintahan raja Jayasakti dan Jayapangus.[235]

Di dalam prasasti Lutungan (975 S)[236] dari zaman pemerintahan Anak Wungsu kita memperoleh keterangan yang lebih jelas tentang pembagian patlun, daripada keterangan yang terdapat di dalam prasasti-prasasti sebelumnya. Di dalam prasasti ini disebutkan:

> *... mangkana yan hana krangan i thaninya, yan jalu-jalu pjah patlun sahanani drbyanya, rwang bhaga mareng sang hyang dharma, sabhaga mareng walu, yanastri pjah sabhaga mare bhatara, rwang bhaga mareng jalu, yan krangan tumpur manglwanga ikanang karaman ma 4 byayaning manghantu-hantu, pasesanya munggaha ri bhatara ....*
>
> (... demikianlah apabila terdapat keluarga tak beranak di desa, kalau laki-laki meninggal semua harta miliknya supaya dibagi tiga, dua bagian diserahkan kepada bangunan suci dan sebagian kepada janda, tetapi apabila istri meninggal, sebagian kepada bhatara dan dua bagian kepada laki-laki. Selanjutnya apabila kedua-duanya meninggal (camput) supaya desa mengambil sebanyak empat ma untuk biaya menyelenggarakan upacara kematian, dan semua sisanya diserahkan kepada bhatara).

Cara patlun itu tidak hanya mengenai soal warisan, tetapi juga untuk menebus seorang budak yang dijadikan tanggungan karena tidak dapat melunasi utang. Uang atau barang tebusan hendaknya dibayar di hadapan Mpu Sthapaka (pendeta) dengan cara: sebagian diberikan kepada karaman (desa dengan penduduknya), dua bagian diberikan kepada bangunan suci (*sang hyang dharma*), tetapi yang dua bagian tersebut dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: sebagian kepada dewa (*bhatara*), sebagian kepada Mpu Sthapaka, dan sebagian lainnya kepada para karma. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada waktu itu terdapat juga sistem patlun berganda. Contoh-contoh lain mengenai pembagian tribhagan atau patlun banyak kita jumpai di dalam prasasti-prasasti Bali kuno dan umumnya tidak banyak berbeda isinya satu sama lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa di dalam prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan (Jayapangus),[237] ungkapan kata seperti yang terdapat di dalam prasasti

---

[235] Istilah patlun dari akar-kata tlu = tiga. Selain patlun juga disebut pinatlu (dibagi tiga) di dalam prasasti Baturan dari raja Marakatapangkaja(R. Goris, no. 352). Kalimat lengkapnya berbunyi: matangnyan pinatlunya ikang drbyahaji saduman i baturan, rwang duman i sukhawati (karena itu dibagi tiga miliknya, sebagian kepada Desa Baturan dan dua bagian lainnya kepada Desa Sukhawati). Desa Baturan sekarang berubah menjadi Batuan dan terletak di sebelah utara Sukawati (keduanya terletak di daerah Kabupaten Gianyar)

[236] R. Goris, no. 404a

[237] M.M. Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan ..."

Lutungan (Anak Wungsu) tersebut di atas, kemudian ditambah dengan kalimat:

> *... tan tagihen de samgat ser krangan, pakranganya tan rampasen, tan sipaten, tan domana*[238] *de samgat ser krangan, apan munggaha ri hyang apwinya ....*
>
> (... serta tidak akan ditagih oleh petugas Samgat Ser Krangan,[239] harta peninggalannya tidak akan dirampas, tidak akan dikenai iuran sipat, tidak akan dibagi-bagi oleh Samgat Ser Krangan karena akan dipersembahkan kepada Hyang Apwi di desanya ....)

4. Kesenian

Di dalam prasasti-prasasti sebelum Anak Wungsu disebut-sebut beberapa jenis seni yang ada pada waktu itu. Kemudian pada zaman pemerintahan Anak Wungsu dibedakan lebih jelas lagi kesenian ini menjadi dua kelompok besar, yaitu seni kraton dan seni rakyat. Tentu saja istilah seni kraton ini tidaklah berarti bahwa seni itu tertutup sama sekali bagi rakyat. Kadang-kadang seni ini dipertunjukkan kepada masyarakat di desa-desa, atau dengan lain perkataan seni kraton bukanlah monopoli raja saja. Keterangan mengenai hal ini kita dapati di dalam prasasti Julah (987 S) yang mengatakan bahwa ada beberapa rombongan kesenian baik untuk raja (i haji) maupun keliling (ambaran) yang datang ke Desa Julah.

Kita tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah pemain, lakon, maupun pakaian rombongan tersebut. Hal ini disebabkan kurangnya sumber penelitian. Akan tetapi, perlu dicatat di sini bahwa seni untuk raja maupun untuk rakyat yang datang ke Desa Julah mendapat imbalan upah tertentu. Istilah yang digunakan yaitu patulak.[240] Patulak untuk *agending i haji* yang datang ke Desa Julah sebesar 1 masa, sedangkan untuk *agending ambaran*[241] sebesar 2 kupang.[242] Untuk jelasnya kami kutipkan kalimat yang berkenaan dengan hal tersebut di atas sebagai berikut:

---

[238] Kata domana ini mungkin dari akar-kata dom = dum = bagi. Dalam bahasa Jawa baru dom = jarum. Akan tetapi, tan domana di sini lebih tepat diterjemahkan dengan: tidak akan dibagi-bagi

[239] Ser krangan mungkin pejabat yang mengurusi mereka yang tidak mempunyai anak. Ser berarti: pemimpin (PB, II, hlm. 307), krangan berarti: orang yang tidak mempunyai anak (PB, II, hlm. 262)

[240] Perkataan patulak sebetulnya berarti: penolak, di sini iuran (upah) tertentu untuk sesuatu pertunjukan

[241] Ambaran berarti: keliling (cf bahasa Jawa baru tontonan barangan yang berkeliling)

[242] Kupang mungkin mengalami perubahan menjadi kepeng (uang kepeng di Bali)

... mangkana yan hana bhandagina salwiranya maranmak irikanang karaman-i julah sadhikara, yan pagending-i haji ma 1 paweha iriya agending ambaran ku 2 paweha iriya ....

(... demikianlah jika terdapat rombongan kesenian datang ke Desa Julah, apabila agending-i haji supaya diberi sebesar 1 ma dan untuk *agending ambaran* sebesar 2 ku ...).

Di dalam masa pemerintahan Gunapriya dan Udayana, yaitu di dalam prasasti Bantiran yang bertarikh 923 S juga terdapat keterangan tentang kesenian (tontonan) sebagai berikut:

... yan-ada paganding sang ratu maranmak, di banwaña, bryanña ya ma 1 yan patapukan pamukul menmen bañwal pirus sang ratu bryanña ku 2 patulak yan-ambaran ku 1 bryanña, yan tani ñak biri saha twa, pamantanen kunong ya, ...

(... jika ada rombongan penyanyi untuk raja datang di desanya supaya diberi 1 ma, jika rombongan pemain topeng, pemukul gamelan, *menmen*, dagelan, dan pelawak supaya diberi patulak 2 ku, jika seni berkeliling supaya diberi 1 ku, apabila tidak mau diberi demikian, supaya dikenakan denda panten,[243] ...).

Dari kutipan tersebut di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Gunapriya dan Udayana seni tontonan juga sudah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu seni kraton dan seni rakyat (berkeliling). Penyanyi istana misalnya pada zaman Udayana disebut paganding sang ratu, tetapi pada zaman Anak Wungsu dinamakan p*agending i haji*. Demikian pula dijelaskan bahwa seni kraton (untuk raja) tersebut juga meliputi p*atapukan* (topeng), p*amukul* (pemukul gamelan), *menmen* (topeng), bañwal (dagelan), dan *pirus* (pelawak).[244]

Perlu ditambahkan di sini bahwa di dalam prasasti Sabhaya (1077 S) dari raja Ragajaya juga dijumpai keterangan tentang pajak yang harus dibayar oleh rombongan kesenian, yaitu jika ada perkumpulan gamelan galunggang ptung,[245] selunding wsi,[246] dan calung di desa harus membayar

---

[243] Arti panten kurang jelas. Di dalam kamus ONW, hlm. 338 hanya disebut tan panten yang berarti: tidak henti-hentinya

[244] M.M. Sukarto, "Bagian-bagian Prasasti Bali yang memuat keterangan tentang seni pertunjukan", di dalam Proyek Penelitian Tari dalam Sejarah Kesenian Jawa dan Bali Kuno, Jurusan Ilmu-Ilmu Sejarah Fak. Sastra UI, tahun 1977, hlm. 136–179

[245] Ptung jenis bambu tertentu, jadi alat bunyi-bunyian dari bambu

[246] Semacam bilah saron (Jawa) atau gender (Jawa). Istilah selunding kerap dijumpai di dalam prasasti Bali. Wsi berarti besi. Temuan bilah-bilah gamelan di Bali selalu disebut selunding oleh penduduk setempat dan kadang-kadang dikeramatkan. Lihat juga J. Kunst, Hindu Javanese Musical Instrument

pajak tikasan[247] sebagai berikut: bila selunding[248] pajaknya 1 ma setiap perkumpulan, sedangkan calung pajaknya 1 ku setiap perkumpulan. Mereka itu tidak dikenai iuran pacaksu,[249] pangiwö, dan segala macam saji-sajian. Pajak-pajak itu harus diserahkan kepada kepala desa. Sebaliknya, jika mereka tidak ada di desa, tidak usah menyerahkan pajak itu (... *yan hana galunggang ptung, mwang salunding wsi, mwang calung ri thaninya, manahura ya tikasan, yan salunding ma 1 saputthayu, galunggang ku 2 saputthayu, calung ku 1 saputthayu, tan kna pacaksu, pangiwö,*[250] *tan kna sakwaihning sajisaji saprakara yan tan hana ya ri thaninya tan isyananya ya pisaningu* ...).

Jenis-jenis seni (tontonan dan bunyi-bunyian) yang ada pada zaman dahulu adalah sebagai berikut: *agending i haji* (penyanyi kraton, untuk raja), *agending ambaran* (penyanyi keliling, seni rakyat), *awayang i haji* (wayang untuk raja), *awayang ambaran* (wayang keliling), *amukul* (pemukul gamelan), *añuling* (peniup suling), *aringgit* (wayang), *atalitaly* (?),[251] *Abañjuran* (?),[252] *atapukan* (bermain topeng), *menmen* (topeng), *pirus* (permainan badut), *abañwal* (melawak), *parpadaha* (pemain genderang), *rojeh* (nama alat musik), *pasangkha* (peniup serunai), *aboñjing* (angklung?), *galunggang ptung, calung,* dan lain-lainnya.

5. Agama dan Kepercayaan

Dalam bidang agama pengaruh tradisi megalitik di Bali masih terasa kuat. Hal ini terlihat pada bangunan-bangunan pura yang mirip dengan bangunan punden berundak. Pemujaan terhadap gunung, laut, batu-batu besar, dan lain-lainnya yang berasal dari zaman sebelum masuknya agama Hindu, tetap tercermin di dalam kehidupan masyarakat pada zaman setelah masuknya agama Hindu. Bahkan sampai sekarang benda-benda dari tradisi megalitik ada yang disimpan dan dipuja bersama-sama dengan patung-patung

---

[247] Tikasan merupakan pajak (iuran) bagi: 1. pemain musik, 2. para tukang seperti tapahaji, pemburu, petugas pasar, 3. produksi tenunan termasuk mencelup, memberi warna (PB, II, hlm. 321)

[248] Di dalam prasasti Bahung-tringan (R. Goris No. 552, dari Bebandem), perkumpulan selunding ini tidak dikenai pajak tikasan dan pabangkis karena perkumpulan semacam sekaha ini sudah bertugas untuk setiap upacara di dalam bangunan suci (pura).

[249] Pacaksu mungkin pajak (iuran) untuk golongan caksu (pengawas) atau yang ditarik oleh para caksu. Namun, harus diperhatikan bahwa istilah caksu mungkin juga berhubungan dengan taksu sekarang

[250] Pangiwö adalah pajak yang berhubungan dengan binatang ternak (PB, II, 251)

[251] Apa yang dimaksud tontonan *atalitaly* sampai sekarang kurang jelas

[252] *Abañjuran* juga belum jelas

agama Siwa dan Buddha. Juga wadah kubur (sarkofag) yang sebenarnya menurut masyarakat Bali sekarang termasuk benda yang leteh (kotor), tetapi disimpan di dalam beberapa pura yang merupakan tempat suci.[253] Keadaan ini membuktikan bahwa masyarakat Bali sekarang tidak mudah melepaskan hasil-hasil budaya dari zaman sebelum Hindu. Hanya kadang-kadang dewa-dewa tertentu berubah namanya dengan nama baru yang diambil dari bahasa Sanskerta.

Akan tetapi, unsur asli kerap kali masih terlihat dengan jelas. Nama Dewa Gede Pañcering Jagat (Bhatara da Tonta) di Desa Trunyan sekarang masih tetap menggunakan unsur asli dan hanya ditambah dengan sedikit bahasa Sanskerta.[254] Selain itu, arca Bhatara da Tonta bentuknya mirip dengan arca megalitik. Juga sebuah pura di Poh Asem[255] yang dikenal dengan nama Pura Gede, bentuknya mirip sekali dengan bangunan punden berundak dan anehnya di Pura Gede tidak terdapat bangunan seperti di dalam pura lainnya. Demikian pula nama dewa terpenting di pura tersebut tetap menggunakan unsur nama asli, yaitu Betara Agung Batu Megereng.[256] Tidak jauh dari Pura Gede terdapat beberapa buah peti mayat (sarkofag) dari batu padas.[257]

Pada masa-masa permulaan hingga masa pemerintahan raja Sri Wijaya Mahadewi, kita tidak mengetahui dengan pasti agama apa yang dianut pada masa itu. Dari nama-nama *bhiksu* yang memakai unsur nama Siwa[258] kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa agama yang berkembang pada waktu itu ialah agama Siwa. Agama Siwa ini rupa-rupanya juga berkembang pada masa pemerintahan raja Ugrasena, Tabanendra, dan Janasadhu Warmmadewa. Akan tetapi, harus diketahui pula bahwa dalam abad VIII M agama Buddha rupa-rupanya sudah berkembang di Pulau Bali, terutama di daerah sekitar Pejeng, Bedulu, Tampaksiring, dan Buleleng. Hal ini terbukti dengan temuan-temuan stupika tanah liat yang berisi mantra-mantra suci agama Buddha dan juga arca Buddha di dalam ceruk selatan Goa Gajah dan di Pura Pegulingan, serta temuan stupa di Buleleng.

---

[253] Sarkofag disimpan di dalam pura, seperti di Ked (Gianyar), Taman Bali (Bangli), Tanggahan Peken (Bangli), Cekeng (Bangli), dan lain-lain

[254] Perkataan dewa, jagat, bhatara berasal dari bahasa Sanskerta. Nama bhatara da Tonta misalnya sudah disebut di dalam prasasti Turuñan (R. Goris, no. 003)

[255] Desa Poh Asem terletak di sebelah timur Desa Mayong, daerah Pengastulan (Kab. Buleleng, Bali Utara)

[256] Megereng berarti besar, cf. garang dalam bahasa Indonesia dan nggereng (mengaum), dalam bahasa Jawa baru

[257] Kebanyakan sarkofag yang ditemukan di Bali berasal dari masa paleometalik

[258] Sebagai contoh misalnya *bhiksu* Siwakangsita, Siwanirmmala, Siwaprajña, dan Siwaprabhawa

Kemudian pada masa pemerintahan Udayana dan Gunapriya ada dua agama besar yang dipeluk oleh penduduk yaitu agama Siwa dan Buddha. Keterangan ini kita peroleh dari prasasti-prasastinya yang menyebut golongan Mpungku Sewasogata sebagai pembantu raja. Mereka ini tugasnya lebih kurang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan agama Siwa dan Buddha, selain memimpin upacara-upacara agama. Para pendeta tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat membantu kelancaran tugas raja. Sampai sekarang masih dikenal pendeta istana di Bali yang disebut Bagawanta.

Pada hakikatnya jumlah para pendeta agama Siwa (dengan gelar Dang Acaryya) lebih banyak bila dibanding dengan pendeta agama Buddha (dengan gelar *Dang Upadhyaya*). Hal ini menunjukkan bahwa agama Siwa memang lebih besar pengaruh dan penganutnya daripada agama Buddha. Sampai sekarang pun jumlah pedanda Siwa di Bali lebih banyak jika dibanding dengan pedanda Buddha.

Sebelum zaman pemerintahan Anak Wungsu belum (tidak) dijumpai penyebutan bahwa raja adalah inkarnasi (penjelmaan) dari dewa di dalam prasasti. Rupa-rupanya kebiasaan itu baru mulai muncul pada masa pemerintahan Anak Wungsu. Di dalam prasastinya ia disebut sebagai inkarnasi dewa Hari (saksat niran harimurti). Hari adalah nama lain dewa Wisnu. Jika demikian rupa-rupanya Anak Wungsu (dan juga raja lainnya seperti Jayapangus) tergolong seorang penganut aliran (sekte) Waisnawa, yaitu pemuja dewa Wisnu. Akan tetapi, hal ini tidak berarti ia melupakan kebaktiannya kepada dewa-dewa Trimurti lainnya, terutama dewa Siwa. Boleh jadi pernyataan Anak Wungsu sebagai inkarnasi dewa Hari ini hanya dihubungkan dengan sifat-sifat dewa Wisnu sebagai pelindung dunia. Demikian pula misalnya apabila dikatakan bahwa raja Anak Wungsu selalu memikirkan kesentosaan dunia yang dikuasainya (nistyasa nira kumingking sakaparipurnnakna nikanang rat rinaksanira). Perkataan rat (dunia) di dalam ungkapan kalimat tersebut di atas tidak lain daripada Pulau Bali, karena baik Pulau Bali maupun Pulau Jawa masing-masing merupakan satu mandala sendiri. Di dalam prasasti Pacanigayan yang berangka tahun 983 S juga dikatakan bahwa Anak Wungsu selalu memikirkan kesempurnaan mandala Pulau Bali (nityasa kumingking sakaparipurnnakna nikanang balidwipamandala). Dengan demikian, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan rat yaitu Pulau Bali saja.

Meskipun sebagian besar penduduk pada masa itu menganut agama Siwa dan Buddha, sekte-sekte kecil yang menyembah dewa-dewa tertentu pasti ada juga, misalnya sekte Ganapatya (penyembah dewa Gana), dan Sora

(penyembah Surya).[259] Adanya sekte Ganapatya diperkirakan berdasarkan kenyataan bahwa banyak sekali arca Ganesa yang diketemukan di Bali,[260] antara lain di Gunung Panulisan (Pura Tegeh Koripan).

Selanjutnya mengenai pemujaan kepada dewa Surya (Suryasewana), secara singkat dapat dikatakan bahwa kebaktian tersebut masih tercermin hingga sekarang di Bali berupa kebaktian kepada Siwaditya (Siwa Matahari) oleh golongan Brahmana Siddhanta.[261]

Dalam masa pemerintahan raja Jayasakti agama Siwa dan Buddha juga berkembang bersama-sama. Mungkin telah terjadi pula perpaduan antara kedua agama tersebut. Hal ini diperkuat oleh prasasti Landih yang pada bagian penutupnya memuat puji-pujian untuk dewa Siwa dan Buddha (nama siwaya namo buddhaya). Puji-pujian kepada dewa Siwa dan Buddha ini juga terdapat di dalam prasasti Sabhaya dari raja Ragajaya. Selain itu, di dalam prasasti Bahung-tringan dan prasasti Kdisan-Bwahan-Er Abang[262] Jayasakti dianggap seolah-olah inkarnasi dewa Wisnu (saksatnira wisnumurti). Dalam prasastinya yang lain ia disebut sebagai dewa Wisnu yang selalu kelihatan (wisnusakala).[263] Dari kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sekte Waisnawa juga berkembang di samping agama Siwa dan Buddha seperti halnya pada zaman sebelumnya. Keadaan yang sama ini juga dapat dibayangkan terjadi pula pada zaman raja-raja pengganti Jayasakti, seperti Ragajaya dan Jayapangus. Bahkan sekte Tantrayana yang mendasarkan pada perbuatan sihir dan juga penghormatan kepada Bhairawa juga pernah berkembang di Bali sekitar abad XIII Masehi.

Selain kepada dewa-dewa Trimurti masyarakat pada zaman dahulu juga menyembah dan menyatakan rasa takutnya kepada dewa-dewa lainnya, terutama dewa catur lokapala, yaitu Yama, Baruna, Kuwera, dan Besawa. Nama-nama dewa Lokapala atau catwaring lokapala disebut di bagian sapatha

---

[259] R. Goris, "Secten op Bali", Mededeelingen, afl. 3, 1931, hlm. 37–53, bijlage 1. Karangan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Sekte-sekte di Bali" oleh Ny. P.S. Kusumo Sutojo, 1974, sebagai seri terjemahan no. 44 dari LIPI –KITLV

[260] Bentuk dan sikap arca Ganesa yang ditemukan di Bali bermacam-macam. Sebuah arca Ganesa dari perunggu yang membawa sebilah keris diketemukan oleh M.M. Sukarto K. Atmodjo. Yang penting di Bali telah terjadi perkembangan setempat (local development). Pada tahun 1979 Sukarto menemukan arca Ganesa dari batu di Pura Manasa yang digambari bagian belakangnya (punggungnya) dengan lingga

[261] R. Goris, "Secten op Bali". Di dalam prasasti Baturan (R. Goris, no. 352) terdapat nama dewa Sanghyang Candraditya yang selalu menerangi seluruh dunia

[262] Prasasti Bahung-tringan tanpa angka-tahun, sedangkan prasasti Kdisan-Bwahan-Er Abang bertarikh 1068 S

[263] R. Goris No. 551 (prasasti Maniklyu yang bertarikh 1055 S. Disimpan di Desa Manik-liu di sebelah barat Kintamani

(kutukan) yang akan memperkuat putusan raja, bersama-sama dengan nama para dewa lainnya, termasuk golongan danawa, yaitu: yaksa, raksasa, dan pisaca.[264]

Di antara sekte-sekte keagamaan di Bali, yang dominan adalah *Saiwasiddhanta*. Sekte atau aliran ini berasal dari India Selatan, dan pada abad XIII Masehi menyebar ke seluruh India dan Asia Tenggara. Menurut Goris, hampir semua pedanda di Bali menganut aliran *Saiwasiddhanta*, dan menggunakan naskah *Bhuwanakosa* sebagai acuan. Aliran tersebut memuja Tripurusa, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, juga memuja manifestasi dewa tertinggi, seperti lingga.[265] Dalam naskah *Jñanasiddhanta*, dijelaskan bahwa doktrin siddhanta pada dasarnya menganggap bahwa asas tertinggi sama dengan Dewa Tertinggi, yaitu Siwa, yang juga sama dengan lingga (Sang Hyang Siwalingga), sama pula dengan suku kata suci tertinggi, yaitu Om.[266] Oleh karena itu, menurut aliran itu om mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada upacara agama seperti pemujaan patung-patung dewa.[267]

Selanjutnya mengenai bangunan suci, sumber prasasti hanya menyebut beberapa istilah seperti: *ulan, satra, sima, sala, hyang, wihara, patapan (partapanan), silunglung, kaklungan, kamulan, pangulumbigyan, pendem, prataya, aluki, sambasambaran, meru, umah sanghyang, sangga,* dan *candi.* Keterangan itu dimuat misalnya di dalam prasasti Buwunan (839 S) prasasti Bukit Cintamani (804 S) prasasti Bañurara (944 S)[268] dan sebagainya. Di dalam prasasti Bali terdapat kira-kira 25 istilah untuk menyebut bangunan suci. Apakah semua bangunan suci itu dapat dikategorikan sama dengan candi (pura), artinya tidak boleh untuk menyimpan abu mayat,[269] masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi.

Di antara nama-nama bangunan suci tersebut, ulan dan satra merupakan semacam pesanggrahan atau tempat bermalam para peziarah (hospitium), sima adalah daerah perdikan yang berkewajiban memelihara bangunan suci di daerah itu. Sala mungkin merupakan bangunan yang mempunyai beberapa ruangan tertentu mengingat perkataan madhya-sala berarti: ruang (*kamar*) tengah bangunan candi. Hyang mungkin singkatan perkataan parhyangan

---

[264] Pisaca yaitu golongan raksasa atau bhuta
[265] R. Goris,1974, hlm. 14
[266] H. Soebadio, 1971, hlm. 51
[267] R. Goris, 1974, hlm. 12–13
[268] R. Goris, no. 102, No. 001, dan no. 439
[269] Lihat R. Soekmono, "Candi, Fungsi, dan Pengertiannya", dan M.M. Sukarto, "Struktur Masyarakat Jawa Kuno"

(*kahyangan*) yang berarti: tempat para dewa, jadi nama bangunan suci. Wihara jelas merupakan bangunan suci agama Buddha. Patapan tempat melakukan tapa. Silunglung dan kaklungan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pada waktu sekarang bale silunglung digunakan untuk meletakkan tulang di kuburan (waktu pembongkaran tulang mayat di kuburan), kira-kira dua hari sebelum upacara ngaben (pembakaran mayat). Pangulumbigyan mungkin merupakan bangunan suci yang ada hubungannya dengan upacara kematian. Aluki masih belum jelas apa arti dan fungsinya. Nama kamulan rupa-rupanya masih tertinggal menjadi sanggah kamulan di Bali sekarang.[270] Sambasambaran berarti tempat persembahan (sambar = sembah). Meru merupakan bangunan berbentuk tumpang melambangkan Gunung Mahameru tempat tinggal dewa-dewa agama Hindu (Siwa). Umah sanghyang sudah jelas berarti: rumah dewa-dewa. Sangga sekarang rupa-rupanya menjadi sanggah (sanggar). Candi sudah jelas merupakan bangunan suci. Akan tetapi, di Bali sekarang candi umumnya untuk menamakan pintu gerbang yang terbelah dua (candi bentar).

Di dalam prasasti-prasasti sebelum masa pemerintahan raja Anak Wungsu disebut beberapa buah bangunan suci atau arca pemujaan yang penting pada waktu itu, di antaranya ialah: Hyang Api, Hyang Tanda, Hyang Karimama, Hyang Tahinuni, Hyang di Bukit Tunggal paradyan Indrapura, dan Bhatara da Tonta. Pada masa raja Anak Wungsu juga disebut beberapa buah tempat suci yang penting pada masa itu, bahkan sebuah prasasti menyebut nama betara yang dipuja oleh penduduk setempat di Desa Sukhawana dan sekitarnya. Sebuah bangunan yaitu Gunung Kawi disebut di dalam prasasti raja Marakatapangkaja,[271] tetapi rupa-rupanya bangunan suci tersebut diperluas atau diselesaikan sewaktu zaman pemerintahan raja Anak Wungsu. Tempat-tempat suci yang penting pada masa pemerintahan Anak Wungsu, antara lain sebagai berikut.

---

[270] Sanggah kamulan terdapat di setiap keluarga di Bali, berbentuk bangunan kecil berbilik tiga (rong telu). Ruang tengah untuk dewa Siwa, kanan untuk arwah laki-laki (bapa) dan kiri untuk arwah perempuan (ibu). Di Bali Selatan sanggah kamulan menghadap ke arah barat. Ada pula yang beranggapan bahwa ruang tengah juga untuk Brahma-Siwa-Wisnu (Trimurti). Abu adegan yang dimasukkan ke dalam kelapa gading (kadang-kadang disebut puspa) kemudian ditanam di belakang sanggah. Akan tetapi, sebagian ada pula yang dihanyutkan ke laut. Penanaman abu ini pada suatu upacara ngerorasin, yaitu 12 hari setelah upacara ngaben (pembakaran mayat, kadang-kadang tiga tahun setelah seseorang meninggal). Untuk golongan raja (di lingkungan puri) sanggah kamulan dinamakan kamimitan dan merupakan bagian dari pamrajan. Selanjutnya mengenai istilah kamulan di Jawa lihat J.G. de Casparis, Prasasti Indonesia I, 1950, hlm. 170 dan seterusnya

[271] Prasasti Songan-tambahan, Ktut Ginarsa, BB, no. 1–2, 1961, hlm. 3–17

1. **Antakuñjarapada**

   Nama ini terdapat di dalam prasasti Lutungan dari tahun 975 S. Menurut Goris,[272] Antakuñjarapada sama dengan Goa Gajah sekarang, karena kunjara berarti gajah.

2. **Sukhawana**

   Tempat suci ini disebut di dalam prasasti Pacanigayan dari tahun 983 S. Sekarang di Pura Tegeh Koripan (Gunung Panulisan) masih terdapat sebuah arca batu menggambarkan seorang putri dan di bagian belakang arca itu terdapat tulisan Kadiri kwadrat yang mirip dengan tulisan di kompleks Gunung Kawi (Tampaksiring) dan berbunyi Bhatari Mandul. Sayang bahwa arca yang menggambarkan suaminya Bhatara Mandul sampai sekarang belum diketemukan. Ataukah yang dimaksud dengan bhatara di dalam prasasti sebetulnya arca Bhatari Mandul yang masih ada hingga sekarang? Selanjutnya Desa Sukhawana sekarang masih tetap bernama Sukawana dan terletak di bawah Gunung Panulisan (± 6 km di sebelah utara Kintamani).

3. **Bukit Humintang**

   Tempat suci ini disebut di dalam prasasti Pacanigayan. Letaknya belum jelas, mungkin di sekitar Dausa dan Sukawana.

4. **Air Kanakantaralaya**

   Tempat suci ini disebut di dalam prasasti Bwah dari tahun 999 S. Letaknya belum jelas.

5. **Candi Gunung Kawi di Tampaksiring**

   Tempat suci ini merupakan kompleks candi padas yang terbesar di Pulau Bali. Terletak di pinggir Sungai Pakerisan atau di sebelah selatan Tampaksiring. Pada zaman dahulu dinamakan Sanghyang katyagan ing pakrisan mangaran ring-amarawati.[273]

Selain itu, masih terdapat pula beberapa buah tempat suci yang dihubungkan dengan penyebutan terhadap seorang raja sesudah meninggal, yaitu

1. Sang lumah ri air-madatu (Ugrasena),[274]
2. Sang lumah ri Bwah-rangga (?),
3. Sang lumah ring Nusa-dwa (?),
4. Bhatari lumah-i Burwan (Mahendradatta),
5. Bhatara lumah-i Bañu-wka (Udayana),

---

[272] R. Goris, BB, no. 3, 1957, hlm. 29

[273] Prasasti Songan-tambahan

[274] Prasasti Air Mih (R. Goris, no. 206)

6. Sang atita prabhu lumah ing Senamukha (?),[275]
7. Bhatara lumah ing Camara (Marakatapangkaja),
8. Bhatara lumah-i Jalu (Anak Wungsu),[276]
9. Bhatara lumah-i Dharmahañar (Jayapangus).[277]
10. Bhatari i Bañu-palasa (?),[278]
11. Bhatara lumah-i Candrimanik (?),
12. Bhatara 1umah-i Candri ring Linggabhuwana (?),
13. Bhatara lumah-i Dewasthana (?),
14. Bhatara lumah-i Air-talaga (?), dan
15. Sang ring Guha (?).[279]

Sayang hampir semua nama tempat yang merupakan tempat seorang raja diabadikan dan dibuatkan candi beserta arcanya, tidak dapat dikenali lokasinya, kecuali Buruan (sekarang Desa Burwan, Gianyar) dan Sukhawana (sekarang Sukawana, Kintamani).

[275] Sang atita prabhu berarti: yang telah lampau (meninggal), lumah: dicandikan, didarmakan

[276] Pada candi terbesar jajaran timur ujung utara di Gunung Kawi (Tampaksiring) terdapat tulisan kwadrat berbunyi "haji lumah ing jalu". Oleh para sarjana "haji lumah ing jalu" ini disamakan dengan Anak Wungsu (R. Goris, no. 467, W.F. Stutterheim, OB, 1, hlm. 72). Menurut Nyoman Kajeng jalu = senjata tajam = keris = Pakerisan. Ktut Ginarsa mengatakan nama Sungai Pakerisan yang mengalir di kompleks percandian Gunung Kawi berasal dari perkataan Pa-krsna-an karena di India juga terdapat sebuah asrama Amarawati yang letaknya dekat sungai Krsna, yang sekarang disebut Kistna. Menurut Sukarto, hipotesis itu tidak benar sebab pada zaman raja Anak Wungsu atau Marakatapangkaja sendiri dengan jelas dan tegas sungai itu disebut Pakerisan, dan belum pernah ditemukan nama Sungai Jalu maupun Sungai Pa-krsna-an. Demikian pula air Sungai Pakerisan sangat jernih dan tidak hitam ataupun keruh (krsna). Memang di Gunung Kawi terdapat kompleks percandian Amarawati yang letaknya di Sungai Pakerisan

[277] Perkataan bhatara lumah-i dharmahañar terdapat di dalam prasasti Campaga (R. Goris, no. 631) yang berangka tahun 1103 S. Di dalam prasasti Campaga lainnya (R. Goris, no. 1006, Campaga C) disebut nama Mapañji Hariprabhu dan juga Jayapangus. Rupa-rupanya raja Hariprabhu juga dicandikan di Dharmahañar dan selanjutnya digantikan oleh raja Jayapangus. Menurut Goris Hariprabhu mungkin memerintah antara tahun 1072 S–1099 S. (R. Goris, BB, 1958, VI, 4). Antara pemerintahan raja Ragajaya dan Jayapangus terdapat "masa kosong" selama 22 tahun. Apakah Hariprabhu dapat diletakkan antara Ragajaya dan Jayapangus masih menunggu temuan-temuan baru di Bali. Dharmahañar ini barangkali terletak di Desa Sawah Gunung, Gianyar (R. Goris, 1948, hlm. 14)

[278] Letak Bañu-palasa belum diketahui dengan jelas. Nama itu terpahat di bagian belakang arca bhatari Hariti yang sekarang disimpan di Pura Panataran Panglan di Pejeng (R. Goris, no. 503)

[279] Letak Guha ini belum jelas. Demikian pula siapa yang dicandikan di sini. Nama ini kita jumpai di bagian belakang arca Parwati dari Pura Panataran Panglan di Pejeng (R. Goris, no. 504)

Dari temuan arkeologi diketahui ada beberapa candi dari masa Bali kuno, yaitu candi Kalibukbuk, pura Pegulingan, dan candi Wasan.

Candi Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, berupa sebuah stupa yang bentuk dasarnya oktagonal diapit dua buah stupa perwara. Sejumlah stupika dan meterai tanah liat ditemukan di dalam salah satu stupa perwara. Huruf pada meterai tanah liat diperkirakan dari abad VIII–IX M. Jadi, bangunan yang sebagian sudah dipugar ini memberikan bukti bahwa di Bali Utara pada abad tersebut telah berkembang agama Buddha Mahayana.

Pada periode yang sama di daerah Tampaksiring juga berkembang agama Buddha Mahayana, terbukti dari temuan stupa beserta arca Buddha emas dan sejumlah meterai tanah liat. Stupa yang ditemukan di pura Pegulingan, Dusun Basangambu, Tampaksiring sekarang sudah dipugar, arca Buddha, meterai tanah liat, dan miniatur stupa disimpan di dalam stupa hasil pemugaran tersebut.

Kecuali bangunan suci agama Buddha, candi Hindu juga ditemukan, yaitu candi Mengening di Tampaksiring dan candi Wasan di Sukawati. Keduanya berlatar belakang agama Hindu, tetapi dari periode yang berbeda. Candi Mengening mungkin dari abad IX M, dan candi Wasan diperkirakan dari abad XIV M. Candi Mengening sudah selesai dipugar, candi Wasan masih dalam tahap penelitian.

Sangat disayangkan bahwa keempat candi tersebut tidak diketahui hubungannya dengan raja-raja Bali yang dikenal dari prasasti-prasasti.

6. Perekonomian Rakyat

Pada zaman dahulu perimbangan antara jumlah penduduk dan tanah yang tersedia masih baik. Artinya, tanah, ladang, dan sawah dapat dikatakan masih cukup luas, sedangkan penduduk relatif sangat sedikit. Memang kita tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah penduduk pada zaman dahulu, demikian pula berapa hektare luas areal sawah, ladang, dan sebagainya. Menurut Sir Thomas Stamford Raffles, penduduk Indonesia pada permulaan abad IX M tidak lebih dari 5 juta jiwa.[280] Jumlah itu dibenarkan oleh Huender dan Von H. Geldern.[281] Menurut perkiraan Muh. Yamin, penduduk Indonesia dalam abad XIV M tidak lebih dari 3 juta jiwa, dan 2 juta di antaranya terdapat di Pulau Jawa.[282]

---

[280] M. Yamin, Tatanegara Majapahit III, hlm. 111

[281] Ibid.

[282] Ibid.

Jumlah penduduk Pulau Bali pada waktu dahulu masih terlalu sulit untuk dijawab dengan pasti. Hal ini disebabkan pada masa itu belum ada sensus penduduk. Meskipun mungkin juga pencatatan penduduk semacam itu sudah ada, hingga sekarang sumber tersebut tidak atau belum kita temukan.

Di dalam salah satu prasasti dari zaman raja Marakatapangkaja terdapat keterangan yang mungkin dapat kita pergunakan untuk menghitung berapa jumlah penduduk Bali pada masa itu, walaupun angka yang akan diperoleh nanti hanyalah merupakan perkiraan belaka. Menurut prasasti Bila yang berangka-tahun 945 S penduduk karaman Bila semula berjumlah 50 kurn,[283] tetapi karena kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan kepada karaman Bila, jumlah tersebut kemudian menyusut menjadi 10 kurn (*sambandha majaraken paraspara ni hambanya sakaraman mula 50 kurn kwehnya nguni rumuhun ring malama, masesa ta ya 10 kurn, kunong sangka ri kabyetanya ring drwya haji, mwang buñcang haji magöngadmit*).[284] Keterangan ini sangat penting kalau ditinjau dari segi sejarah sebab dengan keterangan itu kita mengetahui bahwa jumlah penduduk di sebuah karaman pada masa dahulu sebanyak 50 kurn (kepala keluarga). Akan tetapi, tentu saja ada juga sebuah karaman yang terdiri dari 100 atau 150 kurn. Jika seandainya setiap kurn rata-rata terdiri dari 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan tiga orang anak, penduduk Bila diperkirakan sebanyak 250 jiwa. Selanjutnya di dalam prasasti Bali pada umumnya disebut nama sebuah desa yang dibebaskan misalnya dari kewajiban-kewajiban tertentu (misalnya bebas pajak), kemudian juga menyebut nama-nama desa parimandala yang ada di sekelilingnya. Istilah pinarimandala cinaturdesa sangat terkenal di dalam prasasti baik di Jawa maupun di Bali. Artinya, sebuah desa mempunyai batas empat buah desa yang ada di sekitarnya. Jadi, setiap prasasti umumnya menyebut sebanyak lima buah desa.[285] Jumlah prasasti yang sudah ditemukan di Bali sampai dengan zaman pemerintahan raja Marakatapangkaja kira-kira 41 buah dan sampai dengan zaman Anak Wungsu mendekati 70 buah prasasti. Dengan demikian, jumlah desa di Bali pada zaman Anak Wungsu 70 × 5 = 350 buah desa.[286] Kira-kira seratus tahun kemudian yaitu sampai dengan zaman pemerintahan raja Jayapangus, diperkirakan jumlah penduduk menjadi dua

[283] Sekarang menjadi kuren dalam bahasa Bali baru dan berarti: kepala keluarga

[284] Berarti lebih kurang: Sebab-sebabnya menyampaikan kepada raja tentang hambanya yang semula berjumlah 50 kuren (kepala somah) pada zaman dahulu, sekarang hanya tinggal sisanya 10 kuren, karena terlalu berat beban pajak dan kerja rodi besar maupun kecil

[285] Akan tetapi, ada juga yang menyebut delapan desa atau lebih. Artinya batas delapan arah mata angin

[286] Di dalam berita Cina disebutkan bahwa di P'o-li (kalau Po-1i ini sama dengan Bali seperti kata para ahli) ada 136 buah desa (Sejarah dinasti Liang (502–556), buku 54, W.P. Groeneveldt, 1960, hlm. 80

kali lipat dibanding dengan masa raja Anak Wungsu. Peledakan penduduk rupa-rupanya terjadi sewaktu orang-orang dari Jawa Timur pindah ke Bali sebagai akibat runtuhnya negara Majapahit, kira-kira sekitar tahun 1500 M.

Umumnya masyarakat Bali sejak zaman dahulu hidup bercocok tanam. Hal ini dapat kita ketahui dari berita-berita yang kita peroleh di dalam prasasti-prasasti, antara lain menyebut sawah, parlak (sawah kering), gaga (ladang), kebwan (kebun), mmal (ladang daerah pegunungan), dan kasuwakan (pengairan sawah?).[287]

Pengolahan sawah khususnya mendapat perhatian besar dan dirawat sebaik-baiknya seperti halnya para petani pada waktu sekarang. Di dalam prasasti raja Marakatapangkaja (Songan-tambahan) misalnya disebut deretan istilah yang berhubungan dengan pengolahan atau penanaman padi, yaitu: amabaki, amaluku, atanem, amatun, ahani, anutu. Proses tersebut urutannya sesuai dengan yang dikerjakan oleh para petani pada waktu sekarang, yaitu mbabaki (pembukaan tanah), lalu mluku (membajak), tanem (menanam padi), matun (menyiangi padi), ani-ani (menuai padi, panen), dan nutu (menumbuk padi).[288] Dari keterangan tersebut jelaslah bahwa sewaktu masa pemerintahan Marakatapangkaja dan mungkin juga pada masa sebelum dan sesudahnya, penggarapan sawah telah maju dan tidak jauh berbeda dengan pengolahan sawah para petani pada waktu sekarang.

Jenis-jenis tanaman yang sudah dikenal pada masa dahulu antara lain: padi (baik padi gaga, padi sawah maupun huma),[289] nyu atau tirisan (kelapa), pring (bambu), hano (enau), kamiri (kemiri), kapulaga (kapulaga), kasumbha (kesumba), tals (talas), bawang bang (bawang merah), pipakan (jahe), mulaphala (umbi-umbian lainnya, wortel), hartak (kacang hijau), pucang (pinang), jeruk (jeruk), lunak atau camalagi (asam), pisang atau byu (pisang), sarwaphala (buah-buahan), sarwawija (padi-padian), kapas (kapas), kapir (kapok randu), dan damar (damar).

Selain itu, ada juga jenis kayu-kayuan, yang kadang-kadang merupakan kayu larangan (pohon larangan), antara lain: kamiri (*Aleurites triloba Forst*), boddhi (*Carumbium populifolium*), nangka (*Artocarpus integrifolia*), kembang kuning (*Cassia sophora*), mende (*Wallichia Horsfieldi*), dan kapulaga (*Amonum Cardamomum*).

---

[287] Di Bali pada waktu sekarang dikenal sistem subak. Mungkin perkataan ini berasal dari suwak (kasuwakan). Pemimpin subak disebut pekaseh atau klian subak

[288] lstilah tersebut dalam bahasa Jawa baru

[289] Istilah yang sering kita jumpai di dalam prasasti yaitu bras (beras)

Selain hidup bercocok tanam atau bertani rakyat juga memelihara binatang ternak seperti: *itik, wdus* (kambing), *lembu* (sapi), *kbo* atau *karambo* (kerbau), *asu* (anjing), *jaran* atau *asba* (kuda), *hayam* (ayam), dan *manuk* (ayam jantan). Selain itu, masih ada lagi binatang buruan seperti babi, *culung* (celeng), *pañcayan* (?), *besara* (binatang liar), *hayam alas* (ayam hutan), *putir* (merpati putih), *manuk kitiran* (tekukur), *asu alas* (anjing hutan), dan *wuruwuru* (merpati). Untuk pengawasan binatang ternak bersayap ada seorang pejabat yang disebut *Tuhanjawa* (ketua ternak bersayap).

Kelihatan jelas masyarakat pada masa dahulu gemar juga berburu. Hal ini terbukti dengan adanya pejabat khusus yang tugasnya berhubungan dengan binatang perburuan. Pejabat itu disebut Nayakan buru. Bahkan di dalam prasasti Bukit Cintamani disebut tentang pembuatan bangunan suci di tanah perburuan (*bangunen partapanan satra di katahan buru*), sedang di dalam prasasti Bwahan dikatakan bahwa orang Desa Bwahan yang terletak di pinggir danau (*wingkang ranu*)[290] memohon kepada raja agar diperkenankan membeli hutan perburuan raja (*alas burwan haji*) yang ada di dekat desanya untuk tempat penggembalaan sapi dan mencari kayu api (*mwang höt ni pamangana ni sapinya, mwang pametanya kayu*).[291] Selain itu, disebut juga bahwa rakyat desa diizinkan berburu di daerah sekitarnya (*parimandala*) tanpa dikenakan *drbyahaji* (iuran, pajak) oleh Nayakan buru. Juga di dalam prasasti Ugrasena terdapat keterangan tentang penduduk atau orang yang melakukan kerja bakti buat raja di daerah perburuan raja (*anak mabwatthaji di buru*).

Agaknya binatang yang paling berharga pada masa dahulu di Bali yaitu jaran atau asba (kuda). Di dalam prasasti-prasasti kuno, kuda memang sering kali disebut-sebut, bahkan di dalam prasasti Air Hawang diuraikan dengan panjang lebar tentang peternakan kuda dan juga tentang penyilangan kuda (*amor ing kuda tinangkalik*).[292] Jika ada orang yang melepaskan kuda jantan (kuda lanang) dan kuda betina (*kuda wadwan*), orang itu harus menyerahkan tiga bakul nasi (*skul tlung wakul*) dengan lauknya (*iwakanya*) dan lain-lainnya. Hal ini mungkin disebabkan kuda merupakan satu-satunya binatang yang paling cocok untuk membawa barang-barang dagangan melintasi deretan pegunungan yang tinggi yang membatasi daerah Bali Utara dan Bali Selatan melintasi daerah sekitar Kintamani (Danau Batur) di bagian timur dan Danau Bratan di bagian barat. Di dalam prasasti sebelum zaman Anak Wungsu kita jumpai keterangan atau istilah *anak atar jalan katba kadahulu*, maksudnya

---

[290] Yang dimaksud yaitu Danau Batur (dekat Kintamani)

[291] Perkataan höt artinya "sembunyi"

[292] Mangkalik kuda berarti: memelihara kuda, mengembangbiakkan kuda

orang (pedagang) yang berjalan hilir mudik (ke bawah dan ke atas) melalui daerah pegunungan.[293] Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada zaman dahulu terdapat petugas-petugas yang berhubungan dengan kuda. Pejabat-pejabat itu adalah Senapati asba, Samgat asba atau Samgat juru kuda,[294] dan Tangkalik di hasba. Di dalam zaman Jayapangus[295] misalnya dikatakan bahwa bila ada lembu, kuda, dan juga manusia mati jatuh ke dalam sungai atau danau, supaya dilaporkan kepada Paramadhyastha, terutama kepada Senapati. Akan tetapi, kematian kambing, kerbau, dan babi cukup dilaporkan kepada Hatur tangganya (pengatur tetangga?). Hal ini membuktikan bahwa kedudukan sapi dan kuda dianggap penting dan disejajarkan tempat melaporkannya dengan manusia.

Di samping bercocok tanam dan berternak serta berburu, di dalam masyarakat Bali kuno dikenal juga beberapa kelompok pekerja khusus, seperti halnya para pande mas, wsi, tambra (tembaga), dan kangsa (perunggu).[296] Mereka ini tugasnya membuat perhiasan-perhiasan dari emas, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, senjata, dan sebagainya. Selain itu, ada lagi pekerjaan bangunan seperti *undahagi kayu* (tukang kayu), undahagi batu (tukang batu), *undahagi lañcang* (tukang perahu), dan *undahagi* (undagi) pangarung (tukang pembuat terowongan). Jenis pekerjaan lain yaitu mamangkudu (tukang celup warna merah), mangnila (tukang celup warna biru), citrakara (pelukis), amahat (pemahat), gusali (pandai besi), dan sebagainya.

Bidang perdagangan pada masa itu cukup maju. Hal ini terbukti di beberapa desa terdapat golongan saudagar yang disebut wanigrama (saudagar laki-laki) dan wanigrami (saudagar perempuan). Mereka itu mempunyai kepala atau pejabat yang mengurus semua kepentingannya dan disebut juru wanigrama (banigrama) dan juru wanigrami. Di dalam prasasti yang lebih tua, kelompok pedagang tersebut dinamakan wanyaga (banyaga) dan pimpinannya *juru wanyaga*. Di dalam prasasti zaman Jayapangus kerap kali sebuah karaman (desa dengan penduduknya) disebut mempunyai hakikat wesyajanma, artinya banyak golongan wesya atau kasta pedagang (*apan wesyajanma swajatinikang karaman*).

---

[293] Anak = orang, atar jalan = berjalan hilir-mudik, katba = daerah bawah (pantai) dan kadahulu = daerah pegunungan (hulu)

[294] Di dalam prasasti Jayapangus disebut samgat juru kuda, sedangkan di dalam prasasti Anak Wungsu dijumpai perkataan samgat asba (M.M. Sukarto, "Prasasti Buyan-Sanding-Tamblingan...", 1979, hlm. 14)

[295] Ibid., hlm. 30

[296] Cf. sulpika mas, wsi, tambra dan kangsa

Perdagangan antarpulau juga cukup maju. Hal ini dapat kita ketahui dari prasasti Banwa Bharu yang menyebut apabila ada saudagar yang mendarat lalu mati, sebagian miliknya disumbangkan ke kuil Hyang Api, kalau perahunya pecah, kayu-kayunya harus dipakai sebagai pagar kota (desa). Kemudian prasasti Julah menyebutkan jika ada perahu, lañcang, talaka, jukung yang terdampar, penduduk desa (anak banwa di julah) boleh menawannya (taban karang) dan harta bendanya disumbangkan untuk bangunan suci di desanya. Di dalam prasasti Julah lainnya disebut tentang pedagang-pedagang dari seberang yang datang dengan kapal dan perahu berlabuh di Manasa (banyaga sakeng sabrang jong, bahitra, cimunduk i manasa).[297] Keterangan ini diperkuat lagi dengan berita yang terdapat di dalam prasasti Lutungan yang menyebut tentang pembelian 30 ekor kerbau oleh raja Anak Wungsu dari Gurun (lawan ikang kbo prana 30 siki, ulih *paduka haji* anumbas-i gurun).[298] Menurut perkiraan Goris yang dimaksud Gurun yaitu Pulau Lombok. Sampai sekarang di Lombok Selatan masih terletak sebuah desa bernama Gerung. Keterangan tersebut di atas membuktikan bahwa perdagangan antarpulau dapat dikatakan telah maju, sebab kerbau merupakan binatang yang besar, dengan demikian kapal yang digunakan pada zaman Anak Wungsu tentunya harus besar pula. Daya angkut kapal pada waktu itu tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, mengingat jumlah 30 ekor kerbau, mungkin tidak diangkut dengan sebuah kapal saja. Perlu ditambahkan di sini bahwa pada zaman dahulu di Bali telah dikenal beberapa jenis perahu, yaitu; lañcang (sampan), perahu (perahu), tambangan (perahu tambang), talaka (sejenis perahu), banawa (perahu besar), jong (jung), jukung (jukung), bahitra (bahtera), dan lain-lainnya.

Salah satu hal yang menarik perhatian di dalam prasasti Bali sejak zaman yang tertua hingga zaman pemerintahan Anak Wungsu, Jayapangus, dan raja-raja lainnya, yaitu penyebutan bea cukai, pajak, iuran, serta denda yang bermacam-macam. Penyebutan itu kerap kali berulang kembali dengan beberapa perbedaan kecil dan juga pembebasan sebuah karaman dari beberapa jenis pajak tadi. Jumlah macam pajak, iuran dan denda pada zaman raja Anak Wungsu saja tidak kurang dari 70 macam atau mungkin lebih. Akan tetapi, pada umumnya istilah yang digunakan masih menimbulkan banyak kesuli-

---

[297] Letak Manasa masih belum diketahui dengan pasti, tetapi tempat itu haruslah di tepi pantai utara Pulau Bali, mungkin antara Buleleng dan Sangsit. Di dekat Desa Sinabun sekarang terdapat sebuah pura bernama Pura Manasa. Sinabun sekarang letaknya lebih-kurang 4 km dari pantai. Umumnya garis pantai utara Pulau Jawa mengalami banyak perubahan. Seharusnya Sinabun pada abad XI M letaknya di dekat pantai utara. Di Bali ada beberapa buah prasasti yang menyebut Manasa (Lihat Sukarto, "Struktur pemerintahan dan masyarakat zaman Anak Wungsu")

[298] Prana berarti: hidup, jiwa, nyawa

tan untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Kita harus kerap kali meraba-raba apakah istilah yang menggunakan awalan pa- yang sedemikian banyaknya itu (misalnya *pagajah, pasluh, pawuran*, dan sebagainya) harus diartikan sebagai pajak untuk ..., pajak atas ... atau sebagai nama pelaku pegawai pajak untuk ... atau "pemungut pajak daripada .... Hal ini masih memerlukan penyelidikan yang lebih saksama dan teliti.

Pajak-pajak ini diatur oleh raja sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan penduduk. Akan tetapi, di dalam kenyataannya bermacam-macam pajak ini menimbulkan pelbagai macam persoalan karena para pegawai pemungut pajak (sang mangilala *drwyahaji*) kadang-kadang berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk dengan menaikkan jumlah pajaknya. Sebagai contoh, di dalam prasasti raja Jayasakti dan Jayapangus berulang kali disebut tentang penduduk desa yang mengeluh karena tindakan penyelewengan para petugas pajak yang berakibat suasana masyarakat menjadi kacau dan gelisah. Biasanya setelah mereka melapor kepada raja, desa tersebut kemudian dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan para petugas tertentu (pegawai pajak) dilarang memasuki desa swatantra tersebut.

Di dalam prasasti Sabhaya dari raja Ragajaya terdapat keterangan bahwa penduduk yang mengerjakan tanah laba pura[299] milik raja, harus menyerahkan sebagian dari hasil tanahnya. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan satu pikul bawang merah dan satu pikul kasumba setiap tanggal 12 bulan Asuji (September–Oktober). Urusan ini tidak boleh dicampuri para pegawai Caksu Ida Sthapaka. Akan tetapi, apabila mereka tidak menyerahkan tepat pada tanggal 12 Asuji itu, mereka akan dikenai denda lalai (*pramanten*) sebesar 1 ku. Selanjutnya mereka tidak dikenakan segala macam pajak (*drwyahaji*) dan juga iuran para wuluwulu, seperti iuran *watun palburing sambar* (sambar = bangunan suci) dan iuran-iuran yang diterima oleh Nayakan Saksi. Semuanya itu harus dibayar setiap bulan Asuji pada tanggal 12 dengan perak asli (pirak lumari) yang kemudian digunakan untuk mengisi kampil Ida Bhatara.

Dari keterangan-keterangan tersebut yang diperoleh dari beberapa buah prasasti, kita mendapat sedikit gambaran keadaan masyarakat Bali pada masa lampau. Umumnya mereka hidup bercocok tanam dan beternak di samping usaha-usaha lainnya. Perdagangan baik dalam maupun antarpulau berkembang dengan pesat. Semuanya itu diatur dengan cermat, di samping pajak-pajak yang harus dibayar oleh penduduk.

---

[299] Laba-pura yaitu sawah atau tanah (kebun) milik pura. Semua penghasilan digunakan untuk membiayai pura, lebih-lebih waktu diadakan upacara piodalan (hari lahir)

Yang menarik perhatian adalah setiap tindakan atau gerak usaha penduduk selalu diikuti bermacam-macam pajak atau iuran. Pada zaman raja Anak Wungsu jumlahnya kira-kira 70 macam pajak. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan apakah memang demikian keadaannya? Benarkah penduduk pada masa yang lalu hidup dengan beban bermacam-macam pajak atau iuran? Bagaimana mereka dapat mempertahankan kehidupannya dalam suasana (situasi) yang demikian itu? Semuanya itu masih memerlukan penelitian yang lebih saksama dan teliti dengan bahan-bahan yang lebih lengkap lagi.

Bab VII
Kerajaan Sunda

A. Pusat-Pusat Kerajaan Sunda

Perpindahan pusat kerajaan dari suatu tempat ke tempat lain bukanlah hal yang asing di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Perpindahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, untuk kemudian kembali lagi ke Jawa Tengah, sudah sama-sama diketahui. Bahkan pada masa pemerintahan raja Airlangga saja, beberapa kali pusat kerajaan berpindah-pindah. Pemindahan pusat-pusat kerajaan itu disebabkan oleh pelbagai macam alasan, kadang-kadang karena alasan ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain. Tidak pula mustahil, perpindahan itu disebabkan adanya bencana alam, sebagaimana yang menjadi dugaan umum mengenai terjadinya perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada pertengahan abad X Masehi.

Di Jawa Barat, hal yang sama juga terjadi. Sepanjang naskah-naskah berbahasa Sunda kuno yang ditemukan di Jawa Barat dapat dipercaya, di daerah ini pun telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan. Terjadinya perpindahan pusat kerajaan tersebut menyebabkan harus dipertimbangkan kembali adanya beberapa buah kerajaan yang saling mengganti, sebagaimana menjadi dugaan umum sampai saat ini. Barangkali, sebenarnya di Jawa Barat hanya terdapat sebuah kerajaan setelah keruntuhan kerajaan Tarumanagara menjelang akhir abad VII Masehi, sedangkan nama-nama yang sekarang dianggap sebagai nama kerajaan, adalah nama ibu kota atau pusat kerajaan tersebut. Jika dugaan ini benar, sampai keruntuhannya pada tahun 1579 M, kerajaan Sunda telah beberapa kali berpindah pusat kerajaan, dimulai dari Galuh dan berakhir di Pakwan Pajajaran.

Sumber sejarah pertama yang dapat digunakan tentunya adalah prasasti. Jumlah prasasti yang telah ditemukan di Jawa Barat tidak banyak, lebih-lebih lagi yang menyebut nama kerajaannya dengan jelas.

Sebelum menyimpulkan apa gerangan nama kerajaan di Jawa Barat itu, ada baiknya jika melihat sebutan apa yang dikenal di luar Jawa Barat. Berita Portugis yang berasal dari Tomé Pires (1513 M) menyebut kerajaan yang berkuasa di Jawa Barat dan mengadakan hubungan dagang dengan Portugis

Foto 7.1 Prasasti Huludayeuh, Cirebon
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

... *regño de Çumda* ..., yang berarti kerajaan Sunda.[1] Demikian pula berita Antonio Pigafetta (1522 M)[2] yang memberitakan Sunda sebagai suatu daerah yang banyak menghasilkan lada.

Kutipan dari dua sumber asing dari abad XVI Masehi tersebut di atas menyebut suatu kerajaan Sunda di Jawa Barat. Bagaimana dengan sumber "asli"?

Prasasti yang tertua yang menyebut nama Sunda adalah prasasti Rakryan Juru Pangambat, berangka tahun 854 Saka (932 M), ditemukan di Desa Kebon Kopi, Bogor.[3] Prasasti yang berbahasa Melayu kuno ini menyebut: ... *ba [r] pulihkan haji sunda* .... Bagian kalimat ini dapat diterjemahkan: "Memulihkan raja Sunda". Jika tafsiran itu benar, hal itu dapat berarti bahwa sebelumnya telah ada "raja Sunda".[4]

Sumber kesusastraan lebih tegas lagi menyebut Sunda jika mengacu ke daerah yang sekarang disebut Jawa Barat. *Carita Parahyangan* (akhir abad XVI) menyebut Sunda sebagai nama kawasan. Demikian pula naskah Siksa Kanda ng Karesian yang berangka tahun 1440 Saka (1518 M.).[5] Berita-berita Cina zaman dinasti Ming (1368-1643 M.) juga menyebut adanya ... Sun-la ....[6]

Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah Jawa Barat sebenarnya umum dikenal dengan nama Sunda, sedang nama-nama lain yang berhubungan juga dengan daerah ini adalah nama pusat kerajaan atau ibu kota. Misalnya Galuh yang berkali-kali disebut dalam *Carita Parahyangan*. Nama lain yang sangat dikenal adalah Pajajaran. Nama ini dalam prasasti disebut ... Pakwan Pajajaran ...,[7] Pakwan,[8] dan Pajajaran.[9] Kedua sebutan mengisyaratkan nama suatu tempat berdasarkan konteks kalimatnya, demikian pula penyebutannya dalam *Carita Parahyangan*. Berbeda dengan Sunda yang dalam hubungan kalimat lebih mengesankan nama kerajaan.

---

1 Armando Cortesão, The Suma Oriental of Tomé Pires (2 jilid), 1944, hlm. 166–173 (jilid 1), hlm. 412–416 (jilid 2)

2 J.A. Robertson, Magellan's Voyage Around the World, 1906

3 *Notulen Bataviaasch Genootschap* (NBG), 1918, hlm. 91

4 Prasasti lain yang juga menyebut Sunda adalah Prasasti Sang Hyang Tapak I (952 Saka = 1030 M), Sang Hyang Tapak II (952 Saka = 1030 M), dan prasasti Horren (Kediri Selatan) yang berasal dari zaman Airlangga. Prasasti terakhir ini menarik perhatian karena terdapat di Jawa Timur dan menyebut "... Hatru sunda ..."

5 Atja, Sanghyang Siksakanda ng Karesian (transkripsi), 1973

6 W.P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources, 1960, hlm. 44

7 Prasasti Kebantenan, lempeng E42a

8 Prasasti Huludayeuh baris 3

9 Prasasti Kebantenan, lempeng E44

Seperti sudah disebut di muka nama Galuh, Pakwan Pajajaran, Pakwan, atau Pajajaran kemungkinan besar adalah nama pusat kerajaan yang telah mengalami perpindahan beberapa kali.

Seperti telah disebut dalam Bab II, di Jawa Barat terdapat bukti-bukti tertua adanya suatu bentuk pemerintahan seperti kerajaan. Kemudian terdapat suatu kekosongan berita otentik yang setingkat dengan prasasti. Prasasti yang menjadi bukti kegiatan suatu kerajaan yang kemudian, berasal dari tahun 932 M. Prasasti itu ditemukan di daerah Bogor, jadi masih daerah yang semula telah menjadi daerah kegiatan utama kerajaan Tarumanagara.

Suatu hal yang menarik adalah uraian mengenai awal kerajaan Sunda yang disajikan oleh *Carita Parahyangan*. Dalam naskah disebutkan nama Sañjaya yang juga disebut dalam prasasti Canggal (732 M), yang berasal dari halaman percandian Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang. Dalam prasasti ini Sañjaya dikatakan telah menggantikan raja sebelumnya yang bernama Sanna. Ia mempunyai hubungan darah dengan Sanna karena ia adalah anak Sannaha, saudara perempuan Sanna.

Adakah kiranya hubungan antara Sañjaya dari naskah yang berasal dari abad XVI Masehi itu dengan prasasti dari abad VIII Masehi yang didirikan di pelataran sebuah candi di Jawa Tengah?

Poerbatjaraka beranggapan bahwa Kitab *Carita Parahyangan* masih cukup berbobot sebagai sumber sejarah.[10] *Carita Parahyangan* menghubungkan tokoh Sañjaya ini dengan pusat kerajaan Galuh, karena di situ dikatakan bahwa Sena berkuasa di Galuh. Pada suatu ketika, terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Rahyang Purbasora, saudara seibu raja Sena. Sena dibuang ke Gunung Marapi bersama keluarganya, dan setelah dewasa Sañjaya kemudian mencari perlindungan kepada saudara tua ayahnya yang berdiam di Denuh. *Carita Parahyangan* juga memberikan bahwa akhirnya Sañjaya berhasil mengalahkan Rahyang Purbasora, sehingga dapat mengangkat dirinya sebagai raja. Mengingat bahwa daerah-daerah yang disebutkan di dalam *Carita Parahyangan* pada umumnya terletak di daerah Jawa Barat bagian timur, besar sekali kemungkinan bahwa Gunung Merapi yang dimaksudkan dalam naskah itu bukan Gunung Merapi yang terletak di Jawa Tengah, melainkan sebuah bukit bernama Merapi yang terletak di daerah Kuningan, Jawa Barat. Oleh karena itu pula, barangkali dapat diajukan keberatan atas usaha yang pernah dilakukan untuk "memindahkan" panggung peristiwa masa itu ke daerah Jawa Tengah seluruhnya.[11]

---

[10] Lihat Bab IV

[11] W.J. van der Meulen, "Tjarita Parahijangan dan Rahijang Sandjaja", Basis, 1966, XV (6), hlm. 161–170, XV (7), hlm. 193–202; XV (9), hlm. 277–282; XV (10), hlm. 307–313

1. Kerajaan Berpusat di Galuh

Di Jawa Barat terdapat beberapa buah kerajaan kecil. Selain pusat kerajaan Galuh yang diperintah oleh raja Sena sebelum dikalahkan oleh Rahyang Purbasora, masih ada kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Kuningan diperintah oleh Sang Seuweukarma, dan yang rupanya cukup disegani oleh Sañjaya, yaitu kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda ini dikatakan letaknya di sebelah barat Citarum, dan masih dari *Carita Parahyangan* diketahui bahwa Sañjaya adalah menantu raja Sunda yang bergelar Tohaan (Yang Dipertuan) di Sunda, yaitu Tarusbawa.

Berdasarkan berita-berita yang diperoleh dapat diduga bahwa agama yang dianut pada zaman Sañjaya ialah agama Hindu dari mazhab Siwa. Hal ini antara lain dinyatakan oleh prasasti Canggal, yang memuja dewa Siwa lebih banyak dibandingkan dengan pemujaan kepada kedua dewa Trimurti lainnya. Tentang sifat keagamaan ini, juga tidak bertentangan dengan berita *Carita Parahyangan*, yang menyebutkan bahwa pemujaan yang umum dilakukan oleh raja Galuh adalah sewabakti ring batara upati. Upati tentulah rusakan dari kata Sanskerta utpati atau utpata, yaitu nama lain untuk Yama, dewa pencabut nyawa. Menurut dongeng-dongeng Bali, Yama ini mempunyai sifat-sifat yang sama, baik dengan Siwa maupun dengan Kala, dan pemujaan terhadap para dewa itu pun tidak pula berbeda.[12] Di dalam tradisi sastra Jawa dan Sunda, utipati ini kini kadang-kadang berubah utipati, otipati, atau odipati.[13]

Rupanya, pada masa itu sudah tampak, ada tanda-tanda makin berkembangnya pengaruh agama Buddha, yang sebagaimana diketahui kemudian menjadi agama resmi raja-raja Mataram yang mendirikan Borobudur. Tentang ini pun, *Carita Parahyangan* sudah memberikan petunjuknya, melalui nasihat yang diberikan oleh Sañjaya kepada Rahyang Tamperan, anaknya: ... *haywa dek nurutan agama aing, kena aing mretakutna urang reya* ..., janganlah mengikuti agamaku, karena dengan itu aku ditakuti orang banyak.[14] Di dalam *Carita Parahyangan* disebutkan bahwa Sañjaya pergi berperang ke daerah-daerah lain agar daerah-daerah itu mau mengakui dan tunduk kepadanya. Daerah atau raja kecil yang diberitakan berhasil dikalahkan oleh Sañjaya adalah Mananggul, Kahuripan, Kadul, Balitar, Malayu, Kemir, Keling, Barus, dan Cina. Sehabis memerangi daerah-daerah itu, Sañjaya kembali lagi ke Galuh, pusat kerajaan Sunda pada masa pemerintahannya. Tentu saja tidak

---

[12] J. Gonda, Sanskrit in Indonesia, 1952, hlm. 135

[13] F.S. Eringa, Loetoeng Kasaroeng; Een Mythologisch Verhaal uit West Java, 1949, hlm. 290

[14] R. Ng. Poerbatjaraka, "Çriwijaya, de Çailendra-en de SañjayawamÇa", BKI, 1958, hlm. 259

semua yang disebutkan itu benar-benar diperangi dan ditundukkan oleh Sañjaya, tetapi hal itu bagaimanapun merupakan petunjuk bahwa Sañjaya telah berusaha memperluas daerahnya.

Pada waktu yang bersamaan, di Saunggalah diperintah oleh Sang Seuweukarma, masih saudara misan Sañjaya. Rupanya Sang Seuweukarma lebih berhasil menguasai daerah-daerah yang berjauhan, termasuk daerah-daerah yang diberitakan telah dikalahkan oleh Sañjaya sendiri. *Carita Parahyangan* misalnya, memberitakan daerah-daerah yang mengakui kekuasaan Sang Seuweukarma itu antara lain Keling, Pontang, Kahuripan, Wiru, Jawa, Balitar, Tuntang Sunda, Malayu, Kemir, Berawan, Cimaraupatah, dan Cina.

Tentu saja keadaan demikian tidak memuaskan Sañjaya, sehingga ia mengirimkan utusan ke Saunggalah. Rupanya Sañjaya mau juga berdamai sehingga sengketa antara mereka itu tidak sampai mengakibatkan terjadinya pertikaian di antara keduanya. Mereka membagi wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka masing-masing.

2. Pusat Kerajaan Prahajyan Sunda

Nama Sunda kemudian muncul lagi pada prasasti yang berasal dari tahun 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pangcalikan dan Bantarmuncang, di tepi Sungai Cicatih, daerah Cibadak, Sukabumi.[15] Prasasti Sanghyang Tapak[16] ini berbahasa Jawa kuno, dan hurufnya Jawa kuno. Nama tokoh yang disebut pada prasasti ini adalah Maharaja Sri Jayabhupati *Jayamanahen* Wisnumurtti Samarawijaya SakalabhuwanamandaleHwaranind ita Haro Gowardhana Wikramottungga-dewa, sedangkan daerah kuasanya disebut *Prahajyan Sunda*. Selain bahasa dan huruf serta angka tahunnya, prasasti ini juga menarik, karena gelar yang dipergunakan Jayabhupati ternyata sangat mirip dengan gelar raja Airlangga di Jawa Timur, yang memerintah pada masa yang bersamaan pula. Hal ini menimbulkan pelbagai dugaan. Karena gelar yang hampir sama itu ada anggapan bahwa Sri Jayabhupati adalah salah seorang raja bawahan Airlangga[17] di samping adanya anggapan yang justru sebaliknya. *Jayamanahen* yang terselip pada nama yang demikian panjang itu ditafsirkan sebagai peringatan bahwa ia telah berhasil mengalahkan musuh besarnya. Oleh karena Jayabhupati memerintah sezaman dengan Airlangga,

---

15 C.M. Pleyte, "Maharaja Çri Jayabhupati, Soenda's Oudst Bekende Vorst: Vijfde Bijdrage tot de Kennis van het Oude Soenda", TBG, 1915, hlm. 201–218

16 L-C. Damais, "Études d'Épigraphie IndonÉsienne III," BEFEO, 1952, XLVI (2), hlm. 80–81

17 L-C. Damais, "Epigrafische Aantekeningen: V. Koning Jayabhupati van Sunda", TBG, LXXXIII, 1949, hlm. 16–18

musuh yang dimaksudkan itu tidak lain dari Airlangga.[18] Sementara itu, ada pula yang beranggapan bahwa gelar yang sama itu tidak ada sangkut paut apa pun dengan kehidupan politik di antara kedua daerah yang bersangkutan. Kedua daerah itu masing-masing hidup tidak saling mengganggu, walaupun diakuinya juga, bahwa di dalam bidang budaya bukanlah tidak ada apa-apanya dari adanya kenyataan seperti itu.[19]

Jika mengingat bahwa pada masa itu Airlangga sendiri masih sibuk berusaha menyatukan daerah-daerah yang berdekatan, barangkali kemungkinan terakhir itulah yang paling dapat diterima. Bukankah raja Wijaya dari Wengker baru berhasil ditaklukkan Airlangga pada tahun 1035 Masehi? Akan tetapi, berdasarkan bahasa dan isi prasastinya itu sendiri memang harus diakui bahwa tentulah ada hubungan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur pada waktu tersebut. Pernyataan Sri Jayabhupati berulang kali bahwa ia adalah haji i sunda, raja di Sunda, dapat dianggap sebagai usahanya untuk lebih meyakinkan orang banyak akan kedudukannya sebagai raja Sunda. Hal seperti itu tidak pernah ditemukan pada prasasti-prasasti berbahasa Sunda yang berasal dari zaman yang lebih kemudian. Demikian juga halnya dengan kutukan-kutukan yang termuat pada prasasti ini, sama sekali tidak biasa didapatkan pada prasasti-prasasti berbahasa Sunda. Akan tetapi, kutukan seperti itu merupakan hal yang biasa pada prasasti-prasasti berbahasa Jawa kuno dari zaman yang sama. Prasasti berbahasa Sunda pada umumnya tidak memuat kutukan yang demikian mengerikan, tetapi berisi harapan agar mereka yang melakukan apa yang dianjurkan pada prasasti itu, memperoleh kebahagiaan, sedangkan yang melanggarnya, celaka. Apakah adanya hal-hal demikian pada prasasti yang dikeluarkan oleh Jayabhupati itu sebenarnya disebabkan ia sadar bahwa dirinya adalah seorang yang berbudaya lain di tengah penduduknya yang berbudaya Sunda?

Prasasti itu menyebutkan bahwa pada tahun 1030 M Jayabhupati ... *magaway tepek i purwwa san hyan tapak* ..., membuat tepek (semacam daerah larangan) di sebelah timur Sanghyang Tapak. Daerah larangan atau daerah tertutup itu berupa sebagian dari sungai, yang kemudian dinyatakan tertutup untuk segala macam penangkapan ikan ... *mwan tan hanani baryya barrya Hila. i rikan lwah tan panalapa ikan sesini lwah* ..., dan tidak ada yang diperbolehkan di sungai itu menangkap ikan dan penghuni sungai (lainnya). Sementara itu, daerah larangan itu ditetapkan pula batas-batasnya ... *makahinan san hyan tapak*

18 C.M. Pleyte, ibid.

19 N.J. Krom, Zaman Hindu (diterjemahkan oleh Arief Effendi), 1954, hlm. 136

wates kapujan i hulu. i sor makahingan i san hyan tapak wates kapujan di wungkalagön kalih ..., berbataskan Sanghyang Tapak tempat pemujaan di hulu. Di hilir berbatas Sanghyang Tapak tempat pemujaan terdapat dua buah batu besar.

Prasasti itu menyebutkan adanya pemujaan terhadap tapak kaki. Pemujaan seperti itu bukanlah suatu hal yang aneh di Indonesia. Di Nias misalnya, ditemukan beberapa buah batu dengan pahatan tapak kaki. Batu tapak demikian di sana disebut *tedro-hulu* atau *batu nitaru'o*.[20] Kemudian yang semacam itu juga didapatkan di Desa Pasir Panjang, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau terdapat tapak kaki yang dianggap sebagai tapak kaki Buddha karena tidak jauh dari situ terdapat prasasti yang ditulis dalam tiga baris dengan huruf Nagari dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu berisi tentang pemujaan terhadap kaki (Buddha) Gautama.[21]

Pada masyarakat-masyarakat yang sederhana, lambang tapak kaki ini, baik tapak kaki manusia maupun hewan, mempunyai ciri-ciri yang istimewa, untuk menggambarkan kehadirannya di dunia ini, dan karenanya dianggap mempunyai suatu rahasia.[22] Jadi, mudahlah dimengerti apa sebabnya seseorang yang dianggap memiliki kelebihan akan meninggalkan tapak kakinya, karena tapak kaki itu melambangkan kehadirannya.

Adapun Sangyang Tapak yang dimaksud pada prasasti itu adalah tapak kaki yang ditemukan terpahat pada batu di puncak Gunung Perbakti, daerah Cicurug, Sukabumi. Jika dihubungkan dengan daerah larangan itu sendiri yang berupa sebagian dari sungai yang baik di hulu maupun di hilirnya berbataskan Sanghyang Tapak, besar sekali kemungkinan dugaan di atas terlalu dicari-cari. Selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan itu akan dimakan sumpah. Pada bagian yang meminta kesaksian para dewa dan leluhur disebutkan, sumpah yang bakal ditimpakan kepada para pelanggar itu ialah: terbelah kepalanya, terminum darahnya, terpotong-potong ususnya, terisap otaknya, dan terbelah dadanya. Sumpah itu berlaku untuk sepanjang masa, dan barangkali pengaruhnya secara tidak disadari masih terasa sampai sekarang, karena orang yang tinggal di sekitar tempat itu sekarang pun jarang yang berani mandi di situ.

Dari gelarnya yang panjang dapat pula diketahui bahwa Sri Jayabhupati adalah seorang penganut agama Hindu dari mazhab Waisnawa. Ini juga sama

---

[20] P. Kleiweg de Zwaan, "Enkele opmerkingen naar aanleideing van de steenen met voetafbeeldingen of het eiland Nias", FBG, I, 1929, hlm. 313–316

[21] J.L.A. Brandes, "A Letter from Dr. J. Brandes on the Kerimun Inscription", JMBRAS, no. 10, 1932, hlm. 21–22

[22] J. Ph. Vogel, "The Earliest Sanskrit inscriptions of Java", POD, I, 1925, hlm. 15–35

dengan agama yang dianut oleh Airlangga di Jawa Timur sehingga barangkali dapat dikatakan bahwa agama resmi di Pulau Jawa pada awal abad XI M adalah agama Hindu aliran Waisnawa. Walaupun prasasti Sanghyang Tapak menyebutkan nama daerah yang dikuasai oleh Jayabhupati, dan prasasti tersebut ditemukan di sekitar Sungai Cicatih, ini tidak berarti bahwa pusat kerajaan Sunda zaman itu, juga terletak di situ. Hal ini disebabkan prasasti itu sebenarnya hanya berhubungan dengan peresmian suatu daerah larangan, yang tidak mustahil letaknya jauh dari pusat kerajaan itu sendiri. Apakah tokoh Sri Jayabhupati ini dapat dicari kesesuaiannya dengan salah seorang tokoh yang disebutkan dalam *Carita Parahyangan*? Berdasarkan perhitungan tahun-tahun lamanya pemerintahan seorang raja sebagaimana disebutkan dalam *Carita Parahyangan*, akan terdapat kecocokan masa pemerintahan Sri Jayabhupati ini dengan tokoh Sang Rakeyan Darmasiksa pada *Carita Parahyangan*. Tokoh ini dikaitkan sebagai titisan Batara Wisnu, suatu hal yang rupanya juga bukan suatu kebetulan dicatat dalam *Carita Parahyangan*. Sri Jayabhupati juga, berdasarkan prasastinya, dapat dipastikan beragama Waisnawa, sehingga sudah terdapat ciri-ciri kesamaan antara kedua tokoh itu. Kemudian *Carita Parahyangan* ini juga menyebutkan bahwa Rakeyan Darmasiksa telah membuat beberapa buah daerah kabuyutan (= semacam daerah larangan), sedangkan sebagaimana diketahui, Jayabhupati juga pada prasastinya menonjolkan peresmian daerah larangan ini. Petunjuk yang ketiga ialah tentang apa sebabnya Rakeyan Darmasiksa dapat cukup lama memerintah, yaitu karena ia memperoleh berkah dari para pendeta yang berpegang teguh kepada milik asli Sunda, yaitu Sanghyang Darma dan *Sanghyang Siksa*. Jika diperhatikan, bahwa berulang kali Jayabhupati menekankan kedudukannya sebagai *haji ri sunda*, apakah tidak terbuka adanya kemungkinan bahwa agar kedudukannya sebagai raja di Sunda itu kukuh, ia pun meminta berkah kepada para pendeta yang berpegang teguh kepada Sanghyang Darma dan *Sanghyang Siksa* pula?

Jika dugaan ini dapat diterima, selanjutnya terbuka pula kemungkinan untuk menempatkan Sri Jayabhupati dalam suatu rangkaian kisah sejarah Sunda sebagai suatu kesatuan. Ini berarti bahwa *Prahajyan Sunda*, kerajaan Sunda, yang diperintah oleh Jayabhupati itu, sebenarnya merupakan suatu babak saja dari seluruh kisah sejarah Sunda. Jadi, tidak merupakan suatu negara atau kerajaan tersendiri. Selanjutnya, jika dugaan bahwa Rakeyan Darmasiksa pada *Carita Parahyangan* sama dengan tokoh Sri Jayabhupati pada prasasti Sanghyang Tapak, dapatlah diduga bahwa pusat kerajaan Sunda pada masa pemerintahan Jayabhupati terletak di Pakwan Pajajaran. Pusat kerajaan itu tidak lama kemudian berpindah lagi untuk yang kesekian kalinya, dan kali ini yang terpilih sebagai pusat kerajaan adalah Kawali yang tidak jauh letaknya

dari bekas pusat kerajaan Galuh pada masa Sañjaya.

Ditemukannya prasasti Horren,[23] ternyata cukup menarik perhatian. Prasasti ini antara lain menyebutkan bahwa penduduk kampung Horren sering kali merasa tidak aman karena ada kemungkinan datang musuh dari Sunda. Menurut Stutterheim, prasasti ini diduga berasal dari zaman Majapahit, dan jika memang demikian, sudah pasti prasasti itu berasal dari zaman sesudah terjadinya peristiwa Bubat pada tahun 1357 M. Akan tetapi, jika diperhatikan bahasanya dengan saksama, jelas bahwa gaya dan struktur bahasanya lebih dekat kepada bahasa Jawa kuno zaman Airlangga (abad XI M), sehingga besar sekali kemungkinannya bahwa prasasti itu memang berasal dari abad Xl M. Jika demikian halnya, apakah tidak mungkin Sunda yang dimaksudkan pada prasasti itu ialah Sunda pada masa pemerintahan Sri Jayabhupati, yang sezaman dengan masa pemerintahan Airlangga? Sayang sekali, karena tidak lengkap, tidak dapat disimpulkan lebih jauh apa yang sebenarnya dikandung oleh prasasti itu. Sementara pada waktu itu Airlangga sendiri masih sibuk memerangi raja-raja daerah sekelilingnya yang pada umumnya terletak di daerah Jawa Timur, memang cukup berbahaya jika tiba-tiba datang serangan dari daerah yang lebih jauh letaknya sehingga di dalam usaha Airlangga menyatukan dan memperluas wilayah kerajaannya, daerah Sunda tidak diperhitungkan.

Setelah beberapa lamanya tidak terdengar adanya sengketa dengan negara-negara tetangga, pada tahun 1357 M terjadi lagi sengketa yang sekali ini berakhir dengan suatu perang yang cukup seru. Bahwa peristiwa Bubat merupakan suatu peristiwa yang sangat penting, terbukti dari rekaman-rekaman yang diperoleh melalui beberapa buah naskah. Naskah *Pararaton*, *Kidung Sundayana*, dan *Carita Parahyangan* menyebutkan terjadinya peristiwa tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk di Majapahit itu melibatkan raja Sunda bernama Prebu Maharaja, yang memusatkan pemerintahannya di daerah Kawali. Jika naskah *Nagarakrtagama* yang ditulis oleh Pu Prapañca pada tahun 1365 M tidak memberitakan apa pun tentang peristiwa itu, haruslah hal ini ditinjau dari kedudukan sang penyair waktu menuliskannya. Pada waktu menulis naskah *Nagarakrtagama*, Prapañca sedang berada dalam pembuangan sehingga untuk mengambil hati raja Hayam Wuruk agar sudi menerimanya kembali, dengan sadar ia sengaja tidak menuliskan hal-hal yang justru memburukkan nama raja. Jadi, jika Prapañca

[23] W.F. Stutterheim, Een beschreven koperplaat, op. cit., hlm. 102–104

Foto 7.2 Prasasti Kawali, Ciamis, Jawa Barat
(*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

tidak menyinggung sedikit pun juga peristiwa Bubat itu bukanlah karena ketidaktahuannya, melainkan justru karena ia tidak mau menuliskannya.

3. Pusat Kerajaan Kawali

Pada zaman pemerintahan siapa pusat kerajaan berpindah lagi dari Pakwan Pajajaran ke Kawali tidak dapat ditentukan dengan pasti. Menurut bukti-bukti prasasti yang terdapat di Kampung Astanagede Kawali dapat diketahui bahwa setidak-tidaknya pada masa pemerintahan Prabu Raja Wastu pusat kerajaan telah berada di situ. Dari prasasti-prasasti Kawali itu dapat diperoleh keterangan bahwa Prabu Raja Wastu yang bertakhta di kota Kawali dengan keratonnya bernama Surawisesa telah membuat parit di sekeliling keraton. Selain itu, ia pun telah pula mendirikan desa-desa dan meresmikannya, serta mengharapkan agar mereka yang datang kemudian berbuat kebajikan, sehingga dengan demikian dapat hidup lama dan berbahagia di dunia. Harapan seperti itu juga ditemukan di tempat lain, yaitu di dalam sebuah naskah bernama Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang berasal dari tahun 1518 Masehi.[24]

Prabu Raja Wastu pada prasasti Kawali[25] ini adalah tokoh yang sama dengan yang disebut sebagai Rahyang Niskala Wastu Kañcana pada prasasti Batutulis[26] dan Kebantenan[27] yaitu kakek Sri Baduga Maharaja. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa Prabu Wastu memerintah di Kawali, dan setelah meninggal kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Rahyang Ningrat Kañcana pada prasasti Kebantenan atau Rahyang Dewa Niskala pada prasasti Batutulis. Nama Rahyang Ningrat Kañcana pada prasasti Kebantenan disebutkan sebagai tokoh yang digantikan oleh Susuhunan di Pakwan Pajajaran (... *make nguni ka susuhunan ayöna di pakwan pajajaran* ...) hingga dapat ditentukan bahwa Susuhunan itu adalah Sri Baduga Maharaja yang disebutkan pada prasasti Batutulis.

Menurut prasasti Batutulis, Rahyang Niskala Wastu Kañcana dimakamkan di Nusalarang, sedangkan Rahyang Dewa Niskala di Gunatiga. Berita ini tidak bertentangan dengan *Carita Parahyangan*, yang menyebutkan bahwa *Prebu*

---

[24] Atja, *Sanghyang Siksa*nda ng Karesian

[25] K.F. Holle, "Vlugtig berigt omtrent enige lontar-handschriften, afkomstig uit de Soendalanden, door Radhen Saleh aan het Bataviaasch Genootschap van KW ten geschenke gegeven met toepassing of de inscripties van Kawali, TBG, XVI, 1867, hlm. 450–491

[26] R.Ng. Poerbatjaraka, "De Batoe Toelis bij Buitenzorg", TBG, LIX, 1921, hlm. 380–401

[27] C.M. Pleyte, "Het (jartaal) op den Batoe Toelis nabij Buitenzorg", TBG, LIII, 1911, hlm. 155–220

Niskala Wastu Kañcana surup di nusalarang ring giri wanakusumah, sedangkan penggantinya nu surup di gunungtilu, yang dipusarakan di Gunungtilu. Di dalam *Carita Parahyangan*, tokoh Dewa Niskala atau Ningrat Kañcana ini tidak disebutkan namanya, tetapi dikatakan sebagai Tohaan di Galuh (= Yang Dipertuan di Galuh). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sampai pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan Sunda masih terletak di Galuh, tepatnya di sekitar kota Kawali sekarang.

Menurut *Pararaton*,[28] pada tahun 1357 Masehi terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Pasunda-Bubat, suatu pertikaian politik antara kerajaan Majapahit dan Sunda. Peristiwa ini juga dikenal di dalam *Carita Parahyangan*, yang menyebutkan: ... *manak deui prebu maharaja. lawasniya ratu tujuh tahun. kena kabawa ku kalawisaya, kabancana ku seuweu dimanten, ngaran tohaan. mu(n) dut agung dipipanumbasna. urang reya sa(ng)kan nu angkat ka jawa, mumul nu lakian di sunda pan prangprang di majapahit*, ...[29] (Punya anak, Prebu Maharaja, lamanya menjadi raja tujuh tahun, lantaran terkena bencana, terbawa celaka oleh anaknya yang bernama Tohaan, meminta terlalu besar saratnya. Bermula banyak orang yang pergi ke Jawa, karena tidak mau bersuami di Sunda. Terjadilah perang di Majapahit).

Dari *Carita Parahyangan* itu jelas bahwa yang memerintah ketika itu adalah Prebu Maharaja, dan karena dikatakan bahwa ia berkuasa selama tujuh tahun, dapat diperkirakan bahwa ia mulai menjadi raja pada tahun 1350 M, pada tahun yang sama dengan naik takhtanya Hayam Wuruk di Majapahit. Dalam pertempuran di Bubat itu, hampir seluruh pasukan Sunda gugur. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa Sunda sendiri lalu tidak mempunyai raja lagi. *Carita Parahyangan* memberitakan bahwa sang raja masih mempunyai seorang anak yang terkenal, bernama Niskala Wastu Kañcana. Tokoh inilah yang juga dikenal pada prasasti Kawali, Kebantenan, dan Batutulis, walaupun dengan nama yang agak berbeda.

Ketika peristiwa Bubat terjadi, Wastu Kañcana masih kecil, sehingga pemerintahan untuk sementara diserahkan kepada pengasuhnya yang bernama Hyang Bunisora, yang kemudian bertindak seolah-olah ia sendirilah raja yang sah di Sunda. Berdasarkan perhitungan masa pemerintahan yang termuat di dalam *Carita Parahyangan*, dengan berpegang kepada tahun 1579 M sebagai tahun keruntuhan kerajaan Sunda,[30] dapat ditentukan

---

[28] J.L.A. Brandes, "*Pararaton* (Ken Arok), of het boek der koningen van Toemapel en van Majapahit", TBG, LXII, 1920

[29] Atja, Tjarita Parahijangan. Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi, 1968, hlm. 55

bahwa Hyang Bunisora berkuasa selama 14 tahun, dan bukannya enam tahun sebagaimana pendapat sebelumnya.[31] Adanya selisih delapan tahun ini disebabkan perbedaan menafsirkan kata *sadewidasa*, yaitu lamanya masa pemerintahan raja Sunda terakhir Nusiya Mulya, yang seharusnya 12 tahun,[32] menjadi 20 tahun.[33] Dengan demikian, masa pemerintahan Hyang Bunisora jatuh pada tahun 1357 – 1371 Masehi.

Setelah dewasa, Wastu Kañcana menerima kembali tampuk pemerintahan dari Hyang Bunisora. Ia memerintah cukup lama, 104 tahun. Masa pemerintahannya yang sangat lama ini antara lain disebabkan Wastu Kañcana selama memerintah selalu baik menjalankan agama, serta memerhatikan kesejahteraan rakyat. Pada masa pemerintahannya *...nya mana sang rama e(na)k mangan, sang resi enak ngaresisasana, ngawakan na purbatisti, purbajati.sang dis(r)i enak masini ngawakan na manusasana, ngaduman alas pari-alas. ku beet hamo diukih, ku gede hamo diukih. nya mana sang tarahan enak lalayaran ngawakan manurajasasana ... ngawakan sanghiyang rajasasana, angadeg di sanghiyang linggawesi, brata siya puja tanpa lum. sang wiku e(na)k ngadewasasana ngawakan sanghiyang watangageung, enak ngadeg manu-raja-suniya ..*, makanya tetua kampung nikmat makan, sang resi tenteram menjalankan peraturan keresiannya mengamalkan purbatisti purbajati. Dukun-dukun dengan tenteram mengadakan perjanjian-perjanjian memakai aturan yang bertalian dengan kehidupan, membagi-bagi hutan dan kitarannya, baik oleh si kecil maupun si besar tidak ada kerewelan sedikit pun, bahkan para bajak laut pun merasa aman berlayar menurut aturan sang raja ... berpegang teguh pada undang-undang raja, berdiri pada Sanghyang Linggawesi, berpuasa dan memuja tidak kenal batas. Sang wiku dengan tenang menjalankan undang-undang dewa, mengamalkan Sanghyang Watangageung. Karena keyakinannya jualah sang raja meletakkan jabatannya.[34]

Dibandingkan dengan pemberitaannya mengenai raja-raja atau tokoh lain, cukup menarik bahwa khusus tentang Prabu Niskala Wastu Kañcana ini, *Carita Parahyangan* menyediakan cukup banyak tempat, dan isinya berupa pujian terhadap raja. Padahal tentang tokoh yang lain, pemberitaannya cukup satu atau dua kalimat saja. Apakah tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hal ini?

---

[30] Hoesein Djajadiningrat, Critische Beschouwing van de Sajarah Banten: Bijdrage ter kenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving, 1913

[31] M. Amir Sutaarga, Prabu Siliwangi, 1965

[32] Atja, Tjarita, hlm. 58

[33] M. Amir Sutaarga, op. cit.

[34] Atja, op. cit., hlm. 56

Prabu Niskala Wastu Kañcana yang memerintah selama 104 tahun itu (1371–1471 M), kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Tohaan di Galuh. Raja ini memerintah selama 7 tahun. Ia tidak lama menjadi raja, karena ... *kena salah twa(h) bogo(h) ka estri larangan ti kaluaran* ..., karena salah tindak, jatuh cinta kepada perempuan terlarang dari luar.[35]

4. Pusat Kerajaan Pakwan Pajajaran

Ningrat Kañcana atau Tohaan di Galuh digantikan oleh anaknya sendiri, yang bernama Sang Ratu Jayadewata menurut *Carita Parahyangan* dan memerintah selama 39 tahun (1482–1521 M). Pada prasasti Kebantenan, tokoh ini disebutkan sebagai "yang kini menjadi Susuhunan di Pakwan Pajajaran". Dapat dipastikan, tokoh ini pulalah yang pada prasasti Batutulis disebut dengan nama Prabu Guru Dewataprana, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Nama terakhir ini boleh dikatakan sama dengan namanya pada *Carita Parahyangan*, yaitu sama-sama mengandung unsur dewata.

Tokoh inilah yang pada prasasti Batutulis disebut sebagai ya nu nyusukna pakwan, dan ia juga yang memariti Pakwan di samping beberapa buah karyanya yang lain sebagaimana disebutkan pada prasasti Batutulis. Berita ini dapat diartikan bahwa sejak masa pemerintahannya, pusat kerajaan telah beralih lagi dari Kawali dengan keratonnya yang bernama Surawisesa, ke Pakwan Pajajaran. Keraton Pakwan Pajajaran di dalam *Carita Parahyangan* disebut namanya *sri bima unta rayana madura suradipati*, sedangkan pada naskah K406 namanya *sri bima punta narayana madura suradipati*.[36] Suatu hal yang menarik, karena baik keraton Kawali maupun keraton Pakwan Pajajaran, sama-sama mengandung unsur sura, suatu hal yang barangkali masih dilanjutkan pada nama keraton Banten, yaitu *surasowan* dan *surakarta* atau jayakarta untuk tempat yang sebelum jatuh ke tangan Islam bernama Sunda Kalapa.[37]

Menurut *Carita Parahyangan*, Sang Ratu Jayadewata menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tenteram. Pada masa itu, tidak terjadi perang. Jika pun terjadi rasa tidak aman, hal itu hanya terjadi pada mereka yang berani melanggar *Sanghyang Siksa*.

---

[35] Atja, ibid., hlm. 56

[36] Atja, op. cit., hlm. 73

[37] H.A. ten Dam, "Verkenningen rondom Padjadjaran", IndonesiË, 10 (4), 1957, hlm. 290–310

Mengingat naskah *Carita Parahyangan* ini berasal dari akhir abad XVI Masehi, apakah tidak mungkin, jika *Sanghyang Siksa* yang dimaksudkannya itu adalah Sanghyang Siksakanda ng Karesian, sebuah naskah berasal dari tahun 1518 M? Pada bagian pembukaannya, Siksakanda ini menyebutkan, bahwa naskah ini ialah *sanghyang Dasakreta kundangön urang reya* (Sanghyang Sepuluh Tindakan, untuk dijadikan pegangan masyarakat). Sanghyang Sepuluh Tindakan atau *Dasakreta* itu sendiri, disebutkan sebagai *kalangkang Dasasila, maya-maya sangyang Dasamarga, kapretyaksaan dasa indrya*, bayang-bayang Sanghyang Sepuluh Asas, hakikat Sanghyang Sepuluh Jalan, didasari oleh Sangyang Sepuluh Drya.[38]

Pada masa pemerintahan Sang Ratu Jayadewata, sudah ada penduduk kerajaan Sunda yang beralih agama. Hal ini antara lain dijelaskan di dalam berita Portugis yang berasal dari Tomé Pires (1513 M), yang mengatakan bahwa di Cimanuk, yaitu kota pelabuhan yang sekaligus merangkap menjadi batas kerajaan Sunda di sebelah timur, banyak dijumpai orang Islam.[39] Mereka inilah barangkali yang dalam *Carita Parahyangan* disebutkan yang merasa tidak aman lantaran melanggar *Sanghyang Siksa* itu.

Sebegitu jauh, pengaruh Islam itu memang belum sampai masuk ke pusat kerajaan, sebagaimana antara lain dinyatakan di dalam *Carita Parahyangan*, bahwa ... mana mo kadatangan ku musuh ganal, musu(h) alit ..., karena tidak terdatangi oleh musuh kasar, musuh halus. Yang dimaksudkan dengan musuh kasar ialah balatentara, sedangkan musuh halus ialah tersebarnya kepercayaan atau agama baru, yang keduanya itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan.[40] Akan tetapi, betapapun makin menyebarnya pengaruh Islam ini, rupanya sudah diperhitungkan juga oleh Sang Ratu Jayadewata. Dalam hubungan inilah, ia antara lain berusaha untuk mencari sekutu, yaitu Portugis yang ketika itu sudah menduduki Malaka.

Oleh berita Portugis dikatakan, bahwa pada tahun 1512 M dan 1521 M, Ratu Samiam (= Sanghyang) dari kerajaan Sunda, memimpin perutusan ke Malaka. Akan tetapi, ketika pada tahun 1522 M Hendrik de LemÉ memimpin perutusan Portugis ke Sunda yang beribu kota di Dayo (= Dayeuh, kota), Ratu Samiam sudah berkuasa di sana sebagai raja.[41] Jika hal ini dihubungkan dengan *Carita Parahyangan*, berarti bahwa Ratu Samiam menurut berita Portugis itu tidak lain dari Prabu Surawisesa, seorang raja yang gagah dan berani, yang menggantikan Sang Ratu Jayadewata dan memerintah selama 14 tahun (1521–

---

38 Atja, Sanghyang, hlm. 3

39 Armando Cortesão, The Suma Oriental of Tomé Pires (2 jilid), 1944, hlm. 173

40 Atja, Tjarita, hlm. 75–76, cat. 39

41 Hageman, 1867, hlm. 210

1535 M). Ini berarti pula bahwa pada waktu memimpin perutusan ke Malaka, kemungkinan terbesar adalah Ratu Samiam atau Surawisesa ini menduduki jabatan sebagai putra mahkota.

Barangkali, berita *Carita Parahyangan* tentang terjadinya serbuan dari musuh yang banyak sekali dan tidak diketahui dari mana asalnya, juga dilakukan oleh orang-orang Islam. Ketika peristiwa itu terjadi, yang menjadi raja adalah Prabu Ratudewata (1535–1543 M). Masa pemerintahannya diakui sebagai masa yang penuh derita. Sebelum tentara Islam memperoleh kemenangan pada tahun 1559 M, beberapa kali pula sudah pasukan Islam berusaha merebut ibu kota kerajaan, tetapi sedemikian jauh usaha itu belum berhasil. Serangan-serangan itu dipimpin langsung oleh Maulana Hasanuddin yang dibantu oleh anaknya, Maulana Yusuf.[42] Kemenangan Islam itu sendiri dinyatakan pada kalimat terakhir *Carita Parahyangan*. Berita *Carita Parahyangan* dan Portugis itu, sedemikian jauh tidak pula bertentangan dengan berita yang dimuat di dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, sebuah naskah yang bertalian dengan sejarah mulajadi Cirebon. Di dalam naskah itu dikatakan bahwa sekitar abad XV Masehi, di Cirebon telah ada perguruan Islam, jauh sebelum Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dilahirkan.[43] Pada masa itu memang diduga Cirebon sudah merupakan sebuah kota yang cukup ramai, dengan penduduknya campuran antara orang-orang Sunda dan orang-orang Jawa.[44]

Jatuhnya Sunda Kalapa, pelabuhan terbesar kerajaan Sunda ke tangan pasukan Islam pada tahun 1527 M, telah menyebabkan terputusnya hubungan antara pusat kerajaan Sunda yang terletak di pedalaman, dengan daerah luar. Bala bantuan Portugis tidak pernah dapat sampai ke Dayo, karena keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan. Jalan niaga kerajaan Sunda satu per satu jatuh ke tangan pasukan Islam, sehingga raja hanya dapat bertahan di pedalaman.

Dalam keadaan seperti itu, kerajaan Sunda justru sudah tidak punya lagi pemimpin yang meyakinkan. Prabu Ratudewata yang menggantikan

---

[42] K.H. Rais, Sadjarah Tjirebon, 1956; C.M. Pleyte, "De Patapan Andjar Soeka Resi, unders gezegd de Kluizenarij op den Goenoeng Padang: Tweede Bijdrage tot de kennis van het oude Soenda", TBG, LV, 1 913, hlm. 295

[43] Atja, *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari (Sedjarah Muladjadi Tjirebon)*, 1972; P.S. Sulendraningrat, Purwaka Tjaruban Nagari, 1972

[44] R.A. Kern, "Het Javaansche Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan", BKI, 113, 1957; Hoesein Djajadiningrat, "Kanttekeningen bij het Javaansche Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan", BKI, 113, 1957

Surawisesa, malah hidup sebagai raja pendeta, dan tidak menghiraukan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya itulah terjadi serangan-serangan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Raja yang kemudian menggantikannya, Sang Ratu Saksi (1543–1551 M), adalah seorang yang kejam dan suka main perempuan. Demikian pula penggantinya, Tohaan di Majaya (1551–1567 M). Ia malah memperindah keraton, mabuk-mabukan dan berfoya-foya, serta melupakan tugasnya sebagai raja. Pada masa pemerintahan Nusiya Mulya, raja terakhir, kerajaan pun sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Kerajaan Sunda dikalahkan oleh Islam pada akhir masa pemerintahannya.

Memasuki abad XVI M corak hubungan politik kerajaan Sunda dengan negara lain, mempunyai latar belakang yang berbeda dengan hubungan-hubungan sebelumnya. Menjelang akhir abad XV M, di daerah kerajaan Sunda sudah mulai ada orang-orang yang beragama Islam. Mereka pada umumnya tinggal di kota pelabuhan, dan pelabuhan Sunda yang paling banyak ditinggali orang Islam, ialah Cimanuk, yang menjadi batas kerajaan di sebelah timur. Hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil, karena di sebelah timur Cimanuk terletak kota Cirebon yang penduduknya sudah beragama Islam.

Di dalam *Carita Parahyangan*, petunjuk ke arah sudah mulai adanya orang-orang yang beralih agama itu, digambarkan pada masa pemerintahan Sang Ratu Jayadewata (1482–1521 M). Pada masa itu sudah mulai banyak orang yang melanggar *Sanghyang Siksa*, padahal sebagaimana diketahui, *Sanghyang Siksa* adalah pedoman hidup yang dianut oleh penduduk Sunda. Pada masa pemerintahan Jayadewata ini, penyebaran Islam dari Demak ke arah barat, makin cepat. Dengan dikuasainya Cirebon, ancaman ke pusat kerajaan Sunda makin besar saja. Raja Jayadewata menyadari kedudukannya yang terjepit dan sulit itu, sehingga untuk memperkuatnya, ia merasa perlu melakukan hal-hal yang tepat.

Prasasti Kebantenan menyebutkan usaha Jayadewata untuk membuat daerah kependetaan bernama Jayagiri dan Sunda Sembawa. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai usahanya untuk lebih menggiatkan usaha pengajaran keagamaan. Demikian juga halnya dengan usaha menuliskan Sanghyang Siksakanda ng Karesian pada tahun 1518 M, merupakan usahanya yang lain ke arah itu, karena sebagaimana dikatakan pada bagian pembukaannya, naskah itu dimaksudkan sebagai pedoman untuk masyarakat pada umumnya.

Di bidang politik, Jayadewata juga melakukan tindakan-tindakan yang cukup tegas di dalam usahanya menghadapi meluasnya Islam di daerahnya. Ia melakukan hubungan dengan Portugis, yang sejak tahun 1511 M telah

menguasai bandar Malaka. Selain untuk menyelamatkan perniagaan Sunda, juga hubungan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan kerajaan Sunda secara umum. Hubungan dengan Portugis sudah dimulai pada tahun 1512 M, ketika Jayadewata mengirimkan perutusan yang dipimpin oleh Ratu Samiam (= Sanghyang) yang meminta bantuan kepada Alfonso d'Albuquerque, penguasa bandar Malaka. Ratu Samiam untuk kedua kalinya datang ke Malaka pada tahun 1521 M dengan maksud yang sama, tetapi pada waktu itu penguasa Malaka sudah diganti oleh Jorge d'Albuquerque.[45]

Sebagai kunjungan balasan, juga dalam rangka persetujuan di antara kedua belah pihak, pada tahun 1522 M pihak Portugis mengirimkan Hendrik de LemÉ memimpin perutusan ke Sunda. Ketika itu, Ratu Samiam yang pernah memimpin perutusan Sunda ke Malaka, sudah menjadi raja dan berdiam di Dayo, pusat kerajaan Sunda. Hal ini berarti bahwa pada waktu itu, telah terjadi pergantian takhta di Sunda, dan hal ini ternyata tidak bertentangan dengan berita *Carita Parahyangan* yang mengatakan bahwa Jayadewata digantikan oleh Surawisesa setelah ia berkuasa selama 39 tahun. Menurut perhitungan yang didasarkan pada tahun 1579 M sebagai tahun terakhir pemerintahan raja Sunda Nusiya Mulya yang memerintah selama 12 tahun, maka akhir pemerintahan Jayadewata tersebut jatuh pada tahun 1521 M.

Dari berita itu dapat pula dipastikan bahwa Surawisesa menurut *Carita Parahyangan* adalah Ratu Samiam menurut berita Portugis. Ini berarti bahwa Ratu Samiam sebelum naik takhta mempunyai kedudukan yang cukup tinggi, dan kemungkinan besar sebagai putra mahkota. Sebagai putra mahkota, ia berkuasa di daerah Sangiang, yaitu daerah yang terletak di sekitar Jatinegara sekarang, memanjang sampai ke laut. Walaupun tidak jelas, apakah ia anak raja atau bukan, berita Tomé Pires yang mengatakan bahwa dalam hal raja Sunda tidak mempunyai anak, penggantinya dipilih dari raja-raja daerah yang paling besar dan penting, maka kenyataan ini dapat diterima. Ini pun cocok pula dengan berita Tomé Pires selanjutnya, bahwa Kalapa adalah bandar kerajaan Sunda yang terpenting dan terbesar sehingga raja daerahnya juga tidak mustahil mempunyai kesempatan terbesar untuk menjadi raja seandainya raja yang bertakhta di Dayo atau Pakwan Pajajaran, tidak mempunyai anak.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa perjanjian yang kemudian diselenggarakan antara Portugis dan Sunda berlangsung ketika Ratu Samiam atau Surawisesa berkuasa. Perjanjian itu terjadi pada tanggal 21 Agustus 1522 M, sedangkan isinya ialah pernyataan pihak Portugis untuk membantu

---

[45] J.C. Hageman, "Geschiedenis der Soenda-landen", TBG, XVI, 1867, hlm. 210

kerajaan Sunda jika sewaktu-waktu kerajaan ini diserang oleh orang Islam. Sebagai imbalannya, pihak Portugis diperkenankan mendirikan benteng di bandar Banten, dan diberi hak untuk memperoleh lada sebanyak 350 kuintal setiap tahunnya. Dari pihak Sunda yang menandatangani perjanjian tersebut adalah raja Sanghyang sendiri, dengan tiga orang pembantu utamanya masing-masing Mandari Tadam (= *mantri dalem*), Tamungo Sanque de Pate (= *tumenggung sang adipati*), dan Bengar, Xabandar (=*syahbandar*), sedangkan dari pihak Portugis wakil-wakilnya adalah Fernando de Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, Joao Countinho, Gil Barboza, TomÉ Pinto, Sebastian do Rego, dan Francisco Diaz.[46] Walaupun sebelumnya sudah ditetapkan bahwa loji Portugis akan didirikan di Banten, kenyataannya mereka memilih Kalapa sebagai tempat yang cocok untuk pendirian loji tersebut. Di tempat yang sudah mereka pilih itu, mereka dirikan sebuah *padrão*, yang letaknya di tepi sebelah timur muara Sungai Ciliwung.

Ternyata, benteng atau loji itu tidak pernah berhasil mereka dirikan. Hal ini disebabkan Fransisco de Saä yang ditugaskan oleh pihak Portugis melaksanakan perjanjian tersebut, baru berangkat menuju India pada tahun 1524 M, dan tiba di Kalapa pada tahun 1527 M. Akan tetapi, ketika itu ternyata Kalapa sudah dikuasai oleh pasukan Islam yang dipimpin oleh Faletehan.[47] Usaha-usaha untuk merebutnya dari tangan Islam oleh pihak Portugis, tidak pernah berhasil, sehingga benteng Portugis itu pun tidak pernah didirikan. Sementara mengharapkan bantuan Portugis yang tidak pernah tiba itu, Surawisesa terpaksa berperang sendiri melawan pasukan Islam. *Carita Parahyangan* memberitakan bahwa selama masa pemerintahannya yang hanya 14 tahun itu (1521–1535 M), ia berperang sebanyak 15 kali, dan tidak pernah mengalami kekalahan. Ia berperang ke Kalapa, Tanjung, Ancol Kiji, Wahanten Girang, Simpang, Gunung Batu, Saung Agung, Rumbut, Gunung, Gunung Banjar, Padang, Panggoakan, Muntur, Hanum, Pagerwesi, dan Medangkahyangan. Ini dapat ditafsirkan bahwa sampai pada akhir masa pemerintahannya, walaupun ancaman pihak Islam sudah sering terbukti, pihak Sunda masih dapat bertahan dan mengalahkan tentara Islam itu.

Keadaan terus berperang demikian juga dialami oleh raja yang kemudian menggantikannya, Prebu Ratudewata (1535–1543 M). Pada masa pemerintahannya, tentara musuh yang banyak sekali datang menyerbu, sehingga terjadilah pertempuran di halaman besar (= alun-alun ibu kota?). Dalam pertempuran tersebut, gugur Tohaan Sarendet dan Tohaan Ratu

[46] Hageman, op. cit., hlm. 210–211

[47] Ibid., hlm. 219

Foto 7.3 Padrão, batu, Jalan Cengkeh, Jakarta, koleksi Museum Nasional
(*Sumb*er*:* Museum Nasional)

Sanghyang. Dapat diperkirakan bahwa Tohaan Ratu Sanghyang yang gugur ini, adalah raja daerah Sanghyang yang menggantikan kedudukan Surawisesa setelah ia menjadi raja pusat. Kekacauan itu meliputi daerah yang cukup luas sehingga terjadi juga di Ciranjang dan Sumedang, sementara pendeta di Jayagiri, daerah kependetaan yang diresmikan oleh Ratu Jayadewata, dibenamkan ke laut.

Kemudian yang cukup menarik ialah, karena justru pada masa penggantinya, Sang Ratu Saksi, *Carita Parahyangan* tidak memberikan uraian terjadinya perang sedikitpun juga. Akan tetapi, kalau diingat, bahwa pada tahun 1546 M itu, seluruh kekuatan kerajaan Demak dikerahkan untuk menyerbu dan menaklukkan Pasuruan, maka keadaan seperti ini dapat dimengerti. Untuk menyerbu Pasuruan, Demak juga mengikutsertakan armada Banten dan Cirebon yang dipimpin oleh Ki Fadhillah, yang ketika itu sudah diangkat menjadi raja di Kalapa sebagai wakil Sultan Demak.[48] Sang Ratu Saksi yang berkuasa selama delapan tahun itu (1543–1551 M) meninggal di Pengpelangan, kemudian digantikan oleh Tohaan di Majaya (1551–1567 M). Karena kalah perang, raja ini kemudian meninggalkan ibu kota kerajaan, walaupun sebelumnya ia telah bersusah payah memperindah keraton.

Pada masa pemerintahan raja yang terakhir, Nusiya Mulya, keadaan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perubahan di tengah penduduk makin terasa, terutama yang disebabkan oleh datangnya Islam. Pada masa pemerintahannya itulah Islam mulai memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam perang-perang yang dilakukannya. Satu per satu daerah Rajagaluh, Kalapa, Pakwan, Galuh, Datar, Mandiri, Jawakapala, Gegelang, dan Salajo berhasil dikalahkan. Bahkan Patege atau Portugis sendiri dikatakan dapat dikalahkan oleh Islam.[49] Bersamaan dengan itu, tamat pula riwayat kerajaan Sunda sebagai salah satu benteng terakhir budaya Hindu-Buddha di Indonesia, kira-kira pada tahun 1579 Masehi.

B. Keadaan Masyarakat

1. Struktur Birokrasi

Pajajaran sebagai nama kerajaan, sedemikian jauh belum pernah ditemukan di dalam prasasti-prasasti yang merupakan sumber sejarah terpenting. Bukti-bukti sejarah yang ada hampir boleh dipastikan, semuanya menunjuk Pajajaran terutama sebagai pusat kerajaan, lengkapnya Pakwan

---

[48] Sulendraningrat, Purwaka Tjaruban Nagari, 1973, hlm. 33

[49] C.M. Pleyte, Het jaartal, op. cit., hlm. 181, cat. 2

Pajajaran (prasasti Kebantenan dan Batutulis). Pajajaran sebagai nama kerajaan, ditemukan terutama di dalam naskah-naskah yang lebih bernilai sastra, termasuk *carita pantun* yang berupa tinggalan sastra lisan. Di dalam *carita pantun* malah disebutkan adanya paling sedikit tiga buah daerah yang disebut Pajajaran, masing-masing Pajajaran Timur, Pajajaran Tengah, dan Pajajaran Barat. Pajajaran Timur menurut sumber-sumber tersebut, terletak di daerah Banyumas sekarang, sementara Pajajaran Barat terletak di daerah Banten. Dengan demikian, daerah yang terbentang antara Banten dan Banyumas, termasuk wilayah Pajajaran Tengah.

Sumber-sumber asing dari masa yang sezaman, juga tidak pernah menyebutkan adanya kerajaan bernama Pajajaran. Tomé Pires dalam catatan perjalanannya menyebutkan adanya sebuah negara *Çumda* (= Sunda) dengan ibu kotanya bernama Dayo (= Dayeuh).[50] Sebuah berita Portugis lainnya menyebutkan bahwa pada tahun 1522 M, Hendrik de LemÉ memimpin perutusan Portugis dari Malaka ke Sunda, yang beribukotakan Dayo juga.[51] Dari sumber Portugis ini sedikitnya masih ada tiga berita lain yang menyebut-nyebut Sunda. Di dalam bukunya Da Asia, sejarawan Portugis bernama Barros menyebutkan bahwa daerah Sunda terbentang antara ujung Jawa Barat di pantai Barat sampai Sungai Cimanuk,[52] sedangkan menurut Barbosa, *Qumda* (= Sunda) adalah suatu tempat yang kecil saja di mana terdapat banyak lada.[53] Dari masa yang sama muncul pula sebuah sajak yang ditulis oleh Luis de Camoes, seorang penyair yang ikut dalam pelayaran keliling dunia dengan Magelhaens. Di dalam sajaknya "Os Lusiada" (Canto X), Camoes antara lain menulis: ... *Ke sana kerajaan Sunda menjangkaukan lengan kuasa* ...[54] Sementara itu, "Ilha do Jaoa", sebuah peta yang dibuat oleh Pero de Lavanha (1524 M), malah dengan tegas memisahkan daerah yang disebutnya "Sunda" atau "Zunda" dari "Jaoa".[55]

Hal yang sama juga ditemukan di dalam berita-berita Cina. Dari berita yang berasal dari Cheng-ho ada disebutkan bahwa ia beberapa kali diutus oleh Kaisar Cina ke negara-negara yang terletak di sebelah selatan Cina. Salah satu negara yang pernah dikunjunginya bernama *Sun-la*, yang besar sekali kemungkinannya merupakan lafal Cina dari Sunda.[56] Juga demikian halnya

---

50 Cortesão, op. cit., hlm. 166–173

51 Hageman. op. cit., hlm. 210

52 Leirissa, op. cit., hlm. 18

53 Ibid., hlm. 19

54 Taslim Ali, Puisi Dunia I: Gema Djiwa Slavia dan Latin, 1961 (cat. 2), hlm. 178

55 Hageman, op. cit., hlm. 216

56 W.P. Groeneveldt, "Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources", VBG, 39, 1879, hlm. 44

dengan daerah Sriwijaya pada abad XIII M, sangat mungkin bahwa yang dimaksudkannya ialah Sunda juga.[57]

Bahan-bahan yang berasal dari dalam negeri juga sesuai dengan sumber-sumber luar. *Carita Parahyangan* sudah menyebutkan adanya seorang Tohaan di Sunda (= Yang Dipertuan di Sunda) sebagai mertua Rahyang Sañjaya. Daerah yang disebut Sunda terletak di sebelah barat (Ci)tarum. Dalam naskah itu, nama Sunda beberapa kali muncul, baik sebagai nama daerah, bangsa, maupun adat kebiasaan. Sebagai daerah, selain yang disebutkan di atas, Sunda muncul lagi dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Bubat (1357 M). Sebagai nama daerah selain di dalam *Carita Parahyangan*, Sunda juga disebutkan dalam beberapa buah naskah lainnya. Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian menyebutkan /21/"*... urang leumpang ka jawa, hamo nurut carekna deungeun carana, mangu rasa urang, anggeus ma urang pulang deui ka sunda hanteu bisa carek jawa, asa hanteu datang nyaba*", kita pergi ke Jawa, tidak mengikuti bahasa mereka, demikian juga adatnya, canggunglah perasaan kita. Setelah kita kembali lagi ke Sunda tidak dapat berbicara bahasa Jawa, seperti yang bukan pulang dari rantau. *Pararaton* juga menyebutkan Sunda sebagai daerah: *Tumuli pasunda bubat. Bhre prabhu ayun ing putri ring Sunda. Patih Madu ingutus angundangeng wong Sunda, ahidep wong Sunda yan awawarangana ...*, lalu terjadilah peristiwa Sunda-Bubat. Bhre Prabhu menginginkan putri dari Sunda. Patih Madu diutus untuk mengundang orang Sunda. (karena) baiklah seandainya orang Sunda dijadikan besan ....[58] Sementara itu, sebuah naskah lainnya dengan jelas sekali mempergunakan Sunda sebagai namanya, yaitu *Kidung Sundayana*.[59] Dalam hubungannya dengan adat kebiasaan, nama Sunda didapatkan dalam *Carita Parahyangan* pada bagian yang mengisahkan Prabu Ratudewata: /XXI/ ... disunat ka tukangna, jati sunda teka ..., disunat kepada ahlinya, itulah (adat) Sunda asli.[60]

Selain semuanya itu, bukti-bukti prasasti juga menyebutkan adanya sebuah negara yang bernama *Prahajyan Sunda*, sedangkan rajanya yang bernama Sri Jayabhupati, menyebut dirinya sebagai *haji ri sunda*, raja di Sunda. Selain pada prasasti itu, nama Sunda juga ditemukan pada sebuah prasasti yang berasal dari Jawa Timur, yaitu prasasti Horren. Sayang sekali prasasti yang ditemukan di daerah Kediri Selatan ini sudah rusak sehingga tidak diperoleh keterangan yang lebih lengkap. Pada prasasti itu antara lain tertulis: /6/ *ring kahadradara, nguniweh an dadyan tumangga-tangga datang nikanang*

---

[57] N.J. Krom, Hindoe-Javatsche Geschiedenis, 1931, hlm. 307

[58] J.L.A. Brandes; op. cit., hlm. 36

[59] C.C. Berg. "Kidung Sunda", BKI, 83, 1927, hlm. 1–161; *Kidung Sundayana*, 1928

[60] Atja, op. cit., hlm. 57

Hatru sunda, mangkana rasa ning panembah ni ..., /6/ pada (saat) kekacauan, apalagi apabila kemudian terjadi tetangga (lalu) datanglah musuh (dari) Sunda. Demikian rasanya yang memohon kepada ....[61]

Di dalam catatan perjalanannya, Tomé Pires menyebutkan bahwa raja Sunda bertakhta di ibu kota Dayo, yang letaknya di pedalaman. Ibu kota itu dapat dicapai dalam dua hari perjalanan dari (Sunda) Kalapa, kota pelabuhan kerajaan Sunda yang terbesar dan juga terpenting. Mengenai sistem pemerintahan yang berlaku di kerajaan Sunda, Tomé Pires menyebutkan bahwa kerajaan Sunda diperintah oleh seorang raja. Selain raja pusat, di daerah-daerah tertentu terdapat raja-raja yang berkuasa di daerah mereka masing-masing. Hak waris takhta diturunkan kepada anaknya, tetapi jika raja tidak punya anak, yang menggantikannya dipilih di antara raja-raja daerah yang terbesar. Kerajaan Sunda memiliki enam buah pelabuhan penting, yang masing-masing dikepalai oleh seorang syahbandar atau nakhoda. Mereka bertanggung jawab kepada raja dan bertindak sebagai wakil raja di bandar-bandar yang mereka kuasai. Keenam bandar tersebut ialah Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, dan Cimanuk.

Sementara itu, Sanghyang Siksakanda ng Karesian, memberikan keterangan yang dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan dalam masalah struktur kerajaan ini. Di dalam naskah itu antara lain disebutkan bahwa /2/ ... *nihan sinangguh dasa prebakti ngaranya. Anak bakti di bapa, ewe bakti di laki, hulun bakti di pacandaan, sisya bakti di guru, wong tani bakti di wado, wado bakti di mantri, mantri bakti di nu nangganan, nu nangganan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang* ..., inilah peringatan yang disebut sepuluh kebaktian: anak bakti kepada bapa, istri bakti kepada suami, rakyat bakti kepada majikan (*pacandaan* = tempat bersandar), murid bakti kepada guru, petani bakti kepada *wado* (= pejabat rendahan), *wado* bakti kepada mantri (= pegawai). mantri bakti kepada *nu nangganan, nu nangganan* bakti kepada mangkubumi, mangkubumi bakti kepada raja, raja bakti kepada dewata, dewata bakti kepada hyang ....[62]

Dari kutipan di atas itu jelas bahwa pejabat yang paling dekat hubungannya di bawah raja ialah mangkubumi. Ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi atau dilakukan oleh bawahannya, yaitu *nu nangganan*, lalu berturut-turut ke bawah dijumpai pejabat-pejabat yang disebut mantri dan *wado*. Berdasarkan bahan-bahan yang ada itu, barangkali dapat disusun struktur kerajaan Sunda pada masa itu, sebagai berikut. Di

---

[61] W.F. Stutterheim, "Een beschreven koperplaat uit zuid Kediri", TBG, LXXIII, 1933, hlm. 102–104

[62] Atja, Sanghyang, op. cit., hlm. 5

tingkat pemerintahan pusat, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, raja dibantu oleh mangkubumi yang membawahi beberapa orang *nu nangganan*. Di samping itu, terdapat pula putra mahkota, yang akan menggantikan kedudukan sang raja, jika raja meninggal dunia atau mengundurkan diri. Untuk mengurus daerah-daerah yang luas, raja dibantu oleh beberapa orang raja daerah. Raja-raja daerah itu dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari, bertindak sebagai raja yang merdeka, tetapi mereka tetap mengakui raja Sunda yang bertakhta di Pakwan Pajajaran atau Dayo sebagai *jungjunan* mereka. Dalam keadaan raja tidak meninggalkan pewaris takhta, salah seorang raja dari daerah-daerah itu dapat dipilih untuk menggantikan kedudukan sang raja sebagai raja terbesar dan bertakhta di Pakwan Pajajaran. Sementara itu, untuk mengurus masalah yang langsung berhubungan dengan perniagaan, di keenam buah bandarnya, raja diwakili oleh para syahbandar, yang bertindak untuk dan atas nama raja Sunda di daerah yang mereka kuasai masing-masing. Struktur kerajaan seperti itu, rupanya yang paling sesuai dengan kodrat kerajaan Sunda. Carita-*carita pantun* juga pada umumnya mengisahkan adanya seorang putra raja Pajajaran yang mengembara, dan dalam pengembaraannya itu ia menaklukkan raja-raja kecil yang ditemuinya. Setelah raja-raja kecil itu takluk, mereka kemudian diangkat lagi menjadi penguasa di daerahnya masing-masing, dengan syarat bahwa mereka harus mengakui kekuasaan tertinggi yang ada di Pakwan Pajajaran.

Menurut Tomé Pires, ibu kota kerajaan Sunda yang disebut Dayo itu, terletak kira-kira dua hari perjalanan dari bandar Kalapa ke arah pedalaman. Kota itu adalah sebuah kota besar, dengan penduduk sekitar 50.000 jiwa. Rumah-rumah di kota itu sangat baik, terbuat dari kayu dengan atap terbuat dari daun jenis palem. Raja tinggal di sebuah istana yang memiliki 330 buah tiang kayu yang masing-masing sebesar peti anggur, sedangkan tingginya 5 *fathom* (1 *fathom* = 1,828 meter). Bagian atas tiang itu diberi bentuk yang indah.[63] Walau bagaimanapun, tentu kota itu pulalah yang pada tahun 1690 masih sempat disaksikan oleh Winkler ketika ia berkunjung ke sana. Ia mengatakan bahwa ibu kota yang bernama Pakwan itu terletak di antara dua buah sungai yang mengalir sejajar dan sama besar.[64]

Jadi, ketika akhir abad XVII M, Pakwan juga dikenal sebagai ibu kota

---

[63] Cortesão, op. cit., hlm. 168

[64] F. de Haan, Priangan: De Preangerregentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811, 1911, hlm. 158

atau pusat kerajaan, dan bukan nama kerajaan itu sendiri. Hal ini ditunjang oleh berita-berita yang lebih tua.

Pada prasasti Batutulis, ditemukan ... *diwastu diya dingaran sri baduga maharaja ratu haji di pakwan pajajaran sri sang ratu dewata, ya nu nyusukna pakwan* ..., disucikan beliau dinamai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata, ia itulah yang memariti Pakwan itu. Pada prasasti Kebantenan II dan III,[65] dijumpai: *Ong awighnamastu nihan sakakala rahyan niskala wastu kañcana pun. turun ka rahyan ningrat kañcana, maka nuni ka susuhunan ayöna di pakwan pajajaran* ... selamat, mudah-mudahan tidak ada rintangan. Demikianlah *sakakala* (= tanda peringatan) Rahyang Niskala Wastu Kañcana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kañcana, pendahulu Yang Dipertuan yang sekarang (berada) di Pakwan Pajajaran. Prasasti Kebantenan I/IV antara lain berbunyi: *pun, ini piteket sri baduga maharaja ratu haji di pakwan, sri san ratu dewata* .... Maafkan, inilah amanat Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakwan, Sri Sang Ratu Dewata. Selanjutnya, pada prasasti Kebantenan V[66] ada bagiannya yang berbunyi: *ini piteket nu seba di pajajaran* ..., ini amanat bagi mereka yang menghadap di Pajajaran. Prasasti lainnya yang menulis Pakwan ditemukan pula pada prasasti Huludayeuh yang seperti halnya prasasti Kebantenan dikeluarkan oleh Raja Surawisesa. Dalam prasasti disebutkan ... *(ra)tu purwa ... sri maharaja ra (tu) haji pakwan sya san ra(tu de) wata pun* ... (... Ratu Purana (Sri Baduga) Sri Maharaja Ratu Haji di Pakwan. Ia sang Dewata//[67] Kemudian dari naskah fragmen *Carita Parahyangan* yaitu naskah yang lebih dikenal dengan naskah K406[68] ada kutipan-kutipan yang bertalian dengan Pakwan dan Pajajaran ini:

a. ..., *ti kandangwesi pamwat siya ka pakwan* ..., dari Kandangwesi persembahannya ke Pakwan;

b. ..., a*naking sang prebu rama, resi samadaya sarerea siya marek ka pakwan unggal tahun* ..., anakku sang Prebu, Rama, Resi, bersama-sama semuanya menghadap ke Pakwan tiap-tiap tahun;

c. ..., *memeh angkat ka pakwan ngadegkeun premana di saunggalah ku rakeyan*

---

65 K.F. Holle, "Voorlopig berigt omtrent vijf koperen plaatjes, door Raden Saleh gevonden in een offerhuisje te kampong-Kebantenan, onder Bekasih, p.m. 15 paal van Batavia, TBG, XVI, 1867, hlm. 563

66 C.M. Pleyte, Het jaartal, ibid., hlm. 169–171

67 Hasan Djafar, "Prasasti Huludayeuh", Berkala Arkeologi, Edisi Khusus Th. XIV, 1994, hlm. 197–202

68 Undang A. Darsa dan Edi S. Ekadjati, "Fragmen *Carita Parahyangan* dan *Carita Parahyangan*", Sundalana, 2003, hlm. 173–208

darmasiksa. ti inya angkat ka pakwan. datang ka pakwan mangadeg di kadaton sri bima punta narayana madura surapati ..., kacarita rakeyan darmasiksa: heubeul siya di pakwan saratus sapuluh tahun, heubeul siya adeg ratu di pakwan pajajaran pun .... Sebelum berangkat ke Pakwan di Saunggalah kewibawaannya dikukuhkan oleh Rakeyan Darmasiksa. Selanjutnya beliau berangkat ke Pakwan. Datang ke Pakwan, beliau menjadi ratu di kadatwan *Sri bima punta narayana madura suradipati* .... Dikisahkan bahwa Rakeyan Darmasiksa lamanya beliau di Pakwan seratus sepuluh tahun. Lamanya beliau menjadi ratu di Pakwan Pajajaran.

Dari naskah yang sama bagian kedua, yaitu naskah *Carita Parahyangan* sebagaimana yang dikenal sekarang,[69] ada kutipan-kutipan sebagai berikut:

a. *..., sang susuktunggal inyana nu nyieunna palangka sriman sriwacana sri baduga maharajadiraja, ratu haji di pakwan pajajaran. nu mikadatwan sri bima untarayana madura sura dipati, inyana pakwan sanghyang sri ratudewata* .... Sang Susuktunggal ialah yang membuat takhta Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja, ratu haji di Pakwan Pajajaran, yang beristana di Sri Bima Untarayana Madura Sura Dipati yaitu pakwan (= persemayaman) Sanghyang Sri Ratudewata;

b. *..., ti inya nu puking ka pakwan deui ...*, dari situ yang pulang ke Pakwan lagi.

Dari semua kutipan di atas jelas bahwa Pakwan Pajajaran semuanya mengarah kepada pengertian kota, ibu kota atau pusat kerajaan, dan bukan untuk nama kerajaan itu sendiri. Walaupun demikian, memang harus diakui bahwa tidak jarang nama kerajaan atau negara dikenal melalui nama ibu kotanya. Dalam hal seperti ini, maka istilah kerajaan Pajajaran dengan demikian haruslah diartikan sebagai "kerajaan (Sunda) yang ibu kotanya bernama Pajajaran". Tentang nama Pakwan Pajajaran itu telah timbul pula beberapa pendapat yang cukup menarik untuk diungkapkan. Pendapat pertama ialah yang menghubungkan kata pakwan dengan paku (= sejenis pohon, cycas circinalis), sedangkan pajajaran diartikannya tempat berjajar, sehingga pakwan pajajaran diartikan tempat dengan (pohon) paku yang berjajar.[70] Pendapat yang kedua mencoba menghubungkan pakwan dengan kuwu, dengan menunjukkan pula buktinya bahwa sebutan pakuwan dan kuwu terdapat di dalam *Nagarakrtagama*.[71] Pendapat ketiga adalah pendapat yang menyatakan bahwa pakwan seharusnya berasal dari kata paku (= pasak).

---

[69] Atja, Tjarita Parahijangan, op. cit.

[70] K.F. Holle, "De Batoe Toelis te Buitenzorg", TBG, XXVII, 1882, hlm. 93

[71] ten Dam, op. cit., hlm. 308, catatan 18

Kata paku itu dapat dihubungkan dengan lingga kerajaan, yang terletak di samping prasasti Batutulis. Paku dalam pengertian lingga, sesuai dengan tafsiran zamannya, berarti pusat atau poros dunia serta tautannya sangat erat dengan kedudukan raja, yaitu sebagai pusat jagat. Lingga itu besar sekali kemungkinannya yang disebut hulu wesi di dalam *Carita Parahyangan*, yang diberitakan telah didirikan oleh Sang Susuktunggal ketika ia memperbarui Pakwan. Tentang kata pajajaran pendapat ini menghubungkannya dengan kenyataan bahwa baik *pakwan* maupun *kadatwan*, puri raja, terletak di antara dua buah sungai yang sejajar, yaitu Ci(ha)liwung dan Cisadane.[72]

Berdasarkan berita-berita yang diperoleh melalui *carita pantun* tentang kebesaran "kerajaan" Pajajaran dapat diketahui bahwa keraton yang menjadi tempat raja bersemayam, pada umumnya terdiri atas lebih dari sebuah bangunan. Sayang sekali, sedemikian jauh pengetahuan yang didapatkan belum dapat dipergunakan untuk melakukan rekonstruksi keraton zaman itu, karena pada setiap *carita pantun* letak bangunan-bangunan yang terdapat di daerah keraton itu tidak sama. Yang sudah pasti dapat diketahui ialah adanya sebuah bangunan induk di samping bangunan-bangunan lain yang ada di kompleks tersebut. Rupanya di bangunan induk itulah raja bersemayam, sementara di bangunan-bangunan lainnya tinggal para pejabat kerajaan serta kerabat dekat keraton yang lain.

Menurut naskah Fragmen *Carita Parahyangan* dapat diketahui bahwa yang mendirikan pusat kerajaan Pakwan Pajajaran ialah Prabu Tarusbawa, yang dapat disesuaikan dengan tokoh Tohaan di Sunda menurut *Carita Parahyangan*. Ia pulalah yang dianggap sebagai pendiri keraton Pakwan Pajajaran yang diberi nama *Sri bima punta narayana madura suradipati*. Keraton inilah kiranya yang di dalam *Carita Parahyangan* disebut *Sri bima unta rayana madura suradipati*, tempat raja Sanghyang Sri Ratu Dewata bersemayan. Ketika itu kota Pakwan sudah lama ada karena diberitakan bahwa kota itu diperbaiki oleh Sang Susuktunggal atau Sang Haliwungan.

Petunjuk ke arah jumlah bangunan yang lebih dari sebuah diperoleh dari naskah Fragmen *Carita Parahyangan* ketika memberitakan perpindahan pusat kerajaan Sanghyang Darmasiksa dari Saunggalah, tempat ia berkuasa selama 12 tahun, ke Pakwan Pajajaran. Di dalam naskah itu disebutkan ... *anggeus ta pahi dieusian urut sri parapasela parahyangan ku rakeyan darmasiksa*. ... selesailah semua diisi bekas para pasela dan leluhur yang mulia, oleh Rakeyan Darmasiksa.

Sementara itu, nama keraton di pusat kerajaan di Kawali adalah Surawisesa

[72] Ibid., hlm. 301

sehingga para peneliti beranggapan bahwa bangunan keraton dengan unsur sura itu sepantasnya merupakan keraton induk. Jika diperhatikan, akan terdapat gambaran bahwa keraton Pakwan Pajajaran terdiri dari lima buah bangunan (= pañca persada), dengan bangunan Suradipati sebagai bangunan induk. Keempat bangunan lainnya ialah Bima, Punta, Narayana, dan Madura. Kelima keraton itulah yang di dalam *Carita Parahyangan* disebutkan sebagai pakwan sanghyang sri ratu dewata, persemayaman Sanghyang Sri Ratu Dewata, raja yang pada prasasti Batutulis disebut Sri Baduga Maharaja, ratu haji di Pakwan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata, yang telah berjasa membuat parit di sekeliling kota.

Oleh karena itu, apakah tidak pula mungkin, untuk memberikan tafsiran baru terhadap kata pandawa pada candra sangkala dari prasasti Batutulis? Tafsiran ini lebih dimungkinkan karena ternyata prasasti itu "diemban" atau "dilindungi" oleh lima buah tonggak batu yang berjajar pada satu garis lurus, dan tonggak atau pancang di dalam bahasa Sanskerta disebut pandu, bentuk jamaknya pandawa. Dengan demikian, besar sekali kemungkinan bahwa bagian kalimat pañca pandawa pada prasasti Batutulis itu, benar-benar untuk menggambarkan adanya lima buah tonggak batu yang "mengemban" atau "melindungi" prasasti tersebut, dan tidak usah dihubungkan dengan Mahabharata, walaupun dapat dipastikan bahwa cerita itu pun dikenal juga pada zaman itu.

Menerima dugaan bahwa keraton terdiri dari lima buah bangunan ini menyebabkan pula adanya tafsiran baru mengenai maksud Pakwan Pajajaran yang diakui sebagai pusat kerajaan. Apakah dengan demikian tidak berarti bahwa pakwan pajajaran tersebut sebenarnya adalah kelima buah keraton (= pakwan) yang terletak berjajar itu? Barangkali keraton induk terletak di tengah jajaran itu, walaupun memang tidak pula mustahil bahwa yang menjadi bangunan induk itu justru terletak paling ujung atau paling belakang, jika mengingat bahwa namanya selalu disebutkan sebagai unsur terakhir dari kompleks bangunan itu. Pertanyaan yang kemudian timbul ialah – jika dugaan bahwa kelima bangunan istana itu berjajar dapat diterima – ke arah mana bangunan tersebut berjajar? Arah utara-selatan, ataukah timur-barat? Berdasarkan bahan-bahan yang dapat dipetik dari *carita pantun*, barangkali lebih besar kemungkinannya jika jajaran itu membujur dari utara ke selatan, dan bukannya melintang dari barat ke timur. Hal ini karena pada umumnya demikianlah gambaran yang diperoleh, baik dari *carita pantun* maupun dari arah aliran kedua sungai besar yang sejajar.

2. Agama

Carita Parahyangan jelas sekali memperlihatkan semangat yang bersifat kehinduan. Naskah ini dibuka dengan kisah tokoh yang legendaris bernama Sang Resi Guru dan punya anak bernama Rajaputra. Walaupun kemudian Sañjaya yang beragama Hindu menasihati anaknya, Rahyang Tamperan atau Rakeyan Panaraban, agar tidak mengikuti agama yang dipeluknya, secara keseluruhan naskah tersebut tetap merupakan hasil karya seorang yang beragama Hindu. Hal itu antara lain terlihat ketika memberitakan Sanghyang Darmasiksa, yang dikatakan sebagai titisan Batara Wisnu, sementara pada bagian-bagian akhir naskah itu, juga disebutkan adanya para pendeta yang gugur tanpa dosa, ketika terjadi huru-hara pada masa pemerintahan Prabu Ratudewata (1535–1543 M). Prasasti Sanghyang Tapak (1030 M) yang dikeluarkan oleh Sri Jayabhupati, juga memperlihatkan kuatnya pengaruh agama Hindu itu, yang rupanya sudah tertanam sejak munculnya kerajaan Tarumanagara pada awal abad V M.

Pengaruh Hindu ini rupanya cukup kuat, sehingga di dalam naskah Sewakadarma yang juga disebut Serat Dewabuda dan berasal dari tahun 1357 Saka atau 1435 Masehi, masih ditemukan nama-nama para dewa agama Hindu seperti Brahma, Wisnu, MaheHwara, Rudra, SadaHiwa, Yama, Baruna, Kuwera, Indra, dan Besrawaka. Naskah ini, walaupun berasal dari daerah Gunung Cupu, sebuah gunung yang cukup terkenal dalam dongengan yang hidup di kalangan orang Sunda, ternyata mempergunakan bahasa Jawa kuno. Demikian juga halnya dengan naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian, pengaruh Hindunya masih jelas, walaupun rupanya pada waktu itu sudah luluh menjadi satu dengan agama Buddha: /3/ ... ini na lakukeuneun, talatah sang sadu jati. hongkara namo sewaya, sembah ing hulun di sanghyang pancatatagata; panca ngaran ing lima, tata ma ngaran ing sabda, gata ma ngaran ing raga, ya eta ma pahayueun sareanana ..., inilah yang harus dilakukan, (yaitu) amanat Sang Baik Hati (atau: Terpercaya) yang sejati. Selamatlah (hendaknya) dengan nama Siwa, menyembahlah hamba kepada Sanghyang Pancatatagata (Buddha); panca berarti lima, tata itu artinya sabda, gata itu artinya raga, ya, itulah untuk kebaikan semuanya.

Jadi rupanya, pada masa kerajaan Sunda yang berlangsung sejak awal abad VIII hingga menjelang akhir abad XVI M, kehidupan keagamaan masyarakat kerajaan itu bercorak Hindu-Buddha yang telah berbaur pula dengan unsur agama leluhur sebelumnya. Petunjuk ke arah ini ditemukan di dalam naskah yang sama (*Sanghyang Siksa*): (2) ... mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang ..., mangkubumi berbakti kepada ratu, ratu berbakti kepada dewata, dewata berbakti kepada hyang.

Dari kutipan tersebut jelas bahwa pada awal abad XVI Masehi, kehidupan keagamaan yang pada masa sebelumnya hanya memperlihatkan sifat-sifat Hindu, lalu Hindu-Buddha itu, pada masa tersebut telah memperlihatkan lebih munculnya sifat-sifat agama leluhur. Ini dibuktikan dengan "menurunkan" derajat Dewata berada di bawah *hyang*. Selanjutnya Sanghyang Siksakanda ng Karesian itu telah pula memberikan keterangan, bagaimana sifat agama Buddha pada masa itu. Di dalam naskah tersebut dikatakan bahwa *Dasakreta* adalah bayang-bayang *Dasasila* dan merupakan hakikat *Dasamarga* yang bersumber pada *Dasaindrya*. Hal ini menunjukkan bahwa asas ajaran buddhisme pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja telah dikembangkan dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang praktis. Segi negatif yang terdapat di dalam ajaran Buddha, telah diubah menjadi segi positif di dalam bentuk *Dasamarga* (= sepuluh tindakan). Akan tetapi, karena keberhasilannya akan tergantung kepada manusia sendiri, *Dasakreta* itu haruslah dilandasi dengan pemahaman akan *Dasaindrya* (= sepuluh drya) yang terdapat di dalam raga manusia.[73] Bila hal ini dilaksanakan dengan semestinya menurut petunjuk Sanghyang Siksakanda ng Karesian, negara akan makmur, rakyat akan sejahtera, tanah akan subur, tanaman tumbuh dengan subur, hujan akan turun dengan teratur, dan kehidupan dunia pun akan aman dan sentosa.

Pada masa itu terdapat orang-orang yang cukup ahli di bidang keagamaan ini. Ada beberapa golongan yang dapat dijadikan tempat bertanya hal-hal yang bertalian dengan kehidupan kerohanian, dan kehidupan keagamaan pada khususnya. Orang yang mengetahui dengan baik tingkat-tingkat kehidupan keagamaan disebut *paratanda*. Dari *paratanda* ini akan diketahui bahwa *acara* kalah oleh *adigama*, *adigama* kalah oleh *gurugama*, *gurugama* kalah oleh *tuhagama*, *tuhagama* kalah oleh *satmata*, *satmata* kalah oleh *surakloka*, dan akhirnya *surakloka* kalah oleh *nirawerah*.

Orang yang mengetahui dengan baik pelbagai macam aji mantra disebut brahmana. Dari brahmana ini akan tahu nama-nama aji mantra seperti *jampa-jampa, geugeuing, susuratan, sasaranaan, kaseangan, pawayagahan, puspaan, susudaan, huriphuripan, tunduk iyem, pararasen,* dan *pasakwan*. Orang yang dapat diminta keterangan mengenai pelbagai macam pemujaan yang dilakukan di sanggar disebut janggan. Ia dapat menjelaskan apa itu patah puja daun, gelar palayang, puja kembang, nyampingan lingga, dan ngomean sanghyang. Pandita dapat diminta penjelasan mengenai pelbagai macam kitab pustaka keagamaan, misalnya saja *Darmasiksa, Siksakandang, Pasuktapa, Padenaan, Mahapawitra, Siksaguru, Dasasila, Pañcasiksa, Guru Talapakan, Tato Buwana, Tato*

---

73 Saleh Danasasmita, Bambang Sumadio, dan AyatrohaÉdi, "Kerajaan Sunda", dalam "Sejarah Jawa Barat" (naskah), 1975

(a)

(b)

Foto 7.4 (a) Arca Siwa, batu, Pulau Panaitan, koleksi Museum Sri Baduga, Bandung (*Sumber*: Puslitbang Arkenas); (b) Arca Agastya, Nandiswara dari Yoni, batu, mungkin dari Gunung Pulasari, Banten, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Esh)

Sarira, dan *Tato Ajñyana*. Orang yang mengenal *sandi, tapa, lungguh, pratyaksa, putus tangkes, kakaleupaseun, tata hyang, tata dewata, rasa carita*, dan *kelepa carita*, yaitu hal-hal yang bertalian dengan *nata-nata para dewata*, disebut *sang wiku paraloka*.

Selain dari data tekstual, adanya agama Hindu dan Buddha pada masyarakat Sunda dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis yang ditemukan hampir di seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Di Pulau Panaitan yang merupakan ujung paling barat Banten ditemukan arca GaneHa dan Siwa.[74] Di Kabupaten Lebak ditemukan sisa-sisa candi Siwa bersama dengan arca Agastya dan GaneHa. Di situs yang sama ditemukan pula arca yang diduga sebagai arca Buddha. Di kaki Gunung Pulasari, Menes, Pandeglang ditemukan sejumlah arca-arca agama Hindu yang terdiri dari arca Siwa, Agastya, GaneHa, Durga, Brahma, dan sebuah yoni.[75] Di kota Banten sendiri, tepatnya di Karangantu, ditemukan arca Nandi.

Tinggalan arkeologis lainnya adalah kompleks candi di Cibuaya, Karawang. Di situs ini terdapat enam reruntuhan sisa bangunan dari batu bata, di antaranya reruntuhan candi yang disebut lemah duwur lanang yang pada puncaknya terdapat lingga semu dan lemah duwur *wado*n. Tidak jauh dari situs tersebut ditemukan tiga buah arca Wisnu, dua arca yang masih utuh dikenal dengan arca Wisnu Cibuaya I dan Wisnu Cibuaya II yang berasal dari abad VII–VIII Masehi. Kemudian Candi Bojongmenje di Rancaekek, Bandung; Candi Cangkuang di Leles, Garut. Di Indihang, Tasikmalaya ditemukan sisa-sisa pondasi dengan lingga dan yoni. Ke arah timur lagi, yaitu di daerah Ciamis, di Pamarican dan Kalipucang terdapat struktur bangunan dan beberapa lingga, yoni, dan arca Nandi. Situs Pamarican yang dikenal dengan Candi Ronggeng ini sekarang sudah lenyap. Di Cisaga, tidak jauh dari tempat ditemukannya prasasti Mandiwunga dari abad X M terdapat situs Karangkamulyan. Kemudian di daerah Pangandaran yang dikenal dengan Candi Batu Kalde ditemukan arca Nandi.[76]

Tinggalan arkeologis agama Buddha yang ditemukan di Jawa Barat dan Banten tidak sebanyak tinggalan agama Hindu. Selain di Lebak, Banten, sejumlah arca dari pantheon Buddha ditemukan di Talaga, Majalengka. Di

---

[74] Arca Siwa dari Pulau Panaitan pernah dicuri orang, tetapi berhasil ditemukan kembali, sekarang disimpan di Museum Sri Baduga, Bandung. Arca ganesa masih di Pulau Panaitan

[75] Di dalam NBG, 1878, disebutkan arca-arca tersebut semula di halaman rumah Asisten Residen Caringin, mungkin berasal dari dekat kawah Cipanas. Guillot memperkirakan tempat penemuannya di kaki Gunung Pulasari (Guillot, dkk., Banten Sebelum Zaman Islam, 1996, hlm. 98–107

[76] Lihat P.E.J. Ferdinandus, "Situs Batu Kalde di Pangandaran, Jawa Barat", Monumen, 1990, hlm.295

(a)

(b)

Foto 7.5 (a) Candi Cangkuang, Leles, Garut, Jawa Barat; (b) Candi Bojong Menje, Rancaekek, Bandung (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

samping arca, tinggalan arkeologis agama Buddha yang berupa bangunan suci terdapat di Batujaya, Karawang. Bangunan suci di situs ini merupakan kompleks percandian yang cukup besar.

Selain kepurbakalaan Hindu-Buddha, di Jawa Barat ditemukan juga tempat-tempat pemujaan yang berupa bangunan berundak yang merupakan tradisi megalitik, tetapi memperlihatkan bahwa situs-situs itu berasal dari masa Hindu-Buddha yang dapat dilihat dari prasasti, arca-arca dewa, lingga, dan yoni yang ditemukan di situ. Situs-situs itu antara lain adalah Astanagede dan Karangmulyan di Ciamis, dan Situs Gunung Tampomas di Sumedang.

Arca-arca yang ditemukan di Jawa Barat dan Banten, baik arca-arca dewa agama Hindu dan Buddha maupun arca manusia, dipahat sederhana, kadang-kadang ada arca yang masih berciri arca megalitik seperti arca Cikapundung dan arca Kosala. Demikian pula dengan lingga, beberapa lingga yang ditemukan berupa lingga semu, artinya bukan lingga dalam bentuk lengkap, malah di Situs Astana Gede, Kawali prasasti yang bertulisan *san hyan linga hyan* dan *san hyan linga binba* berupa batu tegak atau menhir.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, masyarakat Sunda yang adalah masyarakat ladang yang hidup berpindah-pindah, agama yang dijalankan lebih mengutamakan isi daripada bentuk, sehingga ukuran kesungguhan beragama bukan diukur oleh nilai material benda-benda upacaranya melainkan dalam hati dan tingkah laku. Mungkin karena itulah bangunan-bangunan keagamaan, arca-arca, maupun lingga yang terdapat di Jawa Barat bentuknya lebih sederhana dibanding dengan temuan serupa yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Kesenian

Walaupun tidak banyak yang kita ketahui dari sumber lain, Sanghyang Siksakanda ng Karesian sedikit banyak memberikan juga keterangan, bagaimana kira-kira kehidupan kesenian masa itu. Di dalam naskah itu juga dapat diketahui adanya orang-orang yang dipandang ahli di salah satu bidang kesenian, misalnya, sastra, lukis, ukir, dan gamelan. Orang yang mengetahui pelbagai macam cerita disebut memen, sedangkan cerita-cerita yang diketahuinya antara lain *Boma, Damarjati, Sanghyang Bayu, Jayasena, Sedamana, Pu Jayakarma, Ramayana, Adiparwa, Korawasarma, Bimasorga, Ranggalawe, Tantri, Sumana, Kalapurbaka,* dan *Jarini.*

Jenis-jenis *kawih* seperti misalnya *kawih bwatuha, kawih panjang, kawih lalanguan, kawih panyaraman, kawih sisindiran, kawih pengpeledan, bonbong kaso, pererane, porod eurih, kawih igel-igelan, kawih babahanan, kawih bangbarongan,*

kawih sasambatan, dan *kawih tangtung*, dapat ditanyakan kepada ahlinya yang bergelar paraguna. Jika ahli yang menguasai lagu dan nyanyian kawih disebut paraguna, *hempul* mempunyai keahlian khusus pula, karena ia mengetahui dengan baik pelbagai macam permainan yang umumnya disebut pamaceuh, yaitu *ceta maceuh, ceta nirus, neureuy pañca, tatapukan, bangbarongan, babakutrakan, ubang-ubangan, munikeun lembur, ngadu lesung, asup kana lantar,* dan *ngadu nini.*

Dalam kedua jenis seni ini ada petunjuk yang menarik. Ke dalam kelompok kawih disebutkan ada *kawih bangbarongan*, sedangkan di dalam kelompok pamaceuh, ada yang disebut *bangbarongan*. Hal ini barangkali menunjukkan bahwa pada masa itu sudah ada jenis permainan yang peragaannya harus diiringi dengan nyanyian, yaitu permainan *bangbarongan*. Anehnya, jika cerita-cerita wayang banyak diketahui, cerita yang pada umumnya dianggap asli berasal dari Sunda sendiri, sedemikian jauh diketahui empat buah saja. Yang dimaksud adalah *carita pantun* dengan ahlinya disebut *prepantun*, dan keempat *carita pantun* itu ialah *Langgalarang, Banyakcatra, Hatur Wangi,* dan *Siliwangi.*

Mengingat bahwa pada awal abad XVI M itu Siliwangi sudah dikenal sebagai salah seorang tokoh dalam *carita pantun*, tidak ada salahnya dipertimbangkan lagi anggapan-anggapan yang beredar selama ini bahwa Prabu Siliwangi ialah raja terbesar "kerajaan" Pajajaran menjelang masuknya Islam? Selain itu, sedemikian jauh usaha-usaha untuk mencari siapa sebenarnya Prabu Siliwangi di dalam sejarah, belum berhasil dengan memuaskan. Tidak ada satu pun juga sumber sejarah yang menyebutkan salah seorang raja yang pernah berkuasa di Sunda dengan nama itu. Penyesuaian tokoh Prabu Siliwangi dengan Prabu Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja yang disebut di dalam *Carita Parahyangan*[77] yang memerintah menjelang peralihan abad (1482–1521 M), apakah tidak terlalu berani? Apakah mungkin raja yang ketika itu masih memerintah atau baru beberapa tahun meninggal dunia, sudah disebut-sebut namanya sebagai tokoh *carita pantun* pada tahun 1518 M dan sebelumnya? Terutama jika hal ini dikaitkan dengan anggapan adanya "pamali" pada orang Sunda untuk menyebutkan nama orang yang dihormatinya, kemungkinan penyesuaian tersebut akan lebih tidak meyakinkan lagi. Menurut AyatrohaÉdi, mengingat tahun 1518 M, Siliwangi sudah dikenal sebagai *carita pantun*, tidak mungkin tokoh tersebut masih hidup, seperti Sri Baduga Maharaja. Sebaliknya, jika tokoh tersebut sudah meninggal dunia dan besar jasanya terhadap rakyat dan negara, hal yang sangat wajar jika kemudian muncul pemujaan terhadapnya. Niskala Wastu Kañcana sudah

---

[77] M. Amir Sutarga, op. cit.

meninggal 40 tahun sebelum naskah itu dituliskan, karena itu lebih mungkin jika tokoh inilah yang dianggap sebagai Siliwangi.[78]

Jenis-jenis batik (tulis) dengan ahlinya yang disebut lukis, adalah pupunjengan, hihinggulan, kekembangan, alas-alasan, urang-urangan, memetahan, sisirangan, tarukhata, kembang tarate, sedangkan macam-macam ukiran seperti misalnya dinanagakeun, dibarongkeun, ditiru paksi, ditiru were, dan ditiru singha, dapat ditanyakan kepada marangguy, yang memang ahli di bidang ini.

4. Ekonomi

Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian,[79] ternyata memberikan keterangan yang cukup jelas mengenai adanya kelompok-kelompok masyarakat kerajaan Sunda masa itu. Kelompok-kelompok itu itu tidak disebutkan berdasarkan katajenjang (hierarki) di dalam sistem birokrasi pemerintahan, tetapi pembagiannya berdasarkan fungsi yang dimiliki tiap-tiap kelompok itu. Oleh sebab itu, dijumpai adanya kelompok ekonomi yang kemudian terbagi lagi ke dalam beberapa golongan, kelompok rohani dan cendekiawan, kelompok alat negara, dan sebagainya.

Kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi ialah: *pangalasan* (= orang utas), *juru lukis* (= pelukis), *pande dang* (= pandai tembaga, pembuat perabot dari tembaga), *pande mas* (= pandai mas), *pande glang* (= pandai gelang), *pande wesi* (= pandai besi), *guru wida(ng) medu wayang* (= pembuat wayang?), *kumbang gending* (= penabuh gamelan, pembuat gamelan?), *tapukan* (= penari), *banyolan* (= badut), *pahuma* (= peladang), *panyadap* (= penyadap), *panyawah* (= penyawah), *panyapu* (= penyapu), *pamanah* (= pemanah), *pangurang dasa calagara* (= pemungut pajak di pelabuhan), *rare angon* (= penggembala), *pacelengan* (= peternak babi), *pakotokan* (= peternak ayam), *palika* (= penangkap ikan, nelayan), *preteuleum* (= penyelam), *puhawang* (= pawang, pelaut), dan *hareup catra* (= juru masak).

Kelompok masyarakat yang bertugas sebagai alat negara adalah *mantri*, *bayangkara* (= penjaga keamanan), *prajurit* (= prajurit, tentara), *pam(a)rang* (= pemerang, tentara), *nu nangganan* (= nama jabatan di bawah mangkubumi). Kepala prajurit disebut *hulu jurit*. Kelompok rohani dan cendekiawan terdiri dari *memen* (= dalang), yang mengetahui pelbagai macam cerita, paraguna yang mengetahui pelbagai macam lagu dan nyanyian, *hempul* yang mengetahui

[78] AyatrohaÉdi, "Niskalawastukancana (1348–1475): Raja Sunda Terbesar", dalam PIA, IV, Jilid IIa, 1986, hlm. 34

[79] Atja, Sanghyang, op. cit.

pelbagai macam permainan, *prepantun* yang mengetahui pelbagai macam *carita pantun*, marangguy yang mengetahui pelbagai macam ukiran, pangeuyeuk yang mengetahui pelbagai macam kain, *paratanda* yang mengetahui pelbagai macam tingkat dan kehidupan keagamaan, brahmana yang mengetahui pelbagai macam mantra, janggan yang mengetahui pelbagai macam pemujaan yang dilakukan sanggar, bujangga yang mengetahui pelbagai macam pertanda zaman, pandita yang mengetahui pelbagai macam buku pustaka keagamaan, paraloka mengetahui pelbagai macam tingkah para pejabat desa, juru basa darmamurcaya yang mengetahui pelbagai macam bahasa yang diketahui orang pada masa tersebut (= *juru basa*), barat katiga tidak jelas, tetapi barangkali dapat dianggap sebagai orang yang dapat meramal cuaca. Selain itu, ada kelompok yang sama sekali tidak jelas apa maksudnya, misalnya *belamati jurumoha.*

Semua kelompok masyarakat yang disebutkan di atas itu, di dalam melaksanakan darma atau tugas masing-masing sesuai dengan fungsinya, disebut *ngawakan tapa di nagara* (= melaksanakan tapa di tengah negara). Yang tidak kurang menariknya adalah keterangan yang menyatakan bahwa pada masa itu di kerajaan Sunda juga sudah terdapat orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan jalan yang tidak disukai masyarakat umumnya. Pekerjaan itu antara lain *meor* (=?), *ngodok* (= merogoh), *nyepet* (= mencopet), *ngarebut* (= merebut, merampas), *ngarorogoh* (= merogoh saku), *papanjingan* (= memasuki rumah orang), *maling* (= mencuri), *ngabegal* (= membegal). Mata pencarian seperti itu disebut cekap carut, sesuatu yang pantang diturut, dan hal-hal seperti itu disebut sebagai guru nista, yaitu hal-hal yang dianggap sangat nista atau hina.

Kerajaan Sunda adalah sebuah negara yang umumnya hidup dari pertanian, terutama dari perladangan. Bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk tentang masyarakat ladang ini ditemukan baik di dalam sumber-sumber sastra tulis maupun sastra lisan. Di dalam *Carita Parahyangan* misalnya, hanya satu kali disebutkan sawah, itu pun dalam hubungannya dengan nama suatu tempat yang disebut sawah tampian dalem,[80] tempat dipusarakannya Ratu Dewata. Petunjuk selebihnya, mengarahkan kepada kemungkinan adanya masyarakat ladang ini, yang sudah dimulai dengan berita tentang kelima orang titisan pancakusika, di mana tiga orang di antaranya masing-masing menjadi *pahuma* (= peladang), *panggerek* (= pemburu), dan *panyadap* (= penyadap), yang ketiganya itu jelas merupakan jenis pekerjaan di ladang.

Demikian juga halnya dengan berita yang diperoleh dari Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang menyebutkan penyawah sekali saja, dan itu pun masih merupakan pekerjaan yang dianjurkan kepada masyarakat untuk

---

[80] Atja, Tjarita Parahijangan, op. cit., hlm. 33

dipelajari. Alat-alat yang disebutkan juga pada umumnya merupakan alat untuk bekerja di ladang, dan bukan untuk bekerja di sawah. Alat-alat itu adalah kujang, patik, baliung, kored, dan sadap. Kehidupan di ladang akan membentuk manusia yang berwatak masyarakat ladang. Ciri yang paling menonjol pada masyarakat ini ialah selalu berpindah tempat, yang secara langsung turut memberi pengaruh terhadap bentuk bangunan tempat mereka tinggal. Untuk masyarakat yang senantiasa berpindah tempat, yang diperlukan sebagai tempat tinggal adalah bangunan-bangunan yang cukup sederhana.

Pada umumnya manusia ladang bertempat tinggal di ladangnya masing-masing sehingga mereka hidup terpencil dari peladang lain yang menjadi tetangganya. Ini menyebabkan taraf kebersamaan masyarakat ladang lebih longgar dibandingkan dengan masyarakat sawah. Hal seperti ini bukanlah sarana yang baik untuk tempat lahir sastra atau hasil seni, walaupun tidak pula usah diartikan bahwa pada masa itu masyarakat Sunda sama sekali tidak mengenal sastra. Adanya *memen* yang mengetahui pelbagai macam cerita dan *prepantun* yang mengetahui *carita pantun*, sudah memberikan petunjuk bahwa jenis-jenis seni sedikit banyaknya dikenal juga oleh masyarakat Sunda masa itu. Dengan memerhatikan pola hidup seperti itu, barangkali dapat dimengerti, apa sebabnya di daerah Jawa Barat sedikit sekali ditemukan prasasti atau naskah-naskah sastra karena kebiasaan menulis bukanlah ciri utama masyarakat ladang. Apalagi usaha-usaha untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tahan zaman seperti candi atau keraton, misalnya.

Kerajaan Sunda terutama hidup dari hasil pertanian karena kerajaan itu memang sebuah negara pertanian. Walaupun demikian, sumber penghasilan lainnya sedikit banyak dapat diketahui juga. Kerajaan Sunda mempunyai enam buah bandar yang cukup ramai dan penting. Melalui keenam itulah dilakukan usaha niaga dengan daerah atau negara lain. Barang-barang dagangan yang merupakan sumber penghasilan kerajaan Sunda, pada umumnya berupa bahan makanan dan lada. Dikatakan misalnya, bahwa lada yang dihasilkan oleh kerajaan Sunda setiap tahunnya mencapai lebih dari 1.000 *bahar*, sedangkan mutunya lebih baik daripada lada yang dihasilkan oleh daerah Kocin (Asia Tenggara). Selain lada, juga banyak dihasilkan asam, tetapi meskipun demikian beras tetap merupakan barang dagangan yang terpenting. Barang-barang lainnya yang dapat diperoleh dari bandar-bandar kerajaan Sunda adalah sayur-mayur, sapi, kambing, biri-biri, babi, tuak, dan buah-buahan. Kecuali itu, ada juga berjenis-jenis bahan pakaian yang didatangkan dari Kambay (India), dan juga terdapat perdagangan budak.[81]

---

[81] Cartesão, op. cit., hlm. 169

Mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar, yaitu mata uang Cina, untuk pembayaran kecil. Mata uang yang beredar di kerajaan Sunda menurut Tomé Pires disebut *ceitis*, *calais* (= 1.000 *ceitis*), uang mas 8 *mates* dan *tumdaya* (= *15 drahma*). Sayang sekali tidak dapat diketahui berapa kira-kira nilai tukarnya sekarang.

Melalui bandar-bandar itu, perahu niaga luar negeri terutama Cina, banyak keluar masuk. Sementara itu, penduduk daerah pesisir kerajaan Sunda sendiri telah biasa berlayar dan berniaga sampai ke Malaka. Kerajaan Sunda dikatakan memiliki enam buah jung dan sejumlah *lancaras* buatan dalam negeri. Bandar-bandar kerajaan Sunda oleh Tomé Pires digambarkan sebagai berikut: *Banten* merupakan sebuah kota niaga yang baik, terletak di tepi sebuah sungai. Kota itu dikepalai oleh seorang syahbandar. Wilayah niaganya mencapai Sumatra dan bahkan Kepulauan Maladewa. Banten merupakan sebuah pelabuhan yang besar dan melalui bandar itu diperdagangkan beras, bahan makanan lain, dan lada. *Pontang* merupakan sebuah kota yang besar, tetapi pelabuhannya tidak sepenting Banten. Jalur niaga dan barang-barang yang diperdagangkan, sama dengan Banten. *Cigede* juga sebuah kota yang besar. Perniagaan dari bandar ini dilakukan dengan Pariaman, Andalas, Tulangbawang, Sekampung, dan lain-lain. Barang dagangannya sama dengan kedua bandar di atas. *Tamgara* yang juga merupakan sebuah kota besar, barang niaganya sama dengan bandar-bandar yang sudah disebutkan. *Kalapa* yang juga merupakan sebuah kota yang sangat besar, adalah pelabuhan kerajaan Sunda yang terpenting dan terbaik. Hubungan niaganya juga lebih luas, antara lain dengan Sumatra, Palembang, Lawe, Tanjungpura, Malaka, Makassar, Jawa, dan Madura. Pelabuhan ini letaknya kira-kira dua hari perjalanan dari ibu kota kerajaan Sunda yang disebut Dayo, tempat raja bersemayam. Para pedagang dari seluruh kerajaan Sunda selalu berdatangan ke bandar ini. Kota ini diperintah dengan cukup tertib dan teratur. Untuk itu, di bandar ini terdapat pengadilan, lengkap dengan hakim dan paniteranya. Tugas mereka antara lain mengadili pelanggaran yang dilakukan penduduk kota itu, atas peraturan-peraturan yang secara tertulis dikeluarkan oleh raja demi ketertiban kota. *Cimanuk* merupakan pelabuhan kerajaan Sunda yang paling timur; sekaligus menjadi batas kerajaan. Walaupun bandar ini dikatakan sebagai sebuah bandar yang besar dan cukup ramai, jung tidak dapat merapat. Di bandar ini sudah banyak berdiam orang-orang yang beragama Islam, walaupun syahbandarnya sendiri masih seorang yang beragama Sunda.[82]

Di samping memiliki bandar-bandar yang cukup ramai seperti disebutkan di atas, kerajaan Sunda juga memiliki jalan lalu lintas darat yang cukup penting,

[82] Cortesão, op. cit., hlm. 168–173

yang sedemikian jauh sedikit sekali diketahui oleh para pedagang asing di masa yang lebih kemudian. Jalan darat itu berpusat di Pakwan Pajajaran, ibu kota kerajaan, yang satu menuju ke arah timur sedangkan lainnya menuju ke sebelah barat. Jalan yang menuju ke timur, menghubungkan Pakwan Pajajaran dengan Karangsambung yang terletak di tepi Cimanuk – batas kerajaan di sebelah timur – melalui Cileungsi dan Cibarusah, lalu dari sana membelok ke arah utara sampai ke Tanjungpura yang terletak di tepi Cimanuk, Karawang. Dari Tanjungpura, ada sambungannya melalui Cikao dan Purwakarta, kemudian berakhir di Karangsambung.[83] Barangkali, dari Karangsambung jalan itu masih ada sambungannya ke arah timur dan selatan. Yang ke timur sampai ke Cirebon, lalu berbelok ke selatan lewat Kuningan dan akhirnya sampai ke Galuh atau Kawali, sedangkan yang ke selatan melalui Sindangkasih dan Talaga, juga akhirnya sampai ke Kawali atau Galuh. Kedua jalan sambungan ini diperkirakan bertemu di daerah Cikijing sekarang. Sementara itu, jalan lainnya yang menuju ke barat, bermula dari Pakwan Pajajaran melalui Jasinga dan Rangkasbitung, menuju Serang dan berakhir di Banten yang merupakan bandar kerajaan Sunda yang paling barat. Jalan darat lainnya dari Pakwan menuju Ciampea dan Rumpin, berakhir di situ, karena perjalanan selanjutnya dilakukan dengan melalui Sungai Cisadane yang memang cukup baik alirannya sejak Muara Cianten.[84] Melalui jalan-jalan darat dan sungai itulah hasil bumi kerajaan Sunda diangkut, dan melalui jalan yang sama itu pula keperluan penduduk di daerah pedalaman dipenuhi.

Dari bahasa-bahasa yang pada waktu itu dikenal di Nusantara oleh penduduk kerajaan Sunda, dapat dijadikan petunjuk dengan daerah mana saja kerajaan Sunda melakukan hubungan dagang. Bahasa-bahasa asing yang dikenal masa itu disebut *carek paranusa*, antara lain tercakup ke dalamnya bahasa-bahasa *Cina, Keling, Parasi, Mesir, Samudra, Banggala, Makassar, Pahang, Palembang, Siem, Kalanten, Bangka, Buwun, Beten, Tulangbawang, Sela, Tego, Pasay, Parayaman, Nagaradekan, Dinah, Andeles, Moloko, Badan, Pego, Malangkabo, Mekah, Lawe, Saksak, Sebawa, Bali, Jenggi, Sabini, Ngogan, Kanangen, Kumering, Simpangtiga, Gumantung, Manumbi, Babu, Nyiri, Sapari, Patukangan, Lampung, Surabaya, Jambudipa, Seran, Gedah, Solot, Sologong, Cempa, Indragiri, Tanjungpura, Samapung, Baluk,* dan *Jawa.* Di dalam kegiatan tersebut rupanya juru basa darmamurcaya memegang peran yang cukup penting, karena dengan bantuan mereka itulah talimarga antara orang-orang yang berhubungan itu dapat terlaksana.

---

[83] ten Dam., op. cit., hlm. 299

[84] Ibid, hlm. 297

Bab VIII
Kerajaan Singhasari dan Majapahit

A. Kerajaan Singhasari

1. Ken Angrok: Cikal Bakal Wangsa Rajasa

Pada masa akhir kerajaan Kadiri daerah Tumapel yang terletak di sebelah timur Gunung Kawi merupakan sebuah daerah yang dikepalai oleh seorang *akuwu* bernama Tunggul Ametung. Daerah Tumapel ini termasuk ke dalam wilayah kekuasaan raja Kertajaya (Dangdang Gendis) dari Daha (Kadiri). Berapa lama Tunggul Ametung menjadi *akuwu* di Tumapel tidak kita ketahui dengan pasti. Kedudukannya sebagai *akuwu* Tumapel kemudian berakhir setelah ia dibunuh oleh Ken Angrok. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Angroklah yang menjadi penguasa baru di Tumapel.

Kemunculan tokoh Ken Angrok ini kemudian menandai munculnya satu wangsa baru yaitu wangsa Rajasa (*Rajasawangsa*) atau wangsa Girindra (*Girindrawangsa*). Wangsa inilah yang berkuasa di kerajaan Singhasari dan Majapahit. Akan tetapi, asal usul Ken Angrok tidak jelas kita ketahui.[1] Satu-satunya sumber yang memberikan uraian panjang lebar tentang asal usul dan masa muda Ken Angrok ialah kitab *Pararaton* atau *Katuturanira Ken Angrok*.[2] Kitab tersebut ditulis pada akhir abad ke XV,[3] dalam bentuk prosa (gancaran). Menurut kitab *Pararaton* Ken Angrok adalah penjelmaan kembali seorang yang

---

[1] C.C. Berg tidak dapat menerima Ken Angrok sebagai tokoh sejarah. Ia hanya menganggap Ken Angrok sebagai tokoh mitos. Lihat tentang hal ini di dalam tulisan-tulisan Berg, a.l.: (a) "De Evolutie der Javaanse Geschiedschrijving", *MKWAL*, XIV (2), 1951, hlm. 5–26; (b) "Herkomst, vorm en functie der Middel-Javaansche Rijksdeelingstheorie", *VKNAWL*, LIX (1), 1953, hlm. 1–306; (c) "Javanese Historiography, a Synopsis of its Evolution", di dalam: D.G.E. Hall (Editor), Historians of South East Asia (*Historical Writing on the People of Asia*), 1961, hlm. 13–23; (d) "The Javanese Picture of the Past", di dalam: Soedjatmoko et al. (Editor), *An Introduction to Indonesian Historiography*, 1965, hlm. 87–118

[2] Lihat J.L.A. Brandes, "*Pararaton* (Ken Arok) of het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit", VBG, LXII, 1920. Lihat pula R. Pitono Hardjowardojo, *Pararaton*, 1965; Ki J. Padmapuspita, *Pararaton*, 1966

[3] Peristiwa terakhir yang disebutkan di dalam Kitab *Pararaton* ialah peristiwa gunung meletus (guntur pawatu gunung), yang terjadi pada tahun 1403 Saka (1481 Masehi). Berdasarkan hal ini diduga penulisan kitab *Pararaton* dilakukan tidak lama setelah tahun 1481 M, atau pada akhir abad ke-15

pada waktu hidupnya di dunia merupakan seorang yang bertingkah laku tidak baik, tetapi karena ia sanggup dijadikan korban untuk dewa penjaga pintu, ia dapat kembali ke Wisnubhawana. Ken Angrok dilahirkan di Desa Pangkur, di sebelah timur Gunung Kawi.[4] Ibunya bernama Ken Éndok, istri seorang petani bernama Gajah Para. Pada waktu Ken Éndok hendak mengantarkan makanan untuk suaminya yang sedang bekerja di sawah, ia ditemui oleh dewa Brahma di Tegal Lalateng, sehingga akhirnya Ken Éndok mengandung. Dewa Brahma kemudian berpesan kepadanya agar ia tidak berhubungan lagi dengan suaminya dan bayi yang dikandungnya itu kelak akan menjadi raja di Pulau Jawa, bernama Ken Angrok. Belum lima hari sejak peristiwa tersebut suaminya meninggal. Setelah tiba saatnya lahirlah bayi Ken Angrok, dan kemudian dibuang oleh ibunya di sebuah kuburan. Bayi Ken Angrok yang dibuang itu mempunyai keistimewaan memancarkan sinar. Secara kebetulan pada malam harinya datanglah ke tempat tersebut seorang pencuri bernama Lembong. Terlihat olehnya sesuatu yang memancarkan sinar, lalu didekatinya dan tampaklah olehnya seorang bayi laki-laki yang sedang menangis. Dibawanya bayi itu ke rumahnya dan dijadikan anak angkat.

Selanjutnya kitab *Pararaton* menguraikan kenakalan-kenakalan Ken Angrok semasa mudanya. Setelah dewasa ia mengembara di daerah sebelah timur Gunung Kawi dengan penuh petualangan sebagai pencuri, perampok, pembunuh, dan pemerkosa. Kejahatan Ken Angrok semakin meningkat sehingga ia dikejar-kejar rakyat Tumapel, bahkan atas perintah raja Daha, *akuwu* Tumapel pun berusaha untuk melenyapkannya dari wilayah Daha. Akan tetapi, dalam pengejaran tersebut Ken Angrok selalu dapat meloloskan diri. Kemudian pada suatu saat Ken Angrok diaku anak oleh seorang brahmana bernama Danghyang Lohgawe, yang sengaja datang dari Jambudwipa ke Jawa untuk mencari Ken Angrok. Dengan perantaraan Danghyang Lohgawe ia dapat diterima mengabdi pada *akuwu* Tunggul Ametung. Ketika Ken Angrok mengabdi pada *akuwu* Tunggul Ametung, ia tertarik dengan istri sang *akuwu* yang bernama Ken Dedes. Pada suatu saat di malam hari dibunuhnya *akuwu* Tunggul Ametung oleh Ken Angrok, dengan menggunakan sebilah keris buatan Pu Gandring.

Pembunuhan ini dilakukannya dengan rencana yang sangat rapi, sehingga seolah-olah bukan Ken Angroklah yang membunuh sang *akuwu*. Setelah Tunggul Ametung meninggal, Ken Angrok kemudian memperistri Ken Dedes

---

[4] Mengenai lokasi tempat kelahiran Ken Angrok, lihat: Hasan Djafar, "Tempat Kelahiran Ken Angrok", *Madjalah Perguruan Tinggi*, (IV (4), 1971, hlm. 1–8. Lihat pula di dalam *Manusia Indonesia*, IV (1–2), 1970, hlm. 29–37; Cf. R. Pitono Hardjowardojo, "Tentang Tempat Kelahiran Ken Angrok", MISI, II (2), 1964, hlm. 137–140

dan menggantikan kedudukannya sebagai *akuwu* Tumapel. Semua tindakan Ken Angrok itu dibiarkan saja oleh keluarga Tunggul Ametung dan rakyat Tumapel.

Setelah lama ia menjadi *akuwu* Tumapel, pada suatu hari ia didatangi para brahmana dari Daha. Mereka datang untuk minta perlindungan Ken Angrok dari tindakan raja Daha. Para brahmana itu kemudian menobatkan Ken Angrok menjadi raja Tumapel dengan bergelar Sri Rajasa Sang Amurwwabhumi. Dengan izin dan restu para brahmana itu pula ia memakai nama Bhatara Guru, dan mengadakan penyerangan ke Daha melawan raja Dangdang Gendis. Dalam peperangan di dekat Ganter, Ken Angrok dapat mengalahkan raja Dangdang Gendis dan bala tentaranya. Seluruh kerajaan Daha akhirnya dapat dikuasai oleh Ken Angrok. Kemudian Ken Angrok menjadi maharaja di Tumapel. Penaklukan Daha ini terjadi pada tahun 1144 Saka (1222 Masehi). Pada tahun 1169 Saka (1274 Masehi) ia dibunuh oleh seorang *pangalasan* dari Batil atas suruhan Anusapati, anak tirinya. Ketika ia dibunuh itu, ia sedang makan, pada waktu senja. Ken Angrok kemudian dicandikan di Kagenengan.[5]

Agak berbeda dengan pemberitaan kitab *Pararaton*, kakawin *Nagarakrtagama*[6] memberikan keterangan sebagai berikut. Pada tahun 1104 Saka (1182 M) ada seorang raja besar yang perwira, putra Sri Girinatha. Konon kabarnya lahir tanpa melalui kandungan. Sri Ranggah Rajasa nama beliau, penggempur musuh, pahlawan bijak. Semua orang tunduk sujud menyembah sebagai tanda bakti. Daerah subur yang luas di sebelah timur Gunung Kawi tempat menunaikan dharmmanya. Ibu kota kerajaannya bernama Kutharaja. Tahun 1144 Saka (1222 M) beliau melawan raja Kertajaya dari Kadiri. Setelah raja Kertajaya dikalahkan, Kadiri dapat direbutnya. Bersatulah Janggala dan Kadiri di bawah kekuasaannya. Makin bertambah besarlah kekuasaan dan wibawa putra Sri Girinatha. Pada tahun 1170 Saka (1227 M) beliau pulang ke Swargaloka, dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa[7] dan di Usana sebagai Buddha. Kakawin *Nagarakrtagama* mengemukakan pula bahwa Bhatara Girinathaputra disembah bagaikan dewa, beliaulah moyang Sang Raja (Hayam Wuruk).[8]

---

5 Mengenai Candi Kegenengan, lihat P.V. van Stein Callenfels, "De graftempel van Kagenengan", TBG, LVIII, 1916, hlm. 200. Lihat pula: Nag. XXXVI: 1–2, XXXVII: 1–2 dan XXXVIII: 6

6 Nag., XL: 1–5

7 Lihat catatan 5. Mengenai arca perwujudan Ken Angrok sebagai Siwa tersebut, lihat F.M. Schnitger, "Een Hindoe-Javaansch potretbeeld te Leiden", BKI, 89, 1932. hlm. 251–252; W.F. Stutterheim, "Een bijzettingsbeeld van Koning Rajasa?", TBG, LXXIX, 1939, hlm. 85–104

8 "... bhatara girinathaputra pinakesti dewa sakala, angehniran tuhatuha narendra ..." (Nag., XXX VII: 2:3–4)

Dari kedua sumber kesusastraan tersebut dapat diketahui pula bahwa Ken Angrok adalah pendiri dan raja pertama Tumapel (Singhasari). Dialah yang menjadi wangsakara, pendiri dinasti Rajasa (*Rajasawangsa*) atau dinasti Girindra (*Girind*ra*wang*sa) dan menjadi cikal bakal raja-raja Singhasari dan Majapahit.Selain dari kedua sumber tersebut, riwayat Ken Angrok masih kita dapati pula dalam beberapa kitab *kidung*.[9] Akan tetapi, keterangan dari kitab-kitab *kidung* tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai kesejarahan Ken Angrok.

Sampai sekarang kita belum mendapatkan prasasti yang dikeluarkan atas perintah Ken Angrok. Akan tetapi, tidaklah mustahil adanya.[10] Hingga kini kita hanya memiliki empat buah prasasti yang dianggap memberikan petunjuk mengenai kesejarahan tokoh Ken Angrok.[11] Prasasti-prasasti tersebut ialah prasasti Balawi dari tahun Saka 1227 (1305 M),[12] prasasti Maribong (Trawulan II) dari tahun 1186 Saka (1264 M),[13] prasasti Kusmala (Kandangan) dari tahun 1272 Saka (1350 M),[14] dan prasasti Mula-Malurung dari tahun 1177 Saka (1255 M).[15]

---

9 Kidung-kidung tersebut di antaranya: Kidung Harsa Wijaya (C.C. Berg, "Kidung Harsa-Wijaya", BKI, 1931, hlm. 49–138); Kidung Serat Arok (naskah Perpustakaan Nasional, Jakarta, no. 47)

10 Di dalam kitab *Pararaton* terdapat sebuah petunjuk tentang kemungkinan adanya prasasti yang dikeluarkan oleh atau atas perintah Ken Angrok. *Pararaton* menyebutkan bahwa setelah Ken Angrok dinobatkan menjadi raja Singhasari, orang-orang yang dahulu telah berbuat jasa kepada Ken Angrok, ketika ia menderita, diberi balasan dengan pemberian hak-hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban-kewajiban tertentu (*luputing saarik-purih satampaking-wulukune wadung-pacule*) (Par.[2], hlm. 19). Biasanya pemberian hak-hak istimewa dan pembebasan dari kewajiban-kewajiban tertentu semacam itu ditetapkan dengan pembuatan sebuah prasasti oleh penguasa. Tidaklah mustahil kalau dalam pemberian hak istimewa dan pembebasan kewajiban tersebut oleh Ken Angrok dikeluarkan pula prasasti-prasasti

11 Dari keempat prasasti itu hanya satu prasasti yang dianggap memberikan petunjuk yang meyakinkan, yaitu prasasti Mula-Malurung

12 R.M.Ng. Poerbatjaraka, "Vier Oorkonden in koper", TBG, LXXV, 1936, hlm. 373–390

13 F.D.K. Bosch, "Oorkonde van Trawoelan, II–IV", OV, 1918, hlm. 169–174

14 P.V. van Stein Callenfels, "De Inscriptie van Kandangan", TBG, LVIII, 1918, hlm. 337–347

15 Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Transkripsinya telah dikerjakan oleh Boechari. Pembicaraan mengenai prasasti ini telah dikemukakan oleh Boechari dalam karangannya "The Inscription of Mula Malurung: A New Evidence on the Historicity of Ken Angrok", yang disampaikan pada Seventh International Conference on Asian History, yang diselenggarakan pada tanggal 23–26 Agustus 1977 di Bangkok, oleh International Association of Historians of Asia (I.A.H.A.). Karangan ini dimuat pula di dalam Majalah Arkeologi, III (1)2), hlm. 55–70. Berdasarkan bahan dari Boechari, Slametmuljana di dalam bukunya *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, 1979, membicarakan pula isi prasasti ini

Prasasti Balawi dikeluarkan oleh Sri Maharaja Nararyya Sanggramawijaya, yang dijuluki "yang menjadi pelindung permata Dinasti Rajasa" (*rajasawangs amaniwrndakastena*).[16]

Prasasti Maribong dikeluarkan oleh Sri Jayawisnuwarddhana yang disebutkan *swapitamahastawana-bhinnasrantalokapalaka* ("kakeknya yang telah menenteramkan dan mempersatukan dunia").[17] Prasasti Kusmala yang memperingati penyelesaian sebuah bendungan batu oleh Rakryan Dmung Sang Martabun Rangga Sapu, menyebutkan makamangala rakaking Amurwwabhumi.[18] Prasasti Mula-Malurung yang juga dikeluarkan oleh Wisnuwarddhana, yang di dalam prasasti ini disebutkan dengan nama Narayya Smining Rat, menyebut pula "kakek (*kaki*) sang raja yang menyandang nama Siwa, yang meninggal di bangku emas, yang menjadi pendiri kerajaan, yang menjadi satu-satunya payung bagi seluruh Pulau Jawa, dan yang telah menaklukkan pulau-pulau yang lain."[19]

Keterangan yang terdapat di dalam prasasti Mula-Malurung tersebut sesuai dengan keterangan yang disebutkan di dalam kitab *Pararaton* dan kakawin *Nagarakrtagama*. Kedua kitab tersebut menyebutkan bahwa kakek Wisnuwarddhana ialah Ken Angrok alias Rajasa,[20] yang telah mendirikan kerajaan Tumapel (Singhasari), dan menyebutkan pula sebagai anak Bhatara Siwa. Dari kitab *Pararaton* kita mengetahui pula bahwa Ken Angrok mati dibunuh oleh suruhan Anusapati, anak tirinya, dengan menggunakan keris buatan Pu Gandring. Ketika Ken Angrok dibunuh, ia sedang makan, pada waktu senja hari ketika matahari telah terbenam.

---

16 Menurut J.L. Moens, dengan disebutkannya rajasawangsa, prasasti ini telah menyebutkan pula nama Ken Angrok, yang dianggap sebagai cikal bakal dinasti Rajasa (J.L. Moens, "Wisnuwarddhana, Radja Singasari dan Kaum Keluarga Madjapahit", Bahasa dan Budaja, II (6), 1954, hlm. 30)

17 Menurut Moens, yang dimaksud dengan "kakeknya yang telah menenteramkan dan mempersatukan dunia" itu tentulah Rajasa, yang sudah terkenal sebagai raja yang telah mempersatukan dan memelihara keamanan Pulau Jawa (J.L. Moens, op. cit., hlm. 28)

18 Oleh P.V. van Stein Callenfels, Amurwwabhumi, yang disebutkan di dalam prasasti ini dianggap sebagai gelar Ken Angrok (Stein Callenfels, op. cit., hlm. 339)

19 Prasasti Mula-Malurung, lempeng IX

20 Menurut kakawin *Nagarakrtagama*, Wisnuwarddhana adalah anak Anusapati (Anusanatha) dan Anusapati adalah anak Sri Rajasa (Nag., XLI: 1:1–2). Kitab *Pararaton* memberikan keterangan yang agak berbeda. Menurut *Pararaton* Anusapati adalah anak Tunggul Ametung, tetapi dilahirkan ketika ibunya Ken Dedes sudah diperistri oleh Ken Angrok. (Par.[2], hlm. 17–18). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara resmi Anusapati pun anak Sri Rajasa

Tidak disangsikan lagi bahwa tokoh "kakek" (kaki) yang disebutkan di dalam prasasti Mula-Malurung itu tentulah Ken Angrok Sri Ranggah Rajasa.[21] Berdasarkan pemberitaan kitab *Pararaton*, banyak para sarjana yang berpendapat bahwa Ken Angrok berasal dari kalangan rakyat biasa saja.[22] Akan tetapi, mengingat fungsi dan kedudukan seorang penguasa atau raja dalam masyarakat Indonesia kuno dan juga keadaan serta susunan masyarakat dengan sistem kepercayaannya, tentulah Ken Angrok pun anak seorang penguasa atau *sang amawa bhumi*, walaupun ternyata ibunya hanya seorang perempuan desa. Berdasarkan hal-hal tersebut Boechari[23] telah memberikan tafsiran yang lain terhadap cerita Ken Angrok. Menurut pendapatnya *sang amawa bhumi* yang telah memerkosa Ken Éndok sampai ia mengandung dan melahirkan Ken Angrok itu tiada lain adalah orang yang berkuasa atas wilayah dan rakyat di situ. Sebagai seorang penguasa ia luput dari jangkauan hukum, bahkan ia mempunyai kekuasaan untuk menyingkirkan laki-laki yang menjadi suami sah dari seorang perempuan yang diingininya. Sebagai seorang anak *sang amawa bhumi*, Ken Angrok mempunyai kemampuan mengeluarkan sinar dari tubuhnya. Mengingat bahwa dengan mudah Ken Angrok diterima pengabdiannya oleh Tunggul Ametung, dan mengingat pula bahwa setelah ia membunuh dengan mudah pula ia memperistrikan Ken Dedes, dan menggantikan kedudukannya sebagai a*kuwu* Tumapel tanpa ada campur tangan dari rakyat dan kaum keluarga Tunggul Ametung, Boechari berpendapat bahwa Ken Angrok adalah anak Tunggul Ametung. Dalam hal ini dapat pula terjadi bahwa Ken Éndok tidak dibawa ke dalam puri. Itulah sebabnya di dalam kakawin Nagarakr-tagama yang merupakan sebuah kakawin pujaan (*puja sastra*) untuk raja Hayam Wuruk, Rajasa disebutkan sebagai keturunan dewa yang lahir tanpa melalui kandungan atau tidak beribu (*saksat dewatmakayonija tanaya-tekap sri girindraprakasa*). Lebih jauh lagi Boechari mengemukakan bahwa sebagai seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan, atau anak selir yang tidak dimasukkan ke dalam puri, tentulah Ken Angrok tidak berhak mewarisi apa-apa, lebih-lebih lagi kalau Tunggul Ametung mempunyai anak dari istri utamanya. Setelah Tunggul Ametung memperistri Ken Dedes dan mungkin menjadikannya istri utama, kemudian ternyata Ken Dedes mengandung, Ken Angrok merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya sebelum sang bayi lahir dan setelah berhasil,

---

21 Prasasti Mula-Malurung ini ditemukan tidak lengkap, lempeng II, IV, dan VI sudah hilang. Mungkin nama kaki Smining Rat disebutkan pada salah satu lempeng yang hilang itu

22 Lihat N.J. Krom, HJG2, hlm. 312 J.L.A. Brandes, *Pararaton*[1]; Slametmuljana, *Menuju Puntjak Kemegahan*, 1965, hlm. 93; R. Pitono Hardjowardojo, "Tentang Tempat Kelahiran Ken Angrok", MISI, II (2), 1964, hlm. 137; id., *Pararaton*, 1965, hlm. 8

23 Boechari, "Ken Angrok: Anak Tunggul Ametung?", Berita Antropologi, VII (20), 1975, hlm. 56–69; id., "Ken Angrok: Bastard Son of Tungul Ametung?", MISI, VI (1), 1975, hlm. 15–33

ia memperistrikan Ken Dedes supaya semua warisan, termasuk kekuasaan atas Tumapel jatuh padanya.[24] Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Angrok memperoleh empat orang anak, yaitu Mahisa Wonga Teleng, Panji Saprang, Agnibhaya, dan Dewi Rimbu. Dari istrinya yang lain, yaitu Ken Umang, Ken Angrok mempunyai empat orang anak juga, masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudhatu, Panji Wregola, dan Dewi Rambu.[25] Di antara anak-anak Ken Angrok tersebut, berdasarkan pemberitaan kitab *Pararaton* hanya seorang yang diketahui menjadi raja di Tumapel, yaitu Panji Tohjaya.

2. Anusapati dan Tohjaya

Dari kitab *Pararaton* kita mengetahui bahwa Anusapati bukanlah anak Ken Dedes dari Ken Angrok, melainkan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Pada waktu Ken Dedes diperistri oleh Ken Angrok, ia sedang hamil tiga bulan. Sesudah dewasa Anusapati mengetahui dari ibunya bahwa Ken Angrok bukanlah ayahnya.

Ayahnya yang sebenarnya ialah a*kuwu* Tunggul Ametung yang telah mati dibunuh oleh Ken Angrok. Setelah ia mengetahui mengenai kematian ayahnya itu, ia ingin membalas kepada Ken Angrok. Kemudian dengan menyuruh seorang *pangalasan* dari Batil, ia berhasil melenyapkan Ken Angrok. Sepeninggal Ken Angrok, Anusapati menjadi raja. Ia memerintah selama kurang lebih dua puluh satu tahun, yaitu dari tahun 1227 M sampai tahun 1248 M. Selama masa pemerintahannya itu tidak banyak yang kita ketahui.

Lama-kelamaan berita tentang pembunuhan Ken Angrok oleh Anusapati terdengar pula oleh Panji Tohjaya, anak Ken Angrok dari Ken Umang. Ia tidak senang akan kematian ayahnya seperti itu, dan berusaha pula untuk menuntut balas. Akhirnya pada tahun 1248 M Anusapati dapat dibunuh oleh Tohjaya, ketika keduanya sedang menyabung ayam. Anusapati kemudian didharmakan di Kidal.[26]

---

[24] Boechari, "Ken Angrok: Anak Tunggul Ametung?" Berita Antropologi, VII (20), 1975, hlm. 60–61

[25] Par.[2], hlm. 18

[26] Kakawin *Nagarakrtagama* (XLI:1:4) juga menyebutkan, bahwa Bhatara Anusapati didharmakan di Kidal, dan diwujudkan dalam sebuah patung Siwa (sireki winangun pradipa si[wawi]mbha sobhita rikang ri kidal). Lebih lanjut mengenai patung perwujudan Anusanatha ini lihat F.M. Schnitger, "Het potretbeeld van Anusanatha", BKI, 89, 1932, hlm. 123–128

Foto 8.1 Candi Kidal, Malang, Jawa Timur
(*Sumber: Puslitbang Arkenas*)

Berita *Pararaton* mengenai pergeseran kekuasaan dari tangan Anusapati ke tangan Tohjaya ini berlainan sekali dengan keterangan yang terdapat di dalam prasasti Mula-Malurung. Menurut prasasti ini Panji Tohjaya tidak menggantikan Anusapati, tetapi menggantikan adiknya yang bernama Nararyya Gunging Bhaya. Tohjaya dan Gunging Bhaya di dalam prasasti itu keduanya disebutkan sebagai paman Nararyya Smining Rat (Wisnuwarddhana). Anak Ken Angrok dari Ken Dedes yang tertua ialah Mahisa Wonga Teleng. Berdasarkan garis keturunannya dialah yang seharusnya menggantikan Ken Angrok menjadi raja. Akan tetapi, tidak ada sumber sejarah yang diketahui menyebutkan Mahisa Wonga Teleng menjadi raja di Tumapel. Dari prasasti Mula-Malurung kita hanya mengetahui adanya tokoh yang bernama Bhatara Parameswara, yang sepeninggalnya digantikan oleh Nararyya Gunging Bhaya. Nama Anusapati tidak kita dapatkan di dalam prasasti Mula-Malurung yang sudah ditemukan, tetapi pada salah satu lempengnya kita menjumpai seorang tokoh yang disebutkan sebagai bapa Nararyya Smining Rat.[27] Dari kakawin Nagarakr- tagama mau pun kitab *Pararaton* kita mengetahui, bahwa ayah Smining Rat (Wisnuwarddhana) ialah Bhatara Anusapati (Anusanatha). Dengan demikian, tokoh bapa yang tidak kita ketahui namanya itu tentulah Bhatara Anusapati .

Siapakah tokoh Bhatara Parameswara dan Nararyya Guning Bhaya ini belum jelas, tetapi besar kemungkinan mereka itu adalah keturunan Ken Angrok. Agaknya sepeninggal Ken Angrok sebagian Tumapel diperintah oleh anak-anak Ken Angrok dari Ken Dedes dan Ken Umang, dan sebagian lagi diperintah oleh Anusapati. Atau mungkin pula, kerajaan Tumapel yang pada waktu itu meliputi pula bekas kerajaan Kadiri dari zaman raja Dangdang Gendis, terdiri dari beberapa kerajaan kecil yang masing-masing diperintah oleh anak-anak Ken Angrok.[28]

Prasasti Mula-Malurung menyebutkan bahwa sepeninggal Nararyya Gunging Bhaya, Nararyya Tohjaya kemudian menggantikannya menjadi raja. Berdasarkan uraian di dalam kakawin *Nagarakrtagama* dan kitab *Pararaton* dapat diketahui bahwa Tohjaya tidak lama memerintah. Ia hanya memerintah selama

---

[27] Prasasti Mula-Malurung ini ditemukan tidak lengkap. Beberapa lempeng telah hilang, yaitu lempeng II, IV, dan VI. Mungkin sekali nama Anusanatha (Anusapati) disebutkan pada lempeng yang hilang itu

[28] Dari prasasti Mula-Malurung kita mengetahui ada beberapa orang raja yang memerintah di daerah atau kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan bagian dari Kerajaan Tumapel. Mereka itu ialah: (1) Ratnaraja yang menjadi raja di Morono, (2) Narajaya yang menjadi raja di Hring, (3) Sabhajaya yang menjadi raja di Lwa, (4) Nararyya Kirana yang menjadi raja di Lamajang, (5) Nararyya Murddhaja yang menjadi raja di Daha, (6) Turukbali yang kawin dengan Jayakatwang dan menjadi raja di Glang-Glang, dan (7) seorang lagi yang tidak jelas namanya, yang menjadi raja di Madhura

beberapa bulan saja dalam tahun 1248 M.[29] Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Rajasa dan orang-orang Sinelir.[30] Orang-orang Rajasa dan orang-orang Sinelir menyerbu ke dalam istana. Dalam penyerbuan itu Tohjaya luka kena tombak, kemudian diusung dan diungsikan oleh pengikut-pengikutnya ke Katanglumbang. Sesampainya di Katanglumbang ia meninggal,[31] dan dicandikan di Katanglumbang.

3. Wisnuwarddhana

Sepeninggal Tohjaya, pada tahun 1248 M Rangga Wuni dinobatkan menjadi raja dengan bergelar Sri Jayawisnuwarddhana. Dalam menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Mahisa Campaka[32] yang diberi kedudukan sebagai *ratu angabhaya* dengan nama gelar Narasinghamurtti. Kedua orang itu memerintah bersama seperti Madhawa (Wisnu) dan Indra, atau sebagai dua ekor ular dalam satu lubang.[33]

Pada tahun 1255 M Wisnuwarddhana mengeluarkan sebuah prasasti berkenaan dengan pengukuhan Desa Mula dan Desa Malurung menjadi

---

[29] Mengenai Tohjaya ini ada perbedaan antara sumber *Pararaton* dan kakawin Nagarakrtagama. *Pararaton* menyebutkan Tohjaya memerintah selama satu tahun, yaitu dari tahun 1249 M sampai 1250 M. *Nagarakrtagama* sama sekali tidak menyebutkan tahun 1248 M sebagai tahun meninggalnya Anusanatha dan tahun permulaan Wisnuwarddhana memerintah. Tidak disebutkannya nama Tohjaya di dalam *Nagarakrtagama* tidak mengurangi historisitas tokoh Tohjaya, karena di dalam prasasti Mula-Malurung yang berangka tahun 1255 M dengan jelas disebutkan nama Nararyya Tohjaya. Tidak disebutkannya nama Tohjaya di dalam kakawin *Nagarakrtagama* mungkin disebabkan ia bukan leluhur raja Hayam Wuruk

[30] Mengenai pemberontakan orang-orang Rajasa (wong rajasaJ dan orang-orang Sinelir (wong Sinelir) lebih lanjut lihat di dalam kitab *Pararaton* edisi Brandes (1920) atau Pitono (1965) dan Padmapuspita (1966)

[31] Tentang kematian Tohjaya itu ada dua versi yang agak berbeda, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Pararaton* yang berbentuk prosa (*Pararaton* A) dan yang berbentuk *kidung* (*Pararaton* B). *Pararaton* A menceritakan bahwa pada waktu pasukan Rajasa dan pasukan Sinelir menyerbu istana di waktu malam, Tohjaya tertombak tetapi tidak meninggal. Lalu ia dilarikan oleh hambanya ke luar istana di waktu malam dalam usungan. Di tengah jalan salah seorang di antara hambanya itu lepas kainnya, dan terlihat oleh raja pantatnya. Karena melihat pantat itulah Tohjaya tidak lama menjadi raja. *Pararaton* B memberikan uraian yang lebih mendekati kenyataan. Setelah mendapat serangan pasukan Rajasa dan Sinelir, Tohjaya sempat melarikan diri dengan naik kuda. Ia dikejar oleh musuh-musuhnya sambil diteriaki. Setiba di Katanglumbang ia terhalang oleh sungai sehingga terkejar musuh. Pertempuran berkobar lagi. Tohjaya terkepung dan akhirnya gugur dalam pertempuran itu

[32] Mahisa Campaka adalah anak Mahisa Wonga Teleng, yaitu anak Ken Angrok dari Ken Dedes

[33] Nag., XLI:2: Par.^{2}, hlm. 24
Sebuah prasasti tembaga yang kini disimpan di Museum Frankfurt am Main, menyebutkan Bhattara Jaya Sri Wisnuwarddhana bersama Bhattara ring Singhanagara (Lihat: F.D.K. Bosch, OV, 1929, hlm. 156; lihat pula: F.H. van Naerssen, Oudjavaansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen, Disertasi Universitas Leiden, 1941, prasasti III)

sima untuk Sang Pranaraja dan keturunan-keturunannya yang telah berjasa kepada raja.[34] Di dalam prasasti tersebut Wisnuwarddhana disebutkan dengan nama Nararyya Smining Rat, istrinya bernama Nararyya Waning Hyun, anak pamannya.[35] Sebuah keterangan yang sangat menarik mengenai penobatan Nararyya Smining Rat kita dapati pula di dalam prasasti ini. Keterangan itu menyebutkan bahwa sepeninggal Nararyya Tohjaya, semua pejabat dengan dipimpin oleh Sang Pamget Ranu Kabayan Sang Apanji Patipati menobatkan Nararyya Smining Rat menjadi raja di Tumapel (nararyya smining rat ta pinasangaken prajapatya).[36] Keterangan tersebut menimbulkan kesan tentang tidak adanya calon yang sah untuk duduk di atas takhta kerajaan atau terdapat beberapa orang yang tidak berhak yang berusaha untuk menjadi raja.[37] Dari kitab *Pararaton* diketahui bahwa pada masa awal kerajaan Singhasari ada tiga orang raja yang berturut-turut memerintah menggantikan yang lainnya dengan jalan pembunuhan. Ketiga raja tersebut ialah Tunggul Ametung, kemudian Ken Angrok digantikan oleh anak tirinya yang bernama Anusapati setelah ia berhasil menyuruh seorang pengalasan untuk membunuh Ken Angrok. Akhirnya, Tohjaya anak Ken Angrok dari Ken Umang, berhasil membunuh Anusapati dan menggantikannya menjadi raja. Berita tentang adanya peristiwa saling membunuh di antara raja-raja Singhasari ini di dalam prasasti Mula-Malurung disebutkan dengan istilah lina.[38]

Pada tahun 1264 M, raja Wisnuwardhana mengeluarkan sebuah prasasti untuk Desa Maribong yang termasuk wilayah Jipang. Akan tetapi, sayang sekali kita tidak mengetahui mengapa Desa Maribong mendapat

---

[34] Lihat catatan 15

[35] Dalam prasasti Wurara tahun 1289 M disebutkan bahwa Wisnuwarddhana adalah suami Jayawarddhani (*jayawarddhanibharrya*). Dengan demikian, mungkin Jayawarddhani ini dapat diidentifikasikan dengan Nararyya Waning Hyun

[36] Lihat prasasti Mula-Malurung lempeng III-verso

[37] Cf. penobatan raja Airlangga berdasarkan keterangan di dalam prasasti Pucangan tahun 1041M

[38] Di dalam prasasti Mula-Malurung, kakek Nararyya Smining Rat yang meninggal di bangku emas disebutkan sebagai sang lineng dampa kanaka, ayah mertua dan paman sang raja disebutkan sebagai sang lineng kubwan ageng dan lina pwa pamanira. Demikian pula di dalam prasasti Gajah Mada dari Singasari (D111), *sang Mahawrddhamantri* yang gugur bersama raja Kertanagara pada waktu ada serangan tentara Kadiri dikatakan *sang mahawrddhamantri lina ri dagan Bhattara*

prasasti raja, karena hanya satu lempengan permulaannya yang ditemukan kembali.[39] Di dalam prasasti ini ia disebutkan dengan nama abhisekanya Sri Jayawisnuwarddhana Sang Mapanji Smining Rat, dan disebutkan pula kakeknya yang telah menenteramkan dan mempersatukan dunia (*swapitamaha stawana bhinasrantalokapalaka*). Sebuah prasasti lain dari masa pemerintahan Wisnuwarddhana ialah prasasti tembaga dari desa Pakis Wetan (Kedu) yang berangka tahun 1267.[40] Prasasti ini dikeluarkan oleh raja Kertanagara, *makamangalya* perintah Paduka Bhatara Jaya Sri Wisnuwarddhana.[41] Sayang sekali prasasti ini pun hanya ditemukan lempeng permulaannya saja sehingga tidak diketahui apa isinya.

Bahwa Kertanagara sudah disebutkan sebagai raja di dalam prasasti Pakis Wetan itu dapatlah dijelaskan dengan suatu keterangan di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, yang mengatakan bahwa Wisnuwarddhana telah menobatkan anaknya menjadi raja dalam tahun 1254 M.[42] Apa latar belakang tindakan itu tidak jelas. Beberapa dugaan telah dilancarkan oleh beberapa sarjana,[43] tetapi agaknya tindakan itu tidak lain dari pengukuhan seorang anak menjadi *yuwaraja* atau *kumararaja*. Kakawin *Nagarakrtagama* memuat

---

[39] Lihat OV, 1918, hlm. 169, Prasasti Maribong (Trawulan II) ini angka tahunnya mula-mula dibaca 1170 Saka, kemudian pembacaannya dibetulkan oleh L-C. Damais menjadi 1186 Saka (L-C. Damais, EEI, III, 1952, hlm. 72–73; EEI, IV, 1955, hlm. 197–199)

[40] N.J. Krom, ROC, 1911, Bijlage LXI, hlm. 117–123

[41] Istilah *makamangalya* biasa diterjemahkan dengan 'di bawah pengawasan' atau 'dengan bimbingan'. Istilah itu dipakai juga oleh Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani di dalam prasasti Brumbung yang berangka tahun 1329 (N.J. Krom, "De koperplaaten van Batoer", TBG, LVII, 1919, hlm. 161–166), dan di dalam prasasti Prapancasarapura (OJO, LXXXIV). Di dalam prasasti itu disebutkan bahwa perintah Tribhuwanottungga-dewi dikeluarkan di bawah pengawasan perintah Bhattara Kertarajasapatni (istri Kertarajasa). Di dalam prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 M (OJO, CXIX; OV, 1918, hlm. 169–174; Pigeaud, Java in the 14th Century, I, 1960, hlm. 108–112; Muh. Yamin, Tatanegara Madjapahit, II, 1962, hlm. 97–105), perintah raja Hayam Wuruk dikeluarkan di bawah pengawasan perintah Sri Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani. Masih ada satu lagi prasasti yang memakai istilah itu, ialah prasasti Kusmala yang berangka tahun 1350 M (Lihat: P.V. van Stein Callenfels, "De inscriptie van Kandangan", TBG, LVII, 1918, hlm. 337–347). Prasasti ini memuat keterangan tentang penyelesaian sebuah bendungan di Kusmala oleh Rakryan Demung Sang Martabun Rangga Sapu, *makamangalya* Rakaking Amurwwabhumi. Di dalam contoh di atas, kecuali contoh terakhir, raja-raja itu mengeluarkan perintahnya pada waktu ayah atau ibunya, yang menjadi raja sebelumnya masih hidup

[42] Nag.. XLI:3. Di dalam prasasti Mula-Malurung tahun 1255 M yang dikeluarkan oleh Wisnuwarddhana, dengan jelas disebutkan bahwa pada waktu itu Kertanagara yang mempunyai nama lain Narayya Murddhaja, telah diangkat menjadi raja di Daha dan menguasai seluruh wilayah Kadiri

[43] N.J. Krom mengemukakan dugaan bahwa tindakan itu disebabkan mungkin sekali ibu Kertanagara, Jayawarddhani, mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan karena asal usulnya, sehingga Wisnuwarddhana memandang lebih aman apabila ia memerintah atas nama anaknya daripada memerintah atas namanya sendiri (N.J.Krom, HJG², hlm. 325).

pula keterangan bahwa raja Wisnuwarddhana membunuh seorang perusuh bernama Linggapati serta segenap pengikutnya, sehingga takutlah semua musuh baginda.[44] Kitab *Pararaton* menambahkan keterangan bahwa Linggapati bertahan di Mahibit, tetapi pemimpin pasukan raja, Mahisa Bungalan, berhasil merobohkan pertahanan itu.[45] Tidak ada keterangan sejarah yang lain yang kita ketahui, kecuali suatu keterangan di dalam kitab *Pararaton* yang menyebutkan pembuatan perbentengan di Canggu Lor dalam tahun 1271 M.[46] Canggu Lor terletak di tepi Sungai Brantas, dan mungkin sekali pembuatan perbentengan di Canggu Lor itu ada hubungannya dengan penyerangan atas Mahibit, karena dapat diperkirakan Mahibit pun terletak di tepi Sungai Brantas, dekat Terung, tidak jauh dari letak keraton Majapahit di kemudian hari.[47]

Angka tahun 1271 M menurut kitab *Pararaton* tersebut agak meragukan, karena menurut kakawin *Nagarakrtagama* Wisnuwarddhana meninggal dalam tahun 1268 M, dicandikan di Waleri[48] dengan arca Siwa, dan di Jajaghu dengan arca Buddha. Karena pada umumnya kita lebih mempercayai kakawin *Nagarakrtagama*, mungkin kita harus menganggap bahwa pembuatan benteng di Canggu Lor itu terjadi satu tahun sebelum Wisnuwarddhana meninggal, yaitu dalam tahun 1267.

Dari kedua tempat pencandian Wisnuwarddhana itu hanya Jajaghu yang masih ada peninggalannya yang berarti, yaitu Candi Jago dekat desa Tumpang (Malang).[49] Dari candi ini telah ditemukan kembali sebuah arca Amoghapasa, suatu bentuk Awalokiteswara bertangan delapan, dengan pengikutnya. Di antara arca-arca itu terdapat juga sebuah arca Bhairawa yang dikirakan arca

---

B.J.O. Schrieke berpendapat, bahwa mungkin tindakan Wisnuwarddhana itu disebabkan ia sendiri menderita penyakit seperti halnya Kertarajasa, atau karena ia menjadi bhagawan (Schrieke, Indonesian Sociological Studies, II, 1955, hlm. 71; 319 catatan 23; 323 catatan 70). Di samping itu, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa pada tahun 1254 M itu mungkin Kertanagara masih kanak-kanak

44 Nag., XLI:2

45 Par^2, hlm. 24

46 Loc. cit.

47 Kesimpulan ini didasarkan pada keterangan di dalam Kidung Sunda (Lihat: C.C. Berg, "Kidung Sunda: inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen". BKI, 83, 1927, hlm. 135 dan seterusnya)

48 Di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, Waleri disebutkan sesudah Balitar, yaitu di dalam uraian mengenai bangunan-bangunan suci di wilayah Majapahit (Nag., LXXIII:3). Berdasarkan hal ini mungkin Waleri dapat dilokalisasikan di Desa Meleri dekat Blitar sekarang. Di Meleri itu pernah juga ditemukan sisa-sisa bangunan candi, tetapi hanya tinggal sedikit saja

49 Mengenai Candi Jago, lihat: J.L.A. Brandes, Tjandi Djago (Archaeologische Onderzoek op Java en Madoera, I), 1904
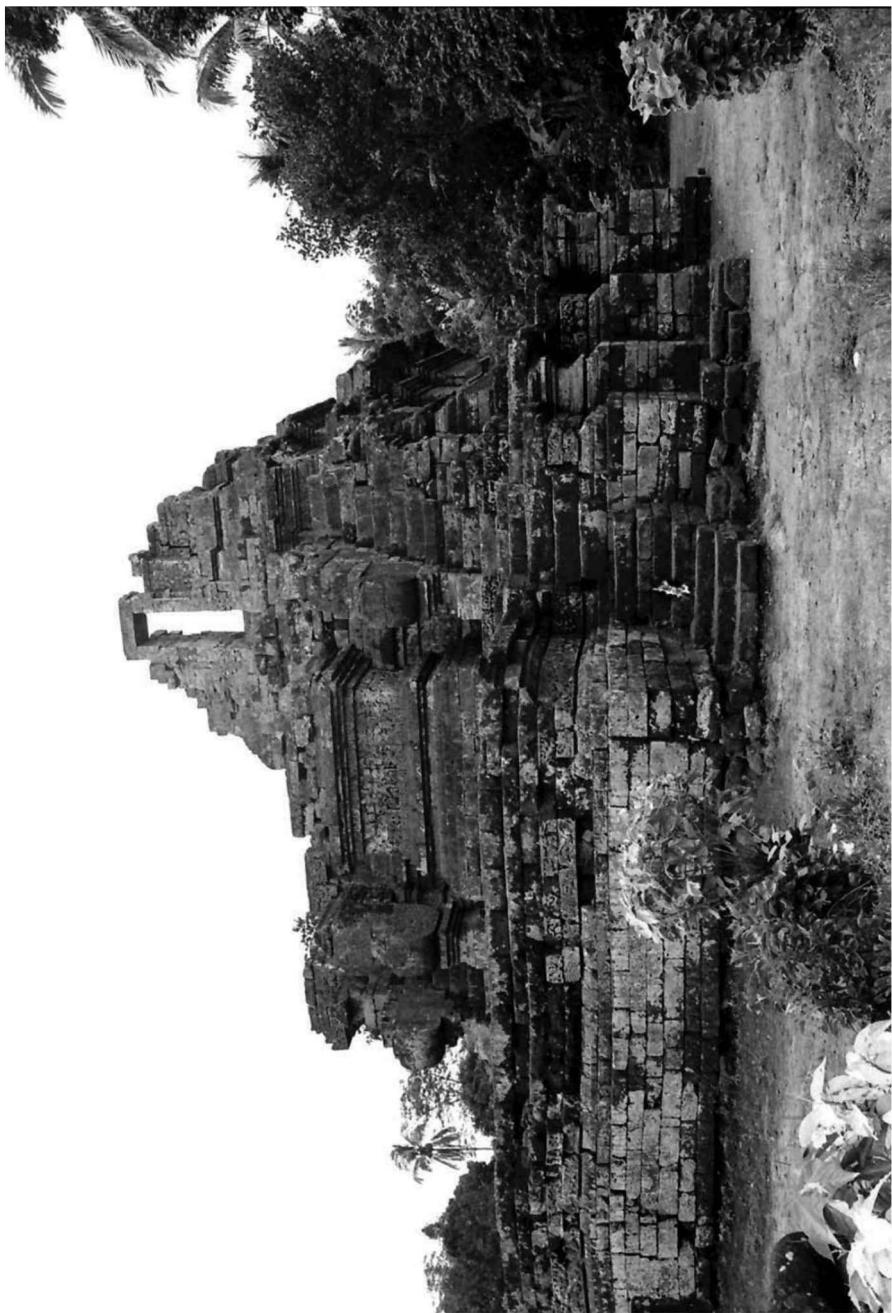
Foto 8.2 Candi Jago, Malang, Jawa Timur
(Sumber: Dit. Purbakala)

perwujudan Adityawarman, raja Malayu. Tidak lama setelah Wisnuwarddhana meninggal, Narasinghamurtti pun meninggal. Ia dicandikan di Kumitir dengan arca Siwa.[50] Menurut kakawin *Nagarakrtagama* Narasinghamurtti menurunkan Dyah Lembu Tal, seorang perwira yuda yang dicandikan di Mireng dengan arca Buddha. Beliau berputra Raden Wijaya (Sri Kertarajasa Jayawarddhana).[51]

4. Kertanagara: Perluasan Cakrawala Mandala

Dari kakawin *Nagarakrtagama* kita mengetahui bahwa pada pemerintahan ayahnya pada tahun 1254 M, Kertanagara telah dinobatkan menjadi raja.[52] Hal ini tidaklah bertentangan dengan keterangan yang terdapat di dalam prasasti Mula-Malurung, yang berangka tahun 1255 M. Di dalam prasasti ini disebutkan bahwa pada waktu itu Kertanagara telah dinobatkan menjadi raja di Daha, yang memerintah seluruh daerah Kadiri.[53] Ia disebut dengan nama Nararyya Murdhaja. Sebagai seorang putra mahkota, pada waktu ia belum menjadi raja menggantikan ayahnya, Kertanagara telah berkedudukan sebagai seorang raja muda (*yuwaraja* atau *kumararaja*). Biasanya raja muda ini sebelum menjadi raja yang berkuasa penuh diberi kedudukan sebagai raja di suatu daerah atau wilayah.[54]

Sebelum tahun 1268 M Kertanagara belum memerintah sendiri sebagai raja Singhasari. Pada waktu itu ia masih memerintah di bawah bimbingan ayahnya, Raja Wisnuwarddhana. Di dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Kertanagara sebelum tahun 1268 M, yaitu sebelum ayahnya meninggal,

---

[50] Nag., XLI: 4. *Pararaton* menyebutkan tempat pencandian itu di Kumeper (Par.[1], hlm. 24)

[51] Nag., LXVL: 2. XLVII: 1. Kitab *Pararaton* tidak menyebut adanya tokoh Dyah Lembu Tal, tetapi menyebutkan bahwa Mahisa Campaka berputra Raden Wijaya (Par.[2], hlm. 24)

[52] Nag., XL.I: 3

[53] Lihat prasasti Mula-Malurung lempeng VII-recto

[54] Di dalam prasasti Sukamrta yang dikeluarkan oleh raja Kertarajasa Jayawarddhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296) disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanagara berkedudukan sebagai *kumararaja* dan telah dinobatkan menjadi raja Daha. (Lihat: Poerbatjaraka, INI, I, 1940, hlm. 38). Demikian pula di dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani (OJO, LXXXIV), disebutkan bahwa Hayam Wuruk yang pada waktu itu telah dinobatkan menjadi raja di daerah Jiwana, juga berkedudukan sebagai *kumararaja*. Dari kakawin *Nagarakrtagama* kita peroleh pula keterangan bahwa pada zaman pemerintahan raja Hayam Wuruk, putri mahkota Kusumawarddhani juga berkedudukan sebagai rajakumari, di samping kedudukannya sebagai raja daerah di Kabalan (Nag., Vll: 4)

selalu kita dapati istilah makamangalya.[55] Dari masa sebelum ia memerintah sendiri ada dua buah prasasti yang ditemukan kembali, yaitu prasasti batu dari Desa Kranggan (Sengguruh, Malang) yang mungkin berangka tahun 1256 M[56] dan sebuah lagi prasasti tembaga dari Pakis Wetan (daerah Kedu) yang berangka tahun 1267 M.[57] Sayang sekali prasasti batu dari Kranggan tersebut sudah sangat usang sehingga sulit dibaca dan isinya tidak dapat diketahui dengan jelas. Prasasti tembaga dari Pakis Wetan hanya ditemukan kembali lempengan permulaannya. Namun, dari lempengan permulaannya ini masih dapat diketahui bahwa prasasti ini dikeluarkan atas perintah raja Kertanagara dengan menyebut *makamangalya* perintah Bhattara Jaya Sri Wisnuwarddhana.

Barulah pada tahun 1269 M, ada sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh raja Kertanagara tanpa menyebut *makamangalya* perintah ayahnya. Prasasti ini ialah prasasti Sarwwadharmma yang ditemukan di Penampihan, di lereng Gunung Wilis, Kediri.[58] Prasasti Sarwwadharmma memberikan keterangan bahwa rakyat daerah Sarwwadharmma dengan perantaraan Sang Ramapati bersama Rakryan Apatih dan Sang Dharmmadhyaksa ri Kasaiwan Sang Apanji Tanutama, telah menghadap raja memohon agar daerah mereka dilepaskan dari wilayah Thanibala menjadi suatu daerah swatantra. Menurut keterangan mereka, dahulu semasa pemerintahan ayahanda raja (Wisnuwarddhana) daerah Sarwwadharmma telah ditetapkan menjadi daerah swatantra lepas dari wilayah Thanibala, yaitu ketika Panji Pati-pati menjabat dharmmadikarana. Permohonan itu dikabulkan raja dan selanjutnya daerah punpunan Sang Hyang Sarwwadharmma tidak lagi diwajibkan membayar bermacam-macam pungutan.

Raja Kertanagara adalah seorang raja Singhasari[59] yang sangat terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan cakrawala mandala ke luar Pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh dwipantara. Dalam bidang keagamaan ia sangat menonjol dan dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha Tantrayana.

Pada awal pemerintahannya ia berhasil memadamkan pemberontakan Kalana Bhaya (Cayaraja). Dalam pemberontakan itu Kalana Bhaya mati

---

55 Mengenai istilah *makamangalya* lihat catatan 41

56 OV, 1916, hlm. 86 dst.

57 N.J. Krom, ROC, 1911, Billage LXI, hlm. 117–123; Muh. Yamin, Tatanegara Madjapahit, II, hlm. 173–175

58 OJO, LXXIX; H.B. Sarkar, JGIS, V, 1935

59 Berdasarkan pemberitaan *Nagarakrtagama*, nama Singhasari baru dikenal setelah Kertanagara menjadi raja, sebelumnya bernama Kutharaja (Nag., XL: 2, XLI: 3)

terbunuh. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1270 M.[60] Pada tahun 1275 M Kertanagara mengirimkan ekspedisi untuk menaklukkan Malayu.[61] Pada tahun 1280 M baginda raja membinasakan durjana yang bernama Mahisa Rangkah, dan pada tahun 1284 M menaklukkan Bali, rajanya ditawan dan dibawa ke Singhasari.[62] Demikianlah, seluruh daerah-daerah lain tunduk di bawah kekuasaan raja Kertanagara, yaitu seluruh Pahang, seluruh Malayu, seluruh Gurun, seluruh Bakulapura, tidak perlu disebutkan lagi Sunda dan Madura, karena seluruh Pulau Jawa tunduk di bawah kekuasaan raja Kertanagara.[63]

Pahang terletak di Malaysia, Malayu terletak di Sumatra Barat, Gurun nama pulau di Indonesia bagian timur, dan Bakulapura atau Tanjungpura terletak di bagian barat daya Kalimantan. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh pengarang *Nagarakrtagama* dengan nama-nama itu ialah wilayah Semenanjung Tanah Melayu, seluruh Sumatra, seluruh Kalimantan dan Indonesia bagian timur, seperti ternyata dari bagian lain dari kitab *Nagarakrtagama*.[64] Kekuasaan raja Kertanagara atas seluruh Nusantara itu, entah benar atau hanya secara simbolis, dinyatakan pula dalam prasasti yang tertera pada bagian belakang arca Camundi dari desa Ardimulyo (Singasari) yang berangka tahun 1292 M.[65] Dalam prasasti itu dikatakan bahwa arca Bhattari

---

[60] Par.[2], hlm. 24; Nag., XLI: 5

[61] Loc.cit.

[62] Nag.. XLII: 1

[63] Nag., XLII: 2

[64] Nag. XIII: I–2; XIV: 1r5

[65] Angka tahun prasasti ini mula-mula dibaca oleh Goris (OV, 1928, hlm. 32), dan W.F. Stutterheim ("De dattering van eenige Oostjavaansche beeldengroepen", TBG, LXXVI, 1936. hlm. 313–317) sebagai angka tahun 1254 Saka (1332 M). Oleh Stutterheim prasasti ini dihubungkan dengar ratu Tribhuwana dari Majapahit dan peperangan di Sadeng dan Keta yang disebutkan di dalam *Nagarakrtagama*. Arca Ganesa dan Bhairawa yang ada di kanan kiri arca Camundi diidentifikasikan dengan tokoh Gajah Mada dan Adityawarman. Atas dasar pembacaan angka tahun tersebut C.C. Berg telah menulis sebuah karangan tentang peperangan di Sadeng dan mitos tentang kebesaran Majapahit (C.C. Berg, "De Sadeng-oorlog en de mythe van Groot Majapahit", lndonesie", 5, 1951–1952, hlm. 385–422). Demikian pula J.L. Moens, atas dasar angka tahun itu mengemukakan teorinya yang menyatakan bahwa Tribhuwana mempunyai hubungan bigami dengan Cakreswara, suaminya, yang dilukiskan sebagai Bhairawa, dan Gajah Mada yang dilukiskan sebagai Ganesa, yang ditempatkan di sebelah kiri dan kanan dari arca Camundi (lihat: J.L. Moens, "Wisnuwarddhana. vorst van Singhasari, en zijn Majapahitse santanapratisantana", TBG, LXXXV, 1955, hlm. 365–336, khususnya hlm. 381–386: lihat pula: J.L. Moens, "Wisnuwarddhana, radja Singhasari dan kaum keluarga Majapahit", Bahasa dan Budaja, II (6), 1954, hlm. 3–30, Ill (1), 1954, hlm. 3–37; cf. Sutjipto Wirjosuparto (±), "Adakah biandri dan poliandri di Indonesia?", Majalah Arkeologi, I (4), 1978, hlm. 55–68). Akan tetapi, kemudian ternyata teori-teori tersebut harus ditinggalkan, karena L-C. Damais berhasil menetapkan pembacaan angka tahun prasasti tersebut menjadi. 1214 Saka (17 April 1292 M), dan harus dihubungkan dengan raja Kertanagara (lihat: L-C. Damais, "Etudes d'Epigraphie Indonésienne: IV. Discussion de la date des inscriptions", BEFEO, XLVII, 1955, hlm. 151–153). Tentang penentuan

Foto 8.3 Arca Camundi, Singasari, Jawa Timur, koleksi Museum Trowulan
(Sumber: Puslitbang Arkenas)

Camundi itu ditahbiskan pada waktu Sri Maharaja (Kertanagara) menang di seluruh wilayah dan menundukkan semua pulau-pulau yang lain.[66]

Sebuah prasasti pada alas arca Amoghapasa dari Sungai Langsat yang berangka tahun 1286 M memberi petunjuk bahwa Malayu benar-benar tunduk kepada Singhasari. Disebutkan bahwa arca Amoghapasa itu dengan keempat belas pengiringnya, beserta saptaratna,[67] dibawa dari Jawa ke Suwarnabhumi dan ditegakkan di Dharmmasraya. Arca itu adalah punya (pemberian jasa) dari Sri Wiswarupakumara. Yang diperintahkan oleh Sri Maharajadhiraja Kertanagara untuk mengiringkan arca tersebut ialah Rakryan Mahamantri Dyah Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma, Samgat Payanan Hang Dipankaradasa, dan Rakryan Demung Pu Wira. Seluruh rakyat Malayu dari keempat kasta bersukacita, terutama rajanya, ialah Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa.[68] Jelas dari prasasti itu bahwa kedudukan Kertanagara lebih tinggi dari Mauliwarmmadewa, karena Kertanagara diberi gelar maharajadhiraja, sedang Mauliwarmmadewa hanya memakai gelar maharaja.

Tindakan raja Kertanagara untuk meluaskan kekuasaannya ke luar Jawa itu rupa-rupanya didorong oleh ancaman dari daratan Cina, di sana sejak tahun 1260 M berkuasa kaisar Shih-tsu Khubilai Khan, yang pada tahun 1280 M mendirikan dinasti Yüan. Khubilai Khan segera memulai dengan minta pengakuan kekuasaan dari negara-negara yang sebelumnya mengakui kekuasaan raja-raja Cina dari dinasti Sung. Kalau tidak mau mengirimkan upeti dengan baik-baik, mereka dipaksa dengan kekuatan senjata. Demikianlah, Birma, Kamboja, dan Campa dikirimi utusan menuntut pengakuan kekuasaan,

---

namanya, yaitu Camundi dan bukan Camunda, lihat: Boechari, "Epigraphy and Indonesian Historiography", di dalam Soedjatmoko, et.al. (editor), *An Introduction to Indonesian Historiography*, 1965, hlm. 52. Lihat pula: Boechari, "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", Majalah Arkeologi, 1 (2), 1977, hlm. 26 cat. 3; L-C. Damais, "Le nom de la déité tantrique de 1214 Saka", BEFEO, L, 1962, hlm. 407–416

[66] "tatkala kapratisthan paduka bhatari maka tewek huwus [s]r[i ma] haraja digwijaya ring sakalaloka manuyuyi (baca: manuluyi) sakaladwipantaro"(lihat: Boechari, "An Inscribed linga from Rambianak", BEFEO, XLIX, 1957, hlm. 407)

[67] Saptaratna atau "tujuh permata" merupakan lambang seorang cakrawartin. Semuanya dilukiskan pada alas arca Amoghapasa tersebut berupa kuda, cakra, permaisuri, ratna, menteri, hulubalang, dan gajah. Mungkin juga raja Kertanagara benar-benar mengirimkan seorang putri, dua orang pejabat, seekor gajah, seekor kuda, senjata cakra, dan permata kepada raja Mauliwarmmadewa

[68] N.J. Krom, "Een Sumatraansche inscriptie van koning Krtanagara", VMKNAW-L, 5e Serie, II, 1916, hlm. 306–339

kemudian diserbu tentara Mongol karena negara-negara tersebut tidak mau tunduk begitu saja. Meskipun serangan itu tidak selamanya berhasil, tetapi negara-negara itu memandang lebih aman untuk akhirnya mengirimkan juga utusan dengan upeti kepada Kubhilai Khan. Jawa juga tidak luput dari incaran. Utusan Kubhilai Khan mulai datang pada tahun 1290 dan 1291, menuntut supaya ada seorang pangeran yang dikirim ke Cina sebagai tanda tunduk kepada Kekaisaran Yüan. Ancaman itulah yang mengubah pandangan raja Kertanagara. Kalau sebelumnya kekuasaan raja-raja di Jawa hanya diarahkan ke lingkungan Pulau Jawa (yawadwipamandala) untuk menghadapi Kubhilai Khan yang hendak meluaskan kekuasaannya ke luar daratan Cina sampai ke pulau-pulau di selatannya, Kertanagara haruslah memperluas wilayah mandalanya sampai ke luar Pulau Jawa. Ia pun mengadakan hubungan persahabatan dengan Campa. Petunjuk tentang adanya hubungan itu terdapat dalam prasasti Po Sah dekat Phanrang yang berangka tahun 1306 M, yang menyebutkan bahwa salah seorang permaisuri raja Campa ialah putri dari Jawa bernama Tapasi.[69] Demikian pula pada waktu tentara Kubhilai Khan hendak menambah perbekalan di Campa dalam perjalanannya ke Jawa, raja Jayasinghawarmman III menolak tentara Cina itu mendarat.[70] Berita lain mengatakan bahwa pada tahun 1318 M, pada waktu Campa hendak merebut kembali daerah-daerah di bagian utara dari kekuasaan Annam, dan sekaligus juga membebaskan diri dari kekuasaan Annam, Chê Nang, anak Jayasinghawarmman III, menderita kekalahan dan mencari perlindungan ke Jawa.[71]

Dalam bidang keagamaan raja Kertanagara berusaha pula untuk mengimbangi Kubhilai Khan, yaitu dengan menganut juga agama Buddha Tantrayana dari aliran kalachakra. Aliran ini mulai berkembang di Benggala menjelang akhir masa pemerintahan dinasti Pala. Dari sana aliran ini menyebar ke Tibet dan Nepal. Raja-raja Mongol ternyata amat tertarik dengan aliran ini karena lebih sesuai dengan jiwa mereka.[72] Di Jawa aliran ini bercampur

---

69 L. Finot, "Notes d'Epigraphie V", BEFEO; III, 1903, hlm. 640-642. Lihat juga: N.J. Krom, "Tapasi", TBG, LVI, 1914, hlm. 318–320, dan HJG, 2 hlm. 332

70 G. Maspero, "Le royaume de Champa", T'oung Pao, XII, 1911, hlm. 392

71 Ibid., hlm. 198 dst.: N.J. Krom, HJG^2, hlm. 333; G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, 1968, hlm. 229

72 Kenneth Chen, Buddhism in China, 1972, hlm. 414–425

dengan pemujaan terhadap Siwa-Bhairawa. Aliran keagamaan yang dianut oleh raja Kertanagara itu dapat disimpulkan dari Kakawin *Nagarakrtagama* dan dari kenyataan bahwa ia ditahbiskan sebagai Jina di kuburan Wurara[73] pada tahun 1289 M. Arca pentahbisannya berupa arca Aksobhya yang digambarkan dengan kepala gundul, yang terkenal dengan nama Joko Dolog.[74] Arca Camundi dari desa Ardimulyo yang telah disebutkan juga merupakan petunjuk bahwa agama yang berkembang pada masa itu ialah suatu aliran dalam agama Buddha Tantrayana. Kakawin *Nagarakrtagama* menggambarkan raja Kertanagara sebagai seorang raja yang tidak ada bandingannya di antara raja-raja di masa lampau. Ia sempurna di dalam sadguna (ilmu ketatanegaraan), paham akan segala ilmu pengetahuan, mengusai ajaran tatwopadesa (ilmu tentang hakikat), patuh pada hukum, teguh dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan pemujaan Jina (apageh ing jinabrata), amat berusaha dalam menjalankan prayogakrya (ritus-ritus tantra), dan karena itu keturunan-keturunannya menjadi raja.[75] Selanjutnya dikatakan bahwa raja tidak pernah melalaikan kewajibannya, tidak pernah lupa daratan (luput ing mada), makin memerhatikan naya (kebijaksanaan) karena ia insaf akan kesulitan memerintah di dunia ini dalam zaman Kaliyuga. Itu pula sebabnya ia menganut agama Buddha, menirukan raja-raja yang telah memerintah sebelumnya. Dengan tekun ia mematuhi pancasila, menaati segala upacara pentahbisan sebagaimana mestinya, mempelajari ilmu mantik dan tata bahasa, dan kitab-kitab lain. Dalam usia yang agak lanjut ia dengan tekun berusaha menyerap segala seluk-beluk kebatinan, terutama Tantra Subhuti,[76] puja, yoga, dan samadi dilakukannya dengan sungguh-sungguh demi keselamatan dunia, tidak terlupakan pula ganacakra[77] dan anugerah kepada semua rakyat, dan terkenallah gelar Jina beliau, yaitu Jnanabajreswara.[78]

---

[73] Selama ini nama pekuburan tempat pentahbisan Kertanagara sebagai Jina disebut Wurare. Memang demikianlah yang tertera di dalam prasasti. Akan tetapi, orang lupa, bahwa itu bentuk lokatif (smasane wurarenamni = di pekuburan yang bernama Wurara). Nama sebenarnya ialah Wurara (Lihat: R.Ng. Poerbatjaraka, "Di mana tempatnya rumah Mpu Bharadah? dan Belas", Bahasa dan Budaja, III (2),1954, hlm. 3–40

[74] H. Kern, "De Sanskrit inscriptie van Mahaksobhya-beeld te Simpang (stad Soerabaja; 1211 Saka)", VG, VII, 1917, hlm. 189–196

[75] Nag., XLIII: 4

[76] Di dalam kitab Sanghyang Kamahayanikan disebutkan sebuah kitab bernama Sang Hyang Tantra Bajradhatu Subhuti, yang dikarang oleh Sri Sambhara Suryyawarana, seorang pendeta agama Jina yang bertempat tinggal di Wanjang. Lihat: J. Kats, Sang Hyang Kamahayanikan, 1910, hlm. 118

[77] Yang dimaksud dengan ganacakra ialah upacara keagamaan yang menyertai upacara inisiasi dalam aliran Tantrayana. Lihat: P.H. Pott, Yoga and Yantra, 1966, hlm. 81; Alexandra David-Neel, Initiations lamaiques, des thèories, des pratiques, des hommes, 1930, hlm. 88 dst

[78] Nag., XLII: 3, XLIII: 2–3

Sepintas lalu gambaran yang diberikan oleh Prapanca itu bertentangan dengan apa yang dikemukakan di dalam kitab *Pararaton*. Di dalam kitab *Pararaton* dikemukakan bahwa raja Kertanagara selalu minum minuman keras (pijer anadah sajeng), suatu perbuatan yang bertentangan dengan pancasila, karena salah satu di antara sila-sila itu larangan untuk mabuk. Akan tetapi, rupa-rupanya di sini ada salah pengertian dari pengarang kitab *Pararaton* yang tidak lagi memahami ajaran agama Buddha Tantrayana yang dianut oleh raja Kertanagara. Tujuan terakhir dari aliran ini adalah sunyaparamananda, yaitu tingkatan hidup sebagai Ãdibuddha yang abadi, yang mengecap kebahagiaan yang tertinggi (paramananda), yang hakikatnya ialah kesunyatan (sunyata). Dengan menjalankan pelbagai upacara orang akan dapat mencapai tingkatan sunyaparamananda itu semasa orang itu masih hidup dengan ditahbiskan sebagai Jina. Orang yang demikian itu disebut jivanmukta atau bhumityaga.[79]

Seperti telah dikemukakan di atas, Kertanagara memang telah dinobatkan sebagai Jina pada tahun 1289 M. Penobatannya itu diperingati dengan prasasti yang dipahatkan pada asana arca Aksobhya dari Simpang. Pelbagai sumber menyebut gelar Jinanya sebagai Jnanasiwabajra (dalam prasasti pada asana arca Aksobhya), Jnanabajreswara (Nag., XLIII: 2), dan Jnaneswarabajra (prasasti dari Candi Singasari tahun 1351 M). Dalam tingkatan yang demikian itu orang tidak terkena lagi akibat-akibat dari pancakama upabhoga, baginya tidak ada lagi hal yang terlarang. Oleh karena itu, ia dengan sadar menikmati kamapancikam atau pancamakara, yaitu maithuna (hubungan seksual), madya (minuman yang memabukkan), mamsa (daging), matsya (ikan), dan mudra (sikap tangan yang menimbulkan kekuatan gaib).

Demikianlah, Kertanagara mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual untuk menghadapi ancaman Kubhilai Khan. Setelah dirinya merasa cukup kuat, utusan Kubhilai Khan yang datang pada tahun 1289 M untuk minta pengakuan tunduk dari raja Kertanagara, yaitu Meng-Ch'i ditolaknya dan dilukai mukanya.[80] Penganiayaan terhadap utusan Kubhilai Khan itu dianggap sebagai penghinaan besar dan merupakan pengumuman perang. Tidaklah mengherankan bahwa setelah Meng-Ch'i kembali menghadap Kubhilai Khan, ia menjadi marah sekali dan memutuskan untuk mengirim pasukannya yang kuat untuk menggempur Jawa. Pada awal tahun 1292 M berangkatlah armada tentara Mongol untuk menaklukkan Jawa, dipimpin oleh tiga orang panglima perang, yaitu Shih-pi, Ike Mese, dan Kau Hsing.[81]

---

[79] J.L. Moens, "Het Buddhisme op Java en Sumatra in zijn laatste bloeiperiode", TBG, LXVI, 1920, hlm. 521–579. Lihat pula terjemahannya dalam bahasa Indonesia: Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam masa kejayaannya terakhir, Jakarta: Bhratara, 1974

[80] W.P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources, 1960, hlm. 22. Lihat pula: Soewito Santoso, "Meng-Ch'i", MISI, II (2).1 964, hlm. 141, dst

[81] W.P, Groeneveldt, op. cit., hlm. 21

Akan tetapi, keruntuhan Kertanagara datang dari jurusan lain. Di muka telah disebutkan bahwa kerajaan Kadiri telah dikalahkan oleh Sri Rajasa, buyut raja Kertanagara. Kadiri tidak dihancurkan, tetapi tetap diperintah oleh keturunan raja Kertajaya dengan mengakui kepemimpinan Singhasari. Sejak tahun 1271 M, Jayakatwang, salah seorang keturunan raja Kertajaya, memerintah di Gelang-Gelang.[82] Raja Kertanagara telah mengambil langkah untuk menjaga hubungan politik yang baik dengan Jayakatwang, yaitu dengan jalan mengambil anaknya yang bernama Arddharaja sebagai menantunya,[83] demikian pula saudara perempuan raja Kertanagara yang bernama Turukbali menjadi istri raja Jayakatwang.[84] Akan tetapi, karena hasutan patihnya, Jayakatwang bertekad akan membalas dendam kematian leluhurnya oleh leluhur raja Kertanagara. Oleh sang patih ditunjukkan dharma seorang ksatrya yang harus menghapus aib yang diderita oleh leluhurnya. Itulah sebabnya Jayakatwang memberontak mengangkat senjata terhadap raja Kertanagara.[85]

Kitab *Pararaton* menambahkan bahwa dalam usaha meruntuhkan kerajaan Singhasari itu Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, adipati Sungenep, yang telah dijauhkan dari keraton oleh raja Kertanagara. Wiraraja itulah yang memberitahukan kepada Jayakatwang kapan waktu yang tepat untuk menyerang Singhasari, yaitu pada waktu sebagian kekuatan tentara Singhasari sedang ada di Malayu.[86]

---

[82] Nag, XLIV: 2. Di dalam prasasti Mula-Malurung tahun 1255 M disebutkan bahwa pada waktu itu yang menjadi raja di Daha adalah Nararyya Murddhaja yang bergelar Sri Kertanagara. Jayakatwang pada waktu itu menjadi raja di Gelang-Gelang; ia memerintah bersama-sama permaisurinya, seorang putri Narayya Smining Rat, yang bernama Turukbali

[83] Disebutkan di dalam prasasti Kudadu (1294 M) dan prasasti Mula-Malurung (1255 M)

[84] Lihat prasasti Mula-Malurung

[85] Lihat: Kidung Harsa Wijaya, 11: 17–19, 35 (C.C. Berg, "Kidung Harsa-Wijaya", BKI, 99, 1931, hlm. 49–238)

[86] Par.[2] hlm. 24. Dalam hal ini timbul pertanyaan, mungkinkah Pamalayu itu terjadi pada tahun 1285 M, dan bukan pada tahun 1275 M seperti yang disebutkan di dalam *Pararaton*. Seperti sudah disebutkan, tiruan arca Amoghapasa dari Candi Jayaghu dikirimkan oleh Kertanagara ke Malayu pada tahun 1286 M. Ataukah mungkin Kertanagara dua kali mengirimkan utusan ke Malayu? Yaitu pertama kali dalam tahun 1275 M dengan kekuatan senjata, dengan maksud minta Malayu tunduk di bawah kekuasaan Singhasari, dan utusan yang kedua pada tahun 1286 M setelah Malayu tunduk, dengan membawa tiruan arca perwujudan ayahnya untuk dipuja di Malayu. Dari kitab *Pararaton* kita mengetahui pula bahwa utusan ke Malayu itu kembali lagi ke Jawa dalam tahun 1293 M, setelah Singhasari jatuh dan Majapahit berdiri, dengan membawa dua orang putri Malayu (Par.[2], hlm. 31)

Foto 8.4 Candi Singasari, Malang, Jawa Timur
(Sumber: Puslitbang Arkenas)

Serangan Jayakatwang dilancarkan antara pertengahan bulan Mei dan pertengahan bulan Juni 1292 M.[87] Prasasti Kudadu yang berangka tahun Saka 1216 (11 September 1294 M) maupun kitab *Pararaton* membayangkan bahwa tentara Kadiri dibagi dua, menyerang dari dua arah.[88] Pasukan yang menyerang dari utara rupa-rupanya hanya sekadar untuk menarik pasukan Singhasari dari keraton. Siasat itu berhasil.[89] Setelah pasukan Singhasari di bawah pimpinan Wijaya dan Arddharaja menyerbu ke utara dan mengejar musuh yang selalu bergerak mundur, pasukan Jayakatwang yang menyerang dari arah selatan menyerbu ke keraton, dan dapat membunuh raja Kertanagara yang menurut kitab *Pararaton* sedang bermabuk-mabukan. Sumber lain menyebutkan bahwa raja Kertanagara meninggal bersama para brahmana,[90] jadi rupa-rupanya raja sedang melakukan upacara keagamaan. Dengan gugurnya raja Kertanagara pada tahun 1292 M, seluruh kerajaan Singhasari dikuasai oleh Jayakatwang.

Raja Kertanagara dicandikan di Singhasari dengan tiga arca perwujudan, yang melambangkan trikaya, yaitu sebagai Siwa-Buddha dalam bentuk Bhairawa yang melambangkan nirmanakaya, sebagai Ardhanari lambang sambhogakaya, dan sebagai Jina dalam bentuk Aksobhya yang melambangkan *dharmmakaya*.[91] Masih ada satu lagi tempat yang biasanya ditafsirkan sebagai tempat pencandian raja Kertanagara, adalah Jajawa atau candi Jawi dekat Prigen (Malang).

---

87 Mengenai penentuan bulan ini, yang sumbernya terdapat di dalam prasasti Candi Singasari (prasasti Gajah Mada) tahun 1351 M, lihat: L-C. Damais, "Études d'Épigraphie Indonésienne: IV. Discussion de la date des inscription", BEFEO, XLVII, 1955, hlm. 236

88 Par.[2], hlm. 94 dst.; OJO, LXXXI

89 Siasat peperangan semacam ini mungkin dapat disebut siasat makarawyuha. Tentang siasat perang ini disebutkan di dalam kakawin Bharatayuddha, XIII: 24, XXVII: 2 (Lihat: R.M. Sutjipto Wirjosuparto, kakawin Bharatayuddha, 1968)

90 Keterangan ini terdapat di dalam prasasti Gajah Mada dari Candi Singasari (Lihat: J.L.A. Brandes, Beschrijving van Tjandi Singasari, 1909, hlm. 38). Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta, dengan nomor inventaris D111. Prasasti ini isinya memperingati pembuatan sebuah bangunan caitya oleh Rakryan Mapatih Mpu Mada (Gajah Mada) yang dipersembahkan kepada arwah para brahmana Saiwa dan Sogata yang ikut gugur bersama raja Kertanagara, demikian juga Sang Mahawrddhamantri yang gugur di bawah kaki baginda (samankana twek rakryan mapatih jirnnodhara makirtti caitya ring mahabrahmana saiwasogata samandulur i kamoktan paduka bhatara muwah sang mahawrddhamantri lina ri dagan bhatara)

91 P.H. Pott, Yoga and Yantra, hlm. 128–130. Tentang masalah tempat pencandian Kertanagara telah hanyak sekali ditulis oleh para ahli. Dapat disebutkan di sini: F.D.K. Bosch, "De bijzetting van koning Kertanagara te Sagala", OV, 1917, hlm. 135–163: "Tjandi Djawi een graftempel'?", OV, 1918, hlm. 156–163.Poerbatjaraka, "Het beeld van Tjandi Djawi", OV, 1917,

Foto 8.5 Candi Jawi, Pasuruan, Jawa Timur
(Sumber: Dit. Purbakala)

Kakawin *Nagarakrtagama* sebenarnya menyebutkan bahwa candi itu dibuat oleh raja Kertanagara sendiri. Jadi, tidaklah jelas apakah juga merupakan tempat pencandiannya. Di dalam kitab itu candi Jawi dilukiskan sebagai bersifat Saiwa di bagian bawah dan bersifat Buddha di puncaknya. Di dalamnya terdapat arca Siwa yang sangat indah dengan arca Aksobhya di atas mahkotanya. Akan tetapi, karena keluhuran dhatnya, yaitu sunyata, arca Aksobhya itu hilang. Di bagian lain dikatakan bahwa hilangnya arca itu disebabkan candinya disambar petir dalam tahun 1331 M.[92]

Penelitian di candi Jawi menunjukkan bahwa rupa-rupanya memang pernah dilakukan pemugaran terhadap candi itu pada masa yang lampau, antara lain karena kelihatan dengan nyata bahwa kaki candi dan sebagian tubuhnya terbuat dari jenis batu yang lain dari puncaknya yang berbentuk dagob. Selain itu, sebagian besar arca-arcanya terdapat dalam keadaan hancur. Seperti yang dinyatakan di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, memang arca induknya ialah Siwa Mahadewa yang tinggal sebagian kepalanya saja. Selain itu, masih didapatkan bagian-bagian arca Ardhanari, Brahma, Ganesa dan dua arca lain, dan sebuah arca Durga dan Nandiswara yang masih utuh.[93] Didapatkan juga sebuah batu candi berangka tahun 1254 Saka (1332 M). Mungkin sekali angka tahun itu ialah angka tahun pemugaran candi Jawi setelah disambar petir dalam tahun 1331 M.

B. Kerajaan Majapahit

1. Wijaya dan Awal Perkembangan Majapahit

Setelah raja Kertanagara gugur, Singhasari berada di bawah kekuasaan Raja Kadiri Jayakatwang dan berakhirlah riwayat kerajaan Singhasari. Salah seorang keturunan penguasa Singhasari yaitu Wijaya, kemudian berusaha untuk dapat merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan raja Jayakatwang. Ia adalah anak Dyah Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka atau Narasinghamurti. Jadi, ia masih keturunan Ken Angrok dan Ken Dedes secara langsung.[94] Dari genealoginya Wijaya masih keponakan raja Kertanagara, bahkan ia diambil menantu oleh raja Kertanagara dan dikawinkan dengan

hlm. 143–151: "De bijzetting van Koning Kertanagara te Tumapel", OV, 1918, hlm. 113–115; "Aanteekeningen op de *Nagarakrtagama*, BKI, 80, 1924, hlm. 239, 277–279. J.L. Moens, "Het Berlijnsche Arddhanari-beeld en de bijzetting beelden van Kertanagara", TBG. 73, 1933, hlm. 123–150. W.F. Stutterheim, "En Bijzettingbeeld van Koning Krtanagara in Berlijn?", TBG, 72, 1932, hlm. 715–726; "Naschrift op Moens: Het Berlijnse Arddhanari-beeld", TBG, 73, 1933, hlm. 292–306; "De Leidse Bhairawa en Tjandi B van Singhasari", TBG, 74, 1934, hlm. 441–476, Jessy Blom, The Antiquities of Singhasari, 1939

[92] Nag, LV1: 1–2; LVII: 1–5

[93] A.J. Bernet Kempers, OV, 1938. hlm. 14–16. Stutterheim, OV, 1939, hlm. 15–16: OV, 1940, hlm. 25–26

[94] Lihat lampiran mengenai Genealogi *Rajasawangsa*

putrinya. Sumber kesusastraan, yaitu kitab *Pararaton* dan beberapa kitab *kidung*, menyebutkan ia kawin dengan dua orang putri raja, sedang sumber prasasti dan kakawin *Nagarakrtagama* menyebutkan ia kawin dengan empat orang putri raja Kertanagara.[95]Pada waktu pasukan Jayakatwang dari Kadiri menyerang Singhasari, Wijaya ditunjuk oleh raja Kertanagara untuk memimpin pasukan Singhasari melawan pasukan Kadiri yang datang dari sebelah utara. Kisah pertempuran antara pasukan Wijaya melawan pasukan Kadiri didapatkan dalam prasasti Kudadu,[96] satu di antara sejumlah kecil prasasti yang memberikan cerita sejarah yang panjang lebar dalam bagian samabandha-nya. Kisah itu terdapat pula di dalam kitab *Pararaton*, *kidung* Harsa-Wijaya, dan *kidung* Panji Wijayakrama dengan perbedaan dalam detail jika dibandingkan dengan keterangan di dalam prasasti Kudadu.

Prasasti Kudadu ini berangka tahun 1216 Saka (11 September 1294 M) dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawarddhana dalam rangka memperingati pemberian anugerah kepada pejabat desa (rama) di Kudadu berupa penetapan Desa Kudadu menjadi daerah swatantra. Dengan penetapan ini Desa Kudadu tidak lagi merupakan tanah ansa bagi Sang Hyang Dharmma di Kleme. Alasan pejabat Desa Kudadu itu mendapat anugerah raja ialah karena ia telah berjasa memberikan perlindungan dan bantuan bagi raja waktu beliau masih belum menjadi raja, dengan nama Nararyya Sanggramawijaya, pada waktu raja tersebut sampai di Desa Kudadu karena dikejar musuh. Baginda sampai mengalami kejadian demikian itu karena dahulu raja Kertanagara yang telah wafat di alam Siwa-Buddha diserang oleh raja Jayakatyeng[97] dari Gelang-Gelang, yang berlaku sebagai musuh, menjalankan hal yang amat tercela mengkhianati sahabat dan mengingkari janji, hendak membinasakan raja Kertanagara di Tumapel. Pada waktu pasukan Jayakatyeng terdengar sampai di Desa Jasun Wungkal, baginda dan Sang Arddharaja diperintahkan oleh raja Kertanagara menghadapi pasukan Jayakatyeng. Setelah baginda dan Sang Arddharaja berangkat dari Tumapel dan sampai di Desa Kedung

---

[95] Lihat prasasti Sukamrta lempeng Ila-dan IIb (R.Ng. Poerbatjaraka, "De oorkonde van Krtarajasa uit; 1296 A.D. (Penanggoengan)", INI, 1, 1940, hlm. 38); prasasti Balawi-A lempeng 2 dan 3 (Poerbatjaraka, "Vier oorkonden in koper", TBG, 76, 1936, hlm. 373–390). Lihat pula: Nag. XLV: 2 dan XLVI: 1 (Th. G. Th. Pigeaud, Java in the 14th Century, I, 1960, hlm. 34)

[96] Lihat di dalam: J.L.A. Brandes, *Pararaton*, 1920, hlm. 94–96; OJO, LXXXI. Lihat pula: Muh. Yamin, Tatanegara Madjapahit, I, hlm. 203–232

[97] Sebutan lain untuk Jayakatwang. Kitab *Pararaton* menyebutnya dengan nama Aji Katong. Sumber-sumber Cina juga menyebutnya dengan nama Aji Katong atau Haji Katang (lihat W.P. Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources, 1960)

Peluk, di situlah pertama kali pasukan baginda bertemu dengan musuh. Bertempurlah pasukan baginda, musuh dapat dikalahkan, dan melarikan diri dengan tidak terhitungkan banyaknya yang gugur. Majulah pasukan baginda ke Desa Lembah, tidak ada musuh yang dijumpai oleh pasukan baginda karena semuanya mundur tanpa memberikan perlawanan. Baginda maju melewati Batang, datang di Desa Kapulungan. Di situ bertemu dengan musuh, dan berperanglah pasukan baginda di sebelah barat Kapulungan. Musuh dapat dikalahkan dan melarikan diri dengan menderita banyak kerusakan. Pasukan baginda bergerak maju lagi dan sampai di Desa Rabut Carat. Tiada lama antaranya datanglah musuh dari sebelah barat, berperanglah baginda mengerahkan semua pasukannya, dan musuh melarikan diri lagi dengan kehilangan banyak orang. Kelihatannya musuh telah habis dan mengundurkan diri. Akan tetapi, pada waktu itu kelihatan panji-panji musuh berkibaran di sebelah timur Desa Haniru, merah dan putih warnanya.[98]

Melihat panji-panji itu bubarlah pasukan Sang Arddharaja, melakukan pengkhianatan, lari tanpa sebab menuju Kapulungan. Itulah permulaan rusaknya pasukan baginda. Sri baginda sangat taat kepada Sri Kertanagara, itulah sebabnya ia bertahan di Rabut Carat. Akhirnya ia harus mundur ke utara Desa Pamwatan Apajeg, di seberang utara sungai. Pasukan sri baginda pada waktu itu berkekuatan kira-kira enam ratus orang banyaknya. Keesokan harinya datanglah musuh mengejar sri baginda. Sri baginda berbalik menghadapi musuh. Akan tetapi, pasukan sri baginda makin sedikit, banyak yang menyelamatkan diri meninggalkan baginda. Takutlah sri baginda kalau-kalau sampai kehabisan anak buah, lalu berunding dengan para pengikutnya. Beliau bermaksud hendak pergi ke Terung, berbicara dengan a*kuwu* di Terung yang bernama Rakryan Wuru Agraja, yang diangkat sebagai a*kuwu* oleh raja Kertanagara, untuk diajak bersama baginda mengerahkan rakyat sebelah timur dan sebelah timur laut Terung. Bersukacitalah pengikut-pengikut baginda mendengar keputusan tersebut. Pada malam hari bergeraklah baginda hendak melalui Kulawan karena takut dikejar oleh musuh yang amat banyak jumlahnya. Setiba di Kulawan bertemu dengan musuh, maka dikejarlah baginda, lari ke utara hendak mengungsi ke Kembang Sri. Akan tetapi, setiba di Kembang Sri bersua musuh lagi dan dikejarlah baginda, lari

---

[98] Pada lempeng IV-verso prasasti Kudadu tertulis: "... ring samangkana, hana ta tunggulning satru layu-layu katon wetaning haniru, bang lawan putih warnnanya ..." Prof. Muh. Yamin menafsirkan panji-panji pasukan Kadiri itu berwarna merah-putih, seperti bendera kebangsaan kita sekarang (lihat: Muh. Yamin, 6000 tahun Sang Merah Putih, 1958 hlm. 194–197; Tatanegara Madjapahit, I, hlm. 221). Kami lebih cenderung kepada anggapan bahwa ada dua kelompok pasukan, yang sekelompok membawa panji-panji berwarna merah, dan kelompok lain yang membawa panji-panji berwarna putih. Yang terakhir itu menandakan bahwa pasukan itu ialah dari wargga apinghay, yaitu rakryan mapatih

ke utara menyeberangi sungai dengan segenap pasukannya yang masih tinggal, berenang dengan tergopoh-gopoh. Banyak anggota pasukan baginda yang mati tenggelam dalam penyeberangan itu, sebagian terkejar oleh musuh dan mati ditombak. Yang masih hidup lari bercerai-berai tidak tahu ke mana tujuannya. Tinggal dua belas orang saja yang melindungi baginda.

Waktu fajar baginda sampai di Desa Kudadu dalam keadaan lapar, lelah dan letih, sedih dan beriba hati, tiada harapan untuk hidup. Amat besarlah malapetaka dan kesedihan yang menimpa beliau. Akan tetapi, sesampai di depan pejabat Desa Kudadu beliau diterima dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat, terbukti dengan persembahannya berupa makanan, minuman, dan nasi. Lalu pejabat Desa Kudadu itu menyembunyikan baginda sehingga tidak ditemui oleh musuh. Akhirnya ditunjukkanlah jalan sampai batas daerah perdikan Rembang. Baginda bermaksud hendak mengungsi ke Madura.

Itulah kisah terdesaknya Wijaya sampai di Desa Kudadu seperti yang terdapat di dalam sambandha prasasti Kudadu. Prasasti lain yang juga menyinggung kisah pelarian Wijaya tetapi amat singkat, adalah prasasti Sukamrta yang berangka tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296 M).[99] Prasasti ini memperingati penetapan daerah Sukamr-ta kembali menjadi daerah swatantra atas permohonan Panji Patipati Pu Kapat, yang hendak menirukan perbuatan ayahnya yaitu Panji Patipati (sr.). Permohonan itu dikabulkan oleh raja Kertarajasa Jayawarddhana karena Panji Patipati pu Kapat telah memperlihatkan kesetiaan dan kebaktiannya yang luar biasa kepada raja, dengan ikut mengalami duka nestapa. Pada waktu raja Kertanagara meninggal beliau masih muda belia. Pada waktu itu beliau harus mengungsi, melarikan diri dari kejaran musuh, masuk hutan, naik gunung, menyeberangi sungai dan laut. Panji Patipati tidak berpisah dari sisi baginda, menjalankan segala perintah, di kala hujan membawa payung, di kala gelap membawa obor. Pada waktu baginda menyerang negeri penjahat yang telah mengkhianati raja Kertanagara, Panji Patipati ikut juga.

Di dalam prasasti Sukamrta itu disebutkan juga bahwa Wijaya menyeberangi lautan. Tentulah yang dimaksud di situ adalah kepergiannya ke Madura seperti disebutkan di dalam prasasti Kudadu. Di Madura ia diterima oleh Aryya Wiraraja, yang kemudian mengusahakan agar Wijaya dapat diterima menyerahkan diri kepada Jayakatwang di Kadiri. Wijaya

---

[99] Lihat: R.Ng. Poerbatjaraka, INI, 1, 1940, hlm. 33–49. Lihat pula: Muh. Yamin. Tatanegara Madjapahit, I, hlm. 233–251

akhirnya mendapat kepercayaan penuh dari raja Jayakatwang, sehingga pada waktu Wijaya minta daerah hutan Terik untuk dibuka menjadi desa, dengan dalih akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi musuh yang menyerang melalui Sungai Brantas, permintaan itu dikabulkan. Daerah Terik dibuka oleh Wijaya dengan bantuan dari Wiraraja, menjadi desa dengan nama Majapahit.[100] Di Majapahit yang baru dibuka itu Wijaya berusaha untuk mengambil hati penduduknya, terutama orang-orang yang datang dari Tumapel dan Daha.

Diam-diam Wijaya memperkuat diri sambil menunggu saat yang tepat untuk menyerang Kadiri. Di Madura adipati Wiraraja sudah bersiap-siap pula dengan orang-orangnya untuk datang membantu ke Majapahit. Bertepatan dengan selesainya persiapan-persiapan untuk mengadakan perlawanan terhadap raja Jayakatwang, pada awal tahun 1293 M datanglah bala tentara Kubhilai Khan[101] yang sebenarnya dikirimkan untuk menyerang Singhasari, menyambut tantangan raja Kertanagara yang telah menganiaya utusannya, Meng-Ch'i. Tentang peristiwa ini kita memperoleh sumber yang berasal dari catatan pemimpin armada tentara Mongol tersebut.[102] Catatan itu menyebutkan bahwa pada akhir tahun 1292 M Kaisar Shih-Tsu (Kubhilai Khan) memerintahkan tiga orang panglima perang, yaitu Shihpi, Ike Mese, dan Kau Hsing, untuk menghukum Jawa. Dengan armada angkatan laut yang besar mereka bertolak dari Ch'üan-chou. Dalam bulan pertama tahun 1293 M mereka telah sampai di Pulau Belitung. Di sana mereka itu merundingkan siasat yang akan dijalankan. Ike Mese berangkat terlebih dahulu untuk menundukkan raja-raja kecil di Jawa dengan jalan damai. Kedua orang panglima yang lain bertolak dengan induk pasukan ke Pulau Karimunjawa, dan dari sana ke Tuban (Tu-ping-tsu). Di Tuban semua pasukan bertemu lagi, lalu diaturlah siasat penyerbuan ke Daha. Shih-pi dengan seperdua pasukan pergi dengan kapal ke Sedayu (sugalu), dari sana ke muara Kali Mas (Pa-tsieh). Ike Mese dan Kau Hsing memimpin pasukan darat berkuda menyerbu ke pedalaman.

---

[100] Kisah berdirinya kerajaan Majapahit hanya terdapat di dalam kitab *Pararaton*, *kidung* Panji Wijayakrama, dan *kidung* Harsa Wijaya. Mengingat sifat penulisan kitab-kitab itu kita tidak dapat mengambil seluruh ceritanya, tetapi hanya sebagian garis besarnya. Nama Majapahit mungkin sekali berdasarkan kenyataan bahwa di hutan Terik yang dibuka itu banyak terdapat pohon maja yang pahit buahnya

[101] Di dalam sumber-sumber *Nagarakrtagama*, *Pararaton*, *kidung* Harsa Wijaya, dan Panji Wijayakrama, tentara Kubhilai Khan itu disebut tentara Tartar

[102] W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 20–34. Mengenai berita-berita Cina sebagai sumber sejarah Indonesia lihat: Tjan Tjoe Som, "Chinese Historical Sources" di dalam: Soedjatmoko dkk. (editor), *An Introduction to Indonesian Historiography*, 1965, hlm. 194–205

Kedatangan pasukan Cina itu terdengar oleh Wijaya. Kedatangannya itu merupakan suatu kesempatan yang baik sekali bagi Wijaya. Ia mengirimkan utusan kepada panglima pasukan Cina, membawa pesan bahwa ia bersedia tunduk di bawah kekuasaan kaisar, dan mau menggabungkan diri dengan pasukan Cina untuk menggempur Daha.[103] Penyerahan Wijaya itu diterima dengan senang hati oleh panglima pasukan Cina.

Pada permulaan bulan yang ketiga semua pasukan Cina sudah berkumpul di muara Kali Mas. Di situ ada angkatan laut Daha yang selalu siap menghadapi musuh dari luar. Pertempuran pun berkobarlah. Tentara Daha dapat dikalahkan, dan lari meninggalkan kapal-kapalnya. Lebih dari 100 buah kapal yang besar jatuh ke tangan pasukan Cina. Sebagian pasukan Cina diperintahkan untuk berjaga-jaga di muara Kali Mas, sedang sebagian yang lain menyerbu ke Daha. Akan tetapi, sebelum mereka dapat bertolak ke pedalaman, datanglah utusan dari Wijaya memberitahukan bahwa ia akan diserang oleh pasukan Daha, dan minta bantuan pasukan. Ike Mese diperintahkan untuk membantunya. Dengan pasukannya ia menuju Canggu, sedang Kau Hsing langsung pergi ke Majapahit. Pada tanggal 7 bulan ketiga pasukan Daha menyerbu Majapahit dari tiga jurusan, tetapi dapat dihalau oleh pasukan Cina. Pada tanggal 15 bulan ketiga barulah pasukan Cina itu menyerbu Daha. Sebagian pasukan naik perahu menghulu Kali Brantas. Ike Mese dengan sebagian pasukan lagi menyerbu dari arah timur, sedang Kau Hsing menyerbu dari arah barat. Wijaya dengan pasukannya mengikuti dari belakang pasukan Cina. Pada tanggal 19 mereka sampai di depan pintu gerbang kota Daha. Jayakatwang telah siap menghadapi musuh dengan pasukan yang terdiri lebih dari 100.000 orang.[104] Tentara Cina menyerbu dalam tiga gelombang. Pertempuran pun berkobarlah dengan dahsyatnya dari pukul enam pagi sampai pukul dua siang. Akhirnya pasukan Jayakatwang mundur masuk ke dalam kota dengan meninggalkan 5.000 orang yang gugur. Segera kota dikepung oleh pasukan Cina, dan sore harinya Jayakatwang keluar menyerahkan diri. Ia ditawan bersama dengan seratus orang anggota keluarga dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan.[105] Anak Jayakatwang yang dalam berita

---

[103] Menurut Kidung Harsa Wijaya, atas nasihat Wiraraja Wijaya bersikap menyerah kepada panglima tentara Tartar dan memberitahukan bahwa raja Kertanagara telah meninggal, penggantinya ialah Jayakatwang dari Kadiri

[104] W.P. Groeneveldt, op. cit., hlm. 26. Apakah jumlah ini tepat atau sekadar perkiraan saja tidak dapat dipastikan. Sejarah Dinasti Sung (960–1279) menyebutkan bahwa raja She-p'o mempunyai tentara sebanyak 30.000 orang (Groeneveldt, op. cit., hlm. 17)

[105] Menurut kitab *Pararaton* (Par.[2], hlm. 31) dan *kidung* Panji Wijayakrama (pupuh VII), raja Jayakatwang kemudian dibawa oleh panglima tentara Cina ke benteng pertahanan mereka di

Cina itu disebut Hsi-la-pati Hsi-la-tan-pu-ho[106] melarikan diri ke pegunungan, tetapi dapat dikejar dan ditangkap oleh Kau Hsing, dan dibawa ke Daha sebagai tawanan.

Setibanya Kau Hsing kembali di Daha ia tidak mendapatkan Wijaya di sana karena oleh Shih-pi dan Ike Mese Wijaya diperbolehkan kembali ke Majapahit untuk mempersiapkan upeti yang akan dipersembahkannya kepada kaisar. Ia dikawal oleh dua orang opsir dan 200 tentara Cina. Akan tetapi, dengan tipu muslihat, Wijaya berhasil membunuh kedua opsir Cina dan menyerang pengawal-pengawalnya itu di tengah jalan. Kemudian Wijaya dan pasukannya menyerang pasukan Cina yang ada di Daha dan Canggu. Meskipun pasukan Cina itu memberikan perlawanan yang kuat, lebih dari 3.000 orang dapat dibinasakan oleh pasukan Wijaya.

Sisa pasukan Cina kemudian terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa dengan banyak kehilangan anggota pasukannya yang gugur.[107] Demikianlah, dengan kedatangan tentara Kubhilai Khan tercapailah apa yang dicita-citakan oleh Wijaya, yaitu runtuhnya Daha.[108] Setelah Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol itu ke luar Jawa, maka Wijaya menobatkan dirinya menjadi raja Majapahit. Menurut *kidung* Harsa-Wijaya, penobatannya itu terjadi pada saat purnama bulan Karttika (ri purneng Karttikamasa).[109] Walaupun Kidung Harsa Wijaya tidak menyebutkan angka tahun penobatannya, angka tahun penobatan ini dapat diketahui berdasarkan kehadiran tentara Kubhilai Khan di Jawa, yaitu pada tahun 1293 M seperti disebutkan dalam berita Cina.[110] Tahun 1293 M ini bertepatan dengan tahun Saka 1215. Dengan demikian, saat penobatan Wijaya menjadi raja itu berlangsung pada tanggal 15 Karttika 1215 Saka, yang berdasarkan unsur-unsur pertanggalannya bertepatan dengan tanggal 10 November 1293 M.[111]

Hujung Galuh, dan ditawan di sana. Di dalam penjara raja Jayakatwang sempat menggubah sebuah kakawin yang diberi nama Wukir Polaman, dan sesudah itu ia meninggal

[106] Sulit untuk menemukan bentuk Jawa kuno dari nama ini dengan tepat. Dari sumber-sumber lain kita hanya mendapatkan seorang saja anak Jayakatwang, yaitu Arddharaja. Nama itu tidak dapat begitu saja kita anggap sama dengan Hsi-la-pa-ti Hsi-la-tan-pu-ho, karena secara fonetis sama sekali tidak ada persamaannya

[107] Tentara Khubilai Khan itu meninggalkan Pulau Jawa pada tanggal 31 Mei 1293 M (G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, 1968, hlm. 200)

[108] Bantuan tentara Cina itu disebutkan pula di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, Pupuh LXIV: 4

[109] C.C. Berg, "Een nieuwe redactie van de roman Raden Wijaya", BKI, 88, 1931, hlm. 22. Saat purnama itu adalah tanggal 15

[110] Seperti diketahui tentara Khubilai Kan datang di Jawa pada awal tahun 1293 M dan meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali lagi ke negerinya pada tanggal 31 Mei 1293 M (Groeneveldt 1960; Coedes 1968: 200)

[111] Lihat: Hasan Djafar, "Berdirinya Kerajaan Majapahit", makalah pada Simposium Peringatan 700 Tahun Majapahit. Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/

Kertarajasa didampingi oleh empat putri Kertanagara sebagai permaisurinya, yaitu Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendraduhita, Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajanaparamita, dan Sri Rajendradewi Dyah Dewi Gayatri.[112] Dengan parameswari Tribhuwana ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jayanagara.[113] Sebagai putra mahkota ia mendapat Kadiri (Daha) sebagai daerah lungguh-nya. Dengan Gayatri Wijaya memperoleh dua orang anak putri, yaitu yang sulung bernama Tribhuwanottungadewi Jayawisnu-warddhani yang menjadi raja di Jiwana (Bhre Kahuripan), dan yang bungsu bernama Rajadewi Maharajasa yang menjadi raja di Daha (Bhre Daha).[114]

Tidak lama setelah Kertarajasa dinobatkan sebagai raja Majapahit, kembalilah pasukan yang dahulu dikirim oleh raja Kertanagara ke Nusantara dengan membawa hasil yang gemilang. Banyak raja-raja di Nusantara yang tunduk dan memberi upeti. Raja Malayu mempersembahkan dua orang putri, Dara Petak dan Dara Jingga. Kitab *Pararaton* menyebutkan bahwa Dara Petak diperistri oleh Kertarajasa sendiri dan beranak Kalagemet. Dara Jingga dikawinkan dengan seorang 'dewa', beranak Tuhan Janaka yang bergelar Sri Marmadewa dan kemudian menjadi raja di Malayu dengan gelar abhiseka

---

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Trawas, Mojokerto, 3–5 Juli 1993. Lihat pula: R.H. Soekmono, Menapak Jejak Arkeologi Indonesia, 2002, hlm. 121

[112] Lihat catatan 95. Kitab *Pararaton* dan *kidung* hanya menyebutkan dua orang putri saja. Akan tetapi, dapat kiranya dipahami bahwa setelah Kadiri jatuh, maka semua putri-putri, termasuk putri-putri tawanan dari keraton Singhasari, diboyong ke Majapahit, dan semua putri-putri Kertanagara diperistri oleh Kertarajasa. Mungkin pula termasuk putri yang semula dikawinkan dengan Arddharaja. Berdasarkan keterangan di dalam prasasti Balawi yang menyatakan bahwa keempat putri Kertanagara itu merupakan prakrti dari Bangli, Malayu, Madhura, dan Tanjungpura, dianggap bahwa keempat putri itu hanya disebut sebagai lambang

[113] Keterangan ini terdapat di dalam prasasti Sukamrta dan prasasti Balawi. Keterangan di dalam kakawin *Nagarakrtagama* agak meragukan, sebab di situ dikatakan bahwa ibu Jayanagara ialah Sri Indreswari (Nag. XLVII: 2), nama yang lain daripada empat putri Kertanagara yang disebutkan sebagai permaisuri raja Kertarajasa (Nag., XLVI: 1). Oleh karena itu, ada juga yang menganut keterangan di dalam *Pararaton* yang mengatakan bahwa Jayanagara sama dengan Kalagemet, anak Kertarajasa dari perkawinannya dengan putri Malayu, Dara Petak. Dalam hal ini kami lebih percaya kepada keterangan dari kedua prasasti tersebut, mengingat pula kebiasaan pada raja-raja di Jawa zaman dahulu bahwa yang berhak menggantikan takhta kerajaan ialah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki atau anak perempuan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Sri Indreswari sama dengan Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani

[114] Nag., XLVIII: I. Sayang sekali keterangan di dalam kakawin *Nagarakrtagama* itu tidak dapat disesuaikan dengan keterangan dari prasasti Balawi, karena prasasti itu tidak lengkap. Lempengan kedua prasasti ini berakhir dengan keterangan bahwa baginda diiringi oleh putrinya dari ... (inking ntuwah sri maharaja deni saputrinira sangke ...). Nama putri itu dan ibunya terdapat pada lempengan ketiga yang hilang. Suatu hal yang menimbulkan tanda tanya adalah bahwa putri bungsu itu bergelar Bhre Daha, sedang Jayanagara juga ditahbiskan di Daha, yang berarti bahwa ia mempunyai Daha sebagai daerah lungguh-nya, dan tentunya juga bergelar Bhre Daha

Aji Mantrolot.[115] Pengikut-pengikut Kertarajasa yang setia dan berjasa dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit diberinya kesempatan untuk menikmati hasil perjuangannya dan diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan. Dari pengikut-pengikut Kertarajasa yang disebutkan dalam kitab *Pararaton* dan *kidung* ada beberapa yang kita jumpai kembali di dalam prasasti-prasasti, yaitu Wiraraja sebagai mantri mahawiradikara, Pu Tambi (Nambi) sebagai rakryan mapatih, dan Pu Sora sebagai rakryan apatih di Daha.[116] Jadi, Nambi telah memperoleh kedudukan yang tinggi dalam hierarki kerajaan Majapahit, sedang Sora menduduki tempat kedua.[117] Sumber lain mengatakan bahwa Wenang atau Lawe diangkat sebagai amanca nagara di Tuban dan adhipati di Datara.[118] Pemimpin pasukan ke Malayu dijadikan panglima perang dengan mendapat nama Kebo Anabrang. Akan tetapi, rupa-rupanya ada juga yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Ini merupakan sumber timbulnya pemberontakan dalam dua dasawarsa yang pertama dari sejarah kerajaan yang baru itu. Pertama Rangga Lawe yang menyatakan rasa tidak puasnya terhadap raja, mengapa bukan dia sendiri atau Sora yang dijadikan patih di Majapahit tetapi Nambi, padahal ia merasa lebih berjasa dan lebih gagah berani dan perwira daripada Nambi.[119] Oleh karena itu, ia pulang ke Tuban dan menghimpun kekuatan. Usaha Wiraraja, ayahnya, untuk menginsafkannya tidak berhasil. Muncullah kemudian tokoh yang merupakan biang keladi dari semua kerusuhan di Majapahit, yaitu Mahapati. Dialah yang mengadu pada raja bahwa Lawe mau memberontak. Pertempuran pun berkobarlah antara pasukan Rangga Lawe melawan pasukan raja. Peperangan ini terjadi pada tahun 1295 M.[120] Dalam pertempuran itu Lawe

---

[115] Par.[2], hlm. 31. Raja Malayu yang bergelar Aji Mantrolot itu oleh para ahli diidentifikasikan dengan Adityawarman. Di dalam *kidung* Harsa Wijaya disebutkan bahwa sebelum dikawinkan dengan seorang dewa, Dara Jingga diperistri oleh Kertarajasa juga. Akan tetapi, karena putri itu tidak senang tinggal di Majapahit dan selalu rindu akan tanah airnya, ia dikembalikan ke Malayu

[116] Wiraraja disebutkan di dalam prasasti Kudadu lempeng IIa, Pu Tambi (Nambi) dan Pu Sora disebutkan di dalam prasasti Sukamrta lempeng IIIa

[117] Perlu dicatat di sini bahwa Gajah Mada pun sebelum menjadi mapatih di Majapahit, terlebih dahulu menjadi mapatih di Kahuripan, kemudian di Daha

[118] Lihat: C.C. Berg, "Rangga Lawe, Middeljavaansche Historische Roman", Bibliotheca Javanica, 1, 1930

[119] Bahwa yang diangkat oleh Kertarajasa sebagai patih di Majapahit ialah Nambi, dan bukan orang lain, tentulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kitab-kitab penuntun yang ada, antara lain kitab Nawanatya, yang berisi uraian tentang pejabat-pejabat kerajaan, kewajiban mereka, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan tertentu (lihat: Th. G. Th. Pigeaud, Java in the 14th Century, I, 1960, hlm. 81–86; III, 1960, hlm. 119–128). Di dalam kitab itu antara lain dikatakan bahwa seorang patih amangkubhumi tidak hanya harus gagah berani dalam peperangan tetapi juga harus paham segala cabang ilmu pengetahuan, adil, bijaksana, pandai berdiplomasi, membina persahabatan, mementingkan kepentingan orang lain, tidak takut dikritik, dan lain sebagainya. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Rangga Lawe ialah seorang yang lekas naik darah dan kasar tabiatnya

[120] Mengenai angka tahun ini dan angka tahun yang lain tentang terjadinya pemberontakan-

gugur di tangan Kebo Anabrang tetapi kemudian Kebo Anabrang dibunuh dari belakang oleh Lembu Sora, karena ia tidak tahan melihat kematian sahabatnya dalam duka nestapa. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Mahapati untuk menyingkirkan Lembu Sora, dan menganjurkan agar Lembu Sora diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berat bagi raja untuk memberi hukuman kepada Sora, mengingat jasa-jasanya di masa lalu. Akan tetapi, dengan segala tipu muslihatnya Mahapati dapat memaksakan pertempuran antara pasukan Lembu Sora melawan pasukan raja dalam tahun 1298–1300 M.

Sora terbunuh bersama dengan pengikut-pengikutnya, Juru Demung dan Gajah Biru.[121] Setelah Sora mati terbunuh, Nambi yang akan dijadikan sasaran oleh Mahapati. Rupa-rupanya Mahapati sendiri menghendaki kedudukan sebagai patih amangkubhumi. Nambi mengetahui maksud jahatnya, dan karena ia tahu bahwa Mahapati sedang mendapat kepercayaan dari raja, ia merasa lebih baik menyingkir saja dari Majapahit. Kebetulan memang ada alasan, yaitu ayahnya (Wiraraja) sedang sakit. Ia minta izin kepada raja untuk menengok ayahnya di Lamajang.

Sementara itu, raja meninggal dalam tahun 1309 M.[122] Ia dicandikan di Antahpura dengan arca Jina, dan di Simping dengan arca Siwa. Simping dilokalisasikan di Sumberjati dekat Blitar. Di situ terdapat sebuah arca perwujudan yang menunjukkan laksana campuran antara Siwa dan Wisnu, yang diperkirakan arca perwujudan raja Kertarajasa.[123]

2. Jayanagara

Sepeninggal Kertarajasa pada tahun 1309 M, putranya Jayanagara dinobatkan menjadi raja. Di dalam salah satu prasastinya ia disebutkan dengan

---

pemberontakan itu lihat C.C. Berg, "De geschiedenis van pril Majapahit", Indonesië; IV, 1950–1951, hlm. 481–520; "Opmerkingen over de chronologie van de oudste geschiedenis van Majapahit en over Krtarajasajayawarddhana's regering", BKI, 97, 1938, hlm. 135 dst

[121] Tentang pemberontakan Lembu Sora itu ada sebuah kitab yang menceritakannya dengan terperinci, yaitu Kidung Sorandaka (lihat: E.J. van den Berg, "De val van Sora", VKI, 2, 1939). Di dalam kitab *Pararaton* disebutkan bahwa Juru Demung dan Gajah Biru memberontak tersendiri, Juru Demung dalam tahun 1302 M, tetapi baru terbunuh dalam tahun 1313 M, dan Gajah Biru dalam tahun 1314 M

[122] Nag., XLVII: 3. Kitab *Pararaton* memberikan angka tahun yang berlainan, yaitu 1335 (Par.[2], hlm. 32). Akan tetapi, Poerbatjaraka telah menunjukkan kepada kita bahwa kita harus lebih percaya kepada keterangan di dalam kakawin *Nagarakrtagama* (Poerbatjaraka, "De dood van Raden Wijaya", TBG, LV1, 1914, hlm. 143–148)

[123] F.D.K. Bosch, "Het heiligdom te Simping", OV, 1916, hlm. 51–55; W.F. Stutterheim, "De dateering van eenige Oostjavaansche beeldengroepen", TBG, LXXVI, 1936, hlm. 429–320

Foto 8.6 Arca Harihara, Sumberjati, Jawa Timur, diduga arca pendharmaan raja Kertarajasa, koleksi Museum Nasional *(Sumber: Puslitbang Arkenas)*

nama gelar abhisekanya Sri Sundarapandyadewadhiswarana-Maharajabhiseka Wikramottunggadewa.[124] Pada waktu ayahnya masih memerintah, yakni pada tahun 1296 M, sebagai seorang putra mahkota Jayanagara telah berkedudukan pula sebagai *kumararaja*.[125]

Pada masa pemerintahannya ia dirongrong oleh serentetan pemberontakan yang merupakan kelanjutan dari pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan ayahnya. Seperti telah diketahui semua kerusuhan itu disebabkan oleh fitnah Mahapati. Setelah Mahapati berhasil menyingkirkan Rangga Lawe dan Lembu Sora kini ia melanjutkan usahanya untuk menyingkirkan Nambi, yang setelah ayahnya meninggal dalam tahun 1311 tidak mau kembali lagi ke Majapahit, dan bahkan membuat perbentengan di Pajarakan. Pada tahun 1316 Pajarakan diserbu, kotanya diduduki, dan Nambi dengan segenap keluarganya dibunuh.[126] Kemudian menyusul pemberontakan Semi pada tahun 1318 M dan pemberontakan Kuti pada tahun 1135 M. Semi dan Kuti adalah dua orang dari tujuh dharmmaputra[127] di kerajaan Majapahit. Mereka itu juga binasa karena fitnah Mahapati. Setelah terjadi dua peristiwa ini rupa-rupanya raja baru sadar akan kekeliruannya untuk mempercayai Mahapati, dan insaflah baginda bahwa Mahapati berhati jahat dan tukang fitnah. Ia ditangkap dan dibunuh.[128]

Dalam pemberontakan Kuti muncul seorang tokoh yang kemudian akan memegang peran penting dalam sejarah Majapahit, yaitu Gajah Mada. Pada waktu itu ia berkedudukan sebagai seorang anggota pasukan pengawal raja (bekel bhayangkari). Berkat siasat Gajah Mada dalam peristiwa di Badander[129] raja dapat diselamatkan dan Kuti dapat dibunuh. Sebagai anugerah raja, Gajah Mada setelah amukti palapa selama dua bulan, diangkat menjadi patih di

---

[124] Lihat prasasti Tuhanaru (OJO LXXXIII); H.B. Sarkar, JGIS, V, 1935, hlm. 133–141; Muh. Yamin, Tatanegara Madjapahit, 11, hlm. 43–59

[125] R.Ng. Poerbatjaraka, "Oorkonde van Krtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan)", INI, 1940, hlm. 38

[126] Nag., XLVIII: 2; Par.², hlm 32–33; N.J. Krom, HJG², hlm. 357

[127] Mereka ini dahulunya adalah pejabat-pejabat yang diberi anugerah raja (*pangalasan* wineh suka), banyaknya tujuh orang, yakni Semi, Kuti, Pangsa, Wedeng, Yuyu, Tanca, dan Banak

[128] Par.², hlm. 33. Di dalam kitab *Pararaton* disebutkan bahwa Mahapati dibunuh cineleng-celeng, yang mungkin dapat diartikan sebagai "dibunuh seperti orang membunuh babi hutan"

[129] Mengenai peristiwa Badander ini *Pararaton* menceritakan sebagai berikut. Ketika ra Kuti belum mati, raja akan pergi sendiri ke Badander. Ia pergi pada waktu malam, tidak ada orang yang tahu, hanya orang-orang bhayangkari mengiringkannya. Semua yang mendapat giliran menjaga pada waktu raja pergi itu banyaknya lima belas orang. Pada waktu itu Gajah Mada menjadi kepala bhayangkari dan kebetulan juga sedang menerima giliran menjaga, itulah sebabnya ia mengiring raja pada waktu raja pergi dengan menyamar itu. Lamalah

Kahuripan, dan kemudian dinaikkan pangkatnya menjadi patih di Daha.[130]

Pada masa pemerintahan Jayanagara hubungan dengan Cina rupa-rupanya telah pulih kembali. Utusan dari Jawa datang setiap tahun dari tahun 1325 M sampai tahun 1328 M.

Utusan yang datang dalam tahun 1325 M dipimpin oleh Seng-chia-liyeh. Mungkin ia dapat diidentifikasikan dengan Seng-ch'ia-lieh-yu-lan, yang terdapat dalam berita Cina sebagai raja di Sumatra. Raja Jawa pada waktu itu disebutkan dengan nama Cha-ya-na-ko-nai, yang merupakan ucapan Cina dari nama Jayanagara.[131]

Dalam tahun 1331 M Odorico di Pordenone mengunjungi Jawa. Ia menceritakan bahwa raja Jawa mempunyai tujuh orang raja takluk. lstananya penuh dengan perhiasan emas, perak dan permata. Khan yang Agung dari Cathay sering bermusuhan dengan raja Jawa, tetapi selalu dapat dikalahkan oleh raja Jawa. Pulau Jawa amat padat penduduknya, dan menghasilkan rempah-rempah.[132]

Dari masa pemerintahan raja Jayanagara kita hanya mengenal tiga buah prasasti yang dikeluarkan olehnya, yaitu prasasti Tuhanaru, prasasti Balambangan, dan prasasti Balitar I. Prasasti Tuhanaru yang berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323 M) berisi penetapan kembali Desa Tuhanaru dan Kusambyan sebagai daerah swatantra atas permohonan Dyah Makaradhwaja. Permohonan itu dikabulkan oleh raja karena Dyah Makaradhwaja telah menunjukkan kesetiaan dan kebaktiannya kepada raja, mempertaruhkan

---

raja tinggal di Badander. Adalah seorang *pangalasan*, ia memohon izin akan pulang ke rumahnya, tetapi ia tidak diizinkan oleh Gajah Mada, karena jumlah pengiring hanya sedikit. Ia memaksa pulang, lalu ditusuk oleh Gajah Mada, karena kalau-kalau ia nanti memberi tahu bahwa raja bertempat tinggal di rumah kepala desa Badander, sehingga ra Kuti dapat mengetahui. (lihat: *Pararaton*[2], hlm. 33–34)

[130] *Pararaton* menyebutkan bahwa Gajah Mada hanya dua tahun menjadi patih di Kahuripan, kemudian diangkat menjadi patih di Daha. Jadi, menurut *Pararaton* ia menjadi patih di Daha pada tahun 1321 M (Par.[2], hlm. 34). Berita *Pararaton* ini bertentangan dengan pemberitaan yang terdapat di dalam prasasti Tuhanaru tahun 1323 M, yang menyebutkan Dyah Puruseswara sebagai patih di Daha, Dyah Halayuddha sebagai patih di Majapahit, pu Dedes sebagai patih di Kapulungan, dan pu Tanu sebagai patih di Matahun. Dalam prasasti ini disebutkan juga pu Tada(h) aryya rajadhikara. Di dalam kitab *Pararaton* Arya Tadah disebutkan sebagai patih hamangkubhumi di Majapahit (lihat.: N.J. Krom, "Tadah en Gajah Mada", TBG, LVI, 1914, hlm. 252–256). Gajah Mada sebagai patih di Daha baru kita jumpai dalam prasasti Palungan tahun 1330 M (Krom, HJG[2], hlm. 378), dan di dalam prasasti Batur yang angka tahunnya tidak terbaca lagi (OV, 1915, hlm. 144)

[131] W.W. Rockhill, "Notes on the relations and trade of China", T'oung Pao, XV, 1914, hlm. 446–447

[132] H. Yule dan H. Cordier, Cathay and the way thither, II, hlm. 151–155

jiwanya demi teguhnya kedudukan raja di atas singgasana mememerintah seluruh mandala Pulau Jawa. Karena kesetiaannya itu Dyah Makaradhwaja dianggap sebagai anak oleh raja.[133] Prasasti yang kedua, yang hanya tinggal satu lempeng, memperingati penetapan daerah Balambangan sebagai daerah perdikan, karena para rama daerah Balambangan telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja dan membantu tegaknya kedudukan raja di atas singgasana, menghancurkan kejahatan di dunia, dan menghapuskan zaman Kaliyuga.[134] Prasasti ini dikeluarkan sehubungan dengan selesainya penumpasan pemberontakan Nambi.

Prasasti yang ketiga dipahatkan pada batu, dan ditemukan di daerah Blitar. Prasasti ini sudah sangat usang sehingga sulit dibaca. Angka tahunnya adalah 1246 Saka (5 Agustus 1324 M) dan menyebut gelar abhiseka Jayanagara sebagai Sri Sundarapandyadewa nama Maharabhiseka Sri Wisnuwangsa ....[135]

Pada tahun 1328 raja Jayanagara meninggal dibunuh Tanca, seorang dharmmaputra yang bertindak sebagai tabib. Peristiwa pembunuhan raja Jayanagara ini di dalam kitab *Pararaton* disebut patanca.[136] Raja Jayanagara dicandikan di dalam pura, di Sila Petak dan di Bubat, ketiganya dengan arca Wisnu, dan di Sukhalila dengan arca Amoghasiddhi.[137]

---

[133] Di dalam prasasti itu disebutkan "an tuhu tuhu kuladipa kaanggeh dyah makaradhwaja putra de sri maharaja". Maksud dari kalimat ini tidaklah jelas. Sumber-sumber yang ada memang tidak menyebutkan anak Jayanagara, dan seperti yang akan kita lihat, sepeninggal Jayanagara maka adik perempuannya yang menggantikan di atas takhta kerajaan. Hal itu tidaklah mungkin akan terjadi apabila Jayanagara mempunyai anak dari permaisuri

[134] Poerbatjaraka, "Vier oorkonden in koper", TBG, LXXVI, 1936, hlm. 388–389; Muh. Yamin, Tatanegara Madjapahit, II, hlm. 37–40

[135] OJO, LXXXII, L-C. Damais, "EEI IV", BEFEO, XLVII (1), 1955, hlm. 109–110

[136] Di dalam *Pararaton* diceritakan agak panjang lebar tentang kematian raja Jayanagara, yaitu bahwa raja dibunuh oleh Tanca, yang istrinya telah digauli oleh raja. Kebetulan raja sedang sakit bisul (bubuh), dan minta dioperasi oleh Tanca. Mula-mula Tanca memotong bisul itu, tetapi tidak mempan. Kemudian raja dipersilakan menanggalkan 'azimat' (kemitan) yang dipakainya, dipotong mempan, tetapi lalu ditusuk oleh Tanca hingga meninggal di tempat tidur. Lalu Tanca dibunuh oleh Gajah Mada

[137] Nag., XLVIII: 3. Kitab *Pararaton* menyebutkan raja Jayanagara didharmakan di Kapopongan di candi Srnggapura, dan diarcakan di Antawulan

3. Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani

Raja Jayanagara tidak berputra. Sepeninggalnya pada tahun 1328 M ia digantikan oleh adik perempuannya, yaitu Bhre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan nama gelar abhiseka Tribhuwano-ttunggadewi Jayawisnuwarddhani.[138] Ia kawin dengan Cakradhara atau Cakreswara, yang menjadi raja di Singhasari (Bhre Singhasari) dengan gelar Kertawarddhana.[139]

Adik Tribhuwana yang menjadi Bhre Daha dengan nama Rajadewi Maharajasa, kawin dengan Kudamerta yang menjadi Bhre Wengker dengan nama Wijayarajasa.Dari kakawin *Nagarakrtagama*, kita mengetahui bahwa dalam masa pemerintahan Tribhuwana telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331 M. Pemberontakan itu dapat dipadamkan oleh Gajah Mada.[140] Sesudah peristiwa Sadeng itu, kitab *Pararaton* menyebutkan sebuah peristiwa yang kemudian amat terkenal dalam sejarah, yaitu sumpah palapa Gajah Mada. Gajah Mada bersumpah di hadapan raja dan para pembesar Majapahit, bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum ia dapat menundukkan

---

[138] Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena raja Jayanagara tidak mempunyai keturunan, takhta kerajaan jatuh di tangan anak Kertanagara yang masih hidup, yaitu bekas permaisuri Kertarajasa, Maharajapatni Gayatri. Akan tetapi, karena Gayatri telah menjadi bhiksuni, pemerintahan dipegang oleh anaknya yang tertua, yaituTribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani, yang memerintah atas namanya (makamangalya). Karena itu pula setelah Gayatri meninggal dalam tahun 1350 M, Tribhuwana menyerahkan pemerintahan kepada anak laki-lakinya yang telah dewasa, yaitu Hayam Wuruk (Krom, HJG2, hlm. 383–384; G. Coedès, The Indianized States of Southeast Asia, hlm. 234). Jalan pikiran yang demikian itu tidak sesuai dengan ketentuan tentang hak suksesi yang menetapkan anak-anak dari permaisuri, baik laki-laki maupun perempuan, yang berhak untuk menggantikan duduk di atas takhta kerajaan. Dalam hal ini sebenarnya hak Tribhuwana sama dengan hak Jayanagara. Memang Jayanagara yang pertama-tama berhak karena ia anak dari permaisuri yang tua. Sesudah Jayanagara adik-adiknya yang berhak mewarisi takhta kerajaan apabila ia sendiri tidak mempunyai anak. Tentang penggunaan kata *makamangalya* dalam prasasti Tribhuwana, dapat dikemukakan di sini bahwa seperti telah disebutkan di atas, kata itu dipakai juga dalam prasasti Krtanagara pada waktu ayahnya masih hidup, dan juga dalam prasasti Hayam Wuruk. Kenyataan bahwa Hayam Wuruk juga memakai kata *makamangalya* di dalam prasastinya jelas tidak sesuai dengan jalan pikiran Krom dan Coedes, itu berarti bahwa sesudah Gayatri meninggal yang berhak duduk di atas takhta kerajaan Majapahit ialah Tribhuwana, yang karena sesuatu hal, mungkin karena telah menjadi bhiksuni pula, tidak dapat menjalankan pemerintahan sendiri. Akan tetapi, tidak ada sumber yang dapat memberikan keterangan mengapa bhiksuni tidak memerintah terus setelah tahun 1350 M

[139] Dari prasasti Trawulan I (Canggu) yang berangka tahun 1280 Saka (7 Juli 1358 M) dapat diketahui bahwa Krtawarddhana adalah keturunan raja Wisnuwarddhana dari Singhasari. Lihat prasasti Trawulan I lempeng 1-verso, di dalam OV, 1918, hlm. 108

[140] Nag., XLIX: 3. Kitab *Pararaton* memberikan versi yang panjang lebar tentang peristiwa Sadeng itu. Arya Tadah, patih amangkubhumi di Majapahit jatuh sakit. Ia minta kepada Gajah Mada supaya mau dicalonkan sebagai patih amangkubhumi. Gajah Mada tidak mau sebelum ia kembali dari Sadeng dengan berhasil menumpas pemberontakan. Berangkatlah ia ke Sadeng, tetapi ia telah kedahuluan oleh Kembar yang telah mendahului perintah. Ia

Nusantara, yaitu Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik.[141] Peristiwa yang lain adalah penaklukan Bali dalam tahun 1343 M. Raja Bali yang berkelakuan jahat dan berbudi rendah dapat dibunuh beserta segenap keluarganya.[142]

Mungkin sekali raja Bali tersebut ialah Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang dikenal dari prasasti Langgaran (Langgahan) tahun 1338 M.[143] Berita Cina yang berasal dari seorang pedagang bernama Wang Ta-yüan, mencatat hal-hal yang menarik perhatian dalam perjalanannya. Catatan-catatan itu dihimpun dalam bukunya Tao-i chih-lüeh. Menurut W.W. Rockhill, buku tersebut ditulis sekitar tahun 1349 M.[144] Diceritakan bahwa She-po (Jawa) sangat padat penduduknya, tanahnya subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakaktua, yang semuanya merupakan barang ekspor utama. Banyak terdapat bangunan yang indah di She-p'o. Dari luar, She-p'o mendatangkan mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uang dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Banyak daerah yang mengakui kedaulatan She-p'o, antara lain, beberapa daerah di Semenanjung Tanah Melayu, Sumatra, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, dan beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

---

memerintahkan para mantri untuk menundukkan Kembar, tetapi ia tetap membangkang. Akhirnya pemberontakan itu dapat dipadamkan setelah baginda sendiri turun tangan, dan akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi patih amangkubhumi (Par.[2], hlm. 35–36)

141 Par.[2], hlm. 36. Apakah peristiwa itu benar-benar historis tidak dapat dipastikan. Hanya perlu dicatat bahwa kata palapa yang telah menimbulkan pelbagai tafsiran itu dapat berarti 'apa yang dapat diambil', 'hasil' atau 'anugerah raja'. Jadi, ia tidak mau menerima anugerah raja setelah peristiwa Sadeng. Ini tidak benar karena ada keterangan di dalam *Pararaton* bahwa Gajah Mada kemudian menjadi hangabehi setelah peristiwa Sadeng, yang mungkin harus dipandang sebagai anugerah raja. Juga di bagian lain dari *Pararaton* disebutkan bahwa setelah peristiwa Kuti, Gajah Mada amukti palapa selama dua bulan, lalu diangkat menjadi patih di Kahuripan

142 Nag., XLIX: 4. Uraian mengenai penaklukan Bali itu disebutkan pula di dalam naskah lontar Raja Purana (kidung Pasunggrigis), yang tersimpan di Gedung Kirtya, Singaraja (naskah lontar no. 827). Saduran dari isi naskah ini telah diterbitkan oleh I Ktut Ginarsa ("Ekspedisi Gajah Mada ke Bali", MISI, VII (1), 1977, hlm. 27–65)

143 Prasasti ini belum diterbitkan. Transkripsi enam baris permulaannya terdapat dalam: L-C. Damais, "Etudes d'Épigraphie Indonésienne: IV. Discussion de la date des inscription", BEFEO, XLVII, 1955, hlm. 99

144 W.W. Rockhill, "Notes on the relations and trade of China", T'oung-Pao, XVI, 1915, hlm. 61–159

Dalam tahun 1334 M lahirlah putra mahkota yang bernama Hayam Wuruk. Kelahirannya disertai alamat gempa bumi, hujan abu, guntur, dan kilat bersabungan di udara sebagai akibat meletusnya Gunung Kampud.[145]Tribhuwana memerintah selama dua puluh dua tahun. Pada tahun 1350 M ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Dari kitab *Pararaton* dan kakawin *Nagarakrtagama* kita mengetahui bahwa pada tahun 1362 Tribhuwana memerintahkan penyelenggaraan upacara sraddha untuk memperingati dua belas tahun wafatnya Rajapatni, Dyah Dewi Tribhuwaneswari.

Pada tahun 1372 M Tribhuwana meninggal, dan didharmakan di Panggih. Pendharmaannya bernama Pantarapurwa.[146]

4. Hayam Wuruk: Puncak Kebesaran Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1350 M putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit. Ia bergelar Sri Rajasanagara, dan dikenal pula dengan nama Bhra Hyang Wekasing Sukha. Ketika ibunya, Tribhuwanottunggadewi, masih memerintah, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi raja muda (rajakumara) dan mendapat daerah Jiwana sebagai daerah lungguh-nya.[147] Dalam menjalankan pemerintahannya Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan Patih Hamangkubhumi. Jabatan ini sebenarnya sudah diperolehnya ketika ia mengabdi kepada raja Tribhuwanottunggadewi, yaitu setelah ia berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng.

Dengan bantuan patih hamangkubhumi Gajah Mada raja Hayam Wuruk berhasil membawa kerajaan Majapahit ke puncak kebesarannya. Seperti halnya raja Kertanagara yang mempunyai gagasan politik perluasan cakrawala mandala yang meliputi seluruh dwipantara, Gajah Mada ingin melaksanakan pula gagasan politik nusantara yang telah dicetuskan sebagai sumpah palapa di hadapan raja Tribhuwanottunggadewi dan para pembesar kerajaan Majapahit. Dalam rangka menjalankan politik nusantaranya itu satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di bawah panji kekuasaan Majapahit ditundukkan dan dipersatukannya. Dari pemberitaan Prapanca di dalam kakawin *Nagarakrtagama* kita mengetahui bahwa daerah-daerah yang ada di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit itu sangat luas. Daerah-daerah

---

[145] Nag., 1: 4–5

[146] Sebuah batu candi berangka tahun 1372 M telah ditemukan di reruntuhan sebuah candi di Panggih (Krom, IHJK^2, II, hlm. 234–236; HJG^2, hlm. 422). Barangkali reruntuhan candi tersebut dapat dihubungkan dengan tempat pendarmaan Tribhuwanottunggadewi yang bernama Pantarapurwa

[147] OJO, LXXXIV

ini meliputi hampir seluas wilayah Indonesia sekarang, meliputi daerah-daerah di Sumatra di bagian barat sampai ke daerah-daerah Maluku dan Irian di bagian timur; bahkan pengaruh itu telah diluaskan pula sampai ke beberapa negara tetangga di wilayah Asia Tenggara.[148] Agaknya politik Nusantara ini berakhir sampai tahun 1357 M, dengan terjadinya peristiwa di Bubat (pasunda-bubat), yaitu perang antara orang Sunda dan Majapahit.[149]

Pada waktu itu raja Hayam Wuruk bermaksud hendak mengambil putri Sunda, Dyah Pitaloka, sebagai permaisurinya. Setelah putri tersebut dan ayahnya bersama-sama para pembesar dan pengiringnya sampai di Majapahit, terjadilah perselisihan. Gajah Mada tidak menghendaki perkawinan Raja Hayam Wuruk dengan putri Sunda itu dilangsungkan dengan begitu saja, ia menghendaki agar putri itu dipersembahkan oleh raja Sunda kepada Raja Majapahit sebagai tanda pengakuan tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Para pembesar Sunda tidak setuju dengan sikap Gajah Mada tersebut. Akhirnya, tempat kediaman orang-orang Sunda dikepung dan diserbu oleh tentara Majapahit. Terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua orang Sunda gugur, tidak ada yang ketinggalan. Peristiwa ini dikemukakan dengan panjang lebar di dalam kitab *Pararaton* dan *kidung* Sundayana,[150] tetapi tidak dikemukakan di dalam kakawin *Nagarakrtagama*. Agaknya hal ini memang disengaja oleh Prapanca, karena peristiwa tersebut tidak menunjang kepada kebesaran kerajaan Majapahit, dan bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politik Gajah Mada untuk menundukkan Sunda.

Dari kitab *Pararaton* kita mengetahui bahwa setelah peristiwa Bubat berakhir kemudian Gajah Mada mukti palapa, mengundurkan diri dari jabatannya.[151] Beberapa waktu kemudian ia aktif kembali dalam pemerintahan, tetapi kita tidak mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program politik Nusantara sesudah peristiwa Bubat. Di dalam kakawin *Nagarakrtagama*

---

148 Uraian mengenai daerah-daerah ini terdapat di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, pupuh XIII–XV

149 Kitab *Pararaton* masih menyebutkan pula adanya ekspedisi ke Dompo (padompo) dalam tahun 1357 M, yang bersamaan dengan terjadinya peristiwa di Bubat (Par.^{2}, hlm. 37). Berdasarkan keterangan di dalam *Nagarakrtagama*, penundukan Dompo ini dipimpin oleh Pu Nala (Nag., LXXII: 2–3)

150 Lihat: Par.^{2}, hlm. 36–37; C.C. Berg, Kidung Sundayana, 1928. Lihat pula: C.C. Berg "Kidung Sunda", BKI, 83, 1927. hlm. 1–161. Peristiwa Bubat disinggung pula sedikit di dalam Carita Parahyangan. Kitab ini antara lain menyebutkan: "... orang berperang di Majapahit ..." ("... Pan prang-rang di Majapahit ... "). Lihat: Atja, Tjarita Parahijangan, 1968, hlm. 31 dan 55

151 Kitab *Pararaton* memberikan keterangan kepada kita bahwa setelah peristiwa Bubat berakhir Gajah Mada kemudian 'mukti palapa' (samangka sira Gajah mada mukti palapa). Mukti palapa di sini dapat diartikan dengan 'menikmati istirahat'

disebutkan bahwa raja Hayam Wuruk pernah menganugerahkan sebuah sima kepada Gajah Mada, yang kemudian diberi nama dharmma kasogatan Madakaripura.[152] Di tempat inilah agaknya Gajah Mada menetap, selama ia mukti palapa.[153]Berhubung dengan meninggalnya putri Sunda dalam peristiwa di Bubat, kemudian raja Hayam Wuruk kawin dengan Paduka Sori, anak Bhre Wengker Wijayarajasa dari perkawinannya dengan Bhre Daha Rajadewi Maharajasa bibi Hayam Wuruk. Masa pemerintahan raja Hayam Wuruk tampak menampilkan usahanya untuk meningkatkan kemakmuran bagi rakyatnya. Pelbagai kegiatan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan sangat diperhatikan. Hasil pemungutan pelbagai macam pajak dan upeti dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi seluruh kerajaan dalam berbagai bidang. Kakawin *Nagarakrtagama* dan beberapa buah prasasti yang berasal dari masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, memberikan keterangan tentang hal itu.[154] Untuk keperluan peningkatan kesejahteraan di bidang pertanian, raja telah memerintahkan pembuatan bendungan-bendungan, dan saluran-saluran pengairan, serta pembukaan tanah-tanah baru untuk perladangan. Di beberapa tempat sepanjang sungai-sungai besar diadakan tempat-tempat penyeberangan, yang sangat memudahkan lalu lintas antardaerah.

Raja Hayam Wuruk sangat memerhatikan pula keadaan daerah-daerah kerajaan. Beberapa kali ia mengadakan perjalanan kenegaraan meninjau daerah-daerah wilayah Majapahit, disertai para pembesar kerajaan.[155] Kakawin *Nagarakrtagama* mencatat perjalanan raja Hayam Wuruk ke Pajang pada tahun 1351 M, ke daerah Lasem pada tahun 1354 M dan ke daerah pantai selatan (Lodaya) pada tahun 1357 M. Kemudian ia mengadakan perjalanan menuju daerah Lamajang pada tahun 1359 M, dan daerah Tirib dan Sempur pada tahun berikutnya. Daerah Balitar dikunjunginya pada tahun 1361 M, dan pada tahun 1363 M raja Hayam Wuruk mengunjungi Simping sambil meresmikan sebuah candi yang baru selesai dipindahkan.

---
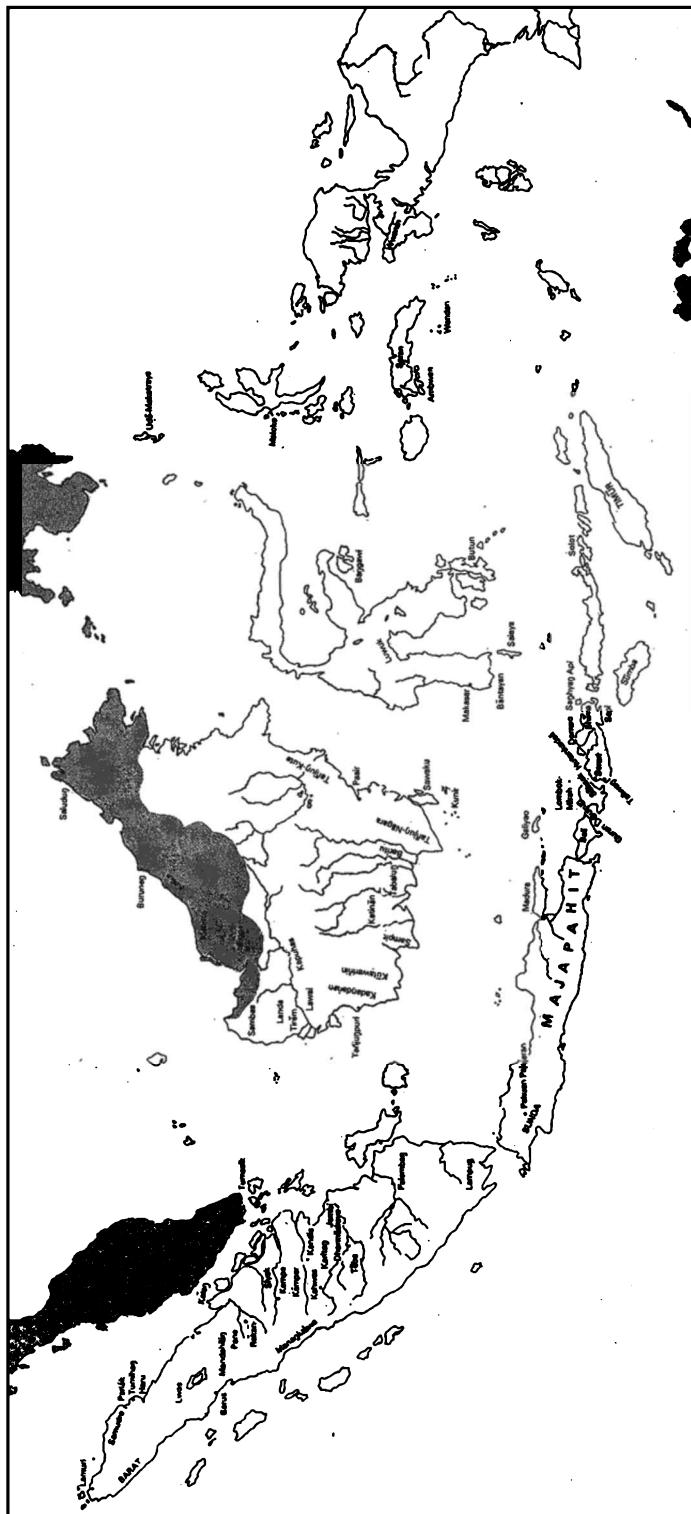
[152] Nag., XIX: 2. Pada waktu raja Hayam Wuruk mengadakan perjalanan ke Lamajang, ia singgah di *sima dharmma kasogatan* Madakaripura dan menempati pesanggrahannya. Sima Madakaripura ini agaknya kemudian berkembang menjadi desa sima yang cukup besar pada abad XVI. Penulis Italia Antonio Pigafetta yang mengikuti pelayaran Magelhãens dengan kapal Victoria, pada awal tahun 1522 M berlabuh di Timor dan mendengar mengenai kota-kota di Jawa, di antaranya Gagiamada. Lihat: J.A. Robertson, Magellan's Voyage around the World by Antonio Pigafetta, II, 1909, hlm. 167, 169. Lihat pula: H.J. de Graaf, "Tomé Pires' "Suma Oriental" en het tijdperk van godsdienstovergang op Java", BKI, 108, 1952, hlm. 146

[153] Slametmuljana, *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*, 1979, hlm. 139

[154] Lebih Ianjut lihat uraian mengenai kehidupan masyarakat

[155] Nag., XVII–XXXVIIL LXI–LXII

Peta 8.1 Nusantara pada masa Majapahit

Peristiwa penting lainnya yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk adalah penyelenggaraan pesta dalam rangka upacara sraddha agung untuk memperingati dua belas tahun meninggalnya Rajapatni. Upacara sraddha tersebut diselenggarakan dengan meriah dan khidmat dalam bulan Badrapada tahun 1362 M, atas perintah ibunda raja Tribhuwanottunggadewi.[156]

Sekembalinya raja Hayam Wuruk dari perjalanan ke Simping, ia mendengar Gajah Mada sakit. Tidak lama setelah itu, dalam tahun 1364 M, patih hamangkubhumi Gajah Mada meninggal, setelah lebih dari tiga puluh tahun mengabdikan dirinya untuk kebesaran dan kejayaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk dan seluruh kerajaan Majapahit sangat berdukacita. Meninggalnya Gajah Mada merupakan suatu kehilangan yang sangat besar bagi Majapahit. Raja Hayam Wuruk kemudian mengundang Pahöm Narendra,[157] yang merupakan dewan pertimbangan raja, untuk merundingkan masalah penggantian Gajah Mada. Usaha untuk mengganti Gajah Mada telah dicoba, tetapi tidak berhasil. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kedudukan dan peran Gajah Mada. Akhirnya raja memutuskan Patih Gajah Mada tidak akan diganti dan untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga Raja Hayam Wuruk mengangkat aryyatmaraja pu Tanding menjadi wrddhamatri, sang aryya wira mandalika pu Nala diangkat menjadi mancanagara, dan Patih Dami diangkat menjadi yuwamantri.[158]

Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk tanpa patih hamangkubhumi ini hanya berlangsung selama tiga tahun. Di dalam kitab *Pararaton* disebutkan bahwa setelah tiga tahun terdapat kekosongan tidak ada Patih Hamangkubhumi,

---

[156] Nag., LXIII–LXIX. Uraian mengenai upacara sraddha Rajapatni ini selain diperoleh dengan panjang lebar di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, diuraikan pula di dalam sebuah karya pujangga Tan Akung Banawa Sekar. Lihat: P.J. "Zoetmulder, Kalangwan, 1974, hlm. 506–507

[157] Nag., LXXI: 2. Dewan pertimbangan ini beranggotakan sembilan orang, yaitu raja Hayam Wuruk, Sri Kertawarddhana (ayah raja), Rani Tribhuwanottunggadewi (ibu raja), Rajadewi Maharajasa (bibi raja) dan suaminya Wijayarajasa, Rajasaduhiteswari (adik raja) dan suaminya Singhawarddhana, Rajasaduhitendudewi (adik raja) dan suaminya Raden Larang (Bhre Matahun). Lebih lanjut mengenai lembaga pahöm narendra ini lihat uraian selanjutnya

[158] Nag., LXXII: 1–5. Di dalam kakawin *Nagarakrtagama*, aryyatmaraja itu bernama Pu Tandi, sedangkan di dalam prasasti Jayasong dari Bendosari tertulis Pu Tanding (lihat: Brandes, OJO, LXXXV; Th. G. Th. Pigeaud, Java in the 14th Century, I, hlm. 104)
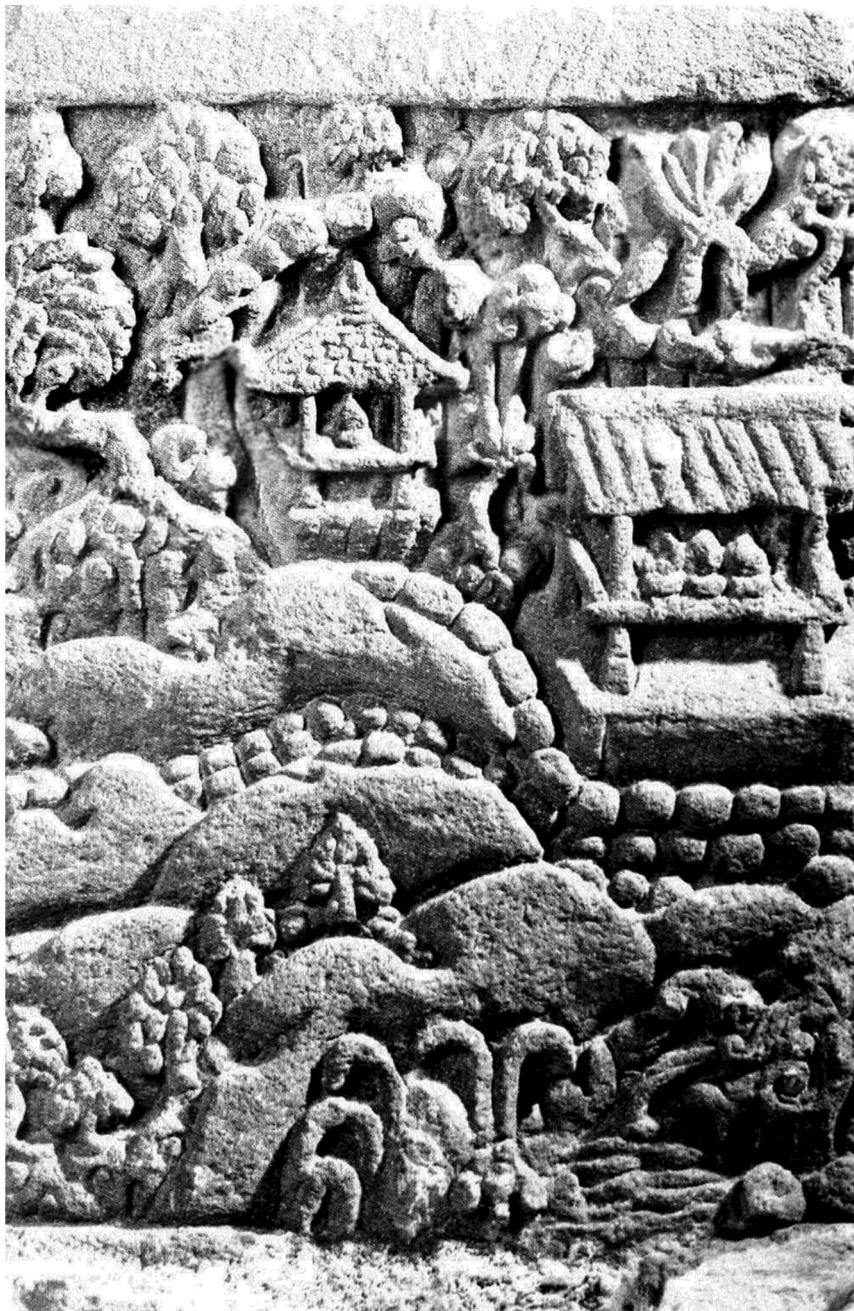
Foto 8.4 Relief pemandangan, batu, menggambarkan rumah dan jalan-jalan berbatu bulat, Trowulan, Jawa Timur, koleksi Museum Nasional (*Sumber*: Puslitbang Arkenas)

kemudian Gajah Enggon diangkat menjadi patih Hamangkubhumi.[159]

Pada tahun 1389 M, Raja Hayam Wuruk meninggal. Tempat pendarmaannya tidak diketahui.[160]

5. Perebutan Kekuasaan Sesudah Pemerintahan Hayam Wuruk

Sepeninggal raja Hayam Wuruk, takhta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawarddhana (Bhra Hyang Wisesa). Ia adalah menantu dan keponakan raja Hayam Wuruk yang dikawinkan dengan putrinya, Kusumawarddhani. Seharusnya, yang menjadi raja menggantikan Hayam Wuruk adalah Kusumawarddhani, putri mahkota yang lahir dari Paduka Sori permaisuri Hayam Wuruk. Wikramawarddhana sendiri adalah anak Dyah Nrttaja Rajasaduhiteswari, yaitu adik Hayam Wuruk yang kawin dengan Bhre Paguhan, Singhawarddhana.

Wikramawarddhana mulai memerintah pada tahun 1389 M. Ia memerintah dua belas tahun lamanya. Pada tahun 1400 M ia mengundurkan diri dari pemerintahan, menjadi seorang pendeta (bhagawan), dan mengangkat anaknya yang bernama Suhita untuk menggantikannya menjadi raja Majapahit. Menurut *Pararaton*, Suhita adalah anak kedua dari Wikramawarddhana. Anaknya yang pertama seorang laki-laki, yaitu Bhre Tumapel, yang dikenal pula dengan nama Bhra Hyang Wekasing Sukha (II). Dialah putra mahkota yang seharusnya menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja di Majapahit. Akan tetapi, ia telah meninggal pada tahun 1399 M sebelum ia dinobatkan menjadi raja.

Duduknya Suhita di atas takhta kerajaan Majapahit ternyata telah menimbulkan pangkal kericuhan di Majapahit, yaitu timbulnya pertentangan keluarga antara Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi. Seperti telah kita ketahui, Bhre Wirabhumi adalah anak raja Hayam Wuruk yang lahir dari selir. Karenanya ia tidak berhak untuk duduk di atas takhta kerajaan Majapahit, menggantikan ayahnya. Walaupun demikian, ketika Hayam Wuruk masih bertakhta, ia telah diberi kekuasaan untuk memerintah daerah bagian ujung timur kerajaan Majapahit, yaitu daerah Balambangan. Ia tidak setuju dengan pengangkatan Suhita menjadi raja Majapahit. Pada tahun 1401 M mulailah timbul persengketaan antara Bhre Wirabhumi dan Wikramawarddhana. Tiga

[159] Menurut kitab *Pararaton*, Gajah Énggon menjadi patih pada tahun 1371 M dan meninggal pada tahun 1398 M (Par.^{2}, hlm. 37–38).

[160] N.J. Krom menduga raja Hayam Wuruk didarmakan di Paramasukhapura, di Tanjung, yang juga dijadikan tempat pendarmaan cucunya Bhre Tumapel (Bhra Hyang Wekasing Sukha II). Lihat: N.J. Krom, HJG^2, hlm. 425; lihat pula: Par.^{2}, hlm. 38

tahun kemudian persengketaan itu makin memuncak, dan muncul menjadi huru-hara yang dikenal dengan peristiwa paregreg. Kedua belah pihak kemudian mengumpulkan orang-orangnya menghimpun kekuatan, dan akhirnya terjadilah perang.

Dalam peperangan tersebut mula-mula Wikramawarddhana dari kadaton kulon menderita kekalahan, akan tetapi kemudian setelah ia mendapat bantuan dari Bhre Tumapel Bhra Hyang Parameswara ia dapat mengalahkan Bhre Wirabhumi dari kadaton wetan. Bhre Wirabhumi kemudian melarikan diri naik perahu. Ia dikejar oleh Raden Gajah[161] dan tertangkap, kemudian dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1406 M.

Peperangan antara Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi ini disebutkan pula di dalam berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Ming (1368–1643 M). Di dalam buku Sejarah Dinasti Ming (Ming Shih), jilid ke-324,[162] disebutkan bahwa setelah kaisar Ch'eng-tsu naik takhta pada tahun 1403 M, ia mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa (Majapahit). Ia mengirimkan utusan-utusannya kepada raja "bagian barat", Tu-ma-pan, dan raja "bagian timur", Put-ling-ta-ha (Pi-ling-da-ha). Pada tahun 1405 M Laksamana Cheng-Ho memimpin sebuah armada perutusan ke Jawa, dan pada tahun berikutnya ia menyaksikan kedua raja Majapahit tersebut saling berperang. Kerajaan bagian timur disebutkan mendapat kekalahan dan kerajaannya dirusak. Berita Cina tersebut mengemukakan pula bahwa pada waktu terjadi perang antara kedua raja tersebut perutusan Cina sedang berada di kerajaan bagian timur, bahkan serangan tentara kerajaan bagian barat ke kerajaan bagian timur itu telah menyebabkan pula ikut terbunuhnya 170 orang Cina. Walaupun Bhre Wirabhumi sudah meninggal, peristiwa pertentangan keluarga itu belum reda juga. Bahkan peristiwa terbunuhnya Bhre Wirabhumi telah menjadi benih balas dendam dan persengketaan keluarga itu menjadi berlarut-larut. Pada tahun 1433 M Raden Gajah dibunuh karena dipersalahkan telah membunuh Bhre Wirabhumi.

Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun 1447 M. Ia didharmakan di Singhajaya bersama-sama dengan suaminya Bhra Hyang Parameswara (Aji Ratnapangkaja) yang meninggal pada tahun 1446 M. Karena Suhita tidak mempunyai anak, sepeninggalnya takhta kerajaan Majapahit diduduki oleh adiknya Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya. Pada masa awal pemerintahannya, pada tahun 1447 M, ia mengeluarkan prasasti

---

161 Di dalam *Pararaton* tokoh ini disebutkan berkedudukan sebagai ratu angabhaya dan bergelar Bhra Narapati. Lihat: Par.[2], hlm. 39

162 Lihat Groeneveldt, Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources, 1960, hlm. 36–37

Waringinpitu,[163] berkenaan dengan pengukuhan perdikan dharma (dharmma sima) Rajasakusumapura di Waringinpitu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh neneknya Sri Rajasaduhiteswari Dyah Nrttaja; untuk memuliakan Sri Paduka Parameswara Sang mokta ring Sunyalaya. Di dalam prasastinya itu ia disebutkan bergelar Wijayapara-kramawarddhana. Ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 M ia meninggal dan didharmakan di Krtawijayapura.

Sepeninggal Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikan menjadi Raja dengan bergelar Sri Rajasawarddhana. Ia dikenal pula dengan sebutan Sang Sinagara. Asal usulnya tidak jelas kita ketahui. Dari prasasti Waringinpitu diketahui bahwa Rajasawarddhana disebutkan pada urutan ketiga sesudah raja, dan pada tahun 1477 M ketika prasasti itu dikeluarkan oleh Kertawijaya, ia berkedudukan sebagai Bhatara ring Kahuripan.[164] Dari kenyataan ini tidak disangsikan lagi bahwa pada masa pemerintahan Kertawijaya, Rajasawarddhana telah mempunyai kedudukan yang tinggi dan penting di kerajaan Majapahit.

Di dalam kitab *Pararaton* disebutkan bahwa pada waktu menjadi raja Rajasawarddhana berkedudukan di Keling-Kahuripan. Berdasarkan pemberitaan diduga ia tidak berkedudukan di ibu kota Majapahit, tetapi telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Keling-Kahuripan. Hal ini mungkin pula disebabkan keadaan politik di Majapahit memburuk lagi akibat pertentangan keluarga yang belum mereda juga. Ia memerintah hampir tiga tahun lamanya. Pada tahun 1453 M ia meninggal dan didharmakan di Sepang.

Menurut *Pararaton*, sepeninggal Rajasawarddhana selama tiga tahun (1453–1456 M) Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja (*interregnum*). Sebab-sebab terjadinya *interregnum* ini tidak dapat diketahui dengan pasti. Diduga hal ini merupakan pula akibat dari adanya pertentangan memperebutkan kekuasaan di antara keluarga raja-raja Majapahit. Pertentangan keluarga yang berlangsung berlarut-larut itu rupa-rupanya telah

---

[163] Prasasti ini berangka tahun 1369 Saka (22 November 1447 M), ditulis pada 14 lempeng tembaga. Untuk pertama kalinya, sebagian dari prasasti ini disiarkan oleh W.F. Stutterheim di dalam JBG, V; 1938, hlm. 117–119. Transkripsi lengkap pertama kali dikerjakan oleh J.G. de Casparis dan disiarkan oleh Muh. Yamin dalam karangannya: Pertulisan Widjaja-parakrama-wardana dari Surodakan (Kediri) dengan bertarich Sjaka 1368 – T.M. 1447, yang disampaikan pada Kongres MIPI di Yogyakarta bulan Oktober 1962. Karangan Muh. Yamin ini dimuat pula di dalam: Laporan KIPN-II, VI, 1965, hlm. 399–428, dan di dalam: Muh. Yamin Tatanegara Madjapahit, II, 1962, hlm. 179–212

[164] Lihat: prasasti Waringinpitu, lempeng III-recto. Berdasarkan keterangan di dalam kitab *Pararaton*, A. Teeuw berpendapat bahwa Rajasawarddhana adalah saudara raja Kertawijaya (A. Teeuw et.al. Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun, 1969, hlm. 18). B.J.O. Schrieke, berpendapat bahwa mungkin sekali Rajasawarddhana adalah anak raja Kertawijaya, atau mungkin pula ia menantu raja Kertawijaya yang kawin dengan putri Bhre Daha (B.J.O. Schrieke, Indonesian Sociological Studies II, 1955, hlm. 48)

melemahkan kedudukan raja-raja Majapahit baik di pusat kerajaan maupun di daerah. Akibatnya, sepeninggal Rajasawarddhana tidak ada seorang pun di antara keluarga raja-raja Majapahit yang sanggup tampil untuk segera memegang tampuk pemerintahan di Majapahit.

6. Girindrawarddhana: Raja-Raja Majapahit Akhir

Setelah *interregnum* berlangsung selama tiga tahun, pada tahun 1456 M tampillah Dyah Suryawikrama Girisawarddhana menaiki takhta kerajaan Majapahit. Ia adalah salah seorang anak Dyah Kertawijaya yang semasa pemerintahan ayahnya menjadi raja daerah di Wengker (*Bhattara ing Wengker*). Di dalam *Pararaton* ia disebutkan dengan nama gelarnya Bhre Hyang Purwwawisesa. Ia memerintah selama sepuluh tahun. Pada tahun 1466 M ia meninggal dan didharmakan di Puri.

Sebagai gantinya kemudian Bhre Pandan Salas menjadi raja di Majapahit. Ia dikenal pula dengan nama Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana. Sebelum ia menjadi raja di Majapahit, ia berkedudukan sebagai raja daerah Tumapel (Bhattara ring Tumapel).[165] *Pararaton* menyebutkan ia hanya memerintah selama dua tahun, kemudian menyingkir meninggalkan keratonnya. Dari prasasti Pamintihan[166] yang dikeluarkan olehnya pada tahun 1473 M ternyata bahwa sampai pada waktu itu ia masih memerintah sebagai Raja Majapahit. Bahkan di dalam prasastinya ia disebutkan sebagai seorang *sri maharajaddhiraja* yang menjadi pemimpin raja-raja keturunan Tuan Gunung *(sri giripatiprasuta-bhupatiketubhuta*), di samping disebutkan pula sebagai "penguasa tunggal di Tanah Jawa" (*yawabhumyekadhipa*). Di dalam manggala kakawin Siwaratrikalpa gubahan Pu Tanakung, ia disebutkan pula sebagai seorang raja yang memang telah sepantasnya menjadi keturunan wangsa Girindra (*tan lyan sry adisuraprabhawa sira bhupati sapala Girindrawangsaja*).[167]

Dengan adanya kenyataan yang demikian ini, pemberitaan kitab *Pararaton* yang menyebutkan Bhre Pandan Salas hanya memerintah sebagai Raja Majapahit selama dua tahun tidak benar. Namun, pemberitaan mengenai penyingkiran Bhre Pandan Salas dari keratonnya dapat dibenarkan. Penyingkiran Bhre Pandan Salas dari keratonnya itu disebabkan serangan dari Bhre Kertabhumi, yang ingin merebut kekuasaan Majapahit. Dari

---

[165] Lihat: Par.², hlm. 40; prasasti Waringinpitu lempeng IV–verso, baris 1–4; dan prasasti Trawulan III, di dalam OV, 1918, hlm. 170

[166] Lihat: F.D.K. Bosch, "De Oorkonde van Sendang Sedati", OV, 1922 hlm. 22-27

[167] P.J. Zoetmulder, "Djaman Mpu Tanakung", Laporan KIPN-II VI. 1965 hlm. 206; P.J. Zoetmulder, Kalangwan, 1974, hlm. 365; A. Teeuw et al. Siwaratrikalpa 1969, hlm. 64, 68

Pararaton diketahui bahwa Bhre Kertabhumi adalah anak bungsu Sang Sinagara (Rajasawarddhana).[168] Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya pada tahun 1486 M, diketahui adanya penyelenggaraan upacara sraddha untuk memperingati dua belas tahun mangkatnya Paduka Bhattara ring Dahanapura. Oleh para sarjana, tokoh Bhattara ring Dahanapura ini diidentifikasikan dengan Bhre Pandan Salas Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana.[169] Berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam prasasti-prasasti Girindrawarddhana tersebut dapat diduga bahwa ketika keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kertabhumi, Bhre Pandan Salas menyingkir ke Daha. Di Daha ia kemudian meneruskan pemerintahannya sampai saat ia meninggal pada tahun 1474 M.

Sepeninggal Dyah Suraprabhawa, kedudukannya sebagai raja Majapahit digantikan oleh anaknya Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya. Sebelum Ranawijaya menjadi raja Majapahit ia berkedudukan sebagai Bhattara i Kling. Pada awal masa pemerintahannya agaknya ia tidak berkedudukan di Majapahit, tetapi tetap di Kling. Itulah sebabnya di dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan olehnya ia masih disebutkan pula sebagai Paduka Sri Maharaja Bhattara i Kling di samping disebutkan sebagai Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri Prabhunatha.[170]

Pada masa pemerintahannya Ranawijaya berusaha pula untuk mempersatukan kembali wilayah kerajaan Majapahit yang telah terpecah-pecah akibat pertentangan keluarga memperebutkan kekuasaan. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, pada tahun 1478 M, ia melancarkan peperangan terhadap Bhre Kertabhumi yang pada waktu itu berkedudukan di Majapahit. Seperti diketahui, Bhre Kertabhumi pada tahun 1468 M merebut kekuasaan dari tangan Bhre Pandan Salas dengan jalan menyingkirkannya dari keraton Majapahit. Peperangan yang dilancarkan Ranawijaya terhadap Bhre Kertabhumi ini dapat pula dianggap sebagai revanche atas penyerangan yang telah dilakukan oleh Bhre Kertabhumi terhadap Bhre Pandan Salas, ayah Ranawijaya. Perang melawan Majapahit yang dilakukan oleh Ranawijaya ini

---

[168] Lihat Par.[2]: 40. Lihat pula Hasan Djafar, Girindrawardhana: Beberapa Masalah Majapahit Akhir, 1978, hlm. 50–51

[169] Lihat: Martha A. Muusses "Singhawikramawarddhana", FBG, II, 1929, hlm. 207–214; B.J.O. Schrieke, op. cit., hlm. 44 dst. Lihat pula: P.J. Zoetmulder, op. cit., 1965, hlm. 207

[170] Lihat prasasti Jiwu I (OJO, XCII) dan Jiwu III (OJO, XCIV)

disebutkan di dalam prasasti Jiwu I yang dikeluarkan olehnya pada tahun 1486 M. Prasasti tersebut dikeluarkan sehubungan dengan pengukuhan anugerah berupa tanah-tanah di Trailokyapuri kepada seorang brahmana terkemuka, Sri Brahmaraja Ganggadhara, yang telah berjasa kepada raja pada waktu perang melawan Majapahit sedang naik-turun (duk ayunayunan yuddha lawaning majapahit). Dalam peperangan ini Ranawijaya berhasil merebut kembali kekuasaan Majapahit dari tangan Bhre Kertabhumi, dan Bhre Kertabhumi gugur di kadaton. Peristiwa gugurnya Bhre Kertabhumi di kadaton ini disebutkan pula di dalam kitab *Pararaton*.[171]

Pada masa awal pemerintahannya Ranawijaya didampingi oleh seorang rakryan apatih, yang bernama Pu Wahan.[172] Pada masa akhir pemerintahannya ia didampingi seorang patih bernama Udara. Dari Babad Tanah Jawi diperoleh keterangan bahwa Patih Udara ini adalah anak Patih Wahan dan semula ia berkedudukan sebagai adipati di Kadiri.[173] Sebagai seorang patih pada waktu itu, Udara sangat berpengaruh di dalam pemerintahan kerajaan Majapahit, dan kekuasaannya sangat besar. Di dalam Suma Oriental, Tomé Pires menyebutnya dengan nama Pate Udra atau Pate Andura (Pate Amdura).[174] Walaupun ia hanya berkedudukan sebagai seorang patih (viso rey) dan panglima (capitam moor), karena sangat besar kekuasaannya, ia dianggap seperti raja.[175] Mengingat peran dan kekuasaannya yang sangat besar, mungkin sekali ia mempunyai kedudukan sebagai Patih Hamangkubhumi seperti halnya kedudukan Gajah Mada pada masa pemerintahan Tribhuwanottunggadewi dan Hayam Wuruk. Sebuah di antara prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya menyebutkan pula adanya seorang tokoh Girindrawarddhana yang lain, yaitu Girindrawarddhana Sri Singhawarddhana Dyah Wijayakusuma.[176] Di dalam prasasti ini ia disebutkan pula sebagai Paduka Sri Maharaja Bhatare Kling. Dari sumber-sumber sejarah yang ada tidak dapat diketahui dengan pasti hubungan antara

---

[171] "... bhre Kertabhumi ... bhre prabhu sang mokta ring kadaton i saka sunyanora-yuganing-wong, 1400" (Par.[2], hlm. 40). Lihat: Hasan Djafar, Girindrawardhana, 1978, hlm. 50

[172] Lihat: OJO, XCI, baris ke-2

[173] Lihat: W.L. Olthof, Babad Tanah Djawi, 1941, teks bahasa Jawa, hlm. 17–18

[174] Armando Cortesão, The Suma Oriental of Tomé Pires, I, 1944, hlm. 175–176. M.C. Ricklefs, menghubungkan Pate Andura atau Pate Amdura ini dengan tokoh Arta Dirya, yang disebutkan di dalam Babad ing Sengkala sebagai raja yang memerintah pada tahun Saka 1403–1407 (1481–1486 M.). Lihat: M.C. Ricklefs, Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials, London, 1978, hlm. 159

[175] Armando Cortesão, loc. cit

[176] Lihat: OJO, XCIV

kedua Girindrawarddhana tersebut, tetapi besar kemungkinannya keduanya mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat, mungkin sebagai kakak dan adik. Karena keduanya disebutkan dengan sebutan Bhattara i Kling, sedangkan Ranawijaya disebutkan pula sebagai Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Daha Janggala Kadiri Prabhunatha, dapat diduga bahwa Dyah Wijayakusuma adalah orang yang menggantikan kedudukan Ranawijaya sebagai Bhattara i Kling pada waktu Ranawijaya menjadi raja di Majapahit.[177]

Selain dari kedua orang Girindrawarddhana tersebut, pada zaman pemerintahan raja Wijayaparakrama (Dyah Kertawijaya) dikenal pula seorang tokoh Girindrawarddhana yang lain, yaitu Girindrawarddhana yang mempunyai nama kecil Dyah Wijayakarana. Di dalam prasasti Waringinpitu yang dikeluarkan oleh Kertawijaya pada tahun 1447 M, Dyah Wijayakarana ini disebutkan sebagai Bhattara i Kling, dan disebutkan pada urutan ketiga belas sesudah raja.[178]

Adanya tiga orang tokoh Girindrawarddhana ini telah mendorong beberapa sarjana untuk berkesimpulan bahwa pada masa Majapahit Akhir, telah muncul suatu dinasti baru raja-raja yang berkuasa di Majapahit, yaitu dinasti Girindrawarddhana.[179] Kesimpulan tersebut sebenarnya bertumpu pada penafsiran N.J. Krom mengenai prasasti-prasasti Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya yang berasal dari tahun 1486 M.[180] Seperti diketahui, di dalam prasasti-prasasti Girindrawarddhana, yaitu prasasti Jiwu I (OJO, XCII) dan Jiwu III (OJO, XCIV), disebutkan adanya penyelenggaraan upacara sraddha untuk memperingati dua belas tahun mangkatnya Paduka Bhattara ring Dahanapura.[181] Krom telah mengidentifikasikan tokoh Bhattara ring Dahanapura ini dengan tokoh Bhre Daha, yang di dalam kitab *Pararaton* disebutkan menjadi raja pada tahun Saka 1359 (1437 M) dan meninggal pada tahun Saka 1386 (1464 M).[182] Lebih lanjut lagi Krom mengemukakan bahwa Bhattara ring Dahanapura adalah ayah Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya. Angka tahun meninggalnya Bhre Daha yang disebutkan di dalam *Pararaton* menurut Krom tidak tepat. Angka tahun tersebut seharusnya 1396 Saka

---

[177] Hasan Djafar, op. cit., hlm. 75–76

[178] Lihat prasasti Waringinpitu, lempeng V-verso dan lempeng VI-recto

[179] Lihat: N.J. Krom, IHJK^2, I, 1923; N.J. Krom, HJG^2, hlm. 450–451: N.J. Krom, "De Hindoe-Javaansche Tijd", di dalam F.W. Stapel, GNI, I, 1938; W.F. Stutterheim, Indische Cultuurgeschiedenis, II, 1932: dan B.J.O. Schrieke, Indonesian Sociological Studies, II, 1955

[180] J.G. de Casparis "Historical Writing on Indonesia (Early Period)" di dalam: D.G.E. Hall (ed.), Historians of South East Asia, London, 1961, hlm. 158

[181] Lihat: Brandes, OJO, 1913, hlm. 216–219

[182] Par.^{2}, hlm. 39–40

(1474 M.), sehingga pada tahun Saka 1408 (1486 M.) ketika Dyah Ranawijaya mengadakan upacara sraddha itu tepat dua belas tahun meninggalnya Bhre Daha. Adanya selisih sepuluh tahun oleh Krom dianggap sebagai kekeliruan penulis *Pararaton*. Dengan berpangkal tolak pada anggapan bahwa Bhattara ring Dahanapura adalah seorang raja Kadiri (Daha), Krom berpendapat bahwa kerajaan Majapahit haruslah telah dijatuhkan oleh kekuasaan Hindu yang lain dari Kadiri, yaitu oleh wangsa Girindrawarddhana, pada tahun 1478 M. Dengan demikian, Krom telah menimbulkan anggapan bahwa Ranawijaya adalah raja Kadiri yang telah menaklukkan kerajaan Majapahit.[183]

Anggapan mengenai adanya wangsa baru raja-raja Majapahit akhir yang berasal dari Kadiri, dari segi politik menjumpai keberatan-keberatan.[184] Dari sumber sejarah Majapahit diketahui bahwa di bawah raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (Paduka Bhattara) yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah sebagai daerah lungguh-nya. Raja-raja daerah ini ternyata mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan raja yang sedang berkuasa di Majapahit. Dan negara-negara daerah yang masing-masing diperintah oleh seorang Paduka Bhattara itu pun ternyata merupakan wilayah-wilayah yang secara keseluruhan merupakan wilayah kerajaan Majapahit. Berdasarkan keterangan mengenai segi-segi struktural kerajaan Majapahit tersebut diketahui bahwa Kadiri (Daha) pada zaman Majapahit tidak lebih dari sebuah negara daerah atau provinsi yang termasuk ke dalam lingkungan wilayah kerajaan Majapahit. Para Paduka Bhattara yang memerintah di negara-negara daerah masih termasuk ke dalam anggota wangsa raja-raja Majapahit, yaitu wangsa Rajasa (rajasawangsa) atau wangsa Girindra (girindrawangsa) yang didirikan oleh Ken Angrok Sri Ranggah Rajasa.

Selain ketiga orang tokoh Girindrawarddhana tersebut, yang semuanya dikenal pula sebagai Bhattara i Kling, ternyata dari sumber-sumber sejarah Majapahit yang lain baik yang berupa prasasti maupun yang berupa karya sastra, masih dapat kita ketahui adanya beberapa orang yang mempunyai nama gelar atau sebutan yang sama artinya dengan arti girindrawarddhana. Dari prasasti Waringinpitu tahun 1447 M disebutkan pula seorang tokoh paduka

---

[183] Lihat pendapat Krom tersebut di dalam HJG^2, hlm. 448–451; GNI, I, hlm. 295

[184] Mengenai kedinastian raja-raja Majapahit akhir ini lihat: J.G. de Casparis, loc. cit. Lihat pula: Hasan Djafar, op. cit., hlm. 77–85; Hasan Djafar, "Girindrawarddhana: Raja-Raja Majapahit Akhir", Majalah Arkeologi, I (1), 1977, hlm. 42–52

Bhattara i Wengker yang bergelar Girisawarddhana. Berdasarkan kesamaan arti girisa dan girindra dapatlah dikemukakan bahwa Girisawarddhana pun masih termasuk kaum keluarga Girindra.[185]

Dari prasasti Pamintihan tahun 1473 M diketahui bahwa raja yang mengeluarkan prasasti tersebut ialah Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana. Di dalam prasastinya itu ia diberi sebutan Sri Gi ripatiprasutabhupatiketubhuta, yang berarti "yang menjadi pemimpin (yang termasuk paling utama) dari raja-raja keturunan Tuan Gunung".[186] Bahkan dari manggala kakawin Siwaratrikalpa terdapat pula sebuah keterangan yang menjelaskan hubungan antara Dyah Suraprabhawa tersebut dengan dinasti Girindra. Keterangan tersebut berbunyi: "tan lyan sri adisuraprabhawa sira bhupati sapala *Girind*ra*wang*saja"; yang berarti "tidak lain adalah Sri Adisuraprabhawa, seorang raja yang memang telah sepantasnya menjadi keturunan wangsa Girindra".[187]

7. Runtuhnya Kerajaan Majapahit

Berita tradisi menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun Saka 1400 (1478 M). Saat keruntuhannya itu disimpulkan dalam candrasengkala sirna-ilang-kertaning-bhumi,[188] dan disebutkan pula bahwa keruntuhannya itu disebabkan serangan dari kerajaan Islam Demak. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi. Prasasti-prasasti batu yang berasal dari tahun 1486 M, masih menyebut adanya kekuasaan kerajaan Majapahit. Rajanya yang berkuasa pada waktu itu bernama Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindrawarddhana; bahkan ia disebutkan pula sebagai seorang Sri Paduka Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabhunatha.

Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Ming (1368–1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomatik antara Cina dengan Jawa (Majapahit) pada tahun 1499 M.[189] Demikian pula Rui de Brito, Gubernur Portugis di Malaka, dalam laporannya kepada raja Manuel pada tahun 1514

---

[185] Girisa dan Girindra adalah nama-nama sebutan untuk Siwa, dan mempunyai arti yang sama yaitu "Tuan Gunung" (giri = gunung; isa = indra = raja atau penguasa, Tuan). Lihat: Soepomo Surjohudojo, "Lord of the Mountains in the Fourteenth Century Kakawin", BKI, 128, 1972, hlm. 281-297

[186] P.J. Zoetmulder, "Djaman Empu Tanakung", Laporan KIPN-II, VI, hlm. 206. Lihat pula: F.D.K. Bosch; "De Oorkonde van Sendang Sedati", OV, 1922, hlm. 25

[187] P.J. Zoetmulder, loc. cit.; lihat pula di dalam: A. Teeuw et. al., Siwaratrikalpa, 1969, hlm. 15

[188] Lihat Serat Kanda, di dalam Par.[2], hlm. 229–230. Lihat pula Babad ing Sengkala, di dalam M.C. Ricklefs, op. cit., hlm. 18 dan 159

[189] Groeneveldt, op. cit., hlm. 39

M, antara lain menyebutkan bahwa di Jawa pada waktu itu terdapat dua raja kafir, yaitu Raja Sunda dan Raja Jawa.[190] Penulis Italia Duarte Barbosa pada tahun 1518 M memberitakan bahwa di pedalaman Jawa masih ada raja kafir yang sangat berkuasa.[191] Dari berita Portugis dan Italia tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awal abad XVI kerajaan Majapahit masih ada. Akan tetapi, berita Italia dari penulis Antonio Pigafetta yang berasal dari tahun 1522 M memberikan kesan bahwa pada waktu itu kerajaan Majapahit sudah tidak ada lagi.[192] Pada waktu itu, Majapahit hanya merupakan sebuah kota di antara kota-kota besar yang ada di Pulau Jawa. Lebih jauh lagi di dalam pemberitaannya itu Pigafetta menyebutkan pula nama Pati Unus sebagai raja Majapahit, yang dikatakannya ketika ia masih hidup merupakan seorang raja yang paling berkuasa.[193] Dari sumber-sumber lain diketahui bahwa Pati Unus ialah seorang penguasa Demak yang memerintah pada tahun 1518–1521 M. Ia terkenal pula dengan sebutannya Pangeran Sabrang Lor, yang meninggal pada tahun 1521 M.[194]

Kalau pemberitaan Pigafetta itu dihubungkan dengan pemberitaan Duarte Barbosa dari tahun 1518 M, yang menyebutkan bahwa pada waktu itu di Jawa masih ada kerajaan kafir yang dikuasai oleh Pate Udra, dapat disimpulkan bahwa antara tahun 1518 M dan 1521 M di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik. Antara tahun 1518 M dan 1521 M itu penguasaan atas kerajaan Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus penguasa dari Demak. Majapahit telah ditaklukkan dan kemudian dikuasai oleh Adipati Unus dari Demak. Bagaimana penaklukan Majapahit oleh Demak dan bagaimana nasib para penguasa Majapahit sesudah penaklukan itu tidak diketahui dengan pasti. Sumber-sumber tradisi seperti Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmagandul hanya dengan samar-samar memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana berlangsungnya penaklukkan Majapahit oleh Demak.[195]

---

[190] Lihat: José Ramos-Coelho, Alguns Documentos do Archivo Nacional, Lisboa, 1892, hlm. 346–347. Lihat pula: R.A. Kern, "Pati Unus en Sunda", BKI, 108, 1952, hlm. 127; B.J.O. Schrieke, op. cit., hlm. 67

[191] M.L. Dames, The Book of Duarte Barbosa, II, 1921 hlm. 189–190

[192] J.A. Robertson, Magellan's Voyages Around the World by Antonio Pigafetta, 1I, 1909, hlm. 167, 169

[193] Loc. cit.

[194] G.P. Rouffaer, "Wanneer is Madjapahit gevallen?", BKI, 50, 1899, hlm. 144; H.J. de Graaf en Th. G. Th. Pigeaud, De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java, 1974, hlm. 47

[195] Lihat: W.L. Olthof, Babad Tanah Djawi, teks bahasa Jawa, hlm. 29; Serat Kanda, di dalam Par.[2], hlm. 216–230; Serat Darmogandul, edisi Tan Khoen Swie, 1954

Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda menyebutkan bahwa raja-raja Demak menyatakan dirinya sebagai keturunan Prabu Brawijaya raja Majapahit.[196] Bahkan di dalam Purwaka Caruban Nagari disebutkan dengan jelas bahwa Raden Patah, pendiri dan Sultan pertama Demak, adalah anak prabu Brawijaya Kertabhumi.[197] Dengan demikian, apabila benar Demak telah mengadakan penyerangan untuk menaklukkan kerajaan Majapahit, hal itu tidak dapat dilepaskan dari rangkaian perang saudara memperebutkan kekuasaan atas takhta kerajaan Majapahit. Telah dikemukakan bahwa raja Kertabhumi telah merebut kekuasaan Majapahit dari tangan Bhre Pandan Salas dengan menyingkirkannya dari kadaton pada tahun 1468 M. Akan tetapi, pada tahun 1478 kekuasaan atas takhta kerajaan Majapahit ini dapat direbut kembali dari tangan Bhre Kertabhumi oleh Dyah Ranawijaya, anak Bhre Pandan Salas, dengan mengadakan penyerangan ke Majapahit. Dalam penyerangan ke Majapahit yang dilancarkan oleh Dyah Ranawijaya itu Bhre Kertabhumi gugur di kadaton. Dengan gugurnya Bhre Kertabhumi ini, hilang lenyaplah kekuasaan Bhre Kertabhumi. Peristiwa gugurnya Bhre Kertabhumi di kadaton inilah yang tersimpul di dalam candra sengkala "sirna-ilang-kertaning-bhumi" (1400 Saka).[198] Akan tetapi, para penulis tradisi telah mengaburkan kenyataan-kenyataan sejarah tersebut dengan mengatakan bahwa kerajaan Majapahit telah runtuh pada tahun Saka 1400 (1478 M) karena serangan tentara Demak, yang dipimpin oleh Raden Patah.

Dengan demikian, penguasaan Majapahit oleh Demak itu tidaklah terjadi pada tahun Saka 1400 (1478 M), dan bukan pula dilakukan oleh Raden Patah terhadap Prabhu Brawijaya Kertabhumi. Penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah, sebagai tindakan balasan terhadap Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya yang telah mengalahkan neneknya, Bhre Kertabhumi.[199]

8. Struktur Pemerintahan dan Birokrasi Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan kuno yang dapat kita ketahui dengan agak lengkap struktur pemerintahan dan birokrasinya. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk kerajaan Majapahit telah mencapai

---

[196] Di dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda disebutkan bahwa Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya dari perkawinannya dengan putri Cina. Lihat: Olthof, op. cit., hlm. 19–20; Brades, *Pararaton*², hlm. 225

[197] "... tumuli hana pwa ya sang Patah ika anak ira Sang Prabhu Brawijaya Kretabhumi kang rumuhun mastri lawan putri Cina, ... " (Atja, Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari, 1972, hlm. 84). Lihat pula: P.S. Sulendraningrat, Purwaka Tjaruban Nagari, 1972, hlm. 19

[198] Hasan Djafar, Girindrawarddhana, 1978, hlm. 50

[199] Ibid. hlm. 90, 94 dst

puncak keemasannya. Pada masa itu, Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur. Dari bahan-bahan keterangan yang ada dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit selama perkembangan sejarahnya tidak banyak berubah. Sebagian besar sumber-sumber tentang masalah ini berasal dari zaman keemasan Majapahit. Struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan keadaannya pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci. Hal yang demikian ini terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi.[200] Berdasarkan konsepsi ini, seluruh kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika dari jagat raya, dan raja Majapahit disamakan dengan dewa tertinggi yang bersemayam di puncak Mahameru.

Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas negara-negara daerah yang disamakan dengan tempat tinggal para dewa Lokapala yang terletak di keempat penjuru mata angin. Dalam prasasti Tuhanaru[201] yang berangka tahun 1245 Saka (13 Desember 1323 M) kerajaan Majapahit dilambangkan sebagai sebuah prasada dengan raja Jayanagara sebagai Wisnwawatara dan Rake Mapatih sebagai pranala, sedangkan seluruh mandala Jawa dianggap sebagai punpunan-nya, Pulau Madura dan Tanjungpura dianggap sebagai angsa-nya. Demikian pula di dalam prasasti Jayapatra[202] yang berasal dari zaman Hayam Wuruk, raja Hayam Wuruk diumpamakan sebagai sebuah patung Siwa dan Patih Gajah Mada diumpamakan sebagai sebuah pranala.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya diberi kedudukan sebagai raja muda (*yuwaraja* atau *kumararaja*). Putra-putra raja dari parameswari biasanya memiliki sebuah daerah lungguh (apanage).

---

[200] Lihat: R. von Heine Geldern, "Conception of State and Kingship in Southeast Asia", The Far Eastern Quarterly, II, 1942, hlm. 15–30; id., Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Radja di Asia Tenggara, terjemahan Deliar Noer, 1972. Lihat pula: id., "Weltbild und Bauform in Sudostasien", Wiener Beiträge zur Kunst und Kulturgeschichte Asiens, 4, 1930, hlm. 28–78; K'o Tsung-Yüan, "Studies on the Sacral Kingship in Early Southeast Asia", Journal of the Historical Society, University of Singapore, 1967/1968, hlm. 21–45

[201] OJO, LXXXIII

[202] OJO, LXXXV

Di dalam prasasti Sukamrta yang dikeluarkan oleh Kertarajasa Jayawarddhana pada tahun 1218 Saka (29 Oktober 1296 M),[203] disebutkan bahwa pada waktu itu Jayanagara telah dinobatkan menjadi *kumararaja* dan berkedudukan di Daha. Demikian pula di dalam prasasti Prapancasarapura[204] yang berasal dari zaman pemerintahan Tribhuwanottunggadewi, disebutkan bahwa sebelum dinobatkan menjadi raja Majapahit, Hayam Wuruk telah diangkat menjadi *kumararaja* dan berkedudukan di Jiwana. Pada waktu Hayam Wuruk menjadi raja, putrinya yang bernama Kusumawarddhani pernah pula dinobatkan menjadi rajakumari dan berkedudukan di Kabalan.[205]

Pada zaman Majapahit kita mengenal pula kelompok yang disebut Bhattara Saptaprabhu,[206] yang merupakan sebuah pahöm narendra, yaitu suatu lembaga yang merupakan "Dewan Pertimbangan Kerajaan". Dewan ini bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada raja. Anggota-anggotanya adalah para sanak saudara raja. Lembaga Bhattara Saptaprabhu ini pertama kali diketahui dari prasasti Singasari (D 111) yang berangka tahun 1273 Saka (27 April 1351 M), yang dikeluarkan oleh Rakryan Mapatih Pu Mada.[207] Kemudian diketahui pula disebutkan di dalam *kidung* Sundayana dengan sebutan Saptaprabhu, dan di dalam kakawin *Nagarakrtagama* dengan sebutan pahöm narendra.[208]

Di bawah Raja Majapahit terdapat sejumlah raja-raja daerah (paduka bhattara), yang masing-masing memerintah sebuah negara daerah. Mereka ini biasanya merupakan saudara-saudara atau para kerabat dekat raja yang memerintah. Dalam pelaksanaan tugas-tugas kerajaan mereka ini dibebani tugas dan tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan juga meliputi fungsi pertahanan wilayahnya.[209] Para penguasa daerah ini dalam menjalankan pemerintahan daerahnya dibantu oleh sejumlah pejabat daerah, dengan struktur yang hampir sama dengan yang ada di pusat kerajaan, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, mereka berhak pula mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.

---

[203] Lihat: R. Ng. Poerbatjaraka, "Oorkonde van Krtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan)", INI, 1, 1940, hlm. 38–43

[204] OJO, LXXXIV

[205] Nag., LXXI: 2

[206] Mengenai Bhattara Saptaprabhu lihat: N.J. Krom, "Sapta Prabhu", TBG, 56, 1914, hlm. 195–196

[207] Lihat: J.L.A. Brandes, ROC, 1904, hlm. 4–5; id., "Beschrijving van Tjandi Singasari en de Wolkentooneelen van Panataran", Archaeologische Onderzoek op Java en Madoera, II, 1909, hlm. 38

[208] Nag., LXXI: 2

[209] Th. G. Th. Pigeaud, Java in the Fourteenth Century, IV, 1962, hlm. 525

Dalam prasasti-prasasti biasanya para paduka bhattara disebutkan ikut mengiringi perintah raja ("... sahacarita mwang ajna paduka bhattara ring..." atau "... iniring denyajna paduka bhattara ring ..."). Perintah itu kemudian diturunkan kepada para pejabat yang disebut Rakryan Mahamantri Katrini dan kemudian diteruskan kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. yaitu para Rakryan Mantri ri Pakira-kiran, para Dharmmadhyaksa, dan para Dharmma-upapatti.

Rakryan Mahamantri Katrini biasanya dijabat oleh para putra raja. Mereka ini terdiri dari tiga orang, yaitu: Rakryan Mahamantri i Hino, Rakryan Mahamantri i Halu, dan Rakryan Mahamantri i Sirikan. Di antara ketiga Rakryan Mahamantri itu agaknya Rakryan Mahamantri i Hino merupakan yang tertinggi dan terpenting kedudukannya, karena ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan raja bahkan ia dapat pula mengeluarkan piagam-piagam berupa prasasti.

Rakryan Mantri ri Pakira-kiran adalah sekelompok pejabat tinggi yang merupakan sebuah "Dewan Menteri", yang berfungsi sebagai "Badan Pelaksana Pemerintahan". Badan ini biasanya terdiri dari lima orang pejabat, yaitu: Rakryan Mapatih atau Patih Hamangkubhumi, Rakryan Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kanuruhan. Kelima pejabat (para tanda rakryan) tersebut pada zaman Majapahit disebut Sang Panca ring Wilwatikta atau disebut juga Mantri Amancanagara. Di antara kelima tanda rakryan itu, Rakryan Mapatih merupakan pejabat yang terpenting kedudukannya. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri atau Menteri Utama (Mantri Mukya), yang bersama-sama raja dapat ikut menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Karena kedudukannya itu pula ia memimpin suatu "Badan Pelaksana Pemerintahan" yang disebut Wesapuri Kamantryaning Amatya ring Sanagara. Patih Hamangkubhumi disebut pula Apatih ring Tiktawilwadhika.[210] Hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan jabatan patih yang ada di daerah, yang biasanya disebut Sang (M) apatih atau Rakryan (M)apatih saja. Di dalam Nawanatya disebutkan tugas-tugas para Rakryan Mantri tersebut.[211] Selain pejabat yang lima tersebut, dari beberapa sumber sejarah Majapahit[212] masih dapat diketahui adanya sejumlah

---

210 Lihat Nawanatya di dalam Th. G. Th. Pigeaud op. cit., vol. 1, hlm. 81–86

211 Lihat misalnya prasasti Kudadu (OJO, LXXXI), prasasti Sukamrta (INI, 1, 1940, hlm. 33–49), prasasti Bendosari (OJO, LXXXV)

212 Lihat antara lain prasasti Sukamrta, prasasti Sidateka (OJO, LXXXIII), prasasti Trawulan I (OV 1918, hlm. 109–112), prasasti Bendosari (OJO, LXXXV), prasasti Waringin Pitu (Muh. Yamin, 1962b), dan *Nagarakrtagama* (pupuh X: 3)

pejabat tinggi lainnya yang dapat digolongkan pula ke dalam kelompok Rakryan Mantri ri Pakira-kiran. Pejabat-pejabat tersebut jumlahnya cukup banyak, di antaranya: Sang Wrddhamantri, Yuwamantri, Sang Ãryyadhikara, Sang Ãryyatmaraja, Mantri Wagmimaya, Mantri Kesadhari, dan Rakryan Juru. Dharmmadhyaksa ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan.

Ada dua Dharmmadhyaksa, yaitu Dharmmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama Siwa, dan Dharmmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha. Tiap-tiap Dharmmadhyaksa ini dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan (dharmmaupapatti) yang diberi sebutan *Sang Pamegat (Samgat)*. Pejabat ini jumlahnya cukup banyak, terdiri dari *Sang Pamegat i Tirwan, Sang Pamegat i Kandamuhi, Sang Pamegat i Manghuri, Sang Pamegat i Jambi, Sang Pamegat i Pamwatan, Sang Pamegat i Kandangan Atuha, Sang Pamegat i Kandangan Rare, Sang Pamegat i Panjangjiwa,Sang Pamegat i Lekan, Sang Pamegat i Tanggar, Sang Pamegat i Pandlegan*, dan *Sang Pamegat i Tigangrat*. Akan tetapi, nama-nama pejabat tersebut di dalam prasasti-prasasti Majapahit biasanya hanya disebutkan paling banyak tujuh buah.[213]

Pada zaman Raja Hayam Wuruk dikenal adanya tujuh upapatti yang disebut Sang Upapatti Sapta.[214] Ketujuh upapatti itu adalah *Sang Pamegat i Tirwan, Sang Pamegat i Kandamuhi, Sang Pamegat i Manghuri, Sang Pamegat i Pamwatan, Sang Pamegat i Jambi, Sang Pamegat i Kandangan Atuha*, dan *Sang Pamegat i Kandangan Rare.*[215]

Dari beberapa buah prasasti Majapahit yang memuat daftar dharmma-upapatti dapat diketahui bahwa para pejabat tersebut masih dapat dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan, yaitu golongan untuk urusan agama Buddha dan golongan untuk urusan agama Siwa.[216] Di antara para upapatti itu ada pula yang menjabat urusan sekte-sekte tertentu seperti Bhaira-wapaksa, Saurapaksa, dan Siddhantapaksa. Dari kitab Sanghyang Kamahayanikan, diketahui pula adanya sekte-sekte agama Buddha yang disebut Sang Wadisisya Bhagawan Kapila, Sang Wadikanabhaksasisya, Sang Wadiwesnawa, Sakara, dan Wahyaka.[217] Selain kedudukannya sebagai

---

213 *Nagarakrtagama*, X: 3

214 Lihat: F.H. van Naerssen, "De Saptopapati. Naar aanleiding van een tekstverbetering in de *Nagarakrtagama*", BKI, 90, 1933, hlm. 239–258

216 Yang termasuk ke dalam golongan untuk agama Buddha ialah Sang Pamegat i Kandangan Atuha dan Kandangan Rare, yang termasuk ke dalam golongan untuk agama Siwa ialah Sang Pamegat i Tirwan, Kandamuhi, Manghuri, Pamwatan, dan Jambi

217 Lihat: J. Kats, Sang Hyang Kamahayanikan: Oud Javaansche Tekst met Inleiding Vertaling en Aanteekeningen, 1910. Lihat pula: Sanghyang Kamahayanikan, 1973, hlm. 138–139

pejabat keagamaan, para upapatti itu dikenal pula sebagai kelompok para cendekiawan, dan dikenal pula sebagai kelompok para bhujangga.[218] Selain para pejabat birokrasi yang telah disebutkan itu, masih terdapat pula sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya.

Mereka itu ialah para kepala jawatan (tanda), para nayaka, pratyaya, dan para drawyahaji, yang merupakan pejabat-pejabat sipil, para *pangalasan*, senapati, dan surantani, sebagai pejabat-pejabat militer yang bertugas pula sebagai pengawal raja dan penjaga lingkungan keraton (bhayangkari).

Dari kitab Praniti Raja Kapakapa, kita mengetahui ada 150 mantri dan 1.500 pejabat-pejabat rendahan yang terdiri dari para tanda, wadohaji, panji andaka, dan kajineman.[219]

---

[218] Lihat: *Nagarakrtagama* LXXXIII: 2. Lihat pula: Purwadigama dan Praniti Raja Kapakapa, di dalam Th. G. Th. Pigeaud, op. cit., vol. 1, hlm. 91–95

[219] Lihat: Th. G. Th. Pigeaud, op. cit., vol. 1, hlm. 94, vol IV, hlm. 375

Daftar Pustaka

Adhyatman, Sumarah, *Keramik Kuna yang Ditemukan di Indonesia*, Jakarta: The Ceramic Society of Indonesia. Jakarta, 1981.

Ali, Mohammad Taslim, *Puisi Dunia I. Gema Djiwa Slavia dan Latin*, Cetakan ke-2, Djakarta: Balai Pustaka, 1961.

Ali, Moh., *Peranan Bangsa Indonesia di Asia Tenggara*, Djakarta: Bhratara, 1960.

Astawa, A.A. Gede Oka, "Candi di Bali: Kajian Arkeologi", Forum Arkeologi, no. 1, 2006, hlm. 94-111.

Atja, *Tjarita Parahijangan: Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi.* Bandung: Jajasan Kebudajaan Nusalarang, 1968.

----, *Ratu Pakuan: Tjeritera Sunda-Kuno dari Lereng Tjikuraj*. Bandung: Lembaga Bahasa dan Sedjarah, 1970.

----, *Purwaka Tjaruban Nagari (Sedjarah Muladjadi Tjirebon),* Djakarta: Ikatan Karyawan Museum, 1972.

----, *Sanghyang Siksakanda ng Karesian* (Transkripsi), Bandung, 1973.

Ayatrohaédi, "Tom Harrison and Stanley J.O'Connor, *Gold and Megalithic Activity in Prehistoric and Recent West Borneo"* (Boekbesprekingen), *BKI*, 130, 1974, hlm.185

Ayatrohaédi, "Niskalawastukancana (1348–1475): Raja Sunda Terbesar", dalam PIA IV, jilid IIa, 1986, hlm. 34.

Beal, S., "Some Remarks Respecting a Place Called Shi-li-fo-tsai Frequently Named in the Works of the Chinese Buddhist Pilgrim I-tsing, C.672", livre des marveilles de l'Inde par le Capitaine Borzorg bia sahriyar de Romhormoz, Traduit par Marcel Devic, teute arabe et notes par P.A. van der lith, Leiden, 1883–1886, hlm. 251–253.

Beal, S., "The Situation of the Country Called Shi-li-fo-tsai", NBG 24, 1886, I–V, bijlage I.

Bellwood, Peter, *Man's Conquest of the Pacific*, Auckland: Collins, 1978.

van Bemmelen, R.W., The Geology of Indonesia, The Hague: Government Printing Office, 1949.

Berg, C.C., "Kidung Sunda. Inleiding, Tekst, Vertalingen aanteekeningen", *BKI*, 83, 1927, hlm. 1–161.

----, *Kidung Sundayana (Inleiding tot de Studie van het Oud-Javaansch),* Surakarta: De Bliksem, 1928.

----, "Rangga Lawe, Middeljavaansche Historische Roman", *Bibliotheca Javanica*, 1. Weltevreden, 1930.

----, "Een nieuwe redactie van de roman van Raden Wijaya", *BKI*, 88, 1931, hlm. 1–48.

----, "Kidung Harsa-Wijaya", *BKI*, 88, 1931, hlm. 49–238.

----, "Opmerkingen over de chronologie van de oudste geschiedenis van Maja-Pahit en over Krtarajasajayawardhana's regeering", *BKI*, 97, 1938, hlm. 135-240.

----, "Arjunawiwaha. Erlangga's levensloop en bruiloftslied?", *BKI*, 97, 1938, hlm. 52–94.

----, "De Geschiedenis van Pril-Majapahit: I. Het Mysterie van de vier Dochters van Krtanagara", II, *Indonesie*, 4, 1950–1951, hlm. 481–520.

----, "De Evolutie der Javaansche Geschiedschrijving", *MKAWL*, XIV(2), 1951, hlm. 5–26.

----, "De Sadeng –oorlog en de Mythe van Groot Majapahit", Indonesie, 5, 1951–1952, hlm. 385–422.

----, "Herkomst, Vorm en Functie der Middeljavaanse Rijksdeelingstheorie", MKA WL, LIX(1), 1953, hlm. 1–306.

----, "Javanese Historiography r A Synopsis of Its Evolution", dalam D.G.E. Hall (ed.), *Historians of South East Asia*, London: Oxford University Press, 1961, hlm. 13–23.

----, "Het rijk van de vijfvoudig Buddha". VKNAW afd. *Letterkunde*, nieuw reeks, LXIX, no. 1, 1962.

----, "The Javanese Picture of the Past", dalam Soedjatmoko et.al. (eds.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca: Cornell University Press, 1965, hlm. 87–118.

van den Berg, E.J, De Val van Sora. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1939 (*VKI*, 2).

Bernet Kempers, A.J., Bali Purbakala, terjemahan R. Soekmono, Seri Tjandi no. 2, 1956.

----, Ancient Indonesian Art, Amsterdam: C.P.J. van der Peet, Cambridge/ Massachusetts: Harvard University Press, 1959.

----, *Ageless Borobudur: Buddhist Mystery in Stone, Decay and Restoration, Mendut and Pawon, Folklife in Ancient Java*. Wassenaar: Servire, 1976.

----, "The Kettledrum of Southeast Asia", Modern Quarternary Research in Southeast Asia, vol. X, 1988.

----, *Monumental Bali*, Introduction to Balinese Archaeology & Guide to the Monuments, Berkeley, Singapore: Periplus Editions, 1989.

Blom, Jessy, The Antiquities of Singasari. Leiden: Burgersdijk & Niermans – Templum Solomonis, 1939.

Boechari, "An Inscribed Linga from Rambianak", *BEFEO*, XLIX, 1957, hlm. 405–408.

----, "*Astabrata*", Medan Bahasa, VIII no. 5, Jakarta. 1958.

----, "A date bronze bell from Pekalongan (North Central Java)", ASAIHL Seminar on Fine Arts of Southeast Asia, Bangkok, 1964, hlm. 121–131.

----, "Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka sebagai Ahli Epigrafi Pelopor Bangsa Indonesia", *MISI*, II (2), 1964, hlm. 119–125.

----, "Epigraphy and Indonesian Historiography", dalam Soedjatmoko *et.al.* (eds.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, Ithaca: Cornell University Press, 1965, hlm. 47–73.

----, "Rakryan Mahamantri i hino Çri Sanggramawijaya Dharmaprasadottunggadewi", *LKPIN Kedua*, 1962, Seksi D (Seksi Sastra dan Budaya). Djakarta: Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1965, hlm. 53–84.

----, "Preliminary report on the discovery of an Old Malay inscription at Sojomerto", *MISI*, III, no. 2, Oktober 1966, hlm. 241–251.

----, "Rakryan Mahamantri i Hino: A Study on the Highest Court Dignitary of Ancient Java up to the 13th Century A.D.", *Journal of the Historical Society*, Singapore: University of Singapore, 1967/1968. Diterbitkan kembali dalam Publikasi Ilmiah no. 2. Fakultas Sastra UI, 1975/1976, hlm. 61–111.

----, "Çri Maharaja Mapañji Garasakan: A New Evidence on the Problem of Airlangga's Partition of His Kingdom", *MISI*, IV (1–2), 1968, hlm. 1–26.

----, "Epigraphic evidence on Kingship in Ancient Java", *MISI*, V (1), 1973, hlm. 119–125.

----, "Ken Anrok Anak Tunggul Ametun?", Berita Antropologi, VII(20), 1975, hlm. 56–69.

----, "Some Considerations of the Problem of the Shift of Mataram's Center of Government from Central to East Java in the 10th Century A.D.", *Bulletin of the Research Center of Archaeology of Indonesia*, 10, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1976.

----, "Epigrafi dan Sejarah Indonesia", *Majalah Arkeologi*, I(2), 1977, hlm. 1–38.

----, "Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuna ditinjau dari Segi Sejarah dan Arkeologi", *Majalah Arkeologi*, I (1), 1977, hlm. 5–30.

----, "An Old Malay Inscription of Sriwijaya at Palas Pasemah (South Lampung)", *Pra Seminar Penelitian Sriwijaya*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1979, hlm. 19–42.

----, "Report on Research on Sriwijaya", *Final Report, SPAFA Workshop on Research on Sriwijaya*, Bangkok, SPAFA, 1979, appendiks 3a.

----, "The Inscription of Mula-Malurun,: A New Evidence on the Historicity of Ken Anrok", *Majalah Arkeologi;* III(1–2), 1980. hlm. 55–70.

----, *Prasasti Koleksi Museum Nasional,* Jilid I, Jakarta: Proyek Pembangunan Museum Nasional, 1985/1986.

Boisselier, J., "Le Visnu de Tjibuaja (Java Occidental) et la Statuaire de Sud-Est Asiatique", *Artibus Asiae,* XXII(3), 1959, hlm. 210–216.

Bosch, F.D.K., "Het Heiligdom te Simping", *OV*, 1916, hlm. 51–55.

----, "De Sanskrit inscriptie op den steen van Dinaja", *TBG*, LVII, 1916, hlm. 410–444.

----, "De Bijzetting van Koning Krtanagara te Sagala", *OV*, 1917, hlm. 135–142.

----, "Een Koperenplaat van 848 Çaka", *OV*, 1917, hlm. 88–98.

----, "Oorkonde van Trawoelan II–IV", *OV*, 1918, hlm. 169–174.

----, "Tjandi Djawi een Graftempel?", *OV*, 1918, hlm. 156–163.

----, "De Oorkonde van Sendang Sedati", *OV*, 1922, hlm. 22–27.

----, "De Sanskrit-inscriptie op de steen van Dinaja", *OV*, 1923, hlm. 29–35.

----, "Het Lingga-heilingdom van Dinojo", *TBG*, LXIV, 1924, hlm. 227-286.

----, "De Oorkonde van Kembang Aroem", *OV*, 1925, hlm. 41–49.

----, "Een Koperen plaat uit het Sidoardjosche", *OV*, 1925, hlm. 50.

----, "Een Oorkonde van het grote klooster te Nalanda", *TBG*, LXV, 1925, hlm. 509–588.

----, "Oudheden in Koetei", *OV*, 1925, Bijlage G, hlm. 132–146.

----, "Transcriptie van een inscriptie uit Goenoeng Kidul", *OV*, 1926, hlm. 60.

----, "Het Bronzen Buddha-beeld van Celebes Westkust", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 495–513.

----, "The Problem of the Hindu Colonization of Indonesia", *Selected Studies in Indonesian Archaelogy*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961, hlm. 1–22.

----, "The Last of the Pandavas", *Selected Studies in Indonesian Archaeology*, The Hague, 1961.

Brandes, J.L.A. "Tjandi Djago", *Archaeologische Onderzoek op Java en Madoera*, I. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff; Batavia: Albrecht & Co., 1904.

----, "Beschrijving van Tjandi Singasari en de Wolkentooneelen van Panataran", *Archaeologische Onderzoek op Java en Madoera*, II, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff; Batavia: Albrecht & Co., 1909.

----, "De bronzen platen van Sembiran (Boeleleng) Bali", *TBG*, XXXVII, hlm. 16–56.

----, "Pararaton (Ken Arok) of het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit", *VBG*, LXII, 1920 (Tweede druk, bewerkt door Prof. Dr. N.J. Krom met medewerking van Prof. Mr. Dr. J.C.G. Jonker, H. Kraemer, en R.Ng. Poerbatjaraka).

----, "a letter from D.J. Brandes on the Kerimun inscription", *JMBRAS* 10, 1932, hlm. 21–22

----, "Een Jayapatra of acte ven eene rechterlijke uitspraak can Caka 849", *TBG*, XXXII, 1889, hlm. 93–148.

----, "Oud Javaansche Oorkonden", Nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, uitgegeven door Dr. N.J. Krom, *VBG*, LX, 1913.

----,"Een nagari-opschirft, gevonden tusschen Kalasan en Prambanan", *TBG*, XXXI, 1886, hlm. 240–260.

Budiastra, Putu, dan Wayan Widia, *Stupika Tanah Liat Koleksi Museum Bali*, Denpasar: Museum Bali, 1977/78.

Buhler, G., *The Law of Manu*, New York: Dover Publications Inc

Bulcke, C., "The three recensions of the Valmiki Ramayana", *JOR*, vol. 17, 1947.

Chavannes, E., *Memoire compose a l'epoque de grande dynastie T'ang sur les religieux eminent qui allerent chercher le loi dans les pays d'occident, par I-tsing*, Paris, 1894.

Chen, Kenneth, *Buddhism in China*, Princeton: Princeton University Press, 1972.

van der Chijs, J.A., De *Numismatische Verzameling*. Batavia: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

Chhabra, B.Ch., "Expansion of Indo-Aryan Culture", *JA*SB, 33, 1935 (terbit pula dalam bentuk buku: *Expansion of Indo-Aryan Culture during Pallava Rule*, New Delhi: Munshi Ram Manohar Lai, 1965).

----, "Three more yupa inscriptions of King Mulavarman from Kutei (East Borneo)", *JGIS*, XII, 1945, hlm. 14–39 (diterbitkan pula dalam *TBG*, LXXXIII, 1949, hlm. 370–374).

Christie, A.H., "The Name K'un-lun as an ethnic term", Comptes Rendus du XXXIIe *Congress International des Orientalis*, Cambridges, 1954.

Christie, Jan Wisseman, Pattern of Trade in Western Indonesia: Ninth through Thirteenth Centuries, A.D., vol. I, disertasi School of Oriental and African Studies University of London, 1982

Clark, Grahame, *Archaeology and Society*. London: Methuen, 1960.

de Casparis, J.G., "Oorkonde uit het Singosarische (Midden 14e eeuw A.D.)", *INI*, afl. 1, 1940, hlm. 50–61.

----, "Nogmaals de Sanskrit-inscriptie op densteen van Dinojo", *TAG*, LXXXI, 1949, hlm. 449–513.

----, "Short Inscriptions from Tjandi Plaosan Lor", *Berita Dinas Purbakala*, no. 4, 1950.

----, *Inscripties uit de Cailendra-tijd*. Prasasti Indonesia I, Bandung: A.C. Nix & Co., 1950.

----, *Selected inscriptions from 7th to the 9th century. A.D. Prasasti Indonesia II*, Bandung: Masa Baru, 1956.

----, *Airlangga*, Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia Lama dan Bahasa Sanskerta pada Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Universitas Indonesia di Malang yang diadakan di Malang pada hari Sabtu tanggal 26 April 1958, Surabaya: Penerbitan Universitas, 1958.

----, "Historical Writing on Indonesia (Early Period)", dalam D.G.E. Hall (ed.), *Historians of South East Asia*. London: Oxford University Press, 1961, hlm. 121–163.

----, "Note on Cultural relation between Ceylon and Jawa", *Artibus Asiae*, XXIV, 1961, hlm. 241–248.

----, *Indonesian Palaeography*, Leiden/Köln: E.J. Brill, 1975.

----, "Where was Pu Sindok's Capital Situated?" dalam H.I.R. Hinzler (ed) Studies in South and Southeast Asia Archaeology, vol. 2, Leiden: Koentji Press, 1988, hlm. 39–52.

Coedès, G., "Le Royaume de Çrivijaya", *BEFEO*, XVIII, 1918, hlm. 1–36.

----, "A propos de la chute du royaume de Çrivijaya", *BKI*, 83, 1927, hlm. 468–472.

----, "Les inscriptions malaises de Çrivijaya", *BEFEO*, XXX, 1930, hlm. 29–80.

----, "On the Origin of the Çailendras of Indonesia", *JGIS*, 1, 1934, hlm. 66–70.

----, "A propos d'une nouvelle thèorie sur le site de Çrivijaya", *JMBRAS*, XIV, 1936, hlm. 1–9.

----, *Les Etat Hindouisès d'Indochine et d'Indonèsie*, Paris: E. de Boccard, 1948.

----, "Le Çailendras, tueur des hèros ennemis", *Bingkisan Budi,* 1950, hlm. 58–70.

----, "L'inscription de la stèle de Ligor, ètat prèsent de son interpretation", *Oriens Extremus*, VI, 1959, hlm. 42-48.

----, "A possible interpretation of the inscription at Kedukan Bukit (Palembang)", dalam John Bastin and R. Roolvink (eds.), *Malayan and Indonesian Studies*, Oxford, 1964, hlm. 24–32.

----, *The Indianized States of Southeast Asia*. Edited by Walter F. Vella, translated by Susan Brown Cowing. Kuala Lumpur/Singapore: University of Malaya Press, 1968.

Cohen Stuart, A.B., *Kawi Oorkonden in facsimile, met inleiding en transcriptie,* 2 vols, Leiden, 1875.

Collier, Wiliam L., et al., "Spontaneous Migration in the Coastal Wetlands", dalam Muriel Charras & Mare Pain (eds), *Spontaneous Setteements in Indonesia*, Jakarta: Departemen Transmigrasi, 1993.

Cortesão, Armando, *The Suma Oriental of Tome' Pires and the Book of Francisco Rodrigues,* Translated from the Portuguese MS in the Bibliothèque de la Chambre des Dèputès, Paris, and edited by Armando Cortesão, London: The Hakluyt Society, 1944, 2 jilid.

Crucq, K.C., "Epigraphische Aantekeningen I", *OV*, 1929, hlm. 271–272.

ten Dam, H.A., "Verkenningen Rondom Pajajaran", Indonesië, 10 (4), 1957, hlm. 290–310.

Damais, L-C., "Epigrafische Aantekeningen, I, Lokapala-Kayuwangi", *TBG*, LXXXIII, 1949, hlm. 1–16.

----, "Epigrafische Aantekeningen, II. Kameçwara Bameçwara", *TBG*, LXXXIII, 1949, hlm. 6–10; III, Srngga-Kertajaya, hlm. 10–15.

----, "Epigrafische Aantekeningen, VIII, Centraal gezaag of Koninkrijkjes?", *TBG*, LXXXIII, 1949, hlm. 22–26.

----, "Études Balinais: I. La Colonette de Sanur", *BEFEO*, XLIV, 1951, hlm. 121–128.

----, "Études d'Épigraphie Indonèsienne: II. La Date des Inscription Datèes de l'Indonèsie", *BEFEO*, XLV, 1951, hlm. 42–63.

----, "Études d'Épigraphie Indonèsienne: III. Liste des Principales Inscriptions Datèes de l'Indonèsie", *BEFEO*, XLVI, 1952, hlm. 1–105.

----, "Étude d'Épigraphie Indonèsienne: IV. Discussion de la date des inscriptions", *BEFEO*, XLVII, 1955, hlm. 7–290.

----, "Une Trace de 1'Expedition de Dharmmawangsa à San- Fo-Ts'i?", dalam Zeki Velidi Togan (ed.), *Proceedings of the Twenty-second Congress of Orientalists held in Istambul, September 15th to 22nd*, 1953, vol. II, Communications, Leiden: E.J. Brill, 1957, hlm. 323–324 (Summary).

----, Bibliographie Indonesienne: II. Prof. Dr. Poerbatjaraka, *Riwajat Indonesia I", BEFEO*, XLVIII, 1957, hlm. 353–415.

----, "Études d'Épigraphie Indonèsienne: V. Dates de Manuscript et Documents divers d'Java, Bali et Lombok", *BEFEO*, XLIX (1), 1958, hlm. 1–257.

----, "Notices Bibliographique-ouvages d'Études l'Indonésienne", *BEFEO*, XLIX, 1959, hlm. 679–702.

----, "Études Sino-Indonesiennes: I. Quelques Titres Javanais de 1'Époque des Song", *BEFEO*, L, 1960, hlm. 1–29.

----, "Études Soumatranaises: I. La Date de l'Inscription de Hujung Langit ('Bawang')", *BEFEO*, L (2), 1962, hlm, 275–288.

----, "Le nom de la deite tantrique de 1214 Saka", *BEFEO*, L, 1962, hlm. 407–416.

----, "Études Sino-Indonesiennes: III. La Transcription Chinoise Ho-Ling Comme Dèsignation de Java", *BEFEO*, LII, 1964, hlm. 93–141.

----, Bibliographie Indonesienne: XI. Les Publications épigraphiques du Service Archeologique de l'Indonésie", *BEFEO*, LIV, 1968, hlm. 295-521.

----, "Études Javanaises: III. A Propos des couleurs symboliques des points cardinaux", *BEFEO*, LVI, 1969, hlm. 75–118.

----, Rèpertoire Onomastique de l'Épigraphie Javannaise (Jusqu'a Pu Sindok Sri Isanawikrama Dharmmotungadewa): *Étude d'Épigraphie Indonésienne, Paris, Publications de l'École Française d'Extrême-Orient*, LXVI, 1970.

----, *Epigrafi dan Sejarah Nusantara. Pilihan Karangan Louis-Charles Damais,* Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1995.

Dames, M.L., *The Book of Duarte Barbosa*, An Account of the Countries Bordering on the Indian Ocean and their Inhabitants, written by Duarte Barbosa, and Completed about the year 1518 A.D. Edited and Anotated by Mansel Longworth Dames, London: The Hakluyt Society, 1918–1921, 2 jilid.

Danasasmita, Saleh, Bambang Sumadio dan Ayatrohaédi, "Kerajaan Sunda", dalam Sejarah Jawa Barat (naskah), 1975.

Darsa, Undang A. dan Edi S. Ekadjati, "Fragmen Carita Parahyangan dan Carita Parahyangan (Kropak 406)", *Sundalana,* 1, Bandung: Pusat Studi Sunda, 2003, hlm. 173–210.

Dinas Purbakala, *Laporan Tahunan Dinas Purbakala RI,* 1954, Djakarta, Dinas Purbakala RI, 1962.

Djafar, Hasan, "Tempat Kelahiran Ken Angrok", *Madjalah Perguruan Tinggi,* IV(4), 1971, hlm. 1–8.

Djafar, Hasan, "Girindrawarddhana: Raja-raja Majapahit Akhir", *Majalah Arkeologi,* 1(1), 1977, hlm. 42–52.

----, *Girindrawarddhana*: Beberapa Masalah Majapahit Akhir, Jakarta: Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, 1978 (Cetakan kedua).

----, "Berdirinya Kerajaan Majapahit", makalah pada *Simposium Peringatan 700 Tahun Majapahit.* Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Trawas, Mojokerto, 3–5 Juli 1993

----, "Pemukiman-Pemukiman Kuno di Daerah Jakarta dan Sekitarnya", *Diskusi Ilmiah Arkeologi IV*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1988, hlm. 1–20.

----, "Prasasti Huludayeuh", *Berkala Arkeologi*, tahun XIV, Edisi Khusus, 1994, hlm. 197–202.

Djajadiningrat, P.A. Hoesein, *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten: Bijdrage ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedschrijving.* (Proefschrift), Haarlem: Joh. Enschede en Zonen, 1913.

----, "Kanttekeningen bij het 'Javaansche Rijk Tjirebon in de eerste eeuwen van zijn bestaan", *BKI,* 113, 1957, hlm. 380–393.

Dumarçay, J., "Elements pour une Histoire Architecturale du Borobudur", *BEFEO,* LX, 1973, hlm. 139–150.

----, "Histoire Architecturale du Borobudur", *Memoires Archeologiques*, no. XII, Paris: EFEO, 1977.

Dunn, F.L. and D.F. Dunn, "Maritime Adaptation and Exploitation of Marine Resources in Sundaic Southeast Asian Prehistory", *Modern Quaternary Research in Southeast Asia 3*, 1977, hlm. 1–28.

Ekadjati, Edi S., *Kebudayaan Sunda. Zaman Pajajaran*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Jaya, 2005.

Eliade, Miercea, *The myth of the eternal return*, or Cosmos and History, Bollingen series XLVI, 1971.

Elliot, W, "The Edifice formely known as the Chinese of Jana Pagoda at Negapatnam", *Indian Antiquity*, VII, 1878, hlm. 224 dst.

Endang Sri Hardiati, Suroso, M. Suhadi, "Laporan Penelitian Situs Kepung, Kediri, Jawa Timur", *Berita Penelitian Arkeologi*, no. 40, Jakarta, 1990.

----, Arca Tidak Beratribut Dewa di Bali. Sebuah Kajian Ikonografi da Fungsional, disertasi, Universitas Indonesia, 1993.

----, "Candi Borobudur sebagai Tempat Berziarah", *Warisan Budaya Bersama*, 2005, hlm. 49–51.

van Erp, Th., "Voorstellingen van vaartuige op de relief van Boroboedoer", *NION*, 8, 1923–1924, hlm. 227–255.

Eringa, F.S., *Loetoeng Kasaroeng: Een Mythologisch Verhaal uit West-Java*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1949 (*VKI*, 8).

Ferdinandus, Peter, E.J., "Recent Archaeological Exavations in Blandongan Site, Batujaya Karawang, West Java". *Aspects of Indonesian Archaeology*, no. 25. Jakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Bagian Proyek Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, 2002.

----, "Situs Batu Kalde di Pangandaran, Jawa Barat". *Monumen Karya Persembahan untuk Prof. Dr. R. Soekmono*, Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1990, hlm. 285–301.

Ferrand, G., *Relations des voyages et textes geographiques arabes, persans et turks relatif-al 'Extrême-Orient du VIIIe au XVIIIe siècles*, 2 jilid, Paris, 1911–1914.

Ferrand, G., "Le K'ouen-louen et les anciennes navigation interocéaniques dans les mers du sud",JA, N.C. Serie, XIII, 1919, hlm. 229–333, 431–492; XIV, 1919, hlm. 6–68, 201–241.

----, "L'empire Sumatranaise de Çrivijaya", *JA*, CCI, 1922, hlm. 1–104, 161–246.

----, "Notes de geographique orientale", *JA*, CCII, 1923, hlm. 1–35.

----, "Quatre textes épigraphiques Malayo-sanscrits de Sumatra et Banka", *JA*, CCXXI, 1932.

Finot, L., "Notes d'Épigraphie V", *BEFEO*, III, 1903, hlm. 640–642.

Fokker, A.A., *Wirataparwa. Op nieuw uitgegeven, vertaald en toegelicht*, I, 's-Gravenhage, 1948.

Furukawa, Hisao, *Coastal Wetlands of Indonesia: Environment, Subsistence and Exploitation*, Kyoto: Kyoto University Press, 1994.

Ginarsa, Ktut, "Prasasti Baru raja Marakata", *BB*, IX (1.2), 1961, hlm. 3–17.

----, "Prasasti Baru Raja Ragajaya 6 April 1155", *MISI*, V (1), 1973, hlm. 27–84.

----, "Ekspedisi Gajah Mada ke Bali", *MISI*, VII (1), 1977, hlm. 27–65.

Gonda, J., "Het oud-Javaansche Brahmanda-Purana. Proza tekst en kakawin", *Bibliotheca Javanica*, no. 5 dan no. 6, Bandoeng, 1932–1933.

----, "Agastyaparwa, uitgegeven, gecommentarieerd en vertaald", *BKI*, 90, 1933, hlm. 329–419; *BKI*, 92, 1935, hlm. 389–458; *BKI*, 94, 1936, hlm. 223–285.

----, "Het Oud-Javaansche Bhismaparwa", *Bibliotheca Javanica* no. 7, Bandoeng, 1936.

----, "Aanteekeningen op het Bhismaparwa", *Bibliotheca Javanica* no. 7a, Bandoeng, 1937.

----, *Twenty five Sanskrit inscriptions*, 1948.

----, *Sanskrit in Indonesia*, Nagpur: Sarasvati Vihara, 1952.

Goris, R., "De Oude-Javansche inscripties uit het Sri-Wedari museum te Soerakarta", *OV*, 1928, hlm. 63–70.

----, "Eenige nieuwe bronsplaten op Bali gevonden", *OV*, 1929, hlm. 73–78.

----, "De eenheid der Mataramsche dynastie", *FBG*, I, 1929, hlm. 202–206.

----, "Secten op Bali", *Mededeelingen*, 1931, hlm. 37–53, terjemahan dalam bahasa Indonesia Sekte-sekte di Bali, seri terjemahan KITLV–LIPI, no. 44, Bhratara, Jakarta, 1974.

----, "Het huidig lontarbezit der Kirtya (tot Mei 1934)", *Med. v.d. Kirtya Liefrink – van der Tuuk*, afl. 4, Singaradja-Solo, 1935, hlm. iv–x, 1–86.

----, "Enkele mededeelingen nopens de oorkonde gesteld in het Oud-Balisch", *Djawa*, 16, 1936, hlm. 88–89.

----, "Enkele historische en sociologische gegevens uit de Balische Oorkonden", *TBG*, LXXXI, 1941, hlm. 279–294.

----, *Sedjarah Bali Kuna*, Singaradja, 1948.

----, "Dinasti Warmadewa dan Dharmawangça di pulau Bali", *BB*, V (3), 1957, hlm. 18–31.

----, "Radja-radja Bali sejak kerajaan Anak Wungçu sampai kemenangan Gajah Mada", *BB*, VI (4), 1958, hlm. 3–10.

Gosh, Manomohan, "On the source of the Old-Javanese Ramayana Kakawin" *JGIS*, III, 1936, hlm. 113–117.

de Graaf, H.J., "Tome Pires Suma Oriental" en het tijdperk van godsdienstovergang op Java", *BKI*, 108, 1952, hlm. 132–171

----, Th. G. Th. Pigeaud, D*e Eerste Moslimse Vorstendommen op Java. Studien over de Staatkundige Geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.* 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1974, *VKI*, 69.

Groeneveldt, W.P., "Notes on the Malay Archipelago and Malaca compiled from Chinese Sources", *VBG*, 39, 1879 (cetak ulang: *Historical Notes on Indonesia and Malaya compiled from Chinese Sources*. Djakarta: Bhratara, 1960).

Guilland, Dominique (ed.), *Menyelusuri Sungai, Merunut Waktu*. Penelitian Arkeologi di Sumatra Selatan. Jakarta: Puslitbang, Arkenas, IRD, EFEO, 2006.

de Haan, F., *Priangan: De Priangerregenschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*, II. Batavia: G. Kolff, 1911.

Hageman, J.C., "Geschiedenis der Soenda-landen", *TBG*, XVI, 1867, hlm. 193–251.

Hall, D.G.E., *A History of South-East Asia*. London: MacMillan; New York: St Martin"s Press, 1968, Third Edition.

Hardjowardojo, R. Pitono, "Tentang-Tempat Kelahiran Ken Angrok", *MISI*, II(2), 1964, hlm. 137–140.

----, *Pararaton*, Djakarta: Bhratara, 1965.

Harrison, Tom and Stanley J.O'Connor, *Gold and Megalithic Activity in Prehistoric and Recent West Borneo*, Ithaca: Cornell University Press, 1970 (Data Paper, 77).

van Heekeren, H.R., *The Stone Age of Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1972, Second Revised Edition.

----, "Proto-historic sarcophagi on Bali", *Berita Dinas Purbakala*, 1955

Heger, F., *Alte Metalltrommeln aus Sudöst-Asien*, 2 vol. Leipzig, 1902.

van der Heide, G.J., "De Samenstelling van Hindoe-vaartuigen. Uitgewerkt naar beeldwerken van den Borobudur", *NION*, 12, 1928, hlm. 343–357.

von Heine Geldern, R., "Wetbild und Bauform in Südostasien", *WBKKA*, IV, 1930, hlm. 28–78.

----, "Urcheimat und Frühste Wanderungen der Austronesier", *Anthropos*, XXVII, 1932, hlm. 543–619.

----, "Conception of State and Kingship in Southeast Asia", *The Fareastern Quarterly*, II, 1942, hlm. 15–30.

----, "Prehistoric Research in the Netherlands in the Netherlands Indies", dalam Peter Honig (ed.), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*, New York, 1945, hlm. 129–167.

----, *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara.* Terjemahan oleh Deliar Noer, Tjetakan ke-2. Djakarta: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1972.

----, "Conception of State and Kingship in Southeast Asia", *The Fareastern Quarterly*, II, 1942, hlm. 15–30.

----, *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Radja di Asia Tenggara,* Terdjemahan Deliar Noer. Tjetakan ke-2. Djakarta: [Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan], 1972.

Higham, C., *The Archaeology of Mainland Southeast Asia; From 10.000 BC to the Fall of Angkor,* Cambridge University Press, 1989

Hirth, F. dan W.W. *Rockhill, Chau Ju-kua, His Work on Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, entitled 'Chu Fan Chi ;* St. Petersburg, 1911 (reprint: New York: Paragon, 1966; Taipei, 1967).

Holle, K.F., "Vlugtig bericht omtrent enige lontar-handschriften, afkomstig uit de Soendalanden, door Radhen Saleh aan het Bataviaasch Genootschap van K. en W. ten geschenke gegeven met toepassing of de inscripties van Kawali", *TBG*, XVI, 1867, hlm. 450–491.

----, "Voorlopig bericht omtrent vijf koperen plaatjes, door Raden Saleh gevonden in een offerhuisje te kampong-Kebantenan, onder Bekasih, p.m. 15 paal van Batavia", *TBG*, XVI, 1867, hlm. 559–567.

----, "Beschreven metalen platjes van desa Pesindon", *TBG*, XXV, 1879, hlm. 464.

----, "De Batoe Toelis te Buitenzorg", *TBG*, XXVII, 1882, hlm. 483–488.

Hooykaas, C., "The Old-Javanese Ramayana Kakawin", *VKI*, XVI, 1955.

Hourani, G.F., *Arab seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval times*, New Jersey: Princeton, 1951.

Hultzch, E., *South Indian Inscriptions*, II, Madras, 1891.

Jones, A.H.M., *The Roman Economy*, Oxford University Press, 1974.

Jonker, J.C. G., Een Oudjavaansch Wetboek. Vergeleken met Indische rechtsbronnen, Disertasi, Leiden, 1885.

Juynboll, H.H., *Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata*, Leiden, 1893.

----, *Adiparwa*, Den Haag, 1906.

----, *Wirataparwa*, Den Haag, 1912.

----, "De verhouding van het Oudjavaansche Udyogaparwa tot zijn Sanskrt Origineel", *BKI*, 69, 1914, hlm. 219–313.

Kats, J., *Sang Hyang Kamahayanikan*, Oud-Javaansche tekst met inleiding, vertaling en aanteekeningen, 's-Gravenhage: M. Nijhoff 1910.

Kern, H., "Taalkundige Gegevenster bepaling van het stamland der Maleisch-Polynesische Volken", *VG*, VI, 1917, hlm. 105–120.

----, "Het Sanskrit op een steen afkomstig (van Pereng), uit (de buurt van) Prambanan (785 Çaka), *VG*, VI, 1917, hlm. 277–286.

----, "Beschreven metalen plaatjes van Pesindon (Bagelen) (826 Çaka)", *VG*, VII, 1917, hlm. 11–15.

----, "De Steen van den berg Pinanggungan (Surabaya), thans in 't Indian Museum te Calcutta", *VG*, VII, 1917, hlm. 83–114.

----, "De Sanskrit-inscriptie van Canggal (Kedu) uit 654 Çaka, *VG*, VII, 1917, hlm. 115–128.

Kern, R.A., "Joartan wedergevonden?", *BKI*, 102, 1943, hlm. 539-553.

Kern, R.A., "Pati Unus en Sunda", *BKI*, 108, 1952, hlm. 124–131.

Kern, R.A., "Het Javaansche Rijk Tjerbon in de Eerste Eeuwen van Zijn Bestaan", *BKI*, 113, 1957, hlm. 191–200.

----, "Het Sanskrit-inschrift van Tuk Mas (Dakawu, res. Kedu; ±500 AD), *VG*, VII, 1917, hlm. 199–204.

----, "De Sanskrit-inscriptie van het Mahaksobhya-beeld te Simpang (stad Surabaya, 1211 Çaka), *VG*, VII, 1917, hlm. 187–197.

K'o Tsung-Yüan, "Studies on the Sacral Kingship in Early Southeast Asia", *Journal of the Historical Society University of Singapore*, 1967/1968, hlm. 21–45.

Krom, N.J. "De inscriptie van Nglawang", *TBG*, LIII, 1911, hlm. 411–434.

----, "Sapta Prabhu", *TBG*, LVI, 1914, hlm. 195–196.

----, "Tada en Gajah Mada", *TBG*, LVI, 1914, hlm. 252–256.

----, "Tapasi", *TBG*, LVI, 1914, hlm. 318–320.

----, "Inventaries der Hindoe-Oudheden", *ROD* 1914, Batavia: Albrecht & Co., 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1915.

----, "Een Sumatransche inscriptie van koning Krtanagara", *VMKNAW*, afd., Letterkunde, 5e serie, II, 1916, hlm. 306–339.

----,"Epigrafische Bijdragen, II, De Inscriptie van Pereng", *BKI*, 75, 1919, hlm. 8–24.

----, *De Sumatraansche periode der Javaansche geschiedenis*, Leiden, 1919.

----, "De Koperplaaten van Batoer", *TBG*, LVII, 1919, hlm. 161–166.

----, *Inleiding tot de Hindoe Javaansche Kunst*, I–III, Tweede herziene druk, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1923.

----, "De Inscriptie van Karang Brahi", *TBG*, LIX, 1923, hlm. 426–431.

----, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, tweede herziene druk, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931.

----, "De Hindoe-Javaansche Tijd", di dalam: F.W. Stapel (ed.), *Geschiedenis van Nederlandsch-Indië*, I, Amsterdam: Joost van den Vondel, 1938, hlm. 119–298.

----, "De Heiligdomen van Palembang", *MKAWL*, I, 1938, hlm. 392–423.

----, *Zaman Hindu*, Diterdjemahkan oleh Arief Effendi, Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1954.

Kulke, Hermann, *The Devaraja Cult*, Data paper no. 108, Southeast Asia Program, Dept. of Asian Studies, Cornell University, 1978.

Kunst, Jaap, *Hindu Javanese Musical Instruments*, translation series no. 12, KITLV, The Hague, M. Nijhoff, 1968.

Kusen, "Raja-raja Mataram Kuno dari Sanjaya sampai Balitung. Sebuah Rekonstruksi Berdasarkan Prasasti Wanua Tengah III", *Berkala Arkeologi*, Tahun XIV, Edisi Khusus, 1994, hlm. 82–94.

Leirissa, R.Z., "Dari 'Sunda Kelapa ke Jayakarta", dalam Abdurachman Surjomihardjo (ed.), *Beberapa Segi Sejarah Masyarakat Budaya Jakarta*, Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta, 1977, hlm. 14–31.

van Leur, J.C., *Indonesian Trade and Society*. The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1955.

van Leur, J.C., *Indonesian Trade and Society*, Essays in Asian Social and Economic History, 2nd. Edition, Bandung: Sumur Bandung, 1960

Lévi, Sylvain, "Ptolemée, le Nidessa et la Bohatkathã", *Études Asiatiques*, II, Publications d'École Française d"Extrême-Orient, XIX–XXII, Paris, G. van Oest, 1925.

----, "K'ouen-louen et Dvipantara", *BKI*, 88, 1931, hlm. 621–627.

van Liere, W.J., "Traditional Water Management in the Lower Mekong Basin", *World Archaeology*, Vol II, No. 3, Southampton: The Camelot Press Ltd., 1980, hlm. 265–280.

Linton, Ralph, *The Tree of Culture*, 1972.

Magetsari, N., Pemujaan Tathagata di Jawa pada Abad Sembilan, disertasi, Universitas Indonesia, 1982.

Majumdar, R.C., "Les rois Çailendra de Suvarnadvipa', *BEFEO*, XXXIII, 1933, hlm. 121–141.

----, "The Çailendra empire (up to the end of the tenth century A.D.)", *JGIS*, I, 1934, hlm. 1–27.

----, *Ancient Indian Colonies in the Far East*, -II, Suvarnadvipa, Part I Political History, Dacca, 1937.

----, *"The Overseas Expeditions of King Rajendra Cola"*, Artibus Asiae, XXIV, 1962, hlm. 338r342.

Malleret, Louis, *"L'Archaeologique du Delta du Mekong" PEFEO*, vol. XLII. Paris: École Française d'Extrême-Orient, 1969.

Manguin ,P. Yves, *Le Portugais sur les cote du Viet-nam et du Champa*, Paris : École Française d"*Extrême-Orient*, 1972.

----, *The Southeast Asian Trading Ship: An Historical Approach*, 1972.

van der Meulen, W.J., "Tjarita Parahijangan dan Rahijang Sandjaja", *Basis*, XV, 1966, hlm. 161-170, 193-202, 277–282, 307–313.

Miksic, John N., "Archaeology and Paleogeography in the Straits of Malacca", dalam Karl Hutterer (eds.) *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia: Perspective from Prehistory, History, and Ethnography*, Ann Arbor: Michigan University Press, 1977.

Moendardjito, "Laporan Penelitian Bowongan", Konsorsium Sastra dan Filsafat, Jakarta: FSUI, 1976.

Moens, J.L., "Het Buddhisme op Java en Sumatra in zijn laatste bloeiperiode", *TBG*, LXIV, 1924, hlm. 521–579.

----, "Het Berlijnsche Ardhanari-beeld en de bijzettingbeelden van Krtanagara", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 123–150.

----, "Çrivijaya, Yava en Kataha", *TBG*, LXXVII, 1937, hlm. 317–487 (terjemahan dalam bahasa Inggris oleh R.J. de Touché, di dalam *JMBRAS*, XVII, 1940), hlm. 1–108.

----, "Was Purnawarman van Taruma een Saura?", *TBG*, LXXX, 1940, hlm. 78–109.

----, "Loro Djonggrang en Prambanan. Van een sprookje dat verkelijkheid was", *De Ronde Tafel*. Coordineerd Social-Economisch, Cultureel en Politiek Weekblad, 2e Jaargaan, no. 48, 31 Juli 1948.

----, "De Stamboom van Erlangga", *TBG*, LXXXIV, 1950, hlm. 110–158.

----, "Wisnuwarddhana, Radja Singhasari dan Kaum Keluarga Majapahit", *Bahasa dan Budaja*, II(6), 1954, hlm. 3–30; III(1), 1954, hlm. 3–37.

----, "Wisnuwarddhana vorst van Singhasari en zijn Madjapahitse santanapratisantana", *TBG*, LXXXV, 1955, hlm. 365–436.

----, *Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam masa kejayaannya terakhir.* Jakarta: Bhratara, 1974 (Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda, 37).

Monier-Williams, Sir Monier, *A Sanskrit-English Dictionary*, Oxford: The Clarendon Press, 1889.

Mulia, Rumbi, The Ancient Kingdom of Panai and the ruins of Padang Lawas (North Sumatra). *Bulletin of the Research Centre of Archaeology of Indonesia*, 14, 1980, Jakarta.

Muusses, Martha A., "Singhawikramawarddhana", *FBG*, II, 1929, hlm. 207–214.

van Naerssen, F.H., "De Saptopapati. Naar aanleiding van een teksverbetering in den Nagarakrtagama", *BKI*, 90, 1933, hlm. 239–258.

----, "Twee Koperen Oorkonden van Balitung in het Koloniaal Instituut te Amsterdam", *BKI*, 95, 1937, hlm. 441–461.

----, *Oud-Javaansche Oorkonden in Duitsche en Deensche Verzamelingen,* disertasi, Leiden, 1941.

----, "De Astadasawyawahara in het Oud-Javaansch", *BKI*, 100, 1941, hlm. 357–376. Terjemahan dalam bahasa Inggris dengan judul "The Astadasawyawahara in Old Javanese", *JGIS*, vol. XV, 1956.

----, "The Çailendra Interegnun", *India Antiqua*, 1947, hlm. 249–253.

----, "Some aspect of the Hindu-Javanese Kraton", *JOSA*, 2, 1963, hlm. 14–19.

----, *The Economic and Administrative history of early Indonesia, Handbuch der Orientalistik*, 7ter Band, Leiden/Köln, E.J. Brill, 1977.

Nastiti, Titi Surti dkk., *Tiga Prasasti dari Masa Balitung*, Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1982.

Nilakanta Sastri, K.A., "A Tamil merchant-guild in Sumatra", *TBG*, LXXVII, 1932, hlm. 314–327.

----, "Origin of the Çailendras", *TBG*, LXXV, 1935, hlm. 605-611.

----, *The Colas*, 2 jilid, Madras, 1935–1937.

----, "Siddhayatra", *JGIS*, IV, 1937, hlm. 128–136.

----, "Kataha", *JGIS*, V, 1938, hlm. 128–146.

----, "Sri Vijaya", *BEFEO*, XL, 1940, hlm. 239–313.

----, *History of Srivijaya*, Madras: University of Madras, 1949.

Obdeyn, V., "De Geomorfologische gesteldheid van Zuid Sumatra enz.", *TAG*, 1941.

----, "Zuid Sumatra volgens de oudste berichten, II, De gouden specerijeilanden", *TAG*, 1941, hlm. 322–341.

----, "De geografische kennis omtrent Sumatra in de Middeleeuwen", *TAG*, 1942, hlm. 46–75; 1943, 102–110.

----, "De oud zeehandelsweg door de Straat van Malaka in verband met de geomorfologie der Selat-eilanden", *TAG*, 1944, hlm. 40–66.

Oemar, Moh., "Prasasti Munduan", prasaran pada Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970.

Olthof, W.L., *Babad Tanah Djawi*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1941, 2 jilid.

Orsoy de Flines, E.W., "Hasin-Medang-Kuwu-Lang-pi-ya", *TBG*, LXXXIII, 1949; hlm. 424–426.

----, *Guide to the Ceramic collection of Museum Pusat Jakarta*, 1972.

van Ossenbruggen, F.D.E., "De oorsprong van het Javaansche begrip montjopat, in verband met primitive classificaties", *VMKNAW*-L, serie 5, (3) 1917, hlm. 6–44, Terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Asal Usul konsep Jawa tentang Mancapat, dalam Hubungannya dengan Sistem-Sistem Klasifikasi Primitif*, seri terjemahan KITLV-LIPI, no. 49, Jakarta: Bhratara, 1975.

Padmapuspita, Ki J., Pararaton, Teks Bahasa Kawi, terjemahan bahasa Indonesia, Jogjakarta: Taman Siswa, 1966.

Pelliot, P., "Deui itinéraries de Chine en Inde à la fin du VIIe siècle", *BEFEO*, IV, 1904, hlm. 131–143.

Pigeaud, Th.G.Th., *Java in the Fourteenth Century: A Study in Cultural History. The Nagara-kertagama by Rakawi Prapañca of Majapahit, 1365 A.D.*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1960–1963, 5 jilid.

----, *Literature of Java.* Catalogue Raisonné of Javanese Manuscript in the Library of the University of Leiden and Other Public Collections in the Netherlands, vol. I, The Hague, M. Nijhoff, 1967.

Pleyte, C.M., "Uit Soenda's Voortijd", *Het Daghet*, I, 1905/ 1906, hlm. 174 dst.

----, "Over een paar Hindoe-beelden van Padang Tjandi (Batang Hari districten), *TBG*, XLIX, 1906, hlm. 171–177.

----, "Het jaartal op den Batoe Toelis nabij Buitenzorg", *TBG*, LIII, 1911, hlm. 155–220.

----, "De Patapan Andjar Soeka Resi, anders gezegd de Kluizenarij op den Goenoeng Padang: Tweede Bijdrage tot de kennis van het Oude Soenda", *TBG*, LV, 1913, hlm. 231–428.

----, "Maharaja Çri Jayabhupa-ti. Soenda's Oudst Bekende Vorst: Vijfde Bijdrage tot de kennis van het Oude Soenda", *TBG*, LVII l, 1915, hlm. 201–218.

Poerbatjaraka, R.Ng., "De Dood van Raden Wijaya", *TBG*, LVI, 1914, hlm. 143–148.

----, "Het beeld van Tjandi Djawi", *OV*, 1917, hlm. 143–151.

----, "De bijzetting van koning Krtanagara te Tumapel", *OV*, 1918, hlm. 113–115.

----, "Transcripties van Koperen Platen", *OV*, 1920, hlm. 136.

----, "De Tjarita Parahijangan", *TBG*, LIX, 1920, hlm. 403–416.

----, "De Batoe Toelis nabij Buitenzorg", *TBG*, LIII, 1921, hlm. 380–401.

----, "Transcriptie van een koperen plaat in het museum te Solo", *OV*, 1922, bijlage I, hlm. 85.

----, "Aantekeningen op de Nagarakrtagama", *BKI*, 80, 1924, hlm. 219–286.

----, "De dateering van het Oud-Javaansch Ramayana", *Gedenkschrift 75-Jarig bestaan Kon. Inst. 4 Juni 1926*, hlm. 265–272.

----, "De Tjalon Arang", *BKI*, 82, 1926, hlm. 110–180.

----, "Arjuna-wiwaha. Teks en vertaling", *BKI*, 82, 1926, hlm. 181–305.

----, "De naam Dharmawangça", *TBG*, LXX, 1930, hlm. 171–183.

----, "Het oud-Javaansche Ramayana", *TBG*, LXXII, 1932, hlm. 151–214.

----, "Enkele oude plaatsnamen besproken", *TBG*, LXXII, 1932, hlm. 514–520.

----, "Naschrift op Dr. W.F. Stutterheim: Was Sindok in een vorsten dynastie ingehuwd?", *TBG*, LXXII, 1932, hlm. 622–625.

----, "Vier Oorkonden in koper", *TBG*, LXXVI, 1936, hlm. 373–390.

----, "Oorkonde van Krtarajasa uit 1296 A.D. (Penanggoengan)", Met inleidende opmerkingen door Dr. W.F. Stutterheim. *INI*, 1, 1940, hlm. 33–49.

----, "Strophe 14 van de Sanskrit-zijde der Calcutta-steen", *TBG*, LXXX, 1941, hlm. 425-437.

----, dan Tardjan Hadidjaja; *Kepustakaan Djawa*, Djakarta: Djambatan, 1952.

----, *Riwajat Indonesia,* I. Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1952.

----, " Çrivijaya, de Çailendra- en Sañjayavamça", *BKI,* 114, 1958, hlm. 254–264. (Terjemahannya dalam bahasa Indonesia: *Çriwijaya, Çailendra dan Sañjayawamça,* Jakarta: Bhratara, 1975).

Pott, P.H., *Yoga and Yantra,* The Hague: Martinus Nijhoff, 1966.

Przyluski, J., "Indian Colonization in Sumatra before the seventh century", *JGIS,* I, 1934, hlm. 92–101.

----, "The Çailendravamça", *JGIS,* II, 1935, hlm. 25–36.

Rai, Himansu P., *The Wind of Change, Biddhisme and Maritime Links of Early South-east Asia,* Oxford University Press, 1994.

Rais, K.H., *Sadjarah Tjirebon,* 2 jilid, 1956.

Rajani, Chand Chirayu, "A geographical reinterpretation of the Sri Vijaya story", paper pada Conference on Asian History, International Association of Historians of Asia, Yogyakarta, 1974.

----, "Review Articles: Background to the Sri Vijaya Story", I–V, *JGIS,* 62–64, 1962–1976.

Ramos-Coelho, Jose', *Alguns Documentos do Archivo Nacional da Torre do Tombo à cerca das navegacões e conquistas Portuguezas,* Lisboa: Imprensa Nacional, 1892.

Resink, Th.A., "Belahan of een mythe ontluiserd", *BKI,* 123, 1967, hlm. 250–266. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "Belahan or a myth dispelled", *Indonesia,* 6, hlm. 2–37.

Ricklefs, M.C., *Modern Javanese Historical Tradition: A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials,* London: School of Oriental and African Studies, University of London, 1978.

Ridho, Abu, *The World greatest collections,* vol. III, Kodansha, Tokyo, 1978.

Robertson, J.A., *Magellan's Voyages Around the World by Antonio Pigafetta,* Cleveland: The Arthur H. Clark Coy., 1909, 2 jilid.

ROC, 1904, hlm. 4–5; 1911, Bijlage LXI, hlm. 117–123.

Rockhill, W.W. & F. Hirth, "Notes on the Relations and trade of China with the Eastern Archipelago and coast of the Indian Ocean during the fourteenth century", *T.'oung Pao,* XIV, 1913, hlm. 473–476; XV, 1914, hlm. 419–447; XVI, 1915, hlm. 61–159, 234–271, 347–392, 604–626.

van Ronkel, Ph. S., "A preliminary notice concerning two old inscriptions in Palembang (Sumatra)", *Acta Orientalia,* II, 1924, hlm. 12–21.

Rouffaer, G.P., "Het Tijdperk van Godsdienstovergang (1400–1600) in den Maleischen Archipel. 1e Bijdrage: Waaneer is Madjapahit gevallen?", *BKI*, 50, 1899, hlm. 111–199.

----, "Was Malaka emporium voor 1400 AD, genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari, Ma-Hasin, Langka, Batoesawar? (Met terreinschetsen van Djambi, oud-Singhapoera, en de Djohor-rivier), *BKI*, 1921, hlm. 1–174, hlm. 359–604.

Santiko, Hariani, "Waprakeswara: Tempat Bersaji Pemeluk Agama Weda?", *Amerta*, Berkala Arkeologi, no. 11, 1989, hlm. 1-8.

Santoso, Soewito, "Meng-Ch'i", *MISI*, II (2), 1964, hlm. 141–146.

Sarkar, H.B., *Indian Influences on the literature of Java and Bali,* Greater India Series, no. 1, 1934

----, "The Copperplate of Borobudur", *JGIS*, VI, 1939, hlm. 124-130.

----, *Corpus of the Inscriptions of Java (Corpus Inccriptionum Javanicarum) (up to 928 A.D.)*, 2 vols. Calcutta; K.L. Mukhopadhyay, 1972.

Sartono, S. "Pusat-pusat Kerajaan Sriwijaya Berdasarkan Interprestasi Paleogeografi", dalam *Pra-Seminar Penelitian Sriwijaya*, Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1979, hlm. 43–74.

Sauheng, Leong, "Prasejarah dan Protosejarah Selangor: Satu Tinjauan Awal" dalam Adnan Haji Awang *et.al. (eds.) Selangor, Sejarah dan Proses Pembangunannya,* Kuala Lumpur: United Selangor Press Sdn. Bhd, 1992, hlm. 1–35.

Schnitger, F.M., "Het Potretbeeld van Anusanatha", *BKI*, 89, 1932, hlm. 123–128.

----, "Een Hindoe-Javaansch Potretbeeld te Leiden", *BKI*, 89, 1932, hlm. 251–252.

----, *Oudheidkundige vondsten in Palembang,* Leiden, 1936.

----, *The Archaeology of Hindoo Sumatra,* Leiden, 1937.

----, *Forgotten Kingdoms in Sumatra.* Leiden: E.J. Brill, 1964.

Schrieke, B.J.O., "Prolegomena tot eene sociologische studie over de volken van Sumatra", *TBG*, LV, 1925, hlm. 90–207.

----, *Indonesian Sociological Studies* II. Ruler and Realm in Early Java, The Hague, Bandung, 1955.

----, *Indonesian Sociological Studies,* Part One, The Hague: W. van Hoeve, 1966 (Second Edition).

Shastri, Hirananda, "The Nalanda Copper Plate of Devapaladeva", *Epigraphia Indica*, XVII, 1924, hlm. 310–327.

Sjafei, Suwadji, "What historical relation were there between Cambodia and Indonesia from the eighth to the ninth century?", *Majalah Arkeologi*, th. I, no. I, 1977, hlm. 31–41.

Slametmuljana, Sriwijaya, Ende, 1963.

----, *Menudju Puntjak Kemegahan (Sedjarah Keradjaan Madjapahit)*, Djakarta: Balai Pustaka, 1965.

----, *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhratara, 1966.

----, *Nagarakretagama dan Tafsir Sedjarahnya*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979.

----, *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, Jakarta: Idayu, 1981.

Soebadio, H., *Jñanasiddhanta. Bibliotheca Indonesia 7*, The Hague: M. Nijhoff, 1971.

Soegondho, Santosa, *Tradisi Gerabah di Indonesia dari Masa Prasejarah Hingga Kini*, Jakarta: Himpunan Keramik Indonesia, 1995.

Soejono, R.P., "Remarks on Maritime Shipping in Prehistoric Times in Indonesia", dalam *SPAFA Consultative Workshop on Research on Maritime Shipping and Trade Networks in Southeast Asia*, Bangkok: SPAFA Coordinating unit, 1984.

Soekmono, R., "Garis pantai Sriwijaya", *Amerta*, 3, 1955, hlm. 30–33.

----, "Early Civilization of Southeast Asia", *JSS*, XLVI, 1958.

----, "Tentang lokalisasi Çriwijaya", *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Pertama*, V, Seksi D, 1958, hlm. 243–264.

----, "Geomorphology and the Location of Çriwijaya", *MISI*, I, 1,1963 hlm. 79–92

----, "Dua Puluh Tahun Ilmu Purbakala Indonesia", dalam *Research in Indonesia 1945–1965*, IV, Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Departemen Urusan Research Nasional, 1965 hal 80–109.

----, The Link Between the Central and the East-Javanese Arts", *Bulletin of the Archaeological Institute of the Republic of Indonesia no. 6*, Djakarta, 1969.

----, Candi Fungsi dan Pengertiannya, disertasi Universitas Indonesia, 1974.

----, "Sekali lagi tentang lokalisasi Sriwijaya", *Pra Seminar Penelitian Sriwijaya.* Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1979, hlm. 75–84.

----, *Menapak Jejak Arkeologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Utama Tiga, 2002

Soeroso, "Jaya Siddhayatra Sarwwasattwa", *Siddhayatra*, Buletin Balai Arkeologi Palembang, Edisi Perdana, 1996.

----, "Sumatra Selatan Menjelang Masa Sejarah", *Katalog Pameran Fajar Masa Sejarah Nusantara*, Jakarta: Museum Nasional, 2003, hlm. 23–29.

van Stein Callenfels, P.V., "De Graftempel van Kagenengan", *TBG*, LVII, 1916, hlm. 200.

----, "De inscriptie van Kandangan", *TBG*, LVIII, 1918, hlm. 337–347.

----, "Epigraphica Balica", *VBG*, 66, 1926.

----, "De inscriptie van Soekaboemi", *MKAW-L*, serie B, deel 78 no. 4, 1934, hlm. 115–130.

Stutterheim W.F., "Een oorkonden op koper uit het Singosarische", *TBG*, LXV, 1925, hlm. 208–282.

_____., "Transcriptie van twee Jayapatra's", *OV*, 1925, hlm. 57–58.

----, "Een belangrijke oorkonde uit de Kedoe", *TBG*, LXVII, 1927, hlm. 173–216.

----, A Javanese period in Sumatran History, Surakarta: De Bliksem, 1929 (dicetak pula dalam: *TBG*, LXIX, 1929, hlm. 135–156).

----, *Tjandi Borobudur. Naam, Vorm en Beteekenis*, Weltevreden: Kolff & Co. 1929. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "Chandi Barabudur. Name, form and meaning", Studies in Indonesian Archaeology, Translation series KITLV no. 1 The Hague: M. Nijhoff, 1956.

----, *Oudheden van Bali. Het oude rijk van Pejeng*, 2 vols, Singaradja: De Kirtya Liefrinck-van der Tuuk, 1929.

----, "Oudheidkundige aantekeningen: X. De Ouderdom van tjandi Soembernanas", *BKI*, 86, 1930, hlm. 305–308.

----, "Een Bijzettingsbeeld van Koning Krtanagara in Berlijn?", *TBG*, LXXII, 1932, hlm. 715–726.

----, *Indische Cultuurgeschiedenis*, II, Het Hinduisme in den Archipel. Den Haag/ Batavia: J.B. Wolters, 1932.

----, "Was Sindok in een vorsten dynastie ingehuwd?", *TBG*, LXXII, 1932, hlm. 618–621.

----, 'Een Beschreven Koperplaat uit Kediri", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 102–104.

----, "Iets over raka en rakarayan naar aanleiding van Sindok's dynastie positie", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 159–171.

----, "Naschrift op Moens: Het Berlijnse Ardhanaribeeld", *TBG*, LXXIII, 1933, hlm. 292–306.

----, "Tjandi Loro Djonggrang en Oost Java", *BKI*, 90,1933, hlm. 267–299.

----, "Oudheidkundige Aanteekening. XXXIIIa. Winetu-wetu", *BKI*, 90, 1933, hlm. 279–282.

----, "A newly discovered pre-nagari inscription on Bali", *Acta Orientalia*, XXII, 1934, hlm. 126–132.

----, "Een vrij overzetveer te Wonogiri", *TBG*, LXXIV, 1934, hlm. 3–28.

----, "De Leidse Bhairawa en Tjandi B van Singasari", *TBG*, LXXIV, 1934, hlm. 441–476.

----, "Epigrafische aantekeningen. II. Een oorkenden van Rake Lokapala uit het Zuiderbergte", *TBG*, LXXV, 1935, hlm. 420–467.

----, "Epigraphica. IV. Nog een Sindok's dynastie positie", *TBG*, LXXV, 1935, hlm. 456–462.

----, "De dateering van eenige Oostjavaansche beeldengroepen", *TBG*, LXXVI, 1936, hlm. 249–320.

----, "Verslag over de inscripties gevonden in Palembang" (Bijlage A, van F.M. Schnitger's *Oudheidkundige Vondsten in Palembang*), 1936.

----, "Oudheidkundige aantekeningen: XLVIII. Waar lag Erlangga's kluizenarij van den Pucangan?", *BKI*, 95, 1937, hlm. 397–424.

----, "De. Archaeologische Verzamelingen", JBG, V, 1938, hlm. 108–142.

----, "Een bijzettingsbeeld van Koning Rajasa?", *TBG*, LXXIX, 1939, hlm. 85–104.

----, "Oorkonde van Dang Acaryya Munindra (Randoesari II)", INI, I, 1940, hlm. 3–28.

----, "De Stichter der Prambanan Tempels, *Djawa*, XX, 1940, hlm. 218–233.

_----, "Koning Teguh op een oorkonde", *TBG*, LXXX, 1940, hlm. 345–366.

_----, "De Kraton van Majapahit", *VKI*, VII, 1948.

Subrahmanya Aiyer, K.V., "The Larger Leiden Plates", *Epigraphia Indica*, XXII, hlm. 213–266.

Sudarta, Cok Rai dan Gde Pudja, *Manawa Dharmaçastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti Compedium Hukum Hindu*, Departemen Agama Republik Indonesia, 1978.

Suhadi, Machi, "Prasasti Terep", *Manusia Indonesia*, IV (1–2), 1970, hlm. 38–46.

----, "Prasasti Rumwiga", *Berkala Arkeologi*, IV/1, 1983, hlm. 39–44.

Sukarto K. Atmodjo, M.M., "Preliminary report on the copperplate inscription of Asahduren", *BKI*, 126, 1970, hlm. 215–227.

----, "The Charter of Dayankayu", *BKI*, 128, 1972, hlm. 157–280.

----, "The second Colophon of the Nagarakertagama", *BKI*, 129, 1973, hlm. 277–309.

----, "The Charter of Kapal", *Aspek-aspek Arkeologi Indonesia*, no. 2, 1977, hlm. 13–14.

----, "A newly discovered pillar-inscription of Sri Kesariwarma (dewa) at Malat Gede", *50 Tahun Lembaga. Purbakala dan Peninggalan Nasional*, 1977, hlm. 150–156.

----, "Singaraja and the population in the Northern Coast of Bali", paper pada Second Indonesia Dutch Historical Conference, Ujungpandang, 26–30 Juni 1978.

----, "Notes on a proto-historic sarcophagus at Selasih in Bali", *Majalah Arkeologi*, II/4, 1979, hlm. 61–75.

Suleiman, Satyawati, "Studi Ikonografi Masa Sailendra di Jawa dan Sumatra", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi*, Cibulan 1977. Jakarta, 1980, hlm. 375–391.

Sulendraningrat, P.S., *Purwaka Tjaruban Nagari*, Djakarta: Bhratara, 1972.

Supratikno, Rahardjo, M.P.B. Manus, dan P. Suryo Haryono, *Sunda Kelapa sebagai Bandar Jalur Sutra*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Surjohudojo, Soepomo, " 'Lord of the Mountains' in the Fourteenth Century Kakawin", *BKI*, 128, 1972, hlm. 281–297.

----, "Some-aspects of kingship in Ancient Java", paper presented at the 30th Congress of Human Sciences of Asia and North Africa, Mexico City, 1976.

Sutaarga, Moh. Amir, *Prabu Siliwangi*, Bandung: Duta Rakjat. 1965.

Sutayasa, I Made, "Gerabah Prasejarah dari Jawa Barat Utara (Kompleks Buni), Seminar *Sejarah Nasional II*", Yogyakarta, 1970.

----, "Ragam Hias Gerabah Prasejarah dari Kompleks Buni", *Manusia Indonesia*, 1969

Taim, Eka Asih Putrina, "The Batujaya Pottery: Early Hindu-Buddist Pottery in West Java", *Archaeology: Indonesian Perspective. R.P. Soejono's Festschift*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 334–344.

Takakusu, J., A *Record of The Buddhist Religion as Practiced in India and the Malay Archipelago (A.D.671–695) by I-Tsing*, Oxford: The Clarendon Press, 1986.

Tan Khoen Swie (ed.), *Darmogandul: anjariosaken reringkesanipun babad bedahipun karaton Madjapait*, Kediri: Tan Khoen Swie, 1954.

Teeuw, A., *et al.*, *Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun*, An Old Javanese Poem, its Indian Source and Balinese illustrations by A. Teeuw, Th.P. Galestin, S.O. Robson, P.J. Worsley, P.J. Zoetmulder, The Hague: Martinus Nijhoff, 1969, (*Bibliotheca Indonesica*, 3).

Tibbets, G.G., "Pre-Islamic Arabia and South-East Asia", *JMBRAS*, XXIX (3), 1956, hlm. 182–208.

Tjan Tjoe Som, "Chinese Historical Sources", di dalam: Soedjatmoko et. al. (eds.), *An Introduction to Indonesian Historiography*, New York, Ithaca: Cornell University Press, 1965, hlm. 194–205.

Tjandrasasmita, Uka, "Keratuan-keratuan Ratudewata, Tarumanagara, Galuh dan Pajajaran (s–1579)". Dalam Moh. Ali (ed.), *Sejarah Jawa Barat: Suatu Tanggapan,* Bandung: Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, 1974.

Trimarhaeni S.B., Survai Arkeologi Klasik di Kawasan Pantai Timur Sumatera, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Palembang: Balai Arkeologi Palembang (belum diterbitkan), 2000.

----, Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Pemukiman di Kawasan Pantai Timur Sumatra, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, Palembang: Balai Arkeologi Palembang (belum diterbitkan), 2001.

van der Tuuk, H.N., "Transcriptie van vier Oud-Javansche vorkonden op brous, gevonden op het eiland Bali", *TBG*, XXX, 1885, hlm. 604–624.

Verstappen, H.Th., *A Geomorphological Reconnaissance of Sumatra and Adjacent Islands (Indonesia)*, Groningen: Wolters-Noordhoff Publishing. 1973.

Vlekke, B.H.M., *Nusantara: A History of the East Asian Indian Archipelago,* New Revised Edition, The Hague/Bandung: W. van Hoeve, 1965.

Vogel, J.Ph., "The Yupa Inscription of King Mulawarman, from Koetei (East Borneo)", *BKI* 74, 1918, hlm. 167–232.

Vogel, J.Ph., "The Earliest Sanskrit Inscriptions of Java", *POD,* I, 1925, hlm. 15–35.

Wales, H.G. Quaritch, "A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion", *IAL*, IX, 1935, hlm. 1–35.

Wellan, W.J., "Çrivijaya 1250 jaren geleden gesticht", *TAG*, LI, 1934, hlm. 348–363.

Wheatley, Paul, "Geographical Notes on Some Commodities involved in Sung Maritime Trade", *JMBRAS*, XXXII, 1959. hlm. 4–140.

----, *The Golden Khersonese,* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1961.

Wibowo, A.S., "Sedikit tentang Tahun Permulaan Pemerintahan Balitung", *MISI*, II/2, Juni 1964, hlm. 147–154.

Wibowo, A.S., "Balitung Menyerang Bali Tahun 827 Çaka", *Bulletin YAPERNA,* III (II), 1976, hlm. 64–76.

Widianto, Harry, "Cranio-Morphological Aspect of the Recent Discovery of Human Remains from Batujaya, West Java", *Archaeology: Indonesian Perspective.* R.P. Soejono's Festshrift, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 124–135.

Winstedt, R.O., "*The advent of Muhammadanism in the Malay Peninsula and Archipelago*", JRASSB, 77, 1917, hlm. 171 dst.

Wirjosuparto, R.M. Soetjipto, Apa Sebabnya Kadiri dan Daerah Sekitarnya Tampil kemuka dalam Sedjarah?", *LKIPN-I,* V, Seksi D, 1958, hlm. 61–121.

----, Kakawin Ghatotkacaçraya. Diss, UI, 1960.

----, "The Second Visnu Image of Cibuaya in West Java", *MISI*, I (2), 1963, hlm. 170–187.

----, "Kakawin Smaradahana sebagai Tafsir Ikonografi", *MISI*, no. 2, 1964, hlm. 111–118.

----, *Kakawin Bharata-Yuddha,* Jakarta: Bhratara, 1968.

----, "Adakah biandri dan poliandri di Indonesia?", *Majalah Arkeologi,* 1I(4), 1978, hlm. 55–68.

Wolters, O.W., "Çrivijayan Expansion in the Seventh Century", *Artibus Asiae,* 1961, hlm. 417–424.

----, "A Note of the Capital of Çrivijaya during the Eleventh Century", *Artibus Asiae*, 1966, hlm. 225–239.

----, *Early Indonesian Commerce;* A Study of the Origins of Sriwijaya. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967.

----, *The Fall of Srivjaya in Malay History,* Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1970.

----, "Restudying Some Chinese Writings on Sriwijaya", dalam *Indonesia*, No. 42 (Oktober). Cornell: Cornell Southeast Asia Program, 1986, hlm. 1–41.

Yamin, H. Muhammad, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, Djakarta: Balai Pustaka, 1958.

----, *Pertulisan Widjaja-Parakrama-Wardana dari Surodakan (Kediri) dengan bertarich Sjaka 1368–T.M.* 1447, Sumbangsih bagi Kongres MIPI dikota Djokdjakarta pada bulan Oktober 1962.

----, *Tatanegara Madjapahit*, I–IV. Djakarta: Prapantja, 1962.

----, "Pertulisan Widjaja-Parakrama-Wardana dari Surodakan (Kediri) dengan bertarich Sjaka 1368 –T.M. 1447", *Laporan KIPN–II*, VI, Seksi D, 1965, hlm. 399–428.

Yule, H. dan Henri Cordier, *Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Medieval Notices of China.* London: The Hakluyt Society, 1913–1916, 4 jilid.

Zoetmoelder, P.J., *Sekar Sumawur*, I. Dewamanusaraksasadi, Jakarta, 1958.

----, *Sekar Sumawur*, II. Korawapandawacarita, Jakarta, 1963.

----, "Djaman Empu Tanakung", *Laporan KIPN–II*, VI, Seksi D, 1965, hlm. 199–210.

----, *Kalangwan: A Survey of Old Javanese Literature*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1974.

----, "Himansu Bhusan Sarkar Corpus of the inscriptions of java (*Corpus Inscriptionum Javanicarum*) (up to 928 A.D.)", *BKI*, 132, 1976, hlm. 188–192 (boekbespreking).

----, *Old-Javanese English Dictionary*, 2 vol., The Hague: M. Nijhoff, 1982.

de Zwaan, P. de Kleiweg, "Enkele Opmerkingen naar aanleiding van de Steenen met Voetafbeeldingen op het Eiland Nias", *FBG*, I, 1929, hlm. 313–326.

Daftar Singkatan

AA : *Artibus Asiae*
AP : *Asian Perspectives*
BB : *Bahasa dan Budaya*
BEFEO : *Bulletin de 1'École Fransaise d'Extrême-Orient*
BKI : B*ijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*
FBG : *Feestbundel*. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778–1928. Weltevreden: G. Koff & Co., 1929, 2 jilid
EEI : *Études d'Épigraphie Indonesienne*
GNI : *Geschiedenes van Nederlendsch Indie*
HJG : *Hindoe Javaansche Geschiedenis*
IHJK : *Inleiding tot de Hindoe Javaansche Kunst*
INI : *Inscripties van Nederlandsch-Indië*; Afl. 1.Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschaap van Kunsten en Wetenschappen, 1940
JA : *Journal Asiatique*
JBG : *Jaarboek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*
JGIS : *Journal of the Greater India Society*
JMBRAS : *Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society*
JOR : *Journal of Oriental Research*
JOSA : *Journal of the Oriental Society of Australia*
JRASMB : *Journal of the Royal Asiatic Society of the Malayan Branch*
JRASSB : *Journal of the Royal Asiatic Society of the Singapore Branch*
JSS : *Journal of the Siam Society*
KITLV : *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*
KO : *Kawi Oorkonden in Facsimile, met Inleiding en Transcriptie*, 2 vols. Leiden: E. J. Brill, 1875
LKIPN - II : *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia kedua*, 1962, VI, Seksi D (Seksi Sastra dan Budaya).Djakarta: Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, 1965
Mãn : *Mãnawadharmasãstra*
MISI : *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*

MKAWL	:	*Mededeelingen der Koninklijk Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde*
Nãg	:	*Nãgarakertagama*
NBG	:	*Notulen van de Directievergaderingen van het. Koninklijk Bataviaasch Genootshap van Kunsten en Wetenschappen*
NION	:	*Nederlandsch - Indië Oud en Nieuw*
OB	:	*Oudheden van Bali*
OJO	:	*Oud-Javaansch Oorkonden*. Nagelaten transcripties van wijlen Dr. J.L.A. Brandes, utgegeven door Dr. N.J. Krom. Batavia: Albrecht & Co., 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913 (VBG, IX)
ONW	:	*Oud Javaansch-Nederlandsch Woordenboek*
OV	:	*Oudheidkundig Verslag van de Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indië*
Par	:	*Pararaton*
PB	:	*Prasasti Bali*
PEFEO	:	*Publications d'Ecole Française d'Esctremê-Orient*
POD	:	*Publicatie van de Oudheidkundige Dienst. Batavia, 1925*
RK	:	*Rãmãyana Kakawin*
ROC	:	*Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera*
ROD	:	*Rapporten van de Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indië*
SPAFA	:	SEAMEO Project on Archaeology and Fine Art
Swar	:	*Swarajambhu*
TAG	:	*Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*
TBG	:	*Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*
VBG	:	*Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*
VG	:	*H. Kern, Verspreide Geschriften. 15 jilid. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913–1928*
VKI	:	*Verhandelingen van her Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*
VKNAW	:	*Verhandelingen der Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde (Nieuwe Reeks)*
VMKNAW	:	*Verhandelingen en Mededeelingen der Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen*
WBKKA	:	*Wiener Beiträge zur Kunst- and Kulturgeschichte Asiens*

Indeks

1. Nama Tokoh, Nama Dewa, Istilah, dan Lain-Lain

A

Abu Zayd 90
Adibuddha 442
Adipati Unus 479
Adityawarman 6, 10, 108, 111, 435
Adwayawarman 106
Agastya, arca 46, 125, 161, 412
agending i haji 361, 363
Air Sugihan 83, 84, 86, 102
Airlangga 182, 185, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 216, 220, 227, 228, 229, 261, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 295, 299, 323, 325, 326, 327, 379, 384, 385, 387,388
Aji Mantrolot 455
Aji Paduka Mpungku 283
Aksobhya 441, 442, 445, 447
akuwu 422
Amoghasiddhi 460
Amoghapāsa 141, 435, 439
amukti palapa 459, 462
anak thāni 392, 353
Anak Wungsu 307, 310, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 343, 346, 348, 349, 350, 353, 355, 356, 360, 361, 362, 365, 368, 372, 373, 374, 376, 378
Ananggawarman 108
Antonio Pigafetta 381, 478
Anusapati 427, 429, 431
anustubh 52, 54
Ardhanari 445, 447
Arddharāja 443, 445, 448
Arjunawiwāha 212,274, 275, 276, 277
Argyre 12, 47
Aryya Wirarāja 443, 450
Astabrata 271
astacorah 268
astadasawyawahāra 267, 269
astadusta 268
Aswawarman 38, 42, 43
Awalokiteswara 435

B

Badander 458
Badut, candi 125, 126
bahitra 316, 376
Bālaputra (dewa) 87, 88, 97, 141, 151, 159
Bameswara 286, 287, 293
Banon, candi 132
Banten 400
Bañu wka 325
Bhadrawati 116

Bhairawa 366, 435, 445
Bhanu 123, 136, 151
Bhãratayuddha 284, 289, 290, 303
Bhatãra da Tonta 311, 312, 364, 368
Bhatãra Guru I 336
Bhatãra Guru II 336, 337
Bhattãra i Kling 473, 475
Bhattãra ring Dahanapurã 473, 475, 476
Bhattãra Saptaprabhu 481
Bhatãra Parameswara 336, 429
Bhattãra ring Tumapel 472
Bhattãra i Wengker 476
bhayangkãri 484
bhiksu 30, 88, 310, 316, 348, 359, 364
bhumi jawa 76, 78, 79
Bhumisambhãra 153, 155
Bhomãntaka 304
Bhre Daha 454, 475
Bhra Hyang Parameswara 470
Bhra Hyang Wekasing Sukha 463, 469
Bhre Kahuripan 454, 461
Bhre Kertabhumi 473, 474, 479
Bhre Pandan Salas 473, 474, 479
Bhre Paguhan 469
Bhre Pamotan 471
Bhre Singhasãri 461
Bhre Tumapel 469
Bhre Wengker Wijayarãjasa 465
Bhre Wirabhumi 280, 470
Blandongan, Candi 57, 58
Borobudur, candi 6, 122, 138, 143, 150, 153, 154, 254, 273, 276, 278, 308, 383
Brahmandapurãna 275
Brahma, dewa 129, 185, 367, 409, 422
Brahma, arca 447
Bubat 388, 390, 391, 464, 465
Buddha Hinayana 82, 122
Buddha Mahãyana 82, 115, 116, 118, 138, 150, 151, 273, 279, 371
Buddha Tantrãyana 441, 442
Burwan 169, 351, 370

C

Calon Arang, kitab 279, 280, 285, 286, 325
Cãmundi, arca 437, 438, 439, 441
Cañcu Makuta 153
Cañcu Manggala 153
Candrabhãga 52, 62
Canggu Lor 433
Carita Parahyangan, kitab 116, 118, 381, 382, 383, 384, 387, 388, 391, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 405, 407, 408, 409, 415, 417
Cayarãja 436
Chan-pi 93
Chau-Ju-Kua 93, 255, 296
Chên-la 115, 119, 305, 307
Cheng-ho 401
Chrysè 9, 10, 12
Chöye 48, 65

Chung-kia-lu 296
Cigede 403
Cimanuk 394, 396, 403, 419
Cudāmaniwarman 90, 91, 92, 97

D

Daha 211, 279, 286, 287, 289, 292, 295, 296, 297, 299, 421, 423, 452, 453, 459, 473, 476
Dahanapura 211, 285, 286
Daksa 123, 131, 175, 177, 178, 179, 186, 233
Dara Petak 454
Dara Jingga 454
Dangdang Gendis 297, 298, 421, 423, 429
Danghyang Lohgawe 422
Dang Puhāwang 152
Dang Upādhyāya 350, 365
Dapunta Hyang 72, 74, 80
Dapunta Selendra 5, 116, 117, 121, 122, 131, 150
Dayo 394, 395, 401, 403, 404
Demak 400
Dewapāladewa 87, 97, 141, 159
Dewasingha 125, 127
Dewawarman 47
dewarāja 127
Dewi Rambu 427
dhārana 255, 258
Dharmādhyaksa 436, 483
Dharmmahañar 349
Dharmakrti 90, 92
Dharmmasāstra 269
Dharmasetu 87, 88
Dharmmasraya 106, 439
Dharmawangsa Teguh 196, 197, 199, 200,201, 202, 205, 210, 212, 228, 275, 282
Dharmawangsa Airlangga 128, 135, 167, 187, 196, 201, 202, 204, 208, 212, 228, 234, 245,252, 254, 277, 284, 291, 295
drawyahaji 256, 484
Duarte Barbose 478
Durga Mahisāsuramardini, arca 325
dvipantara 18
Dyah Bhumijaya 165, 166
Dyah Dewi Gayatri 454
Dyah Dewi Narendraduhitā 335, 454
Dyah Dewi Prajñāparamita 454
Dyah Dewi Tribhuwaneswari 335, 454, 463
Dyah Kertawijaya 475
Dyah Kebi/Pu Kebi 192
Dyah Kili Suci 283
Dyah Lembu Tal 435, 447
Dyah Makaradhwaja 460
Dyah Pitalokā 464
Dyah Ranawijaya 473, 474, 475, 476, 477, 479
Dyah Tumambong 207
Dyah Wawa 180, 183, 184
Dyah Wijayakusuma 474, 475
Dva-pa-tan 307

F

Faletehan 398

Fa-hsien 21, 22, 26, 48, 55, 62, 64

Fancur 90

Fo-shih 98

Fo-she-to 103

Fu-nan 19, 20, 23, 114, 115

G

Gajah Biru 456, 461

Gajah Énggon 469

Gajah Mada 106, 190, 339, 458, 459, 462, 463, 467, 474

Gajayāna 125, 127

Galuh 379, 382, 383, 384, 388, 391, 400, 420

Garasakan 281

Ganter 298, 423

Gelgel 339, 344

Gelang-Gelang 228, 443, 448

gempeng 324

Ghatotkācasraya 303

Girindrawangsa 424

Girindrawarddhana 472, 473, 474, 475, 476, 479

Gaudidwipa 140

Geographikè Hyphègèsis 12, 14, 47

Goa Gajah 327, 364, 369

Gomati, Sungai 52

Gunapriya Dharmmapatni 197, 199, 323, 329, 335, 343, 345, 346

Gunung Kawi (Tampaksiring) 325, 328, 368, 369, 421, 423

Gurah 299, 300, 301, 302, 303

Gurun 317, 376, 437, 462

H

Haji ri Sunda 387, 402

Haji Wurawari 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 212, 228, 276, 282, 326

Hara-Hara 196

Hariñjing 180, 181

Hariwangsa 303

Harsa-Wijaya, kidung 448, 453

Hasin, raja 207, 208, 216

Hayam Wuruk 111, 256, 270, 280, 388, 391, 423, 426, 463, 464, 465, 467, 469, 474, 480

Hendrik de Lemè 394, 397, 401

Ho-ling 54, 55, 60, 61, 67, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 305, 307

Ho-lo-tan 23, 24, 65, 101, 122, 135

Hsi-mo 120, 121

Huen-tsang 64

Hujung Galuh 210, 219, 220, 235, 254

hulun 220, 353

Hyang Bunisora 391, 392

I

labadioum 47

Ibn Al-Fakih 90

Ibn Hordadzbeh 89
Ibn Majid 101
lbn Rosteh 90
Ike-Mese 442, 451, 452
Indra, (raja) 136, 430
Indujaketana 335
Isãna 329
lsãnawangsa 116
Isãnabhawana 187
Isãnabajra 204
I-tsing 26, 65, 73, 84, 98, 102, 103, 104, 111, 121, 122

J

Jago, candi 106, 141, 433, 434
Jajaghu 433
Jalatunda 323, 324
Jambudwipa 223, 422
Janasãdhu Warmmadewa 321, 345, 346
Janggala 190, 211, 215, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 299
Jãtaka
Jatiningrãt 158
Jawi, candi 446, 447
Jayabhaya 288, 289, 290, 303, 333
Jayabhupati 384, 385, 387
Jayadewata 393, 394, 395, 397
Jayakatwang 443, 445, 447, 451, 452, 453
Jayanãgara 454, 458, 459, 460, 481
Jayakasunu 333
Jayapangus 327, 328, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 347, 351, 356, 360, 377
jayapãtra 174, 182, 256, 261, 269, 270
Jayasakti 330, 331, 332, 333, 343, 356, 360, 377
Jayastambha 318
Jayawarsa 198, 212, 330
Jiwa, candi 56, 57
Jivadãna 40, 44
Jiwana 454, 463, 481
Jivanmukta 442
Jñanabhadra 121
Jñanabajreswara 441
Jöng 316, 376
Joko Dolog, arca 441
Jorge d'Albuguergue 397
Juru Demung 456
Jung-ya-lu 94, 296

K

Kabalan 481
Kadãram 93
Kadiri 5, 128, 167, 190, 232, 245, 254, 258, 279, 285, 286, 289, 293, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 330, 332, 336, 421, 423, 429, 443, 445, 451, 404, 474, 476
Kahuripan 182, 211, 261, 284, 383, 384, 459
Kalachakra 108, 440
Kalagemet 454
Kalah 90

Kalana Bhaya 436
Kalapa 397, 398, 400, 403, 419
Kalasan, candi 124, 138, 139, 140
Kali, Dewi 129, 201, 298
Kalibukbuk 342, 371
Kāmeswara 291, 303, 332
Kanakamedinindra 106
Kañjuruhan 118, 125, 127, 128, 156, 232
Kan-t'o-li 24, 65, 84, 97, 99, 101
Karangagung 83, 84, 86, 102, 339
karāman 336, 352, 360, 372, 376
Katāha 92, 97
Katanglumbang 430
Kawali 388, 390, 391, 393, 408, 420
Kebo Anabrang 456
Ken Dedes 422, 426, 427, 429, 447
Ken Arok 116, 292, 297, 298, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 431, 447, 476
Ken Endok 422, 426
Ken Umang 427, 429
Kepung 299, 302, 303
Keta 461
Kidal, candi 427, 428
Ki-yen 120, 122, 123, 124
Krstnayana 303
Krtajaya 292, 294, 297, 298, 335
Kertanāgara 111, 228, 279, 336, 337, 432, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448, 449, 454
Kertarājasa 452, 455, 458, 481
Kertawarddhana 461
Kryan Ladheyan 182
ksatria, hipotesis 27, 28
Kubhilai Khan 106, 111, 439, 440, 442, 451, 453
kumārāraja 432, 458, 480, 481
Kundungga 36, 38, 42, 43
K'un-lun 9, 23, 24, 62, 121
kurn 372
Kutharāja 318
Kutaramānawa 258, 269
Kusumawardhani 280, 469, 481
Kunti 155
Kuti 153, 458
Kutri 325, 327

L

Lamajang 456, 465
Lañcang 316, 376
lañcana 334
Lang-pi-ya 119, 120
Lembong 422
Lasem 465
Lembu Sora 456, 458
Linggapati 433
Lingga-yoni 342, 412, 414
Lokapāla 198, 223, 366
Lokeswara 108, 350
Lo-ki-li-yen 124
Lor, candi 195
Loro Jonggrang 151, 159, 160, 168, 171, 196, 232, 272

M

Madalinggam 110

Mahābhārata 46, 213, 270, 273, 274, 275, 276, 284, 286, 408

Mahāniddesa 10

Mahāpati 456, 458

Mahendradattā 197, 323

Mdang 324, 325

Mahibit 433

Mahisa Bungalan 433

Mahisa Wonga Teleng 427, 429

Mahisa Campaka 430, 447

Mahisa Rangkah 437

Mahisa Walungan 298

Majapahit 7, 94, 108, 111, 112, 152, 182, 234, 252, 258, 268, 269

Makara 280, 282, 336, 337, 339, 373, 388, 391, 421, 424, 447, 452, 455, 456, 458, 461, 464, 472, 473, 475, 476, 477, 478

Makutawangsa-wardhana 199

Mālayu 73, 82, 84, 93, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 158, 188, 383, 384, 435, 437, 439, 443, 454, 455

Mamratipura 159, 164

Mānawadharmmasāstra 260

Mānawa-kāmandaka 333

Mañcapat 222

Mandala 228, 229, 365, 435, 460, 480

Mangilāla drawya haji 267

Mañjusri 124, 138, 140

Mantri Amañcanāgara 482

Mapañji Alañjung Ahyes 282

Marakata 329, 359

Mārawijayottunggwarman 92, 97

māsa 209, 216, 217, 255, 256, 361

masatya 270

Matarām 5, 70, 94, 113, 115, 121, 127, 148, 150, 164, 168, 170, 171, 175, 182, 183, 184, 185, 187, 195, 199, 202, 205, 219, 222, 232, 234, 241, 252, 261, 273, 282, 383

matayap 73

Maulana Yusuf 395

Mauliwarmmadewa 439

Medang 88, 121, 131, 133, 138, 149, 151, 152, 158, 159, 164, 165, 184, 204, 205

Meleri 290

Meng-Ch'i 442, 451

Mengening, Candi 340, 342, 371

menmen 362, 363

Mi-li-ch'e 307

Minanga 311

Mireng 435

Mo-ho-sin 54, 67

Mo-lo-yeu 93, 102, 103

Mukha Upang 73, 86

mulabera 127

Mulawarman 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47

N

Nāgarakrtāgama 104, 111, 112, 228, 279, 285, 297, 298, 388, 406, 423, 425, 426, 432, 433, 437, 440, 441, 447, 463, 464, 465, 481

Nāgipatt ana97

Nālanda 73, 87, 103, 141, 159, 310

nandi 42, 299, 412

Narāryya Gunging Bhaya 429

Narāryya Sanggrāmawijaya 425, 448

Narāryya Smining Rāt 425, 429, 431

Narāryya Waning Hyun 431

Narasinghamurtti 430, 435, 447

Narawaranāgara 115

Narottama 201, 203

Nawanatya 482

nāyaka 76, 153, 263, 264, 266, 316, 350, 351, 355, 484

nekara 7

Nitisāstra 271

Nusiya Mulya 392, 396, 397, 400

O

Oc-eo 20, 68, 84

Ordorico di Pardenone 459

P

Padang Lawas 111, 112

Padrão 398, 399

Pāduka Sori 465, 469

Pagulingan, pura 340, 341, 342, 371

pahöm Narendra 467, 481

Pajang 465

Pakwan Pajajaran 379, 381, 382, 387, 390, 393, 397, 400, 401, 404, 406, 407, 408

Pamālayu 104, 106

Panai 93, 108, 110, 111, 112

Panataran, candi 293

pañcasila 441, 442

Pangeran Sabrang Lor 478

Pangjalu 211, 215, 279, 280, 281, 284, 285, 286, 299

Pangjalu jayati 288, 289, 290

panglapuan 309, 316, 343, 344

Pañji Pati-pati 436

Pañji Saprang 427

Pañji Wijayakrama, kidung 448

Pañji Wregola 427

Paramadhyastha 351, 357

Pararaton 104, 297, 298, 391, 402, 421, 422, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 441, 442, 445, 448, 454, 455, 460, 461, 463, 464, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476

Patapān 153, 367, 368, 388

Pātakan 211, 284

Parakan 153

Pate Udra (Patih Udara) 474, 478

Pati Unus 478

Pejeng 308, 310, 338, 340, 364

Periplous 9, 10, 12

Pitra yajña 304

Plaosan Lor, candi 45, 137, 138, 140, 151, 156, 166, 176
Po-ho-pi-ni 89, 200, 227
Po-ho-wang 89, 200
Poh Pitu 133, 138
P'o-li 24, 54, 119, 305, 307
P'o-lu-kia-sseu 120, 122, 124, 225
Pontang 384, 403, 419
pralaya 184, 205, 228, 298
Prambanan 124, 133, 151, 159, 160, 232, 276, 278
Prāmodāwarddhani 88, 143, 151, 153, 159, 164
Pranāla 480
Praniti Raja Kapa-kapa 484
Prapañca 390, 441, 463
pratiyuwarāja 76
Prasāda 46, 480
Prebu Mahārāja 388, 391
Prabu Raja Wastu 390
Ptolemaelus, Claudius 12, 47
Pu Bhārada 280, 325, 326
Pu Dharmaja 303
Pu Gandring 422, 425
Pu Kanwa 213, 275, 276
Pu Kuturan 326
Pu Ketudhara 181, 183
Pu Ketuwijaya 183, 242
Pu Monaguna 303
Pumpunan 480
Pu Nāla 467
Pu Panuluh 289, 303
Pu Prapañca 388
Purnawarman 50, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 79
Purwādhigama 258
Purwaka Caruban Nagari 395, 479
Pu Sedah 289, 303
Pu Sindok 116, 121, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 221
Pu Sthāpaka 221, 229, 232, 242, 243, 244, 259, 272, 273, 282, 320, 323
Pu Sora (Sura) 455
Pu Tambi (Nambi) 455, 458, 460
Pu Tanakung 472
Pu Triguna 303

R

Raden Patah 479
Raden Wijaya 335, 435
Rāgajāya 327, 330, 331, 332, 333, 343, 347, 348, 358, 362, 366, 377
Raghuvamsa 18
Rahyang Ningrat Kañcana 390, 465
Rahyangta Panaraban 116
Rahyang Tamperan 383, 409
Rajadewi Mahārājasa 454
rājakumāra 76, 463
Rājaniti 330
Rājapatni 108, 334, 463
rājaputra 76, 409
Rājarāja 92, 97

Rãjasa 230, 298, 424, 425, 426, 430
Rãjasawangsa 116, 298, 424
Rãjawacana 330, 331
Rãjasawarddhana 472
Rãjendracoladewa 92, 93, 97
Rakai Garung 147, 148, 151
Rakai Gurunwangi Dyah Rãnu 176
Rakai Gurunwangi Dyah Saladu 159, 164, 166
Rakai Kayuwangi 152, 156, 157, 159, 164, 165, 166, 167, 177, 186, 221, 230, 241, 242, 245
Rakryan Landayan 165, 166, 183
Rakai Layang Dyah Tlodhong 178, 179, 180, 182, 183, 185, 227, 242
Rakryãn Manak 165
Rakai Panangkaran 87, 115, 116, 118, 123, 124, 131, 138, 140, 146, 149, 150, 151, 156, 157, 164
Rakai Pangkaja Dyah Tumambong 176, 207, 243
Rakai Panunggalan 148, 149, 150, 151
Rakai Patapãn pu Manuku 146
Rakai Patapãn pu Pãlar 146, 147, 150, 151, 152, 158
Rakai Pikatan 88, 118, 147, 148, 151, 156, 157, 159, 163, 164, 166, 167, 173, 177, 221, 241
Rakyan Sañjiwana 172, 173
Rakai Weka pu Catura 167
Rakai Walaing pu Kumbhayoni 159, 161, 162, 163, 164
Rakai Wwatan pu Tammer 172
Rãmãyana 9, 48, 213, 227, 270, 271, 273, 277, 455, 456, 458
Ranggawuni 430
Rami 90
Ratu Bako 88, 139, 140, 159, 164
Ratu dewata 395, 405
Ratu Saksi 396, 400
Rãvanavadha 271
Rui de Brito 477

S

Sadeng 461
Sailendrawangsa 113, 116, 150
Sailendrawangsatilaka 87
Saiwa siddhãnta 30, 367
Sakalendukirana 329, 330, 331, 337
Samarãgravira 87
Samarotsaha 281, 285
Samaratungga 88, 143, 145, 146, 148, 151, 156, 157, 159, 173
Samarawijaya 212, 283, 284, 286
Sampula 116
Samya haji 211, 293, 295, 302
San-fo-tsi 89, 93, 94, 101, 102
Sãnggramawijayottunggawarman 93, 110
Sanghyang Tapak 385, 386, 387
Sang lumãh i Air-madatu 369
Sang lumãh i Bwah-rangga 369
Sañjaya 115, 122, 123, 129, 131, 133, 135, 149, 150, 175, 225, 229, 382, 383, 384, 388
Sañjayawangsa 150, 159
Sañjayawarsa 175

Sanna 129, 131, 133, 135, 138, 229, 382
Santanu 116
Sarwarimadawimathana 86
Sarwweswara 332
Sasangkajacihna 335
Sãstra 269
Saunggalah 384
selunding 363
Se-li-tieh-hwa 93, 110
Semi 458
Sena 382, 383
Senãpati 76, 316, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 357, 484
Senãpati Sarwwajala 290, 291, 301
Serat Darmagandul 478
Serat Kanda 285, 478, 479
Sewu, candi 124, 152
She-li-fo-she 102, 103
She-p'o 21, 22, 23, 89, 118, 119, 120, 122, 200, 225, 291, 296, 297, 307, 462
Shih-pi 442, 451, 453
Siksa Kanda ng Karesian 381, 396, 402, 403, 409, 410, 416
Sila Petak 460
Simping 467
Sinelir 430
Singhadwala 318, 320, 344
Singhamandawa 309, 310, 312, 313, 316, 320, 344
Singhasãri 7, 106, 111, 141, 228, 234, 303, 336, 339, 421, 424, 431, 436, 437, 443, 445, 447, 451, 461
Singhawarddhana 469, 474
Siwa-Bhairawa 440
Siwarãtrikalpa, kakawin 477
Smaradahana 303
Sojiwan, candi 173
Somawangsa 87, 88
Srãddha 463, 467, 473, 476
Sri Baduga Maharaja 390
Sribuza 90
Sri Isãnatunggawijaya 198, 273, 282, 323
Sri Gandra 332
Sri Girinãtha 423
Sri Kahulunan 153, 155, 156
Sri Kesari warmadewa 317, 318, 320, 324, 345
Sri Tarunajaya 337
Sri Subadrika Dharmadewi 316
Sri Wiswarupakumãra 439
Sriwijaya 5, 26, 48, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 110, 114, 141, 151, 159, 199, 200, 212, 230, 289, 291, 296, 323, 355, 402
Sri Wijaya Mahãdewi 323, 324, 329, 364
Srengga 293
Stupa 157
Stupika 364, 371
Sukha duhka 256, 259, 268
Sukhalila 460
Su-ki-tan 296
Sumanasãntaka 303

Suma Oriental 474
Sumpah Palapa 462
Sunan Gunung Jati 395
Sunda 94, 379, 381, 382, 384, 385, 388, 391, 392, 394, 395, 396, 464
Sun-la 381, 401
Sundãyana, kidung 402, 481
Surãdipa 330, 331, 341
Surawisesa 393, 395, 396, 397, 398, 400, 405, 408
Surya, dewa 63, 64, 227, 366
suwarna 174, 181, 209, 217, 255
Suvarnnabhumi 9, 12, 65, 106
Suwarnnadwipa 9, 10, 11, 90, 92, 97
Swarajambhu 258

T

Tabanendra 321, 364
talaka 316, 376
Tamgara 403
Tampaksiring 309, 318, 321, 322, 325, 327, 340, 364, 371
Tamwlang 184, 185, 186
Tañca 460
Tanjung-wu-lo 296
Tantra Subhuti 441
Tapasi 440
Tarã 87, 88, 151, 337
Tãruma (nãgara) 5, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 78, 79, 379, 409
Tarusbawa 383
ta-tso-kan-hiung 120, 122, 225
Tatwa Wyawahãra 265
Ta-shih 120, 122
Tegal Lalateng 422
Terik/Trik 451
thãnibala 215, 436
Tohaan di Majaya 396, 400
Tohjaya 427, 429
To-lang-Po-hwang 101
To-lo-mo 54, 55, 56
Tomé Pires 379, 394, 397, 401, 403, 404, 419, 474
Tondowongso 299, 300, 301, 302, 303
To-p'o-teng 119, 305, 307
Tribhuwanotunggadewi 106, 454, 463, 467, 474
Tuhan Janaka 455
Tu-ma-pan 470
Tumapel 297, 421, 422, 423, 424, 427, 429, 431, 448, 449
Tumasik 462
Tunggul Ametung 421, 422, 426, 427, 431
Tu-ping-tsu 451
Turukbali 443

U

Udayãdityawarman 108
Udãyana 199, 323, 324, 325, 326, 343, 345, 346, 348, 352, 362, 365
Udayana II 323
Ugrasenã 313, 315, 316, 320, 321, 343, 345, 364

undahagi 247, 316
unur 56, 58
upapatti 268, 269, 484
Usana Bali 333
Uttara-widdhi-balawan 330, 331
Uttejana 125

V

Vespasianus, Kaisar 16
Vimalasri 89
vratyastoma 31,43

W

Waisya, hipotesis 28
Walaing 121, 161, 162
Wālaprabhu 329, 337
Waleri 433
Wandami 350
wangsa Girindra 472, 477
wangsa Isāna 185, 197
wangsa Rājasa 228, 230, 421
wangsa Sailendra 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 131, 136, 141, 143, 145, 148, 150, 151, 153, 158, 159, 184, 185, 270, 273
wangsa Sañjaya 115, 158, 294
wangsa Warmmadewa 317, 324
wanua 72, 214, 220, 226, 352
Waprakeswara 28, 40, 46
wargga kilalan 220, 254, 278, 291
Waringin Sapta 220, 476
Wasan, candi 340, 342, 371
watak 219, 221, 225, 239, 240, 243, 248, 249, 251, 254, 259, 269
Wengker 385, 472
Wikramawaddhana 469
Wirajāyendra 93
Wirātaparwa 275
Wisnu, dewa 63, 86, 129, 136, 146, 185, 197, 203, 295, 302, 331, 365, 366, 367, 409
Wisnubhāwana 422, 425
Wisnuwarddhana 336, 425, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436
Wurara 279, 285, 441
Wurawari 201

Y

Yāwadwipa 9, 12, 47, 48
Yeh-p'o-t'i 21, 55, 64
Ye-tiao 47
Yoh-na-p'o-to-lo 121
yumu pakatahu 309
yupa 35, 36, 37, 40, 46, 47
yuwarāja 432, 480

Z

Zābag, raja 89, 90

2. Prasasti

A

Abhayagiriwihara 113
Angin 290
Añjukladang 185, 186, 195, 244
Añtakunjarapada 374
Air Hawang 184
Air Kali 184
Ayam Teas 176

B

Bangli 333, 336
Balingawan 155, 232
Bañjaran 282, 285, 302
Baru 216
Basangãra 336
Baturan 326
Batutulis 390, 391, 393, 401, 405, 408
Bayung-Bunar-Srimukha 350
Belanjong 308, 317, 318, 320
Besan 331
Bila 327, 350, 353, 372
Biri 294
Balambangan 459, 460
Balitar I 459
Boom Baru 80
Bukit Cintamani 359, 367, 374
Bukit Seguntang 34, 35, 68, 80, 82
Bungkuk 79
Buwunan 320, 367
Buyan-Anggas-Taryungan 353
Buyan-Sanding-Tamblingan 358, 360
Bwah 348, 354, 369
Bwahan 326, 327, 374

C

Cane 211, 212
Canggal 12, 136, 225, 228, 382, 383
Ceker 292
Ciaruteun 48, 51, 63
Cidanghiang 54
Cunggrang 186, 192, 195

D

Dinojo 124, 125, 232

E

Er Tabar 330

G

Geweg 192
Galunggung 294
Gondosuli 78, 146, 151, 152, 254
Gulung-gulung 244
Guntur 174, 259, 260, 262
Gunung Penanggungan 335

H

Hampran 122, 123, 135, 136
Hantang 288
Harahara 270
Hariñjing C 179, 183
Horren 388
Hujung Langit 200
Huludayeuh 380, 381
Humanding 243

J

Jambu (Pasir Koleangkak) 63
Jaring 290, 301, 332
Jiwu I 474, 475
Jiwu III 475
Jeru-Jeru 244
Julah 361
Jurungan 236, 243, 248

K

Kandangan 176, 424
Kahyunan 290
Kalasan 87, 113, 115, 140, 157, 230, 337
Kamalagyan 187, 210, 211, 212, 219, 254
Kambang Putih 281, 285
Kambang Sri B 281, 285
Kãmulan 153, 155
Karangbrahi 79
Karangtengah 87
Kasugihan 148, 236
Kawali 389, 390, 391
Kawambang Kulwan 196
Kayumwungan 87, 113, 150, 153
Kebantenan 390, 391, 393, 401, 405
Kebon Kopi 62, 381
Kedukan Bukit 70, 71, 72, 73, 74, 80
Kelurak 115, 136, 138, 140, 141, 143, 157
Kinawe 184
Kinewu 216
Kota Kapur 48, 75, 76, 77, 78, 79
Kubu-kubu 175, 232
Kudadu 445, 448, 450
Kuk Prah Kot 114
Kurungan 270
Kusmala 424, 425
Kuti 171

L

Latengan 330
Lawadan 294
Leiden 98, 113
Ligor A 86, 141
Ligor B 86, 113, 136, 141, 146
Limus (Sugihmanek) 186
Linggasutan 187
Lintakan 179, 180, 241
Lucem 196

Luitan 173
Lutungan 346, 349, 356, 360, 361, 369

M

Mañjusrigrha 106
Malenga 281, 285
Malatgede 318, 336
Manduwunga 412
Mantyāsih 131, 148, 149, 150, 153, 155, 167, 169, 175, 176, 183
Maribong (Trawulan II) 425
Muara Cianten 53
Mula-Malurung 424, 425, 429, 431, 435
Muñcang 189
Munduan 146, 148
Munggu Antan 166, 167, 176, 177

N

Nālanda 97, 98, 113, 337

P

Padlegan 286, 287
Padlegan II 290
Palah 293, 294
Palas Pasemah 79
Palepangan 173, 174
Pamintihan 472, 477
Pamwwatan 211, 285
Pancanigayan 315, 365, 369
Pandan 212
Panggumulan 176, 236, 240, 241, 243, 253, 270
Panunggalan 167
Paradah 185, 244
Parung 269
Pasir Awi 53
Patapan Langgaran 338
Penempahan 318, 319
Poh 171, 176, 236, 241, 243, 245
Poh Dulur 167
Poh Galuh (Erkuawing) 178, 179
Pucangan 185, 187, 197, 198, 201, 203, 204, 211, 326

R

Rabwan 176
Rakryan Juru Pangambat 381
Ratu Baka 87, 113, 157
Rukam 172, 22

S

Sabhaya 362, 366
Sambhulingga 161, 163
Sangguran 45, 155, 232
Sangkhara 117, 118, 122, 136, 156
Sanghyang Tapak 384, 387, 404
Sangsang 176
Sapu Angin 292

Silet 282
Sirahketing 212, 294, 295
Siwagrha 151, 157, 158, 159, 163, 272
Sojomerto 5, 116, 117, 118, 164
Songan-Tambahan 326, 327
Sukhamrta 450, 481
Sukhapura 349
Sugih Manek (Limus) 178, 232
Sumbut 193

T

Taji Gunung 175
Talan 288, 290
Talangtuo 74
Tañjore 93, 108, 110
Tejakula 358
Telaga Batu 74, 75, 80, 82, 230
Telahap 168
Telang 155, 171, 176
Terep 176, 207
Tija 262, 269
Timbanan Wungkal 175
Tri Tpusan 153
Tryamwakalingga 161, 162
Tugu 52, 54, 60, 62
Tuk Mas 128
Tulang Air 146, 147, 157, 241, 337
Turuñan A 312
Turun Hyang A 211, 281
Turun Hyang B 281, 282, 284
Turyyãn 185, 186, 191

W

Waharu IV 193
Wanua Tengah 148, 149, 152, 164,
Watukura 168, 171, 251
Wintang Mas A 167, 177
Wintang Mas B 167, 183
Wuatan Tiga 183
Wulakan 166, 179
Wulig 191
Wurudu Kidul 181, 182, 259, 260
Wurutunggal 270

III. Nama Sarjana

A

Abu Ridho 74
Ayatrohaedi 415

B

van Bemmelen, R.W. 184
Berg, C.C. 187, 213, 280, 281
Berkhout, L.M. 79

Boechari 73, 74, 78, 79, 85, 123, 175, 258

Boeles, J.J. 101

Bosch P.D.K. 27, 29, 32, 35, 85, 115, 323, 324

Brandes, J.L.A. 50, 188, 196

Bronson, B. 85

C

de Casparis, J.G. 73, 74, 76, 79, 88, 114, 115, 136, 143, 147, 151, 155, 156, 157, 158, 169, 170, 188, 230, 232

Coedès, G. 16, 18, 74, 76, 84, 85, 110, 114, 143, 144, 153

D

Damais, L-C. 79, 121, 124, 152, 200, 292, 323, 325, 329, 336, 337, 338

F

Ferrand, G. 47, 48, 101

G

Groeneveldt, W.P. 20

Goris, R. 323, 325, 329, 335, 336, 337, 338, 344, 350, 367, 369, 376

Gosh, M. 271

H

Heger, F. 7

von Heine Geldern, R. 222, 371

Hooykaas, C. 271

I

Ijzerman, J.W. 164

J

Jonker, H.H. 260

K

Kern, H. 8, 36, 204

Krom, N.J. 27, 28, 46, 72, 73, 79, 281, 475, 476

L

van, Leur J.C. 8, 16, 23, 27, 29

Levi, Sylvain 9, 10, 48

M

Majumdar, R.C. 85, 114

Moens, J.L. 73, 85, 101, 103, 114, 323

N

van Naerssen, F.H. 115

Nilakantasastri, K.A. 85, 114

Noerhadi Magetsari 273

O

Obdeyn, V. 67, 82, 102

Orsoy de Flines, E.W. 207

P

Poerbatjaraka 52, 73, 85, 115, 116, 118, 127, 133, 145, 186, 270, 272, 276

Przyluski 114

Q

Quaritch Wales, H.G. 85

R

Raffles, Th. S. 371

Rajani, Chan Chirayu 76, 86

Ressink Th. A. 195

Rockhill, W.W. 462

Ronkel. Ph. S. 72

S

Santiko, Hariani 46

Sartono 67

Sharkar, H.B. 271

Schrieke, B. 201, 228, 298

Slametmuljana, R.B. 85, 103

Sukarto K. Atmojo 331

Sukmono, R. 67, 76, 85, 103, 303

van Stein Callenfels, P.V. 78, 323

Stutterheim, W.F. 186, 208, 273, 325, 326, 327, 338, 388

W

Wolters, O.W. 8, 18, 21, 24, 25, 67, 85, 99, 101

Wheatley, P. 10, 110
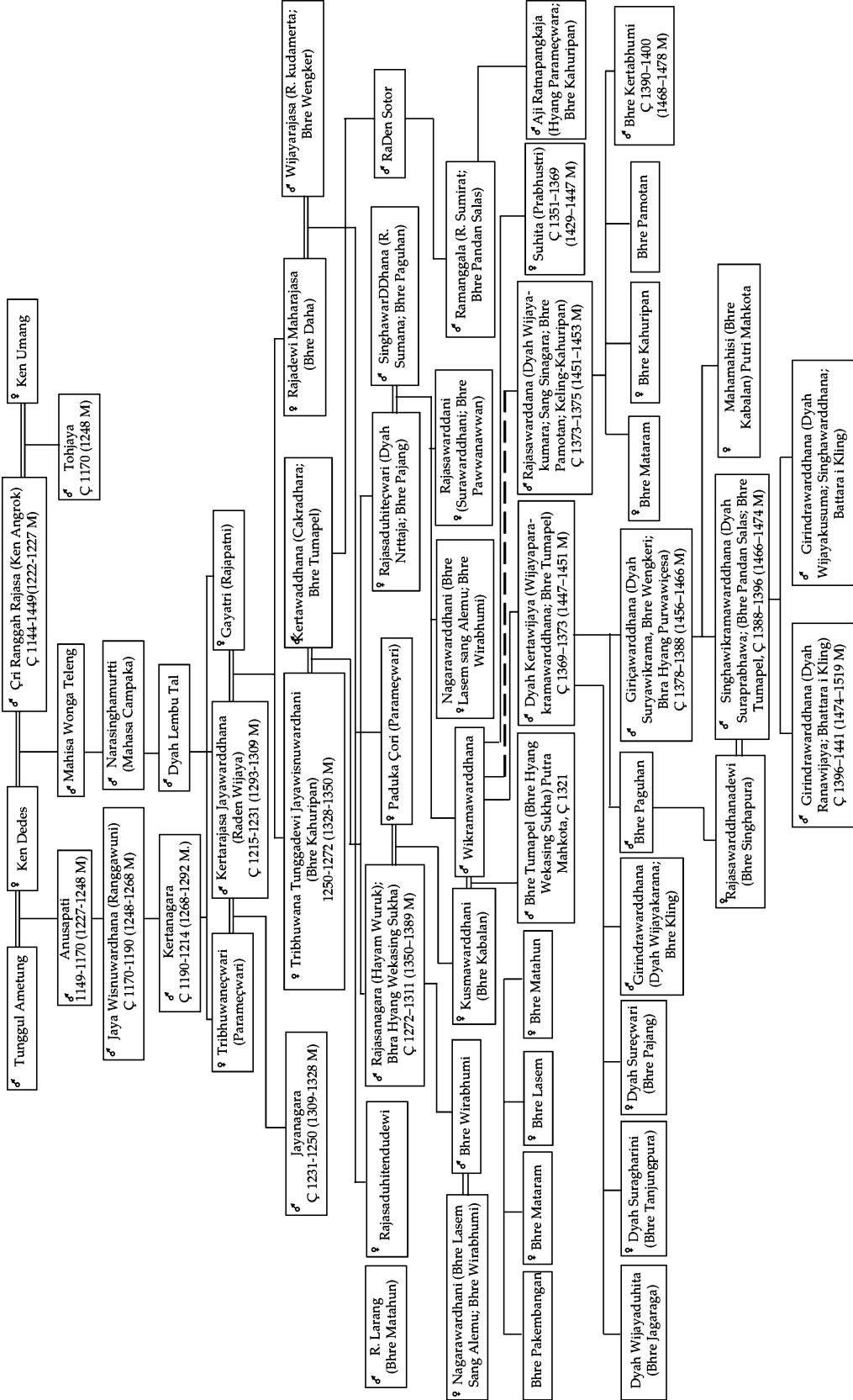
Y

Yamin, Muh. 371

Z

Zoetmulder, P.J. 270, 272

Geneologi Girindrawança (Rajasawança)
Dinasti Raja-Raja Singhasari-Majapahit

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Edisi Pemutakhiran ini terbit dalam cetakan ketujuh. Sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975, buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir tiga puluh tiga tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dari SNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri, ilmuwan/wati Indonesia yang sebagian besar masih hidup.

Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak enam jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo.

Buku SNI telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai "buku standar" sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat.

Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI, Balai Pustaka berhasil memutakhirkan isi buku SNI. Kepada para penulis buku SNI, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini dan kepada yang telah meninggal, Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka.

Dengan ini, SNI Edisi Pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga SNI Edisi Pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia.

Buku ini telah dinilai oleh Panitia Penialaian Buku Nonteks Pelajaran (PPBNP) dan dinyatakan layak sebagai buku nonteks pelajaran (buku pengayaan, buku referensi, dan/atau buku panduan pendidik) berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Depdiknas Nomor: 3610/A8/LL/2009, Tahun 2009, Tanggal 21 Desember, dengan kategori*

Penerbitan dan Percetakan
PT Balai Pustaka
Jalan Bunga No. 8 – 8A Matraman
Jakarta 13140
Telepon : (+6221) 8583369
Faks : (+6221) 29622129
Http : //www.balaipustaka.co.id

ISBN: 979-407-408-X